

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023







BUPATI SIJUNJUNG

PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjunh Tahun 2023 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- (3) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan;
- b. pedoman dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023; dan
- c. pedoman bagi stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I: PENDAHULUAN;
 - b. BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
 - g. BAB VII: PENUTUP.
- (2) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal, 4 Juli 2022
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MISWITA MR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	хi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	1-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen	1-8
1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024	I-9
1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	I-10
1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026	I-11
1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 20211-2031	I-11
1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023	I-12
1.4. Maksud dan Tujuan	I-12
1.5. Sistematika Penyusunan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Letak Geografi dan Batas Administrasi Wilayah	II-1
2.1.1.2. Topografi	II-2
2.1.1.3. Klimatologi	II-3
2.1.1.4. Geologi	II-4
2.1.1.5. Hidrologi	II-4
2.1.1.6. Jenis Tanah	II-5
2.1.1.7. Kawasan Hutan	II-6
2.1.1.8. Potensi Pegembangan Ekonomi Wilayah	II-7
2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana	II-11 II-19

	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
	2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-20
	2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial	II-37
	2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-39
	2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-39
	2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-50
	2.1.3.3. Urusan Pilihan	II-66
	2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.	II-70
	2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-70
	2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-74
	2.1.3.7. Unsur Kewilayahan	II-74
	2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum	II-75
	2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-75
	2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah	II-75
	2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-79
	2.1.4.3. Iklim Investasi	II-78
	2.1.4.4. Sumber Daya Manusia	II-81
	2.1.4.5. Tata Kelola Pemerintahan	II-82
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021	II-83
	2.2.1. Realisasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	II-83
	2.2.2. Hambatan PelaksanaanKinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	II-91
	2.2.3. Upaya-Upaya Perbaikan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	II-92
	2.2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021	II-92
	2.2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	II-96
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-99
	3.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah	II-99
	3.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah	II-101
	2.3.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-102
	2.3.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-03
	2.3.2.3. Urusan Pilihan	II-107
	2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-108
		II-108
	2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 2.3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan	
	Pemerintahan	
2.4	Penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	II-109

	ERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN AERAH	III-5
3.1	Kerangka Ekonomi Daerah 3.1.1. Perkembangan Perekonomian Dunia 3.1.2. Perekembangan Perekonomian Nasional	III-1 III-1 III-2
	3.1.2.1. Outlook Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2022 Pertumbuhan Ekonomi	III-5
	3.1.2.2. Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-8
	3.1.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-8
	3.1.3. Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	III-9
	3.13.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Sumatera Barat	III-10
	3.13.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat	III-13
	3.1.4. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sijunjung	III-13
	3.1.4.1. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Sijunjung	III-22
	3.1.4.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sijunjung	III-25
3.2	Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.2. Arah Kebijkan Belanja Daerah 3.2.3. Arah kebijakan Pembiayaan Daerah	III-25 III-26 III-28 III-31
BAB IV SA	SARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1.	Sasaran Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Tema, Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV-2
	4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional	IV-2 IV-5
	4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional 4.1.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasiona	IV-5 IV-5
	4.1.2. Tujuan, Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-8
	4.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-8
	4.1.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-11
	4.1.3. Tema, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung	IV-18
	4.1.3.1. Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung	IV-18
	4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung	IV-20
4.2.	Prioritas Pembangunan	IV-27
	4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional	IV-27
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-31

Kabupaten Sijunjung	IV-35
4.2.3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten	IV-35
Sijunjung 4.2.3.2. Program Unggulan Kabupaten Sijunjung	IV-38
4.2.3.3. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap RKP Tahun 2023	IV-59
4.2.3.4. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan Sebagai Fokus RKP Tahun 2023	IV-95
4.2.3.5. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-119
4.3 Inovasi Daerah	IV-128
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama 6.2. Indikator Kinerja Daerah	VI-1 V-2
BAB VII PENUTUP	VII-1

LAMPIRAN I

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sesuai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

LAMPIRAN II

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sesuai Penerapan Stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

LAMPIRAN III

Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

LAMPIRAN IV

Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kesesuaian Prioritas Nasional dengan RKPD Kabupaten Sijunjung	I-9	
Tabel 1.2	Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	I-10	
Tabel 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	II-2	
Tabel 2.2	Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-3	
Tabel 2.3	Jenis Batuan di Kabupaten Sijunjung	II-4	
Tabel 2.4	Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten	II-6	
Tabel 2.5	Kontribusi Ekonomi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-8	
Tabel 2.6	Sebaran Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan	II-11	
Tabel 2.7	Kasus bencana Alam di kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-14	
Tabel 2.8	Jumlah Nagari yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Sijunjung, 2019-2021	II-14	
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 Per Kecamatan Tahun 20217-2021 Jiwa)	II-17	
Tabel 2.10	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-17	
	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-18	
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021	II-19	
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto II- Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 (Persen)		
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)	II-22	
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (juta) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-23	
Tabel 2.16		II-24	
Tabel 2.17	PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2017-2021 (Persen)	II-24	
Tabel 2.18	Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021	II-26	
Tabel 2.19	Indek Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/Kota Tahun 2017- 2021	II-30	

Tabel 2.20	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-30
Tabel 2.21	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional (Ribu Jiwa) Tahun 2016-2021	II-32
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk (Jiwa) Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2017-2021	II-34
Tabel 2.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Kab/kota Tahun 2017-2021	II-35
Tabel 2.24	Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 (Orang)	II-36
Tabel 2.26	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-36
Tabel 2.27	Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Sijunjung (SJJ), Provinsi Sumatera Barat (SBR) Dan Nasional (NAS)	II-38
Tabel 2.28	Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.29	Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.30	Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.31	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.32	Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2020.	II-49
Tabel 2.33	Perkembangan Urusan Ketemtraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2015 – 2019	II-49
Tabel 2.34	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.35	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-51
Tabel 2.36	Perkembangan Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-52
Tabel 2.37	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.38	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.39	Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-54
Tabel 2.40	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-55

Tabel 2.41	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021	11-56
Tabel 2.42	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.43	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.44	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021	II-58
Tabel 2.45	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021	II-59
Tabel 2.46	Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.47	Perkembangan Indikator Lama Proses Perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-60
Tabel 2.48	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olah RagaKabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.49	Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 201-20217	II-63
Tabel 2.50	Perkembangan Indikator Urusan Persandian Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-63
Tabel 2.51	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.52	Perkembangan Kinerja Pembangunan Urusan pPerpustakaan Kabupaten Sijunjung 2017-2021	II-65
Tabel 2.53	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.54	Perkembangan Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.55	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.56	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pilihan Pertanian di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-68
Tabel 2.57	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perdagangan di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.58	Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Perindustrian di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.59	Perkembanga Indikator Kinerja Urusan Transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, Tahun 2017-2021	II-70
Tabel 2.60	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.61	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2017-2021	II-71
Tabel 2.62	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.63	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2017-2021	II-72

Tabel 2.64	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.65	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.66	Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2017-2021	II-74
Tabel 2.67	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung	II-76
	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-78
Tabel 2.69	Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kerusakan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-80
Tabel 2.70	Perkembangan Persentas Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.71	Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.72	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-82
Tabel 2.73	Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021	II-83
Tabel 2.74	Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021 Menurut Urusan Pemerintahan	II-84
Tabel 2.75	Faktor Hambatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2021	II-91
Tabel 2.76	Jenis Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung	II-93
Tabel 2.77	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-93
Tabel 2.78	Capaian Indikator Kierja Utama Permerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-96
	Capaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-98
	Prioritas dan Permasalahan Pembangunan Daerah	II-99
Tabel 2.81	Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023	II-101
Tabel 3.1	Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	III-8
Tabel 3.2	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	III-12
Tabel 3.3	Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021	III-17
Tabel 3.4	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	III-24
Tabel 3.5	Struktur Pendapatan Pada APBD Tahun 2023	III-25
Tabel 3.6	Struktur Belanja Daerah pada APBD	III-26
Tabel 3.7	Realisasi Tahun 2020, 2021, Outlook Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	III-27
Tabel 3.8	Realisasi Tahun 2020, 2021, Outlook Tahun 2022, Target Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Belanja Kabupaten Sijunjung Tahun 2024	III-30

Tabel 4.1.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	IV-8
Tabel 4.2.	Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.3.	Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan di Kawasan Perbatasan dengan Provinsi Tetangga	IV-18
Tabel 4.4.	Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan Tema RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	IV-19
Tabel 4.5.	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung	IV-20
Tabel 4.6.	Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	IV-21
Tabel 4.7.	Keselarasan Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023	IV-26
Tabel 4.8.	Keselarasan Aegenda/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-32
Tabel 4.9.	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	IV-35
Tabel 4.10.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	IV-36
Tabel 4.11.	Target Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Program Unggulan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	IV-38
Tabel 4.12.	Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Prioritas dan Program Prioritas RKP Tahun 2023	IV-59
Tabel 4.13.	Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan Sebagai Fokus RKP Tahun 2023	IV-96
Tabel 4.14.	Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-120
Tabel 4.15.	Penerapan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	IV-129
Tabel 5.1	Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Sijunjung	V-4
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan Tahun 2024	VI-1
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Tahun 2022 dan 2023	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tema, Agenda dan Program Unggulan Pembangunan Daerah Tahun 2023	I-3		
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)			
Gambar 1.3	Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023			
Gambar 1.4	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	I-9		
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	II-1		
Gambar 2.2	Pola Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021			
Gambar 2.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021			
Gambar 2.4	Petemuan Tiga Sungai (Batang Ombilin, Sukam dan Batang Kuantan	II-13		
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017–2021 (Jiwa)	II-18		
Gambar 2.6	Angakatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasa	II-18		
Gambar 2.7				
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siunjung, Provinsi II-dan Nasiona Tahun 2017-2021			
Gambar 2.9	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut II- Kelompok Makanan dan Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021			
Gambar 2.10	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat II dan Nasional Tahun 2017-2021			
Gambar 2.11	Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-27		
Gambar 2.12	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2021	II-27		
Gambar 2.13	Perkembangan Inflasi di Bukittinggi Tahun 2017-2021	II-28		
Gambar 2.14	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-29		
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk Miskin danTingkat Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-30		
Gambar 2.16	Tingkat Kemikinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-32		
Gambar 2.17	Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-33		

Gambar 2.18	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021	II-35
Gambar 2.19	Perkembangan dan Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021	II-37
Gambar 2.20	Persentas Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Non-Makanan dan Makanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	II-77
Gambar 3.1	Persentas Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Non-Makanan dan Makanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	III-15
Gambar 3.2	Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	III-16
Gambar 3.3	Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2021	III-18
Gambar 3.4	Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Sijunjung (SJJ), Provinsi Sumatera Barat (SBR) Dan Nasional (NAS) Tahun 2020-2021	III-22
Gambar 4.1	Tarnsformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	IV-3
Gambar 4.2	Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi yang Inklusif dan Bekelanjutan	IV-4
Gambar 4.3	Indikator Sasaran dan Target Nasional	IV-5
Gambar 4.4	Tema dan Arah kebijakan Nasional	IV-5
Gambar 4.5	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional	IV-6
Gambar 4.6	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2021	IV-16
Gambar 4.7	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	IV-19
Gambar 4.8	Tema, Agenda Program Unggulan Daerah Tahun 2023	IV-19
	Program Prioritas Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2023	
Gambar 4.10	Program Prioritas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun 2023	IV-28
Gambar 4.11	Program Prioritas Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun 2023	IV-29
Gambar 4.12	Program Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2023	IV-29
Gambar 4.13	Program Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar Tahun 2023	IV-30
Gambar 4.14	Program Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim Tahun 2023	IV-30
Gambar 4.15	Program Prioritas Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik Tahun 2023	IV-31
Gambar 4.16	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	IV-32



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Supaya pembangunan tersebut mencapai hasil yang diinginkan diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang matang dan terpadu, mencakup semua aspek yang terkait dengan perencanaan itu sendiri.

Perencanaan pembangunan daerah menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder).

Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Sehubungan dengan amanat tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung menyusun RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, yang dalam penyusunannya telah mempertimbangkan Visi Misi dan Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Secara umum, dokumen RKPD Tahun 2023 mempunyai nilai penting, antara lain:

- 1 Merupakan instrumen pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021–2026.
- 2 Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023

- 3 Menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
- 4 Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada RKPD Tahun 2023.

Berdasarkan Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 yakni "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini didasari dari potensi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar (middle income trap) mengingat Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Tahun 2023 merupakan tahun kunci meletakkan kembali landasan untuk middle income *trap* dengan menitikberatkan mengurangi pelaksanaan transformasi ekonomi dengan cara ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, tahun 2023 juga diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai lepas dari tekanan pandemi Covid-19. Berapa program strategis dalam pemulihan ekonomi ditambah dengan upaya vaksinasi akan berjalan maksimal, sehingga tahun 2023 juga menjadi tahun kunci untuk pemulian ekonomi. Sehingga secara mendasar ada 2 (dua) tema besar yang akan diusung pada tahun 2023 yakni transformasi ekonomi secara struktural dan pemantapan pemulihan ekonomi untuk mulai bangkit keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar.

Sesuai dengan RKP Tahun 2023, maka tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 "Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi", sehingga pada tahun 2023 ini beberapa program strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi antara lain membuka aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dan juga pada objek wisata, dukungan terhadap UMKM dan pelaku inditustri kecil dan menengah, tracking dan pengendalian pandemi Covid, peningkatan sarana dan prasana kesehatan terutama terutama untuk kebutuhan laboratorium dengan meningkatkan kapasitas sampel yang diuji, serta peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Rujukan penanganan pasien Covid, penguatan kapasitas sarana dan prasarana serta dukungan operasional isolasi pasien covid, sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru kepada masyarakat secara intens serta dukungan terhadap program vaksinasi kepada masyarakat.

Akibat pandemi *Covid-19* pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung mengalami kontraksi mencapai -1,10 pesen pada tahun 2020. Pengendalian Pandemi *Covid-19* yang cukup berhasil di Indonesia temasuk di kabupaten Sijunjung dan ditambah dengan program-program percepatan pemulihan ekonomi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung mencapai 3,15 persen pada tahun 2021. Pandemi *Covid-19* harus tetap dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan maka menjadi keharusan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk fokus pada tahun 2023 pada pengendalian Pndemi *Covid-19* dan peningakatan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan tema RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Barat untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan seakaligus untuk pemuliahn ekonomi akibat pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sijunjung, maka tema RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 yaitu "*Peningkatan Kualitas Daya*"

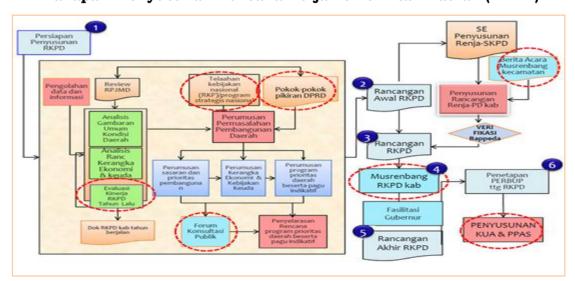
Saing Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas", maka untuk mewujudkan tema tersebut didukung dengan 4 (empat) agenda dan 17 (tujuh belas) program unggulan pembangunan daerah. Struktur agenda tersebut, dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1 Tema, Agenda dan Program Unggulan Pembangunan Daerah Tahun 2023



RKPD disusun melalui tahapan panjang yang terdiri dari persiapan penyusunan penyusunan rancangan awal (ranwal) RKPD, pelaksanaan penyusunan rancangan RKPD, musrenbang perumusan rancangan akhir (ranhir) RKPD, dan penetapan RKPD. Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Secara tahapan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)



Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD sebagaimana tergambarkan dalam Gambar 1.1 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Tahapan Persiapan mencakup:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD.
 - b. Orientasi RKPD
 - Orientasi RKPD, bertujuan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD
 Agenda kerja yang disusu dijadikan sebagai panduan kerja
 mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan
 peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang dokumen
 rencana pembangunan daerah
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- 2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD mencakup:
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan berita acara forum konsultasi publik.
 - c. Pengajuan rancangan awal RKPD kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh pesertaujuan untuk penyempurnaan bahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah
 - d. Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah Kepala Perangkat Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah yang berisikan :
 - Agenda penyusunan RKPD
 - Pelaksanaan forum perangkat daerah
 - Musrenbang RKPD
 - Batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda.
 - Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah
 - e. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan
 - Pembahasan, penilaian dan penentuan urutan prioritas rencana pembangunan yang berasal dari Daftar Usulan RKP Desa/Nagari. Proses pembahasan dilakukan secara terpadu dan obyektif bersama unsur-unsur terkait dari tingkat Desa/Nagari, Kecamatan dan Kabupaten.
 - Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Nagari yang diintegrasikan dengan rancangan Awal RKPD.
 - f. Forum Perangkat Daerah
 - Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan

kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja-PD

3. Penyusunan Rancangan RKPD.

- a. Penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, rancangan awal RKP program strategis nasional
- b. Pengajuan pesetujuan rancangan RKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten
- c. Penyampaian surat edaran Bupati tentang penyempurnaan Rancangan awal

4. Musrenbang RKPD Kabupaten

- a. Menyepakati Permasalahan pembangunan Daerah;
- b. Menyepakati Prioritas pembangunan Daerah;
- c. Program/kegiatan, pagu indikatif,indikator dan target kinerja serta lokasi kegiatan;
- d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi
- e. Klarifikasi program dan kegiatan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan desa/nagari yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

- a. penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten
- b. Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah
- c. Pembahasan rancangan akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- d. Penyusunan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Akhir RKPD dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah
- e. Penyampaian rancangan Perkada tentang RKPD kepada Gubernur Cq. Bappeda Provinsi untuk di fasilitasi
- f. Fasilitasi rancangan Perkada RKPD oleh Bapppeda Provinsi
- g. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD berdasarkan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh Bappeda

6. Penetapan.

- a. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- b. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Provinsi
- c. Penyampaian Perkada tentang RKPD kepada Gubernur Cq. Bappeda provinsi

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga Pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota,

kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Ketiga, pendekatan spasial, dilaksanakan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, seperti terlihat pada Gambar 1.3 berikut ini

Tematik Holistik Spasial Integratif Upava keterpaduan pelaksanaan perencanaan Penjabaran tematik program pembangunan program pembangunan Penjabaran program yang dilihat dari peran Penentuan tema-tema ke dalam perencanaan pembangunan dalam kementerian/ prioritas dalam suatu yang komprehensif satu kesatuan wilayah lembaga/daerah/ jangka waktu mulai dari hulu sampai dan keterkaitan pemangku kepentingan perencanaan ke hilir suatu rangkaian antarwilayah lainnya dan upaya kegiatan keterpaduan berbagai sumber pendanaan Ø =

Gambar 1.3 .
Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Sementara, sistematika RKPD meliputi Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Penutup.

Pendahuluan menjelaskan gambaran umum proses penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan berisikan informasi umum tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

Gambaran umum kondisi daerah antara lain memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD tahun 2023 serta permasalahan pembangunan daerah. Bagian ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi, status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah,

berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi mencakup:

- 1. Realisasi program atau kegiatan yang *tidak memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 2. Realisasi program atau kegiatan yang *telah memenuhi* target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 3. Realisasi program atau kegiatan yang *melebihi target* kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
- 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sumber pendanaan lain berasal dari peningkatan partisipasi masyarakat, yaitu kebijakan, program pemerintah daerah yang didanai APBD yang dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Untuk mengukur kinerja, dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 perlu ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan seperti Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

1.2 Dasar Hukum

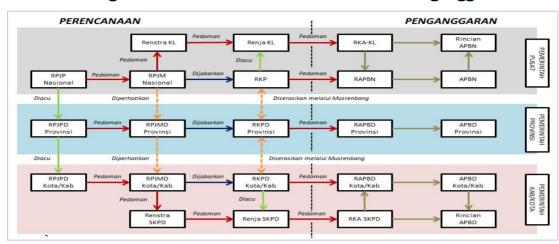
Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 9. Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025.
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2023 merupakan penjabaran taktis rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan jangka menengah (RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, sehingga

keberadaannya tidak dapat terpisahkan, seperti telihat pada Gambar 1.4 berikut ini.



Gambar 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 disusun dengan berpedoman kepada RKPD Provinsi Sumatera Barat, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Tahun 2023 serta RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Agar RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2020-2024. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional/dimensi pembangunan. Tujuh agenda RPJMN Tahun 2020-2024 yang harus diperhatikan dan diselaraskan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Kesesuaian Prioritas Nasional dengan RKPD Kabupaten Sijunjung

No	Prioritas Nasional Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan perikanan (Prioritas 3)
		Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah (Prioritas 5) Pengembangan pariwisata berba-sis
		kearifan lokal (Prioritas 4)
2		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar (Prioritas 6)

No	Prioritas Nasional Tahun 2020-2024	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan kualitas perlin-dungan dan kesejahteraan sosial (Prioritas 8) Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) (Priritas 9)				
5		Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar (Priritas 6)				
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
7		Peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik (Prioritas 10)				

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung 2023 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 diterjemahkan ke dalam kesesuaian antara prioritas Provinsi 2023. Prioritas provinsi tahun 2023 tidak sama persis dari sisi nomenklatur dengan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2023, namun secara substansi selaras antara provinsi dan daerah, hal tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023				
1.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perke-bunan, peternakan dan peri-kanan	Revitalisasi pertanian dengan berbaga sub sektornya terutama tanamar pangan, holtikultura, perkebunan dar perikanan (Prioritas 3)				
	Meningkatkan usaha perda- gangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital	Industri Kecil Menengah (Prioritas 5)				
	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepari- wisataan					
2	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasai (Prioritas 6)				

No	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023				
3	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	pendidikan berbasis karakter dar				
4	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berda- sarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Peningkatan kualitas perlindungan dar kesejahteraan sosial (Prioritas 8) Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK (Priritas 9)				
5	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasai (Priritas 6)				
6	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan					
7	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Peningkatan kualitas birokrasi dar pelayanan publik.				

1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, sub kegiatan serta target pembangunan tahun kedua RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan, sub kegiatan prioritas tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD untuk mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, Sasaran daerah dengan indikator dan target yang telah ditetapkan pada Tahun kedua RPJMD secara otomatis menjadi kinerja yang harus dicapai pada RKPD Tahun 2023.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 20211-2031

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 memperhatikan RTRW Kabupaten Sijunjung dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun untuk mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan secara terpadu.

Dalam menyusun RKPD juga perlu memperhatikan RTRW daerah kabupaten/kota tetangga, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan antar kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan Rancangan RKPD. Penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rancangan RKPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dengan pendekatan money follows program dan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 sebgai berikut:

- 1. Terwujudnya penjabaran tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi program prioritas pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
- 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan.
- 3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

- 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 5. Sebagai dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan Rancangan ABPD Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penyusunan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematikan penyusunan Dokumen RKPD sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, inovasi daerah, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah; Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, menguraikan kebijakan pembangunan provinsi, nasional yang diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan prioritas pembangunan tahun 2023.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

secara eksplisit mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

Bab ini memuat penutup dan kaidah pelaksanaan dari RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografi dan Batas Administrasi Wilayah

Kabupaten Sijunjung terletak di sebelah timur Provinsi Sumatera Barat, dengan ibu kota berada di Muaro Sijunjung. Muaro Sijunjung termasuk ke dalam Kecamatan Sijunjung. Sebagian besar penduduknya bersuku Minangkabau dengan falsafah adat, pola pikir, tatanan budaya, serta norma yang khas. Luas wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.169,03 km² atau 7,54 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat sebesar 42.012,89 km². Letak astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0°18′ 43″ Lintang Selatan sampai dengan 1°41′46″ Lintang Selatan dan dari 100°37′40″ Bujur Timur sampai dengan 101°30′52″ Bujur Timur.

Sedangkan batas administrasi Kabupaten Sijunjung sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dhamasraya; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Dhamasraya; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kota Sawahlunto. Wilayah administrasi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada peta administrasi Kabupaten Sijunjung pada Gambar 2.1 berikut

Kampar-Riau

PETA ADMINISTRASI
PROPINSI SUMATERA BARAT

PARA PROPINSI SUMATERA BARAT

NUMERINA BARATAN SINGNO - RAU

NUMERIN

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung

Sumber: RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 61 (enam puluh satu) Nagari dan 1 (satu) desa. Kecamatan Kamang Baru adalah kecamatan terluas dengan luas wilyah 837,8 km² atau 26,76 persen dari luas kabupaten, Kecamatan Sijunjung dengan luas wilayah 748 km² dan Kecamatan Sump. Kecamatan Kamang Baru dengan jumlah nagari 11 (sebelas) nagari. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kupitan dengan luas 82,01 km² atau 2,62 persen dari luas total Kabupaten. Rincian luas wilayah untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)	Persentase thd Luas Kab	Jumlah Nagari	Jumlah Jorong
1.	Kamang Baru	914,13	28,84	11	61
2.	Tanjung Gadang	516,52	16,29	9	41
3.	Sijunjung	562,79	17,75	9	56
4.	Lubuk Tarok	192,12	6,06	6	24
5.	IV Nagari	125,32	3,95	5	17
6.	Kupitan	69,81	2,20	3+1 desa	14
7.	Koto VII	136,41	4,30	7	36
8.	Sumpur Kudus	651,89	20,57	11	55
Jumlah		3.169,03	100	62	304

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.1.2. Topografi

Topografi Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian bukit barisan yang memanjang dari arah barat laut ke tenggara, dengan morfologi daerah dibagi 3 (tiga) bagian yaitu terjal pada bagian barat dan timur, dataran dibagian tengah dan perbukitan landai dibagian utara dan selatan.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), sebagian besar daerah Kabupaten Sijunjung berada pada ketinggian 500 sampai 1.000 meter, yaitu sebesar 80 persen. Sisanya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara umum, gambaran mengenai daerah yang memiliki luas paling besar di Kabupaten Sijunjung berada pada:

- a. Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 ha (0,86 persen) terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sijunjung.
- b. Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan 79.257 ha (25,32 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
- c. Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha (20,9 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII.
- d. Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15 persen) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII.
- e. Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91 persen) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII.

- f. Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 ha (8,78 persen) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamtan Koto VII,
- g. Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 ha (5,76 persen) tersebar pada seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan.
- h. Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 ha (3,29 persen) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung.
- Ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 ha (4,12 persen) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada Kecamatan Sumpur Kudus.

Berdasarkan kondisi topografi tersebut, potensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Sijunjung bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Untuk itu diharapkan pemanfaatan lahan agar dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan berdampak negatif untuk masa kini dan yang akan datang. Dataran tinggi di di Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera.

2.1.1.3. Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (global climate change) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem, ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Dapat kita lihat tabel 2.2 dibawah , bahwa suhu tertinggi pada tahun 2021 34,6 c yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Disamping itu untuk suhu terendahnya , yang tahun-tahun sebelumnya tetap , untuk tahun 2021 turun menjadi 19,4 c.

Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran ,tahun 2020 pada bulan Desember tetapi pada tahun 2021 terjadi pergeseran ke bulan Maret dengan curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan tahun -tahun sebelumnya 808,4 mm³. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Suhu terendah (C°)	21	21	21	21	19,4
2.	Suhu tertinggi (C°)	33	33	33	33	34,6
3.	Curah hujan terendah (mm³)	80	82	83	83	133,9
		Okt	Feb	Juli	Juli	Juli
4.	Curah hujan tertinggi (mm³)	412	540	569	569	808,4
		Jan	OKt	Des	Des	Mar

Sumber:BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.1.4. Geologi

Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga dipenuhi perbukitan dengan lembah yang curam. Sehingga Secara geologi Kabupaten Sijunjung memiliki 17 jenis batuan yang terdiri atas Batu Andesit, Batu Gamping, Batu Gamping, Batu Gamping, Batu Gamping, Batu Kuarsa, Batu Kuarsit, Batu Sabah Campur Batu Gamping, Batu Sabak Campur Kuarsa, Diabas Basal, Diorit Kuarsa, Filit Batu Sabak, Granit, Konglomerat, Kuarsa Porfir, Lempung dan Napal, Lempung Pasir, Napal Lempungan, Sepih dan Batu Gamping, dan Tuf Batu Apung. Secara rinciannya jenis batuan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Jenis Batuan di Kabupaten Sijunjung

	oems battan ai mabapaten oljunjung							
No	Jenis Batuan	Luas (Ha)	Persentase					
1	Batu Andesit	239,3	0,08					
2	Batu Gamping	74,3	0,02					
3	Batu Gamping Pasiran	190,7	0,06					
4	Batu Kuarsa	36.905	11,64					
5	Batu Kuarsit	61.280	19,33					
6	Batu Sabah Campur Batu Gamping	24.436	7,71					
7	Batu Sabak Campur Kuarsa	60.577	19,10					
8	Diabas Basal	1.061	0,33					
9	Diorit Kuarsa	446,3	0,14					
10	Filit Batu Sabak	837,5	0,26					
11	Granit	80.220	25,31					
12	Konglomerat	548,3	0,17					
13	Kuarsa Porfir	3.346	1,06					
14	Lempung dan Napal	34.662	10,93					
15	Lempung Pasir	3.485	1,10					
16	Napal Lempungan	7.874	2,48					
17	Sepih dan Batu Gamping	233,9	0,07					
	Jumlah	316.903,36	100					
~ 1	D 1 N E (0010 / DEDITIE 1 C''	m 1 00110						

Sumber: Perda No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi air permukaan di Kabupaten Sijunjung banyak dipengaruhi oleh curah hujan dan sistem sungai. Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Sijunjung bersifat perennial yang dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi, topografi, sifat tanah yang permiabel, dan akifer tebal, sehingga aliran dasar (base flow) yang berasal dari air tanah cukup tinggi. Aliran dasar ini mendukung aliran sungai pada saat kemarau. Di sekitar aliran sungai tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lainnya karena akan merusak aliran sungai.

Oleh karena itu, aktivitas usaha tersebut perlu dijaga daerah hulu sungai, sehingga diharapkan dapat mencegah dampak yang merusak pada daerah hilir. Pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Sijunjung pada umumnya berpola dendritik atau berbentuk bulu burung, dimana anakanak sungainya mengalir pada lembah perbukitan yang berasal daerah tetangga menuju Batang Kuantan. Sungai-sungai utama di Kabupaten Sijunjung meliputi, Batang Ombilin, Batang Sinamar, Batang Palangki dan Batang Sukam.

2.1.1.6. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis yang tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah:

a. Jenis Tanah Alluvial

Tanah Aluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tampa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempuyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah ± 443 Ha (0,15 persen) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru.

b. Jenis Tanah Andosol

Tanah Andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau *hidroxida* besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memilki Ph antara 4,5-6. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 Hektar (6,82 persen) dari luas wilayah Kabupaten.

c. Jenis Tanah Glei Humus

Tanah Glei Humus adalah jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung bahan organik lebih dari 3 persen sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral, tingkat kesuburannya sedang dengan derajad kejenuhan basa lebih dari 60 persen Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555 Ha(14,55 persen) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru.

d. Jenis tanah Kambisol

Tanah Kambisol merupakan jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481 (45,45 persen). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang.

e. Jenis Tanah Latosol

Tanah Latosol, jenis tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 Ha (7,38 persen) dari luas wilayah Kabupaten.

f. Jenis Tanah podsolik

Tanah Podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 persen, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi.

Sementara itu, produktivitas tanah yang rendah sampai sedang ternyata mengalami pertumbuhan dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Sedangkan tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ± 77.125 Ha (24,64persen) dari seluruh luas tanah yang ada. Kondisi tanah seperti ini hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

2.1.1.7. Kawasan Hutan

Pembangunan berkembang dengan pesat dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, maupun bagi kelestarian alam. Mengingat pentingnya kelestarian alam bagi makhluk hidup, maka diambil langkah-langkah perlindungan hutan dan pelestarian alam, diantaranya dengan menetapkan kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi dan hutan produksi konversi di Kabupaten Sijunjung.

Luas kawasan hutan di Kabupaten Sijunjung dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 dan tata batas sampai dengan Tahun 2011, luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung adalah ± 204.018 ha, berdasarkan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 luas kawasan hutan Kabupaten Sijunjung adalah 184.604 Ha. Pada tahun 2016 perkembangan kawasan hutan setelah keluarnya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 424/MenLHK /Setjen/PLA.2/6/2016 tangal 7 Juni 2016 menjadi 179.761 ha atau 57,42 persen dari luas kabupaten, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten

	Perbandingan Luas Kawasan Hutan dengan Luas Kabupaten								
No	Kawasan Hutan	Kawasan Hutan No.Sk 422/Mehut -II/1999 dan Tata Batas s.d 2011						Kawasan Hutan No.Sk 35/ Menhut-II/ 2013 berdasarkan perubahannya	
		Luas (ha)	% Thdp Luas Kab.	Luas (ha)	% Thdp Luas Kab.	Luas (ha)	% Thdp Luas Kab	Luas (Ha)	% Thdp luas kab
1.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	40.271	12,90	40.271	12,90	40.271	12,86	42.940	13,54
2.	Hutan Lindung	83.683	26,70	78.824	25,20	77897	24,88	77.755	24,52
3.	Hutan Produksi Terbatas	27.955	8,90	28.260	9,00	28.260	9,03	28.082	8,85
4.	Hutan Produksi	33.672	10,80	22.318	7,10	19.954	6,37	21.473	15,62
5.	Hutan Produksi Konversi	18.439	5,90	14.931	4,80	9.561	3,05	9.512	3,00
	Jumlah	204.020	65,20	184.604	59,00	175.943	56,20	179.761	57,42

Sumber: Perda No. 5/2012 tentang RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2011-2031

Berdasarkan tabel diatas kawasan hutan 57,42 persen dari luas Kabupaten sisanya 42,58 persen merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan sebgai kawasan budidaya, pertambangan, perikanan dan perumahan, perkantoran dan ruang publik. Dapat kita lihat terjadi

perubahan luas kawasan dikarenakan perubahan luas wilayah administrasi kabupaten sijunjung. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan. Ini perlu adanya arah dan kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sijunjung. Perkembangan pembangunan yang pesat baik disektor pertanian, perkebunan, pertambangan dan permukiman dan sektor lainnya jelas akan memiliki implikasi terhadap kebutuhan lahan sehingga perlu beberapa penyesuaian terhadap pengembangannya. Pola penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021, dapat dilihat pada gamabr berikut ini.

0,52 3,65 0,28 1.20 0.11 48,75 40,90 Hutan ■ Perkebunan ■ Permukiman Sawah Tanah Terbuka Semak Belukar Tegalan/Ladang Perairan

Gambar 2.2 Pola Penggunaan Lahan (Hektar) di Kabupaten Sijunjung **Tahun 2021**

Sumber: Interpretasi Citra Satelit, 2020

2.1.1.8. Potensi Pegembangan Ekonomi Wilayah

Pembangunan ekonomi suatu wilayah sangat erat kaitannya dengan kodisi geografis. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui secara konkrit tentang kategori dan subkategori potensi pengembangan ekonomi suatu wilayah. Analisis ini diperlukan mengingat masing-masing daerah mempunyai potensi pengembangan yang bervariasi sesuai dengan kondisi geografis daerah. Informasi ini diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diwujudkan secara optimal. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih maksimal.

Potensi pengembangan suatu wilayah dapat dilihat berdasarkan 2 indikator: 1) struktur/kontribusi kategori dan subkategori yang terkait dalam perekonomian daerah. Hal yang menjadi pertimbangan adalah bahwa suatu kategori dan subkategori mempunyai potensi pembangunan yang cukup besar bilamana kontribusinya terhadap perekonomian daerah cukup besar pula dan 2) laju pertumbuhan kategori dan sub kategori bersangkutan dalam perekonomian daerah. Indikator ini diperlukan untuk pengembangan kategori dan subkategori yang mempunyai potensi yang

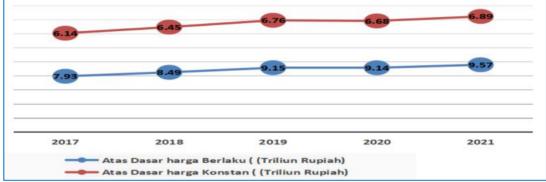
cukup tinggi sehingga dapat diketahui laju pertumbuhannya. Kedua indikator ini dapat mengetahui potensi pengembangan ekonomi wilayah menurut sektor dan sub sektor di Kabupaten Sijunjung.

Untuk mengukur kondisi ekonomi suatu daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha (sektor) dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku dan
Konstan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Struktur/kontribusi Ekonomi dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Kontribusi Ekonomi Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

No	Lamangan Hasha			Tahun		
NO	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan&Perikanan	30,59	29,47	28,03	27,82	27,46
2.	Pertambangan dan Penggalian	14,15	14,14	14,18	13,74	13,29
3.	Industri Pengolahan	3,02	2,99	2,52	2,60	2,73
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6.	Konstruksi	13,31	13,80	14,29	14,33	14,49
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,26	11,51	11,77	11,69	11,67
8.	Transportasi dan Pergudangan	7,63	7,55	7,74	7,15	7,17

No	Lanangan Hasha			Tahun		
NO	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,78	0,80	0,84	0,79	0,83
10.	Informasi dan Komunikasi	2,90	2,99	3,17	3,44	3,50
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	2,33	2,28	2,36	2,53
12.	Real Estat	1,21	1,20	1,21	1,22	1,19
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,86	5,11	5,58	5,66
15.	Jasa Pendidikan	4,39	4,68	4,94	5,23	5,25
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,72	1,79	1,87	2,09	2,19
17.	Jasa lainnya	1,74	1,79	1,93	1,86	1,95
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Sijunjung didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sijunjung.

Lapangan usaha yang memberikan peran terbesar dalam pembPertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 27,46 persen (angka ini menurun sebesar 3,13 persen dari tahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,29 persen (turun 0,86 entukan PDRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 didominasi oleh persen dari tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,49 persen (naik 1,18 persen dari tahun 2017). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,67 persen (naik sebesar 0,41 persen di tahun 2017) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,17 persen (turun 0,46 persen dari tahun 2017).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, hanya Konstruksi yang tetap mengalami peningkatan peranannya selama 5 tahun terakhir. Sementara untuk Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan transportasi dan Pergudangan peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5 persen.

Penyebab turunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan salah satunya adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut disertai dengan penurunan harga produk perkebunan yang merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Sijunjung. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Potensi pembangunan wilayah Kabupaten Sijunjung dapat dikelompokkan atas beberapa wilayah atau kawasan. Dalam hal ini pengelompokkan didasarkan pada kandungan potensi sumberdaya alam pada masing-masing wilayah. Analisis ini diperlukan untuk dapat merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah dan kawasan bersangkutan. Pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031

terbagi 8 (delapan) kawasan untuk kepentingan lahan budidaya adalah sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi hingga tahun 2031 seluas 16.438 ha dari luas yang ada sekarang seluas 30.615 ha. Pengembangan hutan produksi tersebut tersebar ke-8 kecamatan, dengan luas terbesar di Kecamatan Sijunjung seluas 7.660 ha dan terkecil di Kecamatan Sumpur Kudus seluas 521 ha.

b. Kawasan peruntukan pertanian lahan basah

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dialokasikan seluas 12.303 Ha terutama di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, wilayah bagian bawah Kecamatan Sumpur Kudus.

c. Kawasan peruntukan perkebunan

Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok dan untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, pengembangan tanaman holtikultura, terutama manggis dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok.

d. Kawasan peruntukan perternakan

Pengembangan kawasan pertenakan diarahkan antara lain untuk: a) budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya, b) pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Koto VII sebagai sentranya, dan c) budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang.

e. Kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, karena ke-8 kecamatan memiliki bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi.

f. Kawasan peruntukan perindustrian

Pengembangan kawasan perindustrian untuk Kabupaten Sijunjung adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan Kamang Baru). Kedua lokasi tersebut terletak pada posisi yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh petani dalam menyalur hasil pertaniannya.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada Kawasan Geopark Silokek Ranah Minang dengan pusat pengembangan di Kecamatan Sijunjung, Wahana Wisata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru, Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung, dan objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok.

h. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perumahan perkotaan diarahkan di Muaro Sijunjung (Kecamatan Sijunjung), Palangki (Kecamatan IV Nagari), Tanjung Ampalu (Kecamatan Koto VII), Kamang, dan Sei Tambang (Kecamatan Kamang Baru).

2.1.1.9. Wilayah Rawan Bencana

Menurut undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, dan rawan banjir. Dikabupaten Sijunjung kawasan bencana alam ini sebagai berikut:

Tabel 2.6 Sebaran Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luasan (Ha)
A. Kav	wasan Rawan Bencana Banjir	291,61
1	Kamang Baru	213,27
2	Kupitan	78,34
B. Kav	wasan Rawan Bencana Longsor	238,68
1	Koto VII	52,74
2	Kupitan	4,44
3	Sijunjung	51,34
4	Sumpur Kudus	89,12
5	Tanjung Gadang	41,04
Jumlal	1	530,29

Sumber : Hasil Analisa GIS, 2022

Dengan banyaknya jenis dan seringnya bencana alam yang mengancam, Kabupaten Sijunjung dapat disebut sebagai wilayah "rawan bencana". Selain potensi bencana yang disebabkan oleh aktivitas alam, Kabupaten Sijunjung ini juga memiliki potensi bencana yang disebabkan oleh manusia seperti konflik sosial dan epidemi wabah penyakit. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 ha atau 24,45 persen), Batu Andesit Campur Tufa (61.833 ha atau 19,75 persen), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 ha atau 19,44 persen), Batu Napal dan Lempung (36.850 ha atau 11,77 persen), Batu Napal Gamping (34.640 ha atau 11,06 persen), Batu Sabah campur Batu Gamping (24.405 ha atau 7,8 persen), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (land slide), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap dan Banjir.

1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Sebagian besar daerah ini rawan terhadap terjadinya gerakan tanah, terkait dengan struktur dan jenis batuan pembentuknya. Secara umum berdasarkan analisa GIS, wilayah nagari yang rawan terjadi gerakan tanah adalah Padang Sibusuk, Pamuatan (Kec. Kupitan), keseluruhan wilayah nagari dalam Kecamatan Tanjung Gadang, Limo Koto (Kec. Koto VII), Lalan, Buluh Kasok, Kampung Dalam, dan Latang (Kec. Lubuk Tarok), Silokek, Solok Ambah (Kecamatan Sijunjung), serta Takuang, Siaur, dan Sungai Lansek (Kecamatan Kamang Baru).

2. Kawasan Rawan Longsor

Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material yang bergerak ke bawah atau ke luar lereng. Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia. Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain adalah:

- a. Kondisi geologi : batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, struktur sesar dan kekar, gempa bumi, dan stratigrafi.
- b. Iklim: curah hujan yang tinggi.
- c. Keadaan topografi: lereng curam.
- d. Keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika.
- e. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misalnya tanah kritis.

Gejala umum terjadinya tanah longsor diantaranya, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing; Biasanya terjadi setelah hujan; Munculnya mata air baru secara tiba-tiba; Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

Kabupaten Sijunjung hampir tiap bulan mengalami longsor lahan setiap musim hujan. Daerah yang mengalami longsor paling tinggi adalah disepanjang jalan Lintas Sumatera terutama di Kecamatan Tanjung Gadang. Daerah rawan longsor lainnya adalah Jalan Muaro-Silokek- Durian Gadang, Jalan Sijunjung -Aie Angek, Jalan Aie Angek -Paru, Jalan Kumanis - Sumpur Kudus, Jalan Tamparungo - Sisawah, dan Jalan Sibakur - Langki. Berdasarkan hasil analisis GIS, kerawanan bahaya longsor lahan tingkat sedang berada pada Kecamatan Koto VII, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Sumpur Kudus, dan Kecamatan Tanjung Gadang.

3. Kawasan Rawan Banjir

Banjir secara alamiah, pada umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan di atas normal, sehingga sistem pengaliran air dari sungai, anak sungai alamiah, saluran drainase dan kanal tidak mampu menampung akumulasi air hujan maka terjadi luapan air sungai. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi yang terjadi di muara, maupun berpindah-pindahnya alur sungai dan run off sungai atau kemiringan sungai yang relatif tinggi.

Banjir bandang (galodo) dan tanah longsor adalah suatu fenomena alam yang jamak. Bencana banjir terjadi bukan hanya karena faktor alamiah, namun juga disebabkan karena campur tangan manusia. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan (catchment area) juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena debit/pasokan air yang masuk ke dalam sistem pengaliran air menjadi tinggi sehingga melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi pada lahan curam yang menyebabkan terjadinya sedimentasi di sistem pengaliran air

dan wadah air lainnya. Disamping itu berkurangnya daerah resapan air juga berkontribusi atas meningkatnya debit banjir.

Pada daerah permukiman dimana telah padat dengan bangunan sehingga tingkat resapan air kedalam tanah berkurang. Jika terjadi hujan dengan curah hujan yang tinggi sebagian besar air akan menjadi aliran permukaan yang langsung masuk kedalam sistem pengaliran air sehingga kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir. Banjir hampir sering terjadi terutama bila musim hujan. Secara umum rawan banjir terjadi pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradient) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30 persen), jika terjadi hujan yang cukup lebat, di hulu maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi seperti di Padang Sibusuk dan Pamuatan (Kec. Kupitan), Kamang (Kec. Kamang Baru), dan Palaluar (Kecamatan Koto VII).

Kabupaten Sijunjung dilalui oleh 3 (tiga) sungai besar yaitu sungai Batang Ombilin, Batang Sukam dan sungai Batang Palangki. Sungai Batang Ombilin saat ini mengalami pendakalan, erosi, pemcemaran air dan perubahan pola aliran sungai. Tingginya erosi dan sedimentasi pada sungai-sungai tersebut menyebaban terjadi penumpukan sedimen yang cukup signifikan yang di Muara Tiga Sungai, sehingga daya tampung sungai menurun, seperti terlihat pada gambar berikut.

Tanggal 8 Februari 2020
Genangan banjir di
Muaro Tiga Sungal
Kabupaten Sijunjung
(120 Ha)

MNCH BRINGS SKM

Gambar 2.4
Petemuan Tiga Sungai (Batang Ombilin, Sukam dan Batang Kuantan

Sumber: Bapppeda Sijunjung, 2022

Sungai Batang Palangki adalah sungai yang paling mengkhawatirkan jika dibanndingkan dengan kondisi sungai Batang Ombilin dan Sungai Batang Sukam. Sdimen pada sungai ini sangat besar kontribusinya terhadap Muara Tiga Sungai. Terlihat dalam analisa sedimen bahwa Sungai Palangki memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi dan perlu segera di tanggulangi. Dan Berdasarkan hasil survey dan Investigasi, kondisi sungai Batang Sukam masih dalam kondisi baik, hanya di temukan beberapa spot sedimentasi dan erosi tebing yang hanya berada di hilir sungai Batang Sukam. Namun kondisi tebing sungai Batang Sukam yang terkikis yang jika dibiarkan dapat memakan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Muaro Tiga Sungai merupakan daerah bottle-neck.

Perubahan pola aliran sungai, erosi dan sedimentasi yang terjadi sepanjang aliran Sungai Batang Ombilin, Batang Sukam dan Batang Palangki yang ditambah dengan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung yang sebagaian besar didominasi bebatuan mangakibatkan sering terjadinya banjir, tanah longsor dan pergerakan tanah. Beberapa kasus tanah longsor dan banjir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kasus bencana Alam di kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021

No	Kasus	Tahun	Gambar
1.	Tanggal 30 Oktober 2021Terjadi banjir bandang di nagari Kampung Dalam dan Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok di Kab. Sijunjung	2021	
2.	Tanggal 8 Februari 2020, Jembatan Nagari Batu Manjula putus, tanah longsor dan banjir hampir di seluruh Kecamatan di Kab. Sijunjung	2020	
3.	Tanggal 5 November 2019 akibat hujan lebat jalan penghubung 10 nagari di kawasan nagari Kumanis amblas sepanjang 75 m.	2019	
4.	Tanggal 7 Juli 2018 terjadi banjir di Jorong Muaro Linggo, Jorong Liambang dan Jorong Koto Langki , Kab. Sijunjung, (41 rumah tergenang	2018	
5.	Tanggal 3 Maret 2017 terjadi banjir dan tanah longsor di Kec. Kamang Baru dan Kec. Lubuak Tarok, Kab. Sijunjung (100 ha lahan pertanian tergenang	2017	
6.	Tanggal 17 April 2016 Kec. Sijunjung, akibat luapan Sunagi Palangki(12 rumah rusak)	2016	
7.	Tanggal 8 Pebruari 2016 Kab. Sijunjung diterjang banjir akibat luapan S.Sukam dan S. Palangki (51 KK dievakuasi)	2016	

Sumber: Bapppeda, 2022

Kejadian bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor tahun 2019-2021 dan , kebakaran hutan pada tahun 2021 per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Jumlah Nagari yang Mengalami Bencana Alam Menurut
Kecamatan di Kabupaten Sijunjung, 2019-2021

				-							
		Banjir	Banjir			Gempa Bumi			Tanah Lonsor		
No	Kecamatan	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1.	Kamang Baru	3	5	6	-	-	-	1	1	17	
2.	Tanjung Gadang	-	6	3	-	-	-	5	7	5	
3.	Sijunjung	5	6	4	-	-	1	4	3	4	
4.	Lubuk Tarok	1	-	-	-	-	-	2	4	-	
5.	IV Nagari	-	2	2	-	-	-	-	1	-	

		Banjir			Gempa	Gempa Bumi			Tanah Lonsor		
No	Kecamatan	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
6.	Kupitan	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
7.	Koto VII	-	-	-	-	-	-	2	2	-	
8.	Sumpur Kudus	7	8	9	-	-	2	9	6	6	
Jumlah		16	27	24	-	-	3	24	25	17	

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Selain bencana alam, dimulai pada triwulan I tahun 2020, seluruh dunia termasuk Indonesia, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung mendapatkan bencana wabah kesehatan dengan adanya pandemi penyebaran virus Novel Coronavirus-2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 yang awalnya merupakan ancaman Kesehatan kini berkembang menjadi ancaman bagi pergerakan perekonomian serta menjadi bencana sosial.

Namun dengan adanya upaya pengendalian, pencegahan dan penanganan maka secara perlahan hingga akhir 2021, angka perkembangan kasus covid yang terkonfirmasi di Kabupaten Sijunjung semakin lama dapat diturunkan dan dikendalikan. Hingga kondisi triwulan I Tahun 2022, sudah tidak ada kasus terkonfirmasi covid yang cukup berarti, namun perhatian terhadap perkembangan kasus covid tetap dijaga dengan cara tetap memberikan edukasi penggunaan masker, tetap mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer secara berkala dan mempercepat capaian vaksinasi I, II dan Booster.

2.1.1.10. Demografi

Kondisi demografi suatu daerah secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Salah satu tantangan utama pembangunan daerah saat ini yaitu perubahan demografi. Salah satu modal pembangunan, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi adalah jumlah penduduk dan sumber daya manusia (SDM). Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang sangat penting. Diperlukan komponen penduduk yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan. Keberadaan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral adalah jaminan masa depan suatu daerah.

Penduduk atau masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, akan tetapi memiliki kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan.

Berdasarkan data BPS dalam indikator statistik terkini hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035, maka di proyeksikan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 adalah sebanyak 237.313 jiwa meningkatkan jika dibandingkan capaian pada tahun 2020 sebanyak 235.045 jiwa. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan.

Untuk itu, tentu pembangunan harus diorientasikan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian pertumbuhan serta mobilitasnya. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

237.376 238,000 237.313 236,000 235.045 233.810 234,000 232,000 230.104 230,000 228,000 226,000 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.5

Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017- 2021 (jiwa)

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah berpenduduk usia muda dan kecenderungan laiu pertumbuhan penduduknya tinggi. Kendali yang dilakukan selama ini adalah melalui Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Sedangkan untuk data kependudukan yang disusun Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Pencatatan Sipil merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember.

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 Per

Kecamatan Tahun 20217-2021 (Jiwa)

N	Kecamatan			Tahun			Pertum buhan		
0	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2020-2021		
1.	Kamang Baru	49.359	50.438	51.477	50.459	51.176	1,90		
2.	Tjg. Gadang	24.977	25.242	25.494	26.900	27.187	1,43		
3.	Sijunjung	45.951	46.585	47.196	47.925	48.04	1,33		
4.	Lubuk Tarok	15.205	15.338	15.467	17.567	17.779	1,61		
5.	IV Nagari	16.932	17.319	17.698	15.584	15.660	0,65		

N	Vacamatan			Pertum buhan			
0	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2020-2021
6.	Kupitan	13.977	14.161	14.332	13.193	13.227	0,34
7.	Koto VII	37.902	38.565	39.201	37.549	37.845	1,05
8.	Sumpur Kudus	25.801	26.162	26.511	25.868	37.845	0,86
	Total	230.104	233.810	237.376	235.045	237.313	1,29

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat, pertumbuhan penduduk tahun pada tahun 2020-2021 mencapai 1,29 persen. Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Kamang Baru 1,29 persen dan yang terendah Kecamtan Kupitan 0,34 persen.

Laju pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kepadatan penduduk. Rata-rata kepadapatan penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 75,80 jiwa per km², artinya setiap satu km² wilayah Kabupaten Sijunjung ditempati sekitar 75 jiwa. Kecamatan Koto VII menjadi wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk 263 jiwa per km². Sebaliknya Kecamatan Sumpur Kudus menjadi wilayah dengan kepadatan terendah, yaitu sebesar 45,25 jiwa per km².

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase penduduk	(Jiwa/km2)
1.	Kamang Baru	51.176	21,56	61,08
2.	Tanjung Gadang	27.187	11,46	59,13
3.	Sijunjung	48.04	20,40	64,71
4.	Lubuk Tarok	17.779	7,49	94,77
5.	Kupitan	15.660	6,63	162,62
6.	IV Nagari	13.227	5,61	161,29
7.	Koto VII	37.845	15,98	263,00
8.	Sumpur Kudus	37.845	11,01	45,25
Jum	lah	237.313	100	75,80

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Komposisi penduduk Kabupaten Sijunjung didominasi oleh kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) tahun 2021 sebanyak 161,462 jiwa atau 68,04 persen lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun sebanyak 75.851 jiwa atau 31,96 persen. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten Sijunjung memiliki bonus demografi, sehingga dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan percepatan pembangunan daerah yang diringi dengan program-program pembangunan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.

Bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat di Kabupaten Sijunjung harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan bonus demografi. Terdapat banyak cara untuk mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Bonus demografi, selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi daerah, jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif. Bonus demografi bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah daerah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan daerah dalam memanfaatkan peluang ini. Jika tidak

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat menjadi awal bagi daerah yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari sini bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan, seperti berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

Tabel 2.11 .
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021

		Jenis	Kelamin	
NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	10.498	10.125	20.623
2.	5-9	10.260	9.701	19.961
3.	10-14	11.064	10.527	21.591
4.	15-19	11.170	10.427	21.597
5.	20-24	10.473	9.514	19.987
6.	25-29	9.460	9.123	18.583
7.	30-34	9.374	9.483	18.857
8.	35-39	9.151	8.950	18.101
9.	40-44	8.707	8.301	17.008
10.	45-49	7.920	7.519	15.439
11.	50-54	6.362	6.307	12.669
12.	55-59	5.280	5.152	10.432
13.	60-64	4.319	4.470	8.789
14.	65-69	3.178	3.291	6.469
15.	70-74	1.695	1.977	3.672
16.	75+	1.406	2.129	3.535
	Jumlah	120.317	116.996	237 .313

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Penduduk di Kabupaten Sijunjung berusia diatas 15 tahun pada tahun 2021 mencapai 175,138 orang. Angkatan kerjanya mencapai 123,532 dan bukan angkatan kerja 52.781 orang dan bekerja 119,119 orang. Jumlah pengangguran mencapai 4,413 orang, pengangguran terbanyak adalah kaum laki-laki yang mencapai 3,322 sementara kaum perempuan yang mengangur mencapai 1,091 orang, seperti terlihat pada infografis berikut.

Gambar 2.6 . Angakatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Pekerjaan dan Jenis Kelamain Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dilihat dari tingkat pendidikan, angkatan kerja di Kabupaten Sijunjung. Angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SD mencapai 25,361 orang. Angakatan kerja yang berpendidikan SD tersebut yang bekerja hannya 24,149 orang dan mengangur 1,212 orang. Dari sisi persentase penganguran terhadap angkatan kerja, SMA kejuaruan menempati tingkat penganguran tertinggi sebesar 966 orang atau 6,62 persen dari angkatan kerja SMA kejuruan yang mencapai 14,603 orang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Bekerja	Pengang- guran	Jumlah Anggkatan Kerja	Persentase Pengangguran Terhadap Angkatan Kerja
1.	Tidak Tamat SD	23.618	202	23.820	0,85
2.	SD	24.149	1.212	25.361	4,78
3.	SLTP	20.526	835	21.361	3,91
4.	SMA	20.086	818	20.904	3,91
5.	SMA Kejuruan	13.637	966	14.603	6,62
6.	Diploma	2.958	93	3.051	3,05
7.	Universitas	14.145	287	14.432	1,99
Jum	lah	119.119	4.413	123.532	

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Bekerja pada sektor jasa lainnya 55.936 jiwa atau 46,96 persen, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebanyak 46.572 jiwa atau 39,10 persen, seperti terlihat pada infografis berikut ini.

Gambar 2.7

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (ultimate goals) dari pembangunan suatu wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang disepakati baik secara global maupun nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi acuan dalam penyusunan RKPD, aspek kesejahteraan masyarakat ini meliputi indikator-indikator makro yang terdiri dari tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen pendukungnya seperti Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada setiap tahapan kegiatan pembangunan daerah harus memperhatikan kondisi dan perkembangan ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemampuan daya saing daerah serta infrastruktur yang tersedia. Hal ini dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah serta berbagai macam program dan kegiatan yang relevan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Perhitungan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diukur berdasarkan pertambahan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) antara 2 (dua) tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga disebut sebagai salah satu indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, seperti terlihat pada Gambar berikut.

5.07 5.17 5.02

5.3 5.16 5.01 3.69

5.25 5.07 4.81 3.15

2017 2018 2019 1.63 2021
2.07

Sijunjung Sumatera Barat Nasional

Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siunjung, Provinsi dan Nasiona
Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan Gambar ditas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) Tahun cenderung melambat, sempat tumbuh 5,26 persen tahun 2017 justru terus menurun hingga mencapai angka 4,81

persen pada tahun 2019. Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,10 persen. Kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 ternyata mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Secara nasional pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,0 persen, begitupun capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29 persen, Kabupaten Sijunjung 3,15 persen yang dalam capaiannya masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi, seperti terlihat pada grafik berikut ini. Kontribusi sektor lapangan usahan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2020, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas
Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Persen)

	0.14			Tahun		
No	Sektor Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,25	2,55	0,40	0,11	2,72
2.	Pertambangan dan Pengalian	4,17	4,24	6,27	-1,17	-4,42
3.	Industri Pengolahan	0,46	4,55	-5,50	-1,96	8,48
4.	Listrik dan Gas	7,24	7,31	4,33	-5,02	4,37
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,61	3,89	3,90	1,98	3,40
6.	Konstruksi	9,39	7,09	7,92	-4,17	3,92
7.	Perdangangan besar dan Enceran	7,41	6,53	7,10	-0,21	5,82
8.	Transportasi dan Penggudangan	7,63	5,79	7,94	-10,60	4,88
9.	Penyediaan Akomodasi danMakanan	9,24	7,97	7,92	-8,76	9,38
10.	Informasi dan Komunikasi	11,47	9,53	9,96	8,40	5,25
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,01	0,61	2,09	1,20	8,92
12.	Real Estat	5,17	4,43	5,54	0,65	0,87
13.	Jasa Perusahaan	5,04	5,60	6,35	-2,07	3,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5,21	6,09	5,20	-0,64	3,84
15.	Jasa Pendidikan	8,10	8,59	8,22	5,12	4,25
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,33	8,30	7,49	8,23	8,21
17.	Jasa Lainnya	9,07	8,93	9,20	-7,27	8,96
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,26	5,07	4,81	-1,10	3,15

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan PDRB Kabupaten Sijunjung menurut lapangan usaha, nilai PDRB pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan tersebut, terlihat pada beberapa sektor usaha pada tahun 2020 bernilai minus dan di tahun 2021 kembali menunjukan kenaikan yang signifikan, sektor usaha tersebut antara lain industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan, jasa perusahaan, administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta jasa lainnya. Selain lapangan usaha yang mengalami kenaikan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih terus mengalami penurunan dari -1,17 persen di tahun 2020 menjadi -4,42 persen di tahun 2021.

Jika dirinci berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai tahun 2021 adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 9,38 persen dari -8.76 persen ditahun 2020. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah jasa lainnya yakni sebesar 8,96 persen disusul jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 8,92 persen. Berdasarkan tabel tersebut juga dapat dilihat nilai PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama

tahun 2020-2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan tersebut menandakan bahwa usaha di Indonesia khususnya Kabupaten Sijunjung mulai menggeliat kembali setelah hampir 2 tahun lamanya berbagai usaha terhenti akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 3,15 persen dari -1,10 persen di tahun 2020. Hanya saja masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lebih baik, karena dari 17 kategori lapangan usaha yang digunakan dalam penghitungan, masih terdapat 10 lapangan usaha dengan persentase pertumbuhan dibawah 5 persen.

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung masih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen)

NO	Kab/Kota	L	aju Pertu	mbuhan l	Ekonomi (per	sen)
NO	Provinsi/Nasional	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	5,12	4,91	4,76	-1,85	2,89
2	Kab. Pesisir Selatan	5,41	5,35	4,81	-1,11	3,37
3	Kab. Solok	5,32	5,22	5,07	-1,13	3,32
<mark>4</mark>	Kab. Sijunjung	5,26	<mark>5,09</mark>	<mark>4,83</mark>	- 1,10	3,15
5	Kab. Tanah Datar	5,11	5,07	5,01	-1,13	3,30
6	Kab. Padang Pariaman	5,58	5,46	2,51	-10,47	2,18
7	Kab. Agam	5,51	5,26	4,81	-1,38	3,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	5,33	5,26	5,10	-1,38	3,33
9	Kab. Pasaman	5,08	5,00	4,84	-1,16	3,39
10	Kab. Solok Selatan	5,15	5,03	4,89	-1,87	3,35
11	Kab. Dharmasraya	5,44	5,31	4,98	-1,24	3,42
12	Kab. Pasaman Barat	5,34	5,24	4,49	-1,39	3,75
13	Kota Padang	6,23	6,09	5,68	1,34	3,66
14	Kota Solok	5,76	5,68	5,53	-1,86	3,56
15	Kota Sawahlunto	5,74	5,52	5,34	-1,42	2,49
16	Kota Padang Panjang	5,80	5,73	5,59	-1,27	3,46
17	Kota Bukittinggi	6,08	6,02	5,88	-1,44	3,61
18	Kota Payakumbuh	6,12	6,05	5,92	-1,74	3,58
19	Kota Pariaman	5,61	5,50	5,33	-1,66	3,53
	Sumatera Barat	5,30	5,14	5,01	-1,62	3,29
	Nasional	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada Tahun 2021, maka capaian tersebut dapat dikelompokkan pada :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 3,29 sebanyak 4 (empat) Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto dan termasuk Kabupaten Sijunjung
- Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar 3,29 namun dibawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,69 persen sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yakni Kab. Pesisir

Selatan, Kab. Solok, Kab. Tanah Datar, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Solok, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota yang berada di diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 3,69 persen sebanyak 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah juga dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Urajan	Tahun						
Oraian	2017	2018	2019	2020	2021		
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)							
Atas Dasar harga Berlaku	7,93	8,49	9,15	9,14	9,57		
Atas Dasar harga Konstan	6,14	6,45	6,76	6,68	6,89		
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)							
Atas Dasar harga Berlaku	34,45	36,31	38,54	38,87	40,31		
Atas Dasar harga Konstan	26,67	27,57	28,47	28,43	29,05		
Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	5,26	5,07	4,81	-1,10	3,15		
Jumlah Penduduk (orang)/Population	230.104	233.810	237.376	235.045	237.313		
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,68	1,61	1,53	1,49	1,29		

Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan senantiasa mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 34,45 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 40,31 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh factor inflasi. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung selama lima tahun terakhir sangat fluktuatif dan secara umum mengalami perlambatan. Pertumbuhan PDRB perkapita pada tahun 2017 sebesar 5,26 persen sedangkan tahun 2021 mengalami perlambatan menjadi 3,15 persen.

Bila dibandingkan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, PDRB Perkapita atas Harga Berlaku dengan capaian tertinggi yakni pada Kota Bukittinggi sebesar Rp. 74,24 juta, dan terendah di Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp. 29.29 juta. PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sijunbjung Rp. 40,31 juta berada diawah Rata-rata asional dan Provinsi. Secara lebih rinci capaian PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.16
PDRB Perkapita Atas Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota seSumatera Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	Tahun				
NO	Provinsi/Nasional	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	45,12	47,06	50,12	53,19	54,80
2	Kab. Pesisir Selatan	26,39	28,32	30,12	28,04	29,29
3	Kab. Solok	31,96	34,09	36,39	35,96	35,72
4	Kab. Sijunjung	34,67	<mark>36,32</mark>	<mark>38,48</mark>	<mark>37,87</mark>	<mark>40,31</mark>
5	Kab. Tanah Datar	32,97	35,13	37,61	37,33	36,31
6	Kab. Padang Pariaman	46,32	49,46	51,22	42,94	42,62
7	Kab. Agam	36,83	39,25	41,83	41,18	39,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	35,98	38,27	40,79	40,24	41,99
9	Kab. Pasaman	28,30	29,88	31,68	31,32	31,12
10	Kab. Solok Selatan	29,55	30,97	32,59	31,81	31,26
11	Kab. Dharmasraya	38,45	40,15	41,81	40,40	46,52
12	Kab. Pasaman Barat	32,06	33,53	34,71	33,75	36,51
13	Kota Padang	57,27	61,25	65,68	64,66	71,36
14	Kota Solok	50,57	53,45	57,04	56,05	57,09
15	Kota Sawahlunto	51,55	55,01	58,88	58,01	58,62
16	Kota Padang Panjang	56,74	60,36	64,75	63,82	64,09
17	Kota Bukittinggi	58,78	62,22	66,52	65,00	74,24
18	Kota Payakumbuh	42,78	45,89	50,37	49,63	51,64
19	Kota Pariaman	49,75	52,69	56,59	55,86	55,18
	Sumatera Barat	40,19	42,84	45,29	44,03	45,29
	Nasional	51,90	56,00	59,10	56,90	62,24

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari sisi rata-rata pegeluaran perkapita menurut kelompok makanan dan kelompok bukan makanan. Di Kabupaten Sijunjung Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk makanan dan minuman jadi merupakan yang tertinggi yaitu mencapai Rp160.472,- dan terendah untuk pengeluaran ikan/udang/cumi/kerang. Sementara, untuk kelompok bukan makanan pengeluran perkapita tertinggi digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp226.996,- dan terendah untuk pengeluaran barang yang tahan lama yang capai Rp59.307,-.

Tabel 2.17
PDRB Perkapita Atas Harga Konstan menurut Kab/Kota se Sumatera
Barat Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota			Tahun		
NO	Provinsi/Nasional	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kab. Kep. Mentawai	30.91	31.82	32.36	33.83	34.41
2.	Kab. Pesisir Selatan	18.98	19.84	20.55	18.84	19.21
3.	Kab. Solok	24.32	25.41	26.41	25.08	25.67
<mark>4.</mark>	Kab. Sijunjung	<mark>26.67</mark>	<mark>27.57</mark>	<mark>28.18</mark>	<mark>28.52</mark>	<mark>29.05</mark>
5.	Kab. Tanah Datar	25.34	26.55	27.76	25.81	26.47
6.	Kab. Padang Pariaman	30.05	31.51	31.97	27.78	28.17
7.	Kab. Agam	27.36	28.58	29.59	27.31	27.97
8.	Kab. Lima Puluh Kota	26.92	28.08	29.09	28.89	29.64
9.	Kab. Pasaman	20.36	21.17	21.82	20.49	20.88
10.	Kab. Solok Selatan	21.82	22.53	23.01	21.69	21.96
11.	Kab. Dharmasraya	29.06	29.83	30.08	32.74	33.34
12.	Kab. Pasaman Barat	24.30	25.08	25.43	26.18	26.77
13.	Kota Padang	42.80	44.81	46.39	48.07	49.51
14.	Kota Solok	37.62	39.08	40.13	38.80	39.44
15.	Kota Sawahlunto	41.00	42.90	44.55	42.50	43.08
16.	Kota Padang Panjang	44.12	46.14	47.67	45.34	46.19
17.	Kota Bukittinggi	43.24	45.14	46.62	50.02	51.51
18.	Kota Payakumbuh	30.33	31.70	32.78	31.75	32.38
19.	Kota Pariaman	37.34	38.93	40.27	37.76	38.51
	Sumatera Barat	29.31	30.48	31.67	30.81	31.36
	Nasional	37.85	39.34	41.02	39.79	40.76

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Pengeluaran rata-rata per kapita ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. rata-rata pegeluaran perkapita menurut kelompok makanan dan kelompok bukan makanan sebulan pada tahun 2021, dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan dan Kelompok bukan Makanan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Barometer tingkat inflasi di Kabupaten Sijunjung adalah tingkat inflasi Provinsi dan inflasi di Kota Bukittinggi. Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 cederung meningkat dari bulan Januari sampai dengan Desember, hal ini dikarenakan posisi inflasi di bulan Januari mengalami kontraksi dikarenakan adanya pandemik covid 19 dan banyaknya aktifitas masyarakat dan ekonomi yang belum berjalan,adapun perkembangan lanju inflasi selama tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.10
Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Mengutip dari Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Sumaera Barat Desember 2021 Nomor: 01/01/13/Th.XXV pada tanggal 3 Januari 2022 bahwa Inflasi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, September, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 0,65 persen dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0,10 persen. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,38 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,01 persen.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsume (IHK) pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, yakni kelompok kesehatan sebesar 6,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,99 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 1,63 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,38 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen. Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat selama tahun 2021 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok pendidikan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen. Secara lebih detail Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021 di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran	Inflasi	Andil Inflasi
Umum	1,40	1,40
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,88	0,27
Pakaian dan Alas Kaki	0,72	0,05
Perumahan, Air, Listrik dan bahan Bakar Rumah Tangga	1,63	0,24
Perlengkapan, Peralatan&Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,99	0,12
Kesehatan	6,23	0,10
Transportasi	1,54	0,22
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,70	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	6,17	0,12
Pendidikan	-0,12	-0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,38	0,13
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,00	0,12

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Inflasi di Sumatera Barat secara tahun kalender dan inflasi year on year pada bulan Desember 2021 Sumatera Barat tercatat sebesar 1,40 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year on year pada bulan yang sama tahun 2020 sebesar 2,11 persen dan tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 1,66 persen. Angka capaian inflasi di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan capaian angka inflasi tahun 2021 merupakan yang terendah, yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.11 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Perhitungan laju inflasi Kabupaten Sijunjung juga diwakili oleh inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa terdekat, seperti terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.12 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Dari Gambar ditas secara umum inflasi terjadi di kota Bukittinggi pada pertengahan dan akhir tahun dan memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Kenaikan pada pertengahan tahun terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei tahun 2021 menyebabkan terjadinya inflasi sebesar

0,26persen. Meski tidak begitu tinggi, inflasi tersebut tetap bergerak naik ditengah pemberlakuan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan penurunan laju IHK secara regional. Sementara inflasi pada akhir tahun sebagian besar disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat pada masa-masa musim liburan dan cuti bersama. Pada akhir tahun 2021 inflasi sebesar 0,53 persen pada bulan September didorong oleh terjadinya cuti bersama yang disertai pelonggaran pembatasan sosial yang menyebabkan tingginya permintaan konsumsi masyarakat. Sementara untuk perkembangan inflasi tahunan yang terjadi di Kabupaten Sijunjung berdasarkan tingkat inflasi tahunan yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun 2017-2021 disajikan pada grafik berikut ini.

2.99 2.99 1.37 1.31 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.13
Perkembangan Inflasi di Bukittinggi Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Ditengah wabah pandemi Covid-19, inflasi yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar 1,69 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada 9 (sembilan) kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya.

Perkembangan inflasi dan harga yang berfluktuatif tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada pendapatan atau nilai tukar petani. Disisi lain, inflasi yang terjadi pada batas-batas tertentu dan stabil akan mendorong produksi dan menguntungkan petani. Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui dibawah koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diharapkan mampu melakukan pengendalian terhadap supply beberapa komoditas utama penyebab inflasi di daerah untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Selain itu, tim TPID tersebut juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan arah kebijakan sektoral yang mampu menciptakan keterjangkauan harga barang dan jasa di daerah.

3. Gini Ratio/Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang bisa menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan

ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (Gini Ratio) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Gini Ratio dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: tingkat Ketimpangan Tinggi (Gini Ratio 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (Gini Ratio 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (Gini Ratio 0,20-0,35).

Selama tahun 2017-2021, perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sijunjung menurun signifikan, pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,33 menjadi 0,270 pada tahun 2021 yang dikategorikan sebagai "ketimpangan rendah". Gini rasio Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 juga berada lebih baik dari Gini Ratio Provinsi dan Nasional. Perbaikan Gini Ratio pada tahun 2021, seiring dengan pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali aktifitas perekonomian masyarakat. Hal ini juga sebagai dampak adanya bantuan tunai yang banyak diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada masyarakat terdampak utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah keatas mereka juga terdampak tetapi tidak menjadi sasaran program bantuan pemerintah, dapat dilihat pada grafik berikut.

Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021 0,50 0,45 0.40 0.39 0.38 0,38 0,38 0,38 0,33 0,35 0.32 0.30 0,31 0,31 0.30 0,32 0,30 0.25 0.29 0.27 0,27 0.20

Gambar 2.14
Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera
Barat, dan Nasional Tahun 2017-2021

Sijunjung Sumbar Nasional

2018

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, bahwa capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2021 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,343 dan juga Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan capaian 0.321. sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0,244 dan Kabupaten Solok dengan capaian 0,246. Capain gini rasio Kabupaten Sijunjung peringkat sembilan dari 19 Kabupaten/Kota. Kedepannya perlu perhatian serius dari Pemerintah daerah untuk pemerataaan pendapatan, diantaranya dengan penguatan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan program program recovery ekonom. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel berikut ini.

2019

2020

2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

0,15 0,10 0,05 0,00

2017

Tabel 2.19
Indek Gini Ratio Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan
Kab/Kota Tahun 2017-2021

	Kab/Kota Tahun 2017-2021						
BT -	Wah /Waha			Tahun			
No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kab. Kep. Mentawai	0,319	0,306	0,306	0,305	0,321	
2	Kab. Pesisir Selatan	0,299	0,255	0,336	0,273	0,253	
3	Kab. Solok	0,294	0,303	0,246	0,264	0,246	
4	Kab. Sijunjung	<mark>0,333</mark>	<mark>0,300</mark>	<mark>0,285</mark>	0,277	0,270	
5	Kab. Tanah Datar	0,262	0,288	0,293	0,269	0,250	
6	Kab. Padang Pariaman	0,280	0,296	0,278	0,273	0,269	
7	Kab. Agam	0,279	0,257	0,297	0,257	0,272	
8	Kab. Lima Puluh Kota	0,262	0,283	0,251	0,278	0,244	
9	Kab. Pasaman	0,260	0,266	0,238	0,222	0,248	
10	Kab. Solok Selatan	0,299	0,309	0,330	0,310	0,277	
11	Kab. Dharmasraya	0,252	0,264	0,295	0,307	0,268	
12	Kab. Pasaman Barat	0,286	0,290	0,278	0,280	0,261	
13	Kota Padang	0,338	0,344	0,283	0,258	0,343	
14	Kota Solok	0,299	0,296	0,312	0,312	0,277	
15	Kota Sawahlunto	0,299	0,310	0,271	0,286	0,295	
16	Kota Padang Panjang	0,300	0,290	0,289	0,300	0,306	
17	Kota Bukittinggi	0,313	0,337	0,322	0,394	0,286	
18	Kota Payakumbuh	0,303	0,302	0,267	0,265	0,316	
19	Kota Pariaman	0,301	0,316	0,276	0,325	0,301	
	Sumatera Barat	0,319	0,306	0,306	0,305	0,321	
	Nasional	0,299	0,255	0,336	0,273	0,253	

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

4. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan dari tahun ke tahun, dan ukuran garis kemiskinan antar daerah dan antar Kabupaten/Kota juga saling berbeda serta juga terjadi peningkatan garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 sebesar Rp365.074/Kapita/Bulan menjadi Rp455.346/Kapita/Bulan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

No	Kabupaten/Kota		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Kab. Kep. Mentawai	280.695	294.284	310.033	340.191	356.403	
2	Kab. Pesisir Selatan	390.955	409.882	431.817	467.743	491.573	
3	Kab. Solok	400.887	408.570	415.649	451.906	461.030	
4	Kab. Sijunjung	<mark>365.074</mark>	<mark>379.046</mark>	400.861	433.147	<mark>455.346</mark>	
5	Kab. Tanah Datar	361.037	369.833	379.041	420.049	441.793	
6	Kab. Padang Pariaman	385.736	402.960	411.182	455.463	475.342	
7	Kab. Agam	327.004	341.372	379.304	424.728	444.711	
8	Kab. Lima Puluh Kota	370.506	388.689	403.030	451.295	475.123	
9	Kab. Pasaman	320.478	334.800	347.153	388.726	408.293	
10	Kab. Solok Selatan	347.667	364.498	387.438	419.442	438.187	
11	Kab. Dharmasraya	398.408	414.096	439.117	477.421	503.183	
12	Kab. Pasaman Barat	382.820	402.877	417.742	467.769	492.467	
13	Kota Padang	482.763	507.042	534.857	570.654	602.540	
14	Kota Solok	413.297	414.673	440.618	450.254	464.977	

No	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	
15	Kota Sawahlunto	337.682	354.665	374.615	399.688	412.757	
16	Kota Padang Panjang	424.298	438.075	450.377	491.142	516.648	
17	Kota Bukittinggi	441.087	459.371	475.755	519.470	540.457	
18	Kota Payakumbuh	441.736	462.243	482.184	526.490	543.335	
19	Kota Pariaman	412.231	431.368	446.514	480.028	495.386	
	Sumatera Barat	453.612	476.554	503.652	544.315	568.703	

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan data diatas, bahwa Indeks Garis Kemiskinan melebihi rata-rata Provinsi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 20021 adalah Kota Padang dan Indeks Garis Kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2021 (kondisi Maret) sebesar Rp.602.540 perkapita perbulan, sedangkan 18 Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten/Kota lainnya dengan indeks Garis Kemiskinan berada di bawah rata-rata Indeks Garis Kemiskinan Provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Barat berada di Kota Padang.

Berdasarkan Garis kemiskinan tersebut, di Kabupaten Sijunjung jumlah penduduk miskin tahun 2019-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terhentinya berbagai program penanggulangan kemiskinan, realokasi anggaran untuk penanggulangan *pandemic covid 19*, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menyebabkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung meningkat Pada Tahun 2020 adalah 16.280 jiwa, dan mengalami kenaikan 530 jiwa pada tahun 2021. Dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sebesar 6,87 persen turun menjadi 6,80 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid 19 pada Maret 2020 hinga awal tahun 2021 lebih cederung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di di Kabupaten Sijunjung 2021 sebesar 6,80 persen atau turun sebesar 0,07 persen jika dibandingkan capaian kondisi 2020. Namun, bila dilihat dari perbandingan capaian tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi, maka dalam waktu 2017 sampai dengan 2021, capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung relatif lebih baik dari capaian rata-rata nasional dan

berada dibawah rata-rata capaian Provinsi. Pebandingan perkembangan tingkat capaian kemiskinan Kabupatn Sijunjung Provinsi dan nasional, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.16 .
Tingkat Kemikinan Kabupaten Sijunjung, Provinsi dan Nasional
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Capaian tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung relatif lebih baik bila dibandingkan dengan 12 kabupaten di Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung peringkat ketiga terendah dari 12 Kabupaten. Adapun jumlah tingkat kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021 dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Barat dan
Nasional (Ribu Jiwa) Tahun 2016-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	14,67	14,44	14,43	14,35	14,84
2	Kab. Pesisir Selatan	7,79	7,59	7,88	7,61	7,92
3	Kab. Solok	9,06	8,88	7,98	7,81	8,01
4	Kab. Sijunjung	<mark>7,35</mark>	7,11	7,04	<mark>6,78</mark>	<mark>6,80</mark>
5	Kab. Tanah Datar	5,56	5,32	4,66	4,40	4,54
6	Kab. Padang Pariaman	8,46	8,04	7,10	6,95	7,22
7	Kab. Agam	7,59	6,76	6,75	6,75	6,85
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,15	6,99	6,97	6,86	7,29
9	Kab. Pasaman	7,41	7,31	7,21	7,16	7,48
10	Kab. Solok Selatan	7,21	7,07	7,33	7,15	7,52
11	Kab. Dharmasraya	6,68	6,42	6,29	6,23	6,67
12	Kab. Pasaman Barat	7,26	7,34	7,14	7,04	7,51
13	Kota Padang	4,74	4,70	4,48	4,40	4,94
14	Kota Solok	3,66	3,30	3,24	2,77	3,12
15	Kota Sawahlunto	2,01	2,39	2,17	2,16	2,38
16	Kota Padang Panjang	6,17	5,88	5,60	5,24	5,92
17	Kota Bukittinggi	5,35	4,92	4,60	4,54	5,14
18	Kota Payakumbuh	5,88	5,77	5,68	5,65	6,16
19	Kota Pariaman	5,20	5,03	4,76	4,10	4,38
	Sumatera Barat	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63
	Nasional	13,47	13,10	9,22	10,19	10,14

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Lebih lanjut, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh ratarata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam. Perkembangan Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.17 Indek Kedalaman (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Seperti telah dibahas sebelumnya, walaupun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sijunjung meningkat tetapi tidak mempengaruhi Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2017 – 2021 indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan terus mengalami penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 097 dan mengalami penurunan menjadi 0,86 pada tahun 2021, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 0,27 dan menurun menjadi 0,17 pada tahun 2021.

Jika dibandingkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Indek kedalam kemiskinan Provinsi Sumatera Barat mencapai 1,040 dan 0,240 untuk kndek keparahan kemiskinan. Sijunjung lebih baik dari provinsi, artinya kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan rendah, juga ketimpangan

pengeluaran diantara penduduk miskin juga rendah. Kondisi ini sangat positif untuk kedepannya didukung dengan program dan anggaran yang tepat sasaran.

5. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Sijunjung telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan angkatan kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kabupaten Sijunjung. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Sijunjung selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas sebanyak 176.313 orang yang terdiri dari angkatan kerja 123.532 orang dan bukan angkatan kerja 52.781 orang. Jumlah penduduk angkatan kerja selama kurun waktu 2017-2021 juga terus mengalami peningkatan, dimana penduduk yang bekerja pada tahun 2017 sebanyak 104.130 orang menjadi 119.119 orang pada tahun 2021, sedangkan untuk jumlah pengangguran terpengaruh pandemic covid 19 karena beberapa usaha terhenti dan memberhentikan karyawannya yang ditunjukan meningkatnya pengangguran tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 6.475 orang dan menurun kembali ditahun 2021 menjadi 4.413 orang, seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22

Jumlah Penduduk (Jiwa) Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis

Kegiatan Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Angkatan kerja	107.708	109.572	114.731	122.134	123.532		
	Bekerja	104.130	106.061	110.511	115.659	119.119		
	Pengangguran terbuka	3.578	3.511	4.220	6.475	4.413		
2.	Bukan Angkatan Kerja	50.201	51.172	49.409	50.608	52.781		
	Sekolah	14.388	15.506	12.816	13.934	14.131		
	Mengurus Rumah Tangga	30.692	28.871	31.167	31.926	29.179		
	Lainnya	5.121	6.795	5.426	4.748	9.471		
	Jumlah	157.909	160.744	164.140	172.742	176.313		

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Perkembangan tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sijunjung menunjukan grafik meningkat di tahun 2019 dan 2020 yang merupakan imbas dari terjadinya pandemi covid-19. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat maupun Nasional kembali mengalami penurunan. TPT Kabupaten Sijunjung tahun 2021 menjadi 3,57 persen dari TPT sebelumnya 5,3 persen di tahun 2020, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.18
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sijunjung,
Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Berdasarkan gambar diatas, terlihat TPT Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. TPT Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2021 berada pada peringkat ketiga terendah dari 19 kab/kota di Sumatera Barat, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat,
Nasional dan Kab/kota Tahun 2017-2021

BT -	Kabupaten/Kota dan	Tahun				
No	Nasional	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab. Kep. Mentawai	1.96	2.27	2.92	3,98	2,79
2	Kab. Pesisir Selatan	5.95	5.85	6,02	7,00	5,97
3	Kab. Solok	6.05	5.92	4.72	4,65	4,67
4	Kab. Sijunjung	3.32	<mark>3.20</mark>	<mark>3.64</mark>	<mark>5,30</mark>	<mark>3,57</mark>
5	Kab. Tanah Datar	3.72	3.86	3.20	4,79	4,63
6	Kab. Padang Pariaman	6.65	6.90	6,08	8,13	8,41
7	Kab. Agam	4.23	4.82	4.78	4,61	5,06
8	Kab. Lima Puluh Kota	2.60	2.70	2.30	3,03	2,25
9	Kab. Pasaman	6.81	5.88	5.28	5,04	4,92
10	Kab. Solok Selatan	5.54	5.85	4.91	5,62	4,84
11	Kab. Dharmasraya	3.69	3.94	5.06	5,31	5,00
12	Kab. Pasaman Barat	3.99	3.37	4.74	4,69	5,02
13	Kota Padang	9.44	9.18	8.74	13,64	13,37
14	Kota Solok	5.88	5.97	7.06	8,35	5,15
15	Kota Sawahlunto	6.19	5.75	6.84	8,20	6,38
16	Kota Padang Panjang	5.43	5.28	4.38	7,22	4,90
17	Kota Bukittinggi	6.94	7.15	6.20	7,51	6,09
18	Kota Payakumbuh	3.45	3.78	4.13	6,68	6,47
19	Kota Pariaman	5.97	5.72	5.48	5,73	6,09
	Sumatera Barat	5.58	5.55	5.33	6,88	6,52
	Nasional	5,61	5,66	5,23	7,07	6,49

Sumber: BPS Provinsi Suamatera Barat, 2022

Bila kita bandingkan TPT dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung kedua indikator ini tidak selalu mempunyai korelasi positif. Pada tahun 2020 tingkat kemiskinan 6,79 persen, meningkat menjadi 6,80 persen tahun 2021, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,30 tahun 2020 menjadi 3,57 persen tahun 2021. Hal ini disebabkan angkatan kerja yang bekerja pada periode tersebut tidak produktif, sehingga pendapatan yang mereka peroleh masih berada dibawah garis kemiskinan.

Tentu ini kedepannya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk membuka lapagang pekerjaaan yang produktif dengan didukung oleh program dan anggaran yang tepat sasaran. Perbandingan tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengganguran Terbuka Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Perbandingan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

Tahun	Tingkat Kemiskinan (Persen)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)						
2017	7,35	3,32						
2018	7,11	3,20						
2019	7,04	3,64						
2020	6,79	5,30						
2021	6,80	3,57						

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan. Tahun 2021 struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dan sektor industri. Sektor-sektor ini penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 46.572 orang atau 39,10 persen, sektor industri sebanyak 16.611 orang atau 13,94 persen dan sektor lainnya 55.936 orang atau 46,96 persen. Kondisi ini disebabkan karena adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha petanian, kehutanan, perburuan dan perikanan serta lapangan usaha lainnya, sedangkan lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan. Perkembangan angkatan kerja yang berkerja Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021 (Orang)

NO	Lapangan Usaha	Tahun									
140	Lapangan Osana	2017	2018	2019	2020	2021					
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	45.870	48.255	43.944	41.358	46.572					
2.	Industri Pengolahan	5.430	5.559	22.261	20.321	16.611					
5.	Lainnya	16.364	19.207	44 306	53.980	55.936					
	Jumlah	104.130	106.061	110.511	115.659	119.119					

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Ditinjau dari status pekerjaan utama, dari 119.119 orang yang bekerja pada Tahun 2021 yang terbanyak adalah berusaha sendiri sebesar 35.264 orang atau 29,60 persen diikuti Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 34.350 orang atau 28,84 persen. Seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Status
Pekerjaan Utama di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

NO	Status Pekerjaan Utama			Tahun			Persentase
	Status Pekerjaan Otama	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Berusaha sendiri	37.349	28.573	38.322	29.565	35.264	29,60
2.	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	13.685	18.959	13.834	19.068	16.942	14,22
3.	Berusaha dibantu buruh	4.635	4.082	3.377	5.602	4.653	3,91
	tetap/buruh dibayar						

NO	Status Pekerjaan Utama			Persentase				
	Status Pekerjaan Otama	2017	2018	2019	2020	2021	2021	
4.	Buruh/Karyawan/Pegawai	26.782	28.059	35.963	35.126	34.350	28,84	
5.	Pekerja Bebas	10.152	14.933	10.215	12.163	10.389	8,72	
6.	Pekerja keluarga/tak dibayar	11.527	11.455	8.800	14.135	17.521	14,71	
	Jumlah	104.130	106.061	110.511	115.659	119.119	100,00	

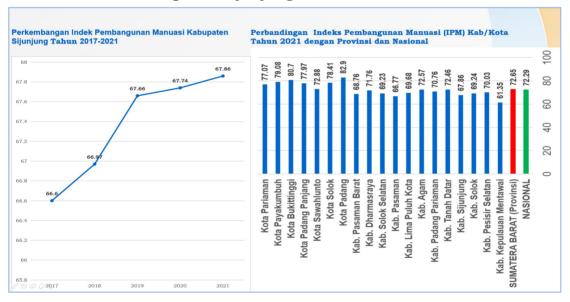
Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Untuk mengukur perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat baik suatu negara maupun daerah indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapn Hidup Saat Lahir (HHSL), digunkanan untuk mengukur peluang hidup, angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status pendidikan dan Pengeluaran Riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya alam serta standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM, seperti terlihat grafik berikut ini.

Gambar 2.19
Perkembangan dan Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung dan BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Berdasarkan gambar diatas, perkembangam IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2017 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 66,60 poin dan kemudian meningkat menjadi sebesar 67,86 poin pada tahun 2021. Angka IPM Kabupaten Sijunjung ini termasuk pada golongan IPM menengah atas karena memiliki nilai dalam rentang batas 65-80 poin. Peningkatan angka IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2017-2021 menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten Sijunjung bila disandingkan dengan IPM Provinsi, Nasional dan Kab/Kota pada tahun 2021.

IPM Kabupaten Sijunjung berada pada posisi 17 (tujuh belas) dari 19 kab/kota sama dengan kondisi tahun 2021. IPM Kabupaten Sijunjung masih barada dibawah rata-rata IPM Provinsi dan Nasional. IPM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 72,65 poin dan Nasional 72,29 poin seperti terlihat pada pada infografis berikut ini.

diperhatikan dari Jika dari sisi pertumbuhan komponen maka capaian pertumbuhan dan pembentuknya IPM komponen pembentukan IPM Kabupaten Sijunjung Selama rentang waktu 2017-2021 selalu berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional. Tentu kedepanya perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan cara menekan angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta meningkakan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di berbagai nagari, melaksanakan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan mendorong kejar Paket A, B dan C. Peningkatan IPM juga dapat didorong melalui peningkatan derjad kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat. Disamping itu, mengenjot pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dengan pengembanga ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27
Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Sijunjung (SJJ),
Provinsi Sumatera Barat (SBR) Dan Nasional (NAS)

	TZ TDM		2017			2018		2019		2019		2020		2021		
No	Komponen IPM	SJJ	SBR	NAS	SJJ	SBR	NAS	SJJ	SBR	NAS	SJJ	SBR	NAS	SJJ SBR 1 66,36 69.59 7 12,38 14.09 1 8,12 9.07 8 10.389 10.790 1 67,86 72.65 7	NAS	
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	65,44	68,78	71,06	65,65	69,01	71,2	66,02	69,31	71,34	66,21	69,47	71,47	66,36	69.59	71,57
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,34	13,94	12,85	12,36	13,95	12,91	12,36	14,01	12,95	12,37	14,02	12,98	12,38	14.09	13,08
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,72	8,72	8,10	8,10	8,76	8,17	8,10	8,92	8,24	8,11	8,99	8,48	8,12	9.07	8,54
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta/Org/Tahun)	10.280	10.306	10.664	10.40	10.638	11.059	10.40	10.950	11.299	10,389	10.733	11.013	10.389	10.790	11.156
	IPM	66,60	71,24	70,81	66,97	71,73	71,39	67,66	72,39	71,92	67,74	72,38	71,94	67,86	72.65	72.29
	Pertumbuhan IPM		0,72	0,90		0,69	0,82		0,92	0,74		-0,01	0,02	0,18	0,27	0,35

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kabupaten Sijunjung telah berkembang menjadi Masyarakat masyarakat yang heterogen dan multikultur. Faktor-faktor menyebabkan perkembangan tersebut antara lain keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi, perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat, perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat, dan efek pembangunan fisik, infrastruktur tidak seimbang dalam masyarakat. Di tengah perbedaan yang begitu menggejala melahirkan berbagai seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung beragam. Namun, karaksteristik seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung masih dominan berbasiskan Adat Minangkabau dan praktek ajaran Agama Islam.

Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa jenis seni budaya yang berkembang dimasyarakat diantaranya Randai, Talempong, Pencak Silat, Salung Rabab, Tari rakyat, Gurindam Dan Reog. Perkembangan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.28
Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Tahun 2017-2021

	i cincindangan cem, badaya dan	· Oluli	itugu It	andi 20	11 20				
N	TT	Tahun							
0	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Randai (kelompok)	137	99	62	46	66			
2.	Talempong (kelompok)	80	113	70	46	66			
3.	Pencak Silat (kelompok)	41	51	65	45	23			
4.	Saluang Rabab (kelompok)	74	64	66	11	11			
5.	Tari Rakyat (kelompok)	88	36	66	7	17			
6.	Gurindam (kelompok)	-	11	1	-	-			
7.	Reog (kelompok)	3	2	3	6	3			

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan media dalam menggerakan sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Aspek ini secara substansi menggambarkan capaian indikator kinerja dari setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun pada tahun 2019, urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan seiring lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, terdiri dari : 1) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 2) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 3) urusan pilihan, 4) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5) unsur penunjang urusan pemerintahan, 6) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 7) unsur kewilayahan dan 8) unsur pemerintahan umum.

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspek pelayanan umum selama kurun waktu 2017-2021 secara umum memperlihatkan perkembangan kemajuan melalui peningkatan atau penurunan indikator-indikator kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang masing-masing yang diklasifikasikan berdasarkan urusan dan unsur pemerintahan daerah. Perkembangan indikator-indikator kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2017-2021, dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan konkuren. Urusan pendidikan yang menjadi kewenagan Pemerintah Daerah adalah urusan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) secara penuh urusan ini sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi terhitung mulai tahun 2017. Untuk mengambarkan capaian urusan wajib pendidikan akan di analisis beberapa indikator urusan wajib pendidikan diataranya Tingkat Partisipasi Penduduk usia tertentu, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Mulai tahun 2022 ini ditambah 3 (tiga) indikator lain yaitu persentase siswa dengan nilai kompetensi yang memenuhi standar kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi standar kompetensi, dan persentase sekolah yang memiliki nilai assesment minimal Baik.

Tingkat partisipasi penduduk usia tertentu, APK dan APS mengambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, sedangkan persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi standar kompetensi, persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi standar kompetensi, dan persentase sekolah yang memiliki nilai assesment minimal Baik menggambarkan bagaimana kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang pendidikan tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No.	Indibates Vineria	Cotuon			Tahun		
NO.	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	%	n.a	n.a	n.a	76,11	76,91
2.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	%	99,69	99,83	99,84	99,87	91,63
3.	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah Pertama	%	81,90	82,25	85,02	84,66	79,20
4.	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Kesetaraan	%	n.a	n.a	n.a	77,23	77,40
5.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
6.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
7.	APS SD/MI/ Paket A	%	101,1	103,92	103,68	99,99	93,39
8.	APS SMP/MTs/ Paket B	%	99,20	98,47	98,20	89,98	86,82
9.	APK PAUD	%	75,53	75,65	79,41	48,19	72,37
10.	APK SD/MI/ Paket A	%	110,73	110,81	113,77	114,81	102,46
11.	APK SMP/MTs/ Paket B	%	99,98	101,12	101,42	109,83	98,51
12.	Persentase sekolah yang memiliki nilai assesment minimal Baik	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun pada jenjang pendidikan PAUD pada tahun 2021 sudah mencapai angka 76,91%, yang artinya 76,91% penduduk usia 5-6 tahun di Kabupaten Sijunjung sudah berada pada jenjang pendidikan PAUD tepat waktu. Dibandingkat tahun 2020 terjadi peningkatan partisipasi tepat waktu sebesar 0,80%.

Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar pada tahun 2021 telah mencapai angka 91,63%, yang artinya 91,63% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 7-12 tahun telah berada pada jenjang pendidikan dasar tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan partisipasi sebesar 8,06%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2021 lebih sedikit yang bersekolah tepat waktu dibandingkan dengan peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar tahun sebelumnya.

Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan Menengah pada tahun 2021 telah mencapai angka 79,20%, yang artinya 79,20% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 13-15 tahun telah berada pada jenjang Pendidikan Menengah tepat waktu. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan partisipasi sebesar 5,46%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik di jenjang Pendidikan Menengah pada

tahun 2021 lebih sedikit yang bersekolah tepat waktu dibandingkan dengan peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar tahun sebelumnya.

Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2021 telah mencapai angka 77,40%, yang artinya 77,40% penduduk Kabupaten Sijunjung usia 7-18 tahun yang putus sekolah telah berada pada jenjang Pendidikan Kesetaraan. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan partisipasi sebesar 0,17%. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia 7 - 18 tahun yang putus sekolah semakin memiliki kesadaran untuk mengenyam pendidikan di sekolah kesetaraan.

Penilaian kompetensi literasi dan numerasi ini dilakukan pada saat Assesment Kompetensi Minimum (APM) dilaksanakan. APM ini merupakan bagian dari kebijakan merdeka belajar yang dirancang sebagai pengganti dari Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional. Dengan APM ini diharapkan evalusi pendidikan tidak lagi dilaksanakan terhadap individu siswa, akan tetapi evaluasi dilakukan terhadap sistem pendidikan pada sekolah tersebut. APM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Kompetensi Literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah seharihari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Untuk persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi dan kompetensi numerasi yang memenuhi standar kompetensi masih belum ada datanya, karena penilaian yang dilakukan 2021 yang lalu

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APS ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. APS SD/MI/Paket A merupakan proporsi jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Sijunjung. Untuk tahun 2021 berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 93,39% penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,60%. APS SMP/MTs/Paket B merupakan proporsi jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang masih bersekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Sijunjung. Untuk tahun 2021 berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 86,82% penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3.16%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK ini dihitung dengan tujuan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APK PAUD di Kabupaten Sijunjung mencapai angka 72,37%, yang artinya sebanyak 72,32% penduduk usia 3-6 tahun terdaftar dalam satuan pendidikan PAUD. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kecuali tahun 2020. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 terjadi Pandemi COVID-19 dan satuan pendidikan ditutup dan

diganti dengan pendidikan jarak jauh. Hal ini menyebabkan banyak orang tua yang tidak mendaftarkan anaknya pada tahun ajaran 2020/2021 pada jenjang pendidikan PAUD. APK SD/MI/Paket A menunjukkan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APK SD/MI/Paket A untuk tahun 2021 adalah 102,46%, yang artinya sebanyak 2,46% murid SD/MI/Paket A bukan merupakan penduduk usia 7-12 tahun atau murid tersebut bersekolah belum cukup umur atau melebihi umur yang seharusnya. Nilai APK yang melebihi 100% ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sijunjung mampu menampung peserta didik SD/MI/Paket A melebihi yang seharusnya. Jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2021 ini mampu menekan penduduk usia lebih kecil dari 7 tahun atau lebih besar dari 12 tahun untuk bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. APK SMP/MTs/Paket B menunjukkan proporsi jumlah murid SD/MI/Paket A dibandingkan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 caaian APK SM/MTs/Paket B adalah 98,51%, yang artinya 98,51% SMP/MTs/Paket B merupakan penduduk usia 13-15 tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya jumlah peserta didik SMP/MTs/Paket B melebihi jumlah penduduk usia 13-15 tahun, artinya ada penduduk yang bersekolah di SMP/MTs/Paket B yang lebih kecil dari 13 tahun atau lebih besar dari 15 tahun.

Asesmen merupakan salah satu proses penting dalam pendidikan yang berguna untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Proses asesmen sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pada tahun 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan kebijakan Asesmen Nasional yang dirancang sebagai pengganti Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Asesmen Nasional bertujuan untuk memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil melalui serangkaian tahapan. Hasil dari Asesmen Nasional tidak digunakan untuk melakukan pemeringkatan sekolah, melainkan untuk perbaikan kualitas belajar di sekolah-sekolah yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan hasil belajar murid Asesmen Nasional tahun 2021 terbagi menjadi 3 (tiga) instrumen, yaitu: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar. Asesmen ini baru dilaksanakan pada tahun 2021 dan hasilnya masih belum ada sampai saat ini.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya. Dalam kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator berkurangnya prevalensi balita stunting, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal, Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kesehatan, Penurunan persentase kematian akibat penyakit menular, persentase terkendalinya penyakit tidak menular. Selain pemenuhan indikator di atas, derajat kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh rasio daya tampung RSUD dan status akreditasi RSUD.

Prevalensi balita stunting di Kabuaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan capaian tahun 2017 adalah sebesar 11,1% yang kemudian meningkat tajam pada

tahun 2018 pada angka 27,4% yang kemudian turun ada tahun 2019 ke angka 22,4%, namun cenderung meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 pada angka 23,4% dan angka 30,1%. Cenderung meningkatnya prevalensi balita stunting dua tahun terakhir belum optimalnya pelaksanaan aksi konvergensi stunting yang menjadi tugas dan fungsi urusan pemerintahan bidang kesehatan karena pembatasan masyarakat dalam berkumpul terkait dengan penerapan protokol covid-19 selama masa pandemi pada tahun 2021.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup selama lima tahun dari 2017-2021 memiliki tren cendrung meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kematian ibu adalah 141 orang per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah ibu sebanyak 6 orang. Pada tahun 2018 angka kematian ibu dilaporkan sebanyak 113 orang per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah ibu sebanyak 5 orang. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup yang dilaporkan, yaitu 143 orang dengan jumlah ibu sebanyak 6 orang. Angka ini terus meningkat pada tahun 2020 dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebanyak 170 orang dengan jumlah ibu sebanyak 7 orang. Pada tahun 2021 angka kematian ibu dapat kembali ditekan dengan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup 146,7 orang dengan jumlah ibu sebanyak 6 orang. Terdapat perbedaan jumlah antara angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu sesungguhnya, hal ini disebabkan jumlah kelahiran hidup yang terjadi di Kabupaten Sijunjung selama setahun tidak pernah mencapai angka 100.000 jiwa.

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup (AKB) selama lima tahun, yaitu tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan tren cendrung menurun. Pada tahun 2017 terjadi 19 kematian bayi dalam 1000 kelahiran hidup yang terus menurun hingga pada tahun 2019 hanya terjadi 6,2 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan terus menerus hingga tahun 2021 terjadi 17,12 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.

Angka kematian neonatal per 1000 kelhiran hidup selama lima tahun, yaitu 2017-2021 mengalami tren yang tetap dengan fluktuasi penurunan pada tahun 2018-2020. pada tahun 2017 terjadi kematian 9 orang neonatal per 1000 kelahiran hidup dan tahun 2021 terjadi kematian 9,2 neonatal per 1000 kelahiran hidup. Kematian neonatal menurun ada tahun 2018 sebanyak 6,79 neonatal namun terus naik samai tahun 2020 terjadi 7,8 kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup.

Fluktuasi capaian Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Neonatal yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, menunjukan belum konsistennya palayanan kesehatan, terjadinya penurunan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan, bayi baik dalam kandungan maupun pasca melahirkan. Disamping itu, tingginya angka kematian ibu dan bayi karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melahirkan melalui non medis dan ditambah keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan relatif terbatas.

Prevalensi balita gizi buruk yang terjadi selama lima tahun, yaitu tahun 2017-2021 memiliki tren menurun setia tahunnya. Pada tahun 2017 terdapat 18,9% balita dengan status gizi buruk, namun berhasil terus ditekan hingga 0,89% ada tahun 2021. penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2021, dimana terjadi penurunan 14,6% balita dengan status gizi buruk.

Pemenuhan SPM kesehatan yang berjumlah 12 indikator memiliki capaian yang berfluktuasi setiap tahunnya. Cakupan layanan kesehatan

ibu hamil baru dilakukan penghitungannya sejak tahun 2018 dengan capaian 81,5% yang terus naik sampai tahun 2019 dengan capaian pemenuhan sebanyak 90%, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 dengan cakupan pemenuhan 72,76%. berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa hanya 72,76% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar pada tahun 2021. Angka ini sangat jauh sekali dari target SPM Kesehatan, yaitu 100%. Cakupan layanan kesehatan bayi sesuai standar juga baru dilakukan penghitungannya sejak tahun 2018 dengan tren meningkat selama tiga tahun (2018-2020) namun menurun pada tahun 2021. Pada tahun 2018 terdapat 81,5% bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar namun menurun menjadi 76,83% pada tahun 2021. Angka ini sangat jauh sekali dari target SPM Kesehatan, yaitu 100%.

Cakupan layanan kesehatan balita selama empat tahun memiliki tren meningkat dari tahun 2018-2021, pada tahun 2018 terdapat 67,6% balita yang mendaatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dan ada tahun 2021 terdapat 78,92% balita yang memperoleh layanan kesehatan balita sesuai standar. Angka ini sangat jauh sekali dari target SPM Kesehatan, yaitu 100%. Cakupan layanan anak usia pendidikan dasar mengalami tren penurunan setiap tahunnya selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2018-2021. Pada tahun 2018 persentase anak usia sekolah dasar yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar adalah 99%, namun capaian ini terus menurun hingga pada tahun 2021 hanya 77,61% anak usia sekolah dasar yang memperoleh layanan kesehatan sesuai standar. Angka ini sangat jauh sekali dari target SPM Kesehatan, yaitu 100%.

Cakupan layanan kesehatan orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan selama empat tahun terakhir, mulai tahun 2018-2021 memiliki tren meningkat. Pada tahun 2018 terdapat 65% orang usia 15-29 tahun yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan pada tahun 2021 terdapat 80,24% yang memperoleh skrining kesehatan sesuai standar. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2020, dimana cakupan pelayanan sudah mendekati target SPM, yaitu sebanyak 90%. Cakupan layanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas yang memperoleh skrining kesehatan selama empat tahun yaitu tahun 2018-2021 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2018 terdapat 55,64% warga negara usia 60 ke atas yang memeroleh skrining kesehatan. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2020 seluruh warga negara usia 60 tahun ke atas yang memperoleh skrining kesehatan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan dimana hanya 67,13% warga negara usia 60 tahun ke atas yang memperoleh skrining kesehatan. Angka ini sangat jauh sekali dari target SPM Kesehatan, yaitu 100%.

Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi selama lima tahun, yaitu tahun 2017-2021 memiliki capaian yang berfluktuasi. Ada tahun 2018 hanya 15,82 penderita hipertensi yang memeroleh layanan sesuai standar dan ada tahun 2019 seluruh penderita hipertensi yang memperoleh layanan sesuai standar. Angka ini turun lagi ada tahun 2020, dimana hanya 63,69 penderita hipertensi yang memperoleh layanan sesuai standar dan tahun 2020 kembali seluruh penderita hipertensi memperoleh layanan sesuai standar. Namun ada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan, dimana hanya 54,64% pemderita hipertensi yang memperoleh layanan sesuai standar. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus selama emat tahun mulai tahun 2018-2021 berfluktuasi namun sudah hampir memenuhi target SPM yaitu 100%, cakupan terendah adalah

tahun 2019 dimana hanya 67,44% penderita diabetes melitus yang memperoleh layanan sesuai standar.

Untuk cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) selama lima tahun, yitu tahun 2017-2021 hampir memenuhi target SPM Kesehatan setia tahunnya, kecuali pada tahun 2019 cakupan pelayanan kesehatan enderita TBC hanya terpenuhi 90% dan ODGJ hanya terpenuhi 85%. dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa emenuhin SPM Kesehatan di Kabuaten Sijunjung masih banyak yang jauh dari angka 100%.

Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular selama emapat tahun, yaitu tahun 2018-2021 berhasil terus ditingkatkan. Ada tahun 2018 penurunan kematian akibat penyakit menular dibandingkan tahun 2017 adalah 2,27% dan pada tahun 2021 berhasil menurunkan kematian akibat penyakit menular sebesar 51% dibandingkan tahun 2020.

Persentase terkendalinya penyakit tidak menular selama empat tahun, yaitu tahun 2018-2021 memiliki tren meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2020. pada tahun 2018 capaian pengendalian enyakit tidak menular adalah 60% dan pada tahun 2021 mencaai 99,8%, walaupun ada tahun 2019 terjadi penurunan hingga angka 55%.

Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk memiliki fluktuasi sesuai dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung. Jumlah tempat tidur di RSUD yang tersedia tahun 207-2018 adalah sebanyak 101 temat tidur dan tahun 2019-2021 meningkat menjadi 114 tempat tidur. Akreditasi RSUD dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 masih berstatus perdana dan meningkat mulai tahun 2019 menjadi utama, sampai tahun 2021 ini.

Fluktuasi capaian AKB, AKN dan AKI yang terjadi dalam 5 tahun terakhir ini, menunjukan belum konsistennya palayanan kesehatan, terjadinya penurunan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan, bayi baik dalam kandungan maupun pasca melahirkan. Disamping itu, tingginya angka kematian ibu dan bayi karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melahirkan melalui non medis dan ditambah keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan relatif terbatas.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kesehatan tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021

	_ 						
No.	Indilator Vinceio	Cat			Tahun		
NO.	Indikator Kinerja	Sat	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Prevalensi Balita Stunting	%	11,1	27,4	22,4	23,40	30,1
2.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	141	113	143	170	146,7
3.	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	%	19	15,84	6,2	15,3	17,12
4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	9	6,79	7,6	7,8	9,2
5.	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	18,9	14,65	16,06	15,5	0,89
6.	Cakupan Layanan Kese-hatan Ibu Hamil	%	n.a	82,97	71,47	90	72,76
7.	Cakupan Layanan Kese-hatan Bayi sesuai Standar	%	n.a	81,5	84,59	90	76,83
8.	Cakupan Layanan Kese-hatan Balita sesuai Standar	%	n.a	67,6	63,35	90	78,92
9.	Cakupan Layanan Kese-hatan Anak Usia Pendidikan Dasar	%	n.a	99	99	80	77,61

N.	Indilator Kinoria	0-4			Tahun		
No.	Indikator Kinerja	Sat	2017	2018	2019	2020	2021
	sesuai Standar						
10.	Cakupan Layanan Kese-hatan orang usia 15-29 tahun sesuai Standar	%	n.a	65	65,7	90	80,24
11.	Cakupan Layanan Kese-hatan warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	n.a	55,64	84,3	100	67,13
12.	Cakupan Layanan Kese-hatan penderita Hipertensi sesuai Standar	%	15,82	100	63,69	100	54,64
13.	Cakupan Layanan Kese-hatan penderita Diabetes Melitus sesuai Standar	%	n.a	55,64	84,3	100	67,13
14.	Cakupan Layanan Kese-hatan penderita TBC sesuai Standar	%	100	100	100	90	100
15.	Cakupan Layanan Kese-hatan penderita ODGJ sesuai Standar	%	100	100	100	85	100
16.	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular	%	n.a	2,27	3	9	51
17.	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	%	n.a	60	64	55	99,8
18.	Rasio daya tampung RSUDterhadap jumlah penduduk	%	0,44	0,43	0,48	0,47	0,48
19.	Status Akreditasi RSUD	Sta- tus	Per dana	Per dana	utama	utama	utama

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikur dengan 7 (tujuh) indikator yaitu: 1). Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten; 2). Rasio layanan irigasi; 3). Cakupan layanan air minum; 4). Cakupan sanitasi yang layak; 5). Rasio kepatuhan IMB; 6). Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat; 7). Persentase ketaatan terhadap RTRW.

Jalan merupakan urat nadi perekonomian, karena perekonomia masyarakat akan sangat ditentukan oleh seberapa lancar dan mudahnya arus barang dan jasa antar daerah (accessibility). Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan masih merupakan prioritas pembangunan bidang PUPR setiap tahunnya. Untuk ini dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga lebih dari 50 persen anggaran pembangunan di Dinas PUPR dialokasikan untuk kegiatan sektor jalan dan jembatan. Dari data yang ada dengan pembangunan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, Pemerintah masih kekurangan anggaran untuk sektor ini, sehingga sampai akhir tahun RPJMD 2016 – 2021, kondisi jalan dengan kondisi mantap 74,73 persen, artinya dari 829,42 KM (SK 2018) kondisi jalan Kabupaten di Kabupaten Sijunjung terdapat ± 209,59 KM jalan Kabupaten yang kondisinya kurang baik (tidak mantap). Untuk mencapai target pembangunan dari sektor jalan ini kedepan tentu diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar setiap tahunnya.

Sedangkan di sektor sumber daya air, dengan keterbatasan anggaran APBD setiap tahunnya, Pemerintah kabupaten masih mengandalkan alokasi anggaran dari Dana Alokasi Khusus. Dari data dapat dilihat bahwa rasio layanan irigasi pada lahan budidaya pertanian khususnya

persawahan sampai akhir tahun 2021 masih pada angka rasio 41,87. Artinya hampir setengah luas budidaya pertanian yang belum dilayani oleh jaringan irigasi. Disamping dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi setiap tahunnya, kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis kabupaten yang berbukit sehingga memerlukan bangunan pengantar (lining saluran) yang panjang dari sumber air ke lahan budidaya/persawahan.

Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan Ruang merupakan isu straregis dalam pembangunan wilayah dikarenakan semua kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mengacu kepada Rencana Tata Ruang dan menjadi salah satu jawaban dari persoalan wilayah kabupaten yang semakin kompleks baik ekonomi maupun lingkungan. Kabupaten Sijunjung sudah memiliki Dokumen Rencana Tata Ruang Daerah yang tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011- 2031. Seiring dengan perubahan dan kondisi daerah, maka RTRW ini harus disesuaikan (direvisi) dan sampai saat ini masih dalam proses pembahasan /persetujuan dengan pihak-pihak terkait.

Untuk mengukur Ketaatan terhadap RTRW yang merupakan kesesuaian antara RTRW dengan struktur ruang di lapangan didapat dari hasil monitoring dan pengawasan pelaksanaan RTRW. Data ini belum pernah diukur sebelumnya, karena untuk mendapatkan data awal harus dilakukan dengan cara menganalisis citra satelit (foto udara) terbaru Kabupaten Sijunjung untuk pemanfaatan ruangnya dibandingkan dengan rencana pola ruang yang sudah ditetapkan dalam RTRW. Oleh karena itu data ini belum dapat ditampilkan kedalam matrik tersebut diatas.

Disektor penataan bangunan, salah satu upaya untuk mewujudkan tertib pembangunan dan meningkatkan keandalan bangunan gedung (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan), maka seluruh kegiatan pembangunan bangunan baik rumah, toko, bangunan pemerintah dan swasta harus memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Izin Mendirikan Bangunan ini adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk bangunan gedung kepada pemilik bangunan gedung untuk kegiatan meliputi : pembangunan bangunan gedung baru atau rehabilitasi/renovasi bangunan gedung yang meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan dan pelestarian/pemugaran.

Dari data yang ada pengurusan IMB oleh masyarakat dan swasta dari tahun ketahun ada peningkatan yang cukup baik, namun dari sisi angka keseluruhan Ratio Kepatuhan IMB per satuan bangunan yang merupakan perbandingan jumlah bangunan yang memiliki IMB dengan Jumlah bangunan keseluruhan di Kabupaten Sijunjung sampai akhir tahun 2021 masih 9,10 persen Ini berarti masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB. Bangunan yang tidak ber IMB ini berada pada rumah atau bangunan yang dibangun oleh masyarakat yang tersebar di Kecamatan dan Nagari se-Kabupaten Sijunjung yang sudah existing sebelum regulasi IMB diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Ketaatan terhadap pengurusan IMB ini oleh masyarakat memang masih kurang, karena pengawasan dan penegakkan hukum atas pendirian bangunan yang tidak ber IMB oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga masih relatif sangat minim. Oleh karena ini tantangan kedepan supaya seluruh bangunan yang akan dan sedang dibangun perlu diawasi oleh pihak-pihak terkait dan bagi yang melanggar diberikan sanksi yang tegas, sehingga ada efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar dan menjadi perhatian bagi yang lain untuk yang datang.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2021

3.7	T 111		•	Tahun		
No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	53,33	55,16	53,33	66,54	74,73
2.	Rasio layanan irigasi	54,23	52,32	59,47	58,58	41,87
3.	Cakupan layanan air minum	63,57	64,24	65,15	67,61	68,32
4.	Cakupan sanitasi yang layak	38,66	40,61	42,84	44,17	45,52
5.	Rasio kepatuhan IMB	8,34	8,80	9,10	9,10	9,10
6.	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	-	4,28	4,28	4,28	4,28
7.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
8.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	24,50	32,46	34,86	38,94	66,54
9.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,62	0,62	0,79	0,79	0,19
10.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	55,46	57,34	58,6	60,73	60,92
11.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	-	2,30	2,30	2,30	2,30
12.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	7,99	8,34	8,80	9,10	9,10
13.	Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	-	-
14.	Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	-	50	100	50	100

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan Dinas Perkim-LH Kabupaten Sijunjung, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kemampuan pemerintah dalam menyediaan rumah layak huni, lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU serta tersedianya rumah layak huni bagi masyakarat merupakan salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini terlihat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu diukur melalui indikator rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga.

Nilai dari indikator kinerja tersebut, dari tahun 2017 secara bertahap mengalami peningkatan terakhir pada tahun 2021 telah mencapai angka 78,70 persen, artinya akses penduduk terhadap rumah layak semakin baik. Namun rehabilitasi perumahan layak huni untuk konban bencana sampai tahun 2021 belum tercapai. Kondisi capaian indikator ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah agar kedepannya didukung dengan program yang jelas dan anggaran yang cukup, mengingat Kabupaten Sijunjung daerah rawan bencana banjir, tanah longsor dan kebakaran. Semntara itu, indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang telah mencapai angka 100 persen.

Perkembangan capaian indikator pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini selama tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.32
Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

		<u>-jj</u>	<u> </u>			
No	Indikator			Tahun		
NO	indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	63,19	64,67	62,41	77,03	78,70
2.	Persentase rehabilitasi rumah layak huni korban bencana layak huni korban bencana	0	0	0	0	0
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman didukung dengan PSU	n.a	96,77	96,92	98,47	100

Sumber: Dinas Perkim & LH Kabupaten Sijunjung 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2017-2021 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian kinerja masing-masing indikator sudah sesuai dengan target SPM.

Sedangkan indikator SPM dibidang penanggulangan bencana tahun 2017-2019 belum dapat diukur karena belum termasuk dalam indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Namun seiring berjalan waktu karena kebencanaan merupakan isu nasional, maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga kebencanaan menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Indeks resiko bencana Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sama dengan tahun 2021 yaitu 107,2 poin, nilai ini tergolong pada risiko bencana sedang.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.33
Perkembangan Urusan Pemerintahan Bidang Ketemtraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017 – 2021

BT -	T., 3254			Tahun		
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks risiko bencana	n.a	n.a	n.a	107.2	106,0
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
3.	Persentase Perda/Perkada yang ditegakan	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	n.a	n.a	n.a	30.500	161.457
5.	Jumlah penduduk yang mem- peroleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	n.a	n.a	n.a	30.500	161.457

BT -	T., 4114			Tahun		
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Jumlah penduduk yang mem- peroleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	n.a	n.a	n.a	30.550	127
7.	Jumlah pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	110	84	91	66	39
8.	Persentase pelayanan penye- lamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	100	100	100	100
9.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) penangganan keba-karan	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Sijunjung dan BPBD Kabupaten Sijunjung, 2022

6. Urusan Wajib Sosial

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang sosial Tahun 2017-2021 yang diukur berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator kinerja persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial tercapai pada tahun 2021 sebesar 29,34% dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial tercapai sebesar 2,7%. Hal ini disebabkan karena cenderung meningkatnya jumlah PPKS akibat melemahnya ekonomi masyarakat dan diikuti keterbatasan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani banyaknya PPKS di Kabupaten Sijunjung. Perkembangan indikator urusan wajib sosial yang sudah mencapai 100 persen yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kenutuhan dasar. Perkembangan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Perkembangan Indikator Urusan Wajib Sosial Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021

No	Indikator			Tahun				
110	Indikatoi	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	56,7	61,88	54,38	55,21	29,34		
2.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		8,51	7,87	9,23	2,7		
3.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	100	100	100		

Sumber: Dinas Sosial, PPr dan PA Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Capaian indikator kinerja pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja secara umum dapat dilihat dari: 1) perentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja; 2) Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi; 3) tingkat produktifitas tenaga kerja, 4). Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak; dan 5). Persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

Capaian indikator persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja pada tahun 2021 sebesar 83,33 persen dan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak di Kabupaten Sijunjung sudah mencapai 100 %. Pada indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi mengalami kenaikan dari tahun 2020 hanya 23,43 persen meningkat menjadi 41,25 persen di tahun 2021, dengan meningkatnya kepemilikan sertifikat kompetensi tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Sijunjung maka dapat dikatakan daya saing tenaga kerja Kabupaten Sijunjung meningkat sehingga diharapkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu yang berasal dari Sijunjung juga meningkat.

Meningkatnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetisi yang ditunjang juga dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tidak berkorelasi positif dengan indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan menurun menjadi 35,56 persen di tahun 2021 menjadi 27,40 persen di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sulitanya lapangan pekerja di masa pandemi dan ditambah lagi tingkat produktifitas tenaga kerja Kabupaten Sijunjung tergolong masih rendah, terlihat di tahun 2020 nilainya adalah 0,40 yang menandakan bahwa produksi yang dihasilkan oleh industri kecil di Kabupaten Sijunjung masih rendah, karena tingkat produktivitas tenaga kerja yang cenderung rendah dapat mengakibatkan menurunnya jumlah produksi dan hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan, usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin.

Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga
Kerja Tahun 2017-2021

No	Indikator			Tahun		
NO	Illulkatoi		2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kepada rencana tenaga kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	83,33
2.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	n.a	n.a	n.a	23,43	41,25
3.	Tingkat produktifitas tenaga kerja	n.a	n.a	n.a	n.a	0,40
4.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	n.a	n.a	n.a	100	100
5.	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	n.a	n.a	35,56	27,40	27,40

Sumber: Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung, 2022

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017-2021 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen dan dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, IDG menjadi alat ukur untuk melihat kesetaraan gender disuatu Negara/wilayah. Jika IDG mendekati angka 100, maka semakin tinggi kesetaraan gender dalam proses pembangunan. Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung tahun 2019 meningkatkan sebesar 59,96 dibanding tahun 2017 sebesar 56,84. Namun pada tahun 2020 capaian IDG sedikit

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Disisi lain, meningkatnya pertumbuhan IDG Kabupaten Sijunjung belum diikuti peningkatan posisi relatifnya dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan kesetaraan gender Kabupaten Sijunjung masih tertinggal dengan daerah lain dan capaiannya dibawah target SDG's.

Dilihat dari indikator persentase ARG terhadap APBD tahun 2020 dan tahun 2021 nilainya masih sama yang artinya belum ada peningkatan pengalokasian anggaran responsif gender. Indikator rasio kekerasan terhadap perempuan nilainya berfluktuatif. Tahun 2017 sebesar 0.001 meningkat menjadi 0.003 pada tahun 2020, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni 3.4 per 100.000 penduduk. Hal ini memperlihatkan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan cukup tinggi. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani sudah mencapai 100% yang artinya seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan sudah tertangani dengan baik. Capaian indikator kategori Kabupaten Layak Anak menunjukkan perkembangan yang cukup singnifikan. Pada tahun 2021 Kabupaten Sijunjung sudah mendapat penghargaan Kabupaten Layak Anak untuk Kategori Pratama yang artinya pemerintah daerah sudah berkomitmen tinggi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung
Tahun 2017-2021

	* 414 A			Tahun				
No	No Indikator		2018	2019	2020	2021		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin	56,84	55,47	59,96	59,93	60,46		
2.	Persentase ARG terhadap APBD	n.a	n.a	n.a	0,001	0,001		
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	0,001	0,001	0,001	0,003	3,4		
4.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	100	100	100	100	100		
5.	Kategori Kabupaten Layak Anak	n.a	n.a	n.a	n.a	Pratama		

Sumber : Dinas Sosial, PPrPA Kabupaten Sijunjung, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan masvarakat setempat. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat. Berdasarkan data yang ada Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sijunjung 81,45 tahun 2017 terus meningkat dan tercapai target pada RPJMD 80,00 dengan persentase 88,02 di tahun 2021. Untuk indeks ketahanan pangan tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 dari 77,85 menjadi 78,88 dan persentase ketersediaan pangan sebesar 15 persen pada tahun 2021. Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, sebagai berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Tahun
2017-2021

N-	Indikator	Tahun							
No	indikator	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Indeks ketahanan pangan	n.a	73,36	n.a	77,85	78,88			
2	Skor Pola Pangan Harapan	81,45	83,60	91,70	95,90	88,02			
3	Persentase ketersediaan pan-gan	n.a	n.a	n.a	15	15			

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tanah adalah aset masyarakat, aset rakyat, aset bangsa. Manajemen aset tanah sangat penting dirasakan bagi mereka yang berpendapatan sebagai pengusaha daripada sebagai pegawai atau buruh. Begitu pentingnya manajemen aset tanah, sehingga pada awalnya Undang-undang Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dalam konsideran) telah mengamanatkan bahwa dengan diundangkanya UUPA, Pemerintah/Negara berkewajiban memimpin penggunaan tanah dan mengatur hak atas tanah.

Untuk pengamanan serta meningkatkan tertib administrasi pertanahan khususnya yang berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah, saat ini terus diupayakan secara bertahap dan periodik melaksanakan pensertifikatan tanah dan penyelesaian sengketa tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Selama periode tahun 2017-2021 tidak ada terjadi konflik pertanahan untuk kepentingan umum dan Pemda, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Tahun 2017-2021

BT -	T., 415-4	Tahun					
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	0	0	0	0	0	
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	0	0	0	0	
3.	Persentase penanganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	0	0	0	0	0	

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu faktor akibat dari aktifitas kegiatan manusia serta kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang disebabkan oleh proses alami bumi. Akan tetapi untuk Kabupaten Sijunjung permasalahan lingkungan hidup tampaknya lebih banyak disebabkan oleh aktifitas kegiatan manusia terutama kegiatan pertambangan seperti masih terjadinya penambangan emas. Kegiatan penambangan emas tersebut lebih banyak dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai (DAS), tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan terutama penggunaan merkuri pada tambang emas yang akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia secara tidak langsung.

Dengan semakin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan masyarakat pada daerah aliran sungai maupun pada lahan

kering lainnya dalam beberapa tahun terakhir dan terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi yang demikian sudah tentu juga membawa dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut agar tidak meluasnya kerusakan lingkungan, pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan pembinaan secara kontinue kepada masyarakat. Disamping itu, Pemerintah Daerah juga tetap melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya.

Selain itu, penanganan sampah dann pengurangan sampah juga merupakan isu lingkungan yang perlu mendapat perhatian. Namun persentase penangganan sampah hingga Tahun 2021 sebesar 15,57 persen penanganan sampah dann pengurangan sampah, pengurangan sampah sebesar 17,86 persen. Belum optimalnya penanganan sampah dann pengurangan sampah disebabkan karena terbatas sumber daya daerah (fiskal, SDM dan sarpras) dan geografis daerah cukup luas. Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tahun 2017-2021 menunjukkan capaian kinerja yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.39
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan
Hidup Tahun 2017-2021

NT -	To dileate a			Tahun		
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kualitas ling-kungan hidup	75.00	64,92	78,13	75,-7	73,11
2.	Indeks kualitas air	14,10	17,03	23,63	30,41	54,62
3.	Indek Kualitas Udara	-	91,25	86,93	-	94,35
4	Indeks tutupan lahan	-	78,02	64,82	64,46	65,58
5	Persentase penanganan sampah	-	-	-	15,65	15,57
6	Persentase pengurangan sampah	-	-	-	14,76	17,86

Sumber: Dinas Perkim & LH Kabupaten Sijunjung, 2022

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penduduk merupakan salah satu modal utama pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang serius agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil menjadi penting dalam perencanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2004 tentang Sistim Informasi Kependudukan (SIAK). Kemudian untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistim tesebut maka pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Namun demikian, kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil periode 2017-2021 belum optimal.

Capaian rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el Tahun 2021 mencapai 94,36 persen. Sedangkan untuk persentase anak usia 01-17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 30,61 persen. Penerbitan KIA berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Namun di Kabupaten Sijunjung perekaman KIA pada tahun 2017 belum dilakukan. Launching KIA di Kabupaten Sijunjung baru

dilaksanakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 total kepemilikan KIA sebanyak 9.824 anak yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan se Kabupaten Sijunjung dengan total wajib KIA sebanyak 72.825 anak. Wajib KIA pada anak meningkat di tahun 2020 sebanyak 725 anak dengan total kepemilikan 18.294 anak. Di tahun 2021 wajib KIA meningkat sebanyak 126 anak dengan total kepemilikan KIA sebanyak 22.473 anak.

Begitu pula untuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan Perangkat Daerah pada tahun 2017 juga belum dilakukan. Pada tahun 2018 telah dilakukan PKS pemanfaatan data dengan 25 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2019 PKS pemanfaatan data masih dengan 25 Perangkat Daerah yang ada di kabupaten Sijunjung. Tahun 2020 Berdasarkan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan, seluruh PKS yang tidak sesuai dengan permendagri tsb diatas harus dibatalkan dan diproses dari awal sesuai dengan mekanisme dalam permendagri. Dengan demikian PKS dengan 25 OPD dibatalkan dan pada akhir tahun 2020 diajukan rekomendasi pemberian hak akses untuk 9 Perangkat Daerah ke Direktorat Jenderal Dukcapil dan sampai akhir tahun 2020 hasilnya belum keluar. Dari 9 Perangkat Daerah yang diajukan rekomendasi pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2020, 8 Perangkat Daerah keluar persetujuannya dari Direktorat Jenderal Dukcapil. Perangkat Daerah antara lain: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Dagprinkop UKM, Dinas PMPTSP, DPMN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan RSUD

Pada tahun 2021 kembali diajukan rekomendasi pemberian hak akses untuk 5 Perangkat Daerah lagi namun sampai akhir tahun 2021 belum keluar rekomendasinya dari Direktorat Jenderal Dukcapil. Perangkat Daerah yang diajukan antara lain: Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, BKPSDM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2017-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40 Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021

NT -	T	Tahun							
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Rasio Penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	94.10	97.12	94.31	92.39	94.36			
2.	Persentase anak usia 01- 17 tahun yang memiliki KIA	n.a	n.a	13.49	24.87	30.61			
3.	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan	n.a	25	25	n.a	8			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijunjung , 2022

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari capaian indikator-indikator yang digunakan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan

karena kesadaran masyarakat dalam berpastisipasi dalam membangun nagari/desa cukup tinggi. Kondisi ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan sangat kuat. Sehingga berimplikasi cenderung meningkatnya capaian indeks desa membangun dua tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 tercapai senilai 0,7024 dan tahun 2021 meningkat menjadi 0,7462. Potensi tersebut, jika dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Tahun 2017-2021, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun							
ИО	indikator	2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Indeks Desa Membangun	n.a	n.a	0,6985	0,7024	0,7462			
2.	Tingkat penurunan sengketa adat	n.a	n.a	n.a	21	16			
3.	Persentase peningkatan status Nagari/Desa mandiri	n.a	0	0	2	6,5			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, 2022

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keberhasilan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berhasil dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Keluarga, Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR), Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), dan Persentase Kebutuhan ber-KB tidak terenuhi.

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga melalui ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga yang menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Indeks Pembangunan Keluarga ini merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks ini digunakan untuk mengkalsifikasi status pembangunan keluarga suatu wilayah, apakah tangguh, berkembang atau rentan. Capaian indeks pembangunan keluarga hingga tahun 2021 sebesar 53,69. Angka tersebut, menunjukkan status pembangunan keluarga di Kabupaten Sijunjung telah berkembang sesuai dengan target nasional.

Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate (TFR) hingga tahun 2021 mengalami penurunan ke angka 2,06. Artinya, rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Sijunung adalah 2,06 anak menurun bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 2,95. TFR tahun 2017-2020 masih merujuk kepada angka TFR rovinsi Sumatera Barat, namun untuk tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB bekerjasama dengan BS telah melakukan penghitungan sendiri untuk level Kabupaten Sijunjung dan memperoleh hasil angka TFR sebesar 2,06. Secara rata-rata, capaian angka TFR dari tahun 2017 - 2021 memiliki kencenderungan menurun dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 sebesar 23,44 persen.

Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) adalah persentase pemakaian kontrasesi modern oleh Pasangan Usia Subur. Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2017 capaian pemakaian kontrasepsi modern adalah 73,58 persen dan tahun 2021 dengan capaian pemakaian sebesar 73,85 persen menunjukkan pertumbuhan peningkatan secara rata-rata sebesar 4,6 persen.

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak tepenuhi secara tren dari tahun 2027 - 2021 dari tabel di atas menunjukkan tren menurun, yaitu pada tahun 2017 terdapat 13,5 persen kebutuhan ber-KB yang tidak terenuhi dan ada tahun 2021 terdapat 12,00persen kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Angka ini pada tahun 2018 sempat mengalami capaian terendah, yaitu hanya 10,42persen kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, namun naik signifikan ada tahun 2019 pada angka 14,31persen. asalah satu enyebabnya adalah fenomena pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak keterbatasan ruang gerak, sehingga banyak Pasangan Usia Subur yang tidak terjangkau untuk ber-KB.

Perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-202, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021

		Tahun						
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Indeks Pembangunan Keluarga	n.a	n.a	n.a	n.a	53,69		
2.	Angka Kelahiran Total /Total Fertility Rate	2,9	2,5	2,68	2,95	2,06		
3.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	70,57	74,22	69,09	72,46	73,58		
4.	Persentase Kebutuhan ber-KB Tidak Terpenuhi	13,5	10,42	14,31	12,03	12,00		

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sijunjung, 2022

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Untuk mengukur urusan pemerintahan bidang perhubungan terdapat satu indikator yaitu persentase penurunan angka kecelakaan. Tahun 2020 tercatat 6 kasus dan pada tahun 2021 menurun menjadi 5 kasus. Hal ini disebabkan karena masyarakat dalam berkendaaraan mempunyai disiplin cukup tinggi dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan. Perkembangan capaian kinerja urusan pemerintahan bidang perhubungan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan Tahun 2017-2021

			-			
Indikator	Tahun					
Indikator		2018	2019	2020	2021	
Persentase Penurunan angka kecelakaan	n.a	n.a	n.a	6	5	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung, 2022

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan didalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government).

Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Cakupan layanan internet di wilayah Kabupaten Sijunjung sebarannya didominasi oleh jaringan nirkabel dengan suplai bandwith dari BTS (Base Transceiver Station) operator baik GSM maupun CDMA / WCDMA. Secara fisik sebaran BTS sudah hampir merata di setiap wilyah kabupaten Sijunjung terutama lokasi-lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Akan tetapi karena kondisi geografi dan topografi yang berbukit-bukit maka yang menjadi faktor pembatas jangkauan BTS bukan hanya masalah jarak tetapi juga keterhalangan oleh topografi yang berbukit-bukit. Masih banyak lokasi yang sebenarnya jaraknya cukup dekat dengan BTS tetapi tidak dapat menerima signal internet.

Nagari-nagari yang belum terjangkau jaringan internet diantaranya adalah di kecamatan Kamang Baru adalah Nagari Lubuk Tarantang, Tanjung Kaliang dan Padang Tarok; Kecamatan Lubuk Tarok adalah Nagari Kampung Dalam dan Silongo; Kecamatan Sijunjung adalah Nagari Paru dan Solok Ambah; Nagari sumpur Kudus adalah Nagari Silantai, Sisawah, Tanjung Labuah dan Unggan kecamatan Sumpur Kudus; dan Kecamatan Tanjung Gadang adalah Nagari Langki, Pulasan dan Sibakur.

Sedangkan perkembangan nilai maturitas SPBE Pemerintah Sijunjung pada 2021 mengalami penurunan Kabupaten Tahun dibandingkan tahun 2020, karena pada tahun 2021 ada perubahan pola penilaian dari pusat baik dari segi kapabilitas proses dan dari segi kapabilitas layanan SPBE. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan domain penilaian dari tahun sebelumnya 3 domaian menjadi 4 domaian, dimana domaian tersebut adalah domaian manajemen SPBE dengan kriteria yaitu; 1) penerapan manajemen SPBE, 2) pelaksanaan audit TIK. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini diantaranya masih kurangnya penerapan manajemen resiko SPBE, manajemen data dan manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE dan belum adanya pelaksanaan Audit TIK serta keterbatasan sumber daya manusia.

Disamping itu, untuk meningkatkan nilai SPBE perlu adanya pembangunan jaringan internet melalui jaringan broadband *fiber optic*. Sehingga terkoneksinya tiap-tiap Perangkat Daerah dalam tranformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar. Sementara itu, ada 3 (tiga) kecamatan yang belaum terjangkau *fiber optic* adalah, Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus dan Lubuk Tarok.

Perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Tahun 2017-2012, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021

	monument dan imormacin	u rum	un 201			
No	Indikator	Tahun				
1.0	1111111111111	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Maturitas SPBE	n.a	1,47	2,04	2,84	1,88
2.	Persentase layanan publik yang	n.a	50	50	50	50
	diselenggarakan secara online dan					
	terintegrasi					

No	Indikator	Tahun					
110	mumator	2017	2018	2019	2020	2021	
3.	Persentase Perangkat Daerah yang	n.a	91,42	91,42	94,28	97,14	
	memiliki akses internet dan terhubung						
	dengan jaringan intra pemerintah						
4.	Persentase masyarakat yang menjadi	n.a	n.a	40	40	66,25	
	sasaran penyebaran informasi publik,						
	mengetahui kebijakan dan program						
	prioritas pemerintah						

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, 2022

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu barometer ekonomi daerah yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan urusan Wajib Koperasi dan UMKM dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi yang berkualitas. Persentase Usaha Mikro dan kecil yang menjadi wirausaha, Persentase koperasi sehat, Persentase peningkatan omset UMKM.

Perkembangan persentase koperasi yang berkualitas lima tahun terakhir tahun 2017-2021 terus meningkat, persentase koperasi yang berkualitas pada tahun 2017 adalah 36,72 persen menjadi 44,3 persen ditahun 2021, dan persentase koperasi sehat juga meningkat dari 15 persen di tahun 2020 meningkat menjadi 40,74 persen. Selanjutnya persentase yang menurun drastis adalah persentase usaha mikro dan kecil yang menjadi wirausaha yaitu 32,01 persen di tahun 2020 menurun menjadi 0,34 persen di tahun 2021, dan persentase peningkatan omset UMKM pada tahun 2020 adalah 4,1 persen menurun menjadi 0,2 persen di tahun 2021, penurunan ini dikarenakan meningkatnya kriteria modal dan omset untuk usaha mikro dan usaha kecil seperti yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Data perkembangan indikator kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021

		Tahun						
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Persentase koperasi yang berkualitas	36,72	47,47	43,26	42,11	44,3		
2.	Persentase Usaha Mikro dan kecil yang menjadi wirausaha	n.a	n.a	n.a	32,01	0,34		
3.	Persentase koperasi sehat	10	10	13	15	40,74		
4.	Persentase peningkatan omset UMKM	n.a	n.a	n.a	4,1	0,2		

Sumber: Dinas Dagperinkop dan UKM Kabupaten Sijunjung, 2022

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Indikator kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 diukur dari persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dan ditahun 2021 meningkat kembali menjadi 14,67 persen dari 11,40 persen di tahun 2020. Peningkatan realisasi PMDN ini sejalan dengan meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sijunjung. Sedangkan untuk peningkatan realisasi investasi PMA selama lima tahun terakhir terus

mengalami penurunan yang signifikan, terlihat ditahun 2021 peningkatan realisasi investasi penanaman modal asing di Kabupaten Sijunjung 0 persen. Penurunan realisasi investasi ini salah satunya dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang belum stabil dikarenakan adanya masa pandemi covid-19 yang melanda dari awal Tahun 2020.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang penanaman modal Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.46
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman
Modal Tahun 2017-2021

N T -	Indikator	Tahun					
No	indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Persentase peningkatan reali-sasi investasi	223,3	72,01	13,90	11,40	14,67	
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	7					
2	Persentase peningkatan reali-sasi investasi	277,41	29,87	19,7	1,9	0	
	Penanaman Modal Asing (PMA)						

Sumber : Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, 2022

Selain indikator-indikator diatas, keberhasilan urusan wajib penanaman modal juga diukur dengan lama proses perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan. Lama proses perizinan selama tahun 2017-2021 telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yaitu paling lambat lima hari keja. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, DPMPTSP Kabupaten Sijunjung melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan.

Evaluasi tersebut dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat dengan melakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan, Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner terhadap masyarakat pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan. Berdasarkan hasil survey capaian Indek Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 meningkat menjadi jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya 83,53 poin, nilai indeks tersebut menunjukan bahwa layanan kinerja DPMPTSP terhadap pelayanan perizinan adalah baik.

Perkembangan lama proses perizinan dan Indek Kepuasan Masyarakat dalam mengurus perizinan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Perkembangan Indikator Lama Proses Perizinan dan Indek Kepuasan
Masyarakat Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

	Indikator	Tahun							
No		2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Lama Prose Perizinan (hari)	5	5	5	5	5			
2	Indek Kepuasan Masyarakat (poin)	76,90	83,14	83,53	83,53	86,71			

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, 2022

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Untuk keberhasilan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan Dan Olahraga dapat diukur dari capaian indikator; 1) Indeks Pembangunan Pemuda; 2) Penumbuhan *millennial entrepreneur dan women entrepreneur*, 3) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri; 4) Tingkat

partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; 5) Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan Provinsi.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dengan penilaian pada lima domain dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan partisipasi kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Hal tersebut yang menjadi dasar menjadikan IPP sebagai indikator urusan wajib kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sijunjung, hanya saja pada tahun 2021 IPP Kabupaten Sijunjung belum dihitung. Selanjutnya sejalan program unggulan Provinsi Sumatera Barat yaitu penumbuhan entrepreneur dan women entrepreneur, penumbuhan indikator tersebut di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sebanyak 5.602 orang dan ditahun 2021 menurun menjadi 5.171 orang. Sejalan dengan penumbuhan entrepreneur menjadikan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Sijunjung juga meningkat, yaitu 5 persen di tahun 2020 menjadi 8,38 persen di tahun 2021. Capaian indikator Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam peningkatan olahraga dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Sijunjung. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung terlihat menurun selama tiga tahun terakir, terlihat 12,27 persen di tahun 2019 menurun menjadi 11,56 persen di tahun 2021. Penurunan tersebut dikarenakan organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan yang aktif di Kabupaten Sijunjung tidak signifikan, sedangkan jumlah pemuda terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perolehan medali oleh atlet Kabupaten Sijunjung di tahun 2021 sebanyak delapan buah, antara lain satu buah medali perak pada ajang balap motor piala Presiden, tiga buah medali diraih pada PON Papua berupa medali emas dari cabang atletik, medali perak dari cabang taekwondo dan medali perunggu dari cabang takraw. Selain itu empat medali disumbangkan oleh atlet berkebutuhan khusus yang bertanding pada Papernas Papua berupa tiga buah medali perak pada cabang olahraga renang, tenis meja, dan bola bocce, serta satu buah medali perunggu pada cabang olahraga atletik. Capaian indikator-indikator urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan
Dan Olah Raga Tahun 2017-2021

	- ·· · -· · · · · · · · · · · · ·									
No	Indikator			Tahun						
146	indikator	2017	2018	2019	2020	2021				
1.	Indeks Pembangunan Pemuda	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a				
2.	Penumbuhan millennial entrepreneur dan women entrepreneur	n.a	n.a	n.a	5.602	5.171				
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	n.a	n.a	n.a	5	8,38				
4.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	n.a	n.a	12,27	11,75	11,56				
5.	Jumlah perolehan medali di even olahraga nasional dan Provinsi	n.a	104	9	33	8				

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung, 2022

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; a) statistik dasar, b) statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut: 1) urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data, karena ditangani secara bersama antara BPS, Perangkat Daerah di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya sering terjadi perbedaan data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data. 2) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. 3) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan per undang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediaannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi telah dilakukan di antaranya; 1) mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku Tupoksi penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data 2) adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masingmasing instansi penyedian data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu. 3) pemahaman peraturan perundangundangan tentang data dan statistik bapik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik.

Urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pola kerjasama selain melibatkan seluruh Perangkat Daerah juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung. Produk yang sudah dikerjasamakan selama ini adalah penyusunan Buku Kabupaten BPS Kabupaten Sijunjung, 2022 dan Buku Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sijunjung. Kedua buku tersebut diatas tersedia dalam versi elektronik / e-Book. Buku Kabupaten BPS Kabupaten Sijunjung, 2022 dan Produk Domestik Regional Bruto tersebut didistribusikan ke seluruh PD dan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sijunjung. Untuk versi digital dapat diunduh dari website Pemerintah Kabupaten Sijunjung (sijunjung.go.id) dan website Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung (sijunjungkab.bps.go.id).

Data statistik yang menjadi urusan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah statistik sektoral. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Terkait statistik sektoral ini, saat ini belum dilakukan pengembangan sistem dan jaringan data yang terintegrasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Tahun 201-20217

		Tahun						
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	n.a	n.a	n.a	n.a	0		
2.	Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka	1	1	1	1	1		
3.	Jumlah Buku Produk Domestik Regional Bruto	1	1	1	1	1		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, 2022

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan pemerintahan bidang persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenagan Kabupaten berkaiatan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antara Perangkat Daerah Kabupaten.

Sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka keamanan informasi dan dokumen menjadi isu krusial. Disinilah peran persandian menjadi sangat penting. Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Fakta sekarang ini, hampir semua transaksi dilakukan melalui media internet, baik urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis maupun yang sifatnya pribadi.

Implementasi yang sudah diterapkan terkait persandian ini dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan adalah penggunaan sertifikat digital. Saat ini memang Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum mengambil kebijakan penggunaan sertifikat digital untuk keseluruhan dokumen. Implementasi sertifikat digital saat ini diantaranya adalah dokumen Laporan Harian Kerja, aplikasi dan dokumen e-planning dan aplikasi dan dokumen monev. Indikator kinerja untuk urusan persandian ini adalah persentase Perangkat Daerah yang menggunakan pengamanan data sistem dengan persandian hingga tahun 2021 tercapai 31%. seperti terlihat perkembangannya pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Tahun 2017-2021

		Tahun					
Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
Persentase Perangkat daerah yang telah	-	10	10	10	31		
menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah							

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung, 2022

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Keberhasilan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dapat dilihat dari persentase seni budaya yang dimanfaatkan, persentase cagar budaya yang dimanfaatkan dan persentase cagar budaya yang dimanfaatkan. Capaian indikator kinerja persentase seni budaya yang dimanfaatkan, persentase cagar budaya yang dimanfaatkan dan persentase cagar budaya yang dilestarikan hingga Tahun 2021 belum optimal, karena capaiannya sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belum terkelolanya pemanfaatan dan pelestarian seni budaya dan cagar budaya secara efektif dan terstruktur akibat terbatasnya sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator urusan pemerintahan bidang kebudayaan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.51
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

		v 414 .			Tahun					
No	Indikator			2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Persentase seni dimanfaatkan	budaya	yang	n.a	n.a	n.a	12,21	18,10		
2.	Persentase cagar dimanfaatkan	budaya	yang	n.a	n.a	n.a	6,40	9,5		
3.	Persentase cagai dilestarikan	budaya	yang	n.a	n.a	n.a	n.a	44,04		

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, 2022

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana definisi perpustakaan adalah sebuah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan perpustakaaan, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan semakin baik dan berkualitasnya layanan perpustakaan di kabupaten Sijunjung, maka akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebuah instrumen pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencaai budaya literasi masyarakat. Ukuran yang menjadi pembentuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini diantaranya rasio ketersediaan perpustakaan, rasio jumlah koleksi perpustakaan serta rasio ketercukupan tenaga perpustakaan. Indek ini baru dilakukan penghitungannya oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2021 dan hasilnya adalah 3,13. Indeks yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa perpustakaan, koleksi perpustakaan dan tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Sijunjung masih belum baik secara kualitas dan kuantitas, sehingga tujuan keberadaan perpustakaan sebagai wahana belajar belum tercapai.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Dimensi utama penilaiannya adalah frekuensi membaca, durasi membaca dan

jumlah buku yang dibaca. Penilaian ini baru dilaksanakan sejak tahun 2020. dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai dari tahun 2020 sebanyak 3,1 poin, yang artinya terjadi peningkatan frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca oleh masyarakat pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
140	Indikatoi	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n.a	n.a	n.a	n.a	3,13
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	n.a	n.a	n.a	58,05	61,15

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, 2022

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyelenggaraan kerasipan yang sesuai dengan prinsi, kaidah, dan standar kearsipan akan memberikan jaminan ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta dapat mendinamiskan sistem kerasipan.

Indikator pembangunan urusan pemerintahan bidang kearsipan tahun 2017-2021 menunjukan cenderung adanya peningkatan setiap tahunnya. Secara umum hal ini disebabkan karena sebelum tahun 2018 belum ada Perangkat Daerah yang mlakukan pengelolaan arsip secara baku. Indeks kepatuhan arsip diukur melalui kegiatan pengawasan kearsipan yang menilai kesesuaian prinsip, serta kaidah dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kerasipan. Tren indeks yang meningkat menunjukkan unit pengelola arsip yang berada di Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari mulai menyelenggarakan kearsipannya sesuai kaidah dan standar kearsipan. Kecilnya peningkatan nilai indeks dari tahun ke tahun disebabkan keterbatasan Perangkat Daerah dalam membina penyelenggaraan kearsipan di setia unit kerasian yang ada, termasuk keterbatasan SDM pengelolaam kerasipan akibat mutasi pegawai.

Persentase tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya, namun capaian masih sangat rendah. Untuk tahun 2021 menunjukkan bahwa ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas adalah 57,14 persen. Hal ini sejalan dengan indeks kepatuhan arsip yang menunjukkan bahwa pengelolaan kearsipan di Kabupaten Sijunjung masih rendah. Pengelolaan arsip dinamis dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan kearsipan Kabupaten Sijunjung 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
Tahun 2017-2021

27		Tahun					
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Indeks Kepatuhan Arsip Daerah	45,1	46,21	48,5	51,3	53,84	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	37,14	42,86	48,57	54,28	57,14	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan yaitu: 1). Produksi perikanan budidaya; 2). Jumlah usaha perikanan dengan agribisnis yang terintegrasi; 3) Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan (NTP), sebagai berikut.

Tabel 2.54
Perkembangan Indikator Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
Tahun 2017-2021

N Y -	T., 415	Tahun					
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produksi perikanan budidaya Ton/Thn)	10,156	10,692	11,197	12,663	10,885	
2	Nilai Tukar Pembudidayaan ikan	80,70	70,31	75.20	78,20	97,00	

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, 2022

Produksi perikanan melalui program budidaya selama periode 2016-2021 yang tertinggi pada tahun 2020 tercatat sebesar 12,663 ton/Tahun dan terendah pada tahun 2017 dengan produksi 10,156 ton/tahun. Namun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir produksi ikan budidaya mulai mengalami peningkatan. Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan di 3 (tiga) Balai Benih Ikan (BBI), yaitu BBI Sumpur Kudus, BBI Aie Amo dan BBI Latang sebagai suply bibit ikan. Disamping itu, untuk memasarkan produksi ikan yang semakin meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir telah dikembangkan usaha perikanan berbasis agribisnis yang terintegrasi sampai tahun 2021 telah dikembangkan sebanyak 8 unit. Sementara untuk indikator Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan selama periode tahun 2017–2021 secara umum masih dibawah 100 persen, yang artinya kesejahteraan pembudidaya ikan diKabupaten Sijunjung masih mengalami defisit yaitu pengeluaran untuk budidaya lebih besar dibandingkan penghasilan yang diterima.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Indikator pembangunan pariwisata di Kabupaten Sijunjung antara lain kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, Tingkat hunian akomodasi, dan Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang. Dijadikannya Geopark Ranah Minang Silokek sebagai Geopark Nasional merupakan salah satu upaya meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sijunjung kedepannya. Berdasarkan data Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang di tahun 2021 mencapai 3,99 persen dengan jumlah kunjungan sebanyak 85.000 orang. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan maka akan meningkatkan kontribusi sektor

pariwisata terhadap PDRB, terlihat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB meningkat fluktuatif, dimana pada tahun 2017 sektor pariwisata berkontribusi terhadap PDRB sebanyak 0,78 persen dan ditahun 2021 meningkat menjadi 0,83 persen.

Peningkatan kunjungan wisata juga menjadikan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan tingkat hunian akomodasi meningkat. Data menunjukan pada tahun 2020 kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD hanya 1,5 persen meningkat menjadi 1,89 persen di tahun 2021, dan tingkat hunian akomodasi di tahun 2021 juga meningat menjadi 11,19 persen dari 5 persen ditahun 2020. Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang pariwisata Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-202, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Perkembangan Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun					
110	mamator	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,78	0,80	0,84	0,79	0,83	
2	Kontribusi sektor pari- wisata terhadap PAD	n.a	2,68	2,76	1,5	1,89	
3.	Tingkat hunian ako- modasi	n.a	n.a	2,89	5	11,19	
4.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	40,68	17,81	-1,92	7,57	3,99	

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sijunjung, 2022

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

pertanian mempunyai pengaruh yang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung. Sektor pertanian merupakan lapangan usaha utama bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sijunjung (sekitar 35,76 persen), selain itu sektor pertanian juga merupakan sumber penyediaan bahan pangan dan input bagi sektor industri. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian/perkebunan Kabupaten Sijunjung selama tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan. Tahun 2021 laju pertumbuhannya 2,72 persen, ini laju pertumbuhan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sempat rendah selama lima tahun terakhir.

Produkvitas sub sektor tanaman pangan secara umum juga mengalami penurunan. Produktivitas tanaman padi sebagai pangan pokok mengalami penurunan dari 4,99 ton/ha tahun 2017 menjadi 4,50 ton/ha tahun 2021, namun jika dibandingkan dengan pencapaian produktivitas tahun sebelumnya mengalami peningkatan (produktivitas padi tahun 2019 3,96 ton/ha). Jika dibandingkan dengan pencapaian produktivitas pada tahun 2017, beberapa komoditi pertanian mengalami peningkatan nilai produktivitas seperti ubi kayu, ubi jalar dan cabe. untuk kacang tanah produktivitas meningkat dari Tahun 2017 ke tahun 2018 dari 0,92 menjadi 2,50 dan mengalami penurunan tahun 2019 1,25 dan meningkat lagi sampat tahun 2021 1,55. Pada sub sektor perkebunan, jumlah produksi pada komoditi utama perkebunan seperti karet 64.255 dan mengalami penurunan sedikit di tahun 2021 64.024, dan untuk kelapa sawit mengalami kenaikan dari tahun 2017 107.949 menjadi 117.473 tahun 2019 dan mengalami penurunan produktivitas pada tahun 2020 64.255 dan

mengalami penurunan lagi sedikit di tahun 2021 64.024 kelapa sawit dan kakao juga mengalami peningkatan pada periode 2017-2020 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 1.143.

Produksi pada sub sektor produksi daging sapi tahun 2017 sebesar 509,73 ton turun menjadi 380,02 ton pada 2021. Berbeda dengan produksi daging kerbau dan telur (ayam buras, ras dan itik), pada tahun 2017 produksi daging kerbau adalah 66 ton dan pada 2019 sebesar 122 ton meningkat menjadi 161,17 ton pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77,88 ton. Produksi telur mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 547,02 ton pada 2016 menjadi 1.884,63 ton pada 2021.

Perkembangan indikator urusan pemerintahan bidang pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-202, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.56
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pertanjan Tahun 2017-2021

	Perta	ınıan rai	hun 2017	-2021		
No				Tahun		
	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian/ perke- bunan	2,25	2,57	0,41	0,11	2,72
2.	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,97	95,31	96,01	100,58	107,60
4.	Jumlah produksi komoditas į	perkebunan	(Ton)			
	Produksi Karet	52.492	50.256	62.005	64.255	64.024
	Produksi Sawit	107.949	116.069	117.473	113.370	113.433
	Produksi Kakao	1.261	1.326	1.130	1.170	1.143
5.	5. Jumlah produktivitas padi dan bahan utama lokal lainnya (Ton/Ha)					
	Produktivitas Padi	4,99	4,57	3,96	4,50	4,50
	Produktivitas Jagung	5,48	4,63	6,75	6,66	5,92
	Produktivitas Kedelai	-	1,28	1,19	1,21	-
	Produktivitas Kacang anah	0,92	2,50	1,25	1,45	1,55
	Produktivitas Kacang Hijau	1,00	1,00	0,95	0,97	1,20
	Produktivitas Ubi Kayu	14,12	41,17	40,86	35,91	39,03
	Produktivitas Ubi Jalar	-	-	12,53	18,14	31,75
	Produktivitas Cabe	0,58	1,60	1,85	2,23	4,73
6.	Jumlah produksi peternakan	(Ton)				
	Produksi daging sapi	507,58	326,82	426,11	425,93	380,02
	Produksi daging kerbau	66	125	122	161,17	77,88
	Produksi Telur (ayam buras, ras, itik)	869,32	691,26	1168,99	1.552	1.884,63

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, 2022

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perdagangan dalam negeri di Kabupaten Sijunjung terlihat dari Kontribusi sektor perdaganan terhadap PDRB, Persentase pelaku usaha yang memiliki izin dan Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku. Selama tiga tahun terakhir data menunjukan kontribusi PDRB sektor perdagangan cenderung menurun, penurunan ini terlihat pada tahun 2020 kontribusinya adalah 11,69 persen menurun menjadi 11,67 persen di tahun 2021. Urusan pemerintahan bidang perdagangan juga diukur dari indikator persentase pelaku usaha yang memiliki izin, pelaku usaha Kabupaten Sijunjung sampai dengan tahun 2021 tercata hanya 25 persen yang memiliki izin, indikator selanjutnya adalah Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku, dilihat dari perkembangannya, pada tahun 2021 indikator ini mengalami penurunan

yaitu 23,99 persen dari 32,02 pesen di tahun 2020. Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan pemerintahan bidang perdagangan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.57
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan Tahun 2017-2021

NT -	T., 121-4-1	Tahun						
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Kontribusi sektor perdaganan terhadap PDRB	11,26	11,51	11,77	11,69	11,67		
2.	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	n.a	n.a	n.a	25	25		
3.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	n.a	n.a	3,74	32,02	23,99		

Sumber: Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, 2022

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Keberhasilan perkembangan Capaian indikator kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian dapat dilihat kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB, Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK, Persentase IKM yang memiliki izin, dan Persentase kenaikan omset IKM. Perkembangan capaian indikator kinerja Urusan pemerintahan bidang perindustrian Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perindustrian, Tahun 2017-2021

N.	To dilect on	Tahun						
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	3,02	2,99	2,52	2,60	2,73		
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry yang ditetapkan RIPIK	n.a	n.a	n.a	75	75		
3.	Persentase IKM yang memiliki izin	37,23	18,35	61,92	7,11	28,88		
4.	Persentase kenaikan omset IKM	16,00	88,88	7,11	-5,3	-0,54		

Sumber: Dinas Dagperinkop UKM Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, selama periode 2017-2020 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB mengalami penurunan, dimana tahun 2017 kontribusi sektor ini mencapai 3,02 persen menurun menjadi 2,73 persen pada tahun 2021, Semetara untuk Persentase pencapaian sasaran pembangunan industry yang ditetapkan RIPIK sampai tahun 2021 masih 75 persen, hal tersebut dikarenakan RIPIK Kabupaten Sijunjung yang masih terbilang baru disusun pada tahun 2019, diharapkan kedepannya dengan telah ditetapkan RIPIK akan tercipta kawasan industri yang berkembang dan benar-benar berhasil guna serta berdaya guna dalam rangka menjawab peluang investasi industry di Kabupaten Sijunjung. Indikator selanjutnya adalah persentase IKM yang memiliki izin, terlihat selama lima tahun terakhir 2017-2021 perkembangannya fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2021 Persentase IKM yang memiliki izin mengalami kenaikan 28,88 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu 7,11 persen, hal ini dikarenakan mulai menggeliatnya kembali sektor industry, terutama industri mikro dan kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan system OSS. Dengan meningkatnya IKM yang memiliki izin, terlihat berpengaruh terhadap persentase kenaikan omset IKM pada tahun 2021 setelah tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis. Persentase kenaikan omset IKM pada tahun 2020 adalah -5,3 persen meningkat menjadi -0,54 pada tahun 2021, walaupun telah terjadi peningkatan diharapkan Dinas terkait terus melakukan pembinaan pada IKM yang ada di Kabupaten Sijunjung agar omset bisa semakin meningkat.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerjasama antar pemerintah daerah baik pemerintah daerah pengirim maupun pemerintah daerah penerima dengan pemerintah pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa. Fokus utama transmigrasi adalah penempatan dan membangun transmigrasi baru serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat lokal sekitarnya. Kawasan transmigrasi yang ada di Kabupaten Sijunjung adalah kawasan transmigrasi Muaro Takung – Kamang Baru yang terdiri dari blok Muaro Takung, Timpeh dan terakhir Padang Tarok.

Indikator pembangunan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung adalah Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi prioritas kementerian yang direvitalisasi, indikator ini dimaksudkan untuk melihat kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah, dengan meningkatnya perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi. Peningkatan status kawasan transmigrasi dengan melakukan Pembangunan kawasan transmigrasi bersifat multidimensional, dengan penggerak utamanya dimensi ekonomi, dimensi lain yang sangat menentukan adalah sosial budaya, kelembagaan, jaringan prasarana dan sarana serta dimensi lingkungan, sehingga kebijakan dan strategi intervensinya mencakup keseluruhan aspek pengembangan tersebut. Namun hingga Tahun 2021 nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Muaro Takung - Kamang Baru belum dapat dihitung, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Perkembangan Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Transmigrasi Tahun 2017-2021

	114115111161401 1411411 2011 2021									
NT -	T., 1114	Tahun								
No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021				
1.	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100	n.a	n.a	n.a	n.a	0				
	kawasan transmigrasi prioritas kementerian									
	yang direvitalisasi					1				

Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.

Capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini ditandai capaian indeks reformasi birokrasi hingga tahun 2021 tercapai sebesar 49,17 atau berada diskor C. Cukup rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Kabupaten Sijunjung disebabkan karena belum optimalnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan.

Sedangkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi menunjukkan perkembangan cukup signifikan, hal ini ditandai cenderung meningkatnya nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2017 nilai SAKIP sebesar 50,65 (skor c) dan meningkat pada tahun 2020 senilai 62,70 (B). Selain itu, Indeks Pelayanan

Publik tercapai sebesar 3,06 atau berada pada kategori B. Capaian tersebut, menunjukkan pelayanan publik dalam Pemerintah Kabupaten Sijunjung cukup baik. Perkembangan Indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Tahun 2017-2021

No	Indikator			Tahun		
МО	indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	n.a	n.a	n.a	47,97	49,17
2.	Nilai SAKIP Pemda	50,65	57,67	60,58	62,11	62,70
3.	Nilai LPPD	2,9833	3,1331	n.a	n.a	n.a
4.	Indeks Pelayanan Publik	n.a	n.a	n.a	n.a	3,06
5.	Persetanse pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	n.a	n.a	n.a	n.a	0
6.	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kompetitif	n.a	n.a	n.a	n.a	0
7.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	n.a	n.a	n.a	n.a	25

Sumber: Setdakab Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Unsur Perencanaan

Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 belum dilakukan penilaian. Penilaian baru dilaksanakan tahun 2021 dengan capaian 84,82. Sedangkan evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (lima) komponen besar manajeman kinerja secara lengkap dan menyeluruh salah satunya nilai komponen perencanaan terhadap evaluasi SAKIP. Nilai perencanaan kinerja Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017 nilai perencanaan sebesar 17,19 dan pada tahun 2021 meningkat secara signifikan sebesar 20,36. Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Unsur Perencanaan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun					
NO	indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Kualitas Perenca- naan	n.a	n.a	n.a	n.a	84,82	
2.	Nilai Komponen perenca- naan terhadap evaluasi SAKIP	17,19	17,65	19,48	20,21	20,36	

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sijunjung, 2022

2. Unsur Keuangan

Capaian kinerja unsur keuangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) menunjukkan perkembangan yang signifikan dari sisi ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lima tahun terakhir dan tercapainya realisasi PAD terhadap anggaran. Namun disisi lain, rasio PAD dan rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya belum optimal pencapaiannya. Hal ini

disebabkan karena belum tergalinya potensi PAD secara efektif dan masih terdapatnya kendala dan hambatan pelaksanaan anggaran tahun berjalan karena masih berlanjutnya pembatasan kegiatan masyarakat dalam masa pandemi covid-19. Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.62
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Unsur Keuangan Tahun 2017-2021

	1 omorman onoar moangan ranam 201, 2021											
No	Indikator	Tahun										
NO	markator	2017	2018	2019	2020	2021						
1.	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
2.	Rasio PAD	n.a	n.a	n.a	9,94	9,45						
3.	Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	na	n.a	n.a	107,71	102,63						
4.	Rasio anggaran sisa terhadap APBD tahun sebelumnya	0,14	0,11	0,88	0,11	11,5						

Sumber: Badan keungan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, 2022

3. Unsur Kepegawaian

Capaian kinerja unsur kepegawaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) yang diukur melalui Indeks Merit Sistem, rasio pegawai Pendidikan Tinggi terhadap pendidikan menengah/dasar dan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan belum menunjukkan capai yang optimal. Hal ini terlihat dari Indeks Merit Sistem tercapai dengan nilai 0,40 yang penilaian baru dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, perkembangan rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun, adanya pegawai yang mutasi dari pejabat fungsional ke struktural, adanya pegawai yang pindah dari Kabupaten Sijunjung. Namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan terhadap pegawai fungsioanal karena adanya penyetaraan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2021.

Sedangkan perkembangan rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap menengah/dasar cenderung meningkat, karena adanya keinginan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik melalui tugas belajar maupun izin belajar dan Penerimaan Calon ASN lebih mengutamakan pendidikan D3 ke atas. Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.63
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Unsur Kepegawaian Tahun 2017-2021

	Indikator	Tahun							
No		2017	2018	2019	2020	2021			
1.	Indeks Merit Sistem	n.a	n.a	n.a	n.a	0,40			
2.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi terhadap mene- ngah/Dasar	80,49	83,26	85,13	86,31	87,31			
3.	Rasio Pegawai Fungsional selain Guru dan Tenaga Kesehatan	2,26	1,91	2,08	1,87	8,45			

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sijunjung, 2022

4. Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Capaian kinerja unsur pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN dan rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendataan ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi dan teknis, terutama tenaga pendidikan dan kesehatan akibat belum diinformasikan secara optimal. Selain itu, rasio pegawai fungsional memiliki sertifikat kompetensi menunjukan tren naik turun karena adanya pegawai yang pensiun, adanya pegawai yang mutasi dari pejabat fungsional ke struktural dan adanya pegawai yang pindah dari Kabupaten Sijunjung. Untuk tahun 2021 persentase pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi lebih kecil dibandingakan dengan jumlah pejabat fungsional hal ini terjadi karena pejabatan struktural eselon IV yang disetarakan ke jabatan fungsional pada akhir tahun 2021 belum mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jabatannya.

Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur pendidikan dan pelatihan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Unsur Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021

		Tahun					
No Indikator		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Profesionalitas ASN	n.a	37,42	51,55	53,97	51,97	
2.	Rasio Jabatan Fun-gsional Memiliki Serti-fikat Kompetensi	2,26	1,91	2,08	1,87	2,45	

Sumber: BKPSDM Kabupaten Sijunjung, 2022

5. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja unsur penelitian dan pengembangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) belum menunjukkan perkembangan yang optimal. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Inovasi Daerah, persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanan pembangunan belum tercapai sesuai dengan angka yang optimal. Kondisi ini disebabkan karena kelembagaan penelitian dan pengembangan masih melekat dengan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. Sehingga dari sisi program dan kegiatan lebih diprioritaskan kepada penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur. Oleh karena itu, unsur penelitian dan dapat dioptimalkan fungsinya pengembangan melalui penguatan kelembagaan. Perkembangan indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan Unsur Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Indeks Inovasi Daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	38,13	
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mene-rapkan inovasi	n.a	n.a	n.a	50,00	60,25	

No	Indikator	Tahun					
110	Indikator		2018	2019	2020	2021	
3.	Persentase pemanfaa-tan hasil Litbang terhadap	n.a	40	45	65	65	
	perencanan pembangunan						

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini tergambar dari capaian Manajemen Resiko Indeks hingga tahun 2021 pada level 2, sedangkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Namun hasil *Quality Assurance (QA)* atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Sijunjung memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang SPIP yang diukur melalui unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Sedangkan tingkat kapabilitas APIP hasil *Quality Assurance (QA)* perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat atas perbaikan peningkatan level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sijunjung terhadap tambahan dokumentasi pendukung pemenuhan seluruh KPA sampai dengan level 3, BPKP melakukan penjaminan kualitas atas perbaikan peningkatan level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sijunjung menyimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sijunjung berada tahun 2021 pada "level 2 plus" dengan elemen yang dinilai yakni peran dan layanan, manajemen Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi serta Struktur Tata Kelola.

Perkembangan indikator kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.66
Perkembangan Indikator Kinerja Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Manajeman Resiko Indeks	n.a	n.a	n.a	n.a	2		
2.	Maturitas SPIP	2	2	3	3	3		
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	2	2	2+	2+	2+		

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.3.7. Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Kecamatan merupakan unsur kewilayahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu dilihat capaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun. Mengingat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan tidak dimuat dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sehingga capaian kinerja unsur kewilayahan tidak dapat dilihat perkembangan dari tahun ke tahun selama periodesasi 2017-2021.

2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan salah satu unsur penting dalam melihat perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021, unsur pemerintahan umum belum dijadikan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga capaian kinerja unsur pemerintahan umum belum dapat dilihat perkembangan dari tahun ke tahun selama periodesasi 2017-2021.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah dapat menggambarkan perkembangan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain baik kabupaten/kota maupun Provinsi yang berdekatan. Untuk meningkatkan daya saing daerah ada dua strategi untuk mengembangkan daya saing yaitu:

Strategi Pertama

- 1. Memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia menurut tingkat permintaan yang tinggi, dimana barang dan jasa tersebut sudah diproduksi oleh daerah lain, tetapi dengan sentuhan teknologi dan etas kerja yang lebih baik, maka suatu daerah akan mampu memproduksi barang dan jasa tersebut lebih kompetitif dibandingkan dengan yang telah dihasilkan oleh produsen terdahulu. Barang dan jasa yang kompetitif adalah yang kualitasnya unggul, harganya relatif murah dan pasokannya dapat memenuhi kebutuhan serta selera konsumen baik di pasar domestik, regional maupun global.
- 2. Memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia, tetapi karena kondisi alam atau faktor lainnya, bangsa-bangsa lain tidak bisa menghasilkannya atau hanya sedikit bangsa yang dapat memproduksinya, misalnya produk-produk yang dihasilkan dari SDA, seperti karet, minyak sawit (CPO) dan puluhan produk hilirnya.

Strategi Kedua

Penyediaan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah dan infrastruktur pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kemampuan finansial dan kesempatan kerja, dukungan kebijakan pemerintah, dan peningkatan stabilitas ekonomi makro.

Kabupaten Sijunjung akan menggunakan kedua strategi ini untuk meningkatkan daya saing daerah. Beberapa aspek penting dalam peningkatan daya saing daerah yang akan yang akan dipaparkan pada bagian ini yaitu; kemampuan ekonomi daerah, fasilitas daerah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator yaitu ; a). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita,. Pendapatan per-kapita, dan c). Nilai Tukar Petani (NTP) dan d). pengeluaran ril per kapita.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas.

PDRB perkapita lima tahun terakhir (2017-2021) cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kurun lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sehingga mencerminkan kemampuan ekonomi daerah mempunyai daya saing dalam berinvestasi. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67
Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Sijunjung

·· ·	Tahun						
Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
Nilai PDRB (Triliun Rupiah)							
Atas Dasar harga Berlaku	7,93	8,49	9,15	9,14	9,57		
Atas Dasar harga Konstan	6,14	6,45	6,76	6,68	6,89		
PDRB Perkapita (Juta Rupiah)							
Atas Dasar harga Berlaku	34,45	36,31	38,54	38,87	40,31		
Atas Dasar harga Konstan	26,67	27,57	28,47	28,43	29,05		

Sumber: PDRB Kabupaten Sijunjung Menurut Lapangan Usaha 2017-2021

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Besar kecilnya jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan faktor yang turut menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara/wilayah. Meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat akan mendorong perkembangan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Hal ini berarti membuka peluang investasi bagi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan gambaran penggunaan PDRB.

Tingkat pengeluaran konsumsi tersebut, menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi melalui proses multiplier dari PDRB Kabupaten Sijunjung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang dominan dalam penggunaan PDRB. Hal ini menunjukkan besamya peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung. Jika terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, maka akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sijunjung.

Perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan kebutuhan makann dan no-mkanan, pada tahun pengeuaran kosumsi rumah tangga sebesar 54,37 persen untuk makanan dan sisanya 45, 63 persen untuk non-makanan. Pengeluaran komsumsi rumah tangga untuk makanan terbesar dialokasikan untuk makanan dan minuman jadi Rp160.472,-/bulan dan terendah dialokasikan untuk komsumsi ikan/udang/cumi/kean sebesar Rp47.416,-/bulan. Sementara untuk non makanan dialokaikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang

mencapai Rp226.996,-/bulan dan terendah untuk barang yang tahan lama Rp59.307,-/bulan, secara lengkap dapat dilihat pada infografis berikut.

Gambar 2.20

Persentas Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Non-Makanan dan Makanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupatn Sijunjung, 2022

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Secara konsep dasar, Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yang dihitung berdasarkan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Indeks harga yang diterima petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

Sementara itu, NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. Sehingga angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Berdasarkan kriteria perhitungan, jika NTP > 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Namun jika NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Sedangkan jika NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. Sementara untuk NTP Kabupaten Sijunjung sudah ditas angka 100. Hal ini mengambarkan petani

mengalami surplus sehingga mengakibatkan meningkatnya daya beli petani. Pada tahun 2021 NTP telah mencapai angka 108,60.

4. Potensi Ekonomi Lainnya

Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang dilalui oleh gugusan Bukit Barisan, sehingga terdapat objek wisata alam yang dapat dikembangkan potensinya. Selain memiliki potensi obyek wisata alam, Kabupaten Sijunjung juga memiliki potensi wisata sejarah dan budaya. Potensi wisata dimaksud tersebar disetiap kecamatan-kecamatan, sehingga mengalami kesulitan untuk dikembangkan secara terstuktur. Oleh sebab itu, potensi obyek wisata alam yang menjadi fokus pengembangan di masa mendatang adalah kawasan Silokek yang merupakan icon Geopark Ranah Minang Silokek. Geopark Silokek merupakan suatu kawasan wisata yang pada dasarnya didukung oleh beberapa objek wisata alam yang memiliki perbukitan batu-batuan yang sudah berumur 350 juta tahun dan air terjun yang sangat indah dan menarik.

Oleh karena itu, pengembangan dan penataan kawasan Silokek merupakan urgensi pelaksanaan arah kebijakan pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan (sustainability) sebagai daya ungkit untuk terwujudnya Kabupaten Sijunjung menjadi kawasan Unesco Global Geopark (UGG). Pengembangan kawasan Geopark Silokek mampu menstimulus aktivitas ekonomi bagi masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Terwujudnya Pengembangan kawasan Geopark Silokek dengan sendirinya akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan Geopark Silokek khususnya dan Kabupaten Sijunjung secara umumnya. Salah satu konsep yang akan dikembangkan adalah penataan kawasan Geopark Silokek melalui pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang lainnya serta pengembangan sumber daya manusia di Nagari Silokek. Selain itu, juga menggali faktor-faktor budaya dan sejarah yang ada di kawasan Silokek.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dan dengan dukungan masyarakat harus lebih berusaha ekstra keras untuk melestarikan situssitus sejarah di Kabupaten Sijunjung, khususnya dengan cara merawatnya dengan baik, mempelajarinya dan mempertahankan keaslian nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Berbagai kalangan sangat berharap agar dibangun sebuah museum untuk menyelamatkan benda-benda sejarah mulai dari masa sebelum penjajahan Belanda, masa kolonial, masa revolusi hingga saat ini agar tidak berpindah tangan demi keuntungan materi sesaat.

Selain pembenahan infrastruktur yang menunjang pariwisata agar destinasi wisata yang ditawarkan bisa diakses dan dijangkau dengan mudah, perlu fasilitas dan sarana prasarana pendukung yang harus disiapkan agar wisatawan betah dan bisa berwisata dengan nyaman dan berkesan. Pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) daerah dalam memasarkan produknya perlu dilakukan karena banyak sekali hasil produksi UMKM dari berbagai daerah yang masih belum dapat menembus pasar ekspor dengan kendala keterbatasan informasi yang dimiliki oleh pelaku UMKM.

Kedepannya, dalam rangka membangun daya saing dan pemulihan ekonomi daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain: (a) Memetakan potensi daerah berikut supply dan demand, (b) Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk SDM-nya, (c) Menguasai rantai pasokan (hulu-hilir) (d)

Menciptakan inovasi produk, serta (e) Mendorong ekonomi rakyat dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal. Akhirnya, kesiapan kapabilitas pemerintah daerah perlu didukung oleh peningkatan kemampuan dalam mengelola keuangan daerahnya. Kualitas sumber daya manusia perlu dipersiapkan, sehingga dana yang dimiliki dapat dikelola dengan efektif dan secara bertahap dapat membangun daya saing pemerintah daerah.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor pada suatu daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah tersebut. Secara umum dapat dilihat dari Indek Infrastruktur, Indekinfrastruktur jalan, rasio elektrifikasi dan rasio layanan Broadband 4G LTE, dengan capaian sebagai berikut.

jalan mempunyai penting Infrastruktur peranan dalam pembangunan. Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas, Kecamatan dan Desa/Nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung. Jaringan jalan sangat penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan ini, perlu diketahui kondisi jalan di Kabupaten Sijunjung. Panjang jalan kabupeten di Kabupaten Sijunjung 1056,86 km sebelum dilakukan updating tahun 2018. Setelah dilakukan updating tahun 2018, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/252/KPTS-BPT-2018 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan kabupaten 829,49 km. Sementara untuk jalan Provinsi dan Negara di Kabupaten Sijunjung masing-masing 49 km dan 109 km. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk perbaikan jalan Provinsi dan jaln Negara perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2020 kondisi jalan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan jenis permukaan dengan jenis permukaan aspal 430,65 km atau 51,92 persen, rigid 187,57 km atau 22,61 persen, 65,44 km atau 7,89 persen dengan jenis permukaan kerikil dan masih ada jalan denga permukaan tanah 145,76 km atau 17,57 persen. Jalan dengan jenis permukaan aspal, tanah dan kerikil dari tahun 2017-2021 terus berkurang , tetapi sebaliknya jalan dengan jenis permukaan rigid terus bertambah, dari 142,16 km di tahun 2020 menjadi 187,57 km di tahun 2021. Perkembangan jenis permukaan jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.68
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten
Sijunjung Tahun 2017-2021

		Jenis Permukaan Jalan (km)								
Tahun	Aspal	Rigid	Tanah	Kerikil	Jumlah					
2017	475,44	122,65	296,86	156,21	1056,86					
2018	477,14	126,65	296,86	156,21	1056,86					
2019	458,82	145,73	102,10	127,35	834,00					
2020	460,92	142,16	296,86	142,86	829,49					
2021	430.65	187,57	145,76	65,44	829,42					
Persentase Kondisi 2021	51,92	22,61	17,57	7,89	100					

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Bila ditinjau dari segi kondisi kerusakan jalan, pada tahun 2021 secara jumlah panjang jalan yang mengalami kerusakan berkurang 0,07 km, hal ini terlihat dari jalan dengan kondisi baik menjadi 409,84 km ditahun 2021, atau 49,41 persen. rusak sedang 142,06 km atau 17,13 persen, rusak ringan 66,02 km atau 7,96 persen dan rusak berat 211,51 km atau 25,50 persen. Hanya saja kondisi dengan kerusakan berat bertambah 56,96 km dari tahun 2019. Perkembangan panjang jalan di Kabupaten Sijunjung berdasarkan kondisi kerusakan selama 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Panjang Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Kerusakan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021

		Kondisi kerusakan (Km)								
Tahun Baik		Sedang Rusak Ringan		Rusak Berat	Jumlah					
2017	343,01	220,62	98,98	394,24	1 056,85					
2018	365,91	217,02	95,28	378,64	1 056,85					
2019	275,91	178,42	216,49	154,18	834,00					
2020	322,97	186,13	165,80	154,55	829,49					
2021	409,84	142,06	66,02	211,51	829,42					
Persentase Kondisi 2020	49,41	17,13	7,96	25,50	100					

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.4.3. Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Berbagai kemudahan bagi masuknya investasi telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2017, antara lain; 1) penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk investasi baru dan 2) memberikan kemudahan dalam perizinan melalui penggunaan teknologi informasi terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional.

Tabel 2.70 .

Perkembangan Persentas Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)

Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun						
NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	223,37	72,01	13,90	11,40	14,67		
2	Persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	277,41	29,87	19,7	1,9	0		

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung, 2022

Meningkatnya Persentase peningkatan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sijunjung dalam kurun lima tahun terakhir tersebut, disamping adanya kebijakan kemudahan berinvestasi juga didukung oleh kebijakan pemerintahan daerah terkait penanaman modal melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan dalam proses perizinan, pemerintah mengeluarkan kebijakan setiap daerah dalam proses penertiban izin berusaha harus berbasis elektronik dan terintegrasi melalui Online Single Submission (OSS). Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat memperpendek lama proses perizinan dan pemerintah mengetahui izin yang diterbitkan oleh daerah. Disisi lain, meningkatnya nilai investasi belum berpengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya nilai investasi terealisir akibat berbelit-belit proses ganti rugi tanah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi meningkatnya nilai investasi adalah dapat ditekannya angka kriminalitas. Angka tersebut, dihitung berdasarkan total kasus kriminalitas dalam setahun dibandingkan dengan jumlah penduduk. Sedangkan, peristiwa demonstasi dan unjuk rasa di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif tidak mempengaruhi terhadap iklim berinvestasi.

Perkembangan angka kriminalitas di Kabupaten Sijunjung tahun 2016- 2020 cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 angka kriminalitas sebesar 0,08%. Sedangkan perkembangan jumlah kasus kriminalitas lebih banyak di Kecamatan Kamang Baru. Sementara itu. Kondisi ini mencerminkan Kabupaten Sijunjung relatif aman dalam berinvestasi. Perkembangan jumlah dan angka kriminalitas Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas
Kabupaten Sijunjung tahun2017-2021

No.	Kecamatan	Tahun							
NO.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Kamang Baru	72	47	46	28	49			
2	Tanjung Gadang	37	39	17	13	23			
3	Sijunjung	40	38	21	20	45			
4	Lubuk Tarok	11	12	7	2	15			
5	IV Nagari	47	52	7	2	14			
6	Kupitan	0	0	0	0				
7	Koto VII	39	34	23	26	15			
8	Sumpur Kudus	38	27	16	25	26			
	Jumlah kriminalitas (kasus)	246	222	165	107	187			
	Jumlah penduduk (jiwa)	226.300	230.104	237.376	235.045	237.313			
	Angka kriminalitas (%)	0,11	0,10	0,07	0,05	0,08			

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Analisis daya saing terhadap Sumber Daya Manusia adalah salah satunya dilakukan dengan melihat tingkat rasio ketergantungan. Tingkat rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun), dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun. Jumlah penduduk, penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sijunjung tahun 2021 sebanyak 161,462 jiwa atau 68.04 persen lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif berusia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun

sebanyak 75,851 jiwa atau 31.96 persen. Usia produkti lebih besar daripada usia non produktif, ini artinya Kabupaten Sijunjung memilik bonus demografi tahun 2021, seperti terlihat pada tabeleberikut.

Tabel 2.72
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten
Sijunjung Tahun 2021

NO	Valama la IImana	Jenis	Kelamin	Translah
NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	10,498	10,125	20,623
2.	5-9	10,260	9,701	19,961
3.	10-14	11,064	10,527	21,591
4.	15-19	11,170	10,427	21,597
5.	20-24	10,473	9,514	19,987
6.	25-29	9,460	9,123	18,583
7.	30-34	9,374	9,483	18,857
8.	35-39	9,151	8,950	18,101
9.	40-44	8,707	8,301	17,008
10.	45-49	7,920	7,519	15,439
11.	50-54	6,362	6,307	12,669
12.	55-59	5,280	5,152	10,432
13.	60-64	4,319	4,470	8,789
14.	65-69	3,178	3,291	6,469
15.	70-74	1,695	1,977	3,672
16.	75+	1,406	2,129	3,535
	Jumlah	120,317	116,996	237 ,313

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Dari sisi Rasio ketergantungan (depedency ratio) atau angka beban ketergantungan, suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia nonproduktif. Rasio ketergantungan dapat diukur dengan membandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun) ditambah dengan penduduk usia 65 tahun keatas dibagi dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun dikali seratus persen. Makin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok usia produktif. Tinggi rendahnya angka ketergantungan dapat dibedakan tiga golongan, yaitu angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan tinggi bila lebih dari 41. Dan berdasarkan data Tabel 2.5 diatas angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 sebesar 46.98 persen (tergolong tinggi), artinya setiap 100 orang kelompok usia produktif akan menanggung 47 orang dari usia non produktif.

Bonus demografi bisa menjadi pilar peningkatan produktivitas Kabupaten Sijunjung dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM yang produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat di Kabupaten Sijunjung harus didukung dengan ketersedian lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat dalam mempersiapkan bonus demografi. Terdapat banyak cara untuk mewujudkannya, seperti melakukan peningkatan investasi, memfasilitasi masyarakat untuk menjadi pengusaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah.

2.1.4.5. Tata Kelola Pemerintahan

Aspek penting lainnya dalam peningkatan daya saing yang perlu dibenahi dalam peningkatan daya saing Kabupaten Sijunjung adalah aspek Tata Kelola Pemerintah Daerah Menurut Hos (2011). Sesuai dengan Visi I

KepalaDaerah yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan kualitas SAKIP meelalui penataan kelembagaan, penerapa merit system dan e-government yang optimal.
- 2. Pembinaan aparatur berbasis reward dan punishment.
- 3. Peningkatan kualitas Sistem Pengendalain Internal Pemerintah (SPIP)
- 4. eningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah ya ng efektif dan profesional
- 5. Peningkatan kualitas manajemen BUMD secara profesional
- 6. Penetapan grand design pengembangan ASN
- 7. Pemetaan kompetensi ASN melalui assesment test.
- 8. Pengembangan kualitas ASN berbasis grand design yang terstruktur dan terukur.
- 9. Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi
- 10. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara efektif.
- 11. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan tepat waktu

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

Ruang lingkup evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2021 lebih menitikberatkan kepada capaian kinerja program pembangunan terhadap target yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi RKPD Tahun 2021 tersebut, melalui aspek-aspek sebagai berikut :

- 1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
- 2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja hasil yang direncanakan.
- 3. Realisasi program yang melebihi target kinerja hasil yang direncanakan.
- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program.
- 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program pembangunan daerah.
- 6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2.1. Realisasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Capaian realisasi kinerja program pembangunan RKPD Tahun 2021 dilihat melalui kriteria capaian kinerja, antara lain : 1) yang melebihi target, 2) telah memenuhi target dan 3) tidak memenuhi target. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja program pembangunan RKPD Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.73
Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja Program Pembangunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

No.	Kriteria Capaian	Jml Indikator Kinerja Program	Tkt. Capaian (%)	Simbol Kriteria Capaian
1	Telah melebihi target (≥ 100%)	9	5,26	
2	Telah memenuhi target (100%)	86	50,29	
2	Tidak memenuhi target (< 100%)	76	44,44	
	Jumlah	171	100	•

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab. Sijunjung 2021 (data dilolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat realisasi kinerja program pembangunan RKPD tahun 2021 belum menunjukkan angka capaian yang optimal, karena masih terdapatnya capaian kinerja program pembangunan yang tidak memenuhi target sebanyak 76 indikator kinerja atau 44,44%. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2021 belum mencapai hasil yang maksimal. Sehingga berimplikasi terhadap rencana pembangunan daerah tahun berikutnya dan berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Realisasi dan tingkat capaian kinerja program pembangunan RKPD Tahun 2021 menurut urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.74
Realisasi dan Tingkat Capaian Kinerja RKPD Tahun 2021
Menurut Urusan Pemerintahan

	Menurut Urusan Pemerintahan								
No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab		
I	Urusan Wajib yang Berkaitan Pelay	anan Dasar		•					
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendi	dikan							
1	Program pengelolaan pendidikan						Dinas Dikbud		
	1) Rasio Sekolah terhadap jumlah	Rasio	1:23	1:22	98,80				
	usia siswa sekolah PAUD								
	2) Rasio Sekolah terhadap jumlah	Rasio	1:142	1:134	96,04				
	usia siswa sekolah SD								
	3) Rasio Sekolah terhadap jumlah	Rasio	1:244	1:172	76,32				
	usia siswa sekolah SMP								
	4) Persentase kondisi bangunan	%	75,50	76,00	100,66				
	sekolah baik PAUD								
	5) Persentase kondisi bangunan	%	69,33	52,00	75,00				
	sekolah baik SD								
	6) Persentase kondisi bangunan	%	73,66	87,00	118,11				
	sekolah baik SMP								
	7) Persentase peningkatan sarpras	%	55,00	60,00	109,09				
	pendidikan non								
	formal/kesetaraan								
2	Program Pendidik dan Tenaga Kepend	lidikan					Dinas Dikbud		
	8) Persentase PTK bersertifikat	%	36,67	34,67	94,55				
	Profesi		1						
	9) Rasio Guru Terhadap Murid	Rasio	1:12	01:25	118,06				
	10) Rasio Guru Terhadap Rombel	Rasio	1:12	1:10	98,39				
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesel					<u> </u>			
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehata	n Perorangan	dan Upaya Kes	ehatan Masyaral	kat		Dinas Keseha-		
	1) Capaian SPM	%	100	90,00	90,00		tan/RSUD		
	2) Persentase fasilitas kesehatan	%	83	78,85	95,00				
	yang sarana dan prasarana								
	sesuai standar								
	3) Persentase balita wasting	%	8,8	8,10	92,05				
	4) Persentase cakupan ASI ekslusif	%	88	75,00	85,23				
	5) Persentase Kecukupan Sarana,	%	78	58,50	75,00				
	Prasarana dan Alat Kesehatan								
	sesuai Standar RS Tipe C								
	6) Persentase Penyediaan Layanan	%	100	95,00	95,00				
	Kesehatan Rujukan					*			
2	Program Pemingkatan Kapasitas Sum		i .	1	1		RSUD		
	7) Persentase Ketercukupan	%	15	11,34	75,57	_			
	Tenaga Kesehatan sesuai								
	Standar RS Tipe C						」		
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kese						Dinas Keseha-		
	8) Persentase puskesmas dengan	%	100	75,00	75,00		tan		
	ketersediaan alkes, sarana					, v			
	prasarana, obat dan vaksin								
	esensial sesuai standar						- L		
4	Program Pemberdayaan Masyarakat l				l == 00		Dinas Keseha-		
	Persentase nagari siaga aktif	%	80,23	/	75,00		tan		
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Peker		aan Penataan F	uang			Diagon Burbs		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya A		I 50.00	I 52.00	1 00.00		Dinas PUPR		
	1) Cakupan luas daerah irigasi	%	59,00	53,23	90,22				
	dengan kondisi baik	0:	1: 4: 55:	<u> </u>		*	D: D 1:		
2	Program Pengelolaan dan Pengemban				l 00.00		Dinas Perkim		
_	2) Cakupan layanan air minum	%	72,00	66,24	92,00		& LH		
3	Program Pengelolaan dan Pengemban			1 50.00	1 06 50		Dinas Perkim		
	Cakupan sanitasi yang layak	%	75,00	72,38	96,50	▼	& LH		

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
4	Program Pengelolaan dan Pengemban 4) Persentase peningkatan drainase yang dibangun	gan Sistem Dr %	rainase 10,00	10,00	100		Dinas Perkim & LH
5	Program pengembangan permukimar 5) Persentase infrastruktur kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang ditangani	n %	80,00	79,20	99,00		Dinas Perkim & LH
6	Program Penataan Bangunan Gedun 6) Persentase gedung kantor Pemda yang representatif	g %	100	85,67	85,67		Dinas PUPR
7	Program Penataan Bangunan dan Lir 7) Persentase sarana publik (RTH) yang tersedia	igkungannya %	20	15,5	77,5		Dinas PUPR
8	Program Penyelenggaraan Jalan 8) Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi	%	65,00	55,91	86,02		Dinas PUPR
9	mantap Program Pengembangan Jasa Konstri 9) Persentase penerbitan izin usaha jasa konstruksi	uksi %	100	70,00	70,00		Dinas PUPR
10	Program Penyelegaraan Pentaan Rua: 10)Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	ng %	100	66,27	66,27		Dinas PUPR
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perur	nahan Rakyat	∣ t dan Kawasan I	 Permukiman			
1	Program Kawasan Permukiman 1) Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	%	78,00	71,76	92,00		Dinas Perkim & LH
2	Program Peningkatan Prasarana, Sa 2) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	rana dan Util %	litas Umum (PSI	84,60	94,00		Dinas Perkim & LH
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Keter			an Masyarakat			
1	Program Peningkatan Ketenteraman (1) Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	dan Ketertiban Rasio	3,5:1.000	3:1.000	90,00		Dinas Satpol PP & Damkar
	2) Persentase Perda dan Perkada	%	100	100	100		
	yang ditegakkan 3) Persentase menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100		
2	Program Pencegahan, Penanggulanga 4) Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	n, Penyelamat %	an Kebakaran d 100	an Penyelamatan 100	Non Kebakar 100	ran	Dinas Satpol PP & Damkar
3	Program Penanggulangan Bencana 5) Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan informasi rawan bencana	%	100	98,33	98,33		BPBD
	Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	85,00	85,00		
	terhadap bencana 7) Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi	%	100	100	100		
	pasca bencana 8) Jumlah Nagari/Desa minimal Destana Madya		1	0	0		
1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosia	1					Ding- S-: 1
1	Program Pemberdayaan Sosial 1) Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	95,00	95,00		Dinas Sosial, PPr & PA
2	Program Perlindungan dan Jaminan 2) Persentase Nagari/Desa yang aktif melakukan pemuktahiran DTKS	Sosial %	100	100	100	•	Dinas Sosial, PPr & PA
3	Program Penanganan Bencana 3) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	98,24	98,24		Dinas Sosial, PPr & PA
4	Program Pengeloaan Taman Makam I 4) Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Pahlawan %	100	100	100	•	Dinas Sosial, PPr & PA
2.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan		asar	1			
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Tena Program Pelatihan Kerja dan Produkt 1) Persentase pencari kerja yang		Kerja 100	97,26	97,26		Dinas Naker- trans
2	telah dilatih Program Penempatan Tenaga Kerja 2) Persentase penempatan pencari	%	30	30	100		Dinas Naker- trans
	,	, , , ,	, 50		100	_	

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
	kerja yang terdaftar				(70)		
3	Program Hubungan Industrial					_	Dinas Naker-
	3) Persentase pengesahan	%	100	100	100		trans
	peraturan perusahaan serta						
	pendaftaran PKB dan pencegahan dan penyelesaian						
	penceganan dan penyelesalah perselisihan hubungan						
L	industrial		<u> </u>				
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemb			lindungan Anak	3		
1	Program Pengarustamaan Gender da			1.6	1 00 00 1		Dinas Sosial,
	Persentase ARG terhadap APBD	%	18	16	88,89		PPr & PA
	Program Pemuhan Hak Anak						-
2	(PHA)						Dinas Sosial,
	2) Persentase pemenuhan hak	%	100	95,00	95,00		PPr & PA
	anak sesuai kewenangan						
	daerah					*	
3	Program Perlindungan Khusus						Dinas Sosial,
	Anak 3) Persentase perlindungan	%	100	96,00	96,00		PPr & PA
	khusus anak yang tertanggani	70	100	90,00	90,00		111 06174
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Panga	ın		I .			
1	Program peningkatan diversifikasi da	n ketahanan p					Dinas Paperi
	1) Skor Pola Pangan Harapan	skor	80,50	88,02	109,34		
2	Program Penanganan Kerawanan Par		1	1	l		Dinas Paperi
	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	14	14	100		
3	pangan Program Pengawasan Keamanan Pan	gan	1	I .	I		Dinas Paperi
	3) Persentase pangan segar asal	gan %	85	85	100		Dinas i apeii
	tumbuhan yang memenuhi	, ,					
	persyaratan mutu dan						
L	keamanan pangan						
2.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perta						Diago DUDD
1	Program penyelesaian sengketa tanal 1) Persentase penyelenggaraan	i garapan %	100	1 0	0		Dinas PUPR
	pertanahan yang sesuai dengan	70	100				
	ketentuan]
2	Program Penyelesaian Ganti Kerugiar						Dinas PUPR
	2) Persentase sengketa lahan dan	%	100	33,33	33,33		
	konflik pertanahan untuk					_	
	kepentingan umum dan Pemda yang diselesaikan						
3	Program Penatagunaan Tanah	1	1	I .	1		Dinas PUPR
	3) Persentase pemanfaatan tanah	%	65	39,00	60,00		
	yang sesuai ketentuannya					V	
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingk						<u></u>
1	Program Perencanaan Lingkungan Hi 1) Persentase dokumen	dup %	100	100	100		Dinas Perkim & LH
	perencanaan lingkungan hidup	70	100	100	100		O 111
	yang ditetapkan						
2	Program Pengendalian Pencemaran d	an.atau Kerus	akan Lingkunga	n n			Dinas Perkim
	2) Persentase jumlah sampel	%	100	100	100		& LH
	lingkungan yang diuji	II (' (77777	I A TI)				D: D 1.
3	Program Pengelolaan Keanekaragama 3) Persentase pengelolaan	n Hayati (KEF %	HATI) 65	65	100		Dinas Perkim & LH
	keanekaragaman Hayati	/0	05	03	100		G L11
4	Program Pengendalian Bahan Berba	ahaya dan Be	eracun (B3) dan	Limbah Bahan	Berbahava (dan Beracun	Dinas Perkim
	(Limbah B3)						& LH
	4) Persentase pengendalian B3	%	10	10	100		
_	dan Limbah B3 yang ditanggani	m 1 :	1 . 1 . 1	1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			<u>.</u>
5	Program Pembinaan dan Pengawasa Lingkungan Hidup (PPLH)	an Ternadap	ızın Lıngkungan	aan Izin Perlir	idungan dan	Pengelolaan	Dinas Perkim & LH
	5) Persentase izin lingkungan		1	1			G L11
	yang diawasi	%	100	100	100		
						-	
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pel			,		at	Dinas Perkim
	6) Persentase pembinaan	%	100	100	100		& LH
	komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan						
	hidup						
7	Program penghargaan lingkungan hic	lup untuk ma	syarakat		1		Dinas Perkim
'	7) Persentase pemberian	%	100	100	100		& LH
	penghargaan lingkungan hidup						
_	untuk masyarakat						<u></u>
8	Program Pengelolaan Persampahan	ı	I	1	1		Dinas Perkim
	8) Persentase sampah yang ditangani	%	17,00	17,00	100		& LH
	9) Persentase sampah yang di						
	kurangi	%	32,50	30,25	93,08		
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Admi	nistrasi Kepe	ndudukan dan F	encatatan Sipil	ı	. ▼	
1	Program Pendaftaran Penduduk					. 🔺	Dinas
	1) Persentase kepemilikan KK	%	97,50	107,25	110		Dukcapil
	2) Persentase kepemilikan KTP-el	%	94,00	99,64	106		
1	3) Persentase kepemilikan KIA	%	30,00	21,55	71,84]

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
2	Program Pencatatan Sipil 4) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	%	97,00	96,15	99,13		Dinas Dukcapil
	5) Persentase cakupan kepemi- likan akta kematian yang peris- tiwa kematiannya dilaporkan	%	100	229,80	229,80		
3	Program Pengelolaan Informasi Admi 6) Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan	nistrasi Kepen %	dudukan 25,71	25,71	100		Dinas Dukcapil
4	perjanjian kinerja Program Pengelolaan Profil Kependuc 7) Persentase penyajian data profil perkembangan kependudukan	lukan %	100	100	100		Dinas Dukcapil
2.7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemb	erdayaan Ma	syarakat dan De	sa			
1	Program Penataan Desa 1) Persentase Nagari yang dilaksanakan penataan nagari- nya	%	10	10	100		Dinas PMN
	2) Jumlah desa mandiri	Nag	9	9	100		
2	Program Administrasi Pemerintahan 3) Persentase pelayanan peme- rintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Desa %	10	10	100		Dinas PMN
	Persentase nagari yang pelayanan administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	%	10	10	100		
	5) Persentase aparatur pemerintahan Nagari/Desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	%	10	10	100		
	Persentase nagari/desa dengan indeks transparansi dana desa kategori baik	%	25	25	100		
_	7) Persentase Peningkatan BUMNAG berkembang	%	10	10	100		
3	Program Pemberdayaan Lembaga Ker 8) Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	nasyarakatan %	, Lembaga Adat o	lan Masyarakat F	100		
	9) Persentase lembaga adat yang difasilitasi	%	25	25	100		
2.8 1	Urusan Pemerintahan Bidang Peng Program Pengendalian Penduduk 1) Angka Kelahiran Total/Total	endalian Pend	luduk dan Kelua	erga Berencana	100		Dinas Dalduk & KB
	Fertility Rate (TFR) 2) Indeks Pembangunan	Nag	53,69	53,69	100		
2	Berwawasan Kependudukan (IPBK) Program Pembinaan Keluarga Bereno	ana (KB)					Dinas Dalduk
	3) Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	<u>%</u>	73,85	73,85	100		& KB
	4) Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	12	12	100		
	5) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,30	20,30	100		
3	Program Pemberdayaan dan Peningk 6) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga/IPK)	atan Keluarga %	Sejahtera (KS) 55,73	52,45	94,11		Dinas Dalduk & KB
	7) Persentase Masyarakat (Remaja/ Catin, Ibu Hamil, Ibu Baduta) di Nagari Stunting yang mendapatkan KIE Stunting	%	28,09	26,67	94,94		
2.9 1	Urusan Pemerintahan Bidang Perhi Program Penyelenggaraan Lalu Linta 1) Persentase ruas jalan mantap yang terpenuhi prasarana jalan		Jalan (LLAJ) 20	20	100		Dinas Perhu- bungan
	sesuai standar 2) Persentase angkutan orang dan	%	80	80	100		
	barang laik jalan 3) Persentase pemenuhan Standar Pelayanan Publik pengujian kendaraan bermotor	%	90	86	95,56		
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Kom		nformatika	<u> </u>		I	1
1	Program Informasi dan Komunikasi I 1) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan		30	30	100		Dinas Kominfo
	strategi komunikasi dan SOP						

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
2	yang telah ditetapkan Program Aplikasi Informatika 2) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	94	94	100	•	Dinas Kominfo
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Kope Program Penilaian Kesehatan KSP/U		ecil dan Meneng	gah 25,40	100		Dinas Dagpe-
2	Persentase koperasi sehat Program Pendidikan dan Latihan Per Persentase koperasi yang persentase koperasi yang	koperasian %	62,50	55,56	88,89		rinkop & UKM Dinas Dagpe- rinkop & UKM
3	mengikuti pelatihan Program Pemberdayaan Usaha Mene: 3) Persentase pertumbuhan usaha	l ngah, Usaha K %	tecil, dan Usaha 2,10	Mikro (UMKM) 1,57	74,91		Dinas Dagpe-
4	mikro Program Pemberdayaan Usaha Mene: 4) Persentase peningkatan omset	l ngah, Usaha K %	tecil, dan Usaha 4,3	Mikro (UMKM) 4,26	99,15		Dinas Dagpe- rinkop & UKM
2.12	usaha mikro Urusan Pemerintahan Bidang Pena: Program Pengembangan Iklim Penan: 1) Persentase Penurunan		0	0	100		Dinas PMPT- SP
2	Pengaduan Pelaku Usaha Program Promosi Penanaman Modal 2) Jumlah investor (investasi	Persh.	1	1	100		Dinas PMPT-
3	diatas 1 Milyar) Program Pelayanan Penanaman Modal 3) Persentase peningkatan penerbitan perizinan penanaman modal yang diterbitkan	%	4,16	4,16	100	•	Dinas PMPT- SP
4	Program Pengendalian Pelaksanaan I 4) Realisasi investasi	Penanaman Mo Rp. Miliar	odal 67	67	100		Dinas PMPT- SP
5	Program Pengelolaan Data dan Siste 5) Persentase keakurasian data dan informasi secara				100	•	Dinas PMPT- SP
2.13	terintegrasi Urusan Pemerintahan Bidang Kepe Program Pengembangan Kapasitas D 1) Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan			13,75	100	•	Dinas Parpora
2	Program Pengembangan Kapasitas D 2) Persentase kualitas cabang olah	aya Saing Keol	lahragaan	100	100		Dinas Parpora
3	raga yang dikembangkan Program pengembangan kapasitas ke 3) Persentase partsipasi pemuda		80	80	100		Dinas Parpora
2.14	dalam kepramukaan Urusan Pemerintahan Bidang Statist Program Penyelenggaraan Statistik S 1) Persentase pemanfaatan data statistic sektoral		80	80	100	•	Dinas Kominfo
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persa Program Penyelenggaraan Persandian 1) Persentase OPD yang telah menggunakan pengamanan		manan Informas	i 20	100	•	Dinas Kominfo
2.16	sistem dengan persandian Urusan Pemerintahan Bidang Kebu Program Pelestarian dan Pengelolaar 1) Jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan		a 50	47	94		Dinas Dikbud
2.17	budaya berbasis ABS SBK Urusan Pemerintahan Bidang Perpu	ıstakaan					
1	Program Pembinaan Perpustakaan 1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1:16	1:16	100		Dinas Pusip
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Rasio	1:450	1:450	100		
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional 3) Persentase peningkatan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	dan Naskah F %	Kuno 5	4	80		Dinas Pusip
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kears Program Pengelolaan Arsip 1) Tingkat ketersediaan arsip statis	sipan 	50	44,50	89,00		Dinas Pusip
2	Program Perlindungan dan Penyelam 2) Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan	atan Arsip %	50	43,50	87,01		Dinas Pusip

December	No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
1. Program Promotination Holdings Relationarian Holdings Ton/Un 238 238 100 Dinas Paperi						1		
Program Pengelolan Perikanan Budidaya I. Jurnalah Total Profuksi Ton/thn			1 72 11					
1 Junalah Total Products Ton/thn 238 238 100				ian				Dinos Popori
Percitanan Budidaya Program pengwasana sumbor daya kolautan dan perikanan 2 Program pengwasana sumbor daya kolautan dan perikanan 3 Junilah Bawasana konservasi kawasan 5 4,6 92	1			238	238	100		Dillas Fapeli
2 Program pengowasan sumber-daya kelautan dan perlaharan 2 Jumlah Rawasan Konservasi Jangah Rawasan Penasaran Hasil Ferikanan 3 Program Pengolahan dan Penasaran Hasil Ferikanan 3 Jumlah Rendapatan Pelakut Ry org 12 000.000 12 000.000 100 Dinas Paperi			1011/ 1111			100		
yang dikelosi secara berickishiputan an Pregram Pengahahan dan Pensasaran Hasil Perikanan 3 Bergaman Pengahahan dan Pensasaran Hasil Perikanan 3 Susha Perikanan 3 Susha Perikanan Pensasaran Hasil Perikanan 3 Susha Pensasaran Pensa	2	Program pengawasan sumber daya k	elautan dan pe					Dinas Paperi
Sericleanjutum Seri		l '	kawasan	5	4,6	92		
3 Program Pengelahan dan Penasaran Hasil Perikanan 2,000.000 12,000.000 100 0 0 0 0 0 0 0		, , ,					_	
3.) Urusan Pendapatan Pelaku Ryorg 12.000.000 12.000.000 100 Urusan Pemeritahan Bidang Patrivisata 100 10	3		 Hasil Perikana	ın .				Dinas Paneri
Usaha Perikanan Dinas Parpora			i e	i	12 000 000	100		Dilias Lapell
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1) Persentase peningkatan pengera-bangan destinasi 2 10 7 70			149/015	12.000.000	12.000.000	100		
1) Persentase peningkatan % 10 7 70	3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariw	risata					
pengem-bangan destinasi pengem-bangan destinasi pengem-bangan Prawisata	1							Dinas Parpora
2 Program Perasaran Pariwisata 2) Persentase promosi pariwisata 3) Program Pengembangan Samber Daya Pariwisata dan Ekonomi Krestif 3) Conomi krestif yang sesuai 3.3 Urusa Parentifahan Bidang Pertanian 1) Program Pengendiana dan Pengembangan Sarana Pertanian 1) Program Pengendiana dan Pengembangan Sarana Pertanian 2) Persentase penjenjekatan penjentahan pengembangan dan pengemba			%	10	7	70		
Program Pemsarsan Pariwisata 2 Persentase promosi pariwisata 5 100		1 1 0					•	
2) Program Progrembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Krestif 3) Program Program Program Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Krestif 3) Program Program Program Sanan Pertanian 1	2	-						Dinas Parnora
3 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 Persentase peningkatan pelaku % 1 0.75 75			%	100	100	100		Billao Tarpora
3.3 Program Pengediaan pertamian 1 0,75 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
ckonomi kreatif yang sesuai standar	3			an Ekonomi Kre				Dinas Parpora
Standar Standar Standar Standar Standar Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1) Persentase peringingkatan pertanian 2) Persentase UPSIP yang terbina % 100			%	1	0,75	75		
3.3 Program Pengelandan Bidang Pertanian 1) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian 2) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian pertanian 2) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan pertanian pertanian sarana pertanian sarana pertanian sarana pertanian sarana pertanian sarana penyediaan dan pengembangan Prasarana Pertanian 5 4,25 85 7 7 7 7 7 7 7 7 7							•	
1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1) Persentase peningkatan pertahun 2) Persentase UPSHP yang terbina melalui pengembangan sarana pertahun 2) Persentase UPSHP yang terbina melalui pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan pertahun 4) Persentase peningkatan pengembangan prasarana pertahun 4) Persentase peningkatan pertahun 5 4,25 85	2 2		nian					
1) Persentase peningkatan penye- diaan dan pengembangan sarana pertanian per tahun 2) Persentase UPSIP yang terbina	1			rtanian				Dinas Perta-
Sarana pertanian per tahun 2 Persentase UP3H yang terbina 100 1	_				4,75	95		
2) Persentase UP3HP yang terbian melahui pengembangan dan hengembangan dan pengembangan dan pengembangan dan pengembangan prasarana pertanian 2 Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian 3) Persentase peningkatan 5 4,25 85		1 0 0						
melalui pengembangan dan pengembangan garana pertanian pertanian pertanian 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan 4) Persentase peningkatan pertanian 4) Persentase peningkatan pertanian 5 4,25 85								
pengembangan sarana pertanian 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3) Persentase peningkatan pertahun 4) Persentase UP3HP yang terbina melalui pengembangan prasarana pertahun 4) Persentase UP3HP yang terbina melalui pengembangan prasarana pertahun 4) Persentase UP3HP yang terbina melalui pengembangan dan pengembangan prasarana pertanian 5) Tingkat kematian ternak % 3 3 100 minas Pertanian pertahun 4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5) Tingkat kematian ternak % 3 3 100 minas Pertanian pertahun dan pengembangan prasarana pertanian dan pengendalian dan pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian 6) Presentase Lusa areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT: % 95 95 100 minas Pertanian penanggulangan bencana OPT: % 95 95 100 minas Pertanian penanggulangan bencana OPT: % 95 95 100 minas Pertanian penanggulangan bencana OPT: % 80 80 100 minas Pertanian penanggulangan bencana OPT: % 75 75 100 minas Pertanian penanggulangan bencana OPT: % 80 80 80 100 minas Pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik 6 Program Penyuluhan Pertanian % 75 75 75 100 minas Pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik 7 Program Perinjana Usaha Pertanian % 2 1,87 93,5 minas Dagperinkop & UKM 1 Program Peringkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan yang representang erdagangan yang pengangan yang pengangan pengangan yang pengangan pengangan pengangan yang pengangan pengangan yang pengangan pengangan pengangan yang pengangan pengangan pengangan pengangan yang pengangan pengangan yang pengangan pengangan pengangan yang difasilitasi pengangan yang difasilitasi pengangan pengangan yang difasilitasi peng			%	100	100	100		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3) Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan 5 4,25 85 mian 100								
2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pertadun dan pengembangan prasarana pertadun dan pengembangan perasarana pertadun dan pengembangan perasarana pertadun dan pengembangan dan pengembangan prasarana pertadun dan pengembangan prasarana pertadua dan pengembangan dan pengembanga								
3) Persentase peningkatan % 5 4,25 85	2		ı gan Prasarana	Pertanian	l	1	I	Dinas Perta-
## Presentase Unitary and Presentation Pertanian persanan persananan persanan persanan persanan persanan persanan persananan persananana	_				4,25	85		
4 Persentase UP3HP yang terbina melalui pengembangan prasarana pertanian 100								
melalui pengembangan dan pertanian pertanian pertanian pertanian pertanian melalui pengembangan prasarana pertanian menaluk % 3 3 100								
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3 100				100	100	100		
Pergam Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner S) Tingkat kematian ternak % 3 3 100		1 2 2						
3 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Tingkat kematian ternak % 3 3 100								
Si Tingkat kematian ternak		·						
Si Tingkat kematian ternak								1 1
4 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6) Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT: % 95 95 100 2 - Tanaman Pangan % 90 90 100 3 - Hortikultura % 80 80 80 100 4 - Perkebunan 5 Program Penyuluhan Pertanian % 75 75 100 6 Program Perizinan Usaha Pertanian % 7 75 75 100 7 Program Perizinan Usaha Pertanian 8) Persentase penyuluh pertanian % 2 1,87 93,5 mian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik 9 Persentase penyuluh pertanian % 2 1,87 93,5 mian yang pertanian 8) Persentase peningkatan usulan % 2 1,87 93,5 mian yang pertanian 19 Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 19 Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 19 Persentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 19 Persentase peningkatan Sarana Perdagangan yang representatif 9 Persentase stabilitas dan % 21,56 17,25 80 7 Dinas Dagperinkop & UKM 9 Dinas Dagperinkop & U	3					100		
September Liasa areal pengendalian Canapagan C	4] 3	100		- '
ngendalian dan penanggulangan bencana OPT: % 95 95 100 - Tanaman Pangan % 90 90 100 - Hortikultura % 80 80 80 100 - Perkebunan 7) Presentase penyuluhan Pertanian 7) Presentase penyuluh pertanian 90 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 100 90 90 90 100 90 90 100 90 90 90 100 90 90 90 100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	'				1			
- Tanaman Pangan								
- Hortikultura		penanggulangan bencana OPT :						
- Perkebunan Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Nersentase peningkatan usulan Nersentase peningkatan usulan Nersentase peningkatan usulan Nersentase peningkatan usulan Nersentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Nersentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Nersentase peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Nersentase peningkatan Sarana Membarana Perdagangan Nersentase peningkatan Sarana Membarana Perdagangan Nersentase stabilitasi dan Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase stabilitasi dan Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi dan Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Sabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Nersentase Produk Uurry Nersentase Sabilitasi Penasaran Nersentase Produk Unggulan Negeri Nersentase Penduk Unggulan Nersentase Nersentase Nersentase Ners								
5 Program Penyuluhan Pertanian 7 Presentase penyuluh pertanian 9 75 75 100			%	80	80	100		
7) Presentase penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	_							Dinos Porto
yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik Pergoram Perizinan Usaha Pertanian 8) Persentase peningkatan usulan % 2 1,87 93,5			%	75	75	100		
Program Perizinan Usaha Pertanian 8 Persentase peningkatan usulan % 2 1,87 93,5			,,,					1110011
8) Fersentase peningkatan usulan izin usaha pertanian 3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1) Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, stakar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang sherang difasilitasi pemasaran 5) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan barang yang difasilitasi pemasaran sherang yang difasilitasi pemasaran sherang yang difasilitasi pemasaran sherang yang difasilitasi permasaran sherang yang difasilitasi permasaran sherang yang difasilitasi permasaran sherang difasilitasi permasarang sherang		kinerja baik						_
S.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1) Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok S.95 S.5 Dinas Dagperinkop & UKM	6							
3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dinas Dagperinkop & UKM			%	2	1,87	93,5		nian
1 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1) Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89	2.4			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		Dinos Dos
1) Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif 2 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitas dan % 7,00 5,95 85 Dinas Dagperinkop & UKM jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, % 18,51 14,81 80 Dinas Dagperinkop & UKM takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang % 30 30 100 Dinas Dagperinkop & UKM difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan % 35,70 35,70 100 Dinas Dagperinkop & UKM 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89				ın				
dan prasarana perdagangan yang representatif 2 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitas dan % 7,00 5,95 85 pinkop & UKM jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, 14kar, 1	1		, 00		17 25	80		IIIINOP & UKW
yang representatif 2 Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 2) Persentase stabilitasi dan yong jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok 3 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89			, , ,]	17,20			
2) Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89		yang representatif						
jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, % 18,51 14,81 80 Dinas Dagperinkop & UKM takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan % 35,70 35,70 100 Dinas Dagperinkop & UKM 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89	2							
barang kebutuhan pokok Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89		l '	%	7,00	5,95	85		rinkop & UKM
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 3) Persentase alat-alat ukur, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89							_	
3) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan 5 Dersentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89	3		an Konsumer	l	I	I .	I	Dinas Dame
takar, timbang dan perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang % 30 30 100 Dinas Dagperinkop & UKM 5) Persentase Produk Unggulan % 35,70 35,70 100 Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89					14.81	80		
perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku 4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan				10,51	1.,51			
4 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89		perlengkapanya (UTTP) yang						
4) Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan Saparan 5) Persentase Produk Unggulan Saparan 5) Persentase Produk Unggulan Saparan 6) Persentase Produk Unggulan Saparan 7) Persentase Produk Unggulan Saparan 8) Promosinya 6) Dinas Dagperinkop & UKM 7) Persentase produk IKM yang Saparan Sa			L	L				↓
difasilitasi pemasaran 5) Persentase Produk Unggulan % 35,70 35,70 100 Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89	4				I =-			
5) Persentase Produk Unggulan % 35,70 35,70 100 Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89			%	30	30	100		rınkop & UKM
Daerah yang difasilitasi Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89			0/.	35 70	35.70	100		
Promosinya 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89		,	/0	35,70	33,70	100		
3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89		, , ,						
1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 1) Persentase produk IKM yang % 27,00 24,00 88,89	3.5		dustrian	•				Dinas Dagpe-
	1		1	ı	1	1		
perstandarisasi dan			%	27,00	24,00	88,89		
	I	perstandarisasi dan	I	1	I	I	▼	_ l

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
0	bersertifikasi				` '		D: D
2	Program pengelolaan sistem informas 2) Persentase ketersediaan	si industri nasi %	ional 100	100	100		Dinas Dagpe- rinkop & UKM
	informasi data industri secara	,,,			100		limiop a omi
	lengkap dan terkini						
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Trans Program Pembangunan Kawasan Tra						Dinas Naker-
-	1) Persentase sarana dan	%	60	60	100		trans
	prasarana kawasan						
2	transmigrasi yang dibangun Program Pengembangan Kawasan Tra	nemigraei					Dinas Naker-
4	2) Persentase pengembangan	%	70	70	100		trans
	kawasan transmigrasi						
4 4.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerint Sekretariat Daerah	ahan					
1	Program Pemerintahan dan Kesejahte	eraan Rakyat					
	1) Persentase terfasilitasinya	%	100	100	100		
	kebijakan di bidang pemerintahan dan						
	kesejahteraan rakyat						
2	Program Perekonomian dan Pembang						
	2) Persentase terfasilitasinya	%	100	100	100		
	kebijakan di bidang perekonomian dan						
	pembangunan		<u> </u>				<u> </u>
3	Program Administrasi Umum						
	3) Persentase terfasilitasinya kebija-kan di bidang	%	100	100	100		
	adminiatrasi umum						
4.2	Sekretariat DPRD						
1	Program Dukungan Pelaksanaan Tug	as dan Fungsi %	DPRD 100	100	100		
	Persentase Ranperda yang difasilitasi menjadi Perda	70	100	100	100		
	2) Persentase penjaringan aspirasi	%	100	100	100		****
_	masyarakat yang difasilitasi						
5 5.1	Unsur Penunjang Urusan Pemerinta Unsur Perencanaan	ahan 	I	1			
1	Program Perencanaan, Pengendalian	। dan Evaluasi l	। Pembangunan D	aerah	'		Bapppeda
	1) Persentase capaian kinerja	%	95	88,30	92,95		
	rencana pembangunan daerah bernilai tinggi dan sangat tinggi						
2	Program koordinasi dan sinkronisasi	perencanaan 1	l pembangunan da	l aerah			Bapppeda
	2) Persentase keselarasan rencana	%	100	100	100		
5.2	pembangunan Unsur Keuangan						
1	Program Pengelolaan Keuangan Daer	ah					BKAD
	1) Kesesuaian pagu program RKPD	%	100	95	95		
	dan KUA-PPAS 2) Penetapan APBD dan APBD-P	waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100		
	tepat waktu	waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu	100		
	3) Persentase penyaluran belanja	%	95	83,63	88,03		
	daerah	0/	100	100	100		
	4) Persentase SKPD penyampaian laporan tepat waktu	%	100	100	100		
	5) Persentase Perangkat Daerah	%	100	100	100		
	yang telah menyusun laporan						
5.3	keuangan sesuai SAP Unsur Kepegawaian						+
1	Program Kepegawaian Daerah		1	1	'		BKPSDM
	1) Persentase penyelesaian	%	50,00	42,50	85,00		
	administrasi kepegawaian sesuai dengan NSPK					•	
5.4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan						
1	Program Pengembangan SDM						BKPSDM
	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap pendidikan menengah	%	87,02	87,02	100		
	/dasar						
	2) Rasio jabatan fungsional	%	4,71	4,71	100		
	bersertifikat Kompetensi	0/			100		
	Persentase ASN yang memiliki kinerja baik	%	87	87	100		
5.5	Unsur Penelitian dan Pengembanga		1	1			
1	Program Penelitian dan Pengembar		1 00	1 00	100		Bapppeda
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanf-	%	80	80	100		
	aaatkan/ dipedomani dalam						
	penyu-sunan perencanaan dan						
_	perumusan kebijakan daerah						
6 6.1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerin Inspektorat Daerah	Lanafi					
1	Program Penyelenggaraan Pengawa						
	1) Persentase penyelesaian tindak	%	100	74,00	74,00		
	lanjut temuan BPK RI 2) Tingkat Kapabilitas APIP	level	3	2+	80,00	Ť	
	2) Illignat Napaullitas AFIF	TEACT	. 3	∠⊤	00,00		_

No.	Program/Indikator Kinerja	Sat.	'arget Kinerja RKPD 2021	Real. Kinerja RKPD 2021	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Simbol Kriteria Capaian	PD Penanggung Jawab
2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi							
	3) Tingkat maturitas SPIP	level	3	2	66,67		
	4) Nilai MCP Pencegahan Korupsi	Nilai	80	51	63,75		
	KPK						
7	Unsur Kewilayahan						
7.1	Kecamatan						
1	Program Penyelenggaraan Pemerintal	nan dan Pelaya	anan Publik				
	1)Indeks kepuasan Masyarakat	%	75	73	97,33		
2	Program Pemberdayaan Masyarakat 1	Desa				. · · ·	
	2) Persentase nagari/ desa dengan	%	40	43,11	107,78		
	kategori minimal maju						
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pe						
	3) Persentase penurunan potensi	%	0	0	100		
	konflik						
4	Program Pembinaan dan Pengawasar			1	1	1	
	4) Persentase administrasi ke-	%	90	90	100		
	uangan nagari yang						
	dilaksanakan sesuai standar	.,			100		
	5) Persentase administrasi pe-	%	90	90	100		
	merintahan nagari yang dilak- sanakan sesuai standar						
	Unsur Pemerintahan Umum						Kantor Kes-
8 1	Program Penguatan Ideologi Pancasil	 n dan Karakter	 r Kebangsaan		I	l	Bangpol & Lin
1 1	1) Persentase kelompok	W	20	16	80		mas
	masyarakat yang mendapatkan	/0	20	10	80		ilias
	pembinaan wawasan					*	
	kebangsaan						
2	Program Peningkatan Peran Parta	i Politik dan	Lembaga Pen	didikan Melalu	i Pendidikan	Politik dan	
-	Pengembangan Etika Serta Budaya P		Domouga 101	.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a		101111111111111111111111111111111111111	
	2) Persentase Partai Politik yang	%	20	0	0		
	melaksanakan pendidikan						
	politik						
3	Program Pemberdayaan dan Pengawa	ısan Organisas	si Kemasyarakat	an			
	3) Persentase organisasi kemasya-	%	80	80	100		
	rakatan yang aktif						
4	Program Pembinaan dan Pengemban	gan Ketahanar	Ekonomi, Sosia	al dan Budaya			
	4) Persentase penurunan penya-	%	2	2	100		
	lahgunaan narkotika						
5	Program Peningkatan Kewaspadaan	Nasional dan	Peningkatan K	ualitas dan Fas	ilitasi Penang	anan Konflik	
	Sosial		S		Ü	_	
	5) Persentase penurunan konflik	%	3	3	100		
	sosial						
\Box	Sumber: Lanoran Evaluasi Hasil	D 1 1	DIVIDID II 1 O		1		l .

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab. Sijunjung 2021

2.2.2. Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021

Berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2021, terlihat belum menunjukkan capaian yang signifikan, karena terdapat sebagian besar realisasi kinerja program pembangunan belum memenuhi target yang ditetapkan. Kondisi tersebut, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor hambatan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.75
Faktor Hambatan Pelaksanaan RKPD Tahun 2021

	Fakt	or l	Hambatan
	Internal		Eksternal
1)	Belum optimalnya sumber daya aparatur dalam merumuskan	1)	Terjadinya perubahan kebijakan pe-merintah dalam penyusunan perencanaan dan
	aparatur dalam merumuskan perencanaan, pengendalian dan		dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.
	evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja	2)	Fokus pemerintahan dalam penanggan
	Perangkat Daerah		pandemi covid-19, sehingga berimplikasi
2)	Keterbatasan pemahaman sumber daya		terhadap pelaksanaan RKPD.
	aparatur dalam menyusun time	3)	Keterbatasan kualitas pihak penyedia barang
	schedule program/kegiatan/ sub		dan jasa, terutama pekerjaan konstruksi.
	kegiatan, sehingga berimplikasi	4)	Terbatasnya waktu proses pengadaan tanah
	terhadap pencapaian target RKPD.		dan izin lokasi yang berada dalam kawasan
3)	Keterbatasan kuantitas dan kualitas		hutan untuk pelaksanaan
	sumber daya dalam mengelola		program/kegiatan/sub kegiatan pem-
	program/kegiatan/ sub kegiatan		bangunan yang bersifat fisik.
	pembangunan secara efektif.		

2.2.3. Upaya-Upaya Perbaikan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021

Untuk mengatasi faktor hambatan terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2021, maka diperlukan upaya-upaya perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan rencana tahun rencana berikutnya, antara lain :

- 1. Perangkat Daerah perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja secara holistik sesuai isu-isu strategis pembangunan daerah. Sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tema dan agenda pembangunan daerah.
- 2. Perangkat Daerah perlu melakukan koordinasi yang efektif dengan Kementerian/Lembaga untuk memperoleh informasi terkait dengan petunjuk teknis penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, terutama bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan sumber pendanaan lainnya, baik pusat maupun provinsi.
- 3. Perangkat Daerah terkait perlu menciptakan strategi yang efektif dalam melalukan proses pengadaan tanah dan izin lokasi yang berada dalam kawasan hutan.
- 4. Perangkat Daerah terkait perlu mencermati dan menilai secara objektif terhadap pihak penyedia barang dan jasa, terutama pekerjaan konstruksi agar tidak berimplikasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun rencana berikutnya.
- 5. Perangkat Daerah perlu melakukan upaya perubahan dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun rencana berikutnya secara inovatif dan adaptif.

2.2.4. Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Dari sisi manajemen pemerintahan, bidang-bidang pelayanan dasar yang tercakup dalam SPM ini termasuk dalam penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian, pembiayaannya dalam APBD maupun APBN menjadi prioritas. Terkait dengan pengadaan pelayanan dasar, untuk menjamin akses dan mutu pelayanannya, disusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya dapat dikatakan bahwa mau tidak mau harus diselenggarakan tanpa melihat pada potensi maupun pertumbuhan daerah, karena pelayanan minimal ini menjadi bagian dari penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan dasar ini harus mengikuti ketentuan teknis yang ditentukan dalam SPM yang ditetapkan masing-masing Kementerian / Lembaga (K/L).

Penerapan SPM menjadi sangat *urgent* dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Di setiap Unit Kerja Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan tugastugasnya sudah diberikan koridor berupa tugas dan fungsi yang menggambarkan cakupan kegiatan yang harus dijalankan pendanaan yang tertuang dalam APBD/APBN. Tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok yang merupakan pelayanan dasar yangwajib diberikan sesuai kegiatan masing-masing unit kerja.

Kegiatan SPM bukan merupakan kegiatan yang terpisah dari tugas dan fungsi Unit Kerja, tetapi merupakan bagian dari program dan kegiatan dari satu unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD/APBN. Dengan

demikian, tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan Unit Kerja. Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.76

Jenis Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah
Kabupaten Sijunjung

No	Bidang Pelayanan Dasar	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Indikator	Target Pencapaian
1	Pendidikan	3	3	2021
2	Kesehatan	12	12	2021
3	Pekerjaan Umum	2	2	2021
4	Perumahan Rakyat	2	2	2021
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	5	2021
6	Sosial	5	5	2021

Berdasarkan jenis SPM tersebut, capaian SPM Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 berdasarkan target yang telah ditetapkan, tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.77
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

	Kabupaten Sijunjung Tahun 2021				
No.	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
I.	Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpar-tisipasi dalam pendidikan PAUD	10.368	10.368	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpar-tisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	36.568	36.568	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	408	408	100
II.	Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	5.641	3963	70,25
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan ke- sehatan	5.384	4.127	76,83
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	5.128	4.047	78,92
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	25.358	19.681	77,6
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang men-dapatkan layanan kese-hatan	12.218	9804	80,24
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang menda-patkan layanan kesehatan	162.345	101.650	62

No.	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	20.886	19.901	95,3
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara pen-derita hipertensi yang men-dapatkan layanan kese-hatan	43.346	23.496	54,2
9	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes meli- tus yang mendapatkan layanan kesehatan	1.136	1.136	100
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGKJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang men- dapatkan layanan kese- hatan	521	500	96
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberko- losis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang medapatkan layanan kese-hatan	3.225	1.645	51
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (human immuno- defiency)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya Tahan Tubuh (human immunodefiency virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.831	4.821	99,8
III.	Bidang Pekerjaan Umum	1			
1	Penyedia kebutuhan po- kok air minum sehari- hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebu- tuhan pokok air minum sehari-hari	277.653	269.145	96,93
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pe-ngolahan air limbah do-mestik	240.916	104.552	43,40
IV.	Bidang Perumahan Rakya				
1	Penyediaan dan reha- bilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan ru- mah yang layak huni bagi masyarakat yang tekena relokasi program pemerintah	Penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak Relokasi Prog- ram Pemerintah	0	0	0
V .		tertiban Umum dan Perlind			0
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	0
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan infor-masi rawan bencana	30.500	30.500	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ter- hadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pen-cegahan dan kesiapsia-gaan terhadap bencana	75	75	100

No.	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Real	Capaian (%)
4	Pelayanan penyelama- tan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pe-nyelamatan dan evakuasi korban bencana	45	44	97,97
V.	Bidang Ketentraman, Ke	tertiban Umum dan Perlindı	ıngan Mas	syarakat	
5	Pelayanan Penye- lamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pe-nyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	43	39	90,70
VI.	Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh reha- bilitasi sosial diluar panti	152	152	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	86	86	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia ter-lantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar ya-ng memperoleh rehabil-itasi sosial di luar panti	30	30	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social di luar panti	9	9	100
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlin- dungan dan jaminan sosial	170	166%	100

Sumber: Laporan Pelaksanaan SPM 2021, Setdakab Kabupaten Sijunjung , 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang belum optimal pencapaian SPM pada tahun 2021, yaitu; Bidang kesehatan, Bidang pekerjaan umum dan Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Belum optimalnya capaian ke-3 bidang pelayanan dasar, disebabkan, antara lain; 1) keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya (anggaran, SDM dan sarana prasarana) dan 2) belum adanya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah terhadap layanan yang diberikan. Kondisi ini sangat berkolerasi terhadap pencapaian kinerja program pembangunan Tahun 2021, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2021.

Sedangkan pelayanan dasar bidang perumahan rakyat pada pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten tidak dapat dilaksanakan karena tidak terdapat rumah yang mengalami kerusakan berdasarkan kategori tingkat kerusakan akibat bencana alam. Disamping itu, juga tidak ada tidak adanya laporan terkait rumah warga yang membutuhkan bantuan akibat bencana alam. Sementara itu, pelayanan bantuan rumah akibat rekolasi program pemerintah juga tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan karena memang belum ada rencana pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan yang bersifat memindahkan perumahan dan pemukiman warga.

Belum optimalnya pencapaian 3 (tiga) bidang pelayanan dasar terhadap target sangat memberi dampak terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung dalam memenuhi target SPM sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, dalam merumuskan rencana pembangunan daerah pada tahun rencana berikutnya kondisi ini perlu dijadikan perhatian dan prioritas utama pembangunan, melalui perumusan masalah bidang urusan pemerintahan. Sehingga tidak berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

2.2.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 1, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU merupakan media evaluasi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam memastikan dan menjamin tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 merupakan bagian strategis dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun rencana berikutnya. Hal ini sangat berkaitan dengan kepastian dan terjaminnya capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan melalui dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021 tersebut, jumlah IKU sebanyak 29 (dua puluh sembilan) buah dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 18 (delapan belas), maka secara ratarata tingkat capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 sebesar 93,54%. Capaian tersebut, mencerminkan bervariasinya tingkat capaian IKU, sehingga belum mendekati target yang optimal. Adapun capaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.78 Capaian Indikator Kierja Utama Permerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

	Sijunjung				
No.	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)
Misi 1	: Mewujudkan perekonomian masy	arakat ya	ng kuat, be	rdaya saing	tinggi dan
sejaht	era				
Sasara	an 1.1 : Meningkatnya investasi daerah	L			
1	Investasi PMDN	Rp.	8.779.87	10.344.27	117,81
		Juta	5	7	
2	Investasi PMA	US\$	190.000	193.559	101.87
Sasara	an 1.2 : Meningkatnya laju pertumbuh	an ekonom	i sektor stra	tegis	
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	6,49	11,67	179,81
4	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	4,59	2,73	59,48
5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	30,62	27,46	89,68
Sasara	an 1.3 : Meningkatnya pertumbuhan pa	ariwisata			
6	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	9,29	3,82	41,11
Sasara	an 1.4 : Menurunnya kemiskinan dan p	enganggu	ran		
7	Angka kemiskinan	%	6,40	6,80	93,75
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00	3,57	107,5
Sasara	an 1.5 : Meningkatnya kesejahteraan p	etani	•		
9	Nilai tukar petani	Indeks	100,21	107,60	107,37
Misi 2	2 : Mewujudkan Kualitas sumber da	ya manu			
	hlak mulia	•		,	,

No.	Misi/Sasaran/Indikator Kinerja Utama	Sat.	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Sasara	an 2.1 : Meningkatnya tingkat pendidik	an dan m	utu pendidik	an		
10	Rata-rata lama sekolah	Tahun	12,00	8,12	67,66	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,56	12,38	91,30	
Sasara	an 2.2 : Meningkatnya derajat kesehata	ın masyara	akat			
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	67,50	66,36	98,31	
Sasara	an 2.3 : Meningkatnya pembangunan d	an pembe	rdayaan gen	der		
13	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,40	93,40	101,08	
14	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	56,30	59,93	106,40	
Misi 3	: Mewujudkan infrastruktur yang be	rkualitas	dan merata			
	an 3.1 : Meningkatnya kualitas dan ku					
15	Persentase panjang jalan kabupaten dengan kondisi mantap	%	65,00	61,76	95,01	
Sagara	an 3.2 : Meningkatnya kawasan perm	l Ilkiman se	l ehat dan me	eniiminnya m	ımah tidak	
layak		ukiiiaii s	ciiat daii iii	ilulullilya 1	aman duak	
16	Persentase permukiman sehat	%	75,00	87,99	117,32	
17	Persentase penurunan rumah tidak	%	20,00	1,50	7,50	
''	layak huni	/0	20,00	1,50	7,50	
Sasara	an 3.3 : Meningkatnya kualitas bar	ıgunan ge	edung perka	antoran dan	bangunan	
	lolaan sumber daya air	-8	В Г			
18	Persentase sarana gedung kantor	%	95,00	87,50	92,10	
	yang layak fungsi		,	,	,	
19	Persentase pengelolaan sumber	%	60	70,69	117,81	
	daya air yang layak fungsi					
Misi 4	: Mewujudkan pemerintahan yang b	ekerja da:	n melayani			
Sasara	an 4.1 : Meningkatnya tata kelola, tra	nsparansi	dan akunta	abilitas penye	elenggaraan	
pemer	intahan					
20	Nilai AKIP	Kategori	В	В	100	
21	Opini terhadap LKPD	predikat	WTP	WTP	WTP	
22	Leveling Maturitas SPIP	Level	4	2	50	
23	indeks e-Governance/SPBE	Indeks	2,84	1,88	66,20	
Sasara	an 4.2 : Meningkatnya kualitas ASN		1			
24	Indek profesional ASN	Indeks	55	51,07	92,85	
Sasara	an 4.3 : Meningkatnya kualitas pelayar	an publik				
25	Rata-rata Indeks Kepuasan	Nilai	82	81,93	99,91	
25	Masyarakat	Iviiai				
Misi 5	: Mengoptimalkan pengelolaan sum	berdaya a	lam yang be	rwawasan li	ngkungan	
Sasara	an 5.1 : Terpeliharanya kualitas lingku	ngan hidu	p			
26	Indeks kualitas Lingkungan hidup	Indeks	74,70	73,11	98,80	
Sasara	an 5.2 : Persentase penurunan titik rav	van bencai	na			
27	Persentase penurunan titik rawan bencana	%	50	35	87,5	
Misi 6	5 : Melakukan revitalisasi adat dan	budava 1	berlandaska	n adat basa	ndi svara	
	basandi kitabullah kitabullah	Duudyu .	J	ar dadt baba	July Oyulu ,	
	an 6.1 : Menguatnya implementasi	adat da	n budava	dalam tata	kehidupan	
masya						
28	Persentase penurunan sengketa	%	20	8	160	
adat nagari						
	an 6.2 : Meningkatnya pelestarian (kha					
29	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	97,21	97,21	
		Rata-ra	ta tingkat c	apaian IKU	93,54	
Cr. resp la r	r: Lanoran Kineria Instansi Pemerintal				•	

Sumber; Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2021, Setdakab Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa pencapaian masing-masing IKU sebagian besar belum sesuai dengan target. Namun disisi lain, pencapaian target sektor ekonomi cukup optimal karena dipengaruhinya capaian bidang perdagangan dan investasi serta tingkat kesejahteraan petani dan diikuti tingkat pengganguran terbuka diatas target. Sementara itu, capaian angka kemiskinan serta diikuti bidang pertanian, peridustrian dan pariwisata tidak tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh belum optimalnya capaian sektor infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya

Peraturan Daerah terkait dengan pembangunan jalan yang terstruktu dan terbatasnya pihak penyediaa jasa sesuai dengan kualifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, masih rendahnya capaian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya *updating* data setiap tahun dan pelaksanaan kegiatan masih bersifat masih parsial antar sektor.

Sedangkan sektor pembangunan manusia juga belum menunjukkan capaian yang optimal sesuai dengan target, terutama bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan manusia masih jauh dari tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Sehingga perlu menjadi skala prioritas pembangunan, disamping memenuhi target SPM. Sementara itu, bidang pembangunan dan pemberdayaan gender menunjukkan capaian yang optimal karena melebihi target. Kondisi ini menunjukkan adanya kualitas pembangunan dan kesetaraan gender yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Sementara itu, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terdapat capaian IKU yang belum optimal, terutama Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sehingga berimplikasi terhadap pencapaian reformasi birokrasi ditataran Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih karena softkiil manage-ment masih berorientasi kepada pelaksanaan fungsi kelembagaan dan terbatasnya kemampuan fiskal daerah.

Belum optimalnya secara rata-rata pencapaian IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, sangat berkorelasi terhadap pencapaian indikator kinerja makro pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021, terutama laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita dan angka kemiskinan yang tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Capaian Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Sat.	Target	Realisasi
1	Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,63	3,15
2	PDRB per-kapita	Rp juta	44,72	40,31
3	Indeks Pembangunan Manusia	poin	68,39	67,86
4	Angka kemiskinan	%	6,40	6,80
5	Tingkat Pengganguran Terbuka	%	4,00	3,57
6	Gini Rasio	Indeks	0,286	0,270

Sumber; RKPD Kab. Sijunjung Th. 2021 dan BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas pencapaian indikator kinerja makro pembangunan secara target pada umumnya belum sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016-2021. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan rencana pembangunan setiap tahun rencana berjalan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dalam merumuskan dan menetapkan arah dan kebijakan pembangunan pada tahun rencana berikutnya perlu mennciptakan strategi yang efektif sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Gambaran capaian IKU dan indikator makro pembangunan pada Tahun 2021 merupakan salah satu pedoman dalam merumuskan permasalahan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun rencana 2023. Permasalahan pembangunan daerah menjadi dasar dalam merumuskan isu-isu strategis/aktual pembangunan daerah,

sehingga dapat dpembangunan daerah merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi dalam mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Secara umum permasalahan makro pembangunan Kabupaten Sijunjung yang perlu dioptimalkan penangganannya pada tahun 2023, sebagai berikut :

- 1. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan dan sektor unggulan daerah
- 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 3. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial masyarakat
- 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pengembangan wilayah
- 5. Belum optimalnya kualitas pelayanan dasar dan layanan publik

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan berdasarkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 (tahun rencana), dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.80
Prioritas dan Permasalahan Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023
1.	Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan berbasis karakter dan tekonologi informasi.	3
2.	Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang merata dan berkeadilan.	

No	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023
3.	Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tana-man pangan, holtikultura, perkebunan dan perika-nan.	 a. Rendahnya daya saing produk pertanian b. Nilai tambah produk pertanian belum berkembang c. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan, d. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan, e. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh. f. Rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan g. Rendahnya daya saing produk pertanian dan perikanan h. Belum optimalnya akses pemasaran produk pertanian dan perikanan
4.	Pengembanga pariwisata berbasis kearifan lokal.	 a. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Geopark Ranah Minang Silokek. b. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata, c. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif, d. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, e. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan, f. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan, g. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.
5.	Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah	

No	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023	Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023
6.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta prasarana dasar	 a. Cukup rendahnya tingkat kemantapan jalan b. Belum terkoneksinya daerah-daerah pertumbuhan ekonomi c. Cukup rendahnya cakupan layanan irigasi. d. Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur kawasan perumahan. e. Belum optimalnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin. f. Cukup rendahnya pemenuhan air minum dan sanitasi yang layak. g. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi. h. Masih rendahnya cakupan layanan internet setiap nagari/desa
7.	Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkun-gan.	
8.	Peningkatan kualitas per-lindungan dan kesejah-teraan sosial.	 a. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan DTKS dalam perencanaan pembangunan b. Masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) c. Masih tinggi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak d. Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu e. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terstruktur dan efektif f. Belum optimalnya pemberdayaan nagari dalam meningkatkan status pembangunan Nagari/Desa g. Rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga berimplikasi terhadap pendapatan masyarakat.
9.	Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).	

No	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023			Permasalahan Pembangunan Daerah Tahun 2023				
	Peningkatan kualitas pelayanan publik.	biro-krasi da	n a. b. c. d. e. f. g.	Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi Softkiil management masih berorientasi kepada pelaksanaan fungsi kelembagaan. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Rendahnya Indeks Profesionalitas ASN. Rendahnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Belum optimalnya penerapan SPIP. Belum berkembangnya penerapan standar pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Daerah.				

2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah tahun dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. penting Namun. yang lebih adalah indentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021. Permasalahan-permasalahan Sijunjung Tahun Kabupaten 2022 diklasifikasikan berdasarkan pembangunan tahun pemerintahan sebagai berikut:

2.3.2.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - Beberapa permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai berikut :
 - a. Masih rendahnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.
 - b. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) janjang pendidikan dasar.
 - c. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan PAUD.
 - d. Belum adanya sekolah yang memiliki nilai assesment minimal baik.
 - e. Belum adanya data siswa dengan nilai kompetensi literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum.
- 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
- b. Cukup tingginya Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup.
- c. Belum optimal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
- d. Pelaksanaan sistem rujukan kesehatan belum optimal
- e. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis
- f. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:
 - a. Cukup tingginya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak.

- b. Masih kurangnya sarana drainase sehingga kejadian genangan air masih cukup tinggi.
- c. Masih rendahnya jaringan irigasi yang baik.
- d. Cukup rendahnya jumlah rumah tangga berakses air bersih.
- e. Cukup rendahnya jumlah rumah tangga memiliki sanitasi yang layak.
- f. Masih rendahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
- g. Masih relatif sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur.
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman adalah sebagai berikut:
 - a. Belum maksimalnya penyediaan prasarana sarana utilitas kawasan perumahan
 - b. Belum optimalnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.
- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan mendasar urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat :

- a. Belum optimalnya peran serta Ormas dan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten (LKAAM, MUI, Bundo Kandung, Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB) dalam penguatan stabilitas daerah
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap implementasi Perda/Perkada.
- c. Belum optimalnya penyidikan dan penyelidikan perkara (tipiring).
- d. Belum tersedianya data dan informasi rencana penanggulangan bencana
- e. Penanggulangan bencana dan mitigasi bencana berbasis masyarakat belum dilakukan secara maksimal.
- f. Belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan bencana baik pra ataupun pasca bencana.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Pemuktahiran data belum dilakukan secara optimal oleh nagari
- b. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan DTKS dalam perencanaan pembangunan
- b. Belum terlaksananya evaluasi secara menyeluruh terhadap program perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial
- c. Belum adaya keberlanjutan dari program perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.
- d. Belum optimalnya monitoring pelaksanaan program perlindungan sosial
- e. Belum terpetakannya penerima program perlindungan dan jaminan sosial

2.3.2.2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- b. Masih rendahnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi
- c. Masih rendahya tenaga kerja yang ditempatkan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya forum PUSPA (Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)
- b. Belum optimalnya peran forum anak dalam pembangunan
- c. Masih belum terpenuhinya indikator kota layak anak
- d. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam pembangunan Pengarusutamaan gender (PUG)
- e. Masih kurangnya keterwakilan perempuan di legislatif
- 3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Permasalahan yang mendasar urusan Pemerintahan Bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya tingkat kerawanan pangan
- b. Rendahnya produktivitas lahan tanaman pangan yang ditandai dengan produktivitas tanaman pangan relatif rendah pada tahun 2019 produktivitas padi 4,5 ton/ha dan jagung 6,66 ton/ha.
- c. Masih rendahnya skor pola pangan harapan
- 4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pertanahan belum optimalnya penyelesaian permasalahan pertanahan untuk keperluan pembangunan daerah.

- 5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
 - Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup adalah :
 - a. Masih belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah.
 - b. Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif.
 - c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan.
- 6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus pelaporan dan updating data adminduk dan capil.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan data base kependudukan untuk keperluan proses pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2013
- c. Masih terbatasnya sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan adminduk dan capil terutama pelayanan ke nagari.
- 7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa (PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna), dan lembaga adat desa dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau serta dalam pembangunan nagari.
 - b. Belum optimalnya pembinaan terhadap peran dan fungsi lembaga ekonomi desa (BUMNag) sebagai katalis perekonomian nagari.

- c. Masih ada 4 (empat) nagari yang belum memiliki BUMNag dan BUMNag yang aktif sebanyak 45 nagari.
- d. Masih rendahnya inovasi masyarakat dalam mengembangkan teknologi tepat guna
- e. Belum optimalnya peran kader pembangunan masyarakat dalam konvergensi percepatan penurunan stunting.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.
- g. Masih ada 53 nagari yang belum menjadi desa mandiri sesuai data IDM Sumatera Barat tahun 2021
- 8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- a. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi
- b. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun masih tinggi
- c. Median usia kawin pertama perempuan masih rendah
- d. Belum optimalnya pembangunan keluarga dilihat dari Indeks Pembangunan Keluarga belum sesuai target.
- e. Belum maksimalnya peran TPPS dalam konvergensi pencepatan penurunan stunting
- 9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Permasalahan yang mendasar urusan Pemerintahan bidang perhubungan adalah :

- a. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan terhadap perlengkapan jalan sesuai kebutuhan pada jalan kabupaten dan jalan desa seperti rabu-rambu jalan, marka jalan dan zebracros baru terpenuhi 70 persen pada tahun 2020.
- b. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum yang ditandai masih sedikitnya jumlah angkutan darat yang tersedia.
- c. Terbatasnya cakupan pelayanan angkutan umum.
- d. Masih terbatasnya kualitas layanan angkutan umum dan pengawasannya.
- 10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik government (*e-government*) dalam menunjang penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah.
- b. Belum tesedianya rencana induk pengembangan e-government.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif
- d. Belum optimalnya pegembangan dan pemanfaatan insfrastruktur jaringan komputer (LAN dan WAN) di Kabupaten Sijunjung yang ditandai dengan cakupan layanan internet setiap nagari/desa masih rendah yaitu 49 persen pada tahun 2021.
- e. Belum optimalnya pengelolaan informasi publik secara merata.
- f. Masih kurangnya penerapan manajemen resiko SPBE, manajemen data dan manajemen keamanan informasi, manajemen aset TIK, manajemen kompetensi sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, manajemen layanan SPBE dan

belum adanya pelaksanaan Audit TIK serta keterbatasan sumber daya manusia.

- 11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Daya saing produk UMKM masih rendah.
 - b. Belum terbangunnya kemitraan dan kerjasama antar UMKM.
 - c. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif.
 - d. Masih lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
 - e. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik.
 - f. Masih rendahnya koperasi yang mengakses permodalan
- 12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah, baik penyediaan media promosi, kerjasama promosi maupun strategi pemasaran investasi.
- b. Belum optimalnya penyelesaian pengurusan lahan atau tanah yang akan menjadi objek lokasi bagi calon investor.
- 13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya prestasi olahraga daerah.
- b. Belum optimalnya peran pemuda sebagai agen perubahan dalam pembangunan karakter.
- 14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang statistik adalah sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
- b. Terbatasnya ketersediaan statistik daerah/ statistik sektoral untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.
- 15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang kebudayaan adalah :

- a. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda yang ditandai dengan jumlah lembaga seni dan budaya yang aktif mengembangkan seni dan budaya berbasis ABS-SBK baru mencapai 8 lembaga.
- b. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dokumen pokok-pokok pikiran kebudayan daerah dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan
- d. Belum seluruhnya benda dan bangunan cagar budaya yang merupakan bukti sejarah ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga belum dapat dipelihara dan dikelola dengan baik.
- e. Minimnya kegiatan yang mengakar dalam rangka pengembangan kebudayaan
- f. Masih minimnya kegiatan pelatihan dan pembinaan bagi pelaku budaya
- 16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang perpustakaan adalah :

- a. Belum adanya inovasi untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat.
- b. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan
- c. Masih kurangnya jumlah buku elektonik

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penerapan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB) pada Perangkat Daerah.
- b. Masih rendahnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis
- c. Belum maksimalnya transformasi pengelolaan arsip konvensional menjadi arsip dengan format digital.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang persandian adalah masih kurangnya penerapan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi baru mencapai 10 persen dari 35 perangkat daerah yang ada

2.3.2.3. Urusan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perikanan adalah:

- a. Tingginya harga pakan ikan.
- b. Rendahnya daya saing produk perikanan.
- c. Belum terjaminnya keamanan pangan produk perikanan, khususnya perikanan tangkap.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pariwisata adalah:

- a. Belum optimalnya pengembangan destinansi wisata terutama Geopark Ranah minang Silokek dan Perkampungan adat
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata.
- c. Belum optimalnya kelembagaan pariwisata.
- d. Belum optimalnya pengelolaan industri pariwisata.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mamajukan pariwisata.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang pertanian adalah:

- a. Lemahnya penguasaan teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga tingkat produktivitas pertanian masih rendah.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk usaha pertanian.
- c. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya minat anak muda di bidang pertanian.
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

- e. Belum adanya kepastian serapan pasar terhadap produk pertanian dengan tingkat harga yang menguntungkan petani.
- f. Belum optimalnya pengembangan kawasan peternakan.
- g. Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan telur terutama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang perdagangan adalah :

- a. Sarana dan prasarana pasar tradisional belum representatif.
- b. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.
- c. Belum tersedianya sarana dan prasarana pasar komoditi produk unggulan kabupaten Sijunjung.
- d. Masih terbatasnya informasi harga komoditi baik bagi petani maupun pedagang lokal.
- e. Belum terbangunnya kerjasama antar pedagang lokal maupun antar pedagang daerah.
- f. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Permasalahan yang mendasar urusan pemerintahan bidang industri adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam pelaku usaha industri kecil dan menengah.
- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri.
- c. Belum optimalnya perkembangan sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- d. Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengganguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Permasalahan yang mendasar urusan Pemerintahan Bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Belum berkembangnya kawasan transmigrasi sesuai target nasional.
- b. Belum terlaksananya pembangunan kota terpadu mandiri.

2.3.2.4. Unsur Pendukung Urusan pemerintahan

Permasalahan yang mendasar unsur pendukung urusan pemerintahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dari sisi manajemen perubahan, kelembagaan pemerintahan, harmonisasi produk hukum dan akuntabilitas kinerja.
- 2. Cukup rendahnya Indek Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)
- 3. Belum optimalnya proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang mendasar unsur penunjang urusan pemerintahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.
- 2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, dari sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan barang milik daerah.
- 3. Belum optimalnya pengembangan sumber daya aparatur.

- 4. Belum optimalnya penerapan merit sistem.
- 5. Belum berkembangnya penerapan inovasi daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan
- 6. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan daerah secara efektif.

2.3.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan yang mendasar unsur pengawasan urusan pemerintahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya peningkatan kapabilitas APIP.
- 2. Belum optimalnya penerapan SPIP dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 3. Belum optimalnya pengelolaan pengawasan berbasis risiko.

2.3.2.7. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang mendasar unsur kewilayahan sebagai berikut:

- 1. Belum optimalnya fungsi kewilayahan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kerena terbatasnya kewenangan Camat.
- 2. Terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan.
- 3. Belum proporsionalnya alokasi sumber daya masing-masing Kecamatan.

2.3.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

Permasalahan yang mendasar unsur pemerintahan umum sebagai berikut:

- 1. Terbatasnya sumber daya dalam menunjang unsur pemerintahan umum.
- 2. Belum adanya regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pemerintahan umum secara jelas.

2.4. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sijunjung dilakukan melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sijunjung merupakan aspirasi DPRD melalui pembahasan rapat masing-masing Alat Kelengkapan DPRD yang disinkronkan melalui Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Sijunjung.

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sijunjung cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil-hasil studi banding/studi tiru DPRD Kabupaten Sijunjung, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain sebagainya yang selanjutnya dilakukan penelaahan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sijunjung dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung tahun 2023 yang disampaikan pada kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan seperti mobiler, ruang kelas, alat peraga edukasi, musholla, fasilitas kebersihan, serta sarana olahraga dan pengadaan komputer untuk menunjang proses belajar, serta peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidik.

2. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perbaikan berbagai fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat seperti perbaikan jalan, jembatan, dan drainase.

3. Bidang Kesehatan

Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang pemberian fasilitas kesehatan kepada masyarakat. Sehingga perlunya penyediaan fasilitas yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk pemenuhan perumahan masyarakat seperti perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan sanitasi dan air bersih.

5. Bidang Pertanian

Perlunya pengembangan lahan yang belum produktif, pembinaan kelompok tani yang tersebar di seluruh nagari di Kabupaten Sijunjung termasuk pengadaan alat pertanian dan bibit pertanian. Sarana pengolahan hasil pertanian dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pendapatan masyarakat.

6. Bidang Budaya

Perlunya pengembangan dan pembinaan kegiatan seni dan budaya yang tumbuh di masyarakat, dan peningkatan SDM para pemangku adat serta lembaga-lembaga adat di tingakat nagari.

7. Bidang Perhubungan

Masih terbatasnya pengadaan lampu jalan dan jaringan listrik ke pelosok-pelosok nagari termasuk ke tempat-tempat objek wisata.

8. Bidang Lingkungan Hidup

Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam pngelolaan sampah di masyarakat.

9. Bidang Ketenagakerjaan

Perlunya peningkatan dan pengembangan kualitas tenaga kerja dalam bentuk pelatihan dan pembinaan oleh Instansi terkait.

10. Bidang Perdagangan

Perlunya pembinaan kepada seluruh UMKM dan industri rumah tangga dalam bentuk pelatihan dan bantuan modal usaha.

11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Perlunya peningkatan kualitas aparatur pemerintah nagari, lembagalembaga nagari dan organisasi yang ada di nagari.

12. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Perlunya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Berdasarkan pokok pikiran DPRD tersebut, maka rumusan usulan program/kegiatan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai berikut:

Tabel 2.81 . Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
1	Rehabilitasi Musholla (SD)	SDN 11 Nagari Silokek, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Silokek	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Unit Anggaran : 70000000
2	Pengadaan Mobiler (SD)	SDN 11 Nagari Silokek, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Silokek	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju Masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 42000000
3	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	Jr. Sangkiamo Nagari Silokek, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Silokek	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
4	Rigit Beton Jalan Permukiman	Nagari Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 300 M Anggaran : 0
5	Rigit Beton Jalan Permukiman	Nagari Pamuatan, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 200 M Anggaran : 0
6	Rigit Beton Jalan Permukiman	Nagari Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 200 M Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
7	Rigit Beton Jalan Permukiman	di Jorong Illie Pasar Jum'''at Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Muaro	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 100 M Anggaran : 0
8	Pengadaan Lampu Jalan	Jalan lansek Manih Jr. Illie Pasar Jum"at Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 6 Unit Anggaran : 60000000
9	Pembangunan Pagar (SMP)	SMPN 45 Jalan Lansek Manih Jr. Illie Pasar Jum'''at Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 100 M Anggaran : 100000000
10	Pengadaan Kontainer / Bak Sampah	di jalan Lansek Manih Jr. Illie Pasar Jum''at Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Diteruskan ke Tim TAPD Koefisien : 1 Unit Anggaran : 0
11	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong parak gadang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 3 unit Anggaran : 30000000
12	Pengadaan Lampu Jalan	di Nagari silantai, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Silantai	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
13	Rigit Beton Jalan Permukiman	rigit beton jalan buah murai menuju jalan lansek manih di jorong Sitampuang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 3000 Meter Anggaran : 0
14	Pembangunan DAM (SD)	Dam tebing SDN 34 Durian Gadang di jorong Pinang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Durian Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 150 Meter Anggaran : 150000000
15	Pengadaan Lampu Jalan	Nagari Durian Gadang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Durian Gadang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
16	Rigit Beton Jalan Permukiman	Di Nagari Koto Tuo, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Tuo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 5 Km Anggaran : 0
17	Rigit Beton Jalan Permukiman	di Jr. Tanjung Pauh II Nagari Muaro Bodi, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Muaro Bodi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
18	Rigit Beton Jalan Permukiman	di Jr. Dusun Tuo II Nagari Muaro Bodi, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Muaro Bodi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
19	Pengadaan Lampu Jalan	Nagari Kandang Baru, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
20	Pengadaan APE TK/PAUD	TK Cempaka 3 jorong Tanah Bato, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 paket Anggaran : 25000000
21	Pengadaan Paving Block (SD)	SD 09 Jorong Tanah Bato, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 100 Meter Anggaran : 100000000
22	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
23	Rigit Beton Jalan Permukiman	rigit beton jalan dari jorong Sikaladi ke batu ajung, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lalan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 4000 meter Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
24	Pengadaan Lampu Jalan	jorong Sikaladi, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lalan	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 unit Anggaran : 4000000
25	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	jorong limau sundai, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 set Anggaran : 150000000
26	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	jorong kalumpang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 set Anggaran : 150000000
27	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	jorong pondok jago, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 set Anggaran : 150000000
28	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	jorong pale, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 set Anggaran : 150000000
29	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	lanjutan jalan lundang jorong limau sundai, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 300 meter Anggaran : 0
30	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	lanjutan jalan batang kareh jorong Samiak, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 400 meter Anggaran : 0
31	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	lanjutan jalan purin jorong limau sundai, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 meter Anggaran : 0
32	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	lanjutan pembangunan jalan batang kareh dari jorong limau sundai ke arahn kantor DPRD,	Seluruh Kecamatan	Kandang Baru	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 2000 meter Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
		Kab. Sijunjung			PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
33	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	peningkatan rigit beton jalan ke kandang harimau sampai ke kampung berlian, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1000 meter Anggaran : 0
34	Pengadaan Lampu Jalan	seluruh jorong, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
35	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pakaian kesenian randai kelompok Lantiak di Jr. Pintu Rayo Nagari Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 50 Pasang Anggaran : 50000000
36	Pembangunan DAM Jalan Permukiman	dam tebing lapangan voli jorong sitampuang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
37	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan Mudik Lurah di Jr. Kampung Baru Nagari sumpur Kudus Selatan, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Selatan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
38	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan Ongeh - Kalampaian di Jr. Calau Nagari Sumpur Kudus Selatan, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Selatan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 280 M Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
39	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan mudik Manuih di Jr. Calau Nagari Sp Kudus Selatan, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Selatan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
40	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan mudik baru di Jr. Calau Nagari Sp Kudus Selatan, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus Selatan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 1 Km Anggaran : 0
41	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan Tangalo - Kinari di Jorong Taruko Nagari Manganti, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Mangganti	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 4700 M Anggaran : 0
42	Pengadaan Lampu Jalan	di Jorong Taruko Nagari Manganti, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Mangganti	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
43	Rehabilitasi Pagar Sekolah (SMP)	Lanjutan Pagar permanen SMP Negeri 44 Sijunjung di Nagari Aie Amo, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Aia Amo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000
44	Pembangunan Pagar dan Gapura (SD)	SDN 3 Aia Amo di Jr. Koto Tuo, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Aia Amo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 200 M Anggaran : 200000000
45	Pembangunan Pagar (SMP)	SMPN 43 di Jr. Banjar Tengah Nagari Aie Amo, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Aia Amo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 150 M Anggaran : 150000000
46	Pembangunan Gedung Sekolah TK/Paud	Rehap Tk Cahaya Pajar Banjar Tenggah Nagari Aie Amo, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Aia Amo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
47	Rigit Beton Jalan Permukiman	rigit beton jalan ke ponpes darul falah jorong jambu lipo, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 150 meter Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
					PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
48	Pengadaan Paving Block (SD)	SDN 5 Jorong Sikaladi, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lalan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 300 M3 Anggaran : 300000000
49	Lanjutan Rigit Beton Jalan Permukiman	lanjutan rigit beton jalan rao rao jorong koto tuo, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 450 meter Anggaran : 0
50	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	SDN 11 Koto tuo, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 kelas Anggaran : 150000000
51	Pembangunan Pagar dan Gapura (SD)	di Jr. Pintu Batu Nagari Padang Tarok, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Padang Tarok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 150 M Anggaran : 150000000
52	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Nag.lalan, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lalan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 6 kelompok/grup Anggaran : 150000000
53	Pembangunan Toilet/Jamban dan Sanitasinya (SD)	SDN 9 Koto tuo, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000
54	Pengadaan Paving Block (SD)	SDN Andopan, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 500 M3 Anggaran : 200000000
55	Pembangunan DAM (SD)	SDN 16 jorong silalak kulik, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Lubuak Tarok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 40 meter Anggaran : 100000000
56	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit Beton jalan di Jorong Koto Nagari Sungai Batuang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Batuang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 300 M Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
57	Pengadaan Pakaian Seragam Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Di Nagari Koto Baru, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 200000000
58	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Parak gadang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 Unit Anggaran : 50000000
59	Pembangunan Laboratorium Komputer (SD)	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 unit Anggaran : 435000000
60	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 unit Anggaran : 390000000
61	Pembangunan Pagar (SD)	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 120 Meter Anggaran : 120000000
62	Pengadaan Paving Block (SD)	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000
63	Pengadaan Lampu Jalan	Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 Unit Anggaran : 200000000
64	Rigit Beton Jalan Permukiman	jorong kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
65	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK/Paud	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
66	Rigit Beton Jalan Permukiman	Pulau Basung - Pulowe, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
67	Rigit Beton Jalan Permukiman	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 120 Meter Anggaran : 0
68	Pembangunan Musholla (SD)	Pembangunan mushola SDN 2 kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
69	Pembangunan DAM Jalan Permukiman	Dam Jln Kampung Pinang menuju Tobek Tangah Jorong Koto Tangah, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
70	Rigit Beton Jalan Permukiman	rigit beton jalaur 7 jr.kamang Sejahtera, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 300 Meter Anggaran : 0
71	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan lampu jalan di Nagari Pematang Panjang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
72	Pembangunan Musholla (SD)	pembangunan mushola SDN 35 kamang jorong kamang sejahtera, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
73	Rigit Beton Jalan Permukiman	Jorong Parik Rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
					PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
74	Pembangunan Pagar (SD)	SDN 05 Siaur, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Siaur	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : setuju masuk Renja Koefisien : 50 Meter Anggaran : 50000000
75	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Nag.kunangan parit rantang, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Kunangan Parik Rantang	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilanjutkan ketahapan selajutnya Koefisien : 50 Orang / Paket / Pekerjaan Anggaran : 0
76	Pengadaan Lampu Jalan	Sisawah, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sisawah	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 Unit Anggaran : 50000000
77	Rigit Beton Jalan Permukiman	rigit beton jalan sangkir ke guguk Dadok Jorong Kampung baru Nagari Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
78	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton / aspal jalan tapian Sudang Lingka Puskesmas Sijunjung Jr.Pasar, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
79	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Jorong Tanjung, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Tanjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : setuju masuk renja Koefisien : 3 Set Anggaran : 150000000
80	Rigit Beton Jalan Permukiman	Rigit beton jalan surau gantiang Jorong Gantiang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : diakomodir OPD sesuai arahan TAPD Koefisien : 500 Meter Anggaran : 0
81	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Ladang kapeh, Kab. Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
82	Pengadaan Lampu Jalan	JR.Simancung Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
83	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Tanjung, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Tanjung	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 unit Anggaran : 200000000
84	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Ranah Pasar Nagari Mundam SaKti, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Mundam Sakti	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
85	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Tapi Balai, Kab. Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
86	Pengadaan Mobiler (SD)	mobiler SDN 34 Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 20 set Anggaran : 30000000
87	Rehabilitasi Ruang Guru/Ruang Kepala Sekolah (TK/Paud)	PAUD Bundo Kanduang Jr Koto Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 Unit Anggaran : 100000000
88	Pengadaan Lampu Jalan	Nagari Koto TUo, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Tuo	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 Unit Anggaran : 200000000
89	Pengadaan Lampu Jalan	Jr.Pantai Cermin, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Palangki	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
90	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Bantuan Sondsistem di Jr. Sungai Tambang I, Nagari Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 set Anggaran : 50000000
91	Rehabilitasi Pagar Sekolah (SD)	Jorong Kumbayak, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Sinyamu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 Meter Anggaran : 50000000
92	Pengadaan Alat Drumband (SD)	Drumbnad SDN 14 Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 set Anggaran : 50000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
93	Pembangunan Pagar (SD)	SDN 13 Taratak, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Buluah Kasok	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 80 Meter Anggaran : 80000000
94	Pembangunan Pagar (SMP)	Pagar SMP N 10 Sungai lansek, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Sungai Lansek	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 175 M Anggaran : 175000000
95	Pembangunan DAM (SD)	Jorong Koto Baru dan Pasar, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 20 Meter Anggaran : 150000000
96	Pembangunan Kantin (SD)	SDN 17 Kampung Dalam, Kab. Sijunjung	Lubuak Tarok	Kampung Dalam	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 100000000
97	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong Batu Gandang, Kab. Sijunjung	Koto VII	Limo Koto	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 unit Anggaran : 200000000
98	Pengadaan Lampu Jalan	Lampu Jalan di Taratak Baru, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 buah Anggaran : 40000000
99	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Jorong Kayu Gadih, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 2 Buah Anggaran : 100000000
100	Pembangunan Gedung Sekolah TK/Paud	Pembangunan Gedung TK Jorong batang talang di Jr. Sungai Tambang IV Nagari Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 Unit Anggaran : 200000000
101	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Sanggar Seni Duo Sakato, Kab. Sijunjung	Koto VII	Limo Koto	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 paket Anggaran : 50000000
102	Pengadaan Paving Block TK/Paud	Paving Block PAUD Harapan Bunda (15 x 20 M), Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Taratak Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 20 Meter Anggaran : 100000000
103	Pengadaan Lampu Jalan	Lampu Jalan Nag Taratak Baru, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 Unit Anggaran : 4000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
104	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Sanggar Randai, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 stel Anggaran : 50000000
105	Pengadaan Paving Block (SMP)	Paving Blok SMP 11 Sijunjung di Nagari Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 159 m Anggaran : 159000000
106	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Sanggar Randai, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 set Anggaran : 50000000
107	Pembangunan Gedung Sekolah TK/Paud	Jorong Mekar Jaya, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 250000000
108	Pembangunan Pagar (SMP)	SMPN 10 Sei lansek, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 175 M Anggaran : 175000000
109	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Jorong Mekar Jaya, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 Pasang Anggaran : 50000000
110	Pengadaan Lampu Jalan	nag.kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kamang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 unit Anggaran : 150000000
111	Pembangunan Pagar TK/Paud	Pagar Paud Dahlia Jr.Pisang kolek, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 40 Meter Anggaran : 50000000
112	Pengadaan Lampu Jalan	Jalan menuju SMP 11 Sijunjung Nagari Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
113	Pengadaan APE TK/PAUD	TK Insan rabani Jr Batang Talang di Nagari Muaro Takung, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Muaro Takuang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja dengan melampirkan Proposal Koefisien : 1 Paket Anggaran : 25000000
114	Pengadaan Lampu Jalan	Lampu Jalan Nag taratak Baru Utara, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru Utara	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 unit Anggaran : 4000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
115	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	di Nagari Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 120 stel Anggaran : 100000000
116	Pembangunan Pagar (SD)	Pembuatan pagar sekolah SDN 04 Pematang Panjang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 500 Meter Anggaran : 200000000
117	Pengadaan Paving Block (SD)	Pemasangan Paving Block SDN 3 Muaro / Jr Gantiang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1000 Meter Anggaran : 300000000
118	Pengadaan APE TK/PAUD	Pengadaan APE TK/ PAUD Insan Cendikia Sungai Sariek di Nagari Muaro Takung, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Muaro Takuang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 2 Set Anggaran : 50000000
119	Pengadaan Lampu Jalan	Padang Laweh Selatan, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
120	Pengadaan Lampu Jalan	untuk se Nagari Muaro Takung, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Muaro Takuang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 Unit Anggaran : 200000000
121	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong IV, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
122	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 Lembar Anggaran : 50000000
123	Pembangunan Pagar TK/Paud	PAUD Tunas Bakti Jorong Kamang Bakti, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000
124	Pengadaan Lampu Jalan	Padang Laweh Selatan, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 Unit Anggaran : 50000000
125	Pembangunan Musholla (SMP)	Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Unit Anggaran : 150000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
126	Pengadaan Lampu Jalan	jorong pandam, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 12 unit Anggaran : 120000000
127	Pembangunan DAM (SD)	SDN 9 jorong pandam, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 70 meter Anggaran : 100000000
128	Pengadaan Alat Drumband (SMP)	SMPN 33 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Set Anggaran : 50000000
129	Pengadaan APE TK/PAUD	PAUD Terpadu Kasih Bunda jorong guguak naneh, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 25000000
130	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	rehab SDN 15 Pematang Panjang jorong parak gadang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Pematang Panjang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 kelas Anggaran : 150000000
131	Pengadaan Lampu Jalan	Nag. tanjung gadang, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 12 unit Anggaran : 120000000
132	Pengadaan Alat Drumband (SD)	SDN 2 Jorong pasa Nag.tanjung gadang, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 50000000
133	Pengadaan Kontainer / Bak Sampah	Nag. tanjung gadang, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Rekomendasi : Diteruskan ke Tim TAPD Koefisien : 100 unit Anggaran : 0
134	Pengadaan Lampu Jalan	jorong pasar tanjung gadang, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 unit Anggaran : 150000000
135	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	SDN 33 Kandang Baru jorong ranah tanjung bungo, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 3 kelas Anggaran : 350000000
136	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan lamou jalan 3 titik nagari Kandang Baru, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 Unit Anggaran : 50000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
137	Pengadaan Lampu Jalan	jorong koto baru, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Tanjung Gadang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 12 unit Anggaran : 120000000
138	Pembangunan Pagar (SD)	Pagar sekolah SDN.33 Kandang Baru, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000
139	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	pengadaan untuk 5 grup kesenian, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 5 paket Anggaran : 250000000
140	Pengadaan Paving Block (SD)	Pengadaan Paving Blok SDN.09 Nagari Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 150000000
141	Pengadaan Lampu Jalan	Penambahan Lampu jalan Jorong Tanah Bato Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
142	Pengadaan Lampu Jalan	Blok A1, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
143	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan lampu jalan di Jorong Pasar Jumat Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
144	Pengadaan Lampu Jalan	Jorong I, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 20 unit Anggaran : 200000000
145	Pengadaan Lampu Jalan	jr.taratak baru utara, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru Utara	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 unit Anggaran : 4000000
146	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	nag.taratak baru utara, Kab. Sijunjung	Tanjung Gadang	Taratak Baru Utara	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 5 paket Anggaran : 250000000
147	Pengadaan Mobiler (SD)	Mobiler SDN 8 Padang Laweh, 30 Meja, 60 Kursi di Nagari Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 Paket Anggaran : 42000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
148	Rehabilitasi Ruang Kelas (SD)	Rehap berat ruang belajar SDN 8 Padang Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 2 Lokal Anggaran : 200000000
149	Pengadaan Lampu Jalan	Penambahan jaringan dan lampu penerangan Jalan umum (LPJU) Jorong Suka Maju Sungai Tenang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
150	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan pakaian Kuda Lumping Trimudo Laksono Mekar Jaya, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 20 set Anggaran : 50000000
151	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan Jaringan dan LPJU Jorong Mekar jaya Sungai tenang, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
152	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan pakaian kuda lumping Eko Budoyo Larasakti Jr Mekar Jaya, Kab. Sijunjung	Seluruh Kecamatan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 20 set Anggaran : 50000000
153	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan Jaring dan LPJU Jr Suko rejo Sei Tenang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 4 unit Anggaran : 4000000
154	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan jaringan dan LPJU Jorong III Sei Tambang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
155	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan Pakaian Kuda Lumping Jorong Kurnia Kamang Nagari Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 20 set Anggaran : 50000000
156	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan jaringan dan LPJU Jr Kamang makmur nagari Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
157	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan pakaian kuda Lumping Jr Kamang makmur Nagari Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 20 set Anggaran : 50000000
158	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan pakaian kesenian Reog Margo Jati Singo Pecok Jr Kamang Bakti Timpah VII Nagari Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 1 set Anggaran : 50000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
159	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan jaringan dan LPJU Jorong Kamang Bakti Nagari Kamang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
160	Bantuan untuk PMI (Hibah)	Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilanjutkan ketahapan selajutnya Koefisien : 1 paket Anggaran : 0
161	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan lampu jalan di Nagari Palangki, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Palangki	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 Unit Anggaran : 150000000
162	Pengadaan Lampu Jalan	Pengadaan lampu jalan di Nagari Kandang Baru, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Kandang Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
163	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Baju seragam kelompok Jr Tangah Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 stel Anggaran : 50000000
164	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Baju seragam kelompok di Jr Ilie Guguak dadok Nagari Muaro, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Muaro	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 30 stel Anggaran : 50000000
165	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Pengadaan pakaian kuda lumping Jr Suka Maju Sei tenang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 20 stel Anggaran : 50000000
166	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Koto Baru, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 unit Anggaran : 100000000
167	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Koto Tuo, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Tuo	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
168	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Pamuatan, Kab. Sijunjung	Kupitan	Pamuatan	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
169	Pengadaan Paving Block (SD)	Paving Block SDN 37, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk Renja Koefisien : 30 Meter Anggaran : 100000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
170	Pembangunan Pagar (SMP)	SMP 14 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 30 Meter Anggaran : 100000000
171	Pembangunan Toilet/Jamban dan Sanitasinya (SMP)	SMP 14 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 paket Anggaran : 200000000
172	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Sumpur Kudus, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 15 unit Anggaran : 150000000
173	Pengadaan Lampu Jalan	dari pasar tj.ampu ke tanjung, Kab. Sijunjung	Koto VII	Tanjung	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 5 unit Anggaran : 50000000
174	Pembangunan Gedung Sekolah TK/Paud	TK Negeri 1 IV Nagari, Kab. Sijunjung	IV Nagari	Koto Tuo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 20000000
175	Pembangunan Toilet/Jamban dan Sanitasinya (SD)	SDN 28 Nag.Durian Gadang, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Durian Gadang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 8 unit Anggaran : 200000000
176	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Jr.pauh, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Tanjung Bonai Aur	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 30 Stel Anggaran : 50000000
177	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Nag.batu manjulur, Kab. Sijunjung	Kupitan	Batu Manjulur	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilajutkan ketahapan selanjutnya Koefisien : 5 orang Anggaran : 0
178	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Nag.Padang Sibusuk, Kab. Sijunjung	Kupitan	Padang Sibusuk	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilajutkan ketahapan selanjutnya Koefisien : 5 orang Anggaran : 0
179	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Nag., Kab. Sijunjung	Kupitan	Pamuatan	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilanjutkan ketahapan selajutnya Koefisien : 5 orang Anggaran : 0
180	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Nag.Kampung Baru, Kab. Sijunjung	Kupitan	Desa Kampung Baru	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilanjutkan ketahapan selanjutnya Koefisien : 5 orang Anggaran : 0

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
181	Pelatihan Guru Mengaji/ TPQ/ TPSQ	Semua Nagari (5 orang/nagari), Kab. Sijunjung	IV Nagari	Seluruh Kelurahan/Desa	SEKRETARIAT DAERAH	Rekomendasi : Dilajutkan ke tahapan selajutnya Koefisien : 15 orang Anggaran : 0
182	Pengadaan Lampu Jalan	Desa Kmapung baru, Kab. Sijunjung	Kupitan	Desa Kampung Baru	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
183	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.Pamuatan, Kab. Sijunjung	Kupitan	Pamuatan	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
184	Pembangunan Musholla (SMP)	SMPN 27 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Kupitan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
185	Pengadaan Lampu Jalan	Nag.batu Manjulur, Kab. Sijunjung	Kupitan	Batu Manjulur	DINAS PERHUBUNGAN	Rekomendasi : Diakomodir sepanjang dana yang tersedia Koefisien : 10 Unit Anggaran : 100000000
186	Pengadaan APE TK/PAUD	TK IUT Nag.Padang Sibusuk dan Kampung Baru, Kab. Sijunjung	Kupitan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 4 Paket Anggaran : 25000000
187	Pengadaan Beasiswa (SD)	Sekecamatan Kupitan, Kab. Sijunjung	Kupitan	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 150 orang Anggaran : 60000000
188	Pengadaan Beasiswa (SMP)	Se kecamatan Kupitan, Kab. Sijunjung	Sumpur Kudus	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 150 orang Anggaran : 75000000
189	Pembangunan Musholla (SMP)	SMPN 14 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 150000000
190	Pembangunan Toilet/Jamban dan Sanitasinya (SMP)	SMPN 14 Sijunjung, Kab. Sijunjung	Sijunjung	Sijunjung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : setuju masuk renja Koefisien : 1 unit Anggaran : 200000000
191	Pengadaan Pakaian dan/atau Alat Kesenian	Nag.Kunpar, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 130 stel Anggaran : 100000000
192	Pengadaan Pakaiandan/atau Alat Kesenian (SMP)	SMPN 11 Kunangan Parit rantang, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik Rantang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja Koefisien : 1 set Anggaran : 50000000

No	Program/Kegiatan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan	Perangkat Daerah	Validasi
193	Pengadaan Pakaian	Jr.sei tambang I, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Kunangan Parik	DINAS PENDIDIKAN	
	dan/atau Alat Kesenian			Rantang	DAN KEBUDAYAAN	Koefisien: 1 set Anggaran: 50000000
194	bantuan untuk mushola	Nag.Pdg Laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	SEKRETARIAT	Rekomendasi : Dilanjutkan ketahapan
	(hibah)				DAERAH	selanjutnya Koefisien : 4 unit Anggaran : 0
195	Pengadaan Paving Block	SDN 21 jr.Pintu batu, Kab.	Kamang Baru	Padang Tarok	DINAS PENDIDIKAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja
	(SD)	Sijunjung			DAN KEBUDAYAAN	Koefisien: 500 Meter Anggaran:
						20000000
196	Pembangunan	SD 07 Aia Amo, Kab. Sijunjung	Kamang Baru	Aia Amo	DINAS PENDIDIKAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja
	Toilet/Jamban dan				DAN KEBUDAYAAN	Koefisien: 1 Paket Anggaran: 200000000
	Sanitasinya (SD)					
197	Pengadaan Pakaian	Nag.Padang laweh, Kab. Sijunjung	Koto VII	Padang Laweh	DINAS PENDIDIKAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja
	dan/atau Alat Kesenian				DAN KEBUDAYAAN	Koefisien: 2 paket Anggaran: 100000000
198	Pembangunan Asrama	Pembangunan Asrama di SMPN 3	Sijunjung	Seluruh	DINAS PENDIDIKAN	Rekomendasi : Setuju masuk renja
	(SMP)	Sijunjung, Kab. Sijunjung		Kelurahan/Desa	DAN KEBUDAYAAN	Koefisien: 1 Unit Anggaran: 350000000
	, ,			,		35



BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 serta proyeksi perekonomian tahun 2022 dan 2023. Perumusan kerangka ekonomi dan keuangan Kabupaten Sijunjung berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan memperhatikan kondisi ekonomi dan keungan Nasional dan Provinsi. Selanjutnya, kebijakan keuangan daerah menguraikan rencana keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan daerah tahun 2023 guna mencapai sasaran pembangunan daerah sejalan dengan proyeksi perekonomian daerah. Oleh karena itu, pada bab ini menyajikan kondisi dan proyeksi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi terhadap perekonomian Kabupaten Sijunjung pada tahun 2022 dan 2023 baik secara langsung, maupun tidak langsung.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1. Perkembangan Perekonomian Dunia

Persebaran pandemi covid-19 hingga tahun 2021 terus berlanjut seiring munculnya perkembangan varian baru Covid-19 varian Delta dan varian Omicron menyebabkan beberapa negara mengalami lonjakan kasus hingga memunculkan gelombang baru, yang membatasi pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Meski demikian, ekonomi global diprakirakan telah mengalami pemulihan karena tingkat vaksinasi yang tinggi di beberapa negara, terjadinya peningkatan permintaan dan volume perdagangan, serta pemulihan pasar tenaga kerja di Amerika Serikat. Negara-negara cenderung telah beradaptasi pada pandemi dengan menerapkan kebijakan pengetatan yang fleksibel untuk mengendalikan pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi. Beberapa negara telah mengalami pemulihan ekonomi, tecermin dari level PDB riil yang telah melampaui level prapandemi. Pemulihan yang relatif lebih cepat juga dialami oleh negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi dalam upaya mencapai herd immunity.

Aktivitas perdagangan dunia mengalami peningkatan tinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020, karena didorong oleh pemulihan permintaan global yang terjadi pada tahun 2021. Namun, gangguan rantai pasok yang melanda dunia menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan dunia yang terjadi sejak Oktober 2021. Meski demikian, volume perdagangan dunia diprakirakan mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan 2022 setelah terkontraksi cukup dalam pada tahun 2020.

Selain itu, harga-harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi, seiring dengan pemulihan ekonomi global pada tahun 2021. Pemulihan permintaan global juga disertai dengan bergesernya fokus kebutuhan energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan. Peningkatan

harga logam, tidak hanya dipicu oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga dorongan penggunaan energi bersih dan hijau secara global yang mendorong tingginya permintaan. Selanjutnya, harga *Crude Palm Oil* (CPO) masih tetap tinggi, dipicu oleh terbatasnya jumlah pasokan.

Dalam upaya menanggulangi dampak ekonomi yang besar akibat pandemi Covid-19, pemerintah berbagai negara mengambil kebijakan stimulus. Dari sisi fiskal, negara-negara tersebut memberikan stimulus yang besar dengan menambah defisit fiskal pada tahun 2020 untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Pada tahun 2021, hampir semua negara telah mengurangi defisit fiskal secara bertahap, dan diprakirakan akan kembali mengurangi stimulus penanggulangan COVID-19, yang tecermin dari pengurangan defisit fiskal untuk tahun 2022.

Dari sisi moneter, pada tahun 2020 dan 2021 bank sentral di beberapa negara menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif melalui penurunan suku bunga dan *quantitative easing* untuk menahan dampak pandemi COVID-19. Seiring pemulihan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021 serta optimisme untuk tahun 2022, beberapa bank sentral negara mulai melakukan normalisasi suku bunga. Peningkatan inflasi dan pemulihan pada pasar tenaga kerja juga memberikan tekanan pada bank sentral untuk menaikkan suku bunga.

3.1.2. Perkembangan Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus *fiskal-moneter* dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi.

Pemulihan di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang belum mampu kembali ke level sebelum pandemi, seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Meksiko, Jerman, Perancis, dan Italia. Dari sisi PDB pengeluaran, berhasilnya pengendalian pandemi Covid-19 mendorong fenomena terjadinya "pent up demand" pada konsumsi masyarakat yang diikuti dengan peningkatan aktivitas pada sektor investasi. Secara keseluruhan tahun 2021, konsumsi rumah tangga mampu tumbuh secara progresif sebesar 2,0 persen. Sementara itu, aktivitas investasi yang sempat tertahan, juga kembali dapat meningkat yang ditunjukkan oleh pertumbuhan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,8 persen pada 2021. Keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN), akselerasi pada belanja modal pemerintah, serta mulai membaiknya kinerja investasi sektor swasta menjadi penopang perbaikan laju pertumbuhan investasi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga mampu tumbuh mencapai 4,2 persen secara keseluruhan tahun 2021, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja negara, khususnya terkait akselerasi program vaksinasi,

keberlanjutan program perlindungan sosial, dan pelaksanaan layanan publik pemerintah.

Pada tahun 2021, ekspor barang dan jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sejak krisis Asia di tahun 2018, yakni mencapai 24,0 persen. Adapun kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB tahun 2021 sebesar 21,6 persen. Tingginya pertumbuhan ekspor tersebut didorong oleh pertumbuhan ekspor barang terutama nonmigas yang mencapai 27,5 persen (yoy). Kinerja ekspor barang yang baik tersebut seiring dengan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang, serta peningkatan harga komoditas di tingkat global yang turut mendorong kenaikan volume ekspor komoditas. Seiring dengan kenaikan ekspor dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, impor barang dan jasa pun mengalami kenaikan sebesar 23,3 persen, dengan kontribusi sebesar 18,9 persen terhadap PDB. Dari sisi lapangan usaha, hampir semua sektor mampu tumbuh positif selama tahun 2021. Industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDB, tumbuh 3,4 persen selama tahun 2021. Hal ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri alat angkutan, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, dan industri furnitur.

Sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2021. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang relatif mereda. Kebijakan pemberian pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil juga mendorong kinerja perdagangan kendaraan bermotor secara signifikan. Sektor konstruksi dan real estate tumbuh positif masingmasing sebesar 2,8 dan 2,8 persen, didorong oleh membaiknya kinerja konstruksi gedung, berkurangnya restitusi, dan menurunnya pembayaran royalti. Selain itu, berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas dan peningkatan pengeluaran dari pihak swasta dan pemerintah juga mendorong pertumbuhan di sektor ini.

Kinerja sektor penunjang pariwisata juga mulai menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level pra pandemi. Sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi makan-minum (akmamin) tumbuh masing-masing sebesar 3,2 dan 3,9 persen secara keseluruhan tahun 2021. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan, serta peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai pulih.

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diprakirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru Covid-19, risiko pengetatan likuiditas domestik,

ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum optimal dari dampak pandemi Covid-19 diperkirakan mampu memengaruhi kinerja perekonomian ke depan. Ketidakseimbangan pemulihan yang terjadi baik antarprovinsi maupun antarsubsektor berpotensi menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dari sisi kewilayahan, Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang mampu tumbuh tinggi di tahun 2021, sedangkan Provinsi Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih. Dari sisi subsektor, subsektor industri pengolahan tembakau, barang logam, kertas, kayu, dan tekstil masih mengalami terkontraksi.

Selain itu, dampak pandemi Covid-19 juga menyebabkan disrupsi pada pembelajaran yang mengakibatkan learning loss dan earnings penalty. Selama dua dekade terakhir, hasil pembelajaran siswa Indonesia menunjukkan stagnasi dan tertinggal jauh dari negara-negara lain. Dalam RPJMN Tahun 2020–2024 ditetapkan target yang cukup tinggi untuk mengejar ketertinggalan. Namun, pandemi Covid-19 diprakirakan akan menurunkan skor PISA ke titik terendah dalam dua dekade terakhir.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan belum pulihnya dunia usaha. Rendahnya permintaan terhadap kredit baru adalah indikasi dari rendahnya kecenderungan usaha untuk berinvestasi. Turunnya omzet cenderung menjadi motivasi utama dari usaha yang mendaftar untuk mendapatkan kredit baru. Hal ini berasosiasi dengan tren pertumbuhan kredit modal kerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit investasi, walaupun terdapat base effect. Dari sisi sosial, kondisi pengangguran dan kemiskinan Indonesia perlahan mengalami perbaikan. Namun, tingkat pengangguran dan kemiskinan tersebut belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19. Selain itu, proses penurunan stunting juga mengalami perlambatan pada saat pandemi, yang berisiko menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang.

Selain itu, ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan tumbuh positif, namun tidak sebesar tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang diprakirakan lebih rendah pada tahun 2022 disebabkan oleh (a) pertumbuhan negara mitra yang diprakirakan positif namun lebih rendah dibandingkan tahun 2021, (b) masih berlanjutnya hambatan rantai pasok kelangkaan kontainer, (c) harga komoditas yang diprakirakan tidak setinggi di tahun 2021, dan (d) eskalasi politik Eropa Timur yang dapat mengganggu ketidakstabilan supply-demandbeberapa komoditas penting seperti minyak bumi dan gandum.

risiko Covid-19 Sementara itu. penyebaran masih akan memperlambat aktivitas perdagangan jasa yang sudah mulai pulih seiring pembukaan border di beberapa destinasi wisata. Pada tahun 2023, walaupun perekonomian negara mitra dagang diprakirakan semakin pulih seiring dengan tingkat vaksinasi yang semakin tinggi, besaran dampaknya terhadap peningkatan ekspor Indonesia masih dibayang-bayangi oleh proteksionisme yang mungkin akan tetap tinggi. Beberapa produk komoditas Indonesia diprakirakan masih akan mengalami hambatan ekspor di beberapa negara akibat isu lingkungan dan sustainability yang akan semakin meningkat. Sementara itu, kinerja ekspor non-komoditas masih terkendala berbagai permasalahan di dalam negeri, di antaranya terkait dengan isu produktivitas dan daya saing, akses bahan baku domestik dan impor, kemampuan inovasi, akses pembiayaan dan investasi, akses pasar dan buyer, serta integrasi program fasilitasi promosi ekspor antar kementerian/lembaga.

3.1.2.1. Outlook Pencapaian Sasaran Nasional Tahun 2022

A. Pertumbuhan Ekonomi

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diprakirakan meningkat pada kisaran 5,0–5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi, di tengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas, dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru Covid-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok, dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Konsumsi masyarakat diprakirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 4,8–5,3 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran Covid-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat. Kinerja ekspor barang dan jasa juga tetap akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dengan masih akan tingginya permintaan dan harga komoditas global, dengan pertumbuhan sebesar 11,0–11,6 persen. Investasi pada tahun 2022 diprakirakan akan meningkat dan tumbuh sebesar 5,4–6,0 persen, sebagai kunci peningkatan kapasitas produktif perekonomian. Konsumsi pemerintah diprakirakan terkontraksi sebesar 2,0–1,6 persen, dipicu oleh mulai berkurangnya program stimulus dan belanja penanganan pandemi seiring dengan kondisi pandemi yang mengarah ke endemi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh sejumlah sektor yang diprakirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diprakirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan, serta perluasan penerapan industri 4.0. Kinerja industri pengolahan diprakirakan meningkat pada tahun 2022 yang didukung oleh peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

Produktivitas merupakan salah satu indikator penentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi diuraikan ke dalam beberapa faktor, di antaranya (a) tenaga kerja, (b) modal, dan (c) Total Factor Productivity (TFP). Ketiga faktor ini saling berkaitan erat, dimana TFP diasumsikan sebagai output sementara input berasal dari tenaga kerja dan modal.

Peningkatan produktivitas memiliki peran yang besar bagi Indonesia dalam upaya mendorong pertumbuhan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Namun demikian, Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam mendorong TFP, di antaranya (a) perkembangan diversifikasi dan kompleksitas ekonomi masih terbatas, (b) ekspor high technology terus mengalami penurunan, (c) tenaga kerja berada di sektor bernilai tambah rendah masih dominan, (d) keterlibatan dalam rantai pasok global yang belum berkembang signifikan, dan (e) penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi yang belum optimal.

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 masih berdampak pada pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT), meskipun telah turun dibandingkan dengan angka pada tahun 2020, tetap masih tinggi, yaitu sebesar 6,49 persen atau 9,10 juta orang (Agustus, 2021). Orang yang bekerja pun masih terkena dampaknya dalam bentuk jam kerja yang lebih sedikit, sehingga menghasilkan jumlah setengah penganggur yang tinggi, dan perolehan upah yang lebih rendah.

Untuk mengurangi bertambahnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah memberikan berbagai stimulus bagi dunia usaha, termasuk usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM, seperti penundaan pokok dan bunga, subsidi bunga kredit, insentif perpajakan, penjaminan kredit modal kerja, dan penyediaan dana talangan. Sementara itu, dari sisi tenaga kerja, pada tahun 2021 pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli yang dilakukan antara lain melalui implementasi Kartu Prakerja dengan melanjutkan desain "semi-bantuan sosial" bagi 5.931.574 orang penerima yang berasal dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pemberian bantuan subsidi upah bagi sekitar 7.399.139 pekerja berpenghasilan Rp3,5 juta ke bawah atau di bawah upah minimum provinsi (UMP), dan penyaluran berbagai bantuan sosial lainnya ke masyarakat termasuk ke pekerja informal.

Memasuki tahun 2022, seiring dengan tren beralihnya status pandemi menjadi endemi serta kelanjutan proses pemulihan perekonomian, TPT diprakirakan dapat diturunkan ke kisaran 5,5–6,3 persen. Agar peluang para pencari kerja mendapatkan kembali pekerjaannya dapat meningkat, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan dengan skema "semibantuan sosial" pada Semester I dan dilanjutkan dengan melaksanakan skema konsep asal sebagai sarana peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja pada Semester II. Selain itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, pada Februari 2022 pemerintah bersama-sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mulai menjalankan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

C. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2021 mengalami penurunan meskipun dampak krisis dari pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya terpulihkan. Per September 2021, angka kemiskinan menjadi 9,71 persen, turun sebesar 0,48 persen poin dibandingkan September 2020, atau sebanyak 1,02 juta penduduk. Penurunan terjadi baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Namun demikian, masih diperlukan usaha keras pemerintah untuk dapat mencapai target angka kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024.

Beberapa upaya dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam program. Terkait dengan hal tersebut, penvaluran melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun nonalam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi diharapkan angka kemiskinan berada pada kisaran 8,5-9,0 persen di tahun 2022.

D. Indeks Pembangunan Manusia

Pandemi Covid-19 varian Delta di pertengahan tahun 2021 memberikan tekanan terhadap perekonomian. Meskipun demikian, perluasan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan penguatan sistem kesehatan mampu menjaga aktivitas perekonomian dan memberikan bantalan pada perekonomian Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu meningkat sebanyak 0,35 poin dari tahun 2020, disumbang oleh peningkatan baik di komponen kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Pengeluaran per kapita masyarakat meningkat di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Namun, penyebaran varian baru Covid-19 (varian Omicron) mengharuskan pemerintah menerapkan kembali pembatasan kegiatan masyarakat yang diprakirakan akan memberikan tekanan pada aktivitas perekonomian. Meskipun demikian, pembatasan yang dilakukan tidak seketat dibandingkan pembatasan pada tahun 2021. Dampaknya dorongan ke bawah pada pengeluaran per kapita tahun 2022 diprakirakan tidak akan sebesar pada tahun 2021.

Perbaikan ekonomi pada tahun 2022 diharapkan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerataan ekonomi terutama dilakukan melalui bantuan sosial dan subsidi kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Terjaganya harga-harga yang merefleksikan stabilnya tingkat inflasi juga diharapkan berdampak pada peningkatan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan esensial seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit. Ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. Rendahnya cakupan imunisasi berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di masa depan, serta tidak tertanganinya berbagai penyakit yang menurunkan kualitas hidup manusia. Infrastruktur dan kemampuan sumber daya pada aspek promotif, preventif, relatif masih lemah. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pandemi melalui reformasi sistem kesehatan diperlukan untuk menjamin aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada aspek pendidikan, pandemi meningkatkan risiko berkurangnya efektivitas pembelajaran (learning loss) dan berpengaruh besar terhadap penurunan mutu dan kualitas hasil belajar. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan mempertimbangkan zonasi risiko COVID-19 diterapkan untuk mencegah learning loss akibat penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) secara berkepanjangan. Ketidaksiapan keluarga dalam pendampingan siswa dan keterbatasan kemampuan untuk membiayai pembelajaran multimoda masih menjadi hambatan dalam peningkatan mutu belajar dan mencegah anak putus sekolah. Untuk itu, diperlukan upaya untuk mempertahankan akses, termasuk mengoptimalkan layanan pendidikan formal dan nonformal, dan penguatan kurikulum pembelajaran untuk mempercepat pemulihan kualitas pembelajaran (learning recovery).

3.1.2.2. Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (Atlas Method) menjadi US\$4.720–4.840 pada tahun 2023, mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori upper-middle income countries.

Stabilitas makroekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 persen (yoy) dan nilai tukar rupiah diprakirakan berada pada kisaran Rp14.450 per US\$ berada pada rentang Rp13.800,00-Rp15.000,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. TPT pada tahun 2023 diharapkan turun menjadi 5,3-6,0 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,31–73,49. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan kehutanan, dan diharapkan dapat menjaga kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 103-105 dan NTN pada kisaran 106-107

Tabel 3.1 Target Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Taiget Ziromomi illanio ilabional Tantan 2020								
Indikator Kinerja	Realisasi	Outlook 2022	2023					
indikator Kinerja	2021	Outlook 2022	RPJMN	RKP 2023				
Pertumbuhan ekonomi (%)	3,69	5,0 – 5,5	5,7 - 6,0	5,3 – 5,9				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,49	5,5 – 6,3	4,0 – 4,6	5,3 - 6,0				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,71	8,5 – 9,0	7,0 – 7,5	7,5 – 8,5				
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,376 - 0,378	0,374 - 0,377	0,375 - 0,378				
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,29	72,67 – 72,69	74,77	73,31 – 73,49				

Sumber: RKP 2023

3.1.2.3. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi, difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

A. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

B. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusi

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

C. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

3.1.3. Perkembangan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 menekan laju pertumbuhan perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar -1,6 persen. Walaupun kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia, kontraksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 masih lebih baik dari nasional pada angka -2,07 persen. Pertumbuhan PDRB per kapita pun terkontraksi ke angka Rp. 30,64 juta dari tahun 2019 pada angka Rp. 31,67 juta.

Sementara itu tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat cenderung stabil dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terlalu terpengaruh oleh Covid-19. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,29 persen. Hingga data terkini di triwulan I 2022 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat pada angka 3,64 persen jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi dalam 4 triwulan terakhir dibandingkan dengan 4 triwulan sebelumnya mencapai angka 4,25 persen.

Dari sisi ketimpangan, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan *Gini Ratio* walaupun cenderung mengalami penurunan secara lambat dalam

5 tahun terakhir justru mengalami tren positif yang menurun 0,001 poin ke angka 0,300 pada tahun 2021 yang lalu. Pandemi Covid-19 justru menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat. Angka ketimpangan ini berada di bawah angka Gini Ratio Nasional pada kisaran 0,381 yang menunjukkan bahwa baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada pada tingkat ketimpangan pendapatan yang sedang. Sedangkan dari sisi ketimpangan wilayah yang diukur dengan Indeks Williamson, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dari 0,266 ke angka 0,274. Kondisi pandemi Covid-19 memperparah ketimpangan wilayah hingga angkanya naik menjadi 0,314. Proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 berjalan dengan baik sehingga ketimpangan wilayah ini bertahan di angka 0,315.

Untuk aspek kemiskinan dan pengangguran, kondisi pandemi COVID-19 menambah jumlah penduduk miskin baru sebanyak 16,57 ribu jiwa sehingga meningkatkan angka kemiskinan dari 6,40 persen menjadi 6,56 persen. Jumlah pengangguran pun bertambah 44,85 ribu orang, meningkat dari 5,33 persen menjadi 6,88 persen. Secara umum berdasarkan karakteristik wilayah kemiskinan cenderung berada di kawasan perdesaan dan pengangguran berada di kawasan perkotaan. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang lebih berdampak di kawasan perkotaan menyebabkan peningkatan angka pengangguran lebih tinggi dari peningkatan angka kemiskinan. Pemulihan ekonomi di tahun 2021 berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,04 persen dan angka pengangguran menjadi 6,52 persen. Perkembangan awal tahun 2022 di bulan Februari tercatat tingkat pengangguran kembali turun ke angka 6,17 persen.

3.1.3.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Sumatera Barat

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi -4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4 persen di Tahun 2021 lalu.

Sementara itu PBB memperingatkan bahwa dampak sosio-ekonomi yang menghancurkan dari pandemi Covid-19 akan dirasakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Pemulihan akibat pandemi sangat dipengaruhi oleh kecepatan proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Laporan PBB bertajuk World Economic Situation and Prospects menggarisbawahi bahwa pemulihan berkelanjutan dari pandemi akan bergantung tidak hanya pada besaran stimulus dan peluncuran vaksin yang cepat, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas langkah-langkah ini untuk membangun ketahanan terhadap guncangan di masa depan. Menghindari hal itu, dibutuhkan investasi cerdas dalam ketahanan ekonomi, sosial dan iklim untuk memastikan pemulihan ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan.

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai angka 3,69 persen. *Outlook* ekonomi Indonesia tahun 2022 memperkirakan ekonomi Indonesia akan *bounceback* dengan pertumbuhan 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 akan ditopang oleh kebijakan vaksinasi nasional yang ditargetkan mencapai angka 100 persen dari target sasaran vaksinasi meningkat dari kondisi di akhir 2021 yang mencapai angka 75 persen.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada tahun 2023 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian Covid-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi tahun 2022 oleh Bappenas, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun ini mencapai angka 5,4 persen. Pemerintah daerah sendiri dalam dokumen RKPD Tahun 2022 menetapkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 3,4 persen. Angka ini sendiri mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam perkembangannya merujuk kepada hasil perhitungan PDRB tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai angka 3,29 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dari outlook Bappenas pada angka 5,2 persen. Proyeksi yang lebih rendah ini merujuk kepada proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional. Sampai dengan kondisi bulan Desember 2021 proses vaksinasi di Sumatera Barat baru mencapai angka 69 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang positif ditunjukan dari pencapaian triwulan I 2022 yang meningkat 3,64 persen dari periode yang sama ditahun 2021. Dengan angka tersebut dan pola pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 10 tahun terakhir, maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan mencapai angka 4,72 persen, lebih tinggi dari prediksi awal dalam RKPD 2022.

Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru Covid-19, sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemi Covid-19 atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol Covid-19 yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi serta proyek konstruksi khususnya JJTS Padang-Sicincin kembali ditunda karena progress pembebasan lahan yang minim kemajuan.

Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan Rancangan Awal RKP 2023 diperkirakan berada pada angka 4,2 – 5,2 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sumatera Barat perlu mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru sebagai lokomotif perekonomian ke depan, disamping terus memperkuat dan mengoptimalkan kinerja pertanian dan industri pengolahan yang telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Sumatera Barat.

Sektor Pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif baru perekonomian Sumatera Barat karena memiliki *multiplier effect* yang luas dan keseluruhan. Kedatangan wisatawan memiliki dampak yang luar biasa dalam menggerakkan begitu banyak kegiatan sektor lain, seperti perhotelan dan restoran, transportasi, produk kerajinan dan industri olahan makan/minum, dan jasa-jasa.

Pemerintah daerah juga telah mencanangkan *Visit Beautiful West Sumatera* 2023 yang akan mendorong pertumbuhan ekondomi di tahun 2023. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didasarkan pada pencapaian ekonomi triwulan I 2022, sehingga diprediksi mencapai angka 4,65 persen.

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 6,15 persen dan secara bertahap di tahun 2023 bisa kembali ke angka sebelum pandemi. Sementara itu kinerja penurunan angka kemiskinan berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali pertumbuhan ekonomi tinggi yang berdampak pada peningkatan angka kemiskinan. Tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,70 persen di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 5,37 persen di tahun 2023.

Sementara itu tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah diharapkan mampu berkurang secara signifikan pasca pandemi. Gini Rasio diprediksi turun ke angka 0,298 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,296 di tahun 2023. Tingkat ketimpangan wilayah juga diprediksi turun ke angka 0,208 di tahun 2022 sejalan dengan pemulihan eknomi dan diharapkan mampu bertahan di angka yang sama 0,213 di tahun 2023. Secara lengkap proyeksi indikator makro daerah tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Real	isasi	Outlook	Target
МО	indikatoi makio dan Fembangunan	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-1,60	3,29	4,72	4,65
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,58	32,47	33,58
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,41	47,13	48,86
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	6,88	6,52	6,15	5,72
5	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	72,38	72,65	72,95	73,46
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,79	69,97
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,26	14,43
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,16	9,25
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	10.733	10.790	10.841	10.997
6	Kemiskinan (persen)	6,56	6,04	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	364,79	339,92	321,86	306,71
8	Gini Rasio	0,301	0,300	0,298	0,296
9	Indeks Williamson	0,311	0,315	0,208	0,213

Sumber : Rankhir RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

3.1.3.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 akan sangat dipengaruhi oleh proses vaksinasi yang belum berjalan sesuai dengan target nasional untuk menjamin pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
- 2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki backward dan forward linkage yang besar.
- 3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2022 dan 2023 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
- 4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

3.1.4. Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sijunjung

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan paripurna (*ultimate goals*) dari pembangunan suatu wilayah. Ukuran ketercapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator makro pembangunan ekonomi yang disepakati baik secara global maupun nasional. Indikator-indikator tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran PDRB per kapita, inflasi, ketimpangan pendapatan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

A. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung stagnan cenderung melambat, ekonomi yang sempat tumbuh 5,26 persen pada tahun 2017 justru terus menurun hingga hanya mencapai angka 4,81 persen pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 bahkan lebih memperparah kondisi perekonomian daerah yang terkontraksi sekitar minus 1,10 persen. Keberhasilan pengendalian Coviddan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Ini dapat dilihat dari , kondisi perekonomian baik global maupun nasional pada tahun 2021 mengalami rebound dengan kondisi yang lebih membaik. Secara nasional pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,0 persen, begitupun capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang pada tahun 2021 tumbuh sebesar 3,29 persen, Kabupaten Sijunjung 3,15 persen yang dalam capaiannya masih dibawah rata-rata nasional dan provinsi.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 telah mendorong peningkatan terhadap nilai PDRB pada tahun 2021. Peningkatan tersebut, terlihat pada beberapa sektor usaha pada tahun 2020 bernilai minus dan di tahun 2021 kembali menunjukan kenaikan yang signifikan, sektor usaha tersebut antara lain industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan, jasa perusahaan, administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial serta jasa lainnya. Selain lapangan usaha yang mengalami kenaikan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih terus mengalami penurunan dari -1,17 persen di tahun 2020 menjadi minus 4,42 persen di tahun 2021.

memiliki kontribusi Lapangan usaha yang terbesar pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yaitu sebesar 9,38 persen dari minus 8.76 persen ditahun 2020. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah jasa lainnya yakni sebesar 8,96 persen disusul jasa keuangan dan asuransi yakni sebesar 8,92 persen. Peningkatan pertumbuhan tersebut menandakan bahwa usaha di Indonesia khususnya Kabupaten Sijunjung mulai menggeliat kembali setelah hampir 2 tahun lamanya berbagai usaha terhenti akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 sebesar 3,15 persen dari -1,10 persen di tahun 2020. Hanya saja masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi semakin lebih baik, karena dari 17 kategori lapangan usaha yang digunakan dalam penghitungan, masih terdapat 11 lapangan usaha dengan persentase pertumbuhan dibawah 5 persen. Kesepuluh lapangan usaha tersebut yaitu: kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; listrik dan gas; pengadaan air, pengolahan sampah daur ulang; konstruksi; perdangan besar dan enceran; transportasi dan penggudangan; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan; pertahanan dan jaminan Sosial dan jasa pendidikan.

Pengendalian Covid-19 yang terus berlanjut, perluasan pembukaan aktivitas ekonomi mendorong sektor transportasi dan pergudangan, penyediaan akmamin, dan perdagangan tumbuh meningkat. Di sisi lain, sektor konstruksi terus meningkat sejalan dengan aktivitas konstruksi pemerintah dan swasta, yang didukung oleh stimulus kebijakan dan meningkatnya pendanaan yang bersumber dari akselerasi belanja modal pemerintah dan peningkatan kinerja kredit properti. Sementara itu, sektor pertanian dan pertambangan diprakirakan akan tetap tinggi sejalan dengan permintaan ekspor terutama dari AS dan Cina dan harga komoditas yang tetap tinggi.

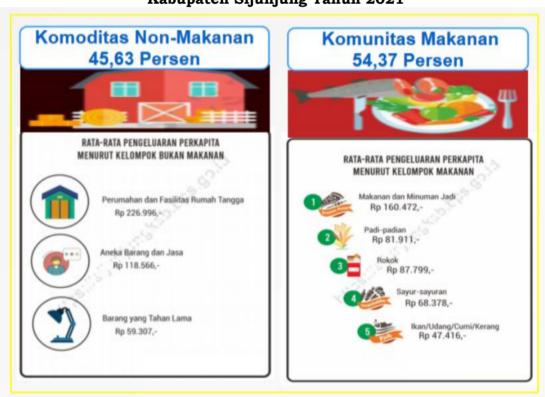
Indikator lain untuk menunjukan kondisi ekonomi suatu wilayah adalah dengan nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB dan PDRB perkapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan senantiasa mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung atas dasar harga berlaku tahun 2021 telah mencapai mencapai 40,31 juta rupiah lebih baik dari tahun 2020 yang hanya mencapai 38,87 juta rupiah. Smentara PDRB per Kapita atas dasar harga konstan tahun mencapai 28,43 juta rupiah meningkat menjadi 29,05. juta rupiah. Nilai

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 9,14 triliun rupiah menjadi 9,57 triliun rupiah pada tahun 2021. begitu juga dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesa 6,68 triliun rupiah menjadi 6,89 triliun rupiah pada tahun 2021

Dari sisi rata-rata pegeluaran perkapita menurut kelompok makanan kelompok bukan makanan. Besar kecilnya jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan faktor yang turut menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara/wilayah. Meningkatnya pengeluaran konsumsi masyarakat akan mendorong perkembangan produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut. Hal ini berarti membuka peluang investasi bagi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Selain itu, pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan gambaran penggunaan PDRB. Tingkat pengeluaran konsumsi tersebut, menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi melalui proses multiplier dari PDRB Kabupaten Sijunjung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel yang dominan dalam penggunaan PDRB. Hal ini menunjukkan besamya peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung. Jika terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat, maka akan mempengaruhi perekonomian Kabupaten Sijunjung. Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Sijunjung, seperti terlihat pada infografis berikut ini.

Gambar 3.1.

Persentas Pengeluaran Perkapita dan Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas Non-Makanan dan Makanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021



Sumber: BPS Kabupatn Sijunjung, 2022

Dari infografis diatas, pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan kebutuhan makann dan no-mkanan, pada tahun 2021 pengeuaran kosumsi rumah tangga sebesar 54,37 persen untuk makanan dan sisanya 45, 63 persen untuk non-makanan. Pengeluaran komsumsi rumah tangga untuk makanan terbesar dialokasikan untuk makanan dan

minuman jadi Rp160.472,-/bulan dan terendah dialokasikan untuk komsumsi ikan/udang/cumi/kean sebesar Rp47.416,-/bulan. Sementara untuk non makanan dialokaikan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai Rp226.996,-/bulan dan terendah untuk barang yang tahan lama Rp59.307,-/bulan.

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum pada suatu negara/daerah dalam kurun waktu yang terus-menerus (kontinu) disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang sesuai dengan mekanisme pasar, yaitu oleh faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply) barang yang beredar di pasaran. Berbagai faktor yang menyebabkan kenaikan harga secara menyeluruh antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, tingginya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, atau ketidaklancaran distribusi barang. Tingginya inflasi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Barometer tingkat inflasi di Kabupaten Sijunjung adalah tingkat inflasi Provinsi dan inflasi di Kota Bukittinggi. Tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 cederung meningkat dari bulan Januari sampai dengan Desember, hal ini dikarenakan posisi inflasi di bulan Januari mengalami kontraksi dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya aktifitas masyarakat dan ekonomi yang belum berjalan,adapun perkembangan lanju inflasi selama tahun 2021 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.2. Laju Inflasi Bulanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Mengutip dari Berita Resmi Statistik Provinsi Sumatera Barat terkait dengan Perkembangan Indeks Harga Konsumen Sumaera Barat Desember 2021 Nomor: 01/01/13/Th.XXV pada tanggal 3 Januari 2022 bahwa Inflasi pada tahun 2021 terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali, yakni terjadi pada bulan Januari, Maret, Mei, September, Oktober, November, dan Desember. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan November sebesar 0,65 persen dan terendah terjadi pada bulan September sebesar 0,10 persen. Sementara itu, deflasi terjadi pada bulan Februari, April, Juni, Juli, dan Agustus. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 0,38 persen dan deflasi terendah terjadi pada bulan April sebesar 0,01 persen.

Inflasi Sumatera Barat terjadi karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsume (IHK) pada 10 (sepuluh) kelompok pengeluaran, yakni kelompok kesehatan sebesar 6,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 6,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,99 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,00 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 1,63 persen; kelompok transportasi sebesar 1,54 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 1,38 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,88 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,72 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,70 persen. Sedangkan kelompok pendidikan mengalami deflasi sebesar 0,12 persen.

Kelompok yang dominan memberikan andil inflasi Sumatera Barat selama tahun 2021 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,24 persen; kelompok transportasi sebesar 0,22 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,13 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar 0,12 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,05 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen. Sedangkan kelompok pendidikan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen. Secara lebih detail Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021 di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Inflasi dan Andil Inflasi Sumatera Barat Tahun 2021

Kelompok Pengeluaran	Inflasi	Andil Inflasi
Umum	1,40	1,40
Makanan, Minuman dan Tembakau	0,88	0,27
Pakaian dan Alas Kaki	0,72	0,05
Perumahan, Air, Listrik dan bahan Bakar Rumah Tangga	1,63	0,24
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,99	0,12
Kesehatan	6,23	0,10
Transportasi	1,54	0,22
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,70	0,04
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	6,17	0,12
Pendidikan	-0,12	-0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/restoran	1,38	0,13
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	2,00	0,12

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Inflasi di Sumatera Barat secara tahun kalender dan inflasi year on year pada bulan Desember 2021 Sumatera Barat tercatat sebesar 1,40 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan laju inflasi year on year pada bulan yang sama tahun 2020 sebesar 2,11 persen dan tahun 2019 mengalami inflasi sebesar 1,66 persen. Angka capaian inflasi di Sumatera Barat selama 5 (lima) tahun terakhir.

Laju inflasi Kabupaten Sijunjung juga diwakili oleh inflasi yang terjadi di Kota Bukittinggi sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa terdekat. Perkembangan inflasi Kabupaten Sijunjung berdasarkan kondisi inflasi bulanan yang terjadi di Kota Bukittinggi tahun 2021 disajikan pada gambar berikut ini.

Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Bukittinggi Tahun 2021

Agustus

(0.27)

(0.17)

0.24

(0.13)

0.28

0.53

(0.01)

(1.10)

0.10

0.31

Oktober

0:41

0.75

0.92

0.41

November Desember

0.39

0.01

0.41

0.37

0.40

0.37

0.10

0.83

0.32

Mei

0.26

0.39

0.78

(0.39)

(0.44)

(0.26)

(0.13)

1.28

0.20

0.20

(0.03)

(0.39)

0.46

0.09

0.09

Gambar 3.3.

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Februari

(0.11)

0.46

(0.49)

(0.22)

(0.45)

Maret

0.31

0.07

0.11

0.28

0.25

0.19

0.06

0.51

0.12

(0.18)

(0.50) (1.00) (1.50)

2021

2020

2018

-2017

Januari

0.30

0.25

(0.39)

0.75

0.22

Berdasarkan Gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai inflasi bulanan yang terjadi sepanjang tahun 2017-2021 cukup berfluktuasi. Secara umum inflasi terjadi pada pertengahan dan akhir tahun dan memiliki pola yang hampir sama setiap tahunnya. Kenaikan pada pertengahan tahun terjadi seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri yang jatuh pada bulan Mei tahun 2021 menyebabkan terjadinya inflasi sebesar 0,26persen. Meski tidak begitu tinggi, inflasi tersebut tetap bergerak naik ditengah pemberlakuan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan penurunan laju IHK secara regional. Sementara inflasi pada akhir tahun sebagian besar disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat pada masa-masa musim liburan dan cuti bersama. Pada akhir tahun 2021 inflasi sebesar 0,53 persen pada bulan September didorong oleh terjadinya cuti bersama yang disertai pelonggaran pembatasan sosial yang menyebabkan tingginya permintaan konsumsi masyarakat.

Ditengah wabah pandemi Covid-19, inflasi yang terjadi pada tahun 2021 adalah sebesar 1,69 persen. Kondisi ini didorong oleh kenaikan harga yang terjadi pada 9 (sembilan) kelompok pengeluaran masyarakat. Kelompok tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya. Perkembangan inflasi dan harga yang berfluktuatif tersebut secara tidak langsung akan berdampak pada pendapatan atau nilai lain, inflasi yang terjadi pada batas-batas tertentu dan Disisi stabil akan mendorong produksi dan menguntungkan petani. Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Daerah melalui dibawah koordinasi Tim Daerah (TPID) diharapkan mampu Pengendali Inflasi melakukan pengendalian terhadap supply beberapa komoditas utama penyebab inflasi di daerah untuk mencegah terjadinya fluktuasi harga yang signifikan. Selain itu, tim TPID tersebut juga diharapkan dapat merumuskan rekomendasi dan arah kebijakan sektoral yang mampu menciptakan keterjangkauan harga barang dan jasa di daerah.

C. Gini Ratio/Ketimpangan Pendapatan

Gini Ratio atau Koefisien Gini merupakan indikator yang bisa menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ketimpangan pendapatan adalah kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan pendapatan penting menjadi perhatian karena akan menyebabkan inefisiensi ekonomi, stabilitas sosial dan solidaritas serta jika ketimpangan melemahkan ekstrim menunjukkan ketidakadilan. Koefisien Gini (Gini Ratio) menjadi salah satu indikator untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi (Gini Ratio 0,50-0,70), tingkat Ketimpangan Sedang (Gini Ratio 0,35-0,50), dan tingkat Ketimpangan Rendah (Gini Ratio 0,20-0,35).

Gini Ratio Kabupaten Sijunjung menurun signifikan, pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,270 sama dengan tahun sebelumnya. Gini Ratio ini dikategorikan sebagai "ketimpangan rendah". Gini rasio Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 lebih baik dari Gini Ratio Provinsi dan Nasional. Perbaikan Gini Ratio pada tahun 2021, seiring dengan pelonggaran aturan PPKM dan meningkatnya kembali aktifitas perekonomian masyarakat. Hal ini juga sebagai dampak adanya bantuan tunai yang banyak diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kepada masyarakat terdampak utamanya masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah keatas mereka juga terdampak tetapi tidak menjadi sasaran program bantuan pemerintah.

D. Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan yang berkualitas ditunjukkan salah satunya dengan terjadinya penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemikinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 Rp455.346/Kapita/Bulan, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan garis kemiskinan tersebut, di Kabupaten Sijunjung jumlah penduduk miskin tahun tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 16,28 ribu jiwa pada tahun 2020 menjadi 16,81 ribu jiwa ribu tahun 2021. Hal ini disebebkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah terhentinya berbagai program penanggulangan kemiskinan, realokasi anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19, ditambah lagi dengan tidak berfungsinya Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Upaya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang dilakukan sejak awal pandemi Covid-19 pada Maret 2020 hinga awal tahun 2021 lebih cederung menahan kenaikan tingkat kemiskinan, namun seiring dengan pembukaan aktifitas ekonomi serta aktifitas masyarakat, maka dampak pemulihan ekonomi telah mulai dirasakan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di di Kabupaten Sijunjung 2021 sebesar 6,80 persen atau turun sebesar 0,07 persen jika dibandingkan capaian kondisi 2020. Namun, bila dilihat dari

perbandingan capaian tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi, maka capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung relatif lebih baik dari capaian rata-rata nasional yang masih tinggi pada angka 10,14 persen, namun masih berada dibawah rata-rata capaian Provinsi yang telah mencapai 6 persen.

Lebih lanjut, upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Untuk mengukur kualitas kinerja penurunan tingkat kemiskinan digunakan indikator berupa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh ratarata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Penurunan pada P2 mengindikasikan bahwa terjadi gap yang semakin mengecil antara penduduk miskin yang satu dengan yang lainnya, sehingga upaya intervensinya pun juga dapat lebih seragam.

Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, namun tidak mempengaruhi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 0,97 dan mengalami penurunan menjadi 0,86 pada tahun 2021, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan pada tahun 2020 adalah 0,27 dan menurun menjadi 0,17 pada tahun 2021.

Jika dibandingkan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021, menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan Kabupaten Sijunjung berada dibawah rata-rata tingkat kedalaman dan keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Indek kedalam kemiskinan Provinsi Sumatera Barat mencapai 1,040 dan 0,240 untuk kndek keparahan kemiskinan. Sijunjung lebih baik dari provinsi, artinya kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan rendah, juga ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga rendah. Kondisi ini sangat positif untuk kedepannya didukung dengan program dan anggaran yang tepat sasaran.

E. Tingkat Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Sijunjung telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Kabupaten Sijunjung. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung

Komposisi penduduk akan mempengaruhi ketersediaan lapangan kerja, sesuai dengan konsep bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten tahun 2021 sebanyak 176.313 orang yang terdiri dari angkatan kerja 123.532 orang dan bukan angkatan kerja 52.781 orang. Jumlah penduduk angkatan kerja yang bekrja pada tahun 2020 sebanyak 115,659 orang menjadi 119.119 orang pada tahun 2021, sedangkan untuk jumlah pengangguran pada tahun 2020 sebanyak 6.475 orang mengalami menurun menjadi 4.413 orang

Bila kita bandingkan TPT dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sijunjung kedua indikator ini tidak mempunyai korelasi positif. Pada tahun 2020 tingakat kemiskinan 6,79 persen meningkat menjadi 6,80 persen tahun 2021, sementara tingkat pengangguran terbuka menurun dari 5,30 tahun 2020 menjadi 3,57 persen tahun 2021. Anomasli ini, disebabkan oleh angkatan kerja yang bekerja pada periode tersebut tidak produktif, sehingga pendapatan yang mereka peroleh masih berada dibawah garis kemiskinan. Tentu ini kedepannya harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah untuk membuka lapagangan pekerjaaan yang produktif dengan didukung oleh program dan anggaran yang tepat sasaran.

Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan dari 119.119 orang yang bekerja pada Tahun 2021. Struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dan sektor industri. Sektor-sektor ini penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan sebanyak 46.572 orang persen meningkat dibanding tahun 2020 menyerap tenaga kerja 41.358 orang, sektor industri sebanyak 20.321 orang pada tahun 2020 menjadi 16.611 orang dan sektor lainnya 53,980 orang tahun 2020 menjadi 55.936 orang tahun 2021 persen. Ditinjau dari status pekerjaan utama, dari 119.119 orang yang bekerja pada Tahun 2021 yang terbanyak adalah berusaha sendiri sebesar 35.264 orang atau 29,60 persen diikuti Buruh/Karyawan/Pegawai sebanyak 34.350 orang atau 28,84 persen.

F. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefenisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Untuk mengukur perkembangan kesejahteraan sosial masyarakat baik suatu negara maupun daerah indikator yang sering digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapn Hidup Saat Lahir (HHSL), digunkanan untuk mengukur peluang hidup, angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status pendidikan dan Pengeluaran Riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya alam serta standar hidup layak. Semakin baik perkembangan empat dimensi variabel tersebut maka akan semakin tinggi pula angka IPM.

Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Sijunjung tahun 2020 67,74 menjadi 67,86 poin tahun 2021. Angka IPM tergolong IPM menengah atas karena memiliki nilai dalam rentang batas 65-80 poin. Peningkatan angka IPM menggambarkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Capain IPM Kabupaten Sijunjung masih berada dibawah rata-rata nasional dan provinsi. Begitu juga dengan pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional.

Tentu kedepanya perlu mendapat perhatian khusus. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan cara menekan angka putus sekolah melalui bantuan dari berbagai lembaga seperti bantuan biaya sekolah dari BOS, dan lembaga beasiswa lainnya, serta meningkakan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di berbagai nagari, melaksanakan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dengan mendorong kejar Paket A, B dan C. Peningkatan IPM juga dapat didorong melalui peningkatan derjad kesehatan masyarakat melalui pola hidup sehat. Disamping itu, mengenjot pertumbuhan perekonomian yang berkualitas dengan pengembanga ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Perkembangan dan pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perbandingan Komponen IPM Kabupaten Sijunjung (SJJ),
Provinsi Sumatera Barat (SBR) Dan Nasional (NAS)
Tahun 2020-2021

No	No Komponen IPM		2020			2021		
NO	Komponen 1PM	SJJ	SBR	NAS	SJJ	SBR	NAS	
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)	66,21	69,47	71,47	66,36	69.59	71,57	
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,37	14,02	12,98	12,38	14.09	13,08	
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,11	8,99	8,48	8,12	9.07	8,54	
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (juta/Org/Tahun)	10,389	10.733	11.013	10.389	10.790	11.156	
IPM		67,74	72,38	71,94	67,86	72.65	72.29	
Pe	ertumbuhan IPM		-0,01	0,02	0,18	0,27	0,35	

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022

3.1.4.1. Tantangan, Prospek Ekonomi Kabupaten Sijunjung

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara berdampak terhadap terkoreksinya pertumbuhan ekonomi secara global. Prediksi awal pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 sedikit membaik dibandingkan 2019 yang kinerjanya melemah. Faktanya pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh 2,5 persen, pada tahun 2020 ini terkoreksi menjadi minus 4,3 persen, lebih dari 2 setengah kali lipat dari penurunan selama krisis keuangan global tahun 2009. Kondisi ini tentu sangat berdampak besar bagi aktivitas perekonomian dunia secara umum dan Indonesia pada khususnya. Pemulihan ekonomi global di tahun 2021 cukup menjanjikan walaupun dalam perkembangannya terdapat beberapa varian baru virus Covid-19. Beberapa Lembaga keuangan dunia menilai pertumbuhan ekonomi global mencapai angka 5,4 persen di Tahun 2021 lalu.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terus mengalami pemulihan dan lepas dari tekanan besar akibat pandemi Covid-19. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 3,7 persen pada tahun 2021. Keberhasilan pengendalian pandemi COVID-19, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal-moneter dan sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi enjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 8,6 persen, menjadi Rp62,2 juta atau setara US\$4.349,5 tahun 2021. Dengan pencapaian ini, *Gross National Income* (GNI) Indonesia

diprakirakan juga mengalami kenaikan. Dari sisi laju pemulihan, PDB Indonesia tahun 2021 berhasil melampaui level prapandemi.

Smentara itu, Pemulihan ekonomi Sumatera Barat tahun 2022 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kasus harian Covid-19. Walaupun sempat menurun diakhir tahun 2021, jumlah kasus harian kembali meningkat di awal tahun 2022. Hal ini senada dengan mobilitas masyarakat yang tertahan di akhir tahun 2021, justru meningkat di awal tahun 2022. *Outlook* pertumbuhan ekonomi tahun 2022 Sumatera Barat sebesar 3,4 persen.

Mencermati tantangan, prospek dan kebijakan ekonomi dunia, nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka pemulihan dan prospek ekonomi Kabupaten Sijunjung sangat bergantung dari penurunan Covid dan kebijakan pemulihan ekonomi ekonomi yang diambil baik secara nasional dan provinsi. Berdasarkan kondisi eksisting perekonomian Kabupaten Sijunjung, kebijakan yang diambil oleh pemerintah tantangan pembangunan ekonomi kabupaten sijunjung ke depan secara internal maupun eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1. Masyarakat Kabupaten Sijunjung 39,10 persen atau (46.572 jiwa) usaha dibidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan dan sektor industri 13,96 persen atau (16.611 jiwa). Berusaha pada skala mikro dan kecil, akses terhadap permodalan rendah dan penguasaan teknologi juga rendah, sehingga dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing yang berdaya ungkit. Dengan skala usaha yang berada pada skala mikro dan kecil, maka dengan terjadinya dampak pandemi Covid-19 usaha masyarakat menjadi sangat rentan terkena dampak dan membutuhkan insentif yang besar untuk bisa bangkit kembali. Kondisi ini menjadi kendala bagi Kabupatebn Sijunjung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
- 2. Masih rendahnya produktivitas UMKM dapat mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang berdaya saing dan memiliki kuantitas yang rendah dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional.
- 3. Angka pengangguran terbuka dan kemiskinan yang masih tinggi, serta akses terhadap sumberdaya produktif berada jauh di bawah tingkat yang memungkinkan untuk berusaha. Dilain pihak, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan menjadi sandaran bagi masyarakat miskin masih menghadapi kendala seperti iklim usaha yang kurang kondusif, produktivitas yang rendah, daya saing yang lemah, keterbatasan terhadap sumberdaya produktif, pasar serta teknologi.
- 4. Integrasi antar lapangan usaha belum optimal, masih belum terbentuk jejaring yang saling mendukung terutama pada tiga lapangan usaha utama yaitu pertanian, UMKM dan pariwisata serta ekonomi kreatif.
- 5. Permasalahan lahan yang sebagain besar merupakan tanah ulayat, sering menjadi kendala, karena itu perlu pola pemanfaatan sehingga pemanfaatan lahan saling menguntungkan antara investor dan pemilik lahan.
- 6. Masih tingginya celah fiskal, ketergantungan kepada alokasi dana dari Pemerintah masih tinggi sehingga kesulitan mengembangkan potensi yang sesungguhnya cukup besar.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung dengan memperhatikan tantangan dan kondisi eksisting perekonomani. *Outlook* Bappeda Provinsi Sumatera Barat, petumbuhan perekonomian Kabupaten Sijunjung tahun 2022 pada angka 3,92 pesen. Namun, pertumbuhan ekonomi ini akan

menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Sumatera Barat periode Februari 2022 yang dilakukan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi penahan pertumbuhan ekonomi tahun 2022, antara lain yakni masih dimungkinkannya muncul risiko adanya beberapa varian baru Covid-19, sehingga dikhawatirkan akan munculnya kembali pengetatan kebijakan aktifitas luar ruang yang akan berdampak kepada aktifitas ekonomi, belum ada satu pihak pun yang mampu menjamin berakhirnya pandemi Covid atau turun status menjadi endemic serta disamping itu juga semakin berkurangnya kurangnya perhatian berbagai pihak terhadap protokol Covid-19 yang membuka peluang risiko masih berlanjutnya status pandemi di tahun 2022 masih dimungkinkan, adanya Konflik Ukraina-Rusia memburuk yang memberikan tekanan kepada perekonomian global, termasuk inflasi yang lebih tinggi. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung sesuai hasil analisis Bapppeda Provinsi Sumatera Barat diperkirakan berada pada angka 4,43 persen, angka tersebut lebih tinggi sedikit dari target RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditargetkan pada angka 4,21 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan diharapkan bisa mencapai angka 6,57 persen pada tahun 2022 dan 6,34 persen secara bertahap pada tahun 2023. *Outlook* tingkat kemiskinan tahun 2022 dan target Tahun 2023 tidak sesuai dengan hasil analisis Bappeda Provinsi Sumatera Barat karena asumsi digunakan terlalu optimis. Oleh sebab itu, perlu disesuaikan dengan asumsi yang digunakan melalui pendekatan moderat berdasarkan rata-rata kenaikan atau penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Sementara itu kinerja pengangguran terbuka di kabupaten Sijunjung berjalan baik walaupun dalam kondisi pandemi. Namun demikian Pemerintah Daerah perlu mewaspadai anomali tingkat pengangguran rendah tapi tingkat kemiskinan tinggi yang disebabkan oleh tenaga kerja yang trserap tidak produktif sehingga pendapatan mereka masih tetap dibawah garis kemikinan. Untuk pengangguran terbuka diharapkan mampu turun ke angka 3,62 persen di tahun 2022 dan secara bertahap turun ke angka 3,41 persen di tahun 2023. Sementara itu Gini Rasio atau tingkat ketimpangan pendapatan diharapkan turun ke angka 0,260 di tahun 2022 dan berkurang ke angka 0,250 di tahun 2023.

Tabel 3.5
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

		Real	isasi	Outlook	Target
No	Indikator Makro	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	-1,10	3,15	3,95	4,43
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	28,43	29,05	29,40	30,36
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	38,99	40,31	40,46	41,24
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,30	3,57	3,62	3,41
5	Indak Pembangunan Manusia - Usia Harapan Hidup - Harapan Lama Sekolah - Rata-rata Lama Sekolah - Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	67,74 66,21 12,37 8,11 10.361	67,86 66,36 12,38 8,12 10.389	68,06 66,59 12,54 8,21 10.438	68,57 66,79 12,70 8,31 10.588
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	6,78	6,80	6,57	6,34
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu Jiwa)	16,28	16,81	16,41	16,02
8	Gini Rasio (indek)	0,269	0,270	0,250	0,240

Sumber: BPS Kabupaten Sijunjung, 2022; Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2022 dan Bapppeda Kabupaten Sijunjung, 2022

3.1.4.2. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sijunjung

Untuk mencapai target-target pada proyeksi makro daerah Tahun 2023 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Sijunjung ke depannya sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, penurunan stunting serta ketimpangan pendapatan
- 2. Peningkatan kualitas daya saing ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, UMKM dan pariwisata dengan arah kebijakan sebagai berikut melalui:
 - a. Pengembangan industri kecil menengah berbasis sumber daya lokal
 - b. Pengembangan destinasi wisata terintegrasi antar wilayah.
 - c. Penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan
 - d. Ketahanan pangan
 - e. Peningkatan sistem penyuluhan.
 - f. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pertanian dan pariwisata.

3.2. Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah mulai tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sijunjung disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya pada tahun anggaran 2017 sampai dengan 2020 kebijakan keuangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005. Berdasarkan perbedaan struktur APBD tersebut, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6 Struktur Pendapatan Pada APBD Tahun 2023

				u in DD Tunun 2020		
		Struktur Pend	apata	n pa	ada APBD	
	I	PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005			
1.	Per	Pendapatan Asli Daerah :		. Pendapatan Asli Daerah :		
	a.	Pajak Daerah;		a.	Pajak Daerah;	
	b.	Retribusi Daerah;		b.	Retribusi Daerah;	
	•	Hasil pengelolaan Kekayaan		0	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah	
	c.	Daerah Yang dipisahkan; dan		c.	Yang dipisahkan; dan	
	d.	Lain-lain pendapatan Asli		d.	Lain lain nondanatan Asli Daarah	
	u.	Daerah.		u.	Lain-lain pendapatan Asli Daerah.	
2.	Per	ıdapatan Transfer :	2.	Pen	dapatan Dana Perimbangan :	
	a.	Transfer Pemerintah Pusat :		a.	DBH	
		 Dana Perimbangan : 		b.	DAU	
		Dana Transfer		c.	DAK	
		(a) Umum :		C.	DAK	
		(1) DBH				
		(2) DAU				
		(b) Dana Transfer				
		Kiiusus .				
		(1) DAK Fisik; dan				
		(2) DAK Non Fisik.				
		2) Dana Insentif Daerah;				
		3) Dana Otonomi Khusus;				
		4) Dana Keistimewaan; dan				
		5) Dana Desa				
	b.	Transfer Antar-Daerah :				
		 Pendapatan Bagi Hasil; dan 				

	Struktur Pendapatan pada APBD						
	PP Nomor 12 Tahun 2019			PP Nomor 58 Tahun 2005			
		2) Bantuan Keuangan.					
3.	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:		3.	3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang S			
	a. b. c.	Hibah; Dana Darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		a. b. c.	Hibah; Dana Darurat; dan/atau lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.		

Sumber: Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, 2022

Tabel 3.7 Struktur Belanja Daerah pada APBD

Struktur Belanja Daerah dalam APBD				
	PP Nomor 12 Tahun 2019	PP Nomor 58 Tahun 2005		
Kla	sifikasi Belanja Daerah terdiri	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja		
ata	s:	terdiri dari :		
a.	Belanja Operasi, dirinci atas jenis :	a. Belanja Tidak Langsung :		
	 Belanja Pegawai; 	1) Bunga;		
	2) Belanja Barang dan Jasa;	2) Subsidi;		
	3) Belanja Bunga;	3) Hibah;		
	4) Belanja Subsidi;	4) Bantuan Sosial;		
	5) Belanja Hibah; dan	5) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan		
		Keuangan; dan		
	6) Belanja Bantuan Sosial.	6) Belanja Tidak Terduga.		
b.	Belanja Modal	b. Belanja Langsung :		
c.	Belanja Tidak Terduga	1) Belanja Pegawai;		
d.	Belanja Transfer, dirinci atas jenis :	2) Belanja Barang dan Jasa; dan		
	1) Belanja Bagi Hasil; dan	3) Belanja Modal.		
	2) Belanja Bantuan Keuangan.			

Sumber: Badan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Sijunjung, 2022

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah Kabupaten Sijunjung kurun waktu 2020 sampai 2024 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

- 1. Memulihkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak Pandemi Covid-19.
- 2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan Pendapatan Daerah.
- 3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.
- 4. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak dan Retribusi.
- 5. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan Pendapatan Daerah dengan instansi/lembaga terkait di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- 6. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan Piutang Pajak Daerah, melalui Inventarisasi Piutang Pajak Daerah.
- 7. Penguatan sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 8. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak dan Retribusi.

- 9. Peningkatan dan pengembangan aset Pemerintah Daerah secara profesional.
- 10. Meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.
- 11. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan BLUD dan Pendapatan Asli Daerah Yang Sah lainnya.

Total Pendapatan Tahun 2023 diasumsikan Rp 657.475.077.081,00 terdiri dari; 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar 95.642.731.837,00 dan 2) Pendapatan Transfer Rp 561.832.345.244,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 970.479.639.731,42. mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2020 sebesar Rp 28.716.322.894,54. Untuk target Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp 657.475.077.081,00 mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp334.363.423.600,00). Hal ini disebabkan karena pendapatan transfer pada RKPD Tahun 2023 hanya memperhitungkan Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Transfer Umum (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Dana Bagi Hasil Pajak.

Sementara itu, realisasi pendapatan tahun 2020, 2021 dan 2022 sudah termasuk di dalamnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Alokasi Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berupa pendapatan hibah. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh Perangkat Daerah lebih giat dan lebih gencar lagi melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi berupa program dan kegiatan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mendapatkan dukungan dana, baik berupa Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, Dana Desa maupun Dana Hibah. Kondisi ini mencerminkan sangat sempitnya ruang fiskal pembangunan daerah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.8

Realisasi Tahun 2020, 2021, Outlook Tahun 2022, Target Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Pendapatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

	Rea	lisasi	Outlook Tahun	Target	Perkiraan Maju	
Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
PENDAPATAN	941.763.316.836,88	970.479.639.731,42	991.838.500.681,00	657.475.077.081,00	53.457.000.000,00	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	92.474.357.995,88	91.746.807.445,42	95.642.731.837,00	95.642.731.837,00	16.356.000.000,00	
Pendapatan Pajak Daerah	12.813.277.327,11	14.251.602.174,00	17.185.916.011,00	17.185.916.011,00	20.232.000.000,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	3.195.651.359,00	3.088.899.247,00	5.548.711.068,00	5.548.711.068,00	6.305.000.000,00	
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.623.180.377,00	13.841.921.504,00	14.685.250.000,00	14.685.250.000,00	19.535.000.000,00	
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.842.248.932,77	60.564.384.520,42	58.222.854.758,00	58.222.854.758,00	70.284.000.000,00	
PENDAPATAN TRANSFER	806.323.734.941,00	838.314.048.880,00	880.728.899.244,00	561.832.345.244,00	37.101.000.000,00	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	661.686.085.868,00	691.975.191.967,00	780.016.792.200,00	517.438.501.200,00	67.913.000.000,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	13.733.231.402,00	19.614.315.938,00	15.240.127.200,00	15.240.127.200,00	15.495.000.000,00	
Dana Alokasi Umum (DAU)	509.071.532.000,00	502.198.374.000,00	502.198.374.000,00	502.198.374.000,00	552.418.000.000,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	138.881.322.466,00	170.162.502.029,00	262.578.291.000,00			
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	105.983.617.000,00	95.429.483.000,00	56.318.263.000,00	0,00	0,00	
Dana Insentif Daerah	46.973.537.000,00	33.087.409.000,00	2.061.902.000,00	_	0	

	Realisasi		Outlook Tahun	Target	Perkiraan Maju	
Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Alokasi dana Desa yang Berasal Dari APBN	59.010.080.000,00	62.342.074.000,00	54.256.361.000,00	-		
Transfer Pemerintah Provinsi	38.654.032.073,00	50.909.373.913,00	44.393.844.044,00	44.393.844.044,00	53.716.000.000,00	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.654.032.073,00	48.909.373.913,00	44.393.844.044,00	44.393.844.044,00	53.716.000.000,00	
Bantuan Keuangan		2.000.000.000,00				
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	42.965.223.900,00	40.418.783.406,00	15.466.869.600,00	0,00	0,00	
Pendapatan Hibah	42.965.223.900,00	40.418.783.406,00	15.466.869.600	-	0,00	

Sumber :Badan Keungan dan Aset Daerah, 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari:

- 1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja Perangkat Daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol *Covid-19* dalam pelaksanaan new nomal.
 - c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Belanja hibah tahun 2023 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOS PAUD/TK swasta, SD swasta, SMP swasta, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- 2. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 3. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
- 4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa.
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
 - belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
 - pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 5. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Nagari/Desa). Belanja transfer tahun 2023 dirinci atas jenis:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Nagari/Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Nagari/Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Nagari/Desa, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergisitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Untuk Bantuan Keuangan berupa Alokasi Dana Nagari dianggarkan 10 persen (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Sijunjung setelah dikurangi DAK.

Proyeksi mengenai Belanja Daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada Kebijakan Pemerintah, serta mempertimbangkan Kebijakan Pembiayaan Daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama/program unggulan.

Sedangkan kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Wajib Mengikat, Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sijunjung;

- 2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
- 3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- 4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
- 5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah: dan
- 6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi Belanja Tahun 2023 direncanakan sebesar terdiri dari; Rp706.475.077.081,00 Belanja Operasi 1) sebesar Rp515.457.764.254,00,-, 2) Belanja Modal sebesar Rp130.000.000.000,00,-3) Belanja Tak Terduga sebesar Rp7.000.000,000 dan 4) Belanja Transfer sebesar Rp54.017.312.827,00. Proyeksi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 Anggaran sebesar Rp358.393.646.521,00. Penurunan ini di proyeksi diluar dari belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah dan Dana Desa karena menunggu regulasi dari pusat mengenai dana Trasfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9

Realisasi Tahun 2020, 2021, Outlook Tahun 2022, Target Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Belanja Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

	Real	isasi	Outlook Tahun	Target	Perkiraan Maju	
Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
BELANJA DAERAH						
BELANJA OPERASI	640.209.243.073,78	652.689.317.660,74	754.508.530.486,00	515.457.764.254,00	708.399.000.000,00	
Belanja Pegawai	400.999.071.757,00	377.620.500.334,00	458.514.486.727,00	395.878.802.727,00	544.474.000.000,00	
Belanja barang dan Jasa	184.305.139.250,40	261.134.521.515,74	276.085.762.517,00	109.578.961.527,00	105.459.000.000,00	
Belanja Bunga	_	_				
Belanja Subsidi	_	_				
Belanja Hibah	54.905.032.066,38	13.934.295.811,00	19.908.281.242,00	10.000.000.000,00	58.000.000.000,00	
Belanja Bantuan Sosial	_	_			466.000.000,00	
BELANJA MODAL	143.523.327.717,00	132.647.512.602,10	186.130.342.609,00	130.000.000.000,00	61.910.000.000,00	
Belanja Tanah	173.758.566,00	71.375.870,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	565.000.000,00	
Belanja Peralatan dan Mesin	36.664.688.760,00	42.675.998.325,01	49.578.192.632,00	42.000.000.000,00	19.692.000.000,00	
Belanja Bangunan dan Gedung	45.960.087.439,00	28.734.483.879,09	75.493.016.906,00	35.000.000.000,00	20.270.000.000,00	
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	54.640.594.725,00	56.766.111.256,00	52.007.614.690,00	45.948.481.619,00	21.302.000.000,00	
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.782.295.227,00	2.841.828.432,00	4.051.518.381,00	2.051.518.381,00	81.000.000,00	
Belanja Aset Lainnya	301.903.000,00	1.557.714.840,00	_			
BELANJA TAK TERDUGA	32.727.475.328,00	5.352.911.272,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
Belanja Tak Terduga	32.727.475.328,00	5.352.911.272,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
BELANJA TRANSFER	114.023.097.601,00	117.169.599.250,00	117.229.850.507,00	54.017.312.827,00	147.167.000.000,00	
Belanja Bagi Hasil	1.516.135.450,00	1.781.964.150,00	2.273.462.707,00	2.273.462.707,00	2.654.000.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan	112.506.962.151,00	115.387.635.100,00	114.956.387.800,00	51.743.850.120,00	144.513.000.000,00	
Jumlah Belanja	930.483.143.719.78	907.859.340.784.84	1.064.868.723.602,00	706.888.345.351	922.476.000.000.00	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo.

Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, Penerimaan Pinjaman Daerah yang bersumber dari pengembalian pokok pinjaman UKM serta Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman yang bersumber dari pengembalian dana talangan dari PDAM. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Pemberian Pinjaman Daerah yang digunakan untuk pengeluaran dana Bergulir UKM. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sijunjung juga diarahkan untuk memperkuat kondisi fiskal dan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui creative financing.

Sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2023 adalah:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebutuhan Daerah, dan jumlah yang akan disertakan disetiap Tahun Anggaran telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10
Realisasi Tahun 2020, 2021, Outlook Tahun 2022, Target Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Pembiayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2024

	Rea	lisasi	0.41.1	75	Perkiraan	
Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Outlook Tahun 2022	Target Tahun 2023	Maju Tahun 2024	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	95.600.695.172,36	105.990.823.567,46	77.030.222.921,00	53.000.000.000,00	73.019.000.000,00	
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	91.957.191.005,36	102.130.868.289,46	77.030.222.921,00	49.000.000.000,00	69.019.000.000,00	
Pencairan dana cadangan	_	_	_	_		
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-		
Penerimaan pinjaman daerah	754.504.167,00	859.955.278,00	-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
Penerimaan kembali penyertaan modal	2.889.000.000,00	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.750.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-		
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	4.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-		
Pemberian Pinjaman Daerah	750.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
Pembiayaan Netto	90.850.695.172,36	101.990.823.567,46	73.030.222.921,00	49.000.000.000,00	69.019.000.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	102.130.868.289,46	164.611.122.514,04	-	-	-	

Sumber: Badan keuangan dan Aset Daerah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan pembiayaan setiap tahun cenderung fluktuatif (tidak bisa dilihat tren nya apakah naik atau turun). Dapat tergambar bahwa penerimaan pembiayaan bersih setiap tahunnya dapat menutup defisit anggaran akibat dari lebih besarnya proyeksi belanja dibandingkan dengan proyeksi pendapatan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya;

- 1. Sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan Pemerintah
- 2. Hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan
- 3. Efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.

Kinerja pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan dibanding tahun 2020, tetapi mulai tahun 2021 sampai dengann 2023 cenderung tetap tidak mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2023 direncanakan Penyertaan Modal ke PDAM yang sifatnya hanya dana talangan dan akan dikembalikan lagi melalui penerimaan pembiayaan. Selain itu, direncanakan pemberian pinjaman daerah dalam rangka peningkatan kuantitas pemberian pinjaman pokok UKM kepada usaha kecil, menengah dan koperasi dalam upaya memperluas usaha akibat pandemi Covid-19.



BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah memperlihatkan fokus pembangunan yang harus didahulukan dan diutamakan daripada yang lain didasarkan pada tingkat urgensi aspek tersebut dalam pembangunan. Upaya untuk memprioritaskan salah satu aspek pembangunan disebabkan karena adanya keterbatasan sumberdaya dan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Ketepatan menentukan prioritas menjadi kunci penyelesaian permasalahan pembangunan dan peningkatan kinerja pemerintah yang pada gilirannya dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2023 merupakan sasaran dan prioritas pembangunan pada tahun rencana kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 juga memperhatikan:

- 1. Sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2023
- 2. Sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat
- 3. Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun 2022 sampai Triwulan II.
- 4. Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2023

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

- 1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional seperti terhadap NAWACITA, SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), program terkait pengentasan kemiskinan, stunting, pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- 2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- 3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- 4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Sasaran pembangunan

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada periode ke IV. Selain itu perumusan sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung memperhatikan tema, sasaran dan arah kebijakan pembangunan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

4.1.1. Tema, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional

Tema RKP Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dinamika pandemi Covid-19, dan isu strategis. Tema RKP Tahun 2023 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah tahun sebelumnya berbagai indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 terkontraksi 2,07 persen, pertama kali sejak krisis tahun 1998. Belajar dari pengalaman krisis di Indonesia tahun 1998, diperlukan upaya yang kuat dan konsisten untuk mengembalikan trajektori pertumbuhan ekonomi seperti sebelum krisis. Pertumbuhan potensial ekonomi Indonesia pasca Covid-19 diproyeksikan akan terus mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2045.

Penurunan produktivitas tersebut, harus segera diatasi melalui redesain transformasi ekonomi Indonesia. Urgensi redesain transformasi ekonomi Indonesia tidak hanya bertujuan untuk pulih dari krisis, namun juga meningkatkan trajektori pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah-panjang. Pascapandemi Covid-19, Indonesia harus tumbuh lebih tinggi dari rata- rata 5,7 persen menjadi 6,0 persen sampai dengan tahun 2045 untuk keluar dari MIT dan menjadi negara maju.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, artificial intelegence (AI) dan *big data*, disrupsi rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi *telework*. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau (*green recovery*).

Pada tahun 2022, pemerintah melalui kebijakan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural mendorong sisi permintaan dan sisi penawaran untuk memulihkan utilitas dan mengembalikan pertumbuhan potensial pada level sebelum pandemi. Selanjutnya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural tersebut akan menjadi landasan dalam mendorong proses transformasi ekonomi Indonesia pada tahun 2023, seperti terlihat pada infografis berikut ini.

Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai "Game Changer" untuk Menuju Indonesia Maju

| SDM berdaya saing:
| Sistem Kesehatan |
| Pendidikan (Sistem Pendidikan (Sistem Pendidikan (Sistem Pendidikan Karakter) |
| Produktivitas UMKM |
| Industrial |
| Produktivitas UMKM |
| Modernisasi Pertanian |
| Penguatan Industrial |
| Penguatan Pendidikan Pendidikan Karakter |
| Riset dan Inovasi |
| Ekonomi Hijau |
| Ekonomi Rendah Karbon |
| Blue Economy |
| Transformasi Digital |
| Penguatan Pendidikan Pendidikan

Gambar 4.1
Tarnsformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber: RKP Tahun 2023

Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learning loss, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda terhadap perekonomian dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Tanpa adanya intervensi kebijakan strategis, produktivitas dan daya saing Indonesia diperkirakan akan semakin menurun. Untuk mengejar gap pertumbuhan agar tetap

sejalan dengan target keluar dari *middle-income* trap maka transformasi ekonomi yang didorong melalui peningkatan produktivitas menjadi semakin penting.

pembangunan tahun 2023 menekankan Tema pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air dan sanitasi yang layak. Selanjutnya, arah pembangunan bersih berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan perubahan iklim. Hal tersebut dilaksanakan dalam koridor pengembangan wilayah dan desa.

Gambar 4.2 Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi yang Inklusif dan Bekelanjutan



Sumber: RKP Tahun 2023

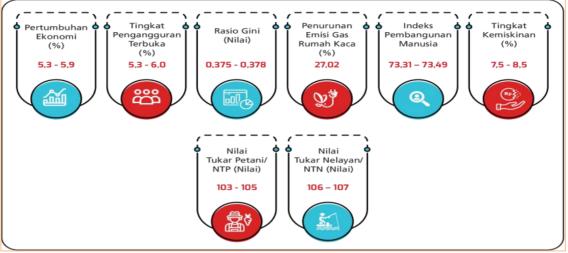
Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi serta bersifat lintas pelaku, sektor, wilayah, dan tingkat pemerintahan. Dengan demikian, tema pembangunan RKP Tahun 2023 menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dan badan usaha dalam rangka bersama-sama mendorong peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran pembangunan tahun 2023 adalah: (1) mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2)Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2023 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 ditunjukkan pada infografis berikut ini.

Gambar 4.3 Indikator Sasaran dan Target Nasional



Sumber: RKP Tahun 2023

4.1.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni: 1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan; 3) penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job; 4) mendorong pemulihan dunia usaha; 5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; 6). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim; 7). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tema dana arah kebijakan nasional ditunjukkan pada infografis berikut ini.

Tema dan Arah kebijakan Nasional Tema RKP Tahun 2023 Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Arah Kebijakan -1000 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job ikn Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi Pengembangan Ibu Kota Nusantara

Gambar 4.4.

Sumber: RKP Tahun 2023

Sebagai operasionalisasi dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada infografis di bawah ini.

Gambar 4.5 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional



Sumber: RKP Tahun 2023

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proposi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107
- 2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 pendudu
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%
 - d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun
 - g. Angka partisipasi kasar Pergurungan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.

- 3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%:
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
- 4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
- 5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan inustri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Konstribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar5,55-6,6,08%
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.
- 6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
- 7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m3/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
- 8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
- b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.

4.1.2. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

4.1.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu: "Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan"

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matrik tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan				
MISI	TUJUAN	SASARAN		
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Menurunnya prevalensi stunting Meningkatnya Kualitas Pendidikan Meningkatnya Daya Saing Masyarakat		
Misi 2: Meningkatkan Tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan sosial Budaya masyarakat yang berlandaskan ASB-SBK Meningkatnya Budaya Literasi Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
Misi 3: Meningkatkan Nilai tambah dan Produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan Meningkatnya pendapatan Petani Hutan Meningkatnya pendapatan Petani Hutan		
Misi 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor		

VISI Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Unggul dan Berkelanjutan				
MISI	TUJUAN	SASARAN		
Misi 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pertumbuhan investasi Meningkatnya peran ekonomi digital Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian		
Misi 6: Meningkatkan pengembangan infrastruktur yang berkeadilan berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Sumatera Barat Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegasi Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan		
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Terwujudnya kualitas tata Kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel Meningkatnya kapabilitas birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik		

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Tujuan dan sasaran Misi Pertama, "Mewujudkan SDM Berakhlak Mulia Sehat, Unggul dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dari aspek Pendidikan dan Kesehatan yang tetap mengkedepankan karaktek berakhlak mulia sebagai perwujudan karakter yang madani, serta memiliki keterampilan untuk mampu berdaya saing serta tanggu dan memiliki nilai kompetisi yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Misi Kedua, "Mewujudkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Sebagai falsafah Kehidupan Masyarakat" terkait dengan isu strategis Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Adat ditengah-tengah masyarakat yang diwujudkan dengan sikap toleransi, saling menghormati, patuh terhadap norma-norma agama, adat dan hukum positif, serta karakter masyarakat yang santun dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan, selain itu isu strategis dalam tujuan ini adalah terkait dengan pemajuan kebudayaan sebagai wujud implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tujuan dan sasaran Misi Ketiga, "Mewujudkan Kesejahteraan Petani" terkait dengan isu meningkatkan pendapatan petani yang berada di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan melalui peniningkatan nilai tambah terhadap produk pertanian serta pengembangan terhadap hilirasi pertanian secara terpadu dan berkualitas.

Tujuan dan sasaran Misi Keempat, "Mewujudkan Perdagangan dan Industri Kecil/Menengah serta Ekonomi Digital yang Tangguh dan Berdaya Saing" terkait dengan isu strategis menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat UMKM dan industri kecil dan menengah yang kedepan menjadi penggerak perekonomian Sumatera Barat yang tahan terhadap goncangan ekonomi serta mampu bersaing ditingkat global.

Tujuan dan sasaran Misi Kelima, "Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Terhadap Perekonomian Sumatera Barat" terkait dengan isu strategis menjadikan pariwisata sebagai etalase Sumatera Barat yang efektif sebagai sektor yang memberikan efek positif pada semua sektor untuk menstimulus pergerakan dan laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

Tujuan dan sasaran Misi Keenam, "Terwujudnya Infrastruktur yang Handal dan Merata" terkait dengan isu strategis dukungan infrastruktur yang berkualitas dalam mendukung layanan dasar kepada masyarakat dan penggerak ekonomi daerah, membangun ketanahan bencana serta kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan yang dapat dipertanggungjawab kepada generasi selanjutnya.

Tujuan dan sasaran Misi Ketujuh, "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" terkait dengan isu strategis Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, efektif, efesien, akuntabel dan transparan yang diwujudkan dengan implementasi reformasi birokrasi yang maksimal pada semua aspek dan bidang penyelenggaran pemerintahan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemic Covid-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami konstraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahanan kepada sektor dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat: "Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Daerah Menuju Transformasi Ekonomi"

Peningkatan produktivitas melalui sektor strategis daerah ini diarahkan kepada sektor pertanian (lima sub sektor pertanian), industri pengolahan (Perdagangan, UMKM dan Industri Kecil Menengah), dan akomodasi makan-minum (pariwisata). Pertimbangan yang mendasari adalah karena peningkatan produktivitas sektor strategis di Tahun 2021 lalu, yakni 1). 1. Sektor Pertanian tumbuh 5,86 persen; 2). Sektor Industri pengolahan tumbuh 12,46 persen; 3) Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 5,80 persen.

Ketiga sektor ini termasuk 5 (lima) besar lapangan usaha yang peningkatan produktivitasnya tertinggi tahun 2021 lalu, dibawah sektor pertambangan dan pengagalian serta sektor jasa lainnya. Secara keseluruhan, produktivitas total di sumbar meningkat 4,45 persen dari 93,74 juta menjadi 97,91 juta.

Selanjutnya ketiga sektor strategis dimaksud juga merupakan sektor unggulan yang didukung dengan berbagai program unggulan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dan sangat perlu dijaga peningkatan momentum produktivitasnya, sehingga diharapkan peningkatan produktivitas sektor strategis ini berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor tersebut.

Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi Covid-19 yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar

kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tabel berikut. Sehingga dengan demikian prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2023 akan lebih difokuskan pada ketiga sektor diatas dengan tetap tidak mengabaikan upaya pencegahan, pengendalian serta penanganan akibat pandemi covid yang tidak akan bisa diprediksi kapan akan berakhir, serta dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka target indikator sasaran pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Indikator Sasaran Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023

	- 4-8-14							
No	Indikator Makro Pembangunan	Targe	et 2023					
МО	indikator makro rembangunan	RPJMD	RKPD					
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,57	4,65					
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	32,97	33,58					
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	50,60	48,86					
4	Tingkat Pengangguran terbuka PT (%)	6,45	5,72					
5	IPM	73,23	73,46					
	-Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,98	69,97					
	-Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,06	14,43					
	-Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,28	9,25					
	-Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.108	10.997					
6	Kemiskinan (%)	6,16	6,34					
7	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	353,68	306,71					
8	Gini Rasio	0,296	0,296					
9	Indeks Williamson	0,309	0,213					

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

4.1.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

1. Bidang Ekonomi

Berdasarkan tema RPKD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang menekankan pada peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis menuju transformasi struktural, kebijakan pembangunan ekonomi menyasar pada sektor ekonomi strategis sesuai dengan program unggulan Kepala dan Wakil Kepala Daerah, yaitu pertanian, wirausaha dan usaha kecil menengah, serta pariwisata.

Proses pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Angka kemiskinan yang sempat meningkat dari 6,29 persen di tahun 2019 menjadi 6,56 persen di tahun 2020 berhasil ditekan ke angka 6,04persen di tahun 2021. Pencapaian ini lebih baik dari angka sebelum pandemi Covid-19 di 2019. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berfokus pada penurunan angka kemiskinan melalui pengembangan sektor pertanian yang terpadu serta penurunan angka pengangguran dengan penciptaan wirausahawan baru di berbagai sektor ekonomi khususnya di perkotaan dengan upaya pembinaan dan kemudahan akses keuangan untuk menurunkan angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sementara itu secara umum sektor pariwisata khususnya wisata kuliner diharapkan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sektor-sektor lainnya di seluruh wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan kebijakan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1. Kabupaten-kabupaten diharapkan mampu meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan resistensinya terhadap pandemi Covis-19. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pertanian baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis pertanian secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengimplementasikan skema *corporate farming* bisa menjadi pilihan yang pada prinsipnya hampir sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD) yang tidak begitu terlihat lagi perannya. Bentuk lain yang mungkin jadi pilihan adalah penguatan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai motor bagi masyarakat petani untuk meningkatkan posisi tawar di pasar pangan yang didominasi oleh tengkulak.
 - b. Perlunya implementasi pertanian organik pada kawasan sentra pertanian dan pemanfaatan hasil pertanian organik.
 - c. Gerakan untuk mengajak generasi muda untuk bertani bisa juga menjadi pillihan lain dengan fakta adanya bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak berusia muda dengan median age 31 tahun.
 - d. Sektor pariwisata di perdesaan juga bisa berkembang dengan mengawinkan kegiatan bertani dengan pengalaman wisata melalui pengembangan desa wisata di berbagai tempat. Selain itu pemanfaatan kawasan hutan produksi dengan mekanisme perhutanan sosial dapat juga menjadi alternatif skema *ecowisata* di kawasan perhutanan sosial.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

- 2. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor industri dan perdagangan. Diperlukan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor industri dan perdagangan baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Peningkatan standar mutu komoditas potensial dan diversifikasi komoditas perdagangan terutama komoditas ekspor. Hal ini perlu ditunjang dengan perluasan implementasi digitalisasi perdagangan melalui penataan, pembinaan, dan pengembangan pasar digital.
 - b. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana untuk sentra IKM serta penguatan SDM bagi pelaku IKM dan UMKM pada komoditas potensial. Hal ini perlu ditunjang oleh fasilitasi kemudahan investasi bagi investor lokal, nasional, maupun investor luar negeri.
 - c. Penumbuhan wirausaha terutama wirausaha muda dan woman enterpreneur untuk dapat membuka lapangan usaha di komoditas potensial di sektor-sektor strategis.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Sijunjung, Solok, Tanah Datar,

- Agam, Pasaman, Dharmasraya, Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.
- 3. Kabupaten/Kota diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pariwisata dengan terobosan-terobosan dan inovasi baru dalam meningkatkan nilai tambah produk di sektor pariwisata baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari sisi teknis secara luas. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Membangun dan mengembangan industri pariwisata halal dengan peningkatan kualitas destinasi yang memenuhi aspek amenitas, aksesibilitas, dan atraksi dengan penekanan pada manajemen pengelolaan destinasi yang bertumpu pada komunitas seperti desa wisata.
 - b. Meningkatkan kompetensi SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif.
 - c. Meningkatkan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan pemanfaatan teknologi Informasi serta memperkuat kemitraan Hexahelix.

Beberapa kebijakan di atas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan semua daerah yang relatif berada di bawah rata-rata provinsi.

4. Bidang Kesehatan

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai di bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan pelayanan kesehatan. Adapun arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pengendalian penyakit; pembudayaan pencegahan dan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

Pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dengan tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", salah satu arah kebijakan nasional adalah "Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan", dimana bidang kesehatan ditekankan pada Sistem Kesehatan dengan indikator terkait prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5persen, Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk.dan Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71 persen. Untuk Tahun 2023 terdapat dukungan *major project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional.

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah didentifikasi isu terkait pada bidang kesehatan diantaranya adalah pandemi Covid-19 yang belum mereda , peningkatan akses kepada layanan dasar dan pemerataan layanan kesehatan, relatif rendahnya usia harapan hidup penduduk Sumatera Barat, dan pentingnya pendekatan preventif melalui pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan lingkungan yang belum sepenuhnya diterapkan masyarakat. Yang tak kalah pentingnya

adalah permasalahan gizi juga berdampak terhadap kualitas Sumber Daya Manusia, yaitu masih tingginya prevalensi anak balita pendek (*Stunting*).

Kebijakan pembangunan bidang kesehatan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, difokuskan pada upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan antara lain:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
- 2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing.
- 3. Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan SDM kesehatan
- 4. Penurunan angka prevalansi stunting dan pelaksanaan aksi konvergensi.
- 5. Penguatan layanan kesehatan ibu dan anak.
- 6. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif melalui GERMAS.
- 8. Penanganan pandemi COVID-19 melalui strategi preventif dan promotif dan pelaksanaan vaksinasi menyeluruh.

Arah kebijakan yang diambil untuk melaksanakan prioritas ini ditujukan untuk meningkatkan IPM kabupaten yang capaian indeks kesehatannya masih rendah, khususnya diarahkan bagi kabupaten/kota yang memiliki Angka Harapan Hidup (UHH) yang masih dibawah rata-rata Provinsi yakni di bawah 69,59 tahun, yaitu: Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat. Kabupaten tersebut menjadi prioritas dilakukannya peningkatan kualitas layanan kesehatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan partisipasi masyarakat akan kesehatan.

Sementara itu, bagi daerah yang sudah AHH yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang menyeluruh dan berdaya saing melalyi penyedian sarana, prasarana dan SDM pendukung, juga memastikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada penanganan pandemi yang masih berlangsug. Secara umum, poin arah kebijakan kesehatan sebagaimana tersebut diatas perlu menjadi perhatian bersama seluruh Kabupaten/Kota.

Khusus terkait percepatan penanganan stunting sangat perlu diprioritaskan seluruh daerah, karena seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah menjadi daerah lokus stunting Tahun 2022 ini. Prevalansi stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan manusia. Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien. Upaya penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Terdapat lima pilar penanganan stunting, yakni komitmen politik, kampanye dan edukasi, konvergensi program, akses pangan bergizi, dan monitoring program. Percepatan penurunan stunting perlu diupayakan dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, sehingga target nasional Tahun 2024 sebesar 14 persen diharapkan bisa dicapai bersama juga di tingkat daerah di Sumatera Barat.

5. Bidang Pendidikan

Kebijakan nasional terkait pembangunan bidang pendidikan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tercantum dalam arahan tentang pembangunan SDM, dengan salah satu prioritas pembangunannya adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun arah kebijakan nasional dalam mendukung prioritas dimaksud adalah dengan meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", salah satu arah kebijakan nasional adalah "Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan dan Pendidikan, pendidikan ditekankan pada Sistem Pendidikan dan Karakter, dengan dukungan major project terkait Reformasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0).

Selanjutnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah didentifikasi isu terkait dimana peningkatan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang yang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah di Sumatera Barat. Selain itu, adopsi kebijakan merdeka belajar juga menjadi penting untuk menghadirkan pendidikan bermutu tinggi, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata. Dimana Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat. Kemudian, penting diperhatikan terkait meningkatnya kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan di daerah .

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023, difokuskan pada upaya untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan arah kebijakan antara lain:

- 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
- 2. Pemerataan akses pendidikan bagi semua baik secara geografis maupun status sosial ekonomi.
- 3. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran melalui adopsi kebijakan merdeka belajar yang berpihak pada kebutuhan anak/siswa.
- 4. Pembangunan sarana prasarana pendukung pendidikan yang diarahkan untuk mendukung pembelajaran pasca pandemi, seperti sanitasi yang layak di sekolah, dukungan akses teknologi informasi yang memadai, dan lainnya.
- 5. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pendistribusian tenaga pendidik di semua daerah.
- 6. Pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah, dan relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja.
- 7. Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan peningkatan literasi masyarakat.

Arah kebijakan tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan IPM kabupaten/kota yang capaian komponen pendidikannya masih rendah di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Data BPS Tahun 2021 diketahui seluruh Kabupaten di Sumatera Barat masih memiliki capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dibawah 9 (Sembilan) tahun dan dibawah rata-rata Provinsi di angka 9,07 Tahun, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok

Selatan, Kabuaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, pembangunan juga diprioritaskan untuk seluruh kabupaten di Sumatera Barat yang juga memiliki capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di bawah rata-rata provinsi 14.09 Tahun. Kabupaten tersebut menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas dan layanan pendidikan terutama dalam membangun ruang kelas baru, peningkatan akses dan jangkauan pendidikan, serta penyediaan tenaga pendidikan secara kuantitas dan kualitas. Sementara itu bagi daerah yang sudah memiliki RLS dan HLS yang relatif baik terus didorong untuk meningkatkan daya saing melalui pelayanan pendidikan secara efisien dan merata. Adopsi kebijakan merdeka belajar dan pengembangan pendidikan karakter juga harus terus didorong dalam proses peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di ruang kelas.

Selanjutnya, daerah dengan TPT yang masih tinggi, khususnya dengan jumlah pengganguran terbuka tamatan SMK yang cukup besar yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu didorong untuk terus melakukan penguatan pendidikan vokasi melalui upaya kerjasama dan kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia industri yang bisa meningkatkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

6. Kebijakan Pemerataan Wilayah

Salah satu Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2020-2024 adalah "Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan". Prioritas ini dapat diukur salah satunya dengan Indeks Williamson. Kondisi pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memperlebar ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Indeks Williamson yang pada tahun 2019 menunjukkan angka 0,274 naik tajam menjadi 0,315 di tahun 2021. Kota Padang menjadi daerah yang dominan dalam menyumbang ketimpangan Sumatera Barat, naik dari 45,42 persen pada tahun 2010 menjadi 53,23 persen pada tahun 2021. Nilai PDRB per kapita Kota Padang yang jauh di atas rata-rata provinsi membuat tingkat ketimpangan wilayah di Sumatera Barat meningkat tajam. Di sisi lain Kabupaten Pesisir Selatan sebagai wilayah penyangga Kota Padang justru memiliki nilai PDRB per kapita yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Hal ini juga berkontribusi terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik berikut.

di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2021 100% Kota Bukittinggi, Kota Bukittinggi, 2021, 8.75% 90%10, 7.96 80% 70% Kota Padang, 60%, 45.42% Kota Padang, 2021, 53.23% 30% 20% Kappesisir Selatan 2010, 17.00% Kab. Pesisir Selatan 2016, 15.73% 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 4.6
Perkembangan Ketimpangan Pendapatan Wilayah di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2010-2021

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023

Ketimpangan pendapatan secara wilayah ini perlu disandingkan dengan hasil pencapaian kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota tahun 2021. Kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kabupaten/kota pada tahun 2021 terlihat pada gambar diatas dimana warna hijau menunjukan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif tinggi dan sebaliknya warna merah menunjukkan daerah dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan relatif rendah.

Kawasan perkotaan mengalami tekanan terbesar akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 s.d. 2021 sebaliknya kawasan perdesaan relatif tidak terdampak besar. Beberapa daerah seperti Kab. Kep. Mentawai, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Pasaman, dan Kab. Solok Selatan menunjukkan kinerja pembangunan yang relatif lebih baik selama pandemi tahun 2021 yang lalu. Intervensi yang tepat terutama untuk sektor ekonomi yang bertahan dan tumbuh tinggi di masa pandemi tahun 2021 perlu dipertahankan.

Di sisi lain daerah perkotaan dan hinterland-nya seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, dan Kab. Agam memiliki kinerja yang relatif kurang baik selama pandemi tahun 2021. Faktor utama penyebab hal ini adalah peningkatan jumlah pengangguran selama pandemi tahun 2020 belum mampu untuk dikembalikan ke angka sebelum pandemi di tahun 2021 lalu. Untuk itu kelima daerah tersebut perlu mendapat perhatian khusus dalam rangka pemulihan ekonomi dan transformasi struktural sebagaimana tema RKP 2023 terutama untuk program-program yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kerja untuk pengurangan angka pengangguran.

Penurunan kesenjangan antarwilayah salah satunya dapat diatasi dengan memberikan stimulus penggerak ekonomi daerah melalui pembangunan jalan yang meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah ke pusat-pusat kegiatan lokal maupun wilayah. Secara teoritis semakin tinggi aksesibilitas suatu wilayah, maka semakin tinggi kecenderungan aktivitas ekonomi untuk bergerak di sepanjang koridor jalan yang dibangun. Hal ini juga cenderung akan merubah pola penggunaan lahan disepanjang jaringan jalan yang dibangun.

Beberapa ruas jalan yang perlu didorong pembangunannya untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dan pemerataan pembangunan wilayah adalah:

- 1. Ruas jalan Pasar Baru (Kab. Pesisir Selatan) Alahan Panjang (Kab. Solok) Kiliran Jao (Kab. Sijunjung)
- 2. Ruas jalan Abai Sangir (Kab. Solok Selatan) Sungai Dareh (Kab. Dharmasraya)
- 3. Ruas jalan Padang Koto Gadang Palembayan Palupuh (Kab. Agam)
- 4. Ruas jalan Bungo Tanjung Teluk Tapang (Kab. Pasaman Barat)
- 5. Ruas jalan Lubuk Sikaping Talu (Kab. Pasaman)
- 6. Ruas jalan Rao (Kab. Pasaman) Rokan (Prov. Riau)
- 7. Ruas jalan Pangkalan Koto Baru Sialang Gelugur (Kab. Lima Puluh Kota)
- 8. Ruas jalan Simp. SP II Kantor Camat (Kab. Kep. Mentawai)

7. Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan dengan Provinsi

Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara, dengan Provinsi Riau dan Jambi di sebelah timur, dengan Provinsi Bengkulu sebelah Selatan, dan dengan Samudera Hindia di sebelah barat. Kondisi wilayah perbatasan relatif tertinggal dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini terjadi karena wilayah perbatasan mempunyai keterbatasan aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur pendidikan, kesehatan, komunikasi dan transportasi, pasar, serta energi. Persoalan selanjutnya adalah lokasi permukiman yang menyebar sehingga sulit menyediakan sarana dan prasarana secara efektif. Jumlah kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Kecamatan di Kawasan
Perbatasan dengan Provinsi Tetangga

	rerbatasan dengan Frovinsi Tetangga			
No.	Provinsi Berbatasan	Kabupaten	Jumlah Kecam atan	Jumlah Kecamatan
1	Sumatera	Pasaman Barat	4	Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung
	Utara			Tuleh dan Lembah Malintang
		Pasaman	4	Duo Koto, Rao Utara, Rao, Mapat Tunggul
2	Riau	Pasaman	2	Mapat Tunggul, Mapat Tunggul Selatan
		Lima Puluh Kota	4	Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, Harau, Lareh
		Lillia i ululi Kota		Sago Halaban
		Sijunjung	3	Sijunjung, Kamang Baru, Sumpur Kudus
		Dharmasraya	2	Sitiung dan Koto Baru
3	Jambi	Dharmasraya	2	Koto Baru, Sungai Rumbai
		Solok Selatan	2	Sangir Jujuhan dan Sangir
		Pesisir Selatan	3	Pancung Soal, basa IV Balai Tapan dan Lunang
				Silaut
4	Bengkulu	Pesisir Selatan	1	Lunang Silaut

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Arah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan sebagai berikut:

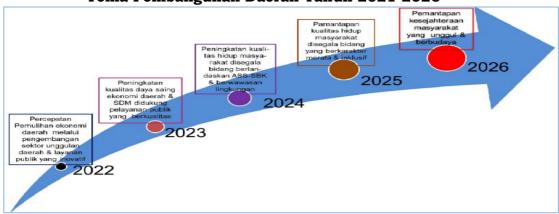
- 1. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum meliputi transportasi, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur perekonomian.
- 2. Pengembangan dan penyelamatan ekosistem, kesepakatan antar wilayah hulu, hilir, provinsi, dan pusat dalam rangka menjaga kelestarian alam dan antisipasi terhadap bencana.
- 3. Pengembangan potensi ekonomi berupa sumberdaya alam, wisata dan sumber ekonomi lainnya dilakukan dengan pola meningkatkan kerjasama antar provinsi maupun antar kabupaten tetangga.
- 4. Pengembangan sosial budaya, pertalian sosial budaya masyarakat di wilayah perbatasan biasanya mempunyai keterkaitan persaudaraan, kekerabatan karena interaksi masyarakat antar wilayah perbatasan sudah lama terjadi.
- 5. Peningkatan sumberdaya manusia dan regulasi mendukung pengembangan daerah perbatasan.

4.1.3. Tema, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sijunjung

4.1.3.1. Tema Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Penyusunan tema pembangunan RKPD Tahun 2023 mengacu pada tema pembangunan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026, arahan Bupati Sijunjung tentang tema, agenda dan program unggulan daerah tahun 2023, mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai triwulan II, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dinamika pandemi COVID-19, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Tema pembangunan tahununan sesuai RPJMD Kabuapten Sijunjung Tahun 2021-2026 sebagai berikut.

Gambar 4.7 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026



Sumber: RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026

Disamping itu, penyusunan tema Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, juga memperhatikan keselarasan tema RKP tahun 2023 dan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", sementara Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah: "*Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi*". Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan Tema RKPD Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4

Keselarasan Tema RKP, RKPD Provinsi Sumatera Barat dengan Tema
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

Tema Pembangunan Tahun 2023						
Tema RKP	Tema RKPD Provinsi	Tema RKPD Kabupaten Sijunjung				
	Sumatera Barat					
Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Kualitas Daya Saing				
untuk Transformasi	Sektor Strategis Menuju	Ekonomi Daerah dan Sumber Daya				
Ekonomi yang Inklusif dan	Transformasi Ekonomi	Manusia (SDM) didukung Pelayanan				
Berkelanjutan		Publik yang Berkualitas				

Tema RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 adalah *Peningkatan Kualitas Daya Saing Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas*, dengan arah kebijakan fokus pada 4 (empat) agenda dan 17 (tujuh belas) program unggulan daerah, seperti terlihat pada infografis berikut.

Gambar 4.8. Tema, Agenda Program Unggulan Daerah Tahun 2023



4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2023 merupakan pelaksanan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. RPJMD Tahun 2021-2026 adalah fase keempat dari tahapan RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025. Pada fase keempat ini Kabupaten Sijunjung diharapkan telah mencapai "Perwujudan Masyarakat Sijunjung yang Madani Dengan Mengedepankan Terbangunnya Sistem Ekonomi yang Kompetitif dan Berkeunggulan. Untuk mewujudkan masyarakat Sijunjung yang Madani dengan mengedepankan terbangunnya sistem ekonomi yang kompetitif dan berkeunggulan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026. Untuk itu, penyusunan tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2023 mengacu pada Visi RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 yaitu: "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani" yang dirumuskan ke dalam 4 (empat) misi, 7 (tujuh) Tujuan, 15 (lima belas) sasaran yang diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.5 Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung

75	m •	
Misi	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsif berbasis reformasi birokrasi	Meningkatkan kua-litas tata kelola pe-merintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien akuntabel dan profesional Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas
Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan	Meningkatkan per- tumbuhanekonomi berbasis pengemba-ngan sektor unggu-lan daerah	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan perindustrian serta realisasi investasi
ekonomi kerakyatan 2. Mengentaskan ma- dan pariwisata syarakat darikemis-kina		Meningkatnya pendapatan masyarakat Menurunnya pengangguran Meningkatnya kualitas pember-dayaan dan jaminan sosial masyarakat
3. Meningkatkan kualitasSDM yang cerdas, sehatdan produktif berbasis teknologi dalam tatanan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulah	Terwujudnyasumber daya manusia yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan berbasis karakter dan teknologi informasi Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Menurunya prevelansi stunting Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda
(ABS-SBK)	2. Terwujudnya nilai-nilai sosialbudaya masyarakat berlan- daskan ABS-SBK	Meningkatnya kualitas nilal-nilai sosial budaya masyarakat berbasis kearifan lokal
4. Meningkatkan kualitasin-frastruktur dan pra-sarana dasar sertapemanfaatan sumber daya alam	Terwujudnya infra- struktur dan prasa-na dasar yang berkualitas dan merata	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar
berwawasan lingkungan	2.Terwujudnya ling-kungan hidupyang berkualitas	Meningkatnya pemanfaata sumber daya alam berwawasanlingkungan Meningkatnya kualitas mitigasi bencana

 $Sumber: RPJMD\ Kab.\ Sijunjung\ Tahun\ 2021-2026$

Disamping penetuan tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan perlu dirumuskan untuk pedoman bagi stakholder dalam penentuan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam mencapai target sasaran pembangunan. Perumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten didasarkan pada visi dan misi RPJMD Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin timbul selama pelaksanaan program prioritas pembangunan. Disamping itu perumusan kebijakan pembangunan kabupaten Sjunjung juga mempertimbangkan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yaitu kebijakan tentang bidang ekonomi,

kesehatan, pendidikan, pemetaan wilayah dan kebijakan pengembangan Wilayah. Arah kebijakan pembangunan kabupten Sijunjung sesuai sasaran pembangunan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

	Kabupatén Sijunjung Tanun 2023		
No	Sasaran		Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional	1.	Penetapan dan harmonisasi produk hukum daerah sesuai kebutuhan daerah
		2.	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah yang efektif, profesional dan akuntabel
		3.	Peningkatan kuantitas Pendapatan Asli Daerah yang efektif dan berkelanjutan
		4.	Peningkatan kualitas dokumen erencanaan pembangunan dengan memanfatkan hasil penelitian dan pengembangan secara efektif dan berkelanjutan
		5.	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan evaluasi SAKIP secara efektif dan akuntabell
		6.	Penerapan SPBE yang terintegrasi
		7.	Peningkatan kualitas arsip daerah dan informasi pemerintahan yang efektif
		8.	Peningkatan kuantitas perkantoran yang representatif
		9.	Peningkatan kualitas Pemerintahan Nagari yang efektif, akuntabel dan transparan
		10.	Peningkatan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berbasis teknologiinformasi
		11.	Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan dan programpemerintahan daerah
		12.	Peningkatan kualitas ASN berdasarkan road map penerapan sistem merit
		13.	Penerapan sistem merit secara efektif dan berkesinambungan
		14.	Pembinaan aparatur berbasis reward dan punishment secara proporsional
		15.	Peningkatan kualitas kinerja ASN secara efektif dan profesional.
		16.	Peningkatan kualitas pencegahan dini potensi konflik dan penegakan supremasi hukum secara efektif
		17.	Peningkatan kualitas kerjasama pemerintah dengan stakeholders yang lebih efektif dan berkesinambunngan
2.	layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas	1.	Penetapan dan penerapan kebijakan pelayanan publik secara efektif dan efisien
		2.	Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi
		3.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana layanan publik
		4.	Penyediaan sistem informasi, pengaduan dan konsultasi pelayanan publik yang responsif
		5.	Penerapan survei kepuasan masyarakat secara mandiri
		6.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan riset dan ekosistem inovasi
		7.	Penerapan zona integritas setiap unit layanan publik secara efektif dan berkesinambungan

No	Sasaran		Arah Kebijakan
3.	Meningkatnya kontribusi	1.	Peningkatan kapasitas petani dan penyuluh berbasis
	PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan		tekonologi
	perindustrian serta realisasi investasi	2.	Penyediaan dana stimulan dalam upaya pengembangan budidaya pertanian/perikanan berbasis teknologi
		3.	Pengembangan bibit unggul pertanian/perikanan secara efektif
		4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pertanian/perikanan secara efektif dan partisipatif
		5.	Peningkatan akses permodalan, kapasitas dan pengembangan usaha UMKM berbasis digital
		6.	Peningkatan kualitas industri rumah tangga, industri kecil dan menengah berdaya saing tinggi
		7.	Revitalisasi pasar Nagari/serikat menuju pasar tradisional modern
		8.	Pengembangan deliniasi dan destinasi kawasan Geopark Ranah Minang Silokek (GRMS)
		9.	Pengembangan destinasi wisata berbasis pertanian
		10.	Peningkatan kualitas pemasaran pariwisata berbasis digitalisasi
		11.	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaku wisata secara efektif
		12.	Peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan
		13.	Peningkatan kualitas kemudahan berinvestasi secara efektif dan efisien
		14.	Pemberian insentif perizinan industrialisasi perkebunan (agroindustri)
		15.	Penataan kepemilikan lahan dan batas wilayah
			Peningkatan kualitas ketertiban umum secara efektif dan partisipatif
4.	Meningkatnya pendapatan ma-syarakat	1.	Peningkatan kualitas nilai tambah produk pertanian/perikanan berdaya saing (agribisnis)
		2.	Pengembangan produk unggulan di setiap nagari berbasis kearifan lokal
		3.	Peningkatan kualitas produk industri rumah tangga, industri kecil dan menengah yang berdaya saing
		4.	Pembinaan koperasi dan BUMNag secara partisipatif
		5.	Perluasan akses pemasaran produk unggulan daerah berbasis digitalisasi
	Marrows	6.	Perluasan usaha BUMD dalam memasarkan produk unggulan daerah (badan penyangga)
5.	Menurunnya pengangguran	1.	Peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja dan calon tenaga kerja
		2.	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri
		3.	Perluasan akses kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil
		4.	Peningkatan kualitas pemanfaatan tenaga masyarakat dalam pembangunan infrastuktur dan prasarana dasar
		5.	Pemanfaatan lahan produktif secara partisipatif
6.	Meningkatnya kualitas pember-dayaan dan jaminan sosial masyarakat		Optimalisasi pemberdayaan masyarakat nagari/desa yang inklusif dan merata
	əvəlat illaəyatakat	2.	Peningkatan kualitas pembangunan ekonomi masyarakat nagari/desa secara partisipatif

No	Sasaran		Arah Kebijakan
		3.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Nagari/Desa secara efektif dan efisien berbasis kearifan lokal
		4.	Peningkatan kuantitas Nagari/Desa yang mandiri secara berkesinambungan
		5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama rantau secara berkelanjutan
		6.	Penyediaan Data Terpadu Kesejah teraan Sosial secara berkelanjutan
		7.	Peningkatan kuantitas jaminan sosial ekonomi masyarakat miskin
		8.	Peningkatan kuantitas dan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar PPKS
		9.	Perluasan jangkauan cakupan pengentasan PPKS berlandaskan skala prioritas
		10.	Peningkatan cakupan bantuan dan kualitas penanganan PPKS
		11.	Peningkatan rumah layak huni secara partisipatif
7.	Meningkatnya kualitas pendidi-kan berbasis	1.	Peningkatan akses, kualitas dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
	karakter dan teknologi informasi	2.	Peningkatan kualitas guru melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis teknologi
		3.	Penguatan pendidikan karakter melalui program tahfiz seluruh jenjang pendidikan dan program boarding school jenjang pendidikan SLTP
		4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas PKBM secara partisipatif
		5.	Peningkatan kuantitas bea siswa bagi siswa/mahasiswa kurang mampu dan berprestasi
		6.	Peningkatan kualitas layanan pendidikan SLTA secara gratis
		7.	Fasilitasi peningkatan status Perguruan tinggi swasta
8.	Meningkatnya derajat	1.	Revitalisasi sarana prasarana dan tenaga kesehatan
	Kesehatan masyarakat	2.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan secara mudah dan cepat
		3.	Peningkatan kualitas perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat secara partisipatif
		4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas jaminan kesehatan terhadap masyarakat
		5.	Peningkatan kualitas upaya deteksi dini terhadap pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		6.	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi
		7.	Peningkatan kuantitas dan kualitas program Kampung KB
		8.	Peningkatan kualitas pembangunan keluarga yang produktif secara partisipatif
		9.	Peningkatan kualitas budaya masyarakat dalam berolahraga secara partisipatif
		10.	Peningkatan kuallitas prestasi olahraga unggulam daerah
9.	Menurunnya prevelansi stunting	1.	Membangun sistem manajemen data pencegahandan penangganan stunting
		2.	Percepatan perbaikan gizi terutama pada kelompok anak di seribu hari pertama kehidupan
		3.	Pemberian gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yakni Ibu

No	Sasaran		Arah Kebijakan
		4.	hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan secara efektif dan berkesinambungan
		5.	Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran penting yakni Remaja putri dan wanita usia
		6.	subur, dan Anak berusia 24-59 bulan secara efektif dan berkesinambungan
		7.	Pemberian gizi sensitif yang ditujukan pada kelompok u mum yakni keluarga dan masyarakatumum bulan secara efektif dan berkesinambungan
		8.	Penerapan kebijakan daerah terkait upaya penanggulangan stunting secara efektif dan integratif
		9.	Peningkatan kualitas perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta mendorong perubahan perilaku untuk mencegah stunting lebih itensif dan berkelanjutan
		10.	Penciptaan aksi konvergensi untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas secara konvergen dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat
		11.	Peningkatan ketersediaan, distribusi , konsumsi dan keamanan pangan
		12.	Peningkatan kualitas pangan yang layak konsumsi bagi masyarakat
10.	Meningkatkan kualitas perem-puan dan pemuda	1.	Peningkatan kualitas pembangunan gender berbasis inklusif
		2.	Peningkatan internalisasi pembangunan gender antar sektor
		3.	Peningkatan kualitas perlindungan anak secara efektif dan berkeadilan
		4.	Penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan
		5.	Penciptaan pemuda produktif dan kreatif yang berwawasan wirausaha
11.	Meningkatnya kualitas nilal- nilai sosial budaya masyarakat berbasis		Peningkatan kualitas pengarustamaan gender berbasis pengetahuan tradisional (localknowledge)
	kearifan lokal	2.	Perluasan akses gender berpastispasi dalam pembangunan kebudayaan
		3.	Peningkatan kualitas gender dalam pengambilan kebijakan pembangunan sosial, ekonomi politik
		4.	Perluasan akses masyarakat memperoleh kesempatan membaca
		5.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan berbasis digital
		6.	Peningkatan kualitas pembinaan seni budaya masyarakat secara efektif dan partisipatif
		7.	Peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan even seni budaya masyarakat
		8.	Peningkatan kualitas pemeiliharaan benda cagar budaya
		9.	Pengembangan kawasan perkampungan adat menjadi warisan budaya dunia
		10.	Revitalisasi sarana dan prasarana adat, budaya dan agama dalam rangka peningkatan kualitaspenerapan ABS-SBK
		11.	Peningkatan kualitas pembinaan kelembagaan
			agama dan adat secara efektif dan partisipatif

No	Sasaran		Arah Kebijakan
		12.	Peningkatan kualitas pembinaan TPQ dan TPSQ untuk menciptakan hafiz Al Qur"an
		13.	Peningkatan kuantitas perlombaan tentang adat bagi generasi muda
		14.	Fasilitasi tokoh agama dan adat dalam penerapan ABS-SBK
12.	Meningkatnya kuantitas dan	1.	Penetapan RDTR kawasan strategis daerah
	kualitas infrastruktur wilayah		Peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi baik
		3.	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana dalam rangka pengembangan kawasan unggulan daerah dan ibukota kabupaten
		4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana jalan
		5.	Pemetaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan strategis daerah per- batasan, provinsi dan nasional
		6.	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis di kawasan perbatasan
		7.	Peningkatan kuantitas jaringan komunikasi dan energi listrik yang terjangkau keseluruh wilayah
13.	 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar 		Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi secara efektif dan merata
			Pengembangan jaringan air bersih secara efektif dan partisipatif
		3.	Peningkatan kuantitas dan kualitas santasi layak secarapartisipatif
		4.	Peningkatan kuantitas dan kualitas pasarana, sarana dan utilitas Umum secara efektif dan merata
14.	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam	1.	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara partispatif
	berwawasan lingkungan	2.	Pemanfaatan sumber daya hutan melalui program perhutanan sosial secara partisipatif
		3.	Pembangunan sistem pengelolaan limbah masyarakat/industriyang terpadu dan bernilai ekonomis
		4.	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah yang representatif berwawasan lingkungan
		5.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan secara partispatif
			ingkatan kuantitas pembangunan Ruang Terbuka u (RTH)
15.	Meningkatnya kualitas mitigasi bencana		ingkatan kualitas pencegahan bencana secara efektif partisipatif
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarpras se penangganan bencana secara partisipatif			
			ingkatan kualitas penangganan bencana secara at , efektif dan partisipatif
		pra	ingkatan kualitas rekonstruksi infrastruktur dan sarana dasar dampak bencana secara efektif dan tisipatif
7	er: RPJMD Kab. Sijunjuna Tahun 20		-

Sumber: RPJMD Kab. Sijunjung Tahun 2021-2026

Dalam pencapaian 15 sasaran, Pemerintah Kabupaten Sijunjung menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi Perangkat Daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi untuk menggandeng aktor pembangunan lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran.

Berdasarkan uraian, tujuan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sijunjung, Nasional, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023, maka dapat dilihat sinergisitas target indikator sasaran pembangunan Kabupaten Sijunjung dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 4.7

Keselarasan Tujuan, Sasaran Pembangunan Kabupaten Sijunjung,
Provinsi Sumatera Barat dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun
2023

				Tarret	•	Target 202	23
No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target RPJMD 2023	RKPD Kab Sijunjung	RKPD Prov	RKP/ Nasional
1	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	58-60	56-60	69,50	
1.1	Meningkatnya kualitas birokrasi yang efektif, efisien	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	
	akuntabel dan profesional	Nilai SAKIP Manajemen Risiko Indeks Indeks Profesionalitas	Nilai Level Nilai	70-75	70-75	BB	
		ASN		70,00	60,65	76,00	
1.2	.2 Meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,51-4,00	3,51-4,00		
	dan berintegritas	Indeks Inovasi Daerah	Skor	2.500	43-45		
2	Meningkatkan partum- buhan ekonomi berbasis pengembangan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,21	4,43	4,65	5,3-5,9
2.1	Meningkatnya kontribusi PDRB sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	30,50	30,50		3,9-4,2
	perindustrian serta realisasi investasi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,88	0,95	1,24	4,3
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12,80	12,80	16,70	20,6
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	5,00	3,50	8,88	20,6
		Pertumbuhan realisasi investasi	%	15,00	15,00		
2.2	Tumbuhnya milenial entrepreneur dan woman entrepreneur	Jumlah enterpreneur baru tercipta	orang		836	17.888	
2.3	Miningkatnya Nilai Tukar Petani	Nilai Tukar Petani	Nilai	105,00	110,0	101,19	103-105
3	Mengentaskan masyara-kat dari kemiskinan	Angka kemiskinan	%	6,43	6,34	5,37	7,5-8,5
3.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	44,92	41,24	48,86	
3.2	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Ter- buka	%	4,86	3,41	5,72	5,3-6,0
3.3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7900	0,7900		
	sosial masyarakat	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	15,80	16,02	306,71	
4	Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	69,39	68,57	73,46	73,31- 73,49
4.1	Meningkatnya kualitas	Harapan lama sekolah	Tahun	13,17	12,70	14,06	
	pendidikan berbasis ka- rakter dan teknologi in- formasi	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,23	8,31	9,28	9,24
4.2	Meningkatnya Derajat kese- hatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	66,69	66,79	69,98	
4.3	Menurunnya prevelansi stunting	Prevalensi balita stun- ting	%	15,00	20,00	15,43	17,50
4.4	Meningkatnya kualitas rempuan dan pemuda pemuda	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,50	93,80	94,25	91,17-91,37

			Satuan	Target RPJMD 2023	Target 2023			
No	Tujuan/Sasaran	Indikator			RKPD Kab Sijunjung	RKPD Prov	RKP/ Nasional	
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	46,00	46,00			
5	Terwujudnya nilai-nilai sosial budaya masyarakat berlan- daskan ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebu-dayaan	Poin	45,00	40,00			
5.1	Meningkatnya kualitas nilal- nilai sosial budaya masya-	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	61,00	61,00	60,01		
	rakat berbasis kearifan lokal	Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan	%	22,60	18,00			
		Tingkat penurunan sengketa adat	%	13	6			
6	Terwujudnya infrastruktur dan prasana dasar yang berkualitas dan merata	Indeks Infrastruktur	Nilai	75,54	63,0			
6.1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Indeks infrastruktur jalan	Nilai	72,38	68,00			
		Rasio Elektrifikasi	%	72,00	63,00			
		Rasio layanan broadband 4G LTE	%	60,00	43,50			
6.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasana dasar	Cakupan layanan irigasi	%	55,00				
		Cakupan layanan air bersih	%	90,00	85,00	84,00	97,7	
		Cakupan sanitasi yang layak	%	90,0	50,00	84,00		
7	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skor	71,18		77,95		
7.1	Meningkatnya pemanfaatan	Indeks Kualitas Air	Skor	52,80	54,85			
	sumber daya alam berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Udara	skor	89,55	94,55			
		Indeks Tutupan lahan	Skor	68,77	67,00			
7.2	Meningkatnya kualitas mitigasi bencana	Indeks risiko bencana	Skor	100,0	102,0			

4.2. Prioritas Pembangunan

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2023, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2023 yakni (1) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, (3)penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, (4) mendorong pemulihan dunia usaha, (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim), (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi, dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang tetap dilaksanakan dalam koridor pencapaian Prioritas Nasional (PN). Adapaun sasaran masing-masing Prioritas Nasional (PN) tahun 2023 yakni:

1. Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT);

pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau, seperti terlihat pada infografis berikut.

Gambar 4.9. Program Prioritas Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Tahun 2023



Sumber: RKP Tahun 2023

2. Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Kerangka Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dijabarkan ke dalam tujuh Program Prioritas (PP) sebagaimana tergambar pada infografis berikut.

Gambar 4.10.
Program Prioritas Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Tahun 2023



Sumber: RKP Tahun 2023

3. Prioritas Nasional 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Kebijakan peningkatan SDM berkualitas dan berdaya saing tahun 2023 diarahkan pada Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 akan diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, dan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, seperti terlihat pada infografis berikut.

Gambar 4.11
Program Prioritas Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Tahun 2023

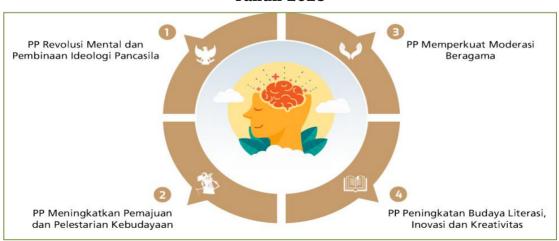


Sumber: RKP Tahun 2023

4. Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Kebijakan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan tahun 2023 diarahkan sebagai nilai-nilai penting untuk mewujudkan pembangunan nasional yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan, seperti terlihat pada infografis berikut.

Gambar 4.12 Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023

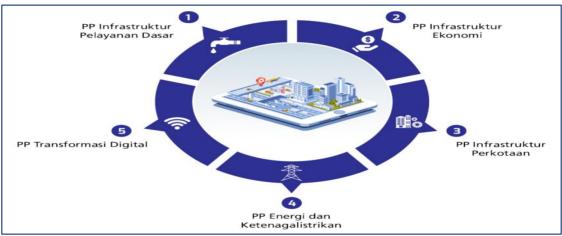


Sumber: RKP Tahun 2023

5. Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif yang diarahkan melalui (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan serta dan pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan; (4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (5) pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta pembangunan Ibu Kota Nusantara, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.13
Program Prioritas Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar Tahun 2023



Sumber: RKP Tahun 2023

6. Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Program Prioritas untuk Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim secara lengkap dapat dilihat pada infografis berikut.

Gambar 4.14
Program Prioritas Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim Tahun 2023



Sumber: RKP Tahun 2023

Berdasarkan pada Gambar diatas, pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim dalam RKP Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

7. Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah pandemi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraannya.

Gambar 4.15
Program Prioritas Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik
Tahun 2023



Sumber: RKP Tahun 2023

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tema RKP Tahun 2023 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi", seperti terlihat pada Gambar berikut:

Gambar 4.16 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 **TEMA RKPD 2023**



Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Keselarasan Agenda/Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (Prioritas 3)
		Meningkatkan usaha perdagangan dan indust kecil/menengah serta ekonomi berbasis digit (Prioritas 4)
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan (Prioritas 5)
2	Mengembangkan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah (Prioritas 2)
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggara pemerintahan daerah yang bersih, akuntat serta berkualitas (Prioritas 7)

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023

Arah kebijakan masing-masing prioritas pembangunan Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1.) Efektifitas dan efesiensi pemanfaatan alokasi anggaran Pendidikan dan kesehatan
 - 2.) Percepatan Vaksinasi menuju Herd Immunity

Prioritas 1: Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing

- Meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan dengan
 3.) pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK/SLB
- 4.) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial
- 5.) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanan Aksi Konvergensi
- 6.) Meningkatkan kualitas dan keterampilan Angkatan Kerja terutama berpendidikan menengah keatas
- 7.) Meningkatkan hasil penelitian yang berorientasi pada kebijakan strategis daerah
- Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang Trantib dan Damkar)
- Prioritas 2:
 Meningkatkan tata
 kehidupan sosial
 kemasyarakatan
 berdasarkan
 falsafah Adaik
 Basandi Syara' –
 Syara' Basandi
 Kitabullah
- 2.) Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfataan dan pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan

 Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat sebagai
 - pusat pembelajaran ABS SBK dengan meningkatkan aktifitas keagamaan dan kebudayaan
 - 4.) Menjadikan perpustakaan daerah menjadi pusat kegiatan literasi masarakat
 - 5.) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama
 - 6.) Meningkatkan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Menguatkan perencanaan dan penganggaran responsive gender dan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitasi sebagai bagian dari Pengarusutamaan Pembangunan Untuk Semua
 - 1.) Alokasi anggaran sektor pertanian sebesar 10% dari APBD
 - 2.) Menyiapkan benih/bibit bermutu (pertanian, kelautan perikanan dan peternakan)
 - 3.) Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan dan hutan

<u>Prioritas 3:</u> Meningkatkan nilai

tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan

- 4.) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan kelautan dan perikanan
 - 5.) Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam
- 6.) Meningkatkan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan
- 7.) Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
- 8.) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan
- 9.) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
- 10.) Mempertahakan produksi padi sebagai lumbung nasional
- 11.) Meningkatkan produksi jagung, ternak unggas dan kambing

1.) Penciptaan iklim investasi

Prioritas 4: Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital

- Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
 - Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif
- Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula



- Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
- Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
 - Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya 2.) bertaraf Internasional

Prioritas 5: Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan

- Meningkatkan fasilitas dan sarana prasaran pada 3.) destinasi wisata
- 4.) Meningkatkan atraksi seni dan budaya
- Meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan domestik
- Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantimbumlinmas (Sub bidang
 - Meningkatkan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada Kawasan sentra pertanian, industry dan pariwisat
 - Menurunkan biaya produksi dan pemasaran komoditas pertanian dan industry melalui efisiensi biaya logistic
- **Prioritas 6:**
- Mendukung peningkatan daya saing Kawasan wisata
- Meningkatkan 6.) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana Pembangunan
- Meningkatkan indeks ketahanan daerah Infrastruktur yang
 - Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan

berkelanjutan

berkeadilan dan

9.) Meningkatkan akses air minum dan sanitasi



- 10.) Mengurangi luasan Kawasan kumuh
- Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah
- 12.) Pemenuhan terhadap infrastruktur pelayanan dasar
- Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak bencana akibat gempa bumi Pasaman dan Pasaman Barat



4.2.3. Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Kabupaten Sijunjung

4.2.3.1. Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung

Sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi maka prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 memperhatikan 7 (tujuh) Agenda/Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sumatera Barat yang diturunkan menjadi Program Prioritas dan di detailkan dengan Kegiatan Prioritas. Hal ini bertujuan agar selarasnya Prioritas dan program pembangunan daerah dengan Prioritas dan Program Nasional sehingga target capaian Nasional dan Provinsi yang merupakan akumulasi dari pencapaian target masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat tercapai. Penyelarasan juga membuktikan bahwa Kabupaten Sijunjung turut mengambil bagian penting dari proses pelaksanaan pembangunan yang menuju kepada tujuan pembangunan nasional dan provinsi Penyelarasan dan dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung terhadap RKP Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9
Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan RKPD
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan
RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

No	Agenda/Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Per- tumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	tambah dan produktifitas	berbagai sub sektornya terutama tanaman
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital (Prioritas 4)	dan Industri Kecil Menengal (Prioritas 5)
		Meningkatkan ekonomi kre dan berdaya Saing kepariwisataan (Prioritas5)	Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Prioritas 4)

No	Agenda/Prioritas Nasional Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
2	Mengembangkan Wila- yah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (Prioritas 6)	Peningkatan kuantitas dar kualitas infrastruktur serta prasarana dasar (Prioritas 6)
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkua- litas dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing (Prioritas 1)	mutu pendidikan berbasis
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebu- dayaan	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah (Prioritas 2)	kesejahteraan sosial (Prioritas 8) 2. Revitalisasi nilai-nilai sosia
5	Memperkuat Infra- struktur untuk Mendu- kung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pembangu- nan Infrastruktur yang berkeadilan dan berke- lanjutan (Prioritas 6)	Peningkatan kuantitas dar kualitas infrastruktur serta prasarana dasar (Priritas 6)
6	Membangun Lingku- ngan Hidup, Mening- katkan Ketahanan Ben- cana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Pembangu- nan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelan- jutan (Prioritas 6)	Peningkatan kuantitas dar kualitas infrastruktur serta prasarana dasar Pemanfaatan sumber daya alam berwawasar lingkungan.
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas (Prioritas 7)	Peningkatan kualitas birokras dan pelayanan publik (Prioritas 10)

Selain memperhatikan prioritas nasional, pembangunan Kabupaten Sijunjung juga harus mempertimbangkan kebijakan global yang akan berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Sijunjung, Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung dengan Tujuan SDGs, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.10.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

dengan Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

N	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung
1	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;	Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan perikanan
		(Prioritas 3) 2. Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah (Prioritas 5) 3. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Prioritas 4)

No	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung
2.	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan	Revitalisasi pertanian dengan berbagai
	pangan dan meningkatkan gizi, serta	sub sektornya terutama tanaman
	mendorong pertanian yang berkelanjutan	pangan, holtikultura, perkebunan dan perikanan (Prioritas 3)
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan	Peningkatan akses dan kualitas
	mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia	kesehatan yang merata dan berkeadilan (Prioritas 2)
4.	Menjamin pendidikan yang inklusif dan	Peningkatan kualitas dan mutu
т.	berkeadilan serta mendorong kesempatan	pendidikan berbasis karakter dan
	belajar seumur hidup bagi semua orang;	tekonologi Informasi (Prioritas 3)
5.	Menjamin kesetaraan gender serta	Peningkatan akses dan kualitas
	memberdayakan seluruh wanita dan	kesehatan yang merata dan
	perempuan	berkeadilan (Prioritas 2)
6.	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air	Peningkatan kuantitas dan kualitas
	serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang	infrastruktur serta prasarana dasar (Priritas 6)
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau,	Peningkatan kuantitas dan kualitas
	terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua orang	infrastruktur serta prasarana dasar (Priritas 6)
8.	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang	1. Revitalisasi pertanian dengan
	terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan,	berbagai sub sektornya terutama
	serta kesempatan kerja penuh dan	tanaman pangan, holtikultura, perkebunan dan perikanan
	produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang	(Prioritas 3)
	John da John d	2. Penguatan UMKM, Koperasi dan
		Industri Kecil Menengah (Prioritas
		5)
		3. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal (Prioritas 4)
9.	Membangun infrastruktur yang	Peningkatan kuantitas dan kualitas
	berketahanan, mendorong industrialisasi	infrastruktur serta prasarana dasar
	yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi	(Priritas 6)
1.0		
10.	Mengurangi kesenjangan;	Revitalisasi pertanian dengan berbagai sub sektornya terutama
		tanaman pangan, holtikultura,
		perkebunan dan perikanan
		(Prioritas 3)
		2. Penguatan UMKM, Koperasi dan
		Industri Kecil Menengah (Prioritas
		5) 3. Pengembangan pariwisata berbasis
		kearifan lokal (Prioritas 4)
		Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial (Prioritas 8)
11.	Menjadikan kota dan pemukiman manusia	Peningkatan kuantitas dan kualitas
	inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan	infrastruktur serta prasarana dasar (Priritas 6)
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi	1. Revitalisasi pertanian dengan
14,	yang berkelanjutan	berbagai sub sektornya terutama
	y 6 J. 2000-	tanaman pangan, holtikultura,
		perkebunan dan perikanan
		(Prioritas 3)
		Penguatan UMKM, Koperasi dan Industri Kecil Menengah (Prioritas 5)
13.	Mengambil tindakan segera untuk	Pemanfaatan sumber daya alam
	memerangi perubahan iklim dan	berwawasan lingkungan (Prioritas 7)
	dampaknya	,
14.	Melestarikan dan menggunakan samudera,	-
4 1 4	samual and mongananan samuada,	1

No	Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sijunjung
	lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan	
15.	Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati	Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan (Prioritas 7)
16.	Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif diseluruh tingkatan	Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) (Priritas 9
17.	Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	-

4.2.3.2. Program Unggulan Kabupaten Sijunjung

Berdasarkan tema RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, maka arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada 4 (empat) agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) program unggulan daerah. Secara arah kebijakan, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan arah kebijakan tersbeut secara rinci sebagai berikut.

Tabel 4.11
Target Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Program Unggulan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
Agenda1: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan					
1.	Pengembangan Industri Kecil Menengah berbasis sumber daya lokal	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan industri yang dilatih dan teridentifikasi	1 Paket	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Lokasi Sentra yang dibangun dan direvitalisasi	1 sentra	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			jumlah IKM yang dibina oleh dekranasda, jumlah ivent yang diikuti	25 IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
			Pelatihan Cetak Produksi Kain (diversifikasi) melalui Ecoprint	30 orang	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Pelatihan pemanfaatan mesin tenun semi otomatif untuk diversifikasi tenun	30 IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Pelatihan Pengolahan Produk Turunan Minyak Astiri (minyak serai wangi, kayu putih)	30 IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Managemen Pengendalian Mutu Terpadu	30 IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	20 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	30 IKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan penataan pasar inpres	12 bulan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang dibangun dan direvitalisasi	4 pasar	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Inpres)	1 Unit	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola yang dibina	54 pasar	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	54 Dokumen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	86 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	1 paket	Dinas Pangan Perikanan
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Dinas Pangan Perikanan
2	Pengembangan destinasi wisata terintekgrasi	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	86 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	20 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	85.19 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	7 Dokumen	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	17 Laporan	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	85.19 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi pariwisata yang fasilitasi	2 investasi	
		Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah investasi sektor pariwisata	2 investasi	
			Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HKI	1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
3	Penguatan kelembagaan Ekonomi Kerakyatan	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	86 orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	200 Orang	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	5 persen	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bimtek Usaha pemula yang dilakukan	90 Orang	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah KUKM yang dikelola penggunaan dana bergulirnya	90 KUKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
			Jumlah KUKM yang dilatih	96 KUKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah KUKM yang dilayani kreditnya penguatan modalnya	320 KUKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha dagang yang dilakukan	30 kali	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	0 Unit Usaha	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30 Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1 rekomenda si	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1 rekomenda si	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase rekomendasi teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan	80 persen	Dinas pertanian
		Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen	Dinas pertanian
		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	Dinas pertanian
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	1 paket	Dinas Pangan Perikanan
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	Dinas Pangan Perikana
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	Dinas Pangan Perikana
4	Ketahanan pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai	Infrastruktur kemandirian dan seluruh pendukung kemandirian pangan	4 unit	Dinas Pengan dan perikanan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 paket	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	1 Unit	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	2 kali	Dinas Pengan dan Perikanan
			Koefisien of varian harga pangan pokok di tingkat konsumen kecil dari	25 persen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Dinas Pengan dan Perikanan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	5 kelompok	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	Dinas Pengan dan Perikanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	3 jenis	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peta kerentanan dan ketahan pangan	1 peta	Dinas Pengan dan Perikanan
			Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85 persen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	Dinas Pengan dan Perikanan
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
	-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Usaha	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi izin	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan Dinas Pengan dan
		Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	usaha perikanan yang diterbitkan	rekomenda si	Perikanan
		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Rekomenda si	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Izin Usaha Perikanan di Bidag Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten/kota yang diterbitkan Jumlah Pembididaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan da Pendampingan/Kemitraa Usaha /kemudahan akse Iptek dan Informasi dan penguatan kelembagaan	2 dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
			Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan	50 orang	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1 Kelompok	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	1 Kelompok	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar/air payau yang diproduksi	2600000 ekor	Dinas Pengan dan Perikanan
			Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelaan	20 orang	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit	Dinas Pengan dan Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Unit	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	10 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 orang	Dinas Pengan dan Perikanan

0	Unggulan			2023	
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai,	Jumlah lahan perikanan yang diawasi	10 nagari	Dinas Pengan dan Perikanan
		Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dinas Pengan dan Perikanan
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan & benih/bibit hijauan pakan ternak yang terawasi	50 persen	Dinas Pertanian
		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak beredar yang terawasi	15 persen	Dinas Pertanian
		Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	20000 Ekor	Dinas Pertanian
		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	100 Ton	Dinas Pertanian
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	persentase peningkatan populasi ternak	1 persen	Dinas Pertanian
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	20 Ekor	Dinas Pertanian
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	2 dokumen	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	Dinas Pertanian
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan	persentase prasarana pertanian yang layak Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang	73.08 persen 1 Unit	Dinas Pertanian Dinas Pertanian

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Pertanian
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Pertanian
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular dan zoonosis	80.5 persen	Dinas Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 Laporan	Dinas Pertanian
		Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	4 persen	Dinas Pertanian
		Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah	1 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang terkelola	75 persen	Dinas Pertanian
		Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	3 Laporan	Dinas Pertanian
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 Laporan	Dinas Pertanian
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentase persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terpenuhi	50 persen	Dinas Pertanian
		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	2 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	persentase bencana pertanian yang terkendali/ tertanggulangi	85 persen	Dinas Pertanian
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	100 На	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkelola	4 komoditas	Dinas Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	Dinas Pertanian
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	persentase kelompok tani pengguna sarana pertanian yang terawasi dan terdampingi	65 persen	Dinas Pertanian
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	Dinas Pertanian

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkelola	4 komoditas	Dinas Pertanian
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	Dinas Pertanian
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	Dinas Pertanian
5	Peningkatan sistem penyuluhan pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	80 persen	Dinas Pertanian
	-	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Unit	Dinas Pertanian
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit	Dinas Pertanian
		Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	Dinas Pertanian
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	8 Unit	Dinas Pertanian
Pen	nda 2: ingkatan kualitas iber Daya manusia M)				
1	Percepatan penurunan stunting	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE	34 persen	Dinas Kesehatan
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	371 Kelompok	Dinas Kesehatan
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	Dinas Kesehatan
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	34 Laporan	Dinas Kesehatan
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	303 Orang	Dinas Kesehatan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Kelompok	Dinas Kesehatan
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Dinas Kesehatan
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	26 Laporan	Dinas Kesehatan
		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	Dinas Kesehatan
		Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	Dinas Kesehatan
		Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Dinas Kesehatan
		Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	persentase Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	34 persen	Dinas Kesehatan
		Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Dinas Kesehatan
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	Dinas Kesehatan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Dinas Kesehatan
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25371 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41694 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 persen	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	5 kelompok	Dinas Pangan Dan Perikanan
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Perikanan
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan	Dinas Pangan Dan Perikanan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Perikanan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		D. I. ODIV	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan air minum yang terbangun dan jumlah sambungan rumah (SR) terpasang	45000 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1800 SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	100 persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi layak	2 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah sarana prasarana yang dibangun	80 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 meter	15 persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah DED drainase di kawasan permukiman yang disusunJumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkata n/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkata n/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Panjang saluran drainase yang terbangun di kawasan permukiman	3400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
2	Poninghatas	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	1 dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	pendidikan kesetaraan/non formal	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	1 dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	20 Buku	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase Kebutuhan PTK	70 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD dan Non Formal yang diterbitkan izinnya	4 satuan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	0 Dokumen kerjasama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	11 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Jumlah Gedung/Ruang	3 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
		Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 5.110	dan Kebudayaan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	325 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	12 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1Dokumen ateri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	1 Dokumenat eri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Laporan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehtan dasar	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang diakvokasi pembentukan nagari siaga aktif	4 Nagari	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Dinas Kesehatan
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			Dinas Kesehatan
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	5 Orang	Dinas Kesehatan
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25371 Orang	Dinas Kesehatan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41694 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21225 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44152 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	530 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2855 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3558 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Orang dengan	52 Dokumen 0 Orang	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	_	
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4584 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	24 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen	Dinas Kesehatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Dinas Kesehatan
4	Peningkatan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu	Bantuan pendidikan untuk SMA/SMK se Kabupaten Sijunjung melalui BKK Provinsi	Jumlah siswa yang memperoleh bantuan	9.334 Siswa	Dinas Pendidikan

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
5	Penguatan pendidikan karakter	Pengelolaan Pendidikan	persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SD	35 persen	Dikbud
			persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SMP	80 persen	Dikbud
Pen	nda 3: ingktan Kualitas ayan Publik				
1	Peningkatan kapasitas ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	5 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	55 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	55 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	persentase penilaian dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	100 persen	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	75 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7 Kasus	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan	50 orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	200 orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	200 Orang	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi	Seluruh erangkat Daerah

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
2	Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	400 berita	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	15 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	35 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	35 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	10 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	5 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan kegiatan pemerintah	10 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	400 berita	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Kabupaten/Kota	persentase layanan publik yang diselenggarakan se-cara online dan terinte- grasi	70	Dinas Kominfo
			persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	Dinas Kominfo
			persentase masyarakat yang menjadi sasaran pe- nyebaran informasi publik,mengetahui kebijakan danprogram prioritas pemerintah	55	Dinas Kominfo
3	Penerapan sistem inovasi daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi yang diterapkan	63 persen	Bapppeda
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	Bapppeda
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	175 Inovasi/ Laporan	Bapppeda
Pen	nda 4: ingkatan Kualitas astruktur Dasar				
1. 2.	Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dasar Peningktan kualitas dan	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	63 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	kuantitas infra struktur pertanian dan pariwisata	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	20 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	20000 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	3 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	2500 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
		Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan	2 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang rehabilitasi irigasi permukaan yang direhabilitasi	15000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	10000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	15 DI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	71.57 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis,kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	16 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pengelolaal leger jalan	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dam informasi terkait kondisi jalan/jembatan	1 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	71.57 persen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis,kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian	16 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.5 KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang diilakukan pemeliharaan secara berkala	9.236715 KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	86.477476 KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	100 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian	98 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	385.36 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	240 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitsi/terekonstruks i akibat bencana	11.38 KM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100 persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan air minum yang terbangun dan jumlah sambungan rumah (SR) terpasang	45000 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1800 SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	100 pesen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi layak	2 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah sarana prasarana yang dibangun	80 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 meter	15 persen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah DED drainase di kawasan permukiman yang disusunJumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkata n/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkata n/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	3400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
			Panjang saluran drainase yang terbangun di kawasan permukiman	3400 Meter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
3.	Pembangunan TPA terintekgrasi	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani	10.105 Ton	
		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11758.8 Ton	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

N o	Agenda/Program Unggulan	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Perangkat Daerah
3	ongguan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
4	Percepatan penataan ibu kota kabupaten		Jumlah kawasan ibukota yang dibangun	1 Kawasan	Dinas PUPR

4.2.3.3. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap RKP Tahun 2023

Dukunagan RKPD Kabupaten Sijunjung terhadap RKP dapat dilihat dari kegiatan prioritas yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 mendukung secara langsung terhadap masing-masing Kegiatan Prioritas yang dijabarkan pada masing-masing 7 (tujuh) Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.12.

Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Prioritas dan Program Prioritas RKP Tahun 2023

Vo DVD 2022						
NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023			
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah		
	itas 1:					
		an Ekonomi Untuk				
	ımbuhan					
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan	Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	-	-		
	mengutamakan peningkatan	Peningkatan pasokan bahan bakar nabati	-	-		
	Energi Baru Terbarukan (EBT)	Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi	-	-		
		Peningkatan pemenuhan energi domestik	-	-		
		Pengembangan industri pendukung EBT	-	-		
2	Peningkatan kuantitas/keta hanan air untuk mendukung	Pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) Pengelolaan hutan	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
	pertumbuhan ekonomi	berkelanjutan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	ınjung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyediaan air untuk pertanian	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian
		Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;	-	-
		Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan	-	-
		Pengembangan waduk multiguna	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
	kualitas konsumsi pangan	onsumsi	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pangan Perikanan
		hasil laut secara berkelanjutan;	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Pangan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pangan Perikanan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pangan Perikanan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Dinas Pangan Perikanan
		daya manusia (SDM)	Pembinaan dan Pemantauan	Dinas Pangan
		pertanian, perikanan dan kepastian pasar;	Pembudidayaan Ikan di Darat	Perikanan Dinas Pangan
		Repastian pasar,	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Dinas Pangan Perikanan
			Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan	
			Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan dan Pemantauan	Dinas Pangan
		D : 1 : 1 1 1 : .	Pembudidayaan Ikan di Darat	Perikanan
		Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
		pertanian; dan	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
		Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak	Dinas Pangan Perikanan
4	Peningkatan	Peningkatan pengelolaan	Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	
7	pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	-	-
		Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	-	-
		Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	-	-
5	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	-	-
6	Penguatan kewirausahaan , Usaha Mikro, Kecil Menengah	Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Menengah Usaha Menengah Besar	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	(UMKM), dan koperasi	Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha Peningkatan kapasitas,	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		jangkauan, dan inovasi koperasi	Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
7	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	-	-
	Tradistrations:	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata,
			Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Peningkatan nilai tambah	Pengelolaan Investasi Pariwisata Pemberdayaan Peningkatan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		ketenagakerjaan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
		Pengembangan industri halal.	Penanaman Modal Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terpadu Satu Pintu Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan	Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	-	-
	Tingkat Kandungan Dalam Negeri	Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor Pengelolaan Impor	- -	-

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	(TKDN)	Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	-	-
		Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	-	-
		Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	-	-
		Peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.	-	-
9	Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya	Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dinas Kesehatan
	Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Industry 4.0	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
		Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan OLah Raga
		Pariwisata	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan OLah Raga
			Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata Pemuda dan OLah Raga
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

NO	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung 2023		
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
			Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
_	itas 2: rombongkon Wiler	rah untuk Mangurangi Ka	oconiongen den Meniemin Demoret	200	
Meng		y an untuk mengurangi Ke pusat pertumbuhan (PKW)	esenjangan dan Menjamin Pemerat Pembangunan jalan	Dinas Pekerjaan Umum	
	ke wilayah belum	berkembang		dan Penataan Ruang	
2	Peningkatan daya inklusif	a saing wilayah yang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Kabupaten/Kota Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
3		ampuan SDM dan Iptek han dalam mendukung	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
4	Meningkatkan IPI pelayanan dasar	M melalui pemenuhan secara merata.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	Dinas Pendidika dan Kebudayaan Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Dinas Pendidika dan	
			Kelas Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kebudayaan Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan	

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Asrama Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidika dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	2 2002		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa Pemeliharaan Rutin Bangunan	Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			Gedung dan Ruangan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kebudayaan Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Kebudayaan Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Menengah Pertama	Dinas Pendidika dan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah Pembangunan Gedung/Ruang	Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			Kelas/Ruang Guru PAUD Pembangunan Sarana, Prasarana	Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			dan Utilitas PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang	Kebudayaan Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Guru PAUD Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			Pengadaan Perlengkapan PAUD Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kebudayaan Dinas Pendidika dan
			PAUD	Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan onformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidika dan Kebudayaan
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidika dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	ınjung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	111011000		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup
			Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
			Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Pengadaan Sarana Fasilitas	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan	Dinas Kesehatan
			Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Drio	ritas 3:		Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
Men	ingkatkan SDM	Berkualitas dan Berdaya		D:
1	Pengendalia n penduduk	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	dan penguatan tata kelola kependuduk an		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Pendampingan dan Layanan Terpadu	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung 2023		
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	
	22202000		Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	Penguatan pelaksanaan perlindunga n sosial	Sistem jaminan sosial nasional	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Kesejahteraan Sosial	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	ınjung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Peningkatan Akses dan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
	Mutu Pelayanan	Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Kesehatan		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Pengendalian Penyakitt	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
		Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Kesehatan
		Sehat (Germas)	Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Kesehatan
			Rehabilitasi Kantin Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
			Kreativitas Siswa Pembangunan Ruang Unit	Dinas Kesehatan
			Kesehatan Sekolah Penyediaan Pangan Berbasis	Dinas pangan dan
			Sumber Daya Lokal	perikanan
			Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas pangan dan perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Dinas pangan dan perikanan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas pangan dan perikanan
		Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
4.	Peningkatan pemerataan	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	layanan pendidikan berkualitas	Pembelajaran	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung 2023		
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	dan Kebudayaan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penambahan Ruang Kelas Baru Pembangunan Ruang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Sekolah Pembangunan Sarana,	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Asrama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Perpustakaan Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Laboratorium	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Asrama	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Fasilitas Parkir	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Kantin Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa Pemeliharaan Rutin Bangunan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Gedung dan Ruangan	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana,	Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil	Dinas Pendidikan
			Peserta Didik Sekolah	dan Kebudayaan
			Menengah Pertama	D' D 1111
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan	Dinas Pendidikan
			Peraga Siswa	dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar	Dinas Pendidikan
			dan Ujian bagi Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Kreativitas Siswa	dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan	Dinas Pendidikan
			Manajemen Sekolah	dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Dinas Pendidikan
			Menengah Pertama	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Prasarana dan Utilitas PAUD Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Kependidikan	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Pendidik dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penjaminan Mutu Pendidikan	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Penyiapan dan Tindak Lanjut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	dan Kebudayaan
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
	THOREAS		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Ruang Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Kesehatan Sekolah Pembangunan Perpustakaan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Sekolah Pembangunan Sarana,	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Perpustakaan Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Pengadaan Perlengkapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Sekolah Pengadaan Perlengkapan Siswa	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Peraga Siswa Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Dasar Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah Pembangunan Unit Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Baru (USB)	dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penambahan Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
			Baru	dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang	Dinas Pendidikan
			Guru/Kepala Sekolah/TU	dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan	Dinas Pendidikan
			Sekolah	dan Kebudayaan
				Dinas Pendidikan
			Pembangunan Laboratorium	dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Serba	Dinas Pendidikan
			Guna/Aula	dan Kebudayaan
			Pembangunan Asrama Sekolah	Dinas Pendidikan
				dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	dan Kebudayaan
			Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana,	Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Gedung Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Ruang Kelas Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Ruang Unit Kesehatan Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Perpustakaan Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Laboratorium	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Ruang Serba Guna/Aula	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Asrama Rehabilitasi Sedang/Berat	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Rumah Dinas Kepala	dan Kebudayaan
			Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	dan Kebadayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Fasilitas Parkir	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Kantin Sekolah	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana,	Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas Sekolah	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Menengah Pertama Perlengkapan Belajar Peserta	Dinas Pendidikan
			Didik	dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan	Dinas Pendidikan
			Peraga Siswa	dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Penyelenggaraan Proses Belajar	Dinas Pendidikan
			dan Ujian bagi Peserta Didik Pembinaan Minat, Bakat dan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Kreativitas Siswa	dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan	Dinas Pendidikan
			Manajemen Sekolah	dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Dinas Pendidikan
			Menengah Pertama	dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana,	Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas PAUD	dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin	Dinas Pendidikan
			Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana,	Dinas Pendidikan
			Prasarana dan Utilitas PAUD	dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Penyiapan dan Tindak Lanjut	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Evaluasi Satuan PAUD	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembangunan Gedung/Ruang	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Nonformal/Kesetaraan Rehabilitasi Sedang/Berat	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
			Laboratorium Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Hak dan Perlindungan Anak	Dasar Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kesetaraan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi	
			Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Kualitas Pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Peningkatan Kapasitas Pemuda	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata,
	December	Alectoric	dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pemuda dan Olah Raga
6.	Pengentasan kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan	Pemberdayaan Perempuan dan
		Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Paan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan	Pemberdayaan
			Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Reforma Agraria Perhutanan Sosial	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Dinas Pertanian
7.	Peningkatan Produktivita s Dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
		Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Prestasi Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah
			Fengenbangan dan Penasaian Festival dan Olahraga Rekreasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	ritas 4: olusi Mental dar	ı Pembangunan Kebudayaa:	n	
1	Revolusi Mental Dan	Revolusi mental dalam sistem pendidikan	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan
	Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuk uh Ketahanan Budaya	untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, a gotong royong, dan budi pekerti kuk Revolusi mental dalam	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan budaya birokrasi yang bersih,	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
		melayani, dan responsif	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	
		Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO			njung 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pengendalian
			Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penduduk dan Keluarga Berencana
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotism	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatka n Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan	Pemajuan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal elestarian ebudayaan ntuk	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Karakter Dan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Mempertegu h Jati Diri Bangsa,		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatka n Kesejahteraa		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	n Rakyat, Dan Mempengaru		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	hi Arah Perkembang an		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		kesejahteraan rakyat	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	
	771071000		Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelindungan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pengembangan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		memperkuat kebudayaan yang inklusif	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	dan Kebudayaan	
			Penetapan Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Pelindungan Cagar Budaya	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
			Pengembangan Cagar Budaya	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
		Pengembangan	Pemanfaatan Cagar Budaya Pelindungan, Pengembangan,	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan	
		Diplomasi Budaya untuk memperkuat	Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	dan Kebudayaan	
		pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhka n Toleransi	Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Kerukunan kebersamaan di Dan kalangan umat Harmoni beragama	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	

NO	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Fasilitasi Kelembagaan Bina	Dinas pendidikan dan Kebudayaan Dinas pendidikan
4	Peningkatan Budaya Literasi,	Peningkatan Budaya Literasi	Spiritual Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Inovasi Dan Kreativitas Bagi	Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Terwujudnya Masyarakat Berpengetah uan, Dan	Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kekhasan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Berkarakter		Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengembangan Bahan Pustaka	dan Kearsipan
		Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Perangkat Daerah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan
	Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetah uan, Dan		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	dan Kearsipan
	Berkarakter		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	dan Kearsipan
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	
	ritas 5: 1perkuat Infrast	ruktur untuk Ekonomi dan	Pelayanan Dasar	
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman dan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kawasan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
			Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
			Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
			Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Dinas Perhubungan
		Ketahanan	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Dinas Perhubungan

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	ınjung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Kebencanaan Infrastruktur	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
			Peningkatan Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Penggantian Jembatan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Rehabilitasi Jembatan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
			Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruan
		Konektivitas Kereta Api	-	-
		Konektivitas Laut Konektivitas Darat	-	-
3	Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dinas Perhubungan
4	Energi Dan Ketenagalistr ikan	Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	-	-
		Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	-	-
		Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	-	-
5	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis	
			Elektronik Pengembangan Aplikasi dan	
			Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	
			Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi	
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non	
			Elektronik Pengelolaan Konten dan	
			Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi	
			Publik Pelayanan Informasi Publik	
		Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	
Prio	ritas 6:		Daerah	
Men 1	nbangun Lingku Peningkatan	ngan Hidup, Ketahanan Be Pencegahan	encana, dan Perubahan Iklim Pemberian Informasi	Dinas Perumahan,
1	Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		8 11 8 11	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
		Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan,
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
			Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
			Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
			Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
		Penguatan	Pemanfaatan Kembali Fasilitasi Pemenuhan	Lingkungan Hidup Dinas Perumahan,
		Kelembagaan dan Penegakan Hukum di	Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kawasan Permukiman dan
		Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	PPLH Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan Ketahanan	Penanggulangan Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup
	Bencana Dan Iklim		Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Peningkatan Ketahanan Iklim	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Pembangunan Energi Berkelanjutan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
		Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup
		-	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
3	Pembanguna n Rendah Karbon	Pengembangan Industri Hijau	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
1	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Pengelolaan Media Komunikasi Pengelolaan Media Komunikasi Pengelolaan Media Komunikasi Pinas komunikasi Dinas komunikasi Dinas komunikasi		
			Perencanaan Media Komunikasi Publik	i Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas komunikasi dan informatika i Dinas komunikasi dan informatika Dinas komunikasi dan informatika Dinas komunikasi dan informatika Dinas komunikasi dan informatika Dinas komunikasi dan informatika
			Publik	dan informatika
			Pelayanan Informasi Publik	
			Manajemen Komunikasi Krisis	dan informatika
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	l .
			Kemitraan dengan Pemangku	Dinas komunikasi
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Kepentingan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	dan informatika Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penguatan Kerjasama Pembangunan	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Sekretariat Daerah
		Internasional	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Sekretariat Daerah

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Siju	ınjung 2023
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
3	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
			Pembinaan Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Perumusan Disiplin ASN Pengelolaan Penyelesaian Pengembangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Data Kepegawaian	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Mutasi ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Promosi ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	dan Pengembangan Sumber Daya
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	dan Pengembangan Sumber Daya
		Transformasi pelayanan publik	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
			Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dan Informatika
			Publik	Dan Informatika
			Pelayanan Informasi Publik Manajemen Komunikasi Krisis	Dan Informatika Dinas Komunikasi
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dan Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO		RKP 2023	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023		
	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah	
	THOTTEUS		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Penataan Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Sekretariat Daerah	
			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretariat Daerah	
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Badan keungan dan Aset Daerah	
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Badan keungan dan Aset Daerah	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Badan keungan dan Aset Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Badan keungan dan Aset Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Badan keungan dan Aset Daerah	
4	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Penguatan Keamanan Laut	-	-	
		Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik	

4.2.3.4. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan Sebagai Fokus RKP Tahun 2023

Selanjutnya, pada RKP Tahun 2023 terdapat delapan arah kebijakan yang menjadi fokus pembangunan nasional yaitu: 1). Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan strategi; 2). Peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan Pendidikan; 3). Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job; 4). Mendorong pemulihan dunia usaha; 5). Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan; 6). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); 7) Percepatan pembangunan insrastruktur dasar antara lain ai bersih, dan sanitasi; 8). Pembangunan Ibu Kota Nusantara (bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah). Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 terhadap arah kebijakan yang menjadi fokus nasional sebagai berikut.

Tabel 4.13. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Arah Kebijakan Sebagai Fokus RKP Tahun 2023

		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023	
N	Fokus RKP	Sasaran	Indikator		Perangkat	
			Terkait	Sub Kegiatan	Daerat	
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstri	Sistem jaminan sosial Modernisasi pertanian	Penghapusan kemiskinan ekstrem: 1,5-2,0% (2023)0-1% (2024)	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	
		Pemerataan pembanguna	, ,	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	Dinas Pertanian Dinas Pertanian	
				Usaha Skala Mikro dan Kecil Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Pangan dan Perikanan	
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial, Pemberdayaan	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan	

Proper	BT		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa di Bidang Pemberdayaan Desa di Bidang Pemberdayaan Desa di Bidang Pemberdayaan Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Dacrah Kabupaten/Kota serta Pelakangan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pemberdayaan Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Dacrah Kabupaten/Kota Pelakasanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perusahaan Kerja Swasta Dan Transming Perusahaan Kerla Perusahaan Kerla Dan Transming Perusahaan Kerla Perusahaan Kerla Perusahaan Kerla Perusahaan Kerla Pengakuran Produktivitas Pada Perusahaan Kerla Pengakuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengakuran Produktivitas Pada Pengakuran Produktivitas Pengakuran Produktivitas Pengakuran Produktivitas Pengakuran Produktivitas Pengakuran Produktivitas Pengakuran Produktivitas Pengakuran Penduktivitas Pengakuran Penduktivitas Pengakuran Penduktivitas Pengakuran Penduktivitas Pengakuran Penduktivitas Pengakuran Pengakuran Kuputa Pengakuran Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Pengakuran Kerja di Daerah Ketenaga Dan Transming Pengakuran Kerja di Daerah Ketenaga Dan Transming Pengakuran Kerja di Daerah Ketenaga Dan Transming Pengakuran Kerja dilam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengakatan Kerja dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengakatan Kendupaten/Kota Penjakatan Kukuta Kawasan Penmukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Darakan Penmukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Dan Lingi Hidup Daraman Penduktivan Banah Pengakutan Kesehatan Penduktivan Banah Pengakutan Kanasan Penmukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Dan Lingi Hidup Daraman Pengakutan Kanasan Pengakatan Kanasanan Pengakatan Pen	N	Fokus RKP				Perangkat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Helakunya Hutung Masyarakat Helakunya Hutung Masyarakat Helaksanan Pelatihan Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Ronsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagal Dan Transmig Dan Lingil				Terkait		Daerat Nagari
Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Pembinaan Lembaga Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Dan Transmigi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Dan Transmigi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Dan Transmigi Pengukuran Produktivitas Pada Perusahaan Kecil Dinas Ketenagal Dan Transmigi Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengukuran Produktivitas Rabupaten/Kota Pengukuran Produktivitas Pengukuran Produktivitas Rabupaten/Kota Pengukuran Produktivitas Pada Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IpTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Ketenagal D						Nagari
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan Tenaga Pelatihan Penempatan Tenaga Pelatihan Refia Swasta Pengukuran Produktivitas pada Pengukuran Produktivitas Pinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagai Dan Transmig Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagai Dan Transmig Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagai Dan Transmig Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagai Dan Transmig Penempatan Penempatan Dinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penempatan Penempatan Dinas Ketenagai Dan Transmig Penempatan Penempatan Dinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penempatan Penempatan Dinas Retenagai Dan Transmig Dinas Penempatan Penempatan Penempatan Dinas Penempatan Penempat					Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah	Pemberdayaan Masyarakat Dan
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Dinas Ketenagai Dan Transmig Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Ketenagai Dan Transmig Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penerbitan Penerpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penerpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penerpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Penerpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Penerpanjangan IMTA yang Berasal dari 1 (Satu) Dan Transmig Dinas Ketenagai Dan Transmig Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Transmig Dinas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dan Transmig Dinas Pelayanan Penerpanjangan Pendataan dan Dan Transmig Dan Dan Transmig Dan Dan Dan Transmig Dan					Pelaksanaan Pelatihan	Ketenagakerjaan Dan
Perizinan dan Pendattaran Lembaga Pelatihan Kerja Dinas Ketenagal Dan Transmig Dinas Ketenagal Dan Transmig Pengukuran Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagal Dan Transmig Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Ketenagal Dan Transmig Pelidudugan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagal Dan Transmig Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Dinas Ketenagal Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penatah Kabupaten/Kota Dan Transmig Dinas Ketenagal Dan Transmig Penguduk yang tercakup dalam program penduduk yang tercakup dalam program Jaminan Kasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan Permukim Masyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelogaaran Pendataan dan Pengelongaaran Pendataan dan Dinas Pengelongaaran Pendataan dan Pengelongaaran Pendataan dan Dinas Pengelongaaran Pendataan dan						Dinas Ketenagakerjaan
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Perusahaan Kecil Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penempatan) Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Dan Transmigi Dinas Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Dan Transmigi Dinas Retenagal Dan Transmigi Dinas Penerbitan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pengelolagan program Jaminan Kesehatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pembinaan Pelaksanaan dan Dinas						Dinas Ketenagakerjaan Dan
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Lembaga Penermpatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketenagal Dan Transmig Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmig Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi penduduk yang tercakup dalam program Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi penduduk yang tercakup dalam program Jaminan sosial : 91% Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Dan Transmig Dinas Ketenagal Dan Transmig						Dinas Ketenagakerjaan
Retengal Dan Transmig Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Ketangal Dan Transmig Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dinas Ketenagal Dan Transmig Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagal Dan Transmig Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagal Dan Transmig Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Ketenagal Dan Transmig Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perumaha Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Perumaha Masyarakat Pembinaan Pelaksanaan Upaya Dinas Ketenagal Dan Transmig Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pengelonaan Pelaksanaan Upaya Dinas Ketenagal Dan Transmig Pembinaan Pelaksanaan Upaya Dinas Ketenagal Dan Dinas Ketenagal Dan Dinas Din						Dinas Ketenagakerjaan
Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmigi Penatana Persebaran IIMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Penatan Rullitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan Permukim Dan Lingl Hidup Penbinaan Pelaksanaan Upaya Dan Transmigi Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas						Ketenagakerjaan
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelindungan PMI (Pra dan Purna Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi Pengelolaan Jaminan Kesehatan penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial: 91% Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas Ketenagal Dan Transmig					Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu)	Ketenagakerjaan
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91% Pelindungan PMI (Pra dan Purna Ketenagal Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Dan Transmigi Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas Ketenagal Dan Transmigi Dinas Dan Dinas Di					Pengelolaan Informasi Pasar	Dinas Ketenagakerjaan
yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial: 91% yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penataan Persebaran Penduduk Ketenagal Dan Transmigi Peningkatan Kualitas Kawasan Perumaha Kawasan Perumaha Kawasan Permukim Dan Lingk Hidup Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas					Penempatan) di Daerah	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Ermukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Ermukim Dan Lingh Hidup Dan Hidup Hidup Hidup Hidup Asyarakat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pembinaan Pelaksanaan Upaya Joinas Fembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas					yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91% Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kawasan Permukim Dan Lingh Hidup Dinas Ketenagal Dan Transmigi Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas					yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketenagakerjaan
penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial : 91% Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Masyarakat Ketenagal Dan Transmigi Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas					Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
jaminan Pembinaan Pelaksanaan Upaya Dinas Sosial : 91% Pelayanan Kesehatan Penyelenggaraan Pendataan dan Dinas				penduduk yang tercakup		Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
			jaminan	3	Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
Industrial dan Jaminan Sosial Dan					Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Ketenagakerjaan

N		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
0	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
			NilaiTukar Petani /Nelayan: 103- 105/ 105-107	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian
				Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Dinas Pertanian
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Pertanian
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Dinas Pertanian
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Dinas Pertanian
				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Dinas Pertanian
				Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
				Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Dinas Pertanian
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Dinas Pertanian
				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Dinas Pertanian
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Dinas Pertanian
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas Pertanian

BT		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas Pertanian
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
				Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Dinas Pertanian
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
				Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Dinas Pangan Perikanan
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Dinas Pangan Perikanan
				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dinas Pangan Perikanan
				Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Dinas Pangan Perikanan
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pangan Perikanan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan Perikanan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pangan Perikanan
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Pangan Perikanan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dinas Pangan Perikanan
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pangan Perikanan
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Dinas Pangan Perikanan
				Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan	

N		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
O	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat
			Terkait	Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Daerat
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Pangan Perikanan Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan	Dinas Pangan Perikanan Dinas Pangan
				Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perikanan
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Pangan Perikanan
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Pangan Perikanan
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
2	Peningkatan kualitas SDM : kesehatan dan pendidikan	Sistem Kesehatan Pendidikan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Kesehatan
		(sistem pendidikan dan endidikan karakter)	pada balita 17,5% sampai 14% (2024)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Dinas Kesehatan

B.T		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
			Terkait	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Daerat
				December Comment Valence In	Dinas Kesehatan
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Dinas Kesenatan
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	
				BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	
				Keluarga/UPPKS)	
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan	Dinas Kesehatan
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	
				BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	
				Keluarga/UPPKS)	
				Orientasi/Pelatihan Teknis	Dinas Kesehatan
				Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	
				BKL, PPPKS, PIK-R dan	
				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
				Penyediaan Biaya Operasional bagi	Dinas Kesehatan
				Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan	
				Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	
				PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	
				Keluarga/UPPKS) Penyediaan Biaya Operasional bagi	Dinas Kesehatan
				Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	
				Pemberdayaan Ekonomi	
				Keluarga/UPPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok	Dinas Kesehatan
				Kegiatan Ketahanan dan	Dinas Resenatan
				Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	
				Pemberdayaan Ekonomi	
				Keluarga/UPPKS)	D: 1 1
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Dinas Kesehatan
				Kesejahteraan Keluarga (Menjadi	
				Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta	
				Pengelolaan Keuangan Keluarga)	
				Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang	Dinas Kesehatan
				Mendukung Tercapainya IPK	
				Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Dinas Kesehatan
				Advokasi dan Promosi IPK	Dinas Kesehatan
				Sosialisasi IPK	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan dan Peningkatan	Dinas Kesehatan
				Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	
				Kabupaten/ Kota dalam	
				Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan	
				Kesejahteraan Keluarga	
				Penguatan Kebijakan Daerah dalam	Dinas Kesehatan
				rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi	
				Kemasyarakatan dan Mitra Kerja	
				Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan	
				Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	
				PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	

B.T		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Dinas Kesehatan
				Keluarga/UPPKS) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Kesehatan
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Parcalin	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
				Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
				pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
				pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dinas Pangan Dan Perikanan
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dinas Pangan Dan Perikanan
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan Dan Perikanan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Dinas Pangan Dan Perikanan
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup

		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat
			Terkait	Pengelolaan dan Pengembangan	Daerat Dinas Perumahan,
				Sistem Air Limbah Domestik dalam	Kawasan
				Daerah Kabupaten/Kota	Permukiman Dan Lingkungan Hidup
				Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Dinas Perumahan, Kawasan
				Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Permukiman Dan
				dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup
				Pembangunan/Penyediaan Sistem	Dinas Perumahan, Kawasan
				Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Permukiman Dan
				Pengelolaan dan Pengembangan	Lingkungan Hidup Dinas
				Sistem Drainase yang Terhubung	Perumahan,
				Langsung dengan Sungai dalam	Kawasan Permukiman Dan
				Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan
				Supervisi	Hidup Dinas
				Pembangunan/Peningkatan/	Perumahan, Kawasan
				Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Permukiman Dan
					Lingkungan Hidup
				Pembangunan Sistem Drainase	Dinas
				Lingkungan	Perumahan, Kawasan
					Permukiman Dan
					Lingkungan Hidup
				Penyusunan Rencana, Kebijakan,	Dinas Perumahan,
				Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kawasan
					Permukiman Dan Lingkungan
					Hidup
			Insidensi TB 211 per	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
			100.000	dan Tidak Menular	110001141411
			penduduk	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas
				Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas	Kesehatan
				Kabupaten/Kota	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan	Dinas Kesehatan
				Kesehatan Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan	Dinas
				Kesehatan Usia Lanjut	Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi	Dinas
			Domocrata	Kesehatan	Kesehatan
			Persentase puskesmas	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
			dengan jenis	Verifikasi dan Penilaian	Dinas
			tenaga kesehatan	Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Kesehatan
			sesuai standar	Pendampingan Fasilitas	Dinas
			/ 1 /0	Pelayanan Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan	Kesehatan Dinas
				Fasilitas Kesehatan	Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan	Dinas
				Sumber Daya Manusia	Kesehatan
				Kesehatan Peningkatan Kompetensi dan	Dinas
				Kualifikasi Sumber Daya	Kesehatan
				Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan	Dinas
				Sumber Daya Manusia	Kesehatan
			Danie (Kesehatan	Disco
			Persentase puskesmas	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
	1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat
· ·			Terkait		Daerat
			dengan jenis	Verifikasi dan Penilaian	Dinas
			tenaga kesehatan	Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Kesehatan
			sesuai standar	Pendampingan Fasilitas	Dinas
			71%	Pelayanan Kesehatan	Kesehatan
				Peningkatan Mutu Pelayanan	Dinas
				Fasilitas Kesehatan	Kesehatan
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Dinas
				Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
				Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya	Dinas Kesehatan
				Manusia Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
			keahlian menengah dan tinggi 43 %	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Ketenagakerjaan Dan
				Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan Dan

N		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
0	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
			Terkait	_	Transmigrasi
				Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan
					Dan
				D : 1 + D1: 1	Transmigrasi
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja	Dinas Ketenagakerjaan
				Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Dan
				Migran Indonesia (PMI) Penyediaan Layanan Terpadu	Transmigrasi Dinas
				pada Calon Pekerja Migran	Ketenagakerjaan
					Dan
				Pemberdayaan Pekerja Migran	Transmigrasi Dinas
				Indonesia Purna Penempatan	Ketenagakerjaan
					Dan Transmigrasi
				Koordinasi dan Sinkronisasi	Dinas
				Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah	Ketenagakerjaan Dan
				Kabupaten/Kota	Transmigrasi
				Pendaftaran Perjanjian Kerja	Dinas Vatara releasia ar
				Sama bagi Perusahaan	Ketenagakerjaan Dan
					Transmigrasi
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Dinas Ketenagakerjaan
				Industrial dan Jaminan Sosial	Dan
				Tenaga Kerja serta Pengupahan	Transmigrasi
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok	Dinas Ketenagakerjaan
				Kerja, dan Penutupan	Dan
				Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Transmigrasi
				Kepentingan di 1 (Satu) Daerah	
				Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan	Dinas
				Hubungan Industrial, Mogok	Ketenagakerjaan
				Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	Dan Transmigrasi
				Berakibat/Berdampak pada	Transmigrasi
				Kepentingan di 1 (satu) Daerah	
				Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan	Dinas
				Rekapitulasi Keanggotaan pada	Ketenagakerjaan
				Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Dan Transmigrasi
				Pekerja/Serikat Buruh serta	28
				Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional	Dinas
				Lembaga Kerja Sama Tripartit	Ketenagakerjaan
				Daerah Kabupaten/Kota	Dan Transmigrasi
				Pengembangan Pelaksanaan	Dinas
				Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan
				dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dan Transmigrasi
				Pendaftaran Perjanjian Kerja	Dinas
				Sama bagi Perusahaan	Ketenagakerjaan Dan
					Transmigrasi
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi	Dinas Pariwisata,
				Kreatif Tingkat Dasar	Pemuda dan
					Olah Raga
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam	Dinas Pariwisata,
				Pengembangan Kemitraan	Pemuda dan
				Pariwisata Sertifikasi Kompetensi bagi	Olah Raga Dinas
				Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Pariwisata,
					Pemuda dan

BT	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
					Olah Raga
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%	Bukan Kewengan Kabupaten	-
			Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Atas 9,24 tahun	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Dasar	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Asrama Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas

N	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
0	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat
			Terkait	Laboratorium	Daerat Pendidikan dan
					Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Dinas Pendidikan dan
				,	Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat	Dinas
				Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Pelah ilitari Sadam (Panta	Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B T	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BT	RKP 2023			RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Silabus Muatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas	
				Lokal Pendidikan Dasar	Pendidikan dan Kebudayaan Dinas	
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pelatihan Penyusunan	Pendidikan dan Kebudayaan Dinas	
				Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kompetensi Dasar	Pendidikan dan Kebudayaan Dinas	
				Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

NT		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen	-	-
3	Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan dece job	Penyediaan lapangan usaha	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43 %	-	-
			Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%	-	-
			Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
			Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%	Bukan Kewengan Kabupaten	

BT	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023								
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat						
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	Revitalisasi pariwisata Pengemba	Pertumbuhan Wirausaha 3,50%	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari						
		ngan UMKM		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Dinas Sosial						
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari						
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menenga						
				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menenga						
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menenga			
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menenga						
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan	Dinas Ketenagakerjaan Dan						
									Klaster Kompetensi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Transmigrasi Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	
								Pelayanan antar Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi		
										Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
				Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi						
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan						

B.T	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
					Anak
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perladungan
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Dinas Pangan Perikanan
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan,	Dinas Pangan Perikanan Dinas Pangan
				Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Perikanan
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Dinas Pangan Perikanan
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Dinas Pangan Perikanan
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan
				Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dinas Pangan Perikanan

NT.		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat
			Terkait	Penyediaan Data dan Informasi	Daerat Dinas Pangan
				Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Perikanan
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dinas pertanian
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Dinas pertanian
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Dinas pertanian
				Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Dinas pertanian
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Dinas pertanian
				Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Dinas pertanian
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas pertanian
			Nilai Devisa Pariwisata US\$	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Dinas Pariwisata,
			1,76-6,08 Miliar	Kabupaten/Kota	Pemuda dan Olah Raga
			Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%	Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			triliun	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Pengadaan/Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Pengelolaan Investasi Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan

R T		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023	
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat	
					Olah Raga	
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
				Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
				Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	
5		asi dan riset dan	Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9 %	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		riset dan inovasi	Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6 %	inovasi PDB Industri Pengolahan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

N		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023
0	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data Ke SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NT.	RKP 2023			RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
N o	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat	
				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Peringkat Global Innovation Index 75-80	-	-	
			Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 5,55-6,08%	-	-	
			Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80 %	-	-	
6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap	lah karbon rendah transisi karbon gi (respon	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 %	-	-	
	perubahan iklim)	energi	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW	-	-	
			Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61	-	-	
			perusahaan Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

N	RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023		
0	Fokus RKP	Sasaran	Indikator Terkait	Sub Kegiatan	Perangkat Daerat
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7	Percepatan pembangunan insrastruktur	Penyediaan air brsih dan sanitasi	r Volume tampungan air per kapita 54,50 m3/det	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dinas Pertanian
	lain air bersih, dan sanitasi	Infrastruktur digital		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Dinas Pertanian
		Infrastruktur onektivitas	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
			sanitasi (air	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
			limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman)	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

BT		RKP 2023		RKPD Kabupaten Sijunjun	g Tahun 2023	
N	Fokus RKP	Sasaran	Indikator	Sub Kegiatan	Perangkat	
			Terkait	oud Hoghtun	Daerat	
					Hidup	
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
			akses air minum layak 97,5%	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	
					Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Sekretariat Daerah	
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Masyarakat Pengguna Internet 80,7%	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik- kumulatif 50%	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Dinas Komunikasi dan Informatika	
8	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Fasilitas dasar di IKN	Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A	-	-	
			Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 5.600 Ha	-	-	

4.2.3.5. Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Selanjunya, pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 terdapat 4 program unggulan yaitu: 1) Sumatera Barat Sehat dan Cerdas; 2) Sumatera Barat Religius dan Berbudaya; 3) Sumatera Barat Sejahtera; 4). Sumatera Barat Berkeadilan yang difokuskan pada 25 sasaran program pembangunan. Bentuk dukungan Kabupaten Sijunjung terhadap program unggulan provinsi Sumatera Barat secara konkret dapat dilihat dari program dan kegiatan yang mendukung program unggulan tersebut dalam RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel 4.14.

Dukungan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 Terhadap Program
Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Sumatera Barat	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
0	Sasran Program	manator innerja	Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
	gram Unggulan 1: natera Barat Sehat da:	n Cerdas		
1.	Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam	Persentase kelengkapan sarana dan prasarana dalam pengujian Covid	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
	pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan,		Pengadaan Obat, Vaksin Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan Dinas Kesehaan
	pencegahan dan pengendalian COVID-19.		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehaan
		Persentase SDM yang tersedia dalam pengujian Covid	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehaan
		Jumlah sarana mobile test baru untuk pengujian test covid sederhana yang disediakan (unit)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
		Jumlah puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas) (unit)	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehaan
		Persentase puskesmas yang memiliki sarana pengujian tes covid sederhana (puskesmas)		Dinas Kesehaan
		Jumlah sistem data informasi terkait covid	Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
		yang tersedia (Sistem Pelaporan Corona)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Persentase sistem data informasi terkait covid yang tersedia (persen)		Dinas Kesehaan Dinas Kesehaan
		Jumlah Rumah Sakit layanan Covid 19 Jumlah Rumah Sakit Rujukan Covid 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehaan
		Persentase sasaran vaksinasi Pertama (%) Persentase sasaran vaksinasi Kedua (%)	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehaan
		Persentase masyarakat		

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
		yang telah divaksin menuju <i>Herd Immunity</i> (%)		Dacian
		Jumlah kader tanggap Covid yang terbentuk (orang)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Jumlah kegiatan sosialisasi 3 M yang dilaksanakan (kali)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Sosialisasi, Komunikasi,	Badan
		Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada masyarakat (kali)	Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	penanggulangan Bencana
		Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan terkait dengan pengendalian dan penanganan COVID19 kepada satuan pendidikan aman bencana (kali)	-	-
		Jumlah kabupaten/kota yang dapat dilakukan penegakan dan pengawasan Perda No. 6 Tahun 2020	-	-
2.	Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan	Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA)	-	-
	fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran	Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	-	-
	masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan	Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB)	-	-
	Baru.	Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia	-	-
		Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia	-	-
		Jumlah sanitasi layak di Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi (lokasi)	-	-
3.	Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga & pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru.	Persentase terbangunnya Main Stadium Sikabu (%)	-	-

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
4.	Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.	Jumlah Guru/Tenaga Pendidik di Daerah 3 T yang menerima tunjangan khusus Rp.2,5 juta (orang)	-	-
5.	Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan.	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) USB yang dibangun setiap tahun (unit)	-	-
		Jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) yang diibangun (unit)	-	-
6.	Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen	Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima	Bantuan pendidikan untuk SMA/SMK se Kabupaten Sijunjung melalui BKK Provins Rp 5.600.000.000	Kabupaten Sijunjung
7	Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.	Jumlah ASN Provinsi yang mendapatkan tugas belajar baru pada jenjang pendidikan S1/S2/S3 (orang)	-	-
		Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3 (orang	-	-
8	Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada kebijakan untuk mendukung program unggulan (dokumen)	-	-
Sun	natera Barat Religius			
1.	Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya,	Jumlah galeri dan tempat edukasi yang tersedia di LKAAM (unit) Jumlah galeri dan	-	-
	gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS	tempat edukasi yang tersedia di Bundo Kanduang (unit)	-	-
	SBK dan wisata religius	Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi LKAAM (orang)	-	-
		Jumlah kunjungan masyarakat ke pusat galeri dan edukasi Bundo Kanduang (orang)	_	-

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Siju	njung 2023
0	Sasran Program	J	Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
		Jumlah rata-rata aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat per minggu (diluar pelaksanaan sholat 5 waktu) yang diselenggarakan (kali)	-	-
		Jumlah jenis aktifitas pengajian dan pembelajaran keagamaan di Masjid Raya Sumatera Barat yang diselenggarakan (jenis)	-	-
2.	Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan	Jumlah rumah ibadah yang mendapatkan hibah (rumah ibadah)	-	-
3.	Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan	Jumlah lembaga keagamaan yang mendapatkan hibah (lembaga)	-	-
	Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan	Persentase terbangunnya Gedung Kebudayaan (%)	-	-
	dan wisata IPTEKS (education tourism)	Persentase terbangunnya/rehabilit asi berat terhadap Museum Adityawarman (%)	-	-
		Persentase terbangunnya Gedung IPTEKS (%)	-	-
		Jumlah ruang ramah bermain anak di Museum Adityawarman yang terbangun (lokasi)	-	-
		Jumlah aktifitas seni dan budaya masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Kebudayaan dan Museum Adityawarman (kali) Jumlah ruang ramah	-	-
		bermain anak yang tersedia Perpustakaan Daerah (lokasi) Telah tersedia sejak tahun 2016 dan upaya yang dilakukan dari 2021 sampai dengan 2026 adalah peningkatan mutu ruang ramah bermain anak seperti ketersediaan perlengkapan dan lainlain	-	-
		Jumlah aktifitas/kegiatan literasi di Perpustakaan Daerah yang melibatkan masyarakat umum yang diselenggarakan (kali)	-	-

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023		RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
0	Sasran Program	uu	Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
		Jumlah layanan perpustakaan visual yang tersedia (studio) Jumlah ruang baca terbuka yang tersedia di perpustakaan daerah	-	-
4.	Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan	(ruang) Jumlah seniman yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang) Jumlah budayawan yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang) Jumlah sejarahwan	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Pemberian Penghargaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan
		yang mendapatkan pelatihan/Bimtek (orang)	kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah seniman/budayawan/s ejarahwan yang menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (orang)	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	gram Unggulan 3: natera Barat Sejahtera			
1.	Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian	Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD (%)	Day rouse as a Para vi	Badan Perenca- naan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan BKAD
		Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan (benih/bibit) Jumlah kegiatan pengawasan agroinput dan atau sumber daya kelautan, perikanan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian Dinas Pertanian
		dan hutan yang dilakukan (kali) Jumlah sarana dan prasarana pendukung	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Pertanian
		produksi kehutanan yang disediakan (unit)	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dinas Pertanian
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Dinas Pertanian

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
			Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Dinas Pertanian
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Dinas Pertanian
			Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
			Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
2.	Mewujudkan Sumatera Barat	Jumlah produksi padi (ton)	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
	sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak	Jumlah produksi jagung (ton) Jumlah produksi komoditas ternak	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian
		unggas (ekor) Jumlah produksi kambing (ekor)	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Dinas Pertanian
3.	Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian	Jumlah BUMD Agro yang terbentuk baru (unit usaha) Jumlah BUMD dengan kategori Sehat (unit usaha)	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	
4.	Mencetak 100 ribu millennial entrepreneur dan women entrepreneur serta pelaku ekonomi	Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	kreatif		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Siju	injung 2023
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
5.	Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula	Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang) Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang) Jumlah Lembaga perbankan dan non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga) Jumlah Lembaga non per-bankan yang memberikan pada UMKM dan pengusaha pemula (Lembaga)	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
6.	Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital	Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan peningkatan keahlian dan keterampilan pada penguasaan teknologi informasi guna perluasan jejaring pemasaran (orang) Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi marketing digital (orang)	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
7.	Membangun industri pa-riwisata melalui 1 des- tinasi wisata berkelas du-nia dan 19 destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata unggulan (Kab/Kota)	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
	unggulan	Jumlah destinasi wisata kelas dunia (lokasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
			Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
		Jumlah Pusat Inkubasi Ekonomi Kreatif yang terbangun dan terkelola (unit)	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8.	Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional	Jumlah pusat pertunjukan seni dan budaya (amphiteatre) bertaraf internasional yang terbangun (lokasi) Lokasi Amphiteatre	-	-
		Jumlah aktifitas seni dan budaya di lokasi amphiteatre (kali)	-	-
Sun	gram Unggulan 4: natera Barat Berkeadi			
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Jumlah jaringan irigasi Provinsi yang direhab (meter)	-	-

RKPD Provinsi Sumatera Barat N 2023 Indikator Kinerja		Indikator Kineria	RKPD Kabupaten Siji	ınjung 2023
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
	infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra	Jumlah panjang jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (kilometer)	-	-
	produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan	Jumlah ruas jalan Provinsi yang terbangun baru menuju Kawasan sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan (ruas)	-	-
		Jumlah Pelabuhan yang beroperasional dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan (Pelabuhan)	-	-
2.	Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara)	Jumlah panjang jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (kilometer)	-	-
	untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang,	Jumlah akses jalan provinsi yang terbangun baru pada daerah yang belum berkembang, terisolir dan perbatasan (ruas)	-	-
		Jumlah integrasi antar moda yang terbangun (jumlah):	-	-
		Jumlah dokumen perencananaan lingkungan Pelabuhan yang ditetapkan (dokumen)	-	-
3.	Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang	Jumlah kelompok masya-rakat tangguh bencana yang terbentuk	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas	baru setiap tahunnya (kelompok) Jumlah nagari/desa	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Komumtas	siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya (nagari/desa)	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		tanumiya (nagan/ ucsa)	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Pelayanan Pencegahan dan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan
			Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana	Penanggulangan Bencana Daerah Badan
			Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan
4.	Optimalisasi pengelolaan	Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Payakumbuh	Kabupaten/Kota -	Bencana Daerah -

N	RKPD Provinsi Sumatera Barat 2023	Indikator Kinerja	RKPD Kabupaten Sijunjung 2023	
0	Sasran Program		Kegiatan/Sub Kegitan	Perangkat Daerah
	sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy),dan	Jumlah energi yang dihasilkan oleh TPA Regional Solok Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang	- -	-
	tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	terlaksana (%) Persentase Bioteknogi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Solok yang terlaksana (%)	-	-
		Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot (nagari/desa)	-	-
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	-	-
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi (Kabupaten/Kota)	-	-
5.	Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public	Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	berbasis elektronik (e-government).	melaksanakan pelayanan kepada masyarakat (Unit)		

4.3. Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu indikator penting untuk meningkatkan daya saing daerah, karena mampu mendorong peningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemampuan daya saing daerah juga akan berpengaruh besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kesadaran pentingnya inovasi saat ini ditandai dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Pelaksanaan inovasi daerah menjadi tolah ukur oleh pemerintah pusat untuk mengukur daya saing daerah dan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pemberian dana insentif kepada daerah. Kementerian dan Lembaga melakukan berbagai penilaian inovasi bagi daerah untuk mengukur daya saing, diantaranya:

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2019 telah melakukan berbagai upaya termasuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, dalam 3 bentuk inovasi yaitu : 1). Tata Kelola Pemerintahan, 2). Pelayanan Publik dan 3). Inovasi dalam bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Sampai dengan Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah berhasil melakukan pemetaan terhadap inovasi sejumlah 206 inovasi dari seluruh OPD dan Kecamatan.

Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah di atas, maka dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2021-2026 telah ditetapkan salah satu sasaran meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas. Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Sijunjung telah dilaksanakan dengan berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Sosialisasi Inovasi Daerah, Penandatanganan Kesepakatan Perangkat Daerah dengan Bupati dalam rangka menciptakan, melahirkan dan menerapkan inovasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing, bimbingan teknis Tenaga Operator Inovasi Perangkat Daerah, Zoom Meeting dengan Narasumber dari BPP Kemendagri dan Pendampingan oleh Tim Sekretariat Inovasi Daerah terhadap Tenaga Operator Inovasi OPD dalam rangka pelaksanaan Penginputan Data/Indeks Inovasi Daerah ke Aplikasi BPP Kemendagri. Dari hasil pemetaan inovasi yang telah diinput dalam Aplikasi BPP Kemendagri untuk Tahun 2020 berhasil memetakan sebanyak 65 Inovasi dengan indeks skor sebesar 1.274 dengan kategori "Daerah Sangat Inovatif" (Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 tertanggal 16 Desember 2020).

Selanjutnya untuk Tahun 2021 Kabupaten Sijunjung telah memetakan Inovasi Daerah sebanyak 137 Inovasi dengan indeks skor sebesar 38,13 dengan kategori "Daerah Inovatif" (Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 tertanggal 23 Desember 2021). Proyeksi pencapaian hasil Indeks skor Inovasi Daerah Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar 2500 atau diatas 60,00 dengan kategori "Daerah sangat Inovatif" sesuai dengan penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2021).

Pada tahun 2023, sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Sijunjung "Peningkatan Kualitas Daya Saing Ekonomi Daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas", dengan mepertimbangkan tema RKPD Provinsi Sumatea Barat dan RKP Tahun 2023, maka penerapan dan pegembangan inovasi daerah di Kabupaten ijunjung tahun 2023 akan difokuskan pada 3 bidang yaitu: 1). bidang ekonomi, 2) bidang sumber daya manusia dan 3) bidang pelayanan publik. Penerapan dan pengembangan inovasi daerah tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Penerapan dan Pengembangan Inovasi Daerah di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2023

No.	Bidang	Nama Inovasi	Manfaat	Perangkat Daerah
I	Ekonomi	Mobile Resto	Meningkatkan omset rumah makan/restoran/kafe melalui pemasaran produk berbasis aplikasi dalam upaya peningkatan pendapatan usaha mikro	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Simantan (Sistem Aplikasi Peminjaman Alat Mesin Pertanian)	Penerapan pemakaian Alsintan oleh kelompok tani/petani melalui pengantrian pinjaman berbasis aplikasi dalam rangka peningkatan produksi	Dinas Pertanian
		"one village one destination"	Memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun destinasi wisata setiap	Dinas Parpora

No.	Bidang	Nama Inovasi	Manfaat	Perangkat Daerah
			Nagari/Desa	
II	Sumber Daya Manusia	PomBenSiM (Program Pembelajaran Sinergi Masyarakat)	Upaya penyelenggaraan pendidikan untuk warga masyarakat yang berusia 21 s/d 45 tahun yang belum menamatkan wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Parade Lansia	Keikutsertaan Lansia dalam upaya penurunan angka stunting sedini mungkin melalui proses nifas & kelahiran untuk pasangan muda	Dinas Kesehatan
		Bulir Tanjung (Buku bergulir Pustaka Kab. Sijunjung)	Memperrmudah masyarakat dalam mendapatkan buku koleksi perpustakaan Kab. Sijunjung secara berkesinambungan.	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
III	Pelayanan Publik	Bajapuik (Bus Antar Jemput Pasien untuk Internal Kabupaten)	Memberikan kemudahan pasien yang tidak sanggup untuk datang secara langsung berobat atau pasien yang dirawat jalan melalui antar jemput	RSUD
		Yanling Pesek (Pelayanan Keliling KTP kepada Pemula ke Sekolah SLTA sederajat)	Memberikan kemudahan bagi siswa SLTA sederajat dalam memperoleh e-KTP secara cepat & akurat	Dinas Kependudukan & Capil
		Pedusia (Perekaman Penduduk Lanjut Usia)	Mempermudah penduduk lanjut usia dalam memperoleh e-KTP secara cepat & akurat	Dinas Kependudukan & Capil



BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program dan kegiatan beserta indikator dan target yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2023, didasarkan pada Sasaran, Program/kegiatan prioritas RKPD Tahun 2023 yang telah dibahas dalam Bab 4, dengan merujuk kepada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan prioritas daerah tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan dengan berbagai pendekatan. Program dan kegiatan prioritas pembangunan merupakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah guna mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan, prioritas pembangunan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah. Hal tersebut dilakukan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah guna melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan kebutuhan dasar yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024. Dalam matriks ini juga digambarkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana/pagu indikatif dan sumber dana serta catatan penting untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Sedangkan untuk prakiraan maju, rencana tahun 2024 hanya menampilkan target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. Program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah diperoleh dari usulan rencana kerja melalui Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah, kemudian usulan tersebut dibahas dan dimatangkan oleh tim penyusun yang melibatkan stakeholders terkait dalam beberapa tahapan antara lain pada Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, verifikasi Renja Perangkat Daerah serta Musrenbang RKPD baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan demikian program, kegiatan dan sub kegiatan ini diharapkan telah sinkron antara usulan masyarakat yang disampaikan dalam Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 yang dirumuskan.

Sementara, anggaran Perangkat Daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi

baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Pagu indikatif Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung dalam RKPD tahun 2023 sebesar Rp706,888,345,351.- yang digunakan untuk pembiayaan 50 bidang, 351 program, 971 kegiatan dan 3,490 sub kegiatan. Pagu indikatif ini termasuk untuk pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rp34.146.127.831 dengan 29 kegiatan dan 251 sub kegiatan (Lampiran I), penangganan stuting Rp21,717,059,000.- dengan 22 kegiatan dan 133 sub kegiatan (Lampiran II), Penanggulangan Kemiskinan dengan pagu indikatif Rp2,770,084,372,- dengan 28 kegiatan dAN 76 sub kegiatan (Lampiran III) dan dukungan program/kegiatan Kabupaten Sijunjung terhadap Progran Unggulan Provinsi Sumatera Barat Rp14,800,499,100 dengan 13 kegiatan dan 22 sub kegiatan (Lampiran IV).

Sumber pembiayaan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut bersumber dari APBD I, APBD II, DAK/APBN dan pembiayaan dari Tugas Pembantuan. Jumlah bidang, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif berdasarkan Perangkat Daerah dan berdasarkan urusan seperti terlihat pada Tebel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut.

Tabe 5.1

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pagu Indikatif
Perangkat Daerah Tahun 2023

	I Clangi	zat Da	cian ia	nun 202	<u> </u>	
No	Perangkat Daerah	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	14	43	361	211,064,705,592
2	DINAS KESEHATAN	1	10	43	184	73,325,070,858
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1	5	14	28	53,119,325,400
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	11	24	85	45,935,388,132
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3	31	55	129	11,402,129,427
6	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1	6	29	117	9,782,901,964
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	4	24	123	4,153,977,688
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	21	51	129	4,755,610,710
9	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	2	16	48	147	4,884,461,142
10	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	2	18	43	102	5,151,535,827
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	10	38	140	4,241,875,930

No	Perangkat Daerah	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	1	10	24	143	5,703,644,490
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	6	25	155	3,479,059,012
14	DINAS PERHUBUNGAN	1	2	14	31	11,262,757,896
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5	12	50	7,525,129,547
16	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	3	30	50	117	8,003,252,057
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	12	26	82	4,682,964,477
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	11	35	128	3,794,961,166
19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	2	16	41	123	8,054,016,896
20	DINAS PERTANIAN	1	14	49	188	19,646,019,715
21	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	19	61	29,112,144,559
22	SEKRETARIAT DPRD	1	2	16	52	32,003,530,088
23	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2	8	34	146	7,329,472,829
24	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	4	15	104	92,067,942,099
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	6	26	76	20,001,097,466
26	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	11	34	7,003,344,546
27	KECAMATAN KAMANG BARU	1	6	15	40	1,940,432,502
28	KECAMATAN TANJUNG GADANG	1	4	9	24	2,079,147,774
29	KECAMATAN LUBUK TAROK	1	6	12	31	1,788,819,673
30	KECAMATAN SIJUNJUNG	1	5	11	35	2,432,405,773
31	KECAMATAN IV NAGARI	1	6	12	32	1,618,905,920
32	KECAMATAN KOTO VII	1	11	23	77	1,916,381,492
33	KECAMATAN SUMPUR KUDUS	1	12	30	90	2,224,018,160
34	KECAMATAN KUPITAN	1	11	26	70	1,950,434,883
35	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	12	24	56	3,451,483,270
Juml	ah	50	351	973	3,490	706,888,348,960

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu muikatn	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		rarget	Fagu Indikatii	Jawab
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						210,327,705,592							334,499,315,481	
1	1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	197,818,072,642						100 Persen	221,661,365,481	
1	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	95 Persen	408,192,300						95 Persen	260,000,000	
1	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				3 dokumen	408,192,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 dokumen	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	1 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	1 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA_SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	195,667,493,644						100 Persen	217,617,845,481	
1	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1953 orang	195,517,893,644		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1953 orang	217,287,845,481	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				984 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	984 dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan							0 Laporan		

						Target	Realisasi	Postdone Constant		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		l	Ι	Registan/ Sub Registan	•	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu indikatii	Lokası		Nasional	Daerah 4. Peningkatan	Sasaran	Target	Pagu Indikatii	Jawab DINAS
1	1 1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	20,000,000	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 dokumen	149,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 dokumen	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	15,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen							1 dokumen		
1	1 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	217,890,250						100 Persen	305,000,000	
1	1 1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah da Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	0				4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 kegiatan	169,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 kegiatan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
1	1 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 dokumen	47,890,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan barang milik daerah				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	170,000,000	
1	1 1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Laporan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04	5	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Laporan	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.04	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 V - 5

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri- Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawah
1	1 1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RPJMD	2021		0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Laporan	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	130,000,000			berdaya Samg			100 Persen	690,000,000	
1	1 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				120 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	120 Paket	70,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket							0 Paket		
1	1 1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				30 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	30 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan				80 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	80 Orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				7 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	7 Laporan	80,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	8	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan				40 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	40 Orang	180,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang							4 Orang		
1	1 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				340 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	340 Orang	65,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	35 Orang	55,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	565,319,800						100 Persen	1,225,000,000	
1	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,999,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	180,188,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RPJMD	2021		1 Paket	106,384,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				70 Laporan	14,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	70 Laporan	30,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	248,748,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Laporan	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berhasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	35,130,500						100 Persen	150,000,000	
1	1 1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	25 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	35,130,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	505,025,148						100 Persen	593,520,000	
1	1 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				15 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 Laporan	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	169,901,948		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Laporan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prohimon Comoion		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				neglatan, oub neglatan		RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu muikatn	LORASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Duourun	rarget	ragu muikam	Jawab
1	1 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Laporan	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	335,123,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	13 Laporan	373,520,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	289,021,000						100 Persen	650,000,000	
1	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				37 Unit	189,177,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	37 Unit	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	69,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
1	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,884,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	30 Unit	95,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SD	sekolah		sekolah	97 sekolah	12,449,632,950						97 sekolah	111,701,450,000	
					Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SMP	sekolah		sekolah	7 sekolah							7 sekolah		
					Jumlah sekolah terakreditasi jenjang PAUD	lembaga		lembaga	296 lembaga							296 lembaga		
					Jumlah sekolah terakreditasi jenjang	sekolah		sekolah	209 sekolah							209 sekolah		
					SD Jumlah sekolah terakreditasi jenjang	sekolah		sekolah	54 sekolah							54 sekolah		
	\vdash				SMP Jumlah sekolah yang memenuhi SNP	sekolah		sekolah	82 sekolah							82 sekolah		
					jenjang SD Jumlah sekolah yang memenuhi SNP													
	\vdash		-		jenjang SMP Persentase kondisi bangunan sekolah	sekolah		sekolah	17 sekolah							17 sekolah		
					baik PAUD Persentase kondisi bangunan sekolah	Persen		Persen	82.5 Persen							82.5 Persen		
					baik SD	Persen		Persen	75 Persen							75 Persen		
					Persentase kondisi bangunan sekolah baik SMP	Persen		Persen	80 Persen							80 Persen		
					Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Persen		Persen	40 Persen							40 Persen		
					Persentase peningkatan sarpras pendidikan non formal/kesetaraan	Persen		Persen	65 Persen							65 Persen		
					Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SD	Persen		Persen	35 Persen							35 Persen		
					Persentase siswa dengan nilai	Persen		Persen	80 Persen							80 Persen		
	tt	+			karakter minimal baik jenjang SMP Persentase Siswa dengan nilai													
					kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	Persen		Persen	35 Persen							35 Persen		
					Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	Persen		Persen	75 Persen							75 Persen		
					Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SD	Persen		Persen	35 Persen							35 Persen		
					Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum jenjang SMP	Persen		Persen	75 Persen							75 Persen		
					Rasio Sekolah terhadap jumlah usia siswa sekolah PAUD	rasio		rasio	01:23 rasio							01:23 rasio		

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 V - 8

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ke	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П	Τ	П		Rasio Sekolah terhadap jumlah usia	rasio	2021	rasio	1:142 rasio				Nasionai	Datian		1:142 rasio		
	\vdash				siswa sekolah SD Rasio Sekolah terhadap jumlah usia	rasio		rasio	1:200 rasio							1:200 rasio		
<u> </u>				Pengelolaan Pendidikan Sekolah	siswa sekolah SMP	14310		14010	1.200 14810							1.200 18310		
	1 2	2.01		Dasar						3,986,185,000			Meningkatkan				53,059,250,000	DINAS
1	1 2	2.01	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	0	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang							1 Ruang		
1	1 2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				4 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Ruang	310,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	390,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	175,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 Paket	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	RPJMD	2021		3600 Unit	783,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3600 Unit	1,110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	18	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				205 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	205 Unit	615,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				205 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	205 Unit	1,025,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Unit	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				272 Peserta Didik	111,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	272 Peserta Didik	178,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				0 Peserta Didik							0 Peserta Didik		
1	1 2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				58 Paket							58 Paket		
1	1 2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				211 Satuan Pendidikan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				211 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				8 Peserta Didik	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	8 Peserta Didik	936,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2230 Orang	2,605,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2230 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	2,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 orang							60 orang		
1	1 2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				209 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	209 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				211 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	33,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				203 Orang							203 Orang		
1	1 2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				10 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Ruang	760,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	I	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 2	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	RPJMD	2021		0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.01	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 Unit	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						2,422,180,000							27,610,900,000	
1	1 2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	760,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang							1 Ruang		
1	1 2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				3 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Ruang	720,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	10	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	11	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				6 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	6 Unit	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	ŀ	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 2	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Keschatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	RPJMD	2021		0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	4. Per Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, uda dan raga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				0 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	1 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, uda dan raga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, uda dan raga	0	4 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, uda dan raga	0	6 Paket	432,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				48 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, uda dan raga	0	48 Paket	144,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				48 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	48 Paket	144,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				2000 Paket	534,372,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	2000 Paket	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				48 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	48 Unit	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				48 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	48 Unit	480,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				12 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	12 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	100 Peserta Didik	262,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik				7 Buku	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kuali	ningkatan itas Pendidikan, ida dan raga	0	7 Buku	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 2	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	RPJMD	2021		350 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	350 Paket	160,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	17 Paket	765,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				1200 Peserta Didik	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1200 Peserta Didik	1,650,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				15 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 Satuan Pendidikan	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta Didik	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	120 Peserta Didik	420,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				125 Orang	1,465,808,000				4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	125 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				528 Orang							528 Orang		
1	1 2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				54 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				54 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Satuan Pendidikan	10,573,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				54 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.02	46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						5,099,160,600							24,212,300,000	
1	1 2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				16 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		16 Unit	3,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				17 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		17 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan				25 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	1 2	2.03	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	RPJMD	2021	2022	25 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN
1	1 2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				21 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Paket	250,000,000	KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia				28 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		28 Paket	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				32 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1163 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1163 Paket	117,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				20 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		20 Peserta Didik	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				32 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				306 Peserta Didik							306 Peserta Didik		
1	1 2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				3 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		3 Satuan Pendidikan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1340 Orang	5,009,160,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1340 Orang	5,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Orang	875,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang							100 Orang		
1	1 2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				21 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Satuan Pendidikan	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				364 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		364 Satuan Pendidikan	7,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						942,107,350							6,819,000,000	
1	1 2	2.04	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				11 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	11 Unit	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 2	2.04	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi			C	apaian Kineria	a dan Kerangka Per	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ke	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun						oritas	Kelompok			Penanggung
				Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1 1	. 2	2.04	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				5 Paket							5 Paket		
1 1	. 2	2.04	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				5 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 Paket	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				325 Paket	52,492,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	325 Paket	419,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	100 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				4 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Paket	45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	681,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Peserta Didik	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				600 Peserta							600 Peserta		
1 1	. 2	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				12 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 Satuan Pendidikan	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				145 Orang	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	145 Orang	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	89,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				70 Orang							70 Orang		
1 1	. 2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				10 Satuan Pendidikan	23,614,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Satuan Pendidikan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 Satuan Pendidikan	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2.04	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase dokumen kurikulum lokal yang ditetapkan	Persen		Persen	100 Persen	0				1		100 Persen	722,500,000	
1 1	3	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	dokume		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	532,500,000	
		1		т спиникан глазаГ	mudtan Lokai	n			l .	1		l .		1	1	1	1	l

						Target	Realisasi	P-11 01			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Tames 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	oritas	Kelompok Sasaran	Toward	Pagu Indikatif	Penanggung
				Regiatan/ Sub Regiatan	Regiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1	1 3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.01	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia				1 Buku	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Buku	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.01	4	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				30 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	30 Orang	122,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	dokume n		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	190,000,000	
					Jumlah Penetapan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	dokume n		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
1	1 3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.02	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 3	2.02	3	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia				20 Buku	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	20 Buku	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK bersertifikat Profesi	Persen		Persen	45 Persen	60,000,000						45 Persen	232,000,000	
					Rasio Guru Terhadap Murid	rasio		rasio	1:20 rasio							1:20 rasio		
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas	Rasio Guru Terhadap Rombel	rasio		rasio	1:1 rasio							1:1 rasio		
1	1 4	2.01		Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Kebutuhan PTK	Persen		Persen	70 Persen	60,000,000						70 Persen	232,000,000	
1	1 4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	232,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Laporan	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan/ lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dikeluarkan izin operasionalnya	satuan pendidik an		satuan pendidikan	10 satuan pendidikan	0						10 satuan pendidikan	182,000,000	
1	1 5	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah satuan pendidikan dasar swasta yang diterbitkan izinnya	satuan pendidik an		satuan pendidikan	10 satuan pendidikan	0						10 satuan pendidikan	70,000,000	
1	1 5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10 Dokumen							10 Dokumen		
1	1 5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Dokumen	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 5	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga PAUD dan Non Formal yang diterbitkan izinnya	satuan pendidik an		satuan pendidikan	4 satuan pendidikan	0						4 satuan pendidikan	112,000,000	
1	1 5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	uii			4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Dokumen	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas T	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	1 5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Maswarakan	RPJMD	2021	2022	24 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	24 Dokumen	26,000,000	Jawab DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1 5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				24 Dokumen	0				4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	24 Dokumen	26,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						737,000,000							3,720,000,000	
2	# 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya yang dikelola	Persen		Persen	88,58 Persen	100,000,000						88,58 Persen	920,000,000	
2	# 2	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						0							470,000,000	
2	# 2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	100 Orang	470,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	group		group	15 group	100,000,000						15 group	150,000,000	
2	# 2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				4 Objek	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Objek	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Laporan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				20 Sertifikat	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	20 Sertifikat	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	Persen		Persen	40 Persen	0						40 Persen	300,000,000	
2	# 2	2.03	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Objek	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.03	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				50 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	50 Orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 2	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				50 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	50 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Lembaga Seni budaya yang dikembangkan	lembaga		lembaga	8 lembaga	185,000,000						8 lembaga	700,000,000	
2	# 3	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang dibina	lembaga		lembaga	2 lembaga	185,000,000						2 lembaga	700,000,000	
2	# 3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				200 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	200 Orang	400,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi				20 Sertifikat	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	20 Sertifikat	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				40 Lembaga	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	40 Lembaga	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 4			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah yang didokumentasikan	Persen		Persen	60 Persen	95,000,000						60 Persen	750,000,000	
2	# 4	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sejarah Lokal di bina	buah		buah	1 buah	95,000,000						1 buah	750,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal di berdayakan	RPJMD	2021	2022	40 orang	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	40 orang	200,000,000	Jawab DINAS PENDIDIKAN DAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				0 Orang					Olamaga		0 Orang		KEBUDAYAAN
2	# 4	2.01	2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Unit	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 4	2.01	3	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	# 5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	cagar budaya		cagar budaya	343 cagar budaya	357,000,000						343 cagar budaya	1,350,000,000	
2	# 5	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	cagar budaya		cagar budaya	25 cagar budaya	80,000,000						25 cagar budaya	550,000,000	
2	# 5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang didaftarkan	budaya			30 cagar budaya	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	30 cagar budaya	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				0 Objek							0 Objek		
2	# 5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan				25 cagar budaya	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	25 cagar budaya	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				0 Objek							0 Objek		
2	# 5	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	cagar budaya		cagar budaya	344 cagar budaya	277,000,000						344 cagar budaya	600,000,000	
2	# 5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi				131 cagar budaya	277,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	131 cagar budaya	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				0 Objek							0 Objek		
2	# 5	2.02	2	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan				15 cagar budaya	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 cagar budaya	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				0 Objek							0 Objek		
2	# 5	2.02	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan				60 cagar budaya	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	60 cagar budaya	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek							0 Objek		
2	# 5	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	izin		izin	1 izin	0						1 izin	200,000,000	
2	# 5	2.03	1	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Objek	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				200 orang							200 orang		
2	# 5	2.03	2	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang di Standarisasi dan Sertifikasi sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				20 orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	20 orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						56,404,821,434							88,778,872,621	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kab/ kota	Persen		Persen	100 Persen	42,299,119,970						100 Persen	71,254,240,127	
1	2 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangka	Persen		Persen	100 Persen	9,996,300						100 Persen	30,838,471	
1	2 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	4,998,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Dokumen	18,985,916	DINAS KESEHATAN

1 2 1 1 2 1 1 2 1	2.01 2.02 2.02	6	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun					Prio	-14	Kelompok			Penanggung
1 2 1 1 2 1 1 2 1	2.02	6	Capaian Kinerja dan Ikhtisar		RPJMD		2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1 2 1 1 2 1 1 2 1	2.02	6	Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Perangkat Daerah		2021	2022	2 Dokumen				Nasional	Daerah		2 Dokumen		Jawab
1 2 1		_	Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,997,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	11,852,555	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	40,914,392,025						100 Persen	69,059,523,239	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				580 Orang/bul an	40,888,492,025		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si	580 Orang/bul an	68,880,777,432	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/				2 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si	2 Laporan	153,745,807	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	20,900,000					Administra si	18 Laporan	25,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100,356,250						100 Persen	129,945,796	
1 2 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	50,356,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si pegawai	81 Paket	65,884,500	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				65 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si pegawai	65 Orang	64,061,296	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	457,440,219						100 Persen	1,055,321,311	
1 2 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5,493,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si umum	5 Paket	6,649,503	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	35,540,600		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Administra si umum	12 Paket	46,206,597	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	74,997,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si umum	10 Paket	390,811,042	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	19,921,229		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si umum	12 Paket	33,234,338	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	21,474,990		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si umum	12 Laporan	95,749,851	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	300,012,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Administra si umum	36 Laporan	482,669,980	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						260,000,000							500,000,000	
1 2 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1 Unit	500,000,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	to the transfer of the transfe					319,347,176		Dana Transfer					116,893,000	1
1 2 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	150,007,176		Umum-Dana Alokasi Umum				48 Laporan	102,252,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	169,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	14,641,000	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	237,588,000						100 Persen	361,718,310	
1 2 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Kendaraan Dinas				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Barang Daerah	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.09	2	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	130,828,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan	Barang Daerah	8 Unit	222,875,950	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	47,000,000		Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Barang Daerah	0 Unit	51,054,924	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit							55 Unit		Ļ
1 2 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	29,760,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Daerah	1 Unit	87,787,436	DINAS KESEHATAN
1 2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Cakupan pelayanan BLUD puskesmas dan Labkesda	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	0	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priorit		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RPJMD	2021		14 Unit Kerja	0		Pendapatan dari BLUD	Nasional	Daerah	0	14 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya	Persen		Persen	100 Persen	13,325,095,169						100 Persen	16,760,632,494	
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan masyarakat Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	persen		persen	100 persen							100 persen		
1	2 2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Persen		Persen	100 Persen	1,806,721,409						100 Persen	3,286,900,424	
1	2 2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				5 Unit	322,133,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	5 Unit	353,944,128	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dikembangkan				1 unit	427,853,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	1 unit	761,025,153	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit		
1	2 2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnay yang dikembangkan				2 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	2 unit	131,751,325	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Unit		
1	2 2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	3 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				5 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	500,780,659		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				15 Unit	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	15 Unit	131,751,325	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		,		g,g		RPJMD	2021	2022	Target 2025	r agu munatn	LUKASI		Nasional	Daerah		raiget	ragu munatm	Jawab
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				100 Unit	179,954,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	100 Unit	815,956,381	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				5 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	5 Paket	566,239,917	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				4 Paket	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	4 Paket	226,232,195	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	2 2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	4 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				15 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN
					Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan				100 Persen			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100 Persen		
1	2 2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				100 Unit	226,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	100 Unit	300,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.01	21	Distribusi Alat Keschatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Keschatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Keschatan Lainnya				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
					Persentase Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya				100 Persen			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100 Persen		
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	11,159,217,650						100 Persen	8,969,322,727	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5679 Orang	125,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	5679 Orang	34,298,136	DINAS KESEHATAN
							_					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5421 Orang	125,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	5421 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan		Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4957 Orang	92,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	4957 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25371 Orang	111,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	25371 Orang	513,371,966	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41694 Orang	180,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	41694 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				165362 Orang	75,001,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	165362 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21225 Orang	145,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	21225 Orang	200,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44152 Orang	75,000,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	44152 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				450 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	450 Orang	60,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				530 Orang	65,002,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	530 Orang	100,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2855 Orang	44,228,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Masyarakat	2855 Orang	70,000,000	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022		•		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional	Daerah			-	Jawab
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3558 Orang	19,005,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	3558 Orang	50,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Keschatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	126,103,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	732,355,367	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				12 Dokumen	124,131,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	1,604,347,362	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				52 Dokumen	127,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	52 Dokumen	59,535,561	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	31,302,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	24 Dokumen	11,461,456	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	174,276,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	175,276,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	39,384,909	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				12 Dokumen	29,999,900		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	3,876,592	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	51,290,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	0 Dokumen	17,054,039	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	RPJMD	2021		52 Dokumen			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional	Daerah		52 Dokumen		Jawab
1	2 2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4584 Orang			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				4584 Orang		
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				24 Dokumen	67,275,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	24 Dokumen	93,336,036	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				14 Dokumen	47,005,100		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	14 Dokumen	323,607,515	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	7,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	3,813,897,658	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				200 Orang	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				0 Paket	19,132,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	0 Paket	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				12 Paket		
1	2 2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				7 Dokumen	200,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	7 Dokumen	78,922,637	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	775,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				Regiatali/ Sub Regiatali	Negratan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatii	Jawab
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				36 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	36 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	345,414,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	12 Dokumen	400,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Keschatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				0 Unit	67,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	0 Unit	318,893,972	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				13 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				13 Unit		
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	75,438,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Laporan	8,057,895	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				52 Dokumen	82,314,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	52 Dokumen	50,744,806	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				744 Orang	5,006,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	744 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan					
1	2 2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	5,008,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	20 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				252275 Orang	5,008,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat	252275 Orang	15,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Presentase Sarana pelayanan kesehatan yang yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persen		Persen	100 Persen	241,156,100						100 Persen	264,933,096	
1	2 2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				12 Dokumen	82,591,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	12 Dokumen	150,825,042	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	56,907,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	12 Dokumen	69,095,413	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				5 Unit	101,658,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	5 Unit	45,012,641	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	118,000,010						100 Persen	4,239,476,247	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	ı dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	- unget 2020	- ugu mumucii	2011102	-amou bulla	Nasional	Daerah		- ungot	Jugu mumumi	Jawab
1	2 2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				2 Unit	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.04	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Keschatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan keschatan				14 Unit	38,000,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	14 Unit	4,239,476,247	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana Kesehatan	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen		Persen	15 Persen	328,968,295						15 Persen	348,000,000	
1	2 3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki izin praktek sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	46,000,000						100 Persen	0	
1	2 3	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				240 Dokumen	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Kesehatan	240 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				240 Dokumen	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Kesehatan	240 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan tenaga kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	23,000,000						100 Persen	0	
1	2 3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				15 Dokumen	23,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Kesehatan	15 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang dilatih sesuai kompetensi	Persen		Persen	100 Persen	259,968,295						100 Persen	348,000,000	
1	2 3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	259,968,295		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Tenaga Kesehatan	40 Orang	348,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2 4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esesnsial sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	141,638,000						100 Persen	116,000,000	
1	2 4	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Keschatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan	Persen		Persen	100 Persen	70,138,000						100 Persen	0	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	2 4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	RPJMD	2021	2022	12 Dokumen	70,138,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah	Masyarakat	12 Dokumen	0	Jawab DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 4	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat. Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Dawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Liin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				86 Sarana	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	86 Sarana	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 4	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase rekomendasi yang diberikan untuk penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persen		Persen	100 Persen	23,500,000						100 Persen	116,000,000	
1	2 4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Iżin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				4 Dokumen	23,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	4 Dokumen	116,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2 4	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Kestoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang diberikan	Persen		Persen	100 Persen	24,000,000						100 Persen	0	
1	2 4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitas Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 4	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						24,000,000							0	
1	2 4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				49 Unit	24,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				49 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	Persen		Persen	100 Persen	310,000,000						100 Persen	300,000,000	
1	2 5	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang diakvokasi pembentukan nagari siaga aktif	Nagari		Nagari	4 Nagari	10,000,000						4 Nagari	300,000,000	
1	2 5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nagari	12 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam	RPJMD	2021	2022	Target 2025	ragu munacm	LURASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		raiget	ragu inuixatii	Jawab
1	2 5	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	0	
1	2 5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				26 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	26 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	150,000,000						100 Persen	0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						412,309,920							466,619,920	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						216,619,920							216,619,920	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						216,619,920							216,619,920	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	216,619,920		Pendapatan dari BLUD		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1 Unit Kerja	216,619,920	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						195,690,000							250,000,000	
1	2 2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 2	2.01	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						195,690,000							250,000,000	
1	2 2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	195,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	250,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,100,958,264							1,100,958,264	
1	2 1	İ		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,072,082,264							1,072,082,264	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,072,082,264				<u> </u>	<u> </u>		1,072,082,264	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,072,082,264		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	1,072,082,264	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN		RPJMD	2021	2022		28,876,000			Nasional	Daerah			28,876,000	Jawab
				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan														
1	2 2	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28,876,000							28,876,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				390 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		390 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				373 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masvarakat 		373 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					ocodii omidii							Dana Transfer		Mayaraka				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
	-			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang							Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	3	Bayi Baru Lahir	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		341 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1745 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		1745 Orang	0	DINAS KESEHATAN
				Danta	r ciayanan kesenatan sesuai standar							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				RESERVAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
,		2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan				2867 Orang	0		Dana Transfer Khusus-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		2867 Orang	0	DINAS
1		2.02	3	pada Usia Pendidikan Dasar	Kesehatan Sesuai Standar				2007 Orang	0		Alokasi Khusus Non Fisik		Masyarakat		2007 Orang	Ü	KESEHATAN
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1498 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1498 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang							Dana Transfer Khusus-Dana		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	8	Penderita Hipertensi	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3035 Orang	0		Alokasi Khusus Non Fisik		Derajat Kesehatan Masyarakat		3035 Orang	0	KESEHATAN
				December Delevere Versleyer	Jumlah Penderita Diabetes Melitus							Dana Transfer Khusus-Dana		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				80 Orang	0		Alokasi Khusus Non Fisik		Derajat Kesehatan Masyarakat		80 Orang	0	KESEHATAN
				Possed de la Pala de la Caracteria de la	Jumlah Orang yang Mendapatkan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				36 Orang	0		Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Derajat Kesehatan Masyarakat		36 Orang	0	KESEHATAN
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan				256 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		256 Orang	0	DINAS KESEHATAN
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pelayanan Sesuai Standar						<u> </u>	Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan				336 Orang	0				5. Peningkatan Derajat Kesehatan		336 Orang	0	DINAS KESEHATAN
	-			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk							Dana Transfer		Masyarakat 5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	13	bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
			1	Gizi Masyarakat	Masyarakat							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П		Ι			RPJMD	2021					Dana Transfer	Nasional	Daerah				Jawab
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				Kerja dan Olahi aga	Olahraga							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				RESENATAN
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS
		2.02		Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen			Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen		KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	18	Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		10 Orang	0	DINAS
				Jiwa dan NAPZA	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					•		Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	25	Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
				D	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial							Non Fisik		5 P				
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
		ļ		Laboratorium Rujukan/Nasional	Didistribusikan							Alokasi Umum		Masyarakat				RESERVATAIN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
					Jumlah Dokumen Operasional							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	28,876,000		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	28,876,000	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
		-		Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah Laporan Hasil Investigasi		 				-				1			
1	2 2	2.02	36	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
		 		Massal)	Pemberian Obat Massal)							Alokasi Umum		Masyarakat				RESERVAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	\vdash	 		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan		 					Dana Transfer		5. Peningkatan	 	-		DINAS
1	2 2	2.02	37	Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
	\vdash	1		PROGRAM PENINGKATAN			 				1	Non Fisik		-	 			
1	2 3			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
		!	1 1	MANUSIA KESEHATAN		<u> </u>		l	l .		1	<u> </u>	ı	1	1	ı	1	l .

						Target	Realisasi	P1 G1			apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	m		Lokasi			oritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
					Regiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					(rasyanics)							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	3					
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0		Non Fisik					0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah						0							0	
1	2 5	2.03	1	Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
1	2			KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						1,659,070,382							1,659,070,382	
1	2 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,583,955,382							1,583,955,382	
1	2 1	2.1	1	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,583,955,382 1,583,955,382		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		1 Unit Kerja	1,583,955,382 1,583,955,382	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						75,115,000				Masyarakat			75,115,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75,115,000							75,115,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				589 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		589 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				562 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		562 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				514 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		514 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2632 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2632 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4325 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		4325 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Junu							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2257 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2257 Orang	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	1 1		1			RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah		_		Jawab
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
					Jumlah Penderita Hipertensi yang							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4579 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan		4579 Orang	0	KESEHATAN
				-	Sesuai Standar							Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
-		1			Jumlah Penderita Diabetes Melitus							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				120 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		120 Orang	0	KESEHATAN
					kesenatan Sesuai Standar							Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
		1										ļ						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan				55 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		Peningkatan Derajat Kesehatan		55 Orang	0	DINAS
				Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	11	Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				386 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		386 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	12	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				551 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		551 Orang	0	KESEHATAN
					Sesuai Stanuai							Dana Transfer		masyarakat				
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan													
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS
				Kejadian Luar Biasa (KLB)	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
			l	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	15	Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik	1					
			1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1			40.5 (Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	16	Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum	1	Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
					Addition							Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus	1					
												Non Fisik	1					
		t		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer	1	5. Peningkatan			1	DINAS
1	2 2	2.02	17	Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum	1	Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer	İ	Annual y and sufficient				
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik	1					
		1		Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	18	Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
		1				1						Dana Transfer		muoyuruRat				
												Khusus-Dana	1					
												Alokasi Khusus Non Fisik	1					
		1			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	1						Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	KESEHATAN
<u> </u>								1				Alokasi Umum	1	Masyarakat		1		l .

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022		•		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional	Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	i					
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	75,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	75,115,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	i					
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan						0							0	
1	2 3	2.02		Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Keschatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan					0							0	
1	2 5	2.03	1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				HOUGAN DEMODE								Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daera
	н	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						715,635,772							715,635,772	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						594,281,772							594,281,772	
1	2 1	2.1		KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD						594,281,772							594,281,772	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	594,281,772		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	594,281,772	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						121,354,000				masyarakat			121,354,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						121,354,000							121,354,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				284 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		284 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		moyutuut				
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				271 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		271 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		258 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1264 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1264 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		-				
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2084 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2084 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1091 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1091 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2207 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2207 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				58 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		58 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		26 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan	RPJMD	2021		186 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		186 Orang	0	DINAS
				Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
		2.02	4.0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	12	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				232 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		232 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	13	bagi Penduduk pada Kondisi	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa				12 Dokumen	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				Kejadian Luar Biasa (KLB)	(KLB) Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat				KEODIMINI
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				10.0.1	0		Dana Transfer		5. Peningkatan		1001		DINAS
1	2 2	2.02	15	Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
					Ommuga							Dana Transfer		maoyaraaa				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				angaungui.	rengumu nesemum amgaungun							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				KESEHATAN
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAC
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Khusus-Dana Alokasi Khusus		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		10 Orang	0	DINAS
-	$\vdash\vdash$	 		Orna dan Mai Za	с.нараскан i сыуанан кезенатап		-					Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan		1		12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
		2.02	20	Menular dan Tidak Menular	Tidak Menular		ļ		12 Dokumen			Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	\vdash	-		Pengambilan dan Pengiriman	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial							Dana Transfer		5. Peningkatan				DIVIG
1	2 2	2.02	28	Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Ruiukan/Nasional	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang				17 Paket	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
		-		Laboratorium Kujukan/ Nasionai	Didistribusikan									masyarakat				
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional				12 Dokumen	121,354,000		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	121,354,000	DINAS
		2.02	- 55	- p-ruoionia i ciayanan i usacsillas	Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	121,004,000		Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen	121,004,000	KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		I		nogiatan/ oub nogiatan	n gantan	RPJMD	2021	2022	rarget 2023	ragu munkatn	LORASI	Dana Transfer	Nasional	Daerah	Judarun	Target	ragu indikatii	Jawab
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	36	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan				12 Laporan	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	KESEHATAN
				Massal)	Pemberian Obat Massal)							Dana Transfer						
												Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan				40.0.4	0		Dana Transfer		5. Peningkatan		4004		DINAS
1	2 2	2.02	37	Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
				PROGRAM PENINGKATAN								Non Fisik						
1	2 3			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
				Perencanaan Kebutuhan dan														
1	2 3	2.02		Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan						0							0	
	-			UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia													
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
				Standar	(Fasyankes)							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
				Pengembangan dan Pelaksanaan														
1	2 5	2.03		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah						0							0	
				Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan													
1	2 5	2.03	1	Pengembangan dan Pelaksanaan	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB								Non Fisik						
1				YANG BERKAITAN DENGAN														
1	2			PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						1,928,975,600							1,928,975,600	
	F			KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN														
1	2 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,809,896,600							1,809,896,600	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,809,896,600							1,809,896,600	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,809,896,600		Pendapatan dari BLUD		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		1 Unit Kerja	1,809,896,600	DINAS KESEHATAN
	$\vdash\vdash$			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	i ciayanan dan rendinjang relayanan						-	dan beub		Masyarakat				RESERVINI
1	2 2			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						119,079,000							119,079,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan						119,079,000							119,079,000	
1	2 2	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						119,079,000							119,079,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				595 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		595 Orang	0	DINAS KESEHATAN
	$\vdash\vdash$	1		Total Halling	. cayanan mochatan ətsuai ətandar	}					-	Alokasi Umum		Masyarakat				RESERVATION
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	2	Ibu Bersalin	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	<u> </u>			568 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		568 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
		<u>L</u>	L 1			<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	Non Fisik		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>		

Part							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
1		Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
The content of the	. [l	Ι.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		RPJMD	2021	2022					Nasional	Peningkatan				DINAS
	1 2	2 2	2.02	3	Bayi Baru Lahir					519 Orang	0						519 Orang	0	KESEHATAN
1																			
													Alokasi Khusus						
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2		-		1											5. Peningkatan				DINAC
	1 2	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2657 Orang	0				Derajat Kesehatan		2657 Orang	0	DINAS KESEHATAN
													Alokasi Khusus						
2 2 2 2 3 Common Dates Common Date Common						In the Amela Hair Dandidina Dana									E Danimalantan				
	1 2	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	yang Mendapatkan Pelayanan				4366 Orang	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		4366 Orang	0	DINAS KESEHATAN
						Kesehatan Sesuai Standar									Masyarakat				-
No. Control													Khusus-Dana						
1																			
	1 2	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan					2285 Orang	0						2285 Orang	0	DINAS
Second Column Second Colum				1	pada Usia Lanjut	Sesuai Standar				_					Masyarakat				KESEHATAN
No. Part Control Part													Khusus-Dana						
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2																			
Adhand Change Products Represent Security Control of Security Cont				+ -	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
Section of Control o	1 2	2 2	2.02	8						4624 Orang	0						4624 Orang	0	KESEHATAN
No. No.																			
1													Alokasi Khusus						
1		_		<u> </u>		Jumlah Penderita Diahetes Melitus									5 Peningkatan		ļ		
1	1 2	2 2	2.02	9		yang Mendapatkan Pelayanan				121 Orang	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		121 Orang	0	DINAS KESEHATAN
No. Control						Rescriatari Sesuai Stanuai									maoyarakat				
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2													Khusus-Dana Alokasi Khusus						
1													Non Fisik						
Alcohas Umum Masyarakat Canagasan Jwas Berat Senasia Standard Canagasa	1		2.02	10						56 Orang	0						56 Orang		DINAS
Richard Rich	•		2.02	10	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					oo orang	Ů						oo orang	Ů	KESEHATAN
Abolast Khusun Non Fisik 1 V V V V V V V V V V V V V V V V V V																			
2													Alokasi Khusus						
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				<u> </u>		Jumlah Orang Terduga Menderita									5 Peningkatan				
Dang Transfer Mayarakat Pengelokan Pelayanan Kesehatan Grang dengan Risako Terinfeka HIV Mayang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 2 2 2 2.02 13 Pengelokan Pelayanan Kesehatan Grang dengan Risako Terinfeka HIV Mayang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 2 2 2 2.02 13 Dang Transfer Mayarakat Pengelokan Pelayanan Kesehatan Dang Transfer Mayarakat Dang Transfer	1 2	2 2	2.02	11		Tuberkulosis yang Mendapatkan				390 Orang	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		390 Orang	0	DINAS KESEHATAN
Alokasi Khusus Non Pisik 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						r ciayanan Sesuai Standar							mondor Cindin		maoyarakat				
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																			
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2																			
Second Statistics Seco	1 2	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	HIV yang Mendapatkan Pelayanan				478 Orang	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		478 Orang	0	DINAS KESEHATAN
Regular Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Seaui Standar Seaui Sta		+	 	1	dengan manko rerimiekat filiv	Sesuai Standar	1	 				 			Masyarakat	-	<u> </u>	1	KESEIMIMN
Solution Solution													Khusus-Dana						
Pengelokan realyanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Resehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelokan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar																			
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				İ	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan										5. Peningkatan				DINAS
Dana Transfer Dana Transfe	1 2	2 2	2.02	13	bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa				12 Dokumen	0				Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
Khusus-Dana Alokasi Umum 1 2 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 2 Dokumen 1 2 Dokumen 0 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Chrust-Dana Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Chrust-Dana Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Chrust-Dana Alokasi Umum Masyarakat						INDI SESUAI STANDAF							Dana Transfer						
Non Fiaik Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dana Transfer Gizi Masyarakat Junlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 13 Dokumen 14 Dokumen 15 Dokumen 16 Dokumen Masyarakat Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Gizi Masyarakat Dana Transfer Gizi Masyarakat Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Khusus-Dana													Khusus-Dana						
1 2 2 2.02 15 rengelouan renayanan Aesenatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi 12 Dokumen 0 Umum-Dana Alokasi Umum Masyarakat KI													Non Fisik						
Masyarakat Alokasi Umum Masyarakat Dana Transfer Khusus-Dana	1 2	2 2	2.02	15						12 Dokumen	0						12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
Khusus-Dana		+	1	1	оші навуатакат	Masyarakat	-	-				-			Masyarakat	-	-	+	RESERIAIAN
													Khusus-Dana						
Alokasi Khisus Non Fisik													Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan	RPJMD	2021		12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				Kerja dan Olamaga	Olahraga							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				10 Orang	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0				5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	119,079,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	119,079,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0			_				0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Probinger Consists			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun						oritas	Kelompok			Penanggung
				Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah						0							0	
1	2 5	2.03	1	Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
				Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						2,220,300,521							2,220,300,521	
1	2 1	0.1		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,131,007,521							2,131,007,521	
1	2 1	2.1	1	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan				12 Unit Kerja	2,131,007,521 2,131,007,521		Pendapatan				12 Unit Kerja	2,131,007,521 2,131,007,521	DINAS
1	2 2			BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					89,293,000		dari BLUD					89,293,000	KESEHATAN
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						89,293,000							89,293,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				652 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		652 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				623 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		623 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				568 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		568 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2914 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2914 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4788 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		4788 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2505 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2505 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5070 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		5070 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 V - 39

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan	RPJMD	2021	2022	133 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		133 Orang	0	Jawab DINAS KESEHATAN
					Kesehatan Sesuai Standar							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				REGERMAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				61 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		61 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				427 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		427 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				475 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		475 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s					
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1					
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1					
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan		Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daera
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	RPJMD	2021	2022	12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehata		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
	\vdash			Mondai dan rada mondai	Tidak Menular							Alokasi Umum Dana Transfer	Masyarakat				RESERVATAIN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	1	17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	89,293,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	i	12 Dokumen	89,293,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	ı	12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	i	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0						0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0						0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	ı	5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0						0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0						0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5. Peningkatan Derajat Kesehata Masyarakat	ı	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												_	
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,172,321,452						1,195,191,452	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,095,191,452						1,095,191,452	
1	2 1 2 1	2.1	1	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan				1 Unit Kerja	1,095,191,452		Pendapatan dari BLUD	5. Peningkatan Derajat Kesehata		1 Unit Kerja	1,095,191,452 1,095,191,452	DINAS
1	2 2			BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					77,130,000		dan BLUD	Masyarakat			100,000,000	KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
			1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan		RPJMD	2021						Nasional	Daeran				oawab
1	2 2	2.02		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						77,130,000		Dana Transfer		5. Peningkatan			100,000,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				464 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		464 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				443 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		443 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					ocsuai otanuai							Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				404 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		404 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					ocodii otilidii							Dana Transfer		masyaraka				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2075 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2075 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Keschatan Sesuai Standar				3410 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		3410 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Resemble Session Standard							Dana Transfer Khusus-Dana		masyaraka				
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1781 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1781 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3611 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		3611 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				95 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		95 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
,		0.00	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan				42.0			Dana Transfer		5. Peningkatan		42.0		DINAS
1	2 2	2.02	10	Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		43 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
					L-110 T							Non Fisik		5.00				
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				304 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		304 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan				613 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		613 Orang	0	DINAS KESEHATAN
		<u> </u>	i	uengan raono reinitasi iliv	Sesuai Standar		l .	l	l .		l	Alokasi Umum		Masyarakat	l	l .		RESERVAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Nasional	Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
					ribb) Coun Gunda							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	77,130,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	100,000,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						_
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prie	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	Target 2020	r agu munach	DORASI	Dana Transfer Khusus-Dana	Nasional	Daerah		Taiget	r agu munacii	Jawab
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan					0		Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer	3	5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	37	Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA						0		Alokasi Khusus Non Fisik	3				0	
1	2 3	2.02		MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						1,168,012,316							1,168,012,316	
1	2 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,001,784,316							1,001,784,316	1
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,001,784,316				5 P			1,001,784,316	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,001,784,316		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	1,001,784,316	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						166,228,000							166,228,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						166,228,000							166,228,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				358 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		358 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				341 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		341 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				312 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		312 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1599 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1599 Orang	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio: Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						RPJMD	2021					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional 3	Daerah				Jawas
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2626 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2626 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1375 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1375 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2782 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2782 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				73 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		73 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				33 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		33 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				234 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		234 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				328 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		328 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masvarakat				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Nasional	Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Keschatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	166,228,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	166,228,000	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan						0							0	
1	2 3	2.02		Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Dava Manusia					0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					nogiatur	RPJMD	2021	2022	rarget 2023	ragu munkatn	LOKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Duourun	rarget	ragu indikatii	Jawab
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,139,847,320							1,139,847,320	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,059,532,320							1,059,532,320	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,059,532,320							1,059,532,320	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,059,532,320		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	1,059,532,320	DINAS KESEHATAN
1	2 2			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						80,315,000							80,315,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						80,315,000							80,315,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				436 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		436 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				417 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		417 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				381 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		381 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1950 Orang	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1950 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3203 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		3203 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1676 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1676 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3393 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		3393 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		89 Orang	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	rarget 2020	r agu muikatn	LORASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Taiget	ragu inuikatii	Jawab
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				41 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		41 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				286 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		286 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				283 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		283 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Probinger Const		С	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun						oritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
				Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kegiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	80,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	80,315,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						904,959,964							904,959,964	
1	2 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						829,844,964							829,844,964	
1	2 1	2.1	1	Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	829,844,964 829,844,964		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	829,844,964 829,844,964	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						75,115,000				recently one walkfulls			75,115,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75,115,000							75,115,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	RPJMD	2021	2022	338 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		338 Orang	0	Jawab DINAS KESEHATAN
				194 1141111	Tengunun nesenatun sesatu stantan							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				RESERVATAIN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	·					
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				323 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		323 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				295 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		295 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1511 Orang	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	i	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1511 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2483 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2483 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1301 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1301 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2630 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2630 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				69 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		69 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		32 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				222 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		222 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				426 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		426 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	endanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ко	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	pritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					-	RPJMD	2021	2022	-			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Nasional s	Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s					
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				De al la planta de la companya de la	to the Discount of the Control of th							Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer	s	5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				0 Dokumen	0		Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana	s	5. Peningkatan Derajat Kesehatan		0 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
				кезепанап	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen			Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s	Masyarakat		12 Dokumen		KESEHATAN
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s					
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
				Pelavanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan							Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer	s	5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	25	Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang				17 Paket	0		Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana	S	5. Peningkatan Derajat Kesehatan		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
				Laboratorium Rujukan/Nasional	Didistribusikan							Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	S	Masyarakat				RESERVAN
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	75,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	75,115,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	S					
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	s					
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	P11 01		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prie	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	Target 2023	r agu muikatn	DORASI	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Nasional	Daerah		Taiget	ragu munatn	Jawab
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA						0		Non Fisik					0	
1	2 3	2.02		MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan						0							0	
1	2 3	2.02	2	UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasvankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					[F-GOYAHACS]							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,934,430,332							1,934,430,332	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,794,421,332							1,794,421,332	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						1,794,421,332							1,794,421,332	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,794,421,332		Pendapatan dari BLUD		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	1,794,421,332	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan						140,009,000							140,009,000	
1	2 2	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						140,009,000							140,009,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		650 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				620 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		620 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				566 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		566 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2905 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2905 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4771 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		4771 Orang	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						RPJMD	2021	2022		-		Dana Transfer Khusus-Dana	Nasional	Daerah			-	Jawab
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2494 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2494 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5052 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5052 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus							Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				132 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		132 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				61 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		61 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				426 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		426 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				578 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		578 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Alokasi Khusus Non Fisik		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0				Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
				Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	-						Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	18	Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prie Nasional	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	RPJMD	2021		12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesenatan	Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	22	Jiwa dan NAPZA	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pelayanan Kesehatan Penyakit	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	25	Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
	_				Jumlah Spesimen Penyakit Potensial							Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
	_			Laboratorium Rujukan/Nasional	Didistribusikan							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
		2.02	33		Jumlah Dokumen Operasional					140,009,000		Dana Transfer		5. Peningkatan			140,009,000	DINAS
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	140,009,000		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	140,009,000	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	-			Investigasi Awal Kejadian Tidak	Jumlah Laporan Hasil Investigasi							Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	36	Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan				12 Laporan	0		Umum-Dana		Derajat Kesehatan		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
				Massal)	Pemberian Obat Massal)							Alokasi Umum		Masyarakat				
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
		2.02	37	Respon Wabah	Wabah				12 Bokumen			Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen	Ů	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				PROGRAM PENINGKATAN														
1	2 3			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya						0							0	
-				Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota													Ü	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		5 Orang	0	DINAS
1		4.04		Standar	di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Grang			Alokasi Umum		Masyarakat		J Orang	Ü	KESEHATAN
										-		Dana Transfer Khusus-Dana	-					
												Alokasi Khusus						
			\vdash				1	1				Non Fisik		-	-			
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya														
1	2 5	2.03		Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
		1	1 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 5	2.03	1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Kesehatan Bersumber Daya				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
				Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)		<u> </u>					Dana Transfer		-				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	Т			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN		RPJMD	2021						Nasional	Daerah				Jawab
1	_			PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
1	2			KESEHATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						713,297,960							713,297,960	
1	2 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						536,880,960							536,880,960	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						536,880,960				5. Peningkatan			536,880,960	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	536,880,960		Pendapatan dari BLUD		Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	536,880,960	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						176,417,000							176,417,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						176,417,000							176,417,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				294 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		294 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer		мазуатакат				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				280 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		280 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Sesuai Standar							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				REGERMINA
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
	_				Jumlah Bavi Baru Lahir yang							Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		260 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1312 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1312 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer		mayaran				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar					0		Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	5	pada Usia Pendidikan Dasar	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2157 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		2157 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik	1					
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1128 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1128 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					ocodii omidii							Dana Transfer		Mayaraka				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	,					
	-			Danaslalaan Dalamaan Vasakatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2284 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		2284 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik	1					
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan				60 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		60 Orang	0	DINAS KESEHATAN
	+				Kesehatan Sesuai Standar							Alokasi Umum Dana Transfer	1	Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
	_	<u> </u>									-	Non Fisik	1			1		
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				28 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		28 Orang	0	DINAS KESEHATAN
	L_	<u> </u>			Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1	l			1	Alokasi Umum	ı	masyarakat		<u> </u>		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus	Nasional	Daerah				Jawab
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				192 Orang	0		Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		192 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				249 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		249 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Keschatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DWIG
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan							Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DIMAG
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial							Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri- Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	176,417,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		12 Dokumen	176,417,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,049,274,142							1,049,274,142	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						972,534,142							972,534,142	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						972,534,142				5 Peningkatan			972,534,142	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PROGRAM PEMENUHAN UPAYA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	972,534,142				5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1 Unit Kerja	972,534,142	DINAS KESEHATAN
1	2 2			KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan						76,740,000							76,740,000	
1	2 2	2.02		untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan					76,740,000		Dana Transfer		5. Peningkatan			76,740,000	DINAS
1	2 2	2.02	1	Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				346 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		346 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	RPJMD	2021		330 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		330 Orang	0	DINAS
				Ibu Bersalin	Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat			-	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				302 Orang	0		Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		302 Orang	0	DINAS KESEHATAN
				Dayi Daru Lami	Sesuai Standar							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				RESERVAN
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1544 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1544 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Keschatan Sesuai Standar				2537 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2537 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1325 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		1325 Orang	0	DINAS KESEHATAN
					Section Statement							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		moyerance				
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2687 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2687 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		-				
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		70 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				32 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		32 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				226 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		226 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				240 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		240 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	2 2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masvarakat	RPJMD	2021	2022	12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	Jawab DINAS KESEHATAN
					Masyarakat							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3	Masyarakat				
1	2 2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		17 Paket	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	76,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	76,740,000	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					
1	2 2	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			-	12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3					

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 V - 59

						Target	Realisasi	Postdone Constan			apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	m		Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
					Regiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1	2 3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
1	2 3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
1	2 5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0							0	
1	2 5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						800,855,479							800,855,479	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						625,730,479							625,730,479	
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD						625,730,479							625,730,479	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	625,730,479		Pendapatan dari BLUD		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1 Unit Kerja	625,730,479	DINAS KESEHATAN
1	2 2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						175,125,000							175,125,000	
1	2 2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						175,125,000							175,125,000	
1	2 2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				283 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		283 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				270 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		270 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				247 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		247 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1263 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		1263 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2077 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat		2077 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2 2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	RPJMD	2021		1087 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan		1087 Orang	0	DINAS
				pada Usia Lanjut	Sesuai Standar							Alokasi Umum		Masyarakat			-	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2199 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		2199 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Keschatan Sesuai Standar				58 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 		58 Orang	0	DINAS KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
				P 11 P.1 V 1	Jumlah Orang yang Mendapatkan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				26 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		26 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	+			Provide Private Visit Inc.	Jumlah Orang Terduga Menderita							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				185 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		185 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
					V 110 M 1 V 13							Non Fisik		5 D : 1 1				
1	2 2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan				188 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		188 Orang	0	DINAS KESEHATAN
	+				Sesuai Standar							Alokasi Umum Dana Transfer		Masyarakat				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1	2 2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
		2.02	15	Kejadian Luar Biasa (KLB)	pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0		Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen	Ů	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	+			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	15	Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2 2	2.02	16	Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
1	2 2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		5. Peningkatan Derajat Kesehatan		12 Dokumen	0	DINAS
-		2.02		Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	· ·		Alokasi Umum		Masyarakat		12 Dokumen		KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
	2 0	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan				10.0-1	_		Dana Transfer		5. Peningkatan		10.0-1	_	DINAS
1	2 2	2.02	18	Kesehatan	Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik		1				
												NOD FISIK		1	L	l		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daera
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
			1		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	RPJMD	2021	2022				Dana Transfer	Nasional	Daerah 5. Peningkatan		40.004		DINAS
1 2	2 2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
		1		D I.I D.I	Total December WADZA							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1 2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				10 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		10 Orang	0	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus						
	-				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan							Non Fisik Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1 2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
					Talia mendia							Dana Transfer		Madyarana				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
					Land to Control Description							Non Fisik						
1 2	2 2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke				17 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		17 Paket	0	DINAS
				Laboratorium Rujukan/Nasional	Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan							Alokasi Umum		Masyarakat			_	KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
												Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1 2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	175,125,000		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	175,125,000	KESEHATAN
												Dana Transfer		mayaran				
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1 9	2 2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Laporan	0	DINAS
				Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)							Alokasi Umum		Masyarakat				KESEHATAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik						
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	2	2.02	37	Respon Wabah	Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				12 Dokumen	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		12 Dokumen	0	KESEHATAN
												Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
	_			PROGRAM PENINGKATAN								Non Fisik						
1 2	3			KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						0							0	
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya			İ											
1 2	3	2.02		Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						0							0	
	\dagger	1		Pemenuhan Kebutuhan Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia							Dana Transfer		5. Peningkatan				DINAS
1	3	2.02	2	Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5 Orang	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Derajat Kesehatan Masyarakat		5 Orang	0	KESEHATAN
	+				(Fasyankes)							Dana Transfer						
												Khusus-Dana Alokasi Khusus						
												Non Fisik						
1 2	2 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						0							0	
	-	1	+	Pengembangan dan Pelaksanaan										+				
1 2	5	2.03		Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah						0				1			0	
	+	1	\vdash	Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan									1				
1 2	5	2.03	1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya	Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Derajat Kesehatan 		12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
	_			Masyarakat (UKBM)	Masyarakat (UKBM)							Alokasi Umum		Masyarakat				RESERIAIAN
												Dana Transfer Khusus-Dana						
												Alokasi Khusus Non Fisik					1	
		1	1					l	l .		<u> </u>	NOII FISIK			<u> </u>	l	i .	<u> </u>

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					nogiutun	RPJMD	2021	2022	rarget 2023	ragu muikatii	LUKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Duourun	rarget	ragu munadi	Jawab
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						53,119,325,400							53,119,325,400	
1	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Persen		Persen	100 Persen	52,619,325,400						100 Persen	52,619,325,400	
1 :	2 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persen		Persen	100 Persen	17,476,455,740						100 Persen	17,476,455,740	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
1	2 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				186 Orang/bul an	17,476,455,740	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	186 Orang/bul an	17,476,455,740	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	2 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persen		Persen	100 Persen	921,462,240						100 Persen	921,462,240	
1 :	2 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				56 Laporan	921,462,240	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	56 Laporan	921,462,240	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	2 1	2.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja		Unit Kerja	1 Unit Kerja	34,221,407,420						1 Unit Kerja	34,221,407,420	
1	2 1	2.1	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	34,221,407,420	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Unit Kerja	34,221,407,420	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketercukupan Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar RS Tipe C	Persen		Persen	100 Persen	500,000,000	Acadaman .					100 Persen	500,000,000	
1 :	2 2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	paket		paket	1 paket	500,000,000						1 paket	500,000,000	
1	2 2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 paket	500,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 paket	500,000,000	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						38,250,388,132							101,577,667,779	
1	3 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya urusan penunjang perkantoran	Persen		Persen	95 Persen	10,838,852,061						95 Persen	11,089,148,657	
1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran	Persen		Persen	95 Persen	187,276,200						95 Persen	190,000,000	
1	3 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	88,242,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	90,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	99,034,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	4 Laporan	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase SPJ dengan administrasi lengkap dan tepat waktu	Persen		Persen	95 Persen	5,697,586,157						95 Persen	5,709,966,057	
1	3 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang	5,599,966,057	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	60 Orang	5,599,966,057	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksaan akuntansi SKPD				2 Dokumen	90,573,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	95,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Target	Realisasi	Prakiraan Canajan			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	3 1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemerikasaan dan tindak lanjut pemeriksaan	RPJMD	2021	2022	2 Dokumen	7,046,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Masional Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Daerah 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	15,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Pemda yang terpelihara	Persen		Persen	85 Persen	29,695,900						85 Persen	30,000,000	
1	3 1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	29,695,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Urusan Kepegawaian yang di proses Tepat Waktu	Persen		Persen	90 Persen	98,386,000						90 Persen	124,300,000	
1	3 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan				116 Paket	59,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	116 Paket	79,300,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi perundang-undangan				15 Orang	38,886,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	15 Orang	45,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	Persen		Persen	90 Persen	741,013,334						90 Persen	779,000,000	
1	3 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				200 Paket	51,719,229	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	200 Paket	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				100 Paket	174,995,741	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	100 Paket	185,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				30 Paket	5,963,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	30 Paket	10,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				10 Paket	62,309,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	10 Paket	64,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				1 Laporan	30,978,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				1 Laporan	415,046,864	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	420,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset OPD dalam keadaan baik	Persen		Persen	85 Persen	95,868,591						85 Persen	180,000,000	
1	3 1	2.07	5	Daerah Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan				5 Paket	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	5 Paket	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit		1					0 Unit		
1	3 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disedaiakan Persentase Pemenuhan Terhadap				10 Unit	95,868,591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	10 Unit	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,038,015,000						100 Persen	2,039,215,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				Registan/ Sub Registan	Negratan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Gasaran	Target	Pagu Indikatii	Jawab
1	3 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan surat menyurat				1 Laporan	10,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	12,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 Laporan	1,042,215,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	1,042,215,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 Laporan	985,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	985,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen		Persen	100 Persen	1,951,010,879						100 Persen	2,036,667,600	
1	3 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya				28 Unit	242,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	28 Unit	262,800,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya				5 Unit	798,269,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	5 Unit	798,269,400	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				5 Unit	149,680,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	5 Unit	150,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				4 Unit	541,264,679	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	4 Unit	586,602,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	218,996,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	28 Unit	238,996,200	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen		Persen	63 Persen	6,500,000,000						63 Persen	32,150,000,000	
1	3 2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Pengelola Irigasi (KPI) yang aktif	Persen		Persen	75 Persen	300,000,000						75 Persen	450,000,000	
1	3 2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pebinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten/kota				40 KPI	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	40 KPI	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Persen		Persen	63 Persen	6,200,000,000						63 Persen	31,700,000,000	
1	3 2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun				20 Dokumen	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	20 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun				20000 M	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	20000 M	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 2	2.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dibangun				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	3 Unit	4,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio:		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	3	2 2.	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	RPJMD	2021		2500 M	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Daerah 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2500 M	6,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
1	3	2 2.	2.02	9	Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang ditingkatkan				2 Unit	0	Kelurahan Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Unit	3,000,000,000	RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2 2.	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang rehabilitasi irigasi permukaan yang direhabilitasi				15000 Meter	3,000,000,000	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Timbulun	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	15000 Meter	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang Kab.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
												Sijunjung, Tanjung Gadang, Taratak Baru Kab.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
												Sijunjung, Sijunjung, Muaro							
												Kab. Sijunjung, Sijunjung, Silokek							
												Kab. Sijunjung, Sijunjung,							
												Paru Kab. Sijunjung, Sijunjung, Aie Angek							
												Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung							
												Kab. Sijunjung, IV Nagari, Mundam Sakti							
												Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Sungai							
												Lansek Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Aia Amo							
												Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Tamparun							
												Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Mangganti							
1	3	2 2.	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi				1 Unit	500,000,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Unggan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Unit	1,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	2 2.	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara				10000 M	2,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	10000 M	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
			1	•	•	RPJMD	2021	2022			Kab.		Nasional	Daerah				Jawab
											Sijunjung, Kupitan, Pamuatan							
1	3 2	2.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara				15 DI	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	15 DI	2,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah sesuai standar	Persen		Persen	88,24 Persen	2,468,268,071						88,24 Persen	2,970,000,000	
1	3 8	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Perizinan Bangunan	Rekome ndasi		Rekomendasi	250 Rekomend asi	2,468,268,071						250 Rekomend asi	2,970,000,000	
1	3 8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah penyelenggaraan penertiban persyaratan bengunana gedung (PBG),Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran tim ahli profesi (TPA), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG				1 Dokumen	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan,pembangunan,pengawa san dan pemanfaatan bengunan gedung daerah kabupaten/kota				3 Dokumen	1,828,268,071	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	1,850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Kab. Sijunjung, Koto VII, Limo Koto							
1	3 8	2.01	3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait bengunan gedung kabupatem/kota yang disusun				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah konsultasi bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara danerah kabupaten/kota				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan				1 Gedung	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Gedung	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	7	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bantuan teknis				2 Pengelola	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Pengelola	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	8	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik,Pengguna dan atau pengelola bangunan gedung cagar budaya daerah kabupaten/kota yang mendapat kompensasi,intensif dan disinsetif				1 Pengelola	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Pengelola	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	9	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang telah dilakukan penilikan oleh penilik bangunan				1 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Unit	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi,renovasi dan ubahsuai				5 Unit	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	5 Unit	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Sarana Publik yang tersedia	Persen		Persen	50 Persen	628,268,000						50 Persen	8,400,000,000	
1	3 9	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Utilitas dan Pemeliharaan Gedung yang dilaksanakan Tepat Waktu	Persen		Persen	65 Persen	628,268,000			_			65 Persen	8,400,000,000	_

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	3 9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah,kawasan panitia, kawasan sistem perkotaan nasional, kawasan sirategis lainnya	RPJMD	2021	2022	2 Kawasan	628,268,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Kawasan	7,700,000,000	Jawab DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya				2 Kawasan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Kawasan	500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 9	2.01	6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	jumlah dokumen hasil monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Persen		Persen	71,57 Persen	16,900,000,000						71,57 Persen	45,010,242,150	
1	3 #	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	Persen		Persen	71.57 Persen	16,900,000,000						71.57 Persen	45,010,242,150	
1	3 #	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis,kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian				16 Dokumen	1,632,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	16 Dokumen	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah dokumen pengelolaal leger jalan				1 Dokumen	49,999,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah data dam informasi terkait kondisi jalan/jembatan				1 Dokumen	767,753,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	850,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun				12.7 KM	2,646,344,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	12.7 KM	2,646,344,500	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Kamang Kamang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
											Sijunjung, Kamang Baru, Lubuk Tarantang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
											Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Sisawah							
1	3 #	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung		11,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Dirchabilitasi				1.5 KM	1,710,249,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1.5 KM	1,881,273,900	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Kamang Kamang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
											Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Lubuak Tarok	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1				RPJMD	2021	2022			Semua		Nasional Memperkuat	Daerah				Jawab DINAS
1	3 #	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang diilakukan pemeliharaan secara berkala				9.236715 KM	0	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	9.236715 KM	9,560,000,000	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin				86.477476 KM	8,122,623,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	86.477476 KM	8,122,623,750	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun				100 M	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	100 M	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan penggantian				98 M	1,642,317,500	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	98 M	2,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
											Kab. Sijunjung, IV Nagari, Mundam Sakti							
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Muaro Takuang							
1	3 #	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi				385.36 M	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	385.36 M	400,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin				240 M	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	240 M	1,500,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang terehabilitsi/terekonstruksi akibat bencana				11.38 KM	328,212,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	11.38 KM	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Persen		Persen	21,55 Persen	250,000,000						21,55 Persen	320,000,000	
1	3 #	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat	Orang		Orang	100 Orang	156,687,950						100 Orang	210,000,000	
1	3 #	2.01	3	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				1 Dokumen	15,705,700	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang bersertifikat				200 Orang	140,982,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	200 Orang	190,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Operasional Layanan Informasi jasa konstruksi	Persen		Persen	100 Persen	30,490,400						100 Persen	40,000,000	
1	3 #	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan	15,474,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Jumlah dokumen hasil data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU				1 Dokumen	15,015,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	Rekome ndasi		Rekomendasi	50 Rekomenda si	9,000,050						50 Rekomenda si	15,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	T			Dukungan/Fasilitasi	-	RPJMD	2021	2022	-		Semua Kab/Kota,	Dana Transfer	Nasional Memperkuat Infrastruktur Untuk	Daerah 6. Pembangunan dan				Jawab DINAS PEKERJAAN
1	3 #	2.03	2	Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah rekomendasi teknis IUJK nasional yang ditentikan				50 Rekomenda si	9,000,050	Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Umum-Dana Alokasi Umum	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	50 Rekomenda si	15,000,000	UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokum en		Dokumen	1 Dokumen	53,821,600						1 Dokumen	55,000,000	
1	3 #	2.04	1	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				2 Dokumen	15,580,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	20,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib pengelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi				1 Dokumen	38,241,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	Persen		Persen	75 Persen	665,000,000						75 Persen	1,638,276,972	
1	3 #	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen penataan ruang yang ditetapkan	Persen		Persen	18.75 Persen	350,000,000						18.75 Persen	528,276,972	
1	3 #	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi,evaluasi dana penetapan RTRW kabupaten/kota				1 Dokumen	119,646,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	138,276,972	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen persetujuan substansi,evaluasi dana penetapan RRTR kabupaten/kota				3 Dokumen	189,013,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen kebijakan perda selain RTRW kabupaten/kota				1 Dokumen	20,734,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang				1 Dokumen	20,605,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	100,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi yang sesuai dengan pola ruang	Persen		Persen	60 Persen	50,000,000						60 Persen	450,000,000	
1	3 #	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemenfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah				1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	200,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi penataan ruang				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	250,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang yang dikeluarkan	Rekome ndasi		Rekomendasi	30 Rekomenda si	265,000,000						30 Rekomenda si	660,000,000	
1	3 #	2.04	2	Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang				1 Dokumen	65,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3 #	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang ditangani penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang				1 Kasus	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Kasus	60,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		ı	1		•	RPJMD	2021	2022			Semua		Nasional Memperkuat	Daerah				Jawab
1	3 #	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang				1 Dokumen	200,000,000	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						7,685,000,000							8,439,848,000	
2	# 4			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	45 Persen	50,000,000						45 Persen	100,000,000	
2	# 4	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	Dokum en		Dokumen	1 Dokumen	50,000,000						1 Dokumen	100,000,000	
2	# 4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data sengketa,konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# 4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	50,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# 5			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah Penyelesaian sengketa Tanah	Sengket a		Sengketa	1 Sengketa	7,555,000,000						1 Sengketa	8,189,848,000	
2	# 5	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ganti Kerugian Tanah dan Santunan Tanah yang diselesaikan	Sengket a		Sengketa	1 Sengketa	7,555,000,000						1 Sengketa	8,189,848,000	
2	# 5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah				1 Dokumen	30,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	189,848,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# 5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	7,525,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	8,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# 7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah penetapan tanah ulayat	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	70,000,000	
2	# 7	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan tanah ulayat	Laporan		Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	70,000,000	
2	# 7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan survey dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) daerah kabupten/kota				1 Laporan	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabu[aten Sijunjung	1 Laporan	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# 7	2.01	3	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota				1 Dokumen	15,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabu[aten Sijunjung	1 Dokumen	35,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# #			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelenggaraan pertanahan yang sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	75 Persen	50,000,000						75 Persen	80,000,000	
2	# #	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	75 Persen	50,000,000						75 Persen	80,000,000	
2	# #	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	# #	2.01	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# #	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kwewnangan kabupaten/kota	RPJMD	2021	2022	1 Dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Daerah 6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	80,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
1	3			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1,540,675,000							80,000,000	
1	3 3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	Persen		Persen	90 Persen	714,826,000						90 Persen	0	
1	3 3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						714,826,000							0	
1	3 3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				3 Dokumen	179,426,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		3 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	3 3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan air minum yang terbangun dan jumlah sambungan rumah (SR) terpasang				45000 Meter	535,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		45000 Meter	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat				1800 SR							1800 SR		
1	3 5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi yang layak	Persen		Persen	90 Persen	372,449,000						90 Persen	0	
1	3 5	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						372,449,000							0	
1	3 5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi layak				2 Dokumen	168,049,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	3 5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Siatem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	204,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		0 Rumah Tangga	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah sarana prasarana yang dibangun				80 Paket			Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				80 Paket		
1	3 6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1.5 m)	Persen		Persen	15 Persen	383,400,000						15 Persen	0	
1	3 6	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air minimal 1,5 meter	Persen		Persen	15 Persen	383,400,000						15 Persen	0	
1	3 6	2.01	10	Supervisi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah DED drainase di kawasan permukiman yang disusun Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabili tasi Sistem Drainase Lingkungan				1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Meningkat kan Pengelolaa n dan Pengemban gan Sistem Drainase	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П				Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabili tasi Sistem Drainase Lingkungan	RPJMD	2021	2022	1 Dokumen	-			Nasional	Daerah		1 Dokumen	-	Jawab
1	3 6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	tasi Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				0 М	254,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Meningkat kan Pengelolaa n dan Pengemban gan Sistem Drainase	0 M	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Panjang saluran drainase yang terbangun di kawasan permukiman				3400 Meter							3400 Meter		
1	3 6	2.01	16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun				1 Dokumen	128,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Meningkat kan Pengelolaa n dan Pengemban gan Sistem Drainase	1 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Perumahan yang dikembangkan	Persen		Persen	20Persen Perse n	70,000,000						20Persen Perse n	80,000,000	
1	3 7	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian infrastruktur dikawasan permukiman	kali		kali	75 kali	70,000,000			_			75 kali	80,000,000	
1	3 7	2.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				5500 Sistem Jaringan	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	5500 Sistem Jaringan	35,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Panjang jalan permukiman yang dibangun				5500 meter							5500 meter		
1	3 7	2.01	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian infrastruktur di kawasan permukiman				75 kali	35,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	75 kali	45,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				75 Sistem Jaringan							75 Sistem Jaringan		
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5,807,072,927							8,082,027,498	
1	4 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	5,461,597,927						100 Persen	7,726,552,498	
1	4 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen pelaporan yang disusun	Lap		Lap	5 Lap	167,465,120						5 Lap	395,000,000	
1	4 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	98,697,320	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	300,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen							7 Dokumen		
					jumlah dokumen perencanaan yang disusun				7 dokumen							7 dokumen		
1	4 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA dan DPA yang disusun				2 dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 dokumen	15,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen							2 Dokumen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	4 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RPJMD	2021	2022	1 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	0	Jawab DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
1	4 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen pelaporan yang disusun				3 dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 dokumen	25,000,000	HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan							3 Laporan		
1	4 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun				5 laporan	68,767,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 laporan	55,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan							5 Laporan		
1	4 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang		orang	33 orang	3,513,178,890						33 orang	5,100,000,000	
1	4 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya				33 orang	3,513,178,890	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	33 orang	5,100,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bula							33 Orang/bula		
1	4 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	orang		orang	3 orang	50,000,000						3 orang	140,000,000	
1	4 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	65 Paket	110,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kengkapannya				65 stel							65 stel		
1	4 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungai	jumlah aparatur yang mengikuti diklat				3 orang	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 orang	30,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				0 Orang							0 Orang		
					Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang							3 Orang		
1	4 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis		jenis belanja	9 jenis belanja	451,869,693					1	9 jenis belanja	396,552,498	
1	4 1	2.06	1	Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	oeianja			8 komponen	11,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	8 komponen	15,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket							8 Paket		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 4	4 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	3 Paket	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Paket	22,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan				3 unit							3 unit		
1 4	4 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	14,779,950	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Paket	22,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan				9 jenis							9 jenis		
1 4	4 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				4 komponen belanja	80,267,703	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 komponen belanja	62,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket							4 Paket		
1 4	4 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				9 jenis belanja	31,540,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 jenis belanja	40,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket							9 Paket		
1 4	4 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				1200 eksempla r	77,999,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1200 eksempla r	16,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				5 Dokumen							5 Dokumen		
					Disediakan jumlah pariwara cetak dan online				47 per tayang							47 per tayang		
1 4	4 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	yang diadakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	12,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	14,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	4 1	2.06	8	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Pasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	40,237,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	45,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
\vdash	_	<u> </u>			jumlah tamu yang dilayani				1200 tamu							1200 tamu	1	DINAS
1 4	4 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				80 laporan	163,546,040	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	80 Iaporan	160,552,498	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan							80 Laporan		
1	4 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit		unit	2 unit	64,324,500						2 unit	185,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	1 1	1	1		•	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
1	4 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	130,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah pengadaan mebel kantor				2 unit							2 unit		DIVIO
1	4 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	9,712,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor				4 unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit							4 Unit		
1	4 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	54,612,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	55,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	orang		orang	13 orang	547,609,724						13 orang	610,000,000	
1	4 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan				1 komponen tagihan	157,999,056	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 komponen tagihan	220,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				4 Laporan							4 Laporan		
-	++	1	\vdash		Listrik yang Disediakan jumlah rekening tagihan telefon/fax				1 komponen					1		1 komponen	1	
 	++	1	+		yang dibayarkan jumlah tagihan air (PDAM) yang				tagihan 1 komponen							tagihan 1 komponen		
-	++	1	1		dibayarkan jumlah tagihan listrik (PLN) yang				tagihan 1 komponen					 		tagihan 1 komponen	 	
	$\vdash\vdash$	1	1		dibayarkan		 		tagihan					1		tagihan	 	DINAS
1	4 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	389,610,668	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	390,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				16 orang							16 orang		
1	4 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit		unit	1 unit	667,150,000						1 unit	900,000,000	
1	4 1	2.09	1	Daerah Penyedisan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 unit	32,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 unit	50,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	RPJMD	2021	2022	1 Unit				Nasional	Daerah		1 Unit		Jawab
1	4 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				53 unit	441,750,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	53 unit	585,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				53 Unit							53 Unit		
1	4 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				65 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	65 Unit	8,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah pemeliharaan mebel				65 unit							65 unit		
1	4 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				7 unit	6,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	7 unit	7,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit							7 Unit		
1	4 1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	17,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	4 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				88 Unit	69,900,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	88 Unit	250,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/rehap Jumlah data rumah korban bencana				88 unit							88 unit		
1	4 2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan	Jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	data		data	5 data	165,000,000						5 data	165,000,000	
1	4 2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penerima rumah korban bencana alam	data		data	5 data	5,000,000						5 data	5,000,000	
1	4 2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah data penerima rumah korban bencana alam				5 data	5,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	5 data	5,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				5 Dokumen							5 Dokumen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				Pembangunan dan Rehabilitasi	-	RPJMD	2021	2022	Target 2020	ragu munatn	DORAGI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	ragu munatm	Jawab
1	4 2	2.03		Rumah Korban Bencana atau	Jumlah Korban bencana yang direhabilitasi	unit		unit	9 unit	150,000,000						9 unit	150,000,000	
1	4 2	2.03	1	Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				9 Unit Rumah	150,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	9 Unit Rumah	150,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah korban bencana yang direbabilitasi				9 unit							9 unit		
1	4 2	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang diserahkan pada korban bencana	unit		unit	14 unit	10,000,000						14 unit	10,000,000	
1	4 2	2.04	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				14 Laporan	10,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	14 Laporan	10,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah yang diserahkan pada korban bencana				14 unit							14 unit		
1	4 3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	dokume n		dokumen	1 dokumen	110,475,000						1 dokumen	110,475,000	
1	4 3	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kooordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang dilaksanakan	kali		kali	35 kali	15,000,000						35 kali	15,000,000	
1	4 3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang dilaksanakan				35 kali	15,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	35 kali	15,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				35 Laporan							35 Laporan		
1	4 3	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	jumlah koordinasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh yang dilaksanakan	kali		kali	70 kali	20,475,000						70 kali	20,475,000	
1	4 3	2.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Permugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah koordinasi pengendalian penyelenggaraan pemunggaran/peremajaan permukiman kumuh yang dilaksanakan				70 kali	20,475,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	70 kali	20,475,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				70 Laporan							70 Laporan		
1	4 3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	unit		unit	20 unit	75,000,000						20 unit	75,000,000	
1	4 3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				20 Unit Rumah	75,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	20 Unit Rumah	75,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani				20 unit							20 unit		
1	4 5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Presentase perumahan yang sudah di lengkapi PSU	Persen		Persen	100Persen Pers en	70,000,000						100Persen Pers en	80,000,000	
1	4 5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah koordinasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan yang dilaksanakan	kali		kali	50 kali	70,000,000						50 kali	80,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					•	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah		5		Jawab
1	4 5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				7 Lokasi	35,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	7 Lokasi	35,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Panjang jalan perumahan yang dibangun				7 paket							7 paket		
1	4 5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Uliltas Umum Perumahan	Jumlah koordinasi penyediaan prasarana dan utilitas umum perumahan yang dilaksanakan				50 kali	35,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	50 kali	45,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				50 Laporan							50 Laporan		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						4,054,381,500							6,970,094,968	
2	# 2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	Persen		Persen	70 Persen	350,000,050						70 Persen	350,000,000	
2	# 2	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH yang disusun dan ditetapkan	Dokum en		Dokumen	1 Dokumen	350,000,050						1 Dokumen	350,000,000	
2	# 2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	350,000,050		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	0 Dokumen	350,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Tersusunnya dokumen IKPLHD Kabupaten Sijunjung				1 Dokumen							1 Dokumen		
					Tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten Sijunjung				1 dokumen							1 dokumen		
2	# 3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA	Nilai		Nilai	52,80 Nilai	554,999,900						52,80 Nilai	640,000,000	
2	# 3	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Iklim yang terbentuk	Kpg iklim		Kpg iklim	3 Kpg iklim	340,000,000						3 Kpg iklim	260,000,000	
2	# 3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	155,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	3 Dokumen	75,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# 3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				40 Dokumen	185,000,000				8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	40 Dokumen	185,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# 3	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah papan informasi yang disediakan	papan		papan	5 papan	0						5 papan	80,000,000	
2	# 3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				5 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	5 Laporan	80,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah papan informasi yang disediakan				5 papan informasi							5 papan informasi		
2	# 3	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pemulihan Kerusakan Lingkungan	Persen		Persen	100 Persen	214,999,900						100 Persen	300,000,000	

Part	24 Perangkat Daerah	u Rencana Tahun 2024	Prakiraan Maju			ndanaan	dan Kerangka Per	Capaian Kinerja	(Prakiraan Capaian	Realisasi	Target						
	Penanggung	Pagu Indikatif	Target	Kelompok Sasaran			Sumber Dana	Lokasi	Pagu Indikatif	Target 2023	Target RKPD Tahun			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		de	Ko	
2 1 1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN			0	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Dana Transfer Umum-Dana	Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	-		2022	2021	RPJMD	Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan	5	2.03	∌ 3	2
V		702,655,000	80 Persen						692,655,000	80 Persen	Persen		Persen	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	KEANEKARAGAMAN HAYATI			ŧ 4	2
Value Valu	00	702,655,000	1 Dok						692,655,000	1 Dok	Dok		Dok	Jumlah taman yang dikelola	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		2.01	ŧ 4	2
Part			18 Ha							18 Ha	На		На	uas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kot					
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	0	1 Dokumen	0	Sumber Daya Alam yang Berwawasan		Umum-Dana	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	0	1 Dokumen				Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun		1	2.01	∓ 4	2
2			1 dokumen							1 dokumen				pembangunan dan pengelolaan					
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	702,655,000	18 Ha	0	Sumber Daya Alam yang Berwawasan		Umum-Dana	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	692,655,000	18 Ha				Luas RTH yang Dikelola Lingkup	(RTH)	4	2.01	∓ 4	2
Serial Desiral Melaphysis (Figure February Februa	00	30,550,000	20 Persen						15,000,000	20 Persen	Persen		Persen		BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			ŧ 5	2
Fedition Francische Comments (Assessment Media) Fedition Francische Francisch	00	30,550,000							15,000,000						Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2.02	ŧ 5	2
Seminary Seminary	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	11,050,000	1 Dokumen		Sumber Daya Alam yang Berwawasan	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Umum-Dana	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	5,000,000	1 Dokumen				Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	1	2.02	‡ 5	2
PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENGELOL	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	19,500,000	1 Dokumen		Sumber Daya Alam yang Berwawasan	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana	Umum-Dana	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	10,000,000	1 Dokumen				Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3	Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,	2	2.02	# 5	2
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Lin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 # 6 2.01	00	82,000,000	100 Persen						45,000,000	100 Persen	Persen		Persen	kegiatan lainnya terhadap izin	PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN			∓ 6	2
difasilitasi 1.D 1.D 301.D 2 # 6 2.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Semua Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Semua Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kelurahan Semua Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kelurahan	00	82,000,000							45,000,000	50 Laporan	.,,			dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah		2.01	∓ 6	2
2 # 6 2.01 1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 50 Dokumen 50 D			50 I.L							50 I.L	I.L		I.L	Jumlah Rekomendasi PPLH yang difasilitasi					
Jumlah rekomendasi PPLH yang	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	10,000,000	50 Dokumen	0	Sumber Daya Alam yang Berwawasan		Umum-Dana	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	0	50 Dokumen				Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau	1	2.01	₹ 6	2
Offinian recommensas FFLF yang SO LL disadification So LL disadification			50 I.L							50 I.L				Jumlah rekomendasi PPLH yang difasilitasi					

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		Ι			-	RPJMD	2021	2022			Semua		Nasional	Daerah				Jawab DINAS PERUMAHAN,
2	# 6	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas lingkungan hidup yang berkompetensi				1 org	0	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	1 org	7,000,000	KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Orang					8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan		1 Orang		
2	# 6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	50 Laporan	65,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# 6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	0 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				27 Dokumen							27 Dokumen		
					Jumlah ketaatan pemegang izin lingkungan				27 P.I.L							27 P.I.L		
2	# 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kawasan hutan yang dilestarikan berbasis masyarakat	Persen		Persen	30 Persen	85,000,400						30 Persen	438,927,983	
2	# 8	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah satuan Pendidikan Formal dan kelompok masyarakat sadar dan peduli lingkungan hidup	Kelomp ok		Kelompok	7 Kelompok	85,000,400						7 Kelompok	438,927,983	
2	# 8	2.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				1 Lembaga	30,000,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan		1 Lembaga	125,898,409	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# 8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				6 Dokumen	55,000,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan		6 Dokumen	313,029,574	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan prestasi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup	Persen		Persen	5 Persen	0						5 Persen	110,500,000	
2	# 9	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diraih dan diberikan	Penghar gaan		Penghargaan	2 Penghargaan	0						2 Penghargaan	110,500,000	
2	# 9	2.01	1	Rabupaten/Rota Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan, Pilantropi dalam Petindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	3 Entitas	110,500,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	LT	\bot			Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diraih dan diberikan				2 Penghargaan							2 Penghargaan		
2	# #			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penangganan sampah	Persen		Persen	23,00 Persen	2,311,726,150						23,00 Persen	4,615,461,985	
					Persentase pengurangan sampah	Persen		Persen	38,00 Persen							38,00 Persen		
2	# #	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang ditangani	Ton	l	Ton	10.105 Ton	2,311,726,150	1	1	<u> </u>		i	10.105 Ton	4,615,461,985	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# #	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	RPJMD	2021	2022	1 Laporan	55,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Laporan	172,618,121	Jawab DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
2	# #	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Penroresan Akhir Sampah di TAP/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah. Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				11758.8 Ton	2,146,726,150	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	11758.8 Ton	3,674,072,835	HIDUP DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# #	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Teriibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				1 Kelompok	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Kelompok	133,035,617	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# #	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mensezu unda Jakstrau undan Mensezu unda Jakstrau				0 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	0 Dokumen	60,624,863	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	# #	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				11 Unit	90,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	11 Unit	575,110,549	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9,782,901,964							17,332,000,000	
1	5 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	persen		persen	100 persen	6,136,122,964						100 persen	7,832,000,000	
1	5 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	dokume n		dokumen	6 dokumen	25,000,000						6 dokumen	44,500,000	
1	5 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	3,500,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,500,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	3,500,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 dokumen	4,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	30,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan	bulan		bulan	12 bulan	5,254,796,714						12 bulan	5,625,000,000	
1	5 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bula n	5,194,796,714	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	59 Orang/bula n	5,500,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan		Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	20,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Dokumen	25,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	20,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	18 Laporan	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian	orang		orang	196 orang	0					196 orang	550,000,000	
1	5 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Unit	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	200 Paket	200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	10 Orang	300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	397,000,000					12 bulan	310,000,000	
1	5 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5,000,000	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	4 Paket	10,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
											Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro Kab.						
											Sijunjung, Kamang Baru, Kamang						
											Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Kumanis						
1	5 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Paket	110,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Paket	15,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Paket	20,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	12 Paket	5,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	50 Laporan	150,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang dibeli	unit		unit	0 unit	0					0 unit	450,000,000	
1	5 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	2 Unit	100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

						Target	Realisasi	Deskinson Court			Capaian Kineri	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maiu	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				Regiatali/ Sub Regiatali	Negiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu indikatii	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Gasaran	Target	Pagu Indikatii	Jawab
1	5 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	239,326,250						12 bulan	185,000,000	
1	5 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	64,326,250	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	60,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
											Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro							
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru,							
											Kamang Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Kumanis							
1	5 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	175,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang berkondisi baik	unit		unit	23 unit	220,000,000						23 unit	667,500,000	
1	5 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	200,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Unit	600,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	12,500,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	10,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	25,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	10,000,000	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	30,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
											Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro							
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Kamang							
											Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Kumanis							
1	5 2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan petugas perlindungan masyarakat per 1000 penduduk	orang		orang	3,5 orang	1,670,000,000						3,5 orang	5,025,000,000	
					Persentase menurunnya gangguan ketentraman & ketertiban umum	persen		persen	100 persen							100 persen		
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	persen		persen	100 persen							100 persen		
1	5 2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan/potensi gangguan tramtibum yang ditangani	kali		kali	24 kali	1,490,000,000						24 kali	4,400,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Persentase gangguan/potensi gangguan tramtibum yang ditangani	persen		persen	100 persen							100 persen		
1	5 2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				24 Kasus	1,400,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan				0	24 Kasus	3,000,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				10 Kasus	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Kasus	300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				63 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	63 Dokumen	75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63 Dokumen	90,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	63 Dokumen	250,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Orang	425,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	150,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				50 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Unit	0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				25 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Laporan	200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah operasi penegakan Perda dan Perkada	kali		kali	24 kali	180,000,000						24 kali	525,000,000	
1	5 2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				8 Laporan	60,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				50 Laporan	60,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				50 Laporan	60,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 2	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang tersedia	orang		orang	13 orang	0	uranall					13 orang	100,000,000	
1	5 2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				2 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen		persen	100 persen	1,976,779,000						100 persen	4,475,000,000	
					Tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran	menit		menit	15 menit							15 menit		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	5 4	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran	RPJMD kali	2021	kali	60 kali	1,976,779,000			Nasional	Daerah		60 kali	3,550,000,000	Jawab
1	5 4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				25 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Dokumen	300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				365 Laporan	1,926,779,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	365 Laporan	2,600,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				50 Dokumen	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Dokumen	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legi				6 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				20 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Orang	150,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah entitas dengan peralatan proteksi kebakaran yang siap digunakan	bangun an		bangunan	66 bangunan	0						66 bangunan	100,000,000	
1	5 4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				35 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				35 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah penuntasan investigasi kejadian kebakaran	kasus		kasus	6 kasus	0						6 kasus	75,000,000	
1	5 4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				25 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	25 Dokumen	75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah nagari yang siap mencegah kebakaran	buah		buah	10 buah	0						10 buah	300,000,000	
1	5 4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1000 Orang	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				10 Desa/Kelur ahan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Desa/Kelur ahan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				5 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	5 4	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	kali		kali	10 kali	0						10 kali	450,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 5	4	2.05	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	RPJMD	2021	2022	50 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah	0	50 Laporan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2.05	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar				5 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Dokumen	75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia, Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				20 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Unit	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2.05	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				10 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4,153,977,688							10,239,200,000	
1 5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	3,165,995,687						100 Persen	6,959,200,000	
1 5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	28,250,000						100 Persen	60,000,000	
1 5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	14,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	25,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
1 5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	4,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	6 Laporan	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	5,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	2,424,387,338						100 Persen	2,743,200,000	
1 5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bula n	2,396,387,338		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	23 Orang/bula n	2,550,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	15 Dokumen	133,200,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				50 Dokumen	13,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	50 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	3,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	30,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Dokumen	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	18 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1 5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	7,500,000						100 Persen	25,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Penanggung
				Regiatali/ Sub Regiatali	Negratan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Gasaran	Target	Pagu Indikatii	Jawab
1	5 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	25,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	131,000,000	
1	5 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				55 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	55 Unit	11,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	60 Paket	40,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Dokumen	7,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Orang	30,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				4 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Orang	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Orang	28,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	173,024,249						100 Persen	483,000,000	
1	5 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				50 Paket	7,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	50 Paket	12,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	6 Paket	70,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Paket	30,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,006,549		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	40,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	40,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	3,517,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Dokumen	6,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Paket	12,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	25,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	125,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	55 Laporan	250,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Dokumen	10,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	2,750,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	5 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	80,000,000	Jawab BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1.	5 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Unit	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Unit	120,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	2,500,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	244,712,500						100 Persen	343,000,000	
1	5 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	5,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	61,482,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Laporan	138,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	10,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	183,230,200				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Laporan	190,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	288,121,600						100 Persen	424,000,000	
1	5 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	210,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	18 Unit	180,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Unit	5,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	35,213,600				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Unit	110,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit							30 Unit		
1	5 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42,408,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	4,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	75,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Nagari/Destana Minimal Destana Madya	Persen		Persen	10 Persen	987,982,001						10 Persen	3,280,000,000	
					Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen		Persen	8 Persen							8 Persen		
					Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi	Persen		Persen	90 Persen							90 Persen		
					Pesentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen		Persen	55 Persen							55 Persen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1	1			RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah		5		Jawab
1	5 3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga negara yang mendapat layanan infromasi rawan bencana	Orang		Orang	32000 Orang	95,240,000						32000 Orang	250,000,000	
1	5 3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIB) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KEJ Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tingsaliwa				10 Orang	95,240,000	Kab. Sijunjung, Tanjung Gadang, Tanjung Gadang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Orang	250,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
											Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung							
											Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Kamang							
											Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Lubuak Tarok							
1	5 3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang		Orang	200 Orang	258,000,000						200 Orang	1,435,000,000	
1	5 3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	400,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				30 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	253,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	310,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				2 Kawasan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Kawasan	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				30 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	75,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				2 Orang	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Orang	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah warga negara yang mendapat layanan infromasi rawan bencana	Orang		Orang	200 Orang	484,279,978						200 Orang	680,000,000	
1	5 3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				0 Dokumen	15,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
					SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				4 Dokumen							4 Dokumen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	Target 2023	r agu munatn	Kab. Sijunjung,		Nasional	Daerah		Taiget	r agu inuixatii	Jawab BADAN
1	5 3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				1 Orang	439,279,978	Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Orang	350,000,000	PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				0 Orang	30,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Orang	80,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang							100 Orang		
1	5 3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				4 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Laporan	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana	Persen		Persen	25 Persen	150,462,023						25 Persen	915,000,000	
1	5 3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.04	3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan				12 Dokumen	17,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen							0 Dokumen		
1	5 3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Laporan	50,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
1	5 3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				3 Dokumen	132,962,023	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULAN GAN BENCANA DAERAH
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebututhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				0 Dokumen							0 Dokumen		
1				YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						4,258,610,710							7,128,980,000	
1	6 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan PD	Persen		Persen	100 Persen	3,379,730,615						100 Persen	5,258,060,000	
1	6 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	85 Persen	55,354,164						85 Persen	323,040,000	
1	6 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	12,150,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemda	3 Dokumen	86,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	ı Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	6 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RPJMD	2021	3022	6 Dokumen	3,858,514		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemda	6 Døkumen	40,430,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemda	0 Dokumen	40,430,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	39,344,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemda	6 Laporan	69,300,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemda	4 Laporan	86,630,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Keuangan PD	Persen		Persen	100 Persen	2,840,711,138						100 Persen	3,575,700,000	
1	6 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bula n	2,805,736,138		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	pemerintah daerah	26 Orang/bula n	3,454,420,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	14,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	pemerintah daerah	2 Laporan	69,300,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	20,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	pemerintah daerah	14 Laporan	51,980,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian PD	Persen		Persen	100 Persen	29,000,000						100 Persen	103,955,000	
1	6 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	pegawai dan Pemda	40 Paket	57,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	pegawai dan Pemda	0 Orang	17,325,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang							3 Orang		
1	6 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	pegawai dan Pemda	3 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum PD	Persen		Persen	100 Persen	173,605,950						100 Persen	450,825,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	6 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	ROMD	2021		1 paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Automa	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	1 paket	63,890,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
1	6 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	9,394,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	2 Paket	86,630,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	10,258,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	5 Paket	69,300,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	29,579,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	15 Paket	86,625,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	15,025,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	2 Paket	23,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	2 Dokumen	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	12 Laporan	23,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75,272,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah	12 Laporan	69,300,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan barang milik daerah penunjang pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	200,000,000	
1	6 1	2.07	1	Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemda	10 Unit	200,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	131,243,963						100 Persen	128,850,000	
1	6 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kapasitas Tagihan Internet yang dibayarkan Jumlah Tagihan Air (PDAM) yang di bayarkan Jumlah Tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan				12 mbps	25,999,963		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan pemda	12 mbps	55,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	т т	1				RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
1	6 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan pemda	0 Laporan	23,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 dokumen	105,244,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan pemda	1 dokumen	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
1	6 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	149,815,400						100 Persen	475,690,000	
1	6 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				36 Unit	114,819,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	36 Unit	177,870,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	36 Unit	177,870,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	0 Unit	18,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	24,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	0 Unit	46,200,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit							12 Unit		
1	6 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	3 Unit	55,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		Persen	100 Persen	188,902,000						100 Persen	477,750,000	
1	6 2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	Persen		Persen	100 Persen	188,902,000						100 Persen	477,750,000	
1	6 2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	38,902,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	10 Orang	144,370,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	10 Orang	157,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang							0 Orang		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
1	6 2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	RPJMD	2021	2022	30 Kelompok	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	30 Kelompok	104,380,000	Jawab DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	JJumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Lembaga	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat dan pemda	10 Lembaga	71,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima rehabilitasi sosial	Persen		Persen	20 Persen	292,978,095						20 Persen	522,160,000	
					Persentase PPKS lainnya yang bukan korban HIV/AIDs dan Napza diluar panti yang mendapat jaminan sosial	Persen		Persen	63 Persen							63 Persen		
1	6 4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabelitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial dasar	Persen		Persen	100 Persen	199,978,270						100 Persen	331,760,000	
1	6 4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				330 Orang	74,999,910	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat	330 Orang	81,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	27,999,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	70 Orang	75,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang							0 Orang		
1	6 4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
												Dana Transfer Umum-Dana Aleksei Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
1	6 4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	5 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				270 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	270 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				322 Orang	46,978,540		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat	322 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	9,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat	5 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Target	Realisasi				Capaian Kineria	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maiu	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Tames 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
				Registan/ Sub Registan	Negratan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
1	6 4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	12 Orang	34,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PKMS lainnya bukan korban HIS/AIDS dan Napza diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Persen		Persen	20 Persen	92,999,825						20 Persen	190,400,000	
1	6 4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	21,999,950	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	Masyarakat	16 Orang	42,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	70 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22,999,875		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	30 Orang	75,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	5 Orang	40,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Nagari/Desa yang aktif dalam melakukan pemuktahiran DTKS	Persen		Persen	100 Persen	190,000,000						100 Persen	377,010,000	
1	6 5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	orang		orang	32 orang	5,000,000						32 orang	23,100,000	
1	6 5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				32 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	anak terlantar	32 Orang	23,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	185,000,000						100 Persen	353,910,000	
1	6 5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				123282 Orang	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	123282 Orang	110,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				40601 Keluarg a	25,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	40601 Keluarg a	31,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40601 Keluarg a	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	masyarakat	40601 Keluarg a	86,630,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				600 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	600 Orang	125,150,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen		Persen	100 Persen	170,000,000						100 Persen	453,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	H	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio: Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	6 6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan sosial	RPJMD Persen	2021	Persen	100 Persen	115,000,000			Nasional	Daerah		100 Persen	298,000,000	Jawas
1	6 6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	115,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	50 Orang	125,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	50 Orang	83,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.01	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	4 Unit	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Paikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan sosial	Persen		Persen	100 Persen	55,000,000						100 Persen	155,000,000	
1	6 6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Kampung	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	4 Kampung	115,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Prioritas 9. Peningkatan kualitas perlindungan dan kesejahteraan sosial	masyarakat	40 Orang	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana taman makam pahlawan	Persen		Persen	100 Persen	37,000,000						100 Persen	41,000,000	
1	6 7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan sarana prasarana taman makam pahlawan	Persen		Persen	100 Persen	37,000,000						100 Persen	41,000,000	
1	6 7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 unit	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat dan Pemda	1 unit	41,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENGARUSUTAMAAN						497,000,000							892,000,000	
2	8 2			GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG terhadap APBD	Persen		Persen	2 Persen	68,000,000						2 Persen	110,000,000	
2	8 2	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan randa PUG	Persen		Persen	100 Persen	35,000,000						100 Persen	58,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		_				RPJMD	2021	2022	Target 2020	ragu muikatn	LULASI	Sumber Dana	Nasional Nasional	Daerah		raiget	ragu munatm	Jawab
2	8 2	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	35,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Lembaga Pemerintah Daerah	1 Dokumen	58,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 2	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Persen		Persen	15 Persen	8,000,000						15 Persen	24,000,000	
2	8 2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				18 Organisasi	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Perempuan	18 Organisasi	24,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persen		Persen	70 Persen	25,000,000						70 Persen	28,000,000	
2	8 2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				5 Orang	25,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	organisasi perempuan	5 Orang	28,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	Persen		Persen	0.01 Persen	87,000,000						0.01 Persen	177,000,000	
2	8 3	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	17,000,000						100 Persen	27,000,000	
2	8 3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Perempuan	1 Dokumen	27,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 3	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Perempuan korban kekerasan yang diberikan rujukan lanjutan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota	Persen		Persen	100 Persen	70,000,000						100 Persen	150,000,000	
2	8 3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Layanan	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	35,000,000	
2	8 5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen data gender dan anak yang di selesaikan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	35,000,000	
2	8 5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase pemenuhan hak anak	Persen		Persen	100 Persen	84,000,000						100 Persen	60,000,000	
2	8 6	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	Persen		Persen	100 Persen	21,000,000						100 Persen	35,000,000	
2	8 6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Lembaga pemerintah , non pemerintah dan dunia usaha	10 Orang	21,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	8 6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	RPJMD	2021	2022	1 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	Lembaga pemerintah , non pemerintah dan dunia usaha	1 Dokumen	14,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persen		Persen	100 Persen	63,000,000						100 Persen	25,000,000	
2	8 6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	masyarakat dan Pemda	40 Orang	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	masyarakat dan Pemda	1 Dokumen	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	258,000,000						100 Persen	510,000,000	
2	8 7	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban Kekerasan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	80,000,000						100 Persen	100,000,000	
2	8 7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekrasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Perangkat Daerah	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	anak korban kekerasan	16 Perangkat Daerah	55,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	anak korban kekerasan	1 Dokumen	45,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen		Persen	100 Persen	103,000,000						100 Persen	300,000,000	
2	8 7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Anak	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	anak	50 Anak	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memertukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Periklumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Periindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kotandungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Layanan	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	anak	1 Layanan	150,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban Kekerasan yang ditangani	Persen		Persen	100 Persen	75,000,000						100 Persen	110,000,000	
2	8 7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Menerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	75,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Prioritas 10. Revitalisasi nilai-nilai sosial budaya berdasarkan Adat Basandi Syrak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)	anak	1 Dokumen	110,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	7		1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						4,383,750,942							9,688,000,000	
2	7			TENAGA KERJA						4,383,750,942		l					9,688,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Price Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	7 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	Persen	2021	Persen	100 Persen	3,265,612,442			Nasionai	Daeran		100 Persen	5,879,000,000	Jawas
2	7 1	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	dokume		dokumen	2 dokumen	50.629.250						2 dokumen	280.000.000	
2	7 1	2.01	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	yang disusun Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n			2 Dokumen	49,130,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	160,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	0 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	0 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1,499,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	4 Laporan	55,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	orang		orang	24 orang	2,377,186,492						24 orang	3,110,000,000	
2	7 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bula n	2,336,950,492		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	26 Orang/bula n	3,000,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Laporan	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	40,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	14 Laporan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	12 Dokumen	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Usulan RKBMD Pengadaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan Penghapusan serta Perhitungan Standar Kebutuhan yang disusun	dokume n		dokumen	1 dokumen	26,833,000						1 dokumen	55,000,000	
2	7 1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	26,833,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	14 Laporan	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Laporan	15,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	pakaian		pakaian	50 pakaian	23,730,000						50 pakaian	90,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ke	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	7 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RPJMD	2021	2022	1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional 1. I Ber	Daerah Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	23,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. F Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Orang	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis		jenis	5 jenis	478,262,600						5 jenis	1,077,000,000	
2	7 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,365,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	11,317,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	50,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	52,182,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	15,918,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	33,223,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. I Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Dokumen	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	24,411,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. I Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Paket	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,795,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. I Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	70,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	321,047,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. I Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	750,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	12,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	а	а		а	1 a	0						1 a	60,000,000	
2	7 1	2.07	2	Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1. F Ber	Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	3 Unit	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	jenis		jenis	50 jenis	64,473,100						50 jenis	707,000,000	
2	7 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	13,963,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	47,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	50,510,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang erdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	7 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN
2	7 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	pakaian		pakaian	1 pakaian	244,498,000						1 pakaian	500,000,000	TRANSMIGRASI
2	7 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	194,538,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	30 Unit	270,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	12,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	10 Unit	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	37,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Unit	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen		Persen	40 Persen	0						40 Persen	200,000,000	
2	7 2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah RTKM(Rencana Tenaga Kerja Makro) yang disusun	dokume n		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	200,000,000	
2	7 2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				5 Perusahaan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Perusahaan	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		Persen	25 Persen	405,822,350						25 Persen	938,000,000	
2	7 3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah RTKM(Rencana Tenaga Kerja Makro) yang disusun	orang		orang	24 orang	365,822,350						24 orang	660,000,000	
2	7 3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	340,822,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	32 Orang	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				5 Lembaga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Lembaga	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				8 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	8 Unit	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	orang		orang	24 orang	20,000,000						24 orang	80,000,000	
2	7 3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				4 Lembaga	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	4 Lembaga	80,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah rekomendasi perizinan lembaga pelatihan	rekome ndasi		rekomendasi	2 rekomendasi	5,000,000						2 rekomendasi	60,000,000	
2	7 3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				2 Perizinan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Perizinan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	a	а		а	1 a	15,000,000						1 a	68,000,000	
2	7 3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 perusahaan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	15 perusahaan	68,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	aa	а		а	11 a	0						11 a	70,000,000	
2	7 3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	1 Dokumen	70,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	Persen		Persen	32 Persen	357,631,150						32 Persen	1,733,000,000	
2	7 4	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	a	we		we	1 we	311,520,350						1 we	1,210,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	T	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Penanggung
	П			neglatan/ oub Neglatan	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Dana Transfer	Nasional	Daerah	Gasaran	Target	ragu indikatii	Jawab DINAS
2	7 4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				16 orang	65,000,000		Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	16 orang	400,000,000	KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				350 orang	105,547,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	350 orang	400,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				120 orang	30,509,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	120 orang	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				3 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	3 Orang	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
														 Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi 				
2	7 4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 orang	80,463,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	20 orang	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan	dokume n		dokumen	2 dokumen	0						2 dokumen	60,000,000	
2	7 4	2.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi				1 Lembaga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Lembaga	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				1 Lembaga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Lembaga	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi IPK yang dioperasionalkan	dokume n		dokumen	24 dokumen	31,110,800						24 dokumen	345,000,000	
2	7 4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Dokumen	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				50 orang	31,110,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	50 orang	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				100 orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	100 orang	280,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	SSSS	888		sss	1 sss	15,000,000						1 sss	118,000,000	
2	7 4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				5 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Orang	58,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Orang	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				3 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	3 Orang	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 4	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ee	dd		dd	1 dd	0						1 dd	0	
2	7 4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	0	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang mematuhi Peraturan Perundang- Undangan Ketenagakerjaan	Persen		Persen	100 Persen	354,685,000						100 Persen	938,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	7 5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	qqq	aaa	2021	aaa	1 aaa	57,595,000			Nasional	Daeran		1 aaa	290,000,000	0.000
2	7 5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				10 perusahaan	24,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	10 perusahaan	80,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				3 Perusahaan	9,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	3 Perusahaan	90,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	23,635,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	120,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	qqq	ss		ss	1 ss	297,090,000						1 ss	648,000,000	
2	7 5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	50,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Perkara	160,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				2 Perkara	9,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Perkara	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung		3,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
														Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi				
2	7 5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				5 Lembaga	23,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Lembaga	45,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2	7 5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				1333 Orang	213,545,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1333 Orang	400,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
3	\vdash			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
3	# 2			TRANSMIGRASI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase dokumen perencanaan kawasan permukiman transmigrasi	Persen		Persen	30 Persen	500,710,200						30 Persen	2,060,000,000	
3	# 2	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan	yang disusun qqqq	SSSS		8888	1 ssss	0						1 ssss	400,000,000	
3	# 2	2.01	1	Transmigrasi Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain				1 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 dokumen	400,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
3	# 3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun	Persen		Persen	30 Persen	129,976,700						30 Persen	810,000,000	
3	# 3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	qqq	SSS		SSS	11 sss	129,976,700						11 sss	810,000,000	
3	# 3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	6 Laporan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
3	# 3	2.01	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				6 Dokumen	25,508,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	6 Dokumen	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
3	# 3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				19 Kepala Keluarga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	19 Kepala Keluarga	0	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI

3 # 3 2.01 3 # 3 2.01 3 # 3 2.01 3 # 4 2.01 3 # 4 2.01 3 # 4 2.01	5 6 7 1 1 2	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Pelatihan Transmigrasi Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigradi Kawasan Transmigradi Kawasan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Penguatan Pemukiman	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Kepala Keharga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri qqq Jumlah Kepala Keharga Transmigran yang Dibina	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Prakinan Capaian Target RPD Tahun 2022 Persen	Target 2023 19 Kepala Keluarga 30 Orang 19 Kepala Keluarga 75 Persen	Pagu Indikatif 23,819,000 50,000,000 30,648,800	Lokasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prio Nasional	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung	Target 19 Kepala Keluarga 30 Orang 19 Kepala Keluarga	Pagu Indikatif 0 250,000,000	Perangkat Daerah Penanggun Jawab DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN AAN DAN
3 # 3 2.01 3 # 3 2.01 3 # 4 2.01 3 # 4 2.01	7	Pelatihan Transmigrasi Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Mendapatkan Penyuluhan Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyeunikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri 999 Jumlah Kepala Keluarga Transmigrani	Persen	2021	Persen	19 Kepala Kehuarga 30 Orang 19 Kepala Kehuarga	50,000,000		Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Ekonomi yang Ekonomi yang	Sijunjung Kabupaten Sijunjung Kabupaten	19 Kepala Keluarga 30 Orang	250,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJ
3 # 3 2.01 3 # 4 3 # 4 2.01 3 # 4 2.01	6 7 1 1 2 2	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigraai di Kawasan Transmigrasi PROGEMA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesusikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri qqq Jumlah Kepala Keluarga Transmigrani				19 Kepala Keluarga			Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Berdaya Saing Tinggi 1. Ekonomi yang	Sijunjung Kabupaten	19 Kepala		DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI DINAS KETENAGAKERJ
3 # 4 2.01 3 # 4 2.01 3 # 4 2.01	1 2	Transmigrasi PROGEMA PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang Mandiri qqq Jumlah Kepala Keluarga Transmigran				Keluarga	30,648,800		Umum-Dana		Ekonomi yang Perdaya Saing Tinggi			0	KETENAGAKERJ
3 # 4 2.01 3 # 4 2.01	1 2	KAWASAN TRANSMIGRASI Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Transmigrasi yang Mandiri qqq Jumlah Kepala Keluarga Transmigran				75 Persen			mondoi Omdiii		berdaya Sanig Tinggi		J.,		AAN DAN TRANSMIGRASI
3 # 4 2.01	1 2	pada Tahap Kemandirian Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran	qq				370,733,500						75 Persen	850,000,000	<u> </u>
3 # 4 2.01	1 2	Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina			pp	1 qq	370,733,500						1 qq	850,000,000	
	2	Penguatan Infrastruktur Sosial					240 Kepala Keluarga	24,999,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	240 Kepala Keluarga	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
2		Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	345,734,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Satuan Permukiman	350,000,000	DINAS KETENAGAKERJ AAN DAN TRANSMIGRASI
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						4,310,894,620							5,301,000,000	
2 9 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		Persen	100 Persen	3,930,140,820						100 Persen	4,274,500,000	
2 9 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan yang disusun	satuan		satuan	4 satuan	55,507,500						4 satuan	60,000,000	-
			Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	dokume n		dokumen	2 dokumen							2 dokumen		
2 9 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	26,660,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen							5 Dokumen		
2 9 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	28,847,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Laporan	30,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	3,372,395,808						100 Persen	3,523,500,000	
2 9 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				32 orang/bula n	3,352,412,708	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	32 orang/bula n	3,500,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3000 Dokumen	7,525,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3000 Dokumen	8,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	12,457,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	15,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi barang milik daerah	dokume n		dokumen	1 dokumen	12,452,100						1 dokumen	14,000,000	
2 9 1 2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12,452,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1 Laporan	14,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9 1 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	59,031,850						100 Persen	70,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	danaan		Prakiraan Maji	ı Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	9 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RPJMD	2021	2022	59 Paket	30,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Daerah	0	59 Paket	40,000,000	Jawab DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	28,531,850	, Semua Kelurahan Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 Orang	30,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	145,907,862	Kelurahan				100 Persen	295,000,000	
2	9 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakanyang Disediakan				1 Paket	7,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 Paket	10,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Pengadaan mesin absensi wajah				1 paket						1 paket		
2	9 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	8,107,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	0 Paket	8,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pengadaan infocus				1 unit						1 unit		
2	9 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	40,046,210	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	5 Paket	42,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	14,322,890	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata: Kinerja dan Pelayanan Da	0	2 Paket	35,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 dokumen	1,757,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 dokumen	5,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	74,674,262	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0	1 Laporan	195,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	117,987,000					100 Persen	120,000,000	
2	9 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 laporan	13,297,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 laporan	15,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				0 Laporan		ксіціанай				0 Laporan		
2	9 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Listrik yang Disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				1 laporan	104,689,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 laporan	105,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah pegawai THL yang dibayarkan honornya				5 orang						5 orang		
					Jumlah pembayaran langganan SIPKD				12 bulan						12 bulan		
	<u> </u>				Jumlah penyewaan tenda untuk pameran hari jadi				1 unit		Ì				1 unit		
2	9 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	166,858,700					100 Persen	192,000,000	
2	9 1	2.09	2	Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan asuransinya				1 Unit	158,178,700	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningkata Kinerja dan Pelayanan Da	0	1 Unit	180,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara				25 unit						25 unit		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	H	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П	Τ	Π		Jumlah kendaraan dinas roda empat	RPJMD	2021		8 unit				Nasionai	Daeran		8 unit		Junus
2	9 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	yang dipelihara Jumlah Pemeliharaan Komputer dan Laptop				10 Unit	8,680,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Unit	12,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Pemeliharaan Printer				2 Unit							2 Unit		
2	9 2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	0	Persen		Persen	25 Persen	0						25 Persen	180,000,000	
	1 1			FANGAN	Persentase cadangan pangan	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
					Persentase cadangan pangan	Persen		Persen	25 Persen							25 Persen		
2	9 2	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur kemandirian dan seluruh pendukung kemandirian pangan	unit		unit	4 unit	0						4 unit	180,000,000	
					Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	paket		paket	1 paket							1 paket		
2	9 2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Unit	180,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Persen		Persen	82,50 Persen	246,391,400						82,50 Persen	672,000,000	
2	9 3	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	kali		kali	2 kali	87,866,400						2 kali	152,000,000	
					Koefisien of varian harga pangan pokok di tingkat konsumen kecil dari	Persen		Persen	25 Persen							25 Persen		
2	9 3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	13,980,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	20,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	27,834,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				1 Dokumen	10,959,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	27,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	35,091,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Unit	60,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	kelomp ok		kelompok	5 kelompok	158,525,000						5 kelompok	520,000,000	
2	9 3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	21,842,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 laporan	108,176,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 laporan	430,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	28,506,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	Persen		Persen	13 Persen	76,927,300						13 Persen	65,000,000	
2	9 4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	jenis		ienis	3 jenis	15.506.600						3 ienis	0	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	9 4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	RPJMD	2021		1 Dokumen	15,506,600	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	0	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 4	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peta kerentanan dan ketahan pangan	peta		peta	1 peta	61,420,700						1 peta	65,000,000	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	dokume		dokumen	1 dokumen							1 dokumen		
2	9 4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	61,420,700	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen		Persen	85 Persen	57,435,100						85 Persen	109,500,000	
2	9 5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen		Persen	85 Persen	57,435,100						85 Persen	109,500,000	
2	9 5	2.01	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				3 Sertifikat	7,357,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Sertifikat	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	6,230,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	17,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 5	2.01	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	32,847,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
2	9 5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	11,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	17,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
3	#			KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN		Ton/tah				840,641,207							1,470,000,000	
3	# 3	2.01		PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Pokmaswas yang dikelola	un Pokmas was		Ton/tahun Pokmaswas	18 Ton/tahun 10 Pokmaswas	57,357,313 57,357,313						18 Ton/tahun 10 Pokmaswas	230,000,000	
3	# 3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	7,357,313	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokumen	30,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAI
3	# 3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				5 Unit	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	200,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAI
3	# 4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Ta hun		Ton/Tahun	288 Ton/Tahu n	652,849,731						288 Ton/Tahu n	875,000,000	
3	# 4	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi izin usaha perikanan yang diterbitkan	rekome ndasi		rekomendasi	2 rekomendasi	0						2 rekomendasi	15,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 4	2.01	1	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	RPJMD	2021	2022	1 Rekomendasi	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Rekomendasi	15,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
				dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tensae Kerja Asine				0 Rekomendasi							0 Rekomendasi		
3	# 4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah lzin Usaha Perikanan di Bidag Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam daerah kabupaten /kota yang ditrbitkan Jumlah Pembididaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan Pendidikan dan Pelatihan /Penyuluhan da Pendampingan /Kemitraa Usaha /kemudahan akse lptek dan Informasi dan penguatan	dokume n		dokumen	2 dokumen	44,004,600						2 dokumen	90,000,000	
					Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pemberdayaan	orang		orang	50 orang							50 orang		
3	# 4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				1 Kelompok	20,000,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Kelompok	30,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				1 Kelompok	24,004,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Kelompok	60,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah benih budidaya air tawar/air payau yang diproduksi	ekor		ekor	2600000 ekor	608,845,131						2600000 ekor	770,000,000	
					Jumlah pembudidaya ikan yang mendapatkan pengelaan	orang		orang	20 orang	<u> </u>						20 orang		
3	# 4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,445,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit	62,365,448	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lainnva 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	10 Unit	135,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	RPJMD	2021		4 Unit	436,630,358	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daeran Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keati yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	4 Unit	550,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 4	2.04	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				10 Dokumen	33,449,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	10 Dokumen	45,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 4	2.04	5	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 orang	60,955,025	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	30 orang	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang							0 Orang		
3	# 5			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase peningkatan lahan perikanan yang layak	Persen		Persen	5 Persen	17,194,063						5 Persen	45,000,000	
3	# 5	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah lahan perikanan yang diawasi	nagari		nagari	10 nagari	17,194,063						10 nagari	45,000,000	
3	# 5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Laimnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	17,194,063	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen					жинуа		1 Dokumen		
3	# 5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Liainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 dokumen	20,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				0 Dokumen							0 Dokumen		
3	# 6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Rp/tah un		Rp/tahun	12400000 Rp/t ahun	113,240,100						12400000 Rp/t ahun	320,000,000	
3	# 6	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	rekome ndasi		rekomendasi	1 rekomendasi	22,230,100						1 rekomendasi	40,000,000	
3	# 6	2.01	1	Usaha Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	22,230,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokumen	40,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				0 Dokumen							0 Dokumen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П	T	l	Pembinaan Mutu dan Keamanan		RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
3	# 6	2.02		Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	rekome ndasi		rekomendasi	1 rekomendasi	25,375,000						1 rekomendasi	50,000,000	
3	# 6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	25,375,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Unit Usaha	50,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3	# 6	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	paket		paket	1 paket	65,635,000						1 paket	230,000,000	
3	# 6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Ton	41,082,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Ton	60,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Ton							0 Ton		
3	# 6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				5 Pelaku Usaha	24,552,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	5 Pelaku Usaha	170,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha							0 Pelaku Usaha		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						4,241,875,930							5,499,127,511	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen		Persen	100 Persen	3,625,376,280						100 Persen	4,626,487,911	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42,175,400							85,000,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	7,500,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perencanaa n OPD	0 Dokumen	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen							3 Dokumen		
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	7,500,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perencanaa n OPD	4 Dokumen	23,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perencanaa n OPD	2 Laporan	12,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	27,175,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perencanaa n OPD	8 Laporan	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,355,117,934							2,628,056,511	
2	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bula n	2,344,765,684		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		17 Orang/bula n	2,582,056,511	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1200 Dokumen	21,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	I	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RPJMD	2021	2022	2 Laporan	10,352,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Laporan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN
2	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		15 Laporan	10,000,000	SIPIL DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10,350,250							15,000,000	
2	# 1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	BMD	0 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	10,350,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	BMD	2 Laporan	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50,856,150							235,250,000	
2	# 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai Disduk Capil	40 Paket	53,750,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai Disduk Capil	4 Dokumen	6,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai Disduk Capil	0 Orang	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				456 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai Disduk Capil	456 Orang	100,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	50,856,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai Disduk Capil	15 Orang	75,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						795,802,000							956,278,400	
2	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		6 Paket	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	477,276,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		6 Paket	516,086,600	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	5,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	32,123,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		8 Paket	38,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	2 Paket	17,002,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	31,261,800	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Dokumen	3,500,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	15,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	8	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		10 Laporan	27,430,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	246,880,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		85 Laporan	285,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				7000 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7000 Dokumen	25,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							260,000,000	
2	# 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 Unit	200,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Unit	60,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Unit	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						257,000,796							265,623,000	
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	118,849,996		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		48 Laporan	118,850,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	u Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	rarget 2020	r agu muikatn	LUKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	ragu munatn	Jawab
																		DINAS
2	# 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Laporan	31,377,800		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan		10 Laporan	40,000,000	KEPENDUDUKA N DAN
_	"	2.00	3	Perlengkapan Kantor	yang Disediakan				10 Laporan	31,377,000		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		10 Laporan	40,000,000	PENCATATAN
																		SIPIL
																		DINAS
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa							Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.08	4	Kantor	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	106,773,000		Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja dan Pelayanan Daerah		72 Laporan	106,773,000	N DAN
					Disediakan							Alokasi Olliulii		relayanan Daeran				PENCATATAN SIPIL
	_			Pemeliharaan Barang Milik Daerah														SIFIL
2	# 1	2.09		Penunjang Urusan Pemerintahan						114,073,750							181,280,000	
				Daerah								1			+			DINAS
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas							Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.09	2	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Operasional atau Lapangan yang				19 Unit	104,073,750		Umum-Dana		Kinerja dan		19 Unit	111,280,000	N DAN
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							Alokasi Umum		Pelayanan Daerah				PENCATATAN
																		SIPIL
																		DINAS
2			_									Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang baru				3 unit	0		Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 unit	0	N DAN PENCATATAN
												mondor omain		remyanan bacian				SIPIL
	_				Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit							0 Unit		01112
					₩ K** *****							Ì					İ	DINAS
												Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	0		Umum-Dana		Kinerja dan		1 Unit	25,000,000	N DAN
				,	76							Alokasi Umum		Pelayanan Daerah				PENCATATAN
																		SIPIL
																		DINAS
2		2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan		0 Unit	0	KEPENDUDUKA N DAN
2	" 1	2.09	,	rememaraan Aset Tetap Lamnya	Dipelihara				o omi	0		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		o ome	0	PENCATATAN
																		SIPIL
																		DINAS
												Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				0 Unit	0		Umum-Dana		Kinerja dan		0 Unit	0	N DAN
					Dipemara							Alokasi Umum		Pelayanan Daerah				PENCATATAN
																		SIPIL
																		DINAS KEPENDUDUKA
2		2.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				1 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Kinerja dan 		1 Unit	30,000,000	N DAN
2	" 1	2.09	9	Kantor dan Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi				1 Ollit	10,000,000		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		1 Olit	30,000,000	PENCATATAN
					• '													SIPIL
																		DINAS
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau							Dana Transfer		7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 1	2.09	11	dan Prasarana Pendukung Gedung	Bangunan Lainnya yang				0 Unit	0		Umum-Dana		Kinerja dan		0 Unit	15,000,000	N DAN
				Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi							Alokasi Umum		Pelayanan Daerah				PENCATATAN
-	_	<u> </u>	\vdash	PROGRAM PENDAFTARAN								 			1	1	1	SIPIL
2	# 2			PENDUDUK	Persentase Kepemilikan KIA	Persen		Persen	45 Persen	219,427,500						45 Persen	232,427,500	
<u> </u>	_	ļ			Persentase Kepemilikan KK	Persen		Persen	100 Persen			ļ				100 Persen	ļ	
	_	ļ	$\vdash \vdash$		Persentase Kepemilikan KTP el	Persen		Persen	96 Persen							96 Persen	ļ	
2	# 2	2.01	\sqcup	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						219,427,500		-			 	ļ	219,427,500	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan,							_			L			DINAS
2		2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas	Penatausahaan dan Penerbitan				16500 Dokume	100.790.300		Dana Transfer Umum-Dana		 Peningkatan Kinerja dan 	Masyarakat Kab	16500 Dokume	100,790,300	KEPENDUDUKA N DAN
	-	2.01	4	Pendaftaran Penduduk	Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				n	100,790,300		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah	Sijunjung	n	100,790,300	PENCATATAN
					renduduk													SIPIL
																		DINAS
				Penerbitan Dokumen Atas Hasil	Jumlah Laporan Penerbitan							Dana Transfer		7. Peningkatan	Masyarakat			KEPENDUDUKA
2	# 2	2.01	7	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen Atas Hasil Pelaporan				10800 Laporan	118,637,200		Umum-Dana		Kinerja dan	Kab.	10800 Laporan	118,637,200	N DAN
					Peristiwa Kependudukan							Alokasi Umum		Pelayanan Daerah	Sijunjung			PENCATATAN
2	# 0	2.02	\vdash	Penataan Pendaftaran Penduduk						0		+			1		0	SIPIL
- 2	# 2	2.02	\vdash	renataan rendanaran renduduk						0		+			1		0	DINAS
1				Pengadaan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan						Kab.	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	7. Peningkatan				KEPENDUDUKA
2	# 2	2.02	2	selain Blangko KTP-El, Formulir, dan	Buku Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0	Sijunjung,	Umum-Dana	Polhukhankam Dan	7. Peningkatan Kinerja dan		0 Dokumen	0	N DAN
				Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Sesuai dengan Kebutuhan yang						Sijunjung, Muaro	Alokasi Umum	Transformasi	Pelayanan Daerah	1			PENCATATAN
				•	Tersedia								Pelayanan Publik					SIPIL
2	# 2	2.03	1 1	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						0							13,000,000	
<u> </u>				1 criduduk									1		1			

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1				RPJMD	2021	2022	Turget 2020	Tugu mumum	Donusi	Dumber Dum	Nasional	Daerah		Turgot	Tugu Inumutii	Jawab
2	# 2	2.03	1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Laporan	13,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 2	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						0							0	
2	# 2	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				0 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Anak Usia 0-17 Tahun	Persen		Persen	100 Persen	178,860,600						100 Persen	303,000,000	
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kematian yang Peristiwa Kematiannya dilaporkan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
					Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada individu yang Perceraiannya dilaporkan	Persen		Persen	10 Persen							10 Persen		
					Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada Semua Pasangan yan Perkawinannya dilaporkan	Persen		Persen	30 Persen							30 Persen		
2	# 3	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil						178,860,600							253,000,000	
2	# 3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				8110 Dokumen	108,954,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat Kab. Sijunjung	8110 Dokumen	133,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				8110 Layanan	69,906,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat Kab. Sijunjung	8110 Layanan	120,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.01	5	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat Kab. Sijunjung	0 Paket	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Koordinasi dengan Kantor	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi					0							50,000,000	
2	# 3	2.02	1	Komenterian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				10 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		10 Laporan	50,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.02	3	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				5 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 3	2.02	7	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	RPJMD	2021		20 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		20 Dokumen	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						0							0	
2	# 3	2.03	2	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kinerja	Persen		Persen	20 Persen	191,211,700						20 Persen	296,212,100	
2	# 4	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian						166,211,800							256,212,100	
2	# 4	2.01	1	Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				40.37 Dokume n	114,211,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Data kependudu kan	40.37 Dokume n	114,212,100	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 4	2.01	3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				0 Laporan	51,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Data kependudu kan	0 Laporan	142,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				45000 Laporan							45000 Laporan		
2	# 4	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Temoungulum Buetun					24,999,900							40,000,000	
2	# 4	2.03	4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				6 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		6 Dokumen	10,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 4	2.03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 4	2.03	8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				100 Dokumen	24,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		100 Dokumen	30,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 4	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0							0	
2	# 4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur Nagari, Pegawai Dukcapil	0 Laporan	0	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2	# 5			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian data profil perkembangan penduduk	Persen		Persen	100 Persen	26,999,850						100 Persen	41,000,000	
2	# 5	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan						26,999,850	Kab.						41,000,000	DINAS
2	# 5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				100 Dokumen	26,999,850	Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pengguna data	100 Dokumen	41,000,000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	ı Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П				-	RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan				Jawab
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN								Alokasi Umum		Pelayanan Daerah				
2	#			PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						5,703,644,490							9,415,000,000	
2	# 1			DAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	85 Persen	3,508,880,490						85 Persen	4,552,000,000	
2	# 1	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Singkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan	Persen		Persen	85 Persen	84,997,300						85 Persen	95,000,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	48,712,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	46,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	17,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	15,962,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Laporan	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	20,322,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	12,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2				Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase tertib administrasi	_		_	0.5 0							0.50		
2	# 1	2.02		Daerah	keuangan	Persen		Persen	95 Persen	2,601,875,640						95 Persen	3,209,000,000	DINAS
2	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bula n	2,526,590,790		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	26 Orang/bula n	3,105,000,000	PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				26 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	26 Dokumen	19,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	17,435,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	59,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	36,785,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	13,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	21,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	13 Laporan	13,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	95 Persen	0						95 Persen	31,000,000	
2	# 1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	24,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Laporan	7,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	90 Persen	26,950,000				1		90 Persen	148,000,000	
2	# 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				51 Paket	26,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	51 Paket	33,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Orang	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	RPJMD	2021	2022	5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Orang	26,000,000	Jawab DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Orang	69,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	90 Persen	306,638,550						90 Persen	327,000,000	
2	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	9,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	9,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	9,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,076,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	14,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	25,519,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Paket	14,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	8,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	7,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	28,858,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	33,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				198 Laporan	187,144,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	198 Laporan	139,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	56,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	29,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Persen		Persen	80 Persen	0						80 Persen	242,000,000	
2	# 1	2.07	2	Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	74,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	18 Unit	40,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	18 Unit	75,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	20,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RPJMD	2021		1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasionai	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	33,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	80 Persen	260,358,500						80 Persen	254,000,000	
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		0	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	103,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Laporan	83,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	9,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	156,558,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	162,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	80 Persen	228,060,500						80 Persen	246,000,000	
2	# 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	106,040,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	15 Unit	206,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	40 Unit	6,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	34,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Unit	17,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit							50 Unit		
2	# 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	87,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	17,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa mandiri	Nagari/ Desa		Nagari/Desa	15 Nagari/Des a	40,000,000						15 Nagari/Des a	425,000,000	
					Persentase nagari yang dilaksanakan Penataan nagari	Persen		Persen	50 Persen							50 Persen		
					Persentase Peningkatan Status Nagari/Desa Mandiri	Persen		Persen	2 Persen							2 Persen		
2	# 2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang menyelenggarakan penataan desa	Nagari/ Desa		Nagari/Desa	18 Nagari/Des a	40,000,000						18 Nagari/Des a	425,000,000	
2	# 2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				1 Desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	41,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 2	2.01	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya				62 Nagari/Des a	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	62 Nagari/Des a	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya				1 Desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	48,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 2	2.01	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa				1 Desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	46,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	RPJMD	2021	2022	34 Unit	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Daerah 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	34 Unit	245,000,000	Jawab DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah Kerjasama	Dokum		Dokumen	5 Dokumen	100,000,000	Kelurahan		Pelayanan Dasar			5 Dokumen	163,000,000	
2	# 3	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah kerjasama nagari yang difasilitasi	Dokum en		Dokumen	5 Dokumen	100,000,000						5 Dokumen	163,000,000	
2	# 3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	dirasiiitasi Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	en			1 Dokumen	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokumen	28,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	110,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase aparatur pemerintahan desa/nagari yang memiliki kompetensi dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan nagari	Persen		Persen	50 Persen	1,733,619,000						50 Persen	2,689,000,000	
					Persentase nagari/desa dengan indeks transparansi dana desa kategori haik	Persen		Persen	41 Persen	_						41 Persen		
					kategori baik Persentase Peningkatan BUMNAG berkembang	Persen		Persen	10 Persen							10 Persen		
2	# 4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Bum Nagari yang difasilitasi dan dibina untuk berkembang	Bumnag		Bumnag	15 Bumnag	1,733,619,000						15 Bumnag	2,689,000,000	
				remenintanan Desa	Jumlah nagari/desa yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/nagari	Nagari/ Desa		Nagari/Desa	62 Nagari/Des a							62 Nagari/Des a		
					Jumlah nagari yang difasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitasnya	Nagari/ Desa		Nagari/Desa	62 Nagari/Des a							62 Nagari/Des a		
2	# 4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				0 Dokumen	26,926,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	85,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Nagari/Desa				186 Dokumen							186 Dokumen		
2	# 4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum nagari/desayusunannya				5 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	5 Dokumen	100,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				0 Dokumen	243,463,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	189,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				62 Nagari							62 Nagari		
2	# 4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				189 Dokumen	1,164,577,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	189 Dokumen	1,235,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				0 Orang	17,038,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Orang	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priori		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П	I	T		Jumlah Aparatur Pemerintah	RPJMD	2021	2022	62 orang				Nasional	Daerah		62 orang		Jawab
2	# 4	2.01	6	Fasilitasi Penyelenggaraan	nagari/desa yang Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari/Desa yang				62 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan	0	62 Laporan	65,000,000	DINAS PEMBERDAYAA
		2.01		Musyawarah Desa	difasilitasi				oz zaporun		Kab.	Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		02 Buporun	00,000,000	N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Nagari/Desa				3 Dokumen	0	Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	234,076,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	245,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				6 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	6 Laporan	0	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Nagari/Desa yang difasilitasi				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	55,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Nagari/Desa				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	35,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Nagari/Desa serta Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				124 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	124 Dokumen	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD/BPN yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				62 orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	62 orang	95,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				0 Desa	47,539,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Desa	155,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
					Jumlah Ngari/Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				30 Nagari							30 Nagari		
2	# 4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa/Walinagari yang difasilitasi				124 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	124 Laporan	30,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah nagari yang melaksanakan urusan/kewenangan kabupaten				62 Nagari/Des a	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	62 Nagari/Des a	0	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Nagari/Desa serta Lomba Nagari/Desa dan Kelurahan yang difasilitasi				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	120,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang Aktif	Persen		Persen	30 Persen	321,145,000						30 Persen	1,586,000,000	
					Tingkat Penurunan Sengketa Adat	Persen		Persen	13 Persen							13 Persen		
2	# 5	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupateri Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	Lembag a		Lembaga	250 Lembaga	321,145,000						250 Lembaga	1,586,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Kelurahan (Ef. Rw, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa (Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunal, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	RPJMD	2021		4 Dokumen	34,076,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Dokumen	201,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Lembaga	325,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Dokumen	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Pasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	125,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat				62 Nagari/Des a	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	62 Nagari/Des a	0	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				5 Dokumen	287,069,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	5 Dokumen	710,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				62 Keluarga	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	62 Keluarga	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2	# 5	2.01	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				62 Keluarga	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	0	62 Keluarga	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN NAGARI
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3,479,059,012							6,506,000,000	
2	# 1			RELUARGA BERENCANA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,753,054,012						100 Persen	3,939,000,000	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen		Persen	100 Persen	10,000,000						100 Persen	63,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П	T	1			RPJMD	2021	2022	-		Kab.		Nasional	Daerah		_	-	Jawab DINAS
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,000,000	Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	2 Dokumen	20,000,000	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	8,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,412,425,507						100 Persen	2,905,000,000	
2	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang	2,362,123,507	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	22 Orang	2,800,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	13,275,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	37,026,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	18 Laporan	80,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	10,000,000	
2	# 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	85,000,000	
2	# 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Keschatan Masyarakat	0	0 Unit	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Paket	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RPJMD	2021		0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	156,120,000						100 Persen	392,000,000	
2	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Paket	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Paket	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Paket	16,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	28,400,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Paket	100,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Paket	85,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	4,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	5,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	12,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	108,720,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	160,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	45,000,000	
2	# 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase ketersediaan Jasa				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	56,112,505						100 Persen	65,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RIOMB	2021		0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	25,230,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Laporan	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	17,402,505	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13,480,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	118,396,000						100 Persen	374,000,000	
2	# 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	111,896,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	38 Unit	260,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	6,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	53 Unit	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	4,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	Angka		Angka	2,22 Angka	145,200,000						2,22 Angka	930,000,000	
					Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka		Angka	53.85 Angka							53.85 Angka		
2	# 2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persen		Persen	100 Persen	65,000,000						100 Persen	260,000,000	
2	# 2	2.01	1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	3	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	4	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	H	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priorit		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 2	2.01	5	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	RPJMD	2021	2022	0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	6	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal				0 Dokumen kerjasama	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen kerjasama	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0 Dokumenater i	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumenater i	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	8	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				0 Dokumenater i	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumenater i	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal				0 Satuan Pendidikan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Satuan Pendidikan	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				0 Organisasi	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Saraschan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				8 Laporan	65,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	60,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Persen		Persen	94 Persen	80,200,000						94 Persen	670,000,000	
2	# 2	2.02	1	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	41,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	RPJMD	2021		0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	4	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	5	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	6	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	7	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)					0	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
					Jumlah kerentanan dampak kependudukan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2	# 2	2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				2 Laporan	60,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	2 Laporan	253,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumenata n	20,200,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Dokumenata n	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 2	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	21,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	Persen		Persen	76,63 Persen	357,420,000						76,63 Persen	910,000,000	
					Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persen		Persen	11,52 Persen							11,52 Persen		
					Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen		Persen	20,75 Persen							20,75 Persen		
2	# 3	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Masyrakat yang mendapatkan KIE Program Bangga Kencana	Orang		Orang	6200 Orang	153,508,500						6200 Orang	213,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	RPJMD	2021		3 Organisasi	898,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Organisasi	9,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				3 Dokumen	11,518,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Dokumen	16,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	9,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangjunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	3,850,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	5	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media cetak, elektonik dan media lainnnya yang digunakan sesuai kearifan lokal dalam pencitraan program KKBPK				0 Paket	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Paket	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakoream), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Kehuarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				8 Laporan	25,898,700	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	24,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				8 Laporan	109,045,600	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	85,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				8 Laporan	2,297,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	Persen		Persen	86 Persen	19,123,200						86 Persen	188,000,000	
2	# 3	2.02	1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				0 Organisasi	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.02	2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumiah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Juntuk Petugas Keluarga Berencana (Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKP, LKB)				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	23,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				220 Orang	19,123,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	220 Orang	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	Persen		Persen	100 Persen	125,327,700						100 Persen	352,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Keschatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Keschatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	RPJMD	2021	2022	13 Laporan	44,755,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	13 Laporan	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				900 Orang	68,297,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	900 Orang	75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	4	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				12 Unit	2,900,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Unit	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	7	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	9,375,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Laporan	4,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	9	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				0 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				0 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	8,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persen		Persen	100 Persen	59,460,600						100 Persen	157,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan	RPJMD	2021	2022	3 Organisasi	18,021,600	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Organisasi	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				0 Dokumen	0	Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				26 Kampung	41,439,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	26 Kampung	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 3	2.04	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja, Ibu Hamil, Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	Persen		Persen	36,52 Persen	223,385,000						36,52 Persen	727,000,000	
2	# 4	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE	Persen		Persen	34 Persen	173,385,000						34 Persen	552,000,000	
2	# 4	2.01	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Baita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (Pik-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bina Keluarga Bernaja (Fik-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk				371 Kelompok	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	371 Kelompok	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kessjahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	10,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	20 Unit	11,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	3	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				34 Laporan	40,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	34 Laporan	81,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPFKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				303 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	303 Orang	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				23 Kelompok	10,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	23 Kelompok	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				26 Laporan	93,385,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	26 Laporan	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 4	2.01	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	RPJMD	2021		0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.01	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Kegiatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persen		Persen	34 Persen	50,000,000						34 Persen	175,000,000	
2	# 4	2.02	1	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKI, PPPKS, PIK, R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Ketharga (BKB, BIK, BKL, PPRS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (JUPKS)				0 Organisasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteranan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPFKS, PIK-R dan Pemberdayana Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyaraktan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesjahteraan Ketuarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				0 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarae /UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)				0 Organisasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	# 4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						11,262,757,896							26,142,704,357	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi akuntabilitas kineja perangkat daerah	nilai		nilai	B nilai	3,579,447,796						B nilai	5,814,704,357	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	105,473,685						100 Persen	60,000,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	105,473,685		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Dokumen	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,703,484,784						100 Persen	2,709,484,784	

2 * 1 2.02 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan Tunjangan ASN dan Tunjan	gram / Wagiston / Sub			Prakiraan Capaian		,	∠apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	naanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
2 # 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi Pera Laporan Lapora	Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	g yang Menerima Gaji	RPJMD	2021	2022	27 Orang/	2,679,484,784			Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	0	27 Orang/	2,679,484,784	Jawab DINAS
2	ran Keuangan Akhir dan Laporan Hasil				bulan 14 Laporan	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah	0	bulan 14 Laporan	30,000,000	PERHUBUNGAN DINAS
2 # 1 2.05 Daerah perangkat daera 2 # 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Jumlah Orang y Sosialisasi Perat Undangan 2 # 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Persentase tertil Decrah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Vanga Disediakan 2 # 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kuntor Perlengkapan Kuntor Jumlah Paket B. yang Disediakan 2 # 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket B. yang Disediakan 2 # 1 2.06 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket B. yang Disediakan 2 # 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Rapat Koordinasi Administrativa Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Administrativa Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Administrativa Penunjang Urusan Pemerintah Persentase keter Penunjang Urusan Pemerintah Persentase keter Penunjang Urusan Pemerintah Persentase keter Perunjang Urusan Pemerintah Persentase keter Perunjang Urusan	nyusunan Laporan hir Tahun SKPD							Alokasi Umum					, ,	PERHUBUNGAN
2 # 1 2.05 10 Undangan Sosialisasi Perat Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Undangan Persentase tertit Deerah Deer		Persen		Persen	100 Persen	0	Semua					100 Persen	40,000,000	
2 # 1 2.06 1 Penyedian Komponen Instalasi Jumlah Paket K Listrik/Penerang yang Disediakan Vandah Paket K Listrik/Penerang yang Disediakan Vandah Paket K Listrik/Penerang yang Disediakan Vandah Paket K Listrik/Penerang yang Disediakan Vandah Paket K Disediakan Vandah Paket K Vandah Paket K Vandah Paket K Vandah Paket K Vandah Paket K Vandah Van	g yang Mengikuti raturan Perundang-				0 Orang	0	Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Orang	40,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.06 1 Listrik/Penernang Rangunan Kantor 2 # 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 # 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 # 1 2.06 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 # 1 2.06 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 # 1 2.06 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 2 # 1 2.06 9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan tamu 2 # 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milk Daerah Penunjang Urusan Penerintah Daerah 2 # 1 2.07 2 Pengadaan Rangan Milk Daerah Penunjang Urusan Penerintah Daerah 2 # 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerintah Disediakan 2 # 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penerintah Daerah 2 # 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Subisdiakan Daerah 2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Perlalatan dan Perlengkapan Kantor 2 # 1 2.09 4 Penyediaan Jasa Pengharan Umum Kantor 2 # 1 2.09 6 Penyediaan Jasa Peneliharaan, Penerintahanan Perlalatan dan Perlangkapan Kantor Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Perlangkapan Kantor Jumlah Laporan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Perlangkapan Kantor Jumlah Laporan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Perlangkapan Kantor Jumlah Laporan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentasa tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentase tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentasa tertih Penunjang Urusan Penerintahanan Persentasa dan Penunjang	rtib administrasi umun erah	Persen		Persen	100 Persen	290,759,755						100 Persen	426,931,000	
2 # 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 # 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 # 1 2.06 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2 # 1 2.06 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengagandaan ya Pengagandaan ya Pengagandaan ya Pengagandaan ya Umlah Laporan Kantor 2 # 1 2.06 8 Pasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Repat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase keter Perencanaan Daerah Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Disediakan Operasional atau Lapangan Dinas doperasional atau Lapangan Dinas Pengenjang Lusan Persentase keter Perencanaan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Perencanaan Dinas Pengenjang Lusan Persentase keter Penunjang Urusan Penunjang Urusan Persentase keter Penunjang Urusan Penunjang Urusan Persentase keter Penunjang Urusan Penunjang Urusan Persentase keter Penunjang Urusan Penunjang Urusan Persentase keter Penunjang Urusan Penunjang Urusan Persentase keter Penunjang Urusan	t Komponen Instalasi angan Bangunan Kanto tan	r			3 Paket	2,931,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Paket	2,931,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket B. Penggandaan ya Jumlah Laporan tamu 2 # 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan tamu 2 # 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Ket Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Ket Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Ket Operasional atau Lapangan Pengelaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Komunikasi, Sunber Daya Air dan Listrik 2 # 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pengelaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Pengelaan Jasa Penyediaana Penyediaan Jasa Penyediaana Penyediaana Penyediaana Penyediaana Penyediaana Jasa Penyediaana Penyediaana Penyediaana Penyediaana Jasa					5 Paket	39,790,525		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Paket	60,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.06 5 Penggandaan ya 2 # 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan tamu 2 # 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan 2 # 1 2.07 2 Pengadaan Berang Milik Daerah Persentase keter perencanaan Jumlah Unit Kendarah Daerah 2 # 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Diserdiakan Pemerintahan Daerah 2 # 1 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 # 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 # 1 2.09 Penyediaan Jasa Penyedian Disas diakan Daerah Penyediaan Daerah Penyediaan Jasa Penyedian Persentase tertit Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan, Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan, Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan, Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan, Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan Persentase tertit Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan Dipelihara dan Persentase tertit Daerah Penyediaan Jasa Peneliharaan Dipelihara dan Unimah Gedung Alaman Daerah Lainnya Peneliharaan Pengangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Pengangan Daerah Jumlah Gaedung Bangunan Lainnya Dipelihara dan Pengangan Daerah Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Pengangan Daerah Dipelihara dan Pengangan Daerah Dipelihara dan	t Bahan Logistik Kantor can				1 Paket	26,857,330		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Paket	34,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Agapat	t Barang Cetakan dan yang Disediakan				2 Paket	60,609,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Paket	115,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.06 9 Heryelenggaran Rapait Koordinas (Annosultasi SKPD) 2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas (Operasional atau Lapangan) 2 # 1 2.08 Pengadaan Kendaraan Dinas (Operasional atau Lapangan) 2 # 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pengenian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Pengenian Jasa Pengunjang Urusan Pengenian Jasa Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Jumlah Laporan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Diseriah Jumlah Laporan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Pengunjang Urusan Urusan Pengun	an fasilitasi kunjungan				1 laporan	10,215,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentasa keter perencanaan Jumlah Lutit Ke Operasional atau Lapangan Pengangan Lapangan Persentasa keter perencanaan Pengangan Lapangan Penganjangan Jamlah Lutit Ke Operasional atau Diaediakan Penganjangangan Penganjangan	ran Penyelenggaraan nasi dan Konsultasi				1 dokumen	150,355,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.08 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unuan Pengediaan Jasa Penunjiang Urusan Persentase keter Penunjiang urusan Pengediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Uniah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Uniah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Penglatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Penglatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlahatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlahatan dan Penglatan dan Penglatan Jasa Penglatan dan Penglatan dan Penglatan Jasa Penglatan dan Penglatan dan Penglatan Jasa Penglatan dan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan dan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Laporan Jumlah Laporan Penglatan Jumlah Lapora	tersediaan BMD sesua	Persen		Persen	100 Persen	0		Alokasi Cilidii		relayanan Dacran		100 Persen	1,750,000,000	
2 8 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlanganan Umum Kantor Jumlah Laporan Perlanganan Umum Kantor Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase tertih Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Persentase tertih Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Barang Milik Daerah Persentase tertih Laporan Pemeliharaan Diaperah Persentase tertih Laporan Umum Kendaraan Perlangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Kendaraan Perlangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Capa Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihar	Kendaraan Dinas atau Lapangan yang				2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	1,750,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Perlantan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlantan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlantan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlantan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlantan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Perlantan dan Pendejayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Pelayanan Umum Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Persentase tertih Diapatan Diapatan dan Menduran Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Pensentase Diapatan Diapata	tersediaan jasa usan pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	249,039,572		Alokasi Cilidii		relayanan Dacran		100 Persen	408,288,572	
2 # 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlantan dan Perlantan dan Perlengkapan Kantor 2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 # 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyanan Umum Pelayanan Umum Kantor 2 # 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Kendaraan Dipelihara dan Kendaraan Dipelihara dan Kendaraan Dipelihara dan Cantanya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dipelihara dan Upada Dipelihara dan Kendaraan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Jumlah Gedung Kenderaan Dipelihara dan Cantanya Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipelihara dan Dipe	ran Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan				1 Laporan	99,924,572				6. Pembangunan dan Pemeliharaan	0	1 Laporan	99,924,572	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 2 # 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Persentase tertil Daerah 2 # 1 2.09 1 Pemeliharaan, dan Pejak Pemeliharaan, Jumlah Kendara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Penyemeliharaan, Daerah Pemeliharaan Dispelihara dan dengan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 # 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralata yang Dipelihara dan dengan Pemeliharaan Penyemelihara Daerah Pemeliharaan Penyemelihara Daerah Pemeliharaan Penyemelihara Daerah Pemeliharaan Penyemelihara Dipelihara D	ran Penyediaan Jasa Perlengkapan Kantor kan				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	135,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase tertik Daerah 2 # 1 2.09 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 # 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas satau Kendaraan Dinas Jabatan 2 # 1 2.09 6 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Dipelihara dan Kendaraan Dinas Jabatan 2 # 1 2.09 9 Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Jumlah Peralata yang Dipelihara 2 # 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Bangunan Lainnya 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN HALU LINTAS DAN ANGKUTAN JAJAM (ILAJ) 2 # 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ran Penyediaan Jasa num Kantor yang				1 Laporan	149,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	173,364,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.09 1 Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dipelihara dan Chara Bara Bara Bara Bara Bara Bara Bara	rtib administrasi BMD	Persen		Persen	100 Persen	230,690,000						100 Persen	420,000,001	
2 # 1 2.09 6 Lainnya yang Dipelihara	araan Perorangan Dina an Dinas Jabatan yang n dibayarkan Pajaknya	s			24 Unit	213,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	24 Unit	320,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 1 2.09 9 Femeinaraan/ kenaolinasi cedung	atan dan Mesin Lainny ra	а			30 Unit	11,940,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Unit	1	DINAS PERHUBUNGAN
2	innya yang				3 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Unit	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan Dokumen renca:	angka kecelakaan lalu	Persen		Persen	90 Persen	7,683,310,100						90 Persen	20,328,000,000	
	cana induk jaringan	dokume n		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	0	
	men Penyusunan ik Jaringan LLAJ ota				0 Dokumen	0					0	0 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN
	as jalan mantap yang sarana jalan sesuai	Persen		Persen	100 Persen	6,627,362,950						100 Persen	15,477,000,000	
	rana Jalan di Jalan ota yang Terbangun				15 Unit	59,554,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	15 Unit	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
	ngkapan Jalan di Jalan ota yang Tersedia				5 Unit	6,357,836,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	5 Unit	14,727,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2 # 2 2.02 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Prasaran Prasarana Jalan Terehabilitasi da					20 Unit	39,971,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	20 Unit	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	RPJMD	2021	2022	100 Unit	170,000,000		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 6. Pembangunan dan Pemeliharaan	0	100 Unit	400,000,000	Jawab DINAS
2		2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah pengelolaan parkir yang	lokasi		lokasi	8 lokasi	321.315.000		Alokasi Umum		Infrastruktur Dasar		8 lokasi	600,000,000	PERHUBUNGAN
2	# 2	2.04		Pembangunan Fasilitas Parkir	dikerjasamakan	iokasi		iokasi	8 IOKASI	321,315,000			Memperkuat			8 I0K881	600,000,000	
2	# 2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	321,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	1 Laporan	600,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase jumlah kendaraan laik uji	Persen		Persen	100 Persen	441,659,400						100 Persen	3,440,000,000	
2	# 2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				3 Unit	69,133,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	3 Unit	2,590,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4000 Dokumen	99,846,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar 	0	4000 Dokumen	120,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	8,982,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar 	0	2 Laporan	15,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	158,999,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar 	0	10 Unit	550,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.05	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				80 Laporan	104,698,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar 	0	80 Laporan	165,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pengaturan lalin dan MRLL yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	224,696,250						100 Persen	300,000,000	
2	# 2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3			1 Laporan	224,696,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	1 Laporan	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen rekomendasi anda lalin	dokume n		dokumen	1 dokumen	6,350,000						1 dokumen	50,000,000	
2	# 2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				1 Laporan	6,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		 Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar 	0	1 Laporan	50,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	# 2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pasar/terminal angdes berizin/tidak berizin yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	lokasi		lokasi	8 lokasi	61,926,500						8 lokasi	461,000,000	
2	# 2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	61,926,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	1 Laporan	461,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7,235,129,547							9,102,450,000	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian program penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	96 Persen	3,274,131,847						96 Persen	4,444,950,000	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencaaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	98,243,850						100 Persen	100,300,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	27,587,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	3 Dokumen	28,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	8,800,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 Dokumen	8,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	7,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 Dokumen	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 Dokumen	6,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Part							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
Part	2 #	÷ 1	2.01	6	Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	RPJMD	2021	2022		-	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	7. Peningkatan Kinerja dan	pada perangkat		10,000,000	Jawab DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Part	2 #	÷ 1	2.01	7		Perangkat Daerah				6 Laporan	33,356,100	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	pada perangkat	6 Laporan	35,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Part Fig. Part	2 #	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian [elayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	2,500,031,137						100 Persen	3,518,600,000	
2 V 1 200 2 Programs Antonimiento de contractivo production in the programs and contractive principles and contractiv	2 #	ŧ 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 orang/bula n	2,342,425,037	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kinerja dan	Perangkat	20 orang/bula n	3,355,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 1 2.02 3 Principal Principal Securing Configuration Fromtonic Advances (April 1997) 12.000 10.00000 10.0000	2 #	ŧ 1	2.02	2						13 Dok	51,114,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kinerja dan	Perangkat	13 Dok	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 v 1 2.02 4 Automated 450°C Productional Action 150°C Production of the Productional State Productional State Production of the Productional State Production of the Production of the Productional State Production of the P	2 #	F 1	2.02	3	Pengujian/Verifikasi Keuangan	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan				1500 Dokumen	13,500,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kinerja dan	Perangkat	1500 Dokumen	13,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Part Part	2 #	ŧ 1	2.02	4						12 dok	5,000,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Kinerja dan	Perangkat	12 dok	6,600,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2 #	F 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Dokumen	59,932,300	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	Perangkat	1 Dokumen	60,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Person P	2 #	ŧ 1	2.02	6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut				1 Dokumen	5,000,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum - Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	Perangkat	1 Dokumen	5,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Trivulanan/ Semesteran SEPO dan Laporan Keungan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Keungan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Keungan Lapora	2 #	1	2.02	7	Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				13 Laporan	23,059,800	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	Perangkat	13 Laporan	23,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 # 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Persenta Pe						Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				0 Laporan							0 Laporan		
Daerah kepegawaian perangkat daerah Persen 100 Persen 56,750,000 Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro Pelavanan Dasar Pelavanan Da	2 #	ŧ 1	2.02	8						1 dok	0	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	Perangkat	1 dok	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 # 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 #	1	2.05				Persen		Persen	100 Persen	56,750,000						100 Persen	85,800,000	
Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 paket	2 #	F 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0 Paket	25,250,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	pada perangkat	0 Paket	30,800,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2 # 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 7 Orang Memperkuat Kab. Sijunjung, Sijunjung, Memperkuat Untuk Mendukung Pendukung Memperkuat Untuk Mendukung Pendukung Mempensangan Alokasi Umum Pelayanan Dasar Pelayanan Dasar 7 Orang 7 Orang 7 Orang 7 Orang										44 paket							44 paket		
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 7 Orang 7 Orang Pendidikan dan Pelatuhan 7 Orang	2 #	ŧ 1	2.05	9		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				0 Orang	31,500,000	Sijunjung, Sijunjung,	Umum-Dana	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Kinerja dan	pada perangkat	0 Orang	55,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Christian dun 1 Chairm						dan Fungsi yang Mengikuti				7 Orang				- warming and the balling			7 Orang		
2 # 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Persen 100 Persen 168,750,000	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi	Persen		Persen	100 Persen	168,750,000						100 Persen	216,150,000	

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	#	1 2	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kromb	2021		8 paket	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	8 paket	8,250,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,250,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	3 Paket	4,400,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	32,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Paket	27,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Paket	11,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	117,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	30 Laporan	165,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	45 Persen	100,000,000						45 Persen	150,000,000	
2	#	1 2	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				36 Unit	100,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur di perangkat daerah	36 Unit	150,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	195,856,860						100 Persen	214,500,000	
2	#	1 2	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Laporan	7,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	80,273,460	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Laporan	82,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Laporan	4,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	111,583,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	12 Laporan	121,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	154,500,000						100 Persen	159,600,000	
2	#	1 2	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	21,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 Unit	23,100,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	70,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	13 Unit	70,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#	1 2	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	10 Unit	3,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				g,g		RPJMD	2021	2022	rarget 2025	ragu inuikatii	LULASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		raiget	ragu munacm	Jawab
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	26,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	0 Unit	26,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit							39 Unit		
2	# 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				1 unit	37,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Aparatur pada perangkat daerah	1 unit	37,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase desiminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan sop yang telah ditetapkan	Persen		Persen	60 Persen	1,791,000,000						60 Persen	1,817,000,000	
2	# 2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aduan masyarakat yang ditindak lanjuti	berita		berita	400 berita	1,791,000,000						400 berita	1,817,000,000	
2	# 2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				15 Dokumen	105,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	15 Dokumen	105,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				35 Dokumen	1,260,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	35 Dokumen	1,260,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				35 Dokumen	95,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	35 Dokumen	110,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				10 Dokumen	45,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	10 Dokumen	33,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				5 Dokumen	43,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	5 Dokumen	66,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendesiminasikan Informasi Program dan kegiatan pemerintah				10 Dokumen	243,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	10 Dokumen	243,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen		Persen	70 Persen	2,169,997,700						70 Persen	2,840,500,000	
					Persentase OPD yang terhubung denga akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2	# 3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain dan sub domain pemerintah daerah	Persen		Persen	85 Persen	1,725,000,000						85 Persen	1,857,000,000	
2	# 3	2.01	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah pendaftaran nama domain pemerintah kabupaten/kota				96 Domain	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD, Nagari dan Masyarakat Kab. SIjunjung	96 Domain	24,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.01	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 dok	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD, Nagari dan Masyarakat Kab. SIjunjung	1 dok	23,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				35 Unit	1,725,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD, Nagari dan Masyarakat Kab. Sijunjung	35 Unit	1,810,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistim informasi dan terintegrasi sesuai kebutuhan dan pengelolaan ekosistim kabupaten cerdas	Persen		Persen	50 Persen	444,997,700						50 Persen	983,500,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		ı	1			RPJMD	2021	2022			Kab		Nasional Memperkuat	Daerah				Jawab
2	# 3	2.02	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 dok	50,000,000	Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	1 dok	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				0 Unit	99,997,700	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	0 Unit	203,500,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Pusat Data Pemerintah Daerah yang Dikelola				16 Unit							16 Unit		
2	# 3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				16 Unit	175,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	16 Unit	400,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	100,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 dok	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat Kabupaten Sijunjung	1 dok	180,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						140,000,000							190,000,000	
2	# 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase peningkatan pemanfaatan data statistik sektoral	Persen		Persen	70 Persen	140,000,000						70 Persen	190,000,000	
2	# 2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	Persen		Persen	70 Persen	140,000,000						70 Persen	190,000,000	
2	# 2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral				3 Dokumen	90,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat se Kab. SIjunjung	3 Dokumen	180,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	# 2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				24 orang	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD dan Masyarakat se Kab. SIjunjung	24 orang	10,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						150,000,000							485,000,000	
2	# 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase layanan publik yang telah menerapkan sistem persandian	Persen		Persen	45 Persen	150,000,000						45 Persen	485,000,000	
					Persentase layanan publik yang telah menerapkan sistem persandian	Persen		Persen	45 Persen							45 Persen		
2	# 2	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem informasi yang telah menerapkan persandian	Persen		Persen	45 Persen	150,000,000						45 Persen	485,000,000	
2	# 2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang di tetapkan				1 dok	50,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD se Kab. Sijunjung	1 dok	235,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				0 Dokumen							0 Dokumen		
2	# 2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	100,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	OPD se Kab. Sijunjung	1 Laporan	250,000,000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5,364,235,707							7,230,750,000	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	4,781,533,107						100 persen	6,626,750,000	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen		persen	85 persen	250,104,550						85 persen	200,000,000	

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	F	Code			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.0	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Anggaran perangkat Daerah (RKA)	RPJMD	2021	2022	4 Dokumen	44,888,650	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	4 Dokumen	50,000,000	DINAS PERIDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
2	# 1	2.0	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen	68,097,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	3 Dokumen	100,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.0	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Dokumen	137,118,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Lainnya 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	8 Dokumen	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.0	.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	3,584,522,000				***************************************		100 persen	4,789,000,000	
2	# 1	2.0	.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bula	3,500,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	35 Orang/bula n	4,714,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.0	.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	45 Dokumen	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.0	.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	42,261,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Dokumen	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1		2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	RPJMD	2021		18 Laporan	42,261,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	18 Laporan	40,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	. 2	2.03		pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	0				0.0		100 persen	15,000,000	
2	# 1	. 2	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Laporan	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	. 2	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	45,000,000						100 persen	72,750,000	
2	# 1	. 2	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	30,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnwa	0	1 Paket	47,750,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	. 2	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Dokumen	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	. 2	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengkuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	15,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	2 Orang	25,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	. 2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	358,046,780						100 persen	515,000,000	
2	# 1	. 2	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,755,100	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Paket	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	1 Paket	15,283,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Paket	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Paket	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	53,423,480	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Paket	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	40,100,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	1 Paket	25,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				50 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	0	50 Dokumen	10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	14,989,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	12 Laporan	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	221,495,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	25 Laporan	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen	2021	persen	100 persen	10,000,173			Nasionai	Daeran		100 persen	235,000,000	ouwab
2	# 1	2.07	2	Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	4 Unit	150,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	4 Unit	60,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10,000,173	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Leinvur	0	1 Unit	15,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	10 Unit	10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	304,522,104						100 persen	365,000,000	
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	12 Laporan	45,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	145,446,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	12 Laporan	250,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021		12 Laporan	29,970,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	12 Laporan	20,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	126,606,104	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	12 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	229,337,500						100 persen	435,000,000	
2	# 1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	146,300,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	28 Unit	350,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				6 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya Lainnya	0	6 Unit	10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	39,720,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	3 Unit	25,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 1	1	2.09	10	Pemcliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi				1 Paket	22,977,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Paket	0	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	1	Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior	ritas	Kelompok Sasaran		D T. 415 - 416	Penanggung
					Regiatan/ Sub Regiatan	Regiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
2	# 1	2.0	09 1	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	20,340,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnwa	0	1 Paket	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 2				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Faslititasi Penerbitan Usaha Simpan Pinjam	persen		persen	45.4 persen	0						45.4 persen	50,000,000	
2	# 2	2.0)1		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Koperasi yang difasilitasi	persen		persen	45.4 persen	0						45.4 persen	50,000,000	
2	# 2	2.0	01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Kenaggotan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10 Unit Usaha	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	o	10 Unit Usaha	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 3				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rata-rata omset Koperasi aktif (Rp Juta)	juta		juta	166.89 juta	39,225,000						166.89 juta	66,000,000	
2	# 3	2.0)1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	KSP/US P		KSP/USP	55 KSP/USP	39,225,000						55 KSP/USP	66,000,000	
2	# 3	2.0	01	1	Pengawasan Kekuatan, Keschatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				55 KSP/USP	39,225,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	55 KSP/USP	66,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 4				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	persen		persen	40 persen	53,776,750				1011111111		40 persen	70,000,000	
2	# 4	2.0)1		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Sehat	KSP/US P		KSP/USP	55 KSP/USP	53,776,750						55 KSP/USP	70,000,000	
2	# 4	2.0	01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				55 KSP/USP	53,776,750	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	o	55 KSP/USP	70,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 5				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	persen		persen	88.50 persen	73,064,450				***********		88.50 persen	116,000,000	
2	# 5	2.0)1		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus dan Pengawas yang dilatih	orang		orang	80 orang	73,064,450						80 orang	116,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan		Prakiraan Maj	u Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompo Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П		Т			RPJMD	2021	2022	Target 2025	r agu munatn	LURASI	Sumber Dana	Nasional Daerah 2. Pengembar		Target	ragu Indikatii	Jawab
2	# 5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				60 Koperasi	73,064,450	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Usaha Pariwi Ekonomi Kea Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan Perhotelan se Informasi, Komunikasi d Sektor Terkai	ita dan Tyang O an a	60 Koperasi	116,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	persen		persen	61.48 persen	16,637,400					61.48 persen	29,000,000	
2	# 6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Modal Sendiri	persen		persen	2.39 persen	16,637,400					2.39 persen	29,000,000	
2	# 6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperras Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Koperasi	16,637,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pengembar Usaha Pariwi Ekonomi Keat Didukung Infrastruktur Transportasi, Industri, Perdagangan Perhotelan se Informasi, Komunikasi d Sektor Terkai Lainnya	ita dan Fyang O an a	20 Koperasi	29,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	# 7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	persen		persen	4.3 persen	199,999,000					4.3 persen	99,000,000	
2	# 7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha Kecil/Mikro Menjadi Wirausaha	persen		persen	0.25 persen	199,999,000					0.25 persen	99,000,000	
2	# 7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				1 Dokumen	199,999,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pengembar Usaha Pariwi Ekonomi Keat Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan Perhotelan se Informasi, Komunikasi d Sektor Terkai	ta dan Yang O an a	1 Dokumen	99,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah fasilitasi pinjaman Dana Bergulir				20 KUM-LKM						20 KUM-LKM		
					jumlah Monitoring dan Evaluasi KUM-LKM Nasabah Dana Bergulir				677 KUKM- LKM						677 KUKM- LKM		
2	# 8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	persen		persen	5 persen	200,000,000					5 persen	174,000,000	
2	# 8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	persen		persen	5 persen	200,000,000					5 persen	174,000,000	
2	# 8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bimtek Usaha pemula yang dilakukan				90 Orang	200,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2. Pengembar Usaha Pariwi Ekonomi Keal Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan Perhotelan se Informasi, Komumikasi d Sektor Terkai	ita dan Fyang O an a	90 Orang	174,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	++	+	1		Jumlah KUKM yang dikelola				90 KUKM				Lainnva		90 KUKM		1
	++	1			penggunaan dana bergulirnya Jumlah KUKM yang dilatih				96 KUKM		<u> </u>				96 KUKM		
					Jumlah KUKM yang dilayani kreditnya penguatan modalnya				320 KUKM						320 KUKM		
					Jumlah pembinaan dan pengembangan usaha dagang yang				30 kali						30 kali		
					dilakukan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				0 Unit Usaha						0 Unit Usaha		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	RPJMD	2021		30 Usaha Mikro				Nasionai	Daeran		30 Usaha Mikro		Jawas
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	reknologi													
3	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1,518,492,840							673,000,000	
3	# 3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana & prasarana perdagangan yang representatif	persen		persen	29.4 persen	1,153,482,420						29.4 persen	308,000,000	
3	# 3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pengelolaan dan penataan nasar innres	bulan		bulan	12 bulan	1,118,482,420						12 bulan	268,000,000	
3	# 3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Yang dibangun dan direvitalisasi				4 pasar	1,033,482,420	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	4 pasar	198,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit							0 Unit		
3	# 3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				0 Unit	85,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	0 Unit	70,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Inpres)				1 Unit							1 Unit		
3	# 3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola yang dibina	pasar		pasar	54 pasar	35,000,000						54 pasar	40,000,000	
3	# 3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				54 Dokumen	35,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	0	54 Dokumen	40,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	persen		persen	7 persen	140,611,700						7 persen	110,000,000	
3	# 4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilakukan	kali		kali	30 kali	33,169,650						30 kali	22,000,000	
3	# 4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersedinan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				20 Laporan	33,169,650	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	20 Laporan	22,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting	pasar		pasar	52 pasar	82,222,550						52 pasar	60,000,000	

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode	,		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	#	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasaar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	RPJMD	2021	1012	40 Laporan	57,143,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	40 Laporan	50,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	#	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	25,079,250	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	2 Laporan	10,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	#	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi yang dilakukan	kali		kali	30 kali	25,219,500						30 kali	28,000,000	
3	#	4	2.03	2	Kabupaten/Kota Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				20 Laporan	25,219,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	20 Laporan	28,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	#	б			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang & perlengkapanya (UTTP) yang bertanda tera sah berlaku	persen		persen	55,54 persen	169,999,970						55,54 persen	197,000,000	
3	#	б	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	jumlah pengawasan BDKT yang dilakukan	UTTP		UTTP	200 UTTP	169,999,970						200 UTTP	197,000,000	
3	#	5	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				850 Unit	95,164,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	0	850 Unit	98,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	#	5	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				0 Orang	74,835,970	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	0 Orang	98,500,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
						Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				500 Orang							500 Orang		
		İ				jumlah pengawasan BDKT yang dilakukan				200 BDKT							200 BDKT		
3	#	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran	persen		persen	45 persen	54,398,750						45 persen	58,000,000	
						Persentase produk unggulan daerah yang difasilitasi promosi	persen		persen	57 persen							57 persen		
3	#	7	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi dagang yang diikuti	promosi		promosi	4 promosi	54,398,750						4 promosi	58,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
3	# 7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	RPJMD	2021	2022	15 UMKM	54,398,750	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Deerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	15 UMKM	58,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,120,523,510				Lammya			741,000,000	
3	# 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	persen		persen	95 persen	1,024,193,700						95 persen	401,000,000	
					Persentase produk yang bersertifikasi	persen		persen	51 persen							51 persen		
3	# 2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan industri yang dilatih dan teridentifikasi	paket		paket	1 paket	1,024,193,700						1 paket	401,000,000	
3	# 2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				20 Dokumen	284,999,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	20 Dokumen	30,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				5 Dokumen	264,193,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Sektor Terkait	0	5 Dokumen	181,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Lokasi Sentra yang dibangun dan direvitalisasi				1 sentra					Lamiiva		1 sentra		
3	# 2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				0 Dokumen	474,999,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	0 Dokumen	190,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				50 Dokumen							50 Dokumen		
					jumlah IKM yang dibina oleh dekranasda, jumlah ivent yang diikuti				25 IKM							25 IKM		
					Pelatihan Cetak Produksi Kain (diversifikasi) melalui Ecoprint				30 orang							30 orang		
					Pelatihan pemanfaatan mesin tenun semi otomatif untuk diversifikasi tenun				30 IKM							30 IKM		
					Pelatihan Pengolahan Produk Turunan Minyak Astiri (minyak serai wangi, kayu putih)				30 IKM							30 IKM		
3	# 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki izin (IUI) dan (IPUI)	persen		persen	19 persen	40,001,400						19 persen	70,000,000	
3	# 3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Menerapkan Managemen Pengendalian Mutu Terpadu	IKM		IKM	30 IKM	40,001,400						30 IKM	70,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IU, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SilNas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayatan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SilNas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	RPJMD	2021		20 Dokumen	20,001,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	20 Dokumen	35,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Dokumen	20,000,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	20 Dokumen	35,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM		IKM	30 IKM	56,328,410						30 IKM	270,000,000	
3	# 4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang masuk SIINas	IKM		IKM	30 IKM	56,328,410						30 IKM	270,000,000	
3	# 4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				2 Dokumen	41,328,160	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	2 Dokumen	90,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Dokumen	90,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	# 4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SiiNas				1 Dokumen	15,000,250	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	o	1 Dokumen	90,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4,682,964,477							6,569,070,352	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	3,477,035,577						100 Persen	4,842,070,352	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	91,028,550						100 Persen	160,000,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	59,796,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DPMPTSP	2 Dokumen	80,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	н	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П	T	T			RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab DINAS
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	5,485,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	25,000,000	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	21,597,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	3 Laporan	50,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun				1 Dokumen	4,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	5,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	persen		persen	100 persen	2,497,988,931						100 persen	2,876,570,352	
2	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				24 Orang/bula n	2,436,436,331	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	24 Orang/bula n	2,739,570,352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	22,893,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	3 Dokumen	52,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	38,659,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	14 Laporan	85,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	61,384,700						100 Persen	148,250,000	
2	# 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	26,812,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai DPMPTSP	46 Paket	43,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	17,422,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai DPMPTSP	3 Orang	35,250,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				42 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai DPMPTSP	42 Orang	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				43 Orang	17,149,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai DPMPTSP	43 Orang	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	292,282,150						100 persen	454,500,000	
2	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	8,504,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	6 Paket	17,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	H	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	0 Paket	18,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18,730,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	1 Paket	27,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	29,292,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	5 Paket	25,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	32,030,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	3 Paket	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	19,629,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	12 Laporan	37,500,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	138,155,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	32 Laporan	210,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	45,939,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	2 Dokumen	30,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen	60,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	79,390,050						100 Persen	540,000,000	
2	# 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	1 Unit	300,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	20,310,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	4 Paket	40,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	59,079,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	8 Unit	90,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	RPJMD	2021		2 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	2 Unit	110,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	238,028,896						100 Persen	314,000,000	
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun				600 surat	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	600 surat	6,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	124,499,896		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	3 Laporan	108,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	1 Laporan	45,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	113,529,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	DPMPTSP	7 Laporan	155,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216,932,300							348,750,000	
2	# 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	133,406,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		14 Unit	210,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	26,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		39 Unit	45,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	57,296,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Unit	93,750,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
2	# 2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Penurunan Pengaduan Pelaku Usaha	Persen		Persen	0 Persen	133,578,500				1 CINYADAD DACIAD		0 Persen	81,000,000	
2	# 2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitas jaminan kepastian hukum (regulasi) dan persentase fasilitasi kemudahan/insentif PM	Persen		Persen	100 Persen	66,742,350						100 Persen	0	
2	# 2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas Jinsentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal				1 Dokumen	66,742,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pelaku Usaha	1 Dokumen	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen perencanaan potensi peluang investasi yang disusun	Persen		Persen	100 Persen	66,836,150						100 Persen	81,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		T	1			RPJMD	2021	2022	_				Nasional	Daerah				Jawab DINAS
2	# 2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	66,836,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Potensi Investasi di kabupaten sijunjung	1 Dokumen	81,000,000	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investasi PMDN dan PMA (Investor/Pelaku Usaha)	Investor /Pelaku Usaha		Investor/Pelaku Usaha	3 Investor/ Pelaku Usaha	393,818,250						3 Investor/ Pelaku Usaha	397,000,000	
2	# 3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya event pameran investasi	Event		Event	2 Event	393,818,250						2 Event	397,000,000	
2	# 3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	393,818,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Calon Pelaku Usaha/Inve stor	1 Dokumen	397,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan standar pelayanan publik	Persen		Persen	100 Persen	415,372,950						100 Persen	358,000,000	
					Persentase Peningkatan Penerbitan Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan	Persen		Persen	13 Persen							13 Persen		
2	# 4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai		Nilai	86 Nilai	415,372,950						86 Nilai	358,000,000	
2	# 4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				800 Pelaku Usaha	278,599,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pelaku Usaha	800 Pelaku Usaha	238,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				10 Kegiatan Usaha	61,825,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pelaku Usaha	10 Kegiatan Usaha	45,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				12 Orang	74,948,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pelaku Usaha	12 Orang	75,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi PMA	US \$ ribu		US \$ ribu	201,38 US \$ ribu	227,664,200						201,38 US \$ ribu	541,000,000	
					Realisasi Investasi PMDN (Rp. Trilyun)	Rp. Trilyun		Rp. Trilyun	13,13 Rp. Trilyun							13,13 Rp. Trilyun		
2	# 5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pelaksanaan penanaman modal	persen		persen	100 persen	227,664,200						100 persen	541,000,000	
				mouphen/nou	Persentase pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
2	# 5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				40 Kegiatan Usaha.	80,393,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perusahaa n PMDN dan PMA	40 Kegiatan Usaha.	147,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimtek/Sosialisasi yang dilaksanakan				6 Angkatan	70,731,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perusahaa n PMDN dan PMA	6 Angkatan	219,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				20 Pelaku Usaha							20 Pelaku Usaha		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	H	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				90 Kegiatan Usaha	76,540,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Perusahaa n PMDN dan PMA	90 Kegiatan Usaha	175,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	# 6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Layanan data dan informasi penanaman modal	Nilai		Nilai	82 Nilai	35,495,000						82 Nilai	350,000,000	
2	# 6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey layanan data dan informasi	paket data		paket data	1 paket data	35,495,000						1 paket data	350,000,000	
2	# 6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	35,495,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pengguna Data Perizinan dan Non Perizinan	2 Dokumen	350,000,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						3,530,245,166							5,311,684,800	
2	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sinkronisasi perencanaan dan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	3,113,976,966						100 Persen	4,508,200,000	
2	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	11,706,900						100 Persen	72,500,000	
2	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	11,706,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro			7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	35,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	9,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Laporan	8,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Laporan	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	2,578,287,276						100 Persen	3,392,200,000	
2	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ bulan	2,567,521,676	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	25 Orang/ bulan	3,300,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	7 Dokumen	70,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Dokumen	8,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Laporan	5,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	10,765,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	15 Laporan	8,200,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	22,000,000	
2	# 1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	6,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

				_		Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RPJMD	2021	2022	2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Laporan	3,500,000	Jawab DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Laporan	5,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	7,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	90,000,000	
2	# 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	8,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				46 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	46 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Dokumen	8,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				46 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	46 Dokumen	4,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Orang	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi umum perangkat daeran	Persen		Persen	100 Persen	129,244,650						100 Persen	355,500,000	
2	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Paket	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,537,740	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Paket	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	40,059,650	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Paket	45,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	8,005,700	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Paket	22,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	18,500,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	74,641,560	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	175,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesusi dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	0	
2	# 1	2.07	5	Daerah Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	283,696,248						100 Persen	330,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RPJMD	2021		12 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	10,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	111,492,448	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	172,203,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	200,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	111,041,892						100 Persen	246,000,000	
2	# 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 unit	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	59,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Unit	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				100 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	100 Unit	17,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	100 Unit	24,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	15,999,992	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	11,041,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	100 Unit	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	rasio ketercukupan koleksi erpustakaan dengan penduduk	buku:or ang		buku:orang	1:14 buku:oran g	416,268,200						1:14 buku:oran g	743,484,800	
					rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	orang		orang	1:400 orang							1:400 orang		
2	# 2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah peningkatan perpustakaan vang dikelola	perpust		perpustakaan	47 perpustakaa	381,268,200						47 perpustakaa	533,484,800	
2	# 2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	yang unktona Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	akaan			60 Layanan	165,745,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	60 Layanan	126,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				20 Perpustakaa n	92,156,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Perpustakaa n	25,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3000 Eksempla r	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3000 Eksempla r	55,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				35 Perpustakaa n	69,542,300	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	35 Perpustakaa n	39,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				20 Perpustakaa n	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Perpustakaa n	28,384,800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	т т	Т	1			RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
2	# 2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				40 Layanan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	40 Layanan	35,100,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				500 Eksemplar	53,823,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	500 Eksemplar	75,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	40 Dokumen	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perpustakaan yang melakukan pembudayaan gemar membaca	perpust akaan		perpustakaan	47 perpustakaa n	35,000,000						47 perpustakaa n	210,000,000	
2	# 2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Lokus	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				4 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Orang	90,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				20 Perpustakaa n	35,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Perpustakaa n	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				2 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Orang	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	koleksi		koleksi	7 koleksi	0						7 koleksi	60,000,000	
2	# 3	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	naskah kuno yang dilestarikan	naskah		naskah	3 naskah	0						3 naskah	60,000,000	
2	# 3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				3 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Orang	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						264,716,000							860,000,000	
2	# 2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase peningkatan SDM pengelola arsip	orang		orang	65 orang	193,422,700						65 orang	670,000,000	
					tingkat ketersediaan arsip statis daerah	Persen		Persen	85 Persen							85 Persen		
2	# 2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan kearsipan	perangk at daerah		perangkat daerah	19 perangkat daerah	116,881,600						19 perangkat daerah	435,000,000	
2	# 2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				19 Berkas	63,724,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	19 Berkas	315,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Laporan	53,157,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Laporan	120,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				19 Laporan							19 Laporan		
2	# 2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah box arsip statis di depo arsip	Persen		Persen	22 Persen	36,541,300						22 Persen	60,000,000	
2	# 2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				330 Arsip	36,541,300	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	330 Arsip	60,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 2	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang telah dimasukkan kedalam JIKN melalui SIKN	arsip		arsip	150 arsip	39,999,800						150 arsip	175,000,000	
2	# 2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				19 laporan	39,999,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	19 laporan	175,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Otingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persen		Persen	85 Persen	71,293,300						85 Persen	190,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prie Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
2	# 3	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pemusnahan arsip dengan retensi dibawah 10 tahun	opd		opd	10 opd	0						10 opd	30,000,000	
2	# 3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				10 Arsip	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Arsip	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3	2.01	2	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				10 Berkas	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Berkas	15,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	persentase arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana berskala kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	50,000,000	
2	# 3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				6 Arsip	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	6 Arsip	20,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3	2.02	2	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				3 Arsip	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Arsip	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	jumlah dokumen arsi statis yang diautentikasi dan dialihmediakan	dokume n		dokumen	200 dokumen	71,293,300						200 dokumen	110,000,000	
2	# 3	2.04	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				650 Arsip	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	650 Arsip	30,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	# 3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				650 Arsip	71,293,300	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	650 Arsip	80,000,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2,996,603,548							3,396,603,548	
2	# 2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen		Persen	17,75 Persen	711,900,468						17,75 Persen	711,900,468	
2	# 2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dah Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda dan kepemudaan	orang		orang	913 orang	561,900,468						913 orang	561,900,468	
2	# 2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	61,900,268	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Keburahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	pemuda yang berprestasi	5 Orang	61,900,268	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				913 Orang	500,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	pemuda yang berprestasi	913 Orang	500,000,200	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 2	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000							150,000,000	
2	# 2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1 Dokumen	150,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Cabor	Cabor		Cabor	45 Cabor	1,784,703,080						45 Cabor	1,784,703,080	
2	# 3	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cabor yang di Bina	Cabor		Cabor	40 Cabor	331,803,080						40 Cabor	331,803,080	
2	# 3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Cabor	3 Unit	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
2	# 3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang	RPJMD	2021	2022	1 Unit	331,803,080	Kab. Sijunjung, Sijunjung,	Dana Transfer Umum-Dana	Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Daerah 4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan	Cabor	1 Unit	331,803,080	Jawab DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
2	# 3	2.02		Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Tersedia dan Termanfaatkan Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan	Cabor		Cabor	3 Cabor	106,900,000	Muaro	Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Olahraga		3 Cabor	106,900,000	OLAH RAGA
2	# 3	2.02	1	Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	106,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Cabor	0 Dokumen	106,900,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen							3 Dokumen		
2	# 3	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1,270,000,000							1,270,000,000	
2	# 3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				137 Orang	1,270,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		137 Orang	1,270,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 3	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Cabor yang di Bina	Cabor		Cabor	3 Cabor	76,000,000						3 Cabor	76,000,000	
2	# 3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Dokumen	76,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Cabor	3 Dokumen	76,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase partisipasi pemuda (usia sekolah) dalam kepramukaan	Persen		Persen	95 Persen	500,000,000						95 Persen	900,000,000	
2	# 4	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah pemuda yang tergabung dalam kepramukaan	orang		orang	110 orang	500,000,000						110 orang	900,000,000	
2	# 4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				63 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	pemuda yang mengikuti kegiatan kepramuka an	63 Orang	400,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	# 4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				9 Laporan	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	pemuda yang mengikuti kegiatan kepramuka	9 Laporan	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5,057,413,348							6,929,111,348	
3	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persen		Persen	100 Persen	3,226,094,398						100 Persen	3,226,094,398	
3	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	29,379,600						100 Persen	29,379,600	
3	# 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	4,307,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si keuangan	3 Dokumen	4,307,200	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	3,760,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si keuangan	1 Dokumen	3,760,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
3	# 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RPJMD	2021	2022	4 Laporan	21,312,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnwa	administra si keuangan	4 Laporan	21,312,400	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	2,738,764,798						100 Persen	2,738,764,798	
3	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bula n	2,691,692,191		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si keuangan	25 Orang/bula n	2,691,692,191	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	9,827,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	administra si keuangan	2 Dokumen	9,827,500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				26 Laporan	37,245,107		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si keuangan	26 Laporan	37,245,107	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	0	
3	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si kepegawaia n	2 Orang	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	168,366,000						100 Persen	168,366,000	
3	# 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,474,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polbukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si	1 Paket	22,474,500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kod	le		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
3	#	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	1 Paket	7,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si	1 Paket	7,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	#	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	138,891,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pengembangan Usaha Pariwisata da Ekonomi Keatifyang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si	12 Laporan	138,891,500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	#	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							0	
3	#	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnwa		0 Unit	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	#	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya		0 Unit	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	#	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	153,004,000						100 Persen	153,004,000	
3	#	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si	4 Laporan	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	#	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	30,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	administra si	4 Laporan	30,450,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021	1011	4 Laporan	122,554,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	administra si	4 Laporan	122,554,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	136,580,000						100 Persen	136,580,000	
3	# 1	2.09	2	Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	118,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	barang milik daerah	29 Unit	118,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	18,580,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jannya 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	barang milik daerah	0 Unit	18,580,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit					101111111		1 Unit		
3	# 2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan pengembangan destinasi pariwisata	Persen		Persen	15 Persen	854,107,300						15 Persen	2,525,805,300	
3	# 2	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis yang dikembangkan	kawasa		kawasan	5 kawasan	0						5 kawasan	1,671,698,000	
3	# 2	2.02	3	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Kawasan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	destinasi pariwisata	1 Kawasan	1,171,698,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2.02	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisara Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolan Kawasana Tategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	destinasi pariwisata	1 Unit	500,000,000	DINAS PARIWISATA, PERIWIDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2.02	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana dan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	destinasi pariwisata	0 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumian Sarana dan Prasarana dan Destinasi pariwisata yang bangun dan dipelihara	sapras		sapras	10 sapras	854,107,300						10 sapras	854,107,300	

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
		Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
3	# 2	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	RPJMD	2021	2022	2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnva	Pokdarwis	2 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	626,611,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Silokek	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	Pokdarwis	1 Lokasi	626,611,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 1	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	139,963,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	Pokdarwis	1 Unit	139,963,800	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Dokumen	87,532,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	Pokdarwis	4 Dokumen	87,532,500	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 2	2	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Investasi pariwisata yang fasilitasi	investas		investasi	2 investasi	0				***********		2 investasi	0	
3	# 2	2	2.04	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah investasi sektor pariwisata				2 investasi	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	pelaku usaha pariwisata	2 investasi	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 3	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisatawan	orang		orang	85.190 orang	602,858,550						85.190 orang	802,858,550	
3	# 3	3	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan	orang		orang	85.19 orang	602,858,550						85.19 orang	802,858,550	
3	# (3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Dokumen	169,536,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	masyarakat yang menyukai wisata	7 Dokumen	169,536,100	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	RPJMD	2021		17 Laporan	433,322,450	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daerah 2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	masyarakat yang menyukai wisata	17 Laporan	433,322,450	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	masyarakat yang menyukai wisata	3 Dokumen	200,000,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	produk		produk	1 produk	0						1 produk	0	
3	# 4	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Produk Ekonomi Kreatif yang di hasilkan	produk		produk	1 produk	0						1 produk	0	
3	# 4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	UMKM	1 Unit	0	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif yang sesuai standar	Persen		Persen	2 Persen	374,353,100						2 Persen	374,353,100	
3	# 5	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualifikasi	orang		orang	86 orang	374,353,100						86 orang	374,353,100	
3	# 5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				200 Orang	152,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	UMKM di kabupaten sijunjung	200 Orang	152,550,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				20 Orang	100,523,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dar Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	UMKM di kabupaten sijunjung	20 Orang	100,523,100	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
3	# 5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Pasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	RPJMD	2021		10 Orang	39,324,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah Jean Jengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	UMKM di kabupaten sijunjung	10 Orang	39,324,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	# 5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40 Orang	81,956,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	UMKM di kabupaten sijunjung	40 Orang	81,956,000	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG														
3	#			PERTANIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Persentase ketercapaian penunjang					19,646,019,715							19,641,019,715	
3	# 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	rersentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	14,623,427,251						100 Persen	14,618,427,251	
3 #	# 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	85 Persen	181,114,000						85 Persen	176,114,000	
3 #	# 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	4 Dokumen	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32 Laporan	131,114,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	32 Laporan	126,114,000	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	13,240,848,911						100 Persen	13,240,848,911	
3	# 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	13,130,051,727		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	125 Orang/ bulan	13,130,051,727	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	92,428,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	12 Dokumen	92,428,700	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	18,368,484		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	2 Laporan	18,368,484	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	40,153,000						100 Persen	40,153,000	
3	# 1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	40,153,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	SKPD	1 Laporan	40,153,000	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	37,038,950		. Johns Ondin				100 Persen	37,038,950	
3	# 1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				125 Dokumen	27,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Pegawai ASN	125 Dokumen	27,038,000	DINAS PERTANIAN
3 #	# 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				0 Orang	10,000,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan	Pegawai ASN	0 Orang	10,000,950	DINAS PERTANIAN
					Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				10 Orang			Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan		10 Orang		
3	# 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	341,989,550		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		100 Persen	341,989,550	
\vdash	_	 			kabupaten Persentase Tertib Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
3 #	# 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Paket	9,570,000		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan	SKPD, Pegawai	3 Paket	9,570,000	DINAS PERTANIAN
3 #	# 1	2.06	4	Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor	yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	76,892,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	ASN SKPD, Pegawai	12 Paket	76,892,000	DINAS PERTANIAN
3	# 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	43,056,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	ASN SKPD, Pegawai	7 Paket	43,056,000	DINAS PERTANIAN
_	# 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				264 Dokumen	8,820,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	ASN SKPD, Pegawai	264 Dokumen	8,820,000	DINAS PERTANIAN

			Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
			RPJMD	2021	2022				Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan				Jawab
06 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	8,998,900		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	SKPD, Pegawai	12 Laporan	8,998,900	DINAS PERTANIAN
06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				12 Laporan	174,714,650		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	ASN SKPD, Pegawai	12 Laporan	174,714,650	DINAS PERTANIAN
06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1335 Dokumen	19,938,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	ASN SKPD, Pegawai	1335 Dokumen	19,938,000	DINAS PERTANIAN
08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	417,304,600		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah	ASN	100 Persen	417,304,600	PERTAINAIN
08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan				36 Laporan	147,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan	SKPD	36 Laporan	147,000,000	DINAS PERTANIAN
08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	37,150,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	SKPD	12 Laporan	37,150,000	DINAS PERTANIAN
08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				12 Laporan	233,154,600		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana		Pelayanan Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan	SKPD	12 Laporan	233,154,600	DINAS PERTANIAN
09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disediakan Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	364,978,240		Alokasi Umum		Pelayanan Daerah		100 Persen	364,978,240	TENTINE
09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	322,637,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	BMD	63 Unit	322,637,000	DINAS PERTANIAN
09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	42,341,240		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	BMD	1 Unit	42,341,240	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah teknologi pasca panen yang diterapkan pada komoditas pertanian	jenis		jenis	3 jenis	2,186,774,484				-		3 jenis	2,186,774,484	
		Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	Persen		Persen	30 Persen							30 Persen		
01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani pengguna sarana pertanian yang terawasi dan terdampingi	Persen		Persen	65 Persen	585,924,000						65 Persen	585,924,000	
01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				5 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	petani	5 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN
01 2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				5 Laporan	485,924,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Pematang Panjang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	petani	5 Laporan	485,924,000	DINAS PERTANIAN
								Kab. Sijunjung, Sijunjung, Solok Ambah							
								Kab. Sijunjung, Sijunjung,							
								Sijunjung Kab. Sijunjung,							
								IV Nagari, Muaro Bodi							
								Kab. Sijunjung, IV Nagari,							
								Koto Tuo Kab. Sijunjung,							
								Lubuak Tarok, Lalan							
								Kab. Sijunjung, Lubuak							
								Silongo Kab.							
								Koto VII, Padang Laweh							
								Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus,							
									Sijunjung, Lubuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung, Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung, Supupur	Sijunjung, Lubuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung, Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung, Sumpur Sumpur Kudus,	Sijunjung, Lubuak Tarok, Silonge Kab. Sijunjung, Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung, Sijunjung, Sijunjung, Sumpur Kudus,	Sijunjung, Lubuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung, Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung, Sumpur Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus,	Sijunjung, Lubuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung, Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung, Sumpur Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus,	Sijunjung. Lubuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung. Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung. Sijunjung. Sumpur Kudus,	Sijunjung. Labuak Tarok, Silongo Kab. Sijunjung. Koto VII, Padang Laweh Kab. Sijunjung. Sumpur Kudus,

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri- Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
											Kab. Sijunjung, Kupitan, Padang Sibusuk							
3	# 2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkelola	komodit as		komoditas	4 komoditas	735,614,760						4 komoditas	735,614,760	
3	# 2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				4 Dokumen	385,614,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	4 Dokumen	385,614,760	DINAS PERTANIAN
3	# 2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	350,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Dokumen	350,000,000	DINAS PERTANIAN
											Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Lalan							
											Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus							
3	# 2	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/bibit ternak dan bahan pakan/pakan & benih/bibit hijauan pakan ternak yang terawasi	persen		persen	50 persen	173,590,800						50 persen	173,590,800	
3	# 2	2.03	1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				3 Laporan	173,590,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani, Peternak , Kelompok Tani	3 Laporan	173,590,800	DINAS PERTANIAN
3	# 2	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak beredar yang terawasi	persen		persen	15 persen	316,215,924						15 persen	316,215,924	
3	# 2	2.05	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat				20000 Ekor	237,928,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Peternak, Petani, Kelompok Tani	20000 Ekor	237,928,000	DINAS PERTANIAN
3	# 2	2.05	5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				100 Ton	78,287,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Peternak, Petani, Kelompok Tani	100 Ton	78,287,924	DINAS PERTANIAN
3	# 2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase peningkatan populasi ternak	persen		persen	1 persen	375,429,000						1 persen	375,429,000	
3	# 2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				20 Ekor	375,429,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Peternak, Petani, Kelompok Tani	20 Ekor	375,429,000	DINAS PERTANIAN
3	# 3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan sawah yang mendapat layanan irigasi tingkat usaha tani	На		Ha	6600 Ha	320,234,000						6600 Ha	320,234,000	
					Persentase peningkatan ketersediaan prasarana pertanian	Persen		Persen	1 Persen							1 Persen		
3	# 3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen pengembangan prasarana pertanian	dokume n		dokumen	2 dokumen	160,234,000						2 dokumen	160,234,000	
3	# 3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian/LP2B, Kawasan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	37,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	petani, kelompok tani, peternak	1 Dokumen	37,038,000	DINAS PERTANIAN
3	# 3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	123,196,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	petani, kelompok tani, peternak	2 Laporan	123,196,000	DINAS PERTANIAN
3	# 3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang layak	persen		persen	73.08 persen	160,000,000						73.08 persen	160,000,000	
3	# 3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara				1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani kelompok tani BPP	1 Unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer		3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani kelompok tani BPP	1 Unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer			Petani			
3	# 3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	40,000,000		Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	kelompok tani BPP	1 Unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan		Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П					RPJMD	2021					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Nasional Daeran				oawab
3	# 3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani kelompok tani BPP	1 Unit	40,000,000	DINAS PERTANIAN
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus					
3	# 4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen		Persen	4 Persen	576,130,880		Fisik			4 Persen	576,130,880	
3	# 4	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular dan zoonosis	persen		persen	80.5 persen	170,038,000					80.5 persen	170,038,000	
3	# 4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				3 Laporan	107,038,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Ternak	3 Laporan	107,038,000	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.01	2	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3 Laporan	63,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Ternak	3 Laporan	63,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan	persen		persen	4 persen	25,000,000					4 persen	25,000,000	
3	# 4	2.02	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	peternak, kelompok tani, kelompok usaha produk peternakan	1 Laporan	25,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang terkelola	persen		persen	75 persen	312,517,880					75 persen	312,517,880	
3	# 4	2.03	1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				3 Laporan	57,482,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Laporan	57,482,900	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				3 Laporan	255,034,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Laporan	255,034,980	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terpenuhi	Persen		Persen	50 Persen	68,575,000					50 Persen	68,575,000	
3	# 4	2.04	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	48,575,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Peternak	2 Laporan	48,575,000	DINAS PERTANIAN
3	# 4	2.04	2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Peternak	2 Laporan	20,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penaggulangan bencana OPT (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)	Persen		Persen	95; 90; 80 Persen	111,762,000					95; 90; 80 Persen	111,762,000	
3	# 5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang terkendali/ tertanggulangi	Persen		Persen	85 Persen	111,762,000					85 Persen	111,762,000	
3	# 5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				100 Ha	111,762,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	petani	100 Ha	111,762,000	DINAS PERTANIAN
3	# 6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian	Persen		Persen	4 Persen	60,000,000					4 Persen	60,000,000	
3	# 6	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persen		Persen	80 Persen	60,000,000					80 Persen	60,000,000	
3	# 6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				2 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani Peternak kelompok tani	2 Dokumen	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani Peternak kelompok tani	2 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani dengan peringkat kelas kelompok madya	kelomp ok		kelompok	2 kelompok	1,767,691,100					2 kelompok	1,767,691,100	
					Persentase penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	persen		persen	80 persen						80 persen		
3	# 7	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	Persen		Persen	80 Persen	1,767,691,100					80 Persen	1,767,691,100	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
3	# 7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	RPJMD	2021	2022	8 Unit	1,367,305,700		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok	8 Unit	1,367,305,700	Jawab DINAS PERTANIAN
3	# 7	2.01	2	dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	vang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Unit	150,000,000		Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok	9 Unit	150,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				8 Unit	26,700,400				3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok rani	8 Unit	26,700,400	DINAS PERTANIAN
3	# 7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk				1 Unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok rani	1 Unit	75,000,000	DINAS PERTANIAN
3	# 7	2.01	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				8 Unit	148,685,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok rani	8 Unit	148,685,000	DINAS PERTANIAN
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	1			SEKRETARIAT DAERAH						29,112,144,559							51,590,000,000	
4	1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	23,960,990,059						100 Persen	39,277,000,000	
4	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	10,202,900						100 Persen	50,000,000	
4	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	3,719,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	0 Dokumen	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
4	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6,483,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	25,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertip administrasi	Persen		Persen	100 Persen	12,089,828,469						100 Persen	12,300,000,000	
4	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/ bulan	11,889,233,069		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	82 Orang/ bulan	12,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	200,595,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase tertip administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	30,000,000						100 Persen	350,000,000	
4	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah tersedianya Pakaian Dinas pada sekretariat daerah				175 stel	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	175 stel	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Orang	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis				5 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Orang	50,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tertip administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,588,649,070						100 Persen	2,407,000,000	
4	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	327,303,680		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Paket	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	4,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	5 Dokumen	7,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	1,256,470,390		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	25 Laporan	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000						100 Persen	5,850,000,000	
4	1 1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas KDH dan WKDH				2 Unit	0					0	2 Unit	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan kendaraan dinas ASISTEN				3 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
	igspace	1	1		pengadaan kendaraan dinas BKAD				1 Unit							1 Unit		
					Pengadaan kendaraan dinas Kepala BPBD				1 Unit							1 Unit		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priori Nasional	tas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П	1	T		Pengadaan kendaraan dinas Samsat	RPJMD	2021		1 Unit				Nasionai	Daeran		1 Unit		Oawab
					pengadaan kendaraan dinas sound sistem				1 Unit							1 Unit		
4	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket pengadaan Mebel kantor				2 paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 paket	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
					Jumlah Paket pengadaan mebel Rumah Jabatan				3 paket			Alokasi Cilidii				3 paket		
4	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	44,268,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	155,731,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	2,577,081,720		mondor omam				100 Persen	2,950,000,000	
4	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,325,411,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	1,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,251,670,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	1,533,800,500						100 Persen	4,800,000,000	
4	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	7 Unit	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				100 Unit	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	100 Unit	1,500,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	477,207,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	18 Unit	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	326,593,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	7 Unit	1,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	persentase tertip administrasi keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	600,000,000						100 Persen	1,140,000,000	
4	1 1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/ Bulan	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Orang/ Bulan	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Paket	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga				8 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	8 Orang	40,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Bulan	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persentase terfasilitasi kebutuhan rumah tangga	Persen		Persen	100 Persen	4,201,427,400						100 Persen	6,750,000,000	
4	1 1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	1,372,123,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Paket	2,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	758,218,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Paket	1,750,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	2,071,085,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Paket	3,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daera
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		_				RPJMD	2021	2022			Donusi	Jumper Duna	Nasional Nasional	Daerah				Jawab
4	1 1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase PD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	480,000,000						100 Persen	1,405,000,000	
					Persentase PD yang menyusun LAKIP sesuai dengan permenpan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
					Persentase PD yang telah menyusun			_										
					anjab dan ABK sesuai dengan struktur organisasi	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
					Persentase UKPP Yang menginput SPP ke SIPP	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
					Persentase UKPP yang mengirimkan Dokumen SPP	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
			1		Dokumen SPP								Memperkuat					
4	1 1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				76 Dokumen	80,000,000			Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	76 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				161 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	161 Laporan	310,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				39 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi		0	39 Dokumen	275,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				20 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	20 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				35 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	35 Dokumen	320,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	persentase terfasilitasinya koordinasi komunikasi, dokumentasi dan keprotokolan pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	650,000,000						100 Persen	1,275,000,000	
4	1 1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	300,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	550,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	425,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	nilai		nilai	3200- 3400 nilai	4,405,154,500						3200- 3400 nilai	10,618,000,000	
				RESEJANIERAAN RAKIAI	Persentase Perda ditetapkan	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
4	1 2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase meningkatnya koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan	Persen		Persen	100 Persen	380,000,000						100 Persen	900,000,000	
4	1 2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	2 Dokumen	250,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				23 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	23 Dokumen	300,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				8 Dokumen	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	8 Dokumen	350,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase terfasilitasinya pelayanan terkait kegiatan keagamaan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan msyarakat	Persen		Persen	100 Persen	3,380,000,000						100 Persen	7,600,000,000	
4	1 2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				106 Dokumen	2,300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		0	106 Dokumen	6,000,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan		Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
4	1 2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteran Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Permberdayaan Perempuan dan Petindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Penedattan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				38 Dokumen	780,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0	38 Dokumen	1,200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	0	3 Dokumen	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan dan pelayanan hukum yang terintergrasi terhadappenyusunan peraturan daerah dan bantuan hukum bagi aparatur pemerintah serta masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	585,000,000					100 Persen	1,343,000,000	
4	1 2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				653 Dokumen	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	653 Dokumen	470,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	10 Kasus	515,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				51 Dokumen	215,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelavanan Publik	0	51 Dokumen	358,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	persentase terfasilitasinya koordinasi dalampenyelenggaraan kerja sama daerah	Persen		Persen	100 Persen	60,154,500					100 Persen	775,000,000	
4	1 2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	2 Dokumen	175,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				10 Dokumen	30,154,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	0	10 Dokumen	600,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rasio elekrifiaksi	Nilai		Nilai	68 Nilai	746,000,000					68 Nilai	1,695,000,000	
					Rasio layan 4G LTE	Nilai		Nilai	55 Nilai						55 Nilai		
4	1 3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terfasilitasinya koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang perekonomian	Persen		Persen	100 Persen	200,000,000					100 Persen	525,000,000	
4	1 3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				18 Dokumen	105,000,000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	18 Dokumen	200,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				2 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	2 Laporan	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				43 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	43 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	2 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	0	1 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	- 1	T	1		Persentase OPD yang menyampaikan	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
4	1 3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	laporan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	111,000,000						100 Persen	255,000,000	
4	1 3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				2 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Dokumen	125,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				35 Laporan	43,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	35 Laporan	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	43,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	4 Laporan	65,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang di selesaikan	Persen		Persen	100 Persen	365,000,000						100 Persen	620,000,000	
4	1 3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				400 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	400 Dokumen	400,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				400 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	400 Dokumen	70,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				35 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	35 Orang	150,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	persentase terfasilitasinya koordinasi kebijakan di bidang sumber daya alam	Persen		Persen	100 Persen	70,000,000						100 Persen	295,000,000	
4	1 3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				3 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		0	3 Dokumen	75,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasii Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		0	2 Dokumen	100,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4	1 3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				2 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		0	2 Dokumen	120,000,000	SEKRETARIAT DAERAH
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	2			SEKRETARIAT DPRD						32,003,530,088							37,572,781,102	
4	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pembuatan LAKIP dan Iktisar Realisai Kinerja	Laporan		Laporan	2 Laporan	18,999,086,812						2 Laporan	18,952,616,262	
4	2 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	buah		buah	2 buah	0						2 buah	29,579,414	
4	2 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Laporan	29,579,414	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,653,253,572							3,794,894,302	
4	2 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/ bulan	2,592,953,572		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Orang/ bulan	3,677,102,100	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	11,781,425	SEKRETARIAT DPRD

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prie Nasional	Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
4	2 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	60,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				17 Laporan	106,010,777	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						179,730,200							204,481,779	
4	2 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	30,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Paket	70,329,137	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket							1 Paket		
4	2 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	149,230,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	100,403,573	SEKRETARIAT DPRD
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang							6 Orang		
4	2 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	6,857,771	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Orang	26,891,298	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,024,071,277							877,646,602	
4	2 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	22,819,353						1 Paket	22,193,325	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	27,853,328		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	30,230,098	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	828,447,146		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	484,012,218	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Paket	47,160,540	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	144,951,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				5 Laporan	294,050,421	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						149,517,500							248,361,476	
4	2 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	149,517,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	248,361,476	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,702,151,980							1,436,956,660	
4	2 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	27,613,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	63,826,899	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	413,202,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	541,053,419	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,261,336,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	832,076,342	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,300,025,907							689,570,237	
4	2 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	440,889,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				32 Unit	228,230,920	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	859,136,407		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Unit	461,339,317	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						11,448,366,376							11,286,209,747	
4	2 1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				30 Orang/ Bulan	11,193,867,626		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang/ Bulan	11,014,400,278	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	194,498,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Paket	204,362,267	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				30 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30 Orang	67,447,202	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.16		Layanan Administrasi DPRD						541,970,000		Dana Transfer					384,916,045	opune
4	2 1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						0		Umum-Dana Alokasi Umum					16,221,744	SEKRETARIAT DPRD
4	2 1	2.16	2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				1 Laporan	0		Umum-Dana Alokasi Umum				1 Laporan	5,598,605	SEKRETARIAT DPRD

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan		Prakiraan Maju	ı Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
4	2 1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				10 Laporan	541,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			10 Laporan	363,095,696	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						13,004,443,276						18,620,164,840	
4	2 2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2,240,412,100						3,436,301,073	
4	2 2	2.01	1	Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0 Dokumen	11,395,991	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				18 Dokumen	2,075,116,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			18 Dokumen	3,251,214,972	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				1 Dokumen	16,621,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	11,005,045	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				1 Dokumen	148,673,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	162,685,065	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran						2,633,051,630						2,338,584,479	
4	2 2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	261,183,830		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	59,500,117	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	56,344,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	59,626,243	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1,093,385,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	724,790,192	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	542,513,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	619,712,417	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	679,624,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	874,955,510	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1,613,268,150						3,906,074,580	
4	2 2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				1 Laporan	695,462,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	38,349,691	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1 Laporan	19,808,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	20,809,080	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakvat				1 Laporan	18,754,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	38,733,173	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				1 Laporan	18,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	38,966,881	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				1 Laporan	18,714,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Laporan	39,805,432	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	33,403,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	36,075,123	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				1 Dokumen	808,412,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	3,693,335,200	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD						1,578,828,450						1,890,838,381	
4	2 2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1 Dokumen	319,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	657,447,541	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				1 Dokumen	537,577,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	239,110,090	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				9 Orang	216,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9 Orang	25,570,724	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	25,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	493,022,730	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	479,181,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	475,687,296	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						2,002,891,046						1,695,368,585	
4	2 2	2.05	1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	142,874,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12 Laporan	345,032,204	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	609,366,510		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1 Dokumen	629,549,818	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	1,250,650,436		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Dokumen	720,786,563	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah						66,308,900		Alokasi Umum	 			106,280,890	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
4	2 2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	RPJMD	2021	2022	1 Dokumen	66,308,900		Dana Transfer Umum-Dana	Nasional	Daerah		1 Dokumen	106,280,890	SEKRETARIAT DPRD
4	2 2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas	kali		kali	14 kali	2,869,683,000		Alokasi Umum				14 kali	5,246,716,852	DIKD
	H	1		Koordinasi dan Konsultasi	Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	Au.i		Au.				Dana Transfer				-		SEKRETARIAT
4	2 2	2.08	1	Pelaksanaan Tugas DPRD	dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				8 Dokumen	1,896,072,000		Umum-Dana Alokasi Umum				8 Dokumen	4,687,599,853	DPRD
4	2 2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	973,611,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				10 Dokumen	559,116,999	SEKRETARIAT DPRD
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	1			PERENCANAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						6,749,472,829							12,696,500,000	
5	1 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	poin		poin	78 poin	4,931,878,579						78 poin	7,875,500,000	
5	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah yang disampaikan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	50,260,320						100 Persen	147,000,000	
5	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	32,546,360	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	0 Dokumen	40,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen							3 Dokumen		
5	1 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3,455,144	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	26,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuman Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	2,892,032	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	26,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen/La poran	4,026,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen/La poran	30,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen/La poran	7,339,904	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen/La poran	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berkurangnya Temuan pemeriksaan terhadap Organisasi	Persen		Persen	100 Persen	3,459,223,009						100 Persen	5,401,500,000	
5	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/ bulan	3,387,776,953	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	420 Orang/ bulan	5,313,500,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	14 Dokumen	18,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	71,446,056	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	14 Laporan	70,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan urusan kepegawaian yang diproses Tepat Waktu.	Persen		Persen	100 Persen	51,846,000						100 Persen	224,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1	1	,,		RPJMD	2021	2022	741get 2020	Tugu mumum	Donusi	Dumber Built	Nasional	Daerah		Tuigot	Tugu Inumutii	Jawab
5	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				56 Paket	29,446,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	56 Paket	39,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	7,400,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	0 Orang	130,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang							1 Orang		
5	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	15,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	10 Orang	55,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	Persen		Persen	100 Persen	494,151,840						100 Persen	918,000,000	
5	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Paket	8,042,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	100 Paket	15,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	100 Paket	300,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Paket	58,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	100 Paket	33,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	foto copy				6300 lembar	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	6300 lembar	33,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket							20 Paket		
					Kwitansi				50 buku							50 buku		
					Lembar Disposisi dan kartu kendali				120 buku					•		120 buku		
					Spanduk				400 meter							400 meter		
5	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	15,380,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	10 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Koran harian dan mingguan				503 eks					-		503 eks		
					Liputan khusus				6 tayang							6 tayang		
5	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	22,729,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	500 Laporan	77,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
		!	1		jumlah tamu yang dilayani	ļ	1		500 orang			-			1	500 orang		DADAN
5	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	80 Laporan	350,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	1 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	RPJMD	2021		75 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	75 Dokumen	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik	Persen		Persen	100 Persen	224,342,800						100 Persen	320,000,000	
5	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	8 Unit	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	124,342,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	6 Unit	300,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
5	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Unit	20,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan yang diberikan oleh layanan organisasi	Persen		Persen	100 Persen	275,562,912						100 Persen	445,000,000	
5	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	148,931,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	12 Laporan	170,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	101,631,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	7 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				7 orang							7 orang		
5	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset OPD dalam keadaan baik	Persen		Persen	100 Persen	376,491,698						100 Persen	420,000,000	
5	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	28,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Unit	60,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	94,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	20 Unit	250,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1				RPJMD	2021	2022	8				Nasional	Daerah				Jawab
5	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	87,560,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	0 Unit	75,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit							30 Unit		
5	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	166,571,698		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Unit	35,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	Nilai komponen perencanaan kinerja terhadap evaluasi AKIP	poin		poin	23-25 poin	626,000,000						23-25 poin	1,550,000,000	
				PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capain IKD	Persen		Persen	90 Persen							90 Persen		
					Persentase capain IKU	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
5	1 2	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase jumlah program perencanaan daerah yang konsisten	Persen		Persen	100 Persen	374,894,700						100 Persen	900,000,000	
5	1 2	2.01	3	renganaan Pelaksanaan Konsultasi Publik	perencanaan daeran yang konsisten Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	19,999,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	135,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				1 Berita Acara	19,999,750	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	25,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	69,895,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Berita Acara	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				8 Usulan	15,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	8 Usulan	40,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				0 Dokumen	250,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Kabupaten Sijunjung	0 Dokumen	500,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen							2 Dokumen		
5	1 2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data IKU dan IKD yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	151,105,300						100 Persen	400,000,000	
5	1 2	2.02	1	Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	80,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				35 Orang	71,105,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	35 Orang	200,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian dan evaluasi perencanaan yang dilaksanakan	Persen		Persen	100 Persen	100,000,000						100 Persen	250,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				.,,	•	RPJMD	2021	2022	Tuiget 2020	r ugu mumutn	Donuor	oumber bunk	Nasional Nasional	Daerah		Turget	rugu mumum	Jawab
5	1 2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				9 Laporan	100,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	9 Laporan	250,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen		Persen	100 Persen	1,191,594,250						100 Persen	3,271,000,000	
5	1 3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.Persentase PD yang Mela2.Persentase Keselarasan Kegiatan antara Renstra dengan Renja lingkup PPM	Persen		Persen	100 Persen	596,594,250						100 Persen	1,696,000,000	
5	1 3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	90,388,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	230,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15 Laporan	81,721,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	15 Laporan	80,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				15 Laporan	7,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	15 Laporan	68,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				15 Laporan	20,247,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	15 Laporan	350,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	273,037,350	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	503,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan (OPD)	82,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	10 Laporan (OPD)	54,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10 Laporan (OPD)	16,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	10 Laporan (OPD)	55,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	356,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup PSDA.	Persen		Persen	100 Persen	375,000,000						100 Persen	675,000,000	
5	1 3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	90,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	8 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	1 3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	RPJMD	2021		10 Laporan (OPD)	60,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	10 Laporan (OPD)	40,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4 Laporan (OPD)	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	4 Laporan (OPD)	90,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	90,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	120,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	95,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	6 Dokumen	165,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				3 Laporan (OPD)	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan (OPD)	95,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase PD yang Melaksanakan Forum OPD lingkup IK; 2. Persentase Keselarasan Kegiatan antara Renstra dengan Renja lingkup IK	Persen; 100Pers en		Persen; 100Persen	100 Persen; 100Persen	220,000,000						100 Persen; 100Persen	900,000,000	
5	1 3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				8 Dokumen	95,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	8 Dokumen	130,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan (OPD)	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan (OPD)	35,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				2 Laporan	90,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	2 Laporan	600,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	15,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Dokumen	70,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	1 3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				3 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	3 Laporan	65,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
												Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
5	5			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						580,000,000		Alokasi Umum					399,000,000	
5	5 2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil Litbang terhadap perencanaan pembangunan	Persen		Persen	75 Persen	580,000,000						75 Persen	399,000,000	
					Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi	Persen		Persen	95 Persen							95 Persen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
5	5 2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bid Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun sesusai dengan Dokumen Perencanaan	RPJMD persen	2021	persen	84 persen	113,261,400			Nasional	Daerah		84 persen	119,000,000	Jawab
5	5 2	2.01	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	113,261,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	119,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.01	11	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penclitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase dokumen Penelitian dan Pengembangan Bid Sosial dan Kependudukan yang disusun sesusai dengan Dokumen Perencanaan	Persen		Persen	84 Persen	0						84 Persen	0	
5	5 2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.02	11	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						216,738,500							120,000,000	
5	5 2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.03	7	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	216,738,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Dokumen	120,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	F	Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	5 2	2.04	T	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi yang diterapkan	Persen	2021	Persen	63 Persen	250,000,100						63 Persen	160,000,000	
5	5 2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayassan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5	5 2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				175 Inovasi/ Laporan	250,000,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	175 Inovasi/ Laporan	160,000,000	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2			KEUANGAN						92,067,942,099							231,385,445,657	
5	2 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	12,201,177,179						B Nilai	19,813,935,657	
5	2 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen		persen	85 persen	9,000,000						85 persen	302,626,663	
5	2 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	42,304,780	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	44,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	44,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	44,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	44,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	3,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	50,050,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya akuntabilit as Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	34,271,883	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib Administrasi Keuangan	persen		persen	100 persen	10,594,575,949						100 persen	15,096,429,000	
5	2 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/ bulan	10,504,623,449	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n adminitrasi keuangan Perangkat Daerah	62 Orang/ bulan	14,815,285,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n adminitrasi keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	28,600,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RPJMD	2021		2 Dokumen	89,952,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n adminitrasi keuangan Perangkat	2 Dokumen	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Daerah Meningkat nya pengelolaa n adminitrasi keuangan Perangkat	1 Laporan	64,090,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Daerah Meningkat nya pengelolaa n adminitrasi keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	38,454,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi pendapatan daerah kewenangan pemerintah daerah	persen		persen	80 persen	0						80 persen	230,000,000	
5	2 1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	22,500,000						100 persen	376,380,995	
5	2 1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	2 Unit	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	62 Paket	65,141,076	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	1 Dokumen	64,090,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	1 Dokumen	30,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	22,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	3 Orang	64,605,919	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				10 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	10 Orang	38,454,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n data kepegawaia n SKPD	5 Orang	64,090,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	795,975,600						100 persen	1,274,778,999	_

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan		Prakiraan Maji	ı Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	F	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021	2022	20 Paket	6,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Daera 7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	Meningkat nya an kualitas administra aerah si umum perangkat	20 Paket	7,750,500	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra si umum perangkat daerah	5 Paket	46,144,800	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	8,961,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan I	Meningkat nya kualitas administra aerah si umum perangkat daerah	5 Paket	7,685,200	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	34,942,700	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra si umum perangkat daerah	5 Paket	31,894,270	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	43,631,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan I	administra si umum perangkat daerah	5 Paket	93,320,090	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	60,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan I	administra si umum perangkat daerah	20 Dokumen	28,600,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra	5 Paket	28,600,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	8	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	55,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra si umum perangkat daerah	12 Laporan	86,991,109	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	231,940,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra aerah si umum perangkat daerah	12 Laporan	177,450,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	65,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra si umum perangkat daerah	10 Dokumen	42,900,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	290,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan l	administra	2 Dokumen	723,443,030	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	persen		persen	100 persen	0					100 persen	903,720,000	
5	2 1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	7. Peningka Kinerja dan Pelayanan I	milik	1 Unit	480,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	RPJMD	2021		3 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	3 Unit	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	2 Unit	79,860,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	3 Unit	84,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	4 Unit	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	1 Unit	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n Barang milik daerah sesuai dengan perencanaa	1 Unit	79,860,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	497,618,700						100 persen	830,000,000	
5	2 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,225,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n jasa pelayanan umum	12 Laporan	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	300,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n jasa pelayanan umum	3 Laporan	650,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	14,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n jasa pelayanan umum	2 Laporan	70,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	167,893,700	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya ketersediaa n jasa pelayanan umum	2 Laporan	90,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	persen		persen	100 persen	281,506,930						100 persen	800,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah	Meningkat			Jawab
5	2 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	40,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	nya kualitas pemelihara an Barang Milik Daerah	2 Unit	85,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	115,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pemelihara an Barang Milik Daerah	25 Unit	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	39,033,930	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pemelihara an Barang Milik Daerah	30 Unit	45,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pemelihara an Barang Milik Daerah	1 Unit	170,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	67,473,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pemelihara an Barang Milik Daerah	20 Unit	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS (Persen)	persen		persen	100 persen	78,188,839,188						100 persen	208,300,300,000	
					Penetapan APBD dan APBDP tepat waktu	tanggal		tanggal	100 tanggal							100 tanggal		
5	2 2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase sinkronisasi dokumen perencanaan dan anggaran daerah	persen		persen	85 persen	1,257,598,750						85 persen	2,200,000,000	
5	2 2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	113,397,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	2 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	118,616,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	2 Dokumen	300,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				35 Dokumen	75,849,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	35 Dokumen	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				92 Dokumen	88,652,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	92 Dokumen	150,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				70 Dokumen	52,700,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	70 Dokumen	85,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	RPJMD	2021	2022	70 Dokumen	100,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n	70 Dokumen	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Jumlah Peraturan Daerah tentang						Kab. Sijunjung,	Dana Transfer		7. Peningkatan	menganggar an Daerah Meningkat nya kualitas	201		BADAN
5	2 2	2.01	7	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	229,634,600	Sijunjung, Muaro	Umum-Dana Alokasi Umum		Kinerja dan Pelayanan Daerah	pengelolaa n penganggar an Daerah Meningkat	2 Dokumen	350,000,000	KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	194,911,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	4 Dokumen	295,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				3 Dokumen	283,836,450	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n penganggar an Daerah	3 Dokumen	500,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase penyaluran belanja tepat waktu	persen		persen	100 persen	592,706,300						100 persen	517,000,000	
5	2 2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				5 Dokumen	5,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	5 Dokumen	35,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	1 Laporan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				70 Dokumen	103,664,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah Meningkat	70 Dokumen	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	nya penyaluran belanja Daerah Meningkat	12 Dokumen	52,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	5	Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				2 Dokumen	428,412,100	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	nya penyaluran belanja Daerah	2 Dokumen	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	1 Dokumen	25,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimana dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Pemyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	2 Laporan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	27,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	2 Dokumen	35,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	28,629,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	1 Dokumen	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	RPJMD	2021		35 Orang	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya penyaluran belanja Daerah	35 Orang	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP	SKPD		SKPD	35 SKPD	644,281,800	Keiuranan					35 SKPD	1,266,200,000	
5	2 2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				6 Laporan	22,595,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	6 Laporan	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekutias, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				35 Dokumen	377,209,850	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	35 Dokumen	350,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Bulahan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	18,348,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisat berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	3 Laporan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	35,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	1 Laporan	50,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	156,943,200	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	2 Dokumen	570,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap I.HF BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	4,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	1 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5	2 2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	6,143,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	2 Dokumen	23,200,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	1 Dokumen	60,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	100 Orang	63,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				3 Lembaga	24,041,150	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas penyusuna n Laporan sesuai SAP dan penyampai an laporan tepat waktu	3 Lembaga	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	persen		persen	100 persen	75,694,252,338						100 persen	204,113,000,000	
5	2 2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				100 Laporan	75,694,252,338	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya pengelolaa n keuangan urusan kewenanga n pengelolaa n keuagan daerah	100 Laporan	204,113,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkun Keyangan Daerah	Persentase Pengelolaan data dan sistem sesuai prosedur	persen		persen	100 persen	0						100 persen	204,100,000	
					Persentase penyampaian laporan tepat waktu	persen		persen	100 persen							100 persen		
5	2 2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				5 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Dokumen	134,100,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 2	2.05	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				35 Orang	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	35 Orang	70,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai		Nilai	B Nilai	600,914,650						B Nilai	1,657,910,000	
					Persentase Perangkat Daerah yang telah mengelola BMD sesuai dengan aturan	Persen		Persen	95 Persen							95 Persen		
5	2 3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD dan Penyampaian laporan	persen		persen	80 persen	600,914,650						80 persen	1,657,910,000	
					Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi BMD dan Penyampaian laporan	Persen		Persen	85 Persen							85 Persen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		Т			-	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
5	2 3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	33,484,200	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	2 Dokumen	127,300,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	20,047,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	2 Dokumen	51,060,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	2 Dokumen	61,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	1 Dokumen	61,500,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				11 Laporan	397,436,750	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	11 Laporan	384,550,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	1 Laporan	160,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	48,790,200	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	1 Laporan	545,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
55	2 3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	2 Laporan	110,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	101,156,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n barang milik daerah	1 Dokumen	157,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	Nilai		Nilai	110 Nilai	1,077,011,082						110 Nilai	1,613,300,000	
	LТ	1		Variation Deposits - D	Rasio PAD	Persen		Persen	10 Persen							10 Persen		
5	2 4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi pendapatan asli Daerah dalam APBD	persen		persen	100 persen	1,077,011,082						100 persen	1,613,300,000	
5	2 4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	10,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Dokumen	20,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	29,565,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Dokumen	68,100,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebartuasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	402,287,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Laporan	230,200,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priori		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
5	2 4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	RPJMD	2021	2022	100 Unit	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata	100 Unit	110,000,000	Jawab BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	87,632,532	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	n daerah Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	2 Laporan	195,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	112,002,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Laporan	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				20 Obyek Pajak	58,226,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	20 Obyek Pajak	250,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				1 Dokumen	95,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				2 Layanan	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	2 Layanan	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				4 Dokumen	110,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	4 Dokumen	120,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	3 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	2 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	2 Dokumen	40,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	152,296,850	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Laporan	200,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	2 4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	20,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas pengelolaa n pendapata n daerah	1 Laporan	100,000,000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	3 1			KEPEGAWAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan derah	Persen		Persen	100 Persen	18,854,653,066 16,762,650,186						100 Persen	18,185,500,000 15,962,500,000	
		<u> </u>	1	KABUPATEN/KOTA	kabupaten/kota		ı									1		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1			Persentase sinkronisasi perencanaan	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah				Jawab
5	3 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan pelaksanaan kinerja perangkat	Persen		Persen	100 Persen	19,995,500						100 Persen	20,000,000	
5	3 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9,981,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ı			1 Laporan	10,014,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	15,634,938,686						100 Persen	15,027,500,000	
5	3 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				230 Orang/bul an	15,566,169,876		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kab. Sijunjung	230 Orang/bul an	15,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	50,056,810		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kab. Sijunjung	1 Dokumen	7,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				16 Dokumen	18,712,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kab. Sijunjung	16 Dokumen	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	71,970,000						100 Persen	60,000,000	
5	3 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				50 Stel	46,970,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	50 Stel	35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 kali	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 kali	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	463,071,200						100 Persen	470,000,000	
5	3 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	7,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	7,500,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

						Target	Realisasi	P-11 01		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Tarret 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	oritas	Kelompok Sasaran	Toward	Down Indibatif	Penanggung
				gratan/ oub negratan	nogracan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu indikatif	Lokasi	sumper Dana	Nasional	Daerah	Sasarall	Target	Pagu Indikatif	Jawab
5	3 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,786,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,880,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	5,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Paket	371,905,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	230,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	355,022,800						100 Persen	75,000,000	
5	3 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	355,022,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Unit	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	98,188,332						100 Persen	75,000,000	
5	3 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Paket	1,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Orang	78,988,332		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Orang	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	119,463,668						100 Persen	235,000,000	
5	3 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	82,163,668		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	16 Unit	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Unit	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	20 Unit	10,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
5	3 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RPJMD	2021	2022	0 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Unit	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai dengan NSPK	Persen		Persen	60 Persen	2,092,002,880						60 Persen	2,223,000,000	
5	3 2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pemenuhan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	664,937,700						100 Persen	905,000,000	
5	3 2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2500 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	2500 Orang	600,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.01	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN				0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	0 Dokumen	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				160 SK	214,937,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	160 SK	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	2 Dokumen	30,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				4000 Orang	199,999,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	4000 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	Persen		Persen	100 Persen	520,760,400						100 Persen	513,000,000	
5	3 2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Orang	258,927,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	500 Orang	238,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
5	3 2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				750 Orang	208,604,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	750 Orang	200,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1		
5	3 2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				5 Kegiatan	53,228,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Lingkup Pemda Kab. Sijunjung	5 Kegiatan	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5	3 2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persen		Persen	10 Persen	680,580,880						10 Persen	630,000,000	
5	3 2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				5 Orang	248,938,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kabupaten Sijunjung	5 Orang	100,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Koo	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
5 3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	RPJMD	2021	2022	55 Orang	81,642,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kabupaten Sijunjung	55 Orang	300,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER
5 3	2	2.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				55 Orang	349,999,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Berdaya Saing Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kabupaten Sijunjung	55 Orang	230,000,000	DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA
5 3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian dan evaluasi kinerja yang diselesaikan	Persen		Persen	100 Persen	225,723,900			Berdaya Saing			100 Persen	175,000,000	N SUMBER DAYA MANUSIA
5 3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				150 Orang	100,037,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	150 Orang	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5 3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				75 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	75 Orang	75,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5 3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				7 Kasus	50,686,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	7 Kasus	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5 4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1,146,444,400							2,989,000,000	
5 4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Terhadap Pendidikan Menegah/Dasar Rasio Pegawai Fungsional Selain	Persen		Persen	88 Persen	1,146,444,400						88 Persen	2,989,000,000	
	-				Guru dan Tenaga Kesehatan 3. Rasio Jabatan Fungsional Selain	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
					Guru dan Tenaga Kesehatan Bersertifikat Kompetensi	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
					 Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik 	Persen		Persen	89 Persen							89 Persen		
5 4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan	orang		orang	50 orang	0						50 orang	400,000,000	
5 4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				0 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kab. Sijunjung	0 Orang	400,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
5 4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mendapatkan Sertifikat lulus, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	orang		orang	200 orang	1,146,444,400						200 orang	2,589,000,000	
5 4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				200 Orang	1,146,444,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	ASN Kab. Sijunjung	200 Orang	2,589,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGA N SUMBER DAYA MANUSIA
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										1			1	
6 1				INSPEKTORAT DAERAH						7,003,344,546							8,326,372,000	
6 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten	Persen		Persen	100 Persen	5,942,276,896						100 Persen	7,094,858,355	
6 1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	34,428,600			Memperkuat			100 Persen	19,284,100	
6 1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	10,015,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inspektorat Daerah	0 Dokumen	4,441,800	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		c	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
6	1 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RPJMD	2021	2022	2 Dokumen	9,032,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Daerah Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	2 Dokumen	5,244,800	Jawab INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15,380,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pelayanan Publik Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	1 Laporan	9,597,500	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	4,564,216,470						100 Persen	5,019,054,117	
6	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	4,518,963,970		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	12 Bulan	4,970,860,367	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	27,538,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	0 Laporan	19,748,850	INSPEKTORAT DAERAH
					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan							2 Laporan		
6	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	17,713,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	13 Laporan	28,444,900	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	394,343,500						100 Persen	528,784,300	
6	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang diadakan				1 Paket	26,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	1 Paket	29,150,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	295,430,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	0 Orang	421,415,500	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti				48 Orang							48 Orang		
6	1 1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Pendidikan dan Pelatihan JJumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				48 Orang	22,355,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	48 Orang	23,155,000	INSPEKTORAT DAERAH
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-				0 Orang							0 Orang		
6	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	50,058,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	48 Orang	55,063,800	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	428,860,926						100 Persen	343,793,698	
6	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	66,396,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Paket	40,313,603	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	22,025,760		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Paket	18,734,672	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	11,598,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	12,758,625	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	32,290,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Laporan	41,606,158	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	296,549,216		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Laporan	230,380,640	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	72,000,000						100 Persen	88,220,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
						RPJMD	2021	2022	Tanget 2020	Tugu Inumutn	DOMEST	Damber Bana	Nasional	Daerah		Tanget	rugu mumum	Jawab
6	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	6 Unit	88,220,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	202,241,180						100 Persen	251,780,298	
6	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	76,249,180		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	3 Laporan	83,874,098	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	125,992,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Laporan	167,906,200	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	246,186,220						100 Persen	843,941,842	
6	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	125,063,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	2 Unit	137,569,850	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	57,892,720		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	1 Unit	636,818,992	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	63,230,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Inspektorat Daerah	4 Unit	69,553,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Maturitas SPIP	-		-	3 -	736,257,150						3 -	874,254,685	
					Nilai SAKIP PEMDA	-		п	В-							В -		
					Persentase Penyelesaian TL BPK RI dan APIP	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
6	1 2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	Persen		Persen	100 Persen	620,103,100						100 Persen	746,477,585	
6	1 2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				8 Laporan	27,268,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	8 Laporan	27,728,800	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60 Laporan	216,780,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	60 Laporan	293,106,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				15 Laporan	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	15 Laporan	150,000,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				4 Laporan	36,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	4 Laporan	41,583,795	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	114,609,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	40 Laporan	126,137,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	95,365,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	6 Dokumen	107,921,990	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Tujuan Tertentu	Persen		Persen	100 Persen	116,154,050						100 Persen	127,777,100	
6	1 2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3 Laporan	6,360,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	3 Laporan	7,001,500	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				29 Laporan	109,794,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah	29 Laporan	120,775,600	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas Apip	0		0	0 0	324,810,500						0 0	357,258,960	
					Nilai Evaluasi RB	0		0	- 0							- 0		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	lode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П	1	1		Nilai MCP Pencegahan Korupsi	0	2021	0	- 0							- 0		
6	1 3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	"Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis	Dokum en		Dokumen	2 Dokumen	5,259,500						2 Dokumen	5,785,450	
6	1 3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	5,259,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Rekomendasi	5,785,450	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	OPD		OPD	34 OPD	319,551,000						34 OPD	351,473,510	
6	1 3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				34 perangkat daerah	99,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Inspektorat	34 perangkat daerah	109,322,400	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				34 perangkat daerah	58,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Inspektorat	34 perangkat daerah	63,885,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				6 Kegiatan	134,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah dan Inspektorat	6 Kegiatan	147,576,000	INSPEKTORAT DAERAH
6	1 3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				6 perangkat daerah	27,142,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Perangkat Daerah dan Inspektorat	6 perangkat daerah	30,690,110	INSPEKTORAT DAERAH
7	Ļ.	-	<u> </u>	UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1,940,432,502							2,737,231,390	
7	1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,894,504,852						100 Persen	2,737,231,390	
7	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	7,825,600						100 Persen	23,257,100	
7	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	7,825,600	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	0 Dokumen	16,440,700	KECAMATAN KAMANG BARU
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
7	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	14 Laporan	6,816,400	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,482,343,682						100 Persen	1,629,924,990	
7	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bula n	1,463,864,502	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	13 Orang/bula n	1,599,894,590	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Laporan	7,460,800	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18,479,180	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	18 Laporan	22,569,600	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	9,198,200	
7	1 1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	14 Laporan	9,198,200	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	11,000,000						100 Persen	32,365,000	
7	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				21 Paket	11,000,000	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	21 Paket	13,500,000	KECAMATAN KAMANG BARU

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	10 Orang	18,865,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentse tertib administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	169,056,850						100 Persen	215,975,400	
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,744,600	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Paket	4,752,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	18,134,100	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Paket	26,972,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3,546,600	Semua Kab/Kota, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Paket	4,884,100	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,400,800	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Paket	8,827,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	16,149,800	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Laporan	35,745,300	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	123,080,950	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Laporan	134,795,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	100,582,390	
7	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Unit	36,640,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	4 Unit	15,800,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Unit	30,582,390	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Unit	17,560,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180,948,720							190,365,000	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	20,139,720	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		2 Laporan	22,450,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	160,809,000	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		12 Laporan	167,915,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43,330,000							169,936,800	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RPJMD	2021		10 Unit	37,000,000	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		10 Unit	85,245,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		10 Unit	6,135,800	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	6,330,000	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		0 Unit	8,316,000	KECAMATAN KAMANG BARU
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit							13 Unit		
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Unit	70,240,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	indeks kepuasan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	4,270,350						100 Persen	56,410,400	
7	1 2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggraaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	4,270,350						100 Persen	46,911,900	
7	1 2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Laporan	13,636,900	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4,270,350	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	4 Dokumen	33,275,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggraaan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	9,498,500	
7	1 2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				6 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	6 Dokumen	9,498,500	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase nagari/ desa dengan kategori maju	Persen		Persen	50 Persen	19,716,700						50 Persen	82,603,400	
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	19,716,700						100 Persen	82,603,400	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0		15,125,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	19,716,700	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	0 Laporan	67,478,400	KECAMATAN KAMANG BARU
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan							2 Laporan		
7	1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	35,950,000	
7	1 4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase koordinasi penyelenggraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	12,500,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Towart 2002	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Toward	Down Indibatif	Penanggung
				mogacian, our negratair		RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu indikatii		Sumper Dana	Nasional	Daerah	Judaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
7	1 4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Laporan	12,500,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 4	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksaaanKegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerahdan Istansi Vertikal	Laporan		Laporan	2 Laporan	0						2 Laporan	23,450,000	
7	1 4	7.04	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Laporan	23,450,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase penurunan potensi konflik/ sara	Persen		Persen	50 Persen	3,212,000						50 Persen	99,454,210	
7	1 5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kenala Daerah	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	3,212,000						100 Persen	99,454,210	
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				15 Orang	3,212,000	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	15 Orang	28,395,510	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				12 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Dokumen	53,513,700	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Otonomi Khusus	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	2 Dokumen	17,545,000	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase admninstrasi keuangan nagari/ desa yang dilaksanakan sesuai stndar	Persen		Persen	80 Persen	18,728,600						80 Persen	91,208,500	
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	18,728,600						100 Persen	91,208,500	
7	1 6	2.01	2	Pasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Dokumen	17,456,800	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				132 Dokumen	7,177,400	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	132 Dokumen	15,465,800	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				11 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	11 Dokumen	16,680,800	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				5 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Kamang Baru, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	5 Dokumen	15,164,400	KECAMATAN KAMANG BARU
7	1 6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	11,551,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	1 Dokumen	26,440,700	KECAMATAN KAMANG BARU
7				UNSUR KEWILAYAHAN						0.070 117 10							2.602.212.21	
7	1 1			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen		Persen	100 Persen	2,079,147,124 1,874,516,974						100 Persen	3,692,913,367 2,566,236,755	
7	1 1	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase singkronisasi perencanaan dan pelaksanaan	Persen		Persen	100 Persen	5,144,000						100 Persen	5,144,000	
7	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kinerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	5,144,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	5,144,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawah
1		1			Jumlah Dokumen Perencanaan	RPJMD	2021	2022	2 Dokumen				Nasional	Daerah		2 Dokumen		Jawab
		ļ		Administrasi Keuangan Perangkat	Perangkat Daerah persentase tertib administrasi													
7 1	1	2.02		Daerah	keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,500,023,924						100 Persen	2,055,949,843	
7 1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 ASN	1,482,236,924		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	15 ASN	1,972,493,998	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	17,787,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	14 Laporan	83,455,845	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentse tertib administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	198,987,650						100 Persen	308,335,224	
7 1	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Tahun	1,155,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Tahun	3,795,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	26,047,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Paket	43,089,227	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1,768,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Paket	4,427,500	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8,166,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Paket	8,855,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	161,849,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Laporan	248,168,497	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	22,380,633	
7 1	1 1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		22,380,633	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	106,487,400						100 Persen	46,119,370	
7 1	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Paket	20,639,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Paket	31,625,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Paket	85,848,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	7 Paket	14,494,370	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	63,874,000						100 Persen	128,307,685	
7 1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	55,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Unit	101,184,820	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		4,427,500	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	3,290,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	8 Unit	4,911,995	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5,084,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Unit	17,783,370	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7 1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	indeks kepuasan masyarakat	skor		skor	78 skor	18,057,150						78 skor	56,069,670	
7 1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen		Persen	100 Persen	18,057,150						100 Persen	56,069,670	

							Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	1	Kode		Urt	usan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
							RPJMD	2021	2022	141501 2020	rugu mumutn	Domusi	Sumber Bunu	Nasional	Daerah		Tuiget	Tugu Inumutii	Jawab
7	1 3	2.0	01	1 da	eningkatan Partisipasi Masyarakat alam Forum Musyawarah erencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Kegiatan	8,004,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Kegiatan	10,202,086	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 3	2.0	01	3 Pe	eningkatan Efektifitas Kegiatan emberdayaan Masyarakat di /ilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	10,053,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Laporan	45,867,584	KECAMATAN TANJUNG GADANG
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan							1 Kegiatan		
7	1 5	;			ROGRAM PENYELENGGARAAN IRUSAN PEMERINTAHAN UMUM	menekannya terjadi potensi konflik di wilayah kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	26,849,750						100 Persen	891,114,009	
7	1 5	2.0	01	Pe	enyelenggaraan Urusan emerintahan Umum Sesuai enugasan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persen		Persen	100 Persen	26,849,750						100 Persen	891,114,009	
7	1 5	2.0	01	Pe da 4 Ra M	embinaan Kerukunan Antar Suku an Intra Suku, Umat Beragama, as, dan Golongan Lainnya Guna Iewujudkan Stabilitas Keamanan okal, Regional, dan Nasional	penugasan kepasa uacian Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				9 Nagari	26,849,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Nagari	891,114,009	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	,		PI	ROGRAM PEMBINAAN DAN ENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen	159,723,250						100 Persen	179,492,933	
						persentase administrasi pemerintahan nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7	1 6	2.0	01	Ke	asilitasi, Rekomendasi dan Joordinasi Pembinaan dan engawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	159,723,250						100 Persen	179,492,933	
7	1 6	2.0	01	o Fa	asilitasi Administrasi Tata emerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				9 Nagari	36,607,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Nagari	39,400,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	2.0	01		asilitasi Pelaksanaan Pemilihan epala Desa						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		16,000,000	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	2.0	01	9 Pe	asilitasi Sinkronisasi Perencanaan embangunan Daerah dengan embangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				9 Nagari	42,403,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Nagari	42,288,710	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	2.0	01 1		asilitasi Penyelenggaraan etenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9 Nagari	30,424,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Nagari	37,451,932	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	2.0	01 1:	5 da	asilitasi Penataan, Pemanfaatan, an Pendayagunaan Ruang Desa erta Penetapan dan Penegasan atas Desa						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		4,862,027	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7	1 6	2.0	01 1	6 Pe	asilitasi Penyusunan Program dan elaksanaan Pemberdayaan fasyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				9 Nagari	50,288,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	9 Nagari	39,490,264	KECAMATAN TANJUNG GADANG
7				_	NSUR KEWILAYAHAN														
7	1 1			PI	ECAMATAN ROGRAM PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	89 Persen	1,788,819,673 1,628,613,623						89 Persen	3,089,129,960 2,711,128,620	
7	1 1	2.0	01	Pe	ABUPATEN/KOTA erencanaan, Penganggaran, dan waluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja PD	Persen		Persen	100 Persen	8,323,700						100 Persen	15,349,400	
7	1 1	2.0	01	1 Pe	enyusunan Dokumen Perencanaan erangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5,106,150	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Dokumen	11,829,400	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.0	01	6 Ca	oordinasi dan Penyusunan Laporan apaian Kinerja dan Ikhtisar ealisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	3,217,550	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Laporan	3,520,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.0	02		dministrasi Keuangan Perangkat Jaerah	Persentase tertib administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	1,385,617,147						100 Persen	2,054,220,850	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				11 Orang/bula n	1,354,564,247	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	11 Orang/bula n	2,000,331,850	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				30 Laporan	31,052,900	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Laporan	53,889,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	21,550,000	
7	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	11,550,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan				2 kali	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 kali	10,000,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	139,365,950						100 Persen	299,739,770	
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	2,883,900	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Paket	5,591,300	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	18,923,100	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	6 Paket	31,774,270	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,026,200	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Paket	12,364,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10,918,800	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	17,509,800	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	102,613,950	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	300 Laporan	232,500,400	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah seseuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	137,412,500	
7	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	33,000,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubiler yang diadakan				2 unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 unit	20,000,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin dan lainnya diadakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	18,000,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	66,412,500	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen		Persen	100 Persen	44,426,826						100 Persen	42,042,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric Nasional	oritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RPJMD	2021		12 Laporan	16,563,826	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	20,196,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	27,863,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Laporan	21,846,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Persen		Persen	100 Persen	50,880,000						100 Persen	140,814,100	
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	44,000,000	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	11 Unit	87,087,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan Mebel				42 unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	42 unit	14,500,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6,880,000	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Unit	16,773,900	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Unit	22,453,200	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	nilai		nilai	89 nilai	39,975,600						89 nilai	66,995,700	
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	39,975,600						100 Persen	66,995,700	
7	1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	39,975,600	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	24 Laporan	66,995,700	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Nagari/ Desa dengan Kategori Minimal Maju	Persen		Persen	50 Persen	28,558,400						50 Persen	58,745,500	
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa	Persen		Persen	100 Persen	28,558,400						100 Persen	58,745,500	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 lembaga	5,121,900	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 lembaga	14,850,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72 Laporan	23,436,500	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	72 Laporan	43,895,500	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3,422,050							0	
7	1 4	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3,422,050							0	
7	1 4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	3,422,050	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Laporan	0	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penurunan Potensi Konflik di Wilayah Kecamatan	Persen		Persen	3 Persen	49,938,300						3 Persen	149,232,050	
7	1 5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	49,938,300						100 Persen	149,232,050	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					_	RPJMD	2021	2022	rarget 2023	ragu indikatii		Sumper Dana	Nasional	Daerah	Jusaran	rarget	ragu indikatii	Jawab
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				30 Orang	24,389,200	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	52,231,850	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				36 Dokumen	25,549,100	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	36 Dokumen	97,000,200	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Administrasi Keuangan Nagari yang dilaksanakan sesuai Standar	Persen		Persen	79 Persen	38,311,700						79 Persen	103,028,090	
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen		Persen	100 Persen	38,311,700						100 Persen	103,028,090	
7	1 6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	0	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				246 Dokumen	4,927,050	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	246 Dokumen	31,416,000	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	25,941,600	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	46,660,790	KECAMATAN LUBUK TAROK
7	1 6	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				72 Laporan	7,443,050	Kab. Sijunjung, Lubuak Tarok, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	72 Laporan	24,951,300	KECAMATAN LUBUK TAROK
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang	Persen		Persen	100 Persen	2,432,405,773						100 Persen	4,679,286,006 3,606,786,006	
7	1 1	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan	urusan perangkat daerah	rersen		rersen	100 Persen	12.355.900						100 Persen	3,606,786,006	
	Ė	2.01		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	www	88 88		55 88	1 ss	12,000,900					-	1 ss	44,000,000	
7	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	www Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			33	2 Dokumen	7,855,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kabupaten Sijunjung	2 Dokumen	27,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	4,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kabupaten Sijunjung	1 Laporan	16,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,968,257,873							2,573,336,006	
7	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bula n	1,936,868,373	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	kabupaten sijunjung	19 Orang/bula n	2,386,336,006	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				36 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	kabupaten sijunjung	36 Dokumen	88,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	31,389,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	kabupaten sijunjung	14 Laporan	99,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						14,000,000							25,300,000	
7	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				26 Paket	14,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		26 Paket	25,300,000	KECAMATAN SIJUNJUNG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio: Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						103,590,450							480,150,000	
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,500,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Paket	165,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	7,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 Paket	27,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	3,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	27,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,900,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	1,650,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	20,960,900	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Laporan	38,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	63,729,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		100 Laporan	220,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							236,500,000	
7	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 Unit	66,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				8 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		8 Unit	71,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		30 Unit	99,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73,587,000							106,700,000	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	19,768,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 Laporan	35,200,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	53,819,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 Laporan	71,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91,404,000							140,800,000	
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	61,164,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		16 Unit	105,600,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		20 Unit	22,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun 2021	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	22,840,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Unit	13,200,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	point		point	89 point	19,891,000						89 point	46,200,000	
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	а	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	19,891,000						1 kegiatan	46,200,000	
7	1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	19,891,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan Masyaraka	12 Laporan	46,200,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks kepuasan masyarakat	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	17,690,850						1 kegiatan	144,100,000	
					Persentase Nagari/ Desa dengan Kategori Minimal Maju	Persen		Persen	90 Persen							90 Persen		
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawara Perencanaan Pembangunan di Desa	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	17,690,850						1 kegiatan	144,100,000	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				63 lembaga	7,534,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Persentase Pelaksanaa n Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	63 lembaga	49,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,156,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Persentase Pelaksanaa n Koordinasi Kegiatan Pemberday aan Desa	1 Laporan	94,600,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan keteriban umum	Persen		Persen	30 Persen	35,021,800						30 Persen	341,000,000	
7	1 5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						35,021,800							341,000,000	
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				75 Orang	24,171,800	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	75 Orang	132,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	7,850,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	165,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
														7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
7	1 5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	3,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	44,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai standar, Persentase administrasi pemerintahan nagari yang sesuai standar	Persen		Persen	95 Persen	96,606,900						95 Persen	541,200,000	
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						96,606,900							541,200,000	
7	1 6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				108 Dokumen	15,701,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	108 Dokumen	60,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				154 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan masyarakat	154 Dokumen	60,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	т т	1	1			RPJMD	2021	2022	7 target 2020	Tugu Inumutn		Dumber Bunk	Nasional	Daerah		Tunget	rugu mumum	Jawab
7	1 6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				18 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	18 Dokumen	49,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	6	Pasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	0	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				9 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	9 Dokumen	49,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	24,247,200	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	88,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	25,412,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	88,000,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				5 Dokumen	24,245,500	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	5 Dokumen	93,500,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7	1 6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Indeks Kepuasan masyarakat	1 Dokumen	51,700,000	KECAMATAN SIJUNJUNG
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1	-		KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN			-			1,618,905,920							1,912,654,503	
7	1 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,561,808,920						100 Persen	1,833,417,013	
7	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan evaluasi kineria PD	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	14,474,016	
7	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja organisasi	0 Dokumen	7,814,016	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen							2 Dokumen		
7	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah yang disusun				2 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja organisasi	2 Dokumen	6,660,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi keuangan	Persen		Persen	100 Persen	1,246,103,080						100 Persen	1,551,337,892	
7	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yg disediakan gaji dan tunjangan				12 org	1,240,065,080	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit askinerja	12 org	1,542,213,892	KECAMATAN IV NAGARI
		1			Jumlah Orang yang Menerima Gaji		1		0 Orang/bulan						organisa81	0 Orang/bulan		
	++	+	<u> </u>		dan Tunjangan ASN	1	 				Kab.				Meningkat	3,		
7	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah dkumen laporan keuangan yang disusun				1 dokumen	3,063,500	Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	nya kualitas akuntabilit askinerja organisasi	1 dokumen	4,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan						No.	0 Laporan		
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah dkumen laporan keuangan yang disusun				16 dkumen	2,974,500	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit askinerja organisasi	16 dkumen	4,624,000	KECAMATAN IV NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	RPJMD	2021		0 Laporan				Nasional	Daerah		0 Laporan		Jawas
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat	SKPD Persentase pemenuhan terhadap	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	0	
7	1 1	2.05	2	Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan				20 stel	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja	20 stel	0	KECAMATAN IV NAGARI
	-				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta				0 Paket		Kciuranan				organisasi	0 Paket		
7	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Atribut Kelengkapan jumlah bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang- undangan yang dikuti				2 kegiatan	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja	2 kegiatan	0	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang							0 Orang		
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	136,167,500						100 Persen	32,500,105	
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kompnen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan				1 paket	1,322,000	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as Kinerja Organisasi	1 paket	1,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	18,378,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as Kinerja Organisasi	0 Paket	18,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantr yg diadakan				2 paket							2 paket		
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan				2 paket	6,460,200	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as Kinerja Organisasi	2 paket	6,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	1 1	2.06	8	Pasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				1 paket	5,208,400	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as Kinerja Organisasi	1 paket	6,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	104,798,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as Kinerja Organisasi	0 Laporan	105	KECAMATAN IV NAGARI
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang-barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang diadakan	paket		paket	0 paket	2,351,300						0 paket	8,000,000	
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja	0 Unit	5,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					umlah unit peralatan dan mesin yang ada				1 unit						O A MARIE DE LA CALIFICIA DE LA CALIFICA DE LA CALIFICA DE LA CALIFICA DE LA CALIFICA DE LA CALIFICA DE LA CAL	1 unit		
7	1 1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	2,351,300					Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja organisasi	0 Unit	3,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
7	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				1 paket	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja organisasi	1 paket	0	KECAMATAN IV NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
	П	Ι			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	RPJMD	2021	2022	0 Unit				Nasional	Daerah		0 Unit		Jawab
	\vdash	-	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Bangunan Lainnya yang Disediakan Persentase pemenuhan terhadap													
7	1 1	2.08		Pemerintahan Daerah	pelayanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	139,807,040					Maria Lat	100 Persen	156,605,000	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan				1 paket	10,841,040	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerjaorga	1 paket	11,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan						Ilisasi	0 Laporan		
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				8 orang	128,966,000	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerjaorga nisasi	8 orang	145,605,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	Persen		Persen	100 Persen	37,380,000						100 Persen	70,500,000	
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				8 unit	33,000,000	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja rganisasi	8 unit	35,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit							0 Unit		
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				3 unit	4,380,000	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja rganisasi	3 unit	5,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit						.,,	0 Unit		
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas akuntabilit as kinerja	0 Unit	30,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					jumlah gedung kantr ydan bangunan lainnya ye dinelihara				3 unit							3 unit		
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen		Persen	80 Persen	0						80 Persen	6,237,490	
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	0						1 kegiatan	6,237,490	
7	1 2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan fasilitasi percepatan standar pelayanan inimal yang dilaksanakan dikecamatan				1 kegiatan	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kantr camat	1 kegiatan	6,237,490	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase nagari/desa dengan kategori minimal maju	Persen		Persen	100 Persen	20,192,250						100 Persen	22,000,000	
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah kegiatan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	20,192,250						1 kegiatan	22,000,000	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa				1 kegiatan	3,001,600	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas koordinasi dan fasilitasi pemberday aan nagari desa diwilayah	1 kegiatan	4,500,000	KECAMATAN IV NAGARI

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	I	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	RPJMD	2021		0 Dokumen	7,973,650	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas koordinasi dan fasilitasi pemberday aan nagari desa diwilayah	0 Dokumen	8,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah kegiatan sinkronisasi prgram kerja dan kegiatan pemberdayyaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan sasta diwilayah kerja keematan				1 kegiatan						Recamatan	1 kegiatan		
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan				1 kegiatan	9,217,000	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas koordinasi dan fasilitasi pemberday aan nagari desa diwilayah kecamatan	1 kegiatan	9,500,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	masyarakat di wilayan Kecamatan					0							0	
7	1 4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0							0	
7	1 4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Meningkatnya kuantitas koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				8 kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		8 kegiatan	0	KECAMATAN IV NAGARI
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran dan ketertiban umum	Persen		Persen	20 Persen	9,211,750						20 Persen	20,000,000	
				Penyelenggaraan Urusan	Persentase penurunan potensi knflik	Persen		Persen	20 Persen							20 Persen		
7	1 5	2.01		Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi dengan forcopincam	kegiata n		kegiatan	1 kegiatan	9,211,750						1 kegiatan	20,000,000	
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewijudkn stabilitas keamanan lkal regional dan nasional				1 kegiatan	9,211,750	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas koordinasi dan fasilitasi ketentrama n, ketertiban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum diilayah kecamatan	1 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang							0 Orang		
7	1 5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewanangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas koordinasi dan fasilitasi ketentrama n, ketertiban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum dilayah	0 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah kegiatan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan leh instans vertikal				1 kegiatan						an	1 kegiatan		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
7	1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Persentase administrasi keuangan nagari yang dilaksanakan sesuai	RPJMD Persen	2021	Persen	100 Persen	27,693,000			Nasional	Daerah		100 Persen	31,000,000	Jawab
				DESA	standar Persentase Administrasi pemerintahan nagari yang	Persen		Persen	100 Persen							100 Persen		
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	dilaksanakan sesuai standar Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan	Persen		Persen	100 Persen	27,693,000						100 Persen	31,000,000	
	H		<u> </u>	Pengawasan Pemerintahan Desa	pengawasan pemerintahan desa										Meningkat			
7	1 6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	9,241,400	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	nya kualitas krdinasi da fasilitasi ketentrama n, ketertiban umun dan penyelengg araan pemerintah an umum diwilayah kecamatan	0 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah nagari yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan				5 nagari							5 nagari		
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengdolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	o	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 7. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal	Meningkat nya kualitasi krdinasi da fasilitasi ketentrama n, keteritiban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum diwilayah kecamatan	0 Dokumen	0	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah nagari yang difasilitasi dalam rangka pengellaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa				5 nagari							5 nagari		
7	1 6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas krdinasi da fasilitasi ketentrama n, ketertiban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum diwilayah kecamatan	0 Dokumen	0	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah nagari yang difasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa				2 nagari							2 nagari		
7	1 6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	9,237,500	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas krdinasi da fasilitasi ketentrama n, keteritban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum diwilayah kecamatan	0 Dokumen	11,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					jumlah nagarai yang difasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa				5 nagari							5 nagari		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					.,	RPJMD	2021	2022	141get 2020	rugu mumum	Donasi	Sumber Build	Nasional	Daerah		141500	rugu mumum	Jawab
7	1 6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	9,214,100	Kab. Sijunjung, IV Nagari, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkat nya kualitas krdinasi da fasilitasi ketentrama n, ketertiban umum dan penyelengg araan pemerintah an umum diwilayah kecamatan	0 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN IV NAGARI
					Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				5 nagari							5 nagari		
7				UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1			KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN						1,916,381,492							2,353,881,492	
7	1 1			PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,773,775,592							2,036,275,592	
7	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							45,000,000	
7	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusu				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Dokumen	20,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Dokumen	25,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,430,719,994				-			1,430,719,994	
7	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan				15 Orang	1,409,019,994	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		15 Orang	1,409,019,994	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ bulan							0 Orang/ bulan		
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD yang disusun				18 Dokumen	21,700,000	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		18 Dokumen	21,700,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan		Returatian					0 Laporan		
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,500,000							32,500,000	
7	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Paket	2,500,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah pengadaan pakaian dinas				1 Orang			mondor omam		renyunun Duerun		1 Orang		
7	1 1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	beserta atribut kelengkapanya Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan				2 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana		7. Peningkatan Kinerja dan	0	2 Kegiatan	30,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat			1			161,953,190	1	Alokasi Umum	1	Pelayanan Daerah	<u> </u>		161,953,190	
7	1 1	2.06	1	Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				1 Paket	1,948,400	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Paket	1,948,400	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	14,724,000	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Paket	14,724,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah peralatan dan perlengkapan				2 Paket							2 Paket		
7	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	kantor yang disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	1,845,700	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Paket	1,845,700	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor yang disediakan				2 Paket							2 Paket		
7	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor yang disediakan Jumlah Logistik Kantro yang disediakan				3 Paket	11,470,490	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 Paket	11,470,490	KECAMATAN KOTO VII

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1	T		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	RPJMD	2021	2022					Nasional	Daerah		-		Jawab
					yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Paket	7,068,600	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	7,068,600	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket		Tieraraman.					0 Paket		
7	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	6,307,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	6,307,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah tamu yang dilayani				1 Paket		Returnin					1 Paket		
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				2 Paket	118,089,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Paket	118,089,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	500,000	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Dokumen	500,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							150,000,000	
7	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan baru				2 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 unit	50,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang diadakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Paket	100,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya				1 unit	0	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 unit	0	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit							0 Unit		
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	annya yang antanan					97,884,408							97,884,408	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik, air dan telefon/fax yang dibayarkan				3 Paket	25,044,408	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 Paket	25,044,408	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia				5 Orang	72,840,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	72,840,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80,718,000							118,218,000	
7	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				13 unit	68,988,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	13 unit	68,988,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit							0 Unit		
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Mesin Lainnya yang dipelihara				1 unit	0	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 unit	2,500,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 unit	35,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara				21 unit	11,730,000	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	21 unit	11,730,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit							0 Unit		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode RPJMD	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN		RPJMD	2021			500,000			Nasionai	Daeran			500,000	Jawas
7	1 2	2.02		PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						500,000							500,000	
7	1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Kegiatan	500,000	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Nagari/desa dengan kategori minimal maju	Persen		Persen	100 Persen	19,409,800						100 Persen	19,409,800	
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						19,409,800							19,409,800	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 Kali	4,950,000	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Kali	4,950,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	14,459,800	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Kegiatan	14,459,800	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						24,394,500							59,394,500	
7	1 5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						24,394,500							59,394,500	
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan				5 Kegiatan	24,394,500	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Kegiatan	24,394,500	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional				0 Orang							0 Orang		
7	1 5	2.01	7	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal				1 Kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Kegiatan	35,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						98,301,600							238,301,600	
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						98,301,600							238,301,600	
7	1 6	2.01	2	Pasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Nagari	22,247,700	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	22,247,700	KECAMATAN KOTO VII
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Nagari yang di Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Nagari	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	25,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang difasilitasi Pelaksaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desanya				7 Nagari	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	20,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	jumlah Badan Permusyawaratan Desa yang diFasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi				7 Nagari	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	55,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7	1 6	2.01	9	Pasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				0 Dokumen	25,154,800	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	25,154,800	KECAMATAN KOTO VII
					Jumlah Nagari yang di Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				7 Nagari							7 Nagari		
7	1 6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				0 Dokumen	27,110,500	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	27,110,500	KECAMATAN KOTO VII

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
		1	1		Jumlah nagari yang difasilitasi	RPJMD	2021	2022	-				Nasional	Daerah		-		Jawab
					Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				7 Nagari							7 Nagari		
7 1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah nagari yang difasilitasi dan Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				7 Nagari	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	20,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7 1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah nagari yang difasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				7 Nagari	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		7 Nagari	20,000,000	KECAMATAN KOTO VII
7 1	6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	23,788,600	Kab. Sijunjung, Koto VII, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	23,788,600	KECAMATAN KOTO VII
				UNSUR KEWILAYAHAN	Jumlah nagari yang difasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				7 Nagari							7 Nagari		
7 1				KECAMATAN						2,224,018,160							3,039,794,848	
7 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,146,351,160							2,631,194,848	
7 1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0							21,000,000	
7 1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 Dokumen	7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 Laporan	7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentse tertib administrasi keuangan perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	1,583,894,848						100 Persen	1,607,894,848	
7 1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/ bulan	1,583,894,848	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	16 Orang/ bulan	1,583,894,848	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Laporan	12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0							7,000,000	
7 1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 Laporan	7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaaian perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	18,000,000						100 Persen	120,000,000	
7 1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	10,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Paket	35,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	35,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	16 Orang	40,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentse tertib administrasi umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	267,615,050						100 Persen	418,000,000	

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	к	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	RPJMD	2021		1 Paket	3,144,300	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0	Kedialian	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	25,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	31,203,800	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	54,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,018,700	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Paket	8,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		7,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Laporan	12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 kegiatan	227,248,250	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 kegiatan	300,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	Persen		Persen	100 Persen	23,000,000						100 Persen	110,000,000	
7	1 1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Unit	35,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	9,000,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 paket	35,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 paket	14,000,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 paket	20,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Paket	20,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	194,521,262						100 Persen	205,000,000	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 paket	7,801,762		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 paket	15,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 orang	186,719,500	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	11 orang	190,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dipelihara	Persen		Persen	100 Persen	59,320,000						100 Persen	142,300,000	
7	1 1	2.09	1	Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		15,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
				nogratan, out nogratan	nogracun	RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu munkatn		Sumber Dana	Nasional	Daerah	Ousurun	Target	ragu muikatn	Jawab
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	45,500,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Unit	80,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	4,000,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	5 Unit	10,300,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	8,600,000	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Unit	20,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	1,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Unit	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	64,000,000	
7	1 2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	0						100 Persen	22,000,000	
7	1 2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	0	12 Laporan	10,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0		12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						0							22,000,000	
7	1 2	2.02	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah			12,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.03	1	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						0							10,000,000	
7	1 2	2.03	1	dan saraia Pelayanan Umum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Dokumen	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta				1 Unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Unit	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						0							10,000,000	
7	1 2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik	:	1 Dokumen	0	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7	1 2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Laporan	5,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	le		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
7 1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	RPJMD	2021	2022	1 Laporan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Prioritas 4. Peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan pelayanan publik		1 Laporan	5,000,000	Jawab KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase nagari/ desa dengan kategori maju	Persen		Persen	100 Persen	31,548,000						100 Persen	164,600,000	
7 1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persen		Persen	100 Persen	31,548,000						100 Persen	164,600,000	
7 1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 kegiatan	6,155,800	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 kegiatan	10,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				3 kegiatan	25,392,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	3 kegiatan	60,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	12 Laporan	94,600,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Persen		Persen	100 Persen	13,509,750						100 Persen	50,000,000	
7 1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	13,509,750						100 Persen	50,000,000	
7 1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 bulan	13,509,750	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 bulan	50,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						11,589,750							50,000,000	
7 1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						11,589,750							50,000,000	
7 1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi kesos dan pk				12 nagari	11,589,750	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 nagari	50,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						21,019,500							80,000,000	
7 1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						21,019,500							80,000,000	
7 1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah nagari yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 nagari	9,429,750	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		11 nagari	40,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7 1	6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				11 nagari	11,589,750	Kab. Sijunjung, Sumpur Kudus, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		11 nagari	40,000,000	KECAMATAN SUMPUR KUDUS
7				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						1,950,434,883							3,231,500,000	
7 1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,889,865,283							2,651,500,000	
7 1	1	2.01		KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kineria Perangkat Daerah						0							50,000,000	
7 1	1	2.01	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0							30,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7 1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang disusun				2 dokumen	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 dokumen	20,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7 1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,563,089,283							1,792,500,000	
7 1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangannya				22 orang	1,559,282,683	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		22 orang	1,742,500,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/ bulan							0 Orang/ bulan		

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daeral
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
	П	1				RPJMD	2021	2022			Kab.		Nasional	Daerah		0		Jawab
7	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun				2 dokumen	1,461,400	Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 dokumen	25,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun				13 dokumen	2,345,200	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		13 dokumen	25,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0							27,000,000	
7	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				30 stel	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		30 stel	27,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						136,875,800							332,000,000	
7	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan				1 paket	0	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 paket	15,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	1 1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	21,366,500	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Paket	55,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan				5 paket							5 paket		
7	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 paket	3,202,200	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 paket	17,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket							0 Paket		
7	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Dokumen	10,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	110,507,100	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Laporan	235,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				3 paket							3 paket		
7	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0							55,000,000	
7	1 1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan				2 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 unit	35,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan				1 paket	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 paket	20,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146,900,200							185,000,000	
7	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				4 paket	19,897,200	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 paket	35,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan		,					0 Laporan		
7	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				8 orang	127,003,000	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		8 orang	150,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43,000,000							210,000,000	

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
V - 221

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		C	apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun 2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
7	1 1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	RPJMD	2021	2022	13 unit	43,000,000	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		13 unit	120,000,000	KECAMATAN KUPITAN
				Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit		Kelurahan			·		0 Unit		
7	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				20 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		20 unit	22,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehab				3 unit	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		3 unit	68,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						10,538,500							90,000,000	
7	1 2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0							45,000,000	
7	1 2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				2 kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		2 kegiatan	45,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10,538,500							45,000,000	
7	1 2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				90 Persen	10,538,500	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		90 Persen	45,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah kegiatan peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan				2 kegiatan							2 kegiatan		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
7	1 3			MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						6,012,300							80,000,000	
7	1 3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						6,012,300							80,000,000	
7	1 3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah kegiatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				1 kegiatan	1,200,000	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 kegiatan	45,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 kegiatan	4,812,300	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 kegiatan	35,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan							0 Laporan		
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan							1 Laporan		
7	1 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0							0	
7	1 4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						0							0	
7	1 4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	0	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Laporan	0	KECAMATAN KUPITAN
7	1 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						13,264,800			-				100,000,000	
7	1 5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						13,264,800							100,000,000	
7	1 5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti oleh seksi Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan				4 kegiatan	13,264,800	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN KUPITAN

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	m	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
				Regiatan/ Sub Regiatan	Regiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
				Priaksanaan Semua Urusan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional jumlah kegiatan Pelaksanaan Semua				0 Orang							0 Orang		
7	1 5	2.01	7	reiaksanaan semua urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal PROGRAM PEMBINAAN DAN	Jumian kegiatan relaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 kegiatan	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		1 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 6			PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30,754,000							310,000,000	
7	1 6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30,754,000							310,000,000	
7	1 6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				0 Dokumen	9,857,100	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	24,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					jumlah nagari yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pendayagunaan Aset Desa				4 nagari/ desa							4 nagari/ desa		
7	1 6	2.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	jumlah nagari yang difasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Nagari/ desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Nagari/ desa	30,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah nagari yang difasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				4 Nagari/ desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Nagari/ desa	30,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 6	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				0 Dokumen	9,818,500	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	90,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah Nagari yang Jumlah nagari yang difasilitasi Penyusunan perencanaan				4 Nagari/ desa							4 Nagari/ desa		
7	1 6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	jumlah nagari yang difasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				4 Nagari/ desa	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Nagari/ desa	50,000,000	KECAMATAN KUPITAN
7	1 6	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				0 Dokumen	11,078,400	Kab. Sijunjung, Kupitan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Dokumen	86,000,000	KECAMATAN KUPITAN
					Jumlah nagarai/desa yang difasilitasi penyusunan program				4 Nagari/ desa							4 Nagari/ desa		
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	penyusunan program							İ						
8	1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3,451,483,270							5,400,362,164	
8	1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian uruan penunjang pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	1,660,247,428						100 persen	2,067,282,228	
8	1 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	persen		persen	100 persen	24,706,000						100 persen	40,000,000	
8	1 1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	8,736,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Dokumen	15,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				3 Dokumen	8,736,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	3 Dokumen	15,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7,234,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Laporan	10,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	persen		persen	100 persen	1,088,536,028			1	1		100 persen	1,088,536,628	
8	1 1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				8 Orang/ bulan	1,056,909,428	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	8 Orang/ bulan	1,056,910,028	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	12,021,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	2 Laporan	12,021,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(Capaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ndanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
8	1 1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	RPJMD	2021	2022	0 Laporan	19,605,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah 7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	0 Laporan	19,605,600	Jawab KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan							13 Laporan		
8	1 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	24,000,000						100 persen	25,000,000	
8	1 1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				17 Paket	9,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	17 Paket	10,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	15,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Orang	15,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	persen		persen	100 persen	234,246,600						100 persen	363,652,600	
8	1 1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 paket	2,662,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	2 paket	2,662,400	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	26,138,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	4 Paket	21,990,200	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 paket	14,621,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	2 paket	20,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	3,675,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	5 Dokumen	4,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				4 paket	0	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	4 paket	25,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket kunjungan tamu difasilitasi				2 paket	13,447,400	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	2 paket	40,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	173,702,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	50 Laporan	250,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pengadaan barang milik daerah	persen		persen	100 persen	38,000,000					Kantor	100 persen	138,000,000	
8	1 1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 paket	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kesbang, Politik dan Linmas	4 paket	100,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	38,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	11 Unit	38,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen		persen	100 persen	126,659,600						100 persen	267,093,000	
8	1 1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3,500,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Laporan	5,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	43,137,600	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Laporan	50,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	23,620,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Laporan	40,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	56,402,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 Laporan	172,093,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap pelayanan administrasi umum	persen		persen	100 persen	124,099,200						100 persen	145,000,000	

RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023
V - 224

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian			Capaian Kinerja	a dan Kerangka Pen	danaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	K	ode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung
					nogattan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	ragu munkatn		Sumber Dana	Nasional	Daerah		rarget	ragu indikatii	Jawab
8	1 1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	99,140,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	10 Unit	100,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	14,959,200	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	0 Unit	20,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dinelihara				18 Unit							18 Unit		
8	1 1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 unit	10,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Kantor Kesbang, Politik dan Linmas	1 unit	25,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	persen		persen	30 persen	151,727,300						30 persen	500,000,000	
8	1 2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	persen		persen	100 persen	151,727,300						100 persen	500,000,000	
8	1 2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				445 Orang	151,727,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	445 Orang	200,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kabangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Orma, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Laporan	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	50 Laporan	300,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 2	2.01	6	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Kehuarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegasakat,				0 Keluarga	0				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	0 Keluarga	0	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	persen		persen	90 persen	35,000,000						90 persen	35,000,000	
8	1 3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitan Skelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah	persen		persen	100 persen	35,000,000						100 persen	35,000,000	
8	1 3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Eika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumilah Orang yang Mengkuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Dacrah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				44 Orang	35,000,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Partai Politik di Kabupaten Sijunjung	44 Orang	35,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persen		Persen	50 Persen	1,058,006,542						50 Persen	1,288,079,936	
8	1 4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	persen		persen	100 persen	1,058,006,542						100 persen	1,288,079,936	
8	1 4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendafaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayajan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Seplecta Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				13 Dokumen	858,138,742	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Partai Politik, Organisasi Kemasyara katan dan LSM yang terdaftar di Kabupaten Siiuniung	13 Dokumen	938,079,936	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Dacrah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Penguwasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Laporan	199,867,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Partai Politik, Organisasi Kemasyara katan dan LSM yang terdaftar di Kabupaten Sijunjung	50 Laporan	350,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

						Target	Realisasi	Prakiraan Capaian		(apaian Kinerja	a dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraan Maju	Rencana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	К	Code		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Akhir Periode	Capaian RKPD Tahun	Target RKPD Tahun			i	T	Pri	oritas	Kelompok Sasaran			Penanggung
				Regiatan/ Sub Regiatan	Kegiatan	RPJMD	2021	2022	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Jawab
8	1 5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penurunan konflik ekonomi, agama dan budaya	persen		persen	20 persen	0						20 persen	510,000,000	
					Persentase penurunan penyalahgunaan narkotika	persen		persen	20 persen							20 persen		
8	1 5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase penurunan penyalahgunaan narkotika	persen		persen	100 persen	0						100 persen	510,000,000	
8	1 5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1260 Orang	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Anak Sekolah dan masyarakat	1260 Orang	510,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan konflik sosial	Persen		Persen	20 Persen	546,502,000						20 Persen	1,000,000,000	
8	1 6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	Persen		Persen	100 Persen	546,502,000						100 Persen	1,000,000,000	
8	1 6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Rasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konfiki di Daerah				36 Laporan	360,934,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan , Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	36 Laporan	700,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	1 6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	185,568,000	Kab. Sijunjung, Sijunjung, Muaro	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Masyarakat	3 Dokumen	300,000,000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			TOTAL							706,888,348,310							1,178,349,635,291	



BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih pada periode RPJMD 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan tahunan yang telah ditentukan maka di pilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi. Target capaian indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah untuk Tahun 2023 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Realisai dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Realis asi	Outlook	Target	2023	Target
			2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
1	1 : Meningkatkan kualitas pela	yanan p	ublik yar	ng efektif,	efisien dar	responsi	f berbasis
refo	rmasi birokrasi						
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai SAKIP Pemda	Nilai	62,70	65-69	70-75	70-75	76-79
3	Manajemen Risiko Indeks	Level	2	2	3	3	3+
4	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	51,97	55-59	70,00	60-65	66-70
5	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,06	3,01-3,50	3,51-4,00	3,51-4,00	4,01-4,50
6	Indeks Inovasi Daerah	Skor	38,13	40-42	2.500	43-45	46-50
	2 : Meningkatkan daya saing ekon wisata	omi daeı	ah berbas	sis pembero	layaan ekon	omi kerak	yatan dan
7	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	27,46	28,50	30,50	30,50	31,50
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	0,83	0,88	0,95	0,95	1,10
9	Kontribusi sektor per-dagangan terhadap PDRB	%	11,67	12,50	12,80	12,80	13,10
10	Kontribusi sektor perin-dustrian terhadap PDRB	%	2,73	3,00	5,00	3,50	4,00
11	Pertumbuhan realisasi investasi	%	13,23	14,00	15,00	15,00	20,00

No	Indikator Kinerja Utama	Sat.	Realis asi	Outlook	Target	2023	Target
NO	indikator kinerja otama	Sat.	2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
12	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	40,31	40,46	44,92	41,24	42,00
13	Tingkat Pengangguran Ter-buka	%	3,57	3,62	4,86	3,41	3,00
14	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7273	0,7300	0,7500	0,7500	0,7900
15	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	16,81	16,60	15,80	16,20	15,80
	3 : Meningkatkan kualitas SDM				luktif berba	sis teknol	ogi dalam
tata	nan Adat Basandi Syarak, Syarak Ba	sandi K	itabulah (A	ABS-SBK)			
16	Harapan lama sekolah	Thn.	12,38	12,54	13,17	12,70	12,80
17	Rata-rata lama sekolah	Thn.	8,12	8,21	8,23	8,31	8,41
18	Usia Harapan Hidup	Thn.	66,36	66,59	66,69	66,79	66,96
19	Prevalensi balita stunting	%	30,1	20,0	15,00	17,00	14,00
20	Indeks Pembangunan Gen-der	Poin	93,40	93,50	93,50	93,80	94,00
21	Indeks Pemberdayaan Gen-der	Poin	60,46	60,46	61,00	61,00	63,00
22	Indeks Pembangunan Lite-rasi Masyarakat	Nilai	3,13	5,00	11,00	8,00	11,00
23	Persentase warisan budaya yang dimanfaatkan	%	13,8	15,00	22,60	18,00	22,60
24	Tingkat penurunan seng-keta adat	%	6,5	6,5	2	6,5	6,5
	i 4 : Meningkatkan kualitas infrast n berwawasan lingkungan	 ruktur d	an prasar	ana dasar s	serta pemai	ıfaatan su	mber daya
25	Indeks Infrastruktur jalan	Nilai	58,59	62,00	72,38	68,00	72,00
26	Cakupan layanan irigasi	%	41,89	42,50	55,00	43,50	46,00
27	Cakupan layanan air bersih	%	71,65	75,00	90,00	85,00	90,00
28	Cakupan sanitasi yang layak	%	45,52	47,00	90,00	50,00	55,00
29	Indeks Kualitas Air	Skor	54,62	54,70	52,80	54,85	55,00
30	Indeks Kualitas Udara	Skor	94,35	94,45	89,55	94,55	96,00
31	Indeks Tutupan lahan	Skor	65,58	66,00	68,77	67,00	68,77
32	Indeks risiko bencana	Skor	106,0	105,	100,0	102,0	100,0

6.2. Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai nai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelengaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka

perwujudan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai pembangunan ekonomi kegiatan sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek Daya Saing Daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sijujung tersebut secara rinci disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6.2 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 dan 2024

			_			2022	
No	Aspek/Urusan/Bidang/	Sat.	Reali sasi			2023	Target
	Indikator Kinerja		2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
A.	Aspek Kesejahteraan Masyaraka						
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemera						
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,15	3,95	4,21	4,43	4,65
1.2	PDRB per-kapita (ADHK)	Rp Juta	29,05	29,40	29,57	30,36	30,60
1.3	PDRB per-kapita (ADHB)	Rp Juta	40,31	40,46	44,92	41,24	42,00
1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,57	3,62	4,86	3,41	3,00
1.5	Angka kemiskinan	%	6,80	6,00	6,43	5,65	5,30
1.6	Jumlah penduduk miskin	Rb Jiwa	16,60	15,80	16,20	15,80	16,60
1.7	Gini Ratio	nilai	0,270	0,260	0,250	0,250	0,240
2.	Fokus Kesejahteraan Sosial						
2.1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	67,86	68,06	69,39	68,57	69,39
2.1.1	Usia Harapan Hidup	Thn.	66,36	66,59	66,69	66,79	66,96
2.1.2	Harapan lama sekolah	Thn.	12,38	12,54	13,17	12,70	12,80
2.1.3	Rata-rata lama sekolah	Thn.	8,12	8,21	8,23	8,31	8,41
2.1.4	Pengeluaran riil per-kapita	Rp Ribu	10.389	10.438	10,723	10.438	10.650
2.2	Indeks Pembangunan Gender	Poin	93,40	93,50	93,50	93,80	94,00
2.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	44,04	35,00	45,00	40,00	45,00
В.	Aspek Pelayanan Umum			I .			
1.	Urusan Wajib yang Berkaitan de	ngan Pe	lavanan Da	asar			
1.1	Urusan Pemerintahan Bidang Pe						
1.1.1	Tingkat partisipasi pendu-duk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	%	76,91	78,00	64,90	80,00	82,00
1.1.2	Tingkat partisipasi pendu-duk usia 7-12 tahun jenjang pendidikan dasar	%	91,63	95,00	100	100	100
1.1.3	Tingkat partisipasi pendu-duk usia 13-15 tahun jenjang pendidikan me-nengah pertama	%	79,20	81,0	89,00	84,00	89,00
1.1.4	Tingkat partisipasi pendu-duk usia 7-18 tahun jenjang pendidikan kesetaraan	%	77,40	79,0	40	82,0	85,00
1.1.5		%	n.a	48,00	65,0	52,0	55,00
1.1.6	Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompe-tensi minimum	%	n.a	48,00	65,0	52,0	55,00
1.1.7		%	93,39	95,00	100	98,00	100
1.1.8	APS SMP/MTs/ Paket B	%	86,82	89,0	100	93,00	98,00
1.1.9	APK PAUD	%	72,37	75,00	53,00	78,00	80,00
1.1.10	APK SD/MI/Paket A	%	102,46	100	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang/	Sat	Reali sas	si Outlook	Target	2023	Target
	Indikator Kinerja	Sat.	2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
1.1.11		%	98,51	100	100	100	100
1.1.12	Persentase sekolah yang memiliki nilai Assesment minimal Baik	%	n.a	25	30	30	35
1.2	Urusan Pemerintahan Bidang Ke	sehatan					
1.2.1	Prevalensi balita stunting	%	30,1	20,0	15,00	17,00	14,00
1.2.2	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	angk a	146,7	135	100	100	75
1.2.3	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Angk a	17,12	13,0	10,0	10,0	7,0
1.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angk a	9,2	5,0	4,0	4,0	3,0
1.2.5	Prevelansi balita gizi buruk	%	0,89	0,75	9,0	0,6	0,5
1.2.6	Cakupan layanan kese-hatan ibu hamil	%	72,76	100	100	100	100
1.2.7	Cakupan layanan keseha-tan bayi sesuai standar	%	76,83	100	100	100	100
1.2.8	Cakupan layanan kese-hatan Balita sesuai standar	%	78,92	100	100	100	100
1.2.9	Cakupan layanan keseha-tan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	%	77,61	100	100	100	100
1.2.10	Cakupan layanan orang usia 15-29 tahun menda-patkan skrining kesehatan sesuai standar	%	80,24	100	100	100	100
1.2.11	Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,13	100	100	100	100
1.2.12	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita hipertensi sesuai standar	%	54,64	100	100	100	100
1.2.13	Cakupan pelayanan kese-hatan penderita DM sesuai standar	%	122,84	100	100	100	100
1.2.14		%	100	100	100	100	100
1.2.15		%	100	100	100	100	100
1.2.16	Persentase menurunnya kematian akibat penyakit menular	%	51	48	6	45	40
1.2.17	Persentase terkendalinya penyakit tidak menular	%	99,8	100	65	100	100
1.2.18	Rasio daya tampung RSUD terhadap jumlah penduduk	%	0,48	0,50	0,14	0,51	0,53
1.2.19		statu s	Utama		Paripur na	Paripur na	Paripur na
1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pe						
1.3.1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	74,73	76,0	69,89	77,0	80,0
1.3.2	Rasio layanan irigasi	%	41,89	43,0	55,00	48,00	51,0
1.3.3		%	68,32	71,00	90,00	75,00	80,00
	Cakupan sanitasi yang layak	%	45,52	47,00	90,00	50,00	55,00
1.3.5		%	100	100	35	100	100
1.3.6	Rasio tenaga kerja kons-truksi yang bersertifikat	%	18,45	19,05	21,55	21,55	24,05
1.3.7	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	68,5	70	71	71	72
1.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	rumaha %					90,0
1.4.1	Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga	-/0	78,7	82,0	85,0	85,0	90,0
1.4.2	Persentase rehabilitasi ru-mah layak huni korban bencana	%	0	20	75	25	30
1.4.3	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	%	10,96	12,0	17,79	15,0	17,0
1.4.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	52,35	55,0	100	58,0	62,0
1.5	Urusan Pemerintahan Bidang Masyarakat	Keten	traman,	Ketertiban	Umum	dan Per	lindungan
1.5.1	Indeks risiko bencana	Skor	106,0	105,0	100,0	102,0	100,0
1.5.2	Persentase gangguan Trantibum	%	100	100	100	100	100
	yang dapat diselesaikan						

	Aspek/Urusan/Bidang/		Reali sasi	Outlook	Target	t 2023	Target
No	Indikator Kinerja	Sat.	2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
1.5.3		%	100	100	100	100	100
1.5.4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	org	161.45 7	170.00 0	60.000	172.000	176.00 0
1.5.5		org	161.45 7	170.00 0	60.000	172.000	176.00 0
1.5.6	terhadap bencana Jumlah penduduk yang memperoleh layanan	org	127	0	0	0	0
1.5.7	penyelamatan dan eva-kuasi korban bencana Jumlah pelayanan penyel-	kejad	39	0	0	0	0
1.5.8	amatan dan evaluasi kor-ban bencana kebakaran Persentase pelayanan pe-	ian 100	100	100	100	100	100
	nyelamatan dan evaluasi korban bencana kebaka-ran						
1.5.9	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) penangganan kebakaran	Me- nit	15	15	15	15	13
1.6 1.6.1	Urusan Pemerintahan Bidang So Persentase PPKS yang	sial %	29,34	35,0	67,00	40,0	45,0
	memperoleh bantuan sosial				,	-	·
1.6.2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	2,7	4,0	20,00	6,0	10,0
1.6.3	Persentase korban ben-cana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100
2.	Urusan Wajib yang Tidak Berkait			nan Dasar			
2.1	Urusan Pemerintahan Bidang Te			05.0	10	00.0	0.5.0
2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang menga-cu kepada rencana tenaga kerja	%	83,33	85,0	40	90,0	95,0
2.1.2	besertifikat kompetensi	%	41,25 0.40	44,0	25,00	48,0	53,0 0,58
2.1.3	kerja			0.47	0,52	0,52	
2.1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	%	100	100	100	100	100
2.1.5	ditempatkan	%	27,4	31,0	32,00	32,00	33,0
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pe						
$\frac{2.2.1}{2.2.1}$	Indeks Pemberdayaan Gender Persentase ARG terhadap APBD	Poin %	60,46 0,001	60,46 0,001	61,00 0,002	61,00 0,002	63,00 0,002
2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per	%	3,4	3,0	0,002	2,5	2,0
2.2.4	100.000 penduduk perempuan Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
2.2.5	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kateg ori	Pratam a	Pratam a	Nidya	Nidya	Nidya
2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pa	ngan					
2.3.1	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai	78,88	83,0	90,00	85,0	90,0
2.3.2		Skor	88,02	90,0	82,50	92,0	93,0
2.3.3	Persentase ketersediaan pangan Urusan Pemerintahan Bidang Pe	% rtanaha	1.344	1.344	20	1.400	1,500
2.4 2.4.1	Persentase penyelengga-raan	rtanana %	0	50	75	60	70
	pertanahan yang sesuai dengan ketentuan						
2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	100	100	100	100
2.4.3	Persentase penangganan sengketa tanah ulayat melalui mediasi	%	0	100	100	100	100
2.5	Urusan Pemerintahan Bidang Lir	ı 1gkunga	n Hidup	I			
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkung-an	Skor	73,11	74,0	71,18	75,0	76,0
2.5.2	Hidup Indeks Kualitas Air	Skor	54,62	54,70	52,80	54,85	55,00

N 7 -	Aspek/Urusan/Bidang/	0-4	Reali sasi	Outlook	Target	t 2023	Target
No	Indikator Kinerja	Sat.	2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
2.5.3	Indeks Kualitas Udara	Skor	94,35	94,45	89,55	94,55	96,00
2.5.4	Indeks Tutupan lahan	Skor	65,58	66,00	68,77	67,00	68,77
2.5.5	Persentase penangganan sampah	%	15,57	17,0	23,00	21,0	23,00
2.5.6	Persentase pengurangan sampah	%	17,86	20,0	38,00	23,0	26,0
2.6	Urusan Pemerintahan Bidang Ad						
2.6.1	Rasio penduduk usia 17 tahun memiliki KTP-el	%	94,36	96,0	98,00	98,00	100
2.6.2	Persentase anak usia 01-17 tahun memiliki KIA	%	30,61	33,0	45	36,0	40,0
2.6.3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kepen-	%	8	10	20	15	20
2.7	dudukan Urusan Pemerintahan Bidang Pe	mberder	raan Masu	arakat dar	n Desa		
2.7.1	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,7462	0,7500	0,7900	0,7600	0,7900
2.7.2	Tingkat penurunan seng-keta adat	%	16	16	13	13	10
2.7.3	Persentase peningkatan status Nagari/Desa man-diiri	%	6,5	6,5	2	6,5	6,5
2.8	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	ngendal	ian Pendu	duk dan K	eluarga B	erencana	
2.8.1	Indeks Pembangunan Keluarga	Skor	53,69	55,75	55,80	55,80	55,85
2.8.2	Total Fertlity Rate	nilai	2,06	2,06	2,22	2,06	2,06
2.8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	%	72,58	75,24	76,63	76,63	78,02
2.8.4	Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	12,0	11,75	11,52	11,52	11,28
2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Pe						
2.9.1	Persentase penurunan angka kecelakaan	%	5	4	3	3	2
2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Ko						
2.10.1		Skor	1,88	2,2	3,5	2,5	3,0
2.10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan se-cara online dan terintegrasi	%	50	60	70	65	70
2.10.3		%	97,14	99,0	100	100	100
2.10.4		%	100	100	55	100	100
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Ko	perasi,	Usaha Kec	il dan Meı	nengah		l
$\overline{}$	Persentase koperasi yang berkualitas	%	44,3	46,0	61,48	50,0	55,0
2.11.2		%	0.03	0,8	0,25	0,15	0,25
	Persentase koperasi sehat	%	40,74	43,0	28	46,0	50,0
	Persentase peningkatan omset UMKM	%	0,2	0,4	5	0,6	1
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	enanama	an Modal				
	Persentase peningkatan realisasi investasi	%	13,23	14,00	15,00	15,00	20,00
2.13	Urusan Kepemudaan dan Olahra		1	I			
	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	n.a	45,3	46,0	46,0	47,0
2.13.2	Penumbuhan milenial en- trepreneur dan women	org	5.171	699	836	836	836
2.13.3	entrepreneur Tingkat partisipasi pemu-da dalam kegiatan eko-nomi	%	8,38	10,0	20	13,0	16,0
2.13.4	dalam organisasi kepemu-daan dan organisasi sosial	%	11,56	15.75	17,75	17,75	20
2.13.5	even olaĥraga nasional dan	Meda li	33	35	45	45	45
2 14	provinsi	aticti1-					
2.14 1	Urusan Pemerintahan Bidang St Persentase OPD yang	atistik %	41	45	70	50	55
4.17.1	menggunakan data sta-tistik dalam menyusun perencanaan	/0	71	70	70	30	

No	Aspek/Urusan/Bidang/	Sat.		Outlook	Target		Target
	Indikator Kinerja pembangu-nan daerah		2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
	pembangu-nan daeran						
2.14.2	Persentase OPD yang	%	41	45	70	50	55
	menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi						
	pembangunan daerah						
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	rsandiaı	1				
2.15.1	Persentase layanan publik yang	%	0	10	45	20	30
	telah menerapkan sistem persandian						
2 15 2	Tingkat keamanan infor-masi	%	0	10	45	20	30
2.10.2	pemerintah	,,,				20	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ke	budayaa					
2.16.1	Persentase seni budaya yang	%	18,10	20,0	27,80	23,0	25,0
0.16.0	dimanfaatkan	%	0.5	10.0	17.40	15.0	17.40
2.10.2	Persentase cagar budaya yang dimanfaatkan	70	9,5	12,0	17,40	15,0	17,40
2.16.3	Persentase cagar budaya yang	%	44,04	48,0	100	55,0	65,0
	dilestarikan		,			,-	,-
		-					
2.17.1	Indeks Pembangunan Literasi	Nilai	3,13	5,00	11,00	8,00	11,00
2.17.2	Masyarakat Nilai tingkat kegemaran	Nilai		4,1	64,2	7,1	9,0
4.11.2	membaca masyarakat	Iviiai		7,1	∪ ⊤,∠	1,1	9,0
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Ke	arsipan					
2.18.1	Indeks Kepatuhan Arsip Daerah	%	53,84	55,0	40	58,0	63,0
2.18.2	Tingkat ketersediaan arsip	%	57,14	60,0	70	65,0	70
	sebagai bahan akuntabili-tas						
3	kinerja Urusan Pilihan						
3.1	Urusan Pemerintahan Bidang K	- elautan	dan Perika	anan			
3.1.1	Nilai Tukar Petani Perika-nan	Nilai	97	98	100	100	100
3.1.2	Jumlah produksi perikanan	Ton/	278	278	306	306	334
		thn					
3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pa			0.00	0.05	1.00	1.10
3.2.1	Kontribusi sektor pariwi-sata terhadap PDRB	%	0,83	0,88	0,95	1,00	1,10
3.2.2	Kontribusi sektor pariwi-sata	%	1,89	1,90	2,0	2,0	2,25
	terhadap PAD		,	,	.,-	.,-	,,
3.2.3		%	11,19	12,0	10	12,5	13,0
3.2.4	Persentase peningkatan	%	3,99	5,0	15,00	7,0	10,0
	perjalanan wisatawan nu- santara yang datang						
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	rtanian					
3.3.1	Kontribusi sektor pertanian	%	27,46	28,50	30,50	30,50	31,50
	terhadap PDRB		. , -	,	/	,	, , , , ,
3.3.2	Tingkat produktivitas padi	Ton/	4,5	4,64	4,71	4,71	4,78
2.2.2		ha					
3.3.3		Ton	7.368	7.400	5.731	7.500	8.500
	JagungManggis	Ton	26.949	28.000	4.133	29.000	30.000
	Karet	Ton	64.025	65.000	66.197	66.197	67.150
	Telur ayam ras	Ton	1.690	1.750	1.402	1.900	2.000
3.3.4	Jumlah populasi ternak						
	unggulan :						
	• Sapi	ekor	16.018	16.655	16.882	16.882	16.990
2 2 5	• Kerbau	ekor	9.633	12.152	12.271	12.271	12.397
3.3.5	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit	%	0,71	0,6	4	0,5	0,4
	hewan menular						
3.3.6	Persentase peningkatan	%	1,4	2	5	5	5
	pendapatan petani	L					
3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Pe			10.50	10.00	10.00	10.10
3.4.1	Kontribusi sektor perda-gangan	%	11,67	12,50	12,80	12,80	13,10
3.4.2	terhadap PDRB Persentase pelaku usaha yang	%	25	30	40	35	40
υ.π.⊿	memiliki izin	/0	4.5	30	+0	55	40
3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar,	%	23,99	25,00	55,54	28,0	33,0
	timbang dan per-lengkapanya				'	•	
	(UTTP) yang bertanda tera sah						
2 =	yang berlaku	 	<u> </u>				
3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Pe	-1111uust	11411				

No	Aspek/Urusan/Bidang/	Sat.		Outlook		t 2023	Target
3.5.1	Indikator Kinerja	%	2021	2022	RPJMD	RKPD	2024
	Kontribusi sektor perin-dustrian terhadap PDRB		2,73	3,00	5,00	3,50	4,00
3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	%	75	80	95	85	90
3.5.3	Persentase IKM yang memiliki izin	%	28,88	30,0	19	33,0	35,0
3.5.4	Persentase kenaikan omset IKM	%	0,54	1,3	1,75	1,5	1,75
3.6	Urusan Pemerintahan Bidang Tr	ansmigr					
3.6.1	Nilai rata-rata indeks per- kembangan 100 Kawasan transmigrasi Prioritas Ke- menterian yang direvi-talisasi	%	0	0	0	0	25
4	Unsur Pendukung Urusan Pemer					1	
4.7.1	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai SAKIP Pemda	Nilai Nilai	49,17 62,70	50-55 68-69	61-63 75-80	56-60 70-75	61-63 76-79
4.7.3	Nilai LPPD	Nilai	n.a	3.200- 3.400	3.400- 3.500	3.400- 3.500	3.500- 3.700
4.7.4	Indeks Pelayanan Publik	Skor	3,06	3,01-	3,51- 4,00	3,51-	4,01- 4,50
4.7.5	Persetanse pengadaan	%	0	3,50 100	100	4,00 100	100
4.7.5	konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya			100	100	100	100
4.7.6	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan kom-petitif	%	0	100	100	100	100
4.7.7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui penga-daan	%	25	30	33	33	38
5	Unsur Penunjang Urusan Pemeri					•	
5.1	Unsur Perencanaan Pembanguna	n					
5.1.1	Indeks Kualitas Perenca-naan	Nilai	84,82	85,81	89,03	89,03	90,21
5.1.2	Nilai komponen perenca-naan	Nilai	20,36	21-22	23-25	23-25	26-28
5.2	terhadap evaluasi SAKIP Unsur Keuangan						
5.2.1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.2.2	Rasio PAD	%	9,45	10	14,00	10,5	11
5.2.3	Deviasi realiasi PAD terhadap anggaran	%	102,63	101	110	103	103
5.2.4	Rasio anggaran sisa ter-hadap APBD tahun sebe-lumnya	%	11,5	9,8	5,00	9,11	9,12
5.2.5	Cakupan layanan publik terhadap informasi ke-uangan daerah	%	80	100	100	100	100
5.3	Unsur Kepegawaian						
5.3.1		indeks	0,40	0,41-0,50	0,51-0,61	0,51-0,61	0,62-0,71
5.3.2	Rasio pegawai pendidikan tinggi terhadap me-nengah/dasar	%	87.31	87.5	88,0	88,0	88.5
5.3.3	Rasio pegawai fungsional selain guru dan tenaga kesehatan	%	8.45	12,0	20,0	16,0	20,0
5.4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan		1	1	1		
5.4.1	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	51,97	55-57	70,00	60-65	66-70
5.4.2	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompe-tensi	%	2,45	8,0	20	15,0	20
5.5 5.5.1	Unsur Penelitian dan Pengembar Indeks Inovasi Daerah	n gan skor	38,13	40-42	2.500	43-45	46-50
6	Unsur Pengawasan Urusan Peme			TU-74	4.500	TU-40	TO-30
6.1	Manajemen Risiko Indeks	Level	2	2	3	3	3+
6.2	Maturitas SPIP	Level	3	3+	4+	4	4
6.3	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2+	3	3+	3+	4
C.	Aspek Daya Saing						
1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Da		100.0	100.0	105.00	110.0	110.0
1.1 2.	Nilai Tukar Petani Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastr	Nilai	108,0	108,0	105,00	110,0	112,0
2.1	Indeks Infrastruktur	nilai	59,38	61,0	75,54	63,0	65,0
2.2	Indeks infrastruktur jalan	nilai	58,59	62,00	72,38	68,00	72,00
2.3	Rasio Elektrifikasi	%	61,22	62,0	72,00	63,0	64,0
2.4	Rasio layanan broadband 4G LTE	%	49,00	52,0	60,00	54,0	60,00
3.	Fokus Iklim i						
3.1	Angka Kriminalitas	%	0,05	0,04	0,03	0,03	0,02
4.	Fokus Sumber Daya Manusia	I 0'		T == -	FO 00	F0.00	F0.00
4.1	Rasio Ketergantungan	%	57,14	55,0	53,00	53,00	52,00



BAB VII PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2023 mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah .

Sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2023 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023 difokuskan pada pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Penyusunan RKPD Tahun 2023 dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan verifikasi Rancangan Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah. Disamping itu, RKPD Tahun 2023 juga merupakan sebagai pedoman untuk:

- a. Perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023 berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
- b. Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
- c. Pedoman bagi stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

LAMPIRAN I



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SESUAI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023

LAMPIRAN I

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sesuai Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kinerj	a dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Re	ncana Tahun 2024	
	Kode	•	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			BIDANG I ENDIDINAN	SPM Pendidikan Anak Usia Dini											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SPM Pendidikan Dasar											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				SPM Pendidikan Kesetaraan											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SD	97 sekolah	12,703,508,600						97 sekolah	111,701,450,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SMP	7 sekolah							7 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah sekolah terakreditasi jenjang PAUD	296 lembaga							296 lembaga		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah sekolah terakreditasi jenjang SD	209 sekolah							209 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah sekolah terakreditasi jenjang SMP	54 sekolah							54 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah sekolah yang memenuhi SNP jenjang SD	82 sekolah							82 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah sekolah yang memenuhi SNP jenjang SMP	17 sekolah							17 sekolah		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase kondisi bangunan sekolah baik PAUD	82.5 %							82.5 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase kondisi bangunan sekolah baik SD	75 %							75 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase kondisi bangunan sekolah baik SMP	80 %							80 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase peningkatan kepemilikan Ijazah pendidikan Non Formal/Kesetaraan	40 %							40 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase peningkatan sarpras pendidikan non formal/kesetaraan	65 %							65 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SD	35 %							35 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase siswa dengan nilai karakter minimal baik jenjang SMP	80 %							80 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Persentase Siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum Jenjang SD	35 %							35 %		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Urusan	ı/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendar	ıaan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Kode	e		Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kegiat	tan/ Sub	Duoui	Kegiatan	Target 2020	ragu mumatii	LORUSI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		raiget	ragu munatn	Tonunggung ouwus
						Persentase Siswa dengan nilai										
						kompetensi literasi										DINAS PENDIDIKAN
						yang memenuhi	75 %							75 %		DAN KEBUDAYAAN
						kompetensi minimum										
						jenjang SMP										
						Persentase Siswa										
						dengan nilai										
						kompetensi numerasi	35 %							35 %		DINAS PENDIDIKAN
						yang memenuhi	33 70							33 70		DAN KEBUDAYAAN
						kompetensi minimum										
	-	_				jenjang SD										
						Persentase Siswa dengan nilai										
						kompetensi numerasi										DINAS PENDIDIKAN
						yang memenuhi	75 %							75 %		DAN KEBUDAYAAN
						kompetensi minimum										
						jenjang SMP										
						Rasio Sekolah terhadap										DINAS PENDIDIKAN
						jumlah usia siswa	01:23 rasio							01:23 rasio		DAN KEBUDAYAAN
_	-	_				sekolah PAUD										Dini iliboobiiiilii
						Rasio Sekolah terhadap jumlah usia siswa	1:142 rasio							1:142 rasio		DINAS PENDIDIKAN
						jumian usia siswa sekolah SD	1:142 18810							1:142 18810		DAN KEBUDAYAAN
+	++	\dashv	_			Rasio Sekolah terhadap										
						jumlah usia siswa	1:200 rasio							1:200 rasio		DINAS PENDIDIKAN
						sekolah SMP										DAN KEBUDAYAAN
			Pengelolaa	ın												DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	2	Pendidikar	n Sekolah				4,122,385,000							53,059,250,000	DAN KEBUDAYAAN
	₩	_	Dasar													
			. Pembangu	man Timit		Jumlah Sekolah Baru				Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	 Peningkatan Kualitas Pendidikan, 				DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	2	1 Sekolah Ba			yang Telah Dibangun	1 Unit	0		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	0	1 Unit	0	DAN KEBUDAYAAN
			ockolali De	ara (COD)		yang relah Dibangun				Dana Mokasi Cinum	Berdaya Saing	Olahraga				DIN KEDODITIEN
	Ħ										Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan				
, ,	0 0	,	Penambah	an Ruang		Jumlah Ruang Kelas	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-	Daya Manusia Yang	Kualitas Pendidikan,	0	1 Ruang	900,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 1		^ ا	Kelas Baru	1		Baru yang Bertambah	1 Kuang	0		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	0	1 Kuang	900,000,000	DAN KEBUDAYAAN
	44										Berdaya Saing	Olahraga				
			Pembangu	nan Ruang		Jumlah Ruang Guru/Kepala				Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	 Peningkatan Kualitas Pendidikan, 				DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	2	3 Guru/Keps			Sekolah/TU yang Telah	0 Ruang	0		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	0	0 Ruang	380,000,000	DAN KEBUDAYAAN
			Sekolah/T	U		Dibangun				Dana Mokasi Omum	Berdaya Saing	Olahraga				DAIN KEDODITIVIN
						Jumlah Ruang										
						Guru/Kepala	1 Ruang							1 Ruang		DINAS PENDIDIKAN
						Sekolah/TU yang Telah	1 11444115							1 11441115		DAN KEBUDAYAAN
	-	_				Dibangun						4.70 . 1				
				nan Ruang		Jumlah Ruang Unit				Dana Transfer Umum-	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	 Peningkatan Kualitas Pendidikan, 				DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	2	4 Unit Keseh	natan		Kesehatan Sekolah	4 Ruang	0		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	0	4 Ruang	310,000,000	DAN KEBUDAYAAN
			Sekolah			yang Telah Dibangun				Dana Mondor Omam	Berdaya Saing	Olahraga				Din RDD ODITION
	Ħ										Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan				
1 1	2 2	,	5 Pembangu			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah	2 Ruang	0		Dana Transfer Umum-	Daya Manusia Yang	Kualitas Pendidikan,	0	2 Ruang	390,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	2	Perpustaka	aan Sekolah		Dibangun	2 Ruang	U		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	0	2 Ruang	390,000,000	DAN KEBUDAYAAN
						Ü					Berdaya Saing	Olahraga				
			Pembangu	nan Sarana,		Jumlah Sarana,					Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan				
1 1	2 2	2	6 Prasarana	dan Utilitas		Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	3 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Daya Manusia Yang Berkualitas Dan	Kualitas Pendidikan, Pemuda dan	0	3 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Sekolah			Dibangun				Dana Alokasi Umum	Berkuantas Dan Berdaya Saing	Olahraga				DAN KEBUDAYAAN
_	tt	-	Pembangu	nan Rumah		Jumlah Rumah Dinas					Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan	-		-	
. [.	ا ا	,	Dinas Kepa			Kepala Sekolah, Guru,	1.77			Dana Transfer Umum-	Daya Manusia Yang	Kualitas Pendidikan,	0	1.77.14	175 000 000	DINAS PENDIDIKAN
1 1	2 2	4	Sekolah/G	uru/Penjaga		Penjaga Sekolah yang	1 Unit	0		Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan	Pemuda dan	U	1 Unit	175,000,000	DAN KEBUDAYAAN
_ _	Ш		Sekolah			Telah Dibangun					Berdaya Saing	Olahraga				
			Rehabilitas	si		Jumlah Ruang Kelas				L	Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan	1			
1 1	2 2	2	8 Sedang/Be			yang Direhabilitasi	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-	Daya Manusia Yang	Kualitas Pendidikan,	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN
			Kelas	_		Sedang/Berat	_			Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemuda dan Olahraga	1	=		DAN KEBUDAYAAN
+	+	\dashv	+ .			Jumlah Ruang									+	
			Rehabilitas			Guru/Kepala				n m	Meningkatkan Sumber	4. Peningkatan	1			D. D. L. G. DE
- 1	2 2	2		erat Ruang		Sekolah/TU yang Telah	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum-	Daya Manusia Yang	Kualitas Pendidikan,	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1		1	Guru/Kepa			Direhabilitasi				Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemuda dan Olahraga	1			DAN KEBUDAYAAN
1 1			Sekolah/T	TT		Sedang/Berat										

				Urusan/ Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendan				Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Ko	de		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daeran Penanggung Jawab
1 1	. 2	2	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	130,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	14	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 Paket	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	15	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3600 Unit	905,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3600 Unit	1,110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2		Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	205 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	205 Unit	615,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	205 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	205 Unit	1,025,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	20	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Unit	40,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	272 Peserta Didik	111,800,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	272 Peserta Didik	178,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	4,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	58 Paket							58 Paket		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	211 Satuan Pendidikan	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	211 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendar	ıaan			Prakiraan Maju Renc	ana Tahun 2024	
	Kod	e		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 1	2 2	2		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non	8 Peserta Didik	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	8 Peserta Didik	936,250,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Akademik Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2230 Orang	2,605,585,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2230 Orang	3,500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	2,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 orang							60 orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 :	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	209 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	209 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	211 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	211 Satuan Pendidikan	33,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	203 Orang							203 Orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	10 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Ruang	760,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	22	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	33	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	15 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 Unit	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				2,513,463,000				·			27,610,900,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	2	Penambahan Ruang Kelas Baru		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kin	erja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Kod	de		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 1	2	2	3	Kegiatan/ Sub Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kegiatan Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	760,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang							1 Ruang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	3 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Ruang	720,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	6	Pembangunan Laboratorium		Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	380,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	8	Pembangunan Asrama Sekolah		Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	450,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	10	Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	11	Pembangunan Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	6 Unit	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah		Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah		Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	_	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula		Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				Urusan/ Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendan				Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Kod	le		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Daerah	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 1	2	2	20	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama		Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir		Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	23	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah		Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	6 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	6 Paket	432,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	48 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	48 Paket	144,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	48 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	48 Paket	144,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2000 Paket	563,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2000 Paket	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	29	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan		Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	48 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	48 Unit	240,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	48 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	48 Unit	480,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	31	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah		Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	12 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	52,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	100 Peserta Didik	262,500,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2		Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	7 Buku	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	7 Buku	650,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	350 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	350 Paket	160,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	17 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	17 Paket	765,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Urusan/ Bidang	Total Balancas	Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendar	ıaan			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	December Decemb
	Kod	e	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 1	2 2	2 3	Penyelenggaraan		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1200 Peserta Didik	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1200 Peserta Didik	1,650,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satua Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	15 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	15 Satuan Pendidikan	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 3	Pembinaan Minat, 38 Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	120 Peserta Didik	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	120 Peserta Didik	420,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125 Orang	1,472,563,000				4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	125 Orang	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	528 Orang							528 Orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	54 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Satuan Pendidikan	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 4	Pengelolaan Dana BO Sekolah Menengah Pertama	S	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	54 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Satuan Pendidikan	10,573,400,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 4	Peningkatan Kapasita Pengelolaan Dana BO: Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	54 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	54 Orang	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2 4	Pemeliharaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				5,099,160,600							24,212,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	16 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		16 Unit	3,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	Pembangunan Sarana 2 Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		17 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/	1		Canaian Vina	ja dan Kerangka Pendar				Prakiraan Maju Reno	one Tehun 2024	
	Ko	de		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	m	D V. 415-416			Prior	ritas	Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah
				Kegiatan/Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	_	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 1	. 2	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	7	Pengadaan Mebel PAUD		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	21 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD		Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	28 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		28 Paket	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2	2	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	32 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1163 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1163 Paket	117,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		20 Peserta Didik	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	32 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	306 Peserta Didik							306 Peserta Didik		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD		Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	3 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		3 Satuan Pendidikan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1340 Orang	5,009,160,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1340 Orang	5,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	. 2	2	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Pemingkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Orang	875,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Penda	naan			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	
	Kode		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kegiatan/ Sub		Kegiatan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	100 Orang		253.00	Summer Sum	Nasional	Daerah		100 Orang	- ugu mumum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Kualifikasi Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Satuan Pendidikan	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	364 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		364 Satuan Pendidikan	7,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				968,500,000							6,819,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	11 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	11 Unit	2,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	500,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Unit	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Paket	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket							5 Paket		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan		Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	5 Paket	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 1	2 2	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	325 Paket	100,500,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	325 Paket	419,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

			Urusan/ Bi		Jenis Pelayanan	Indikator Program/			Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendar				Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Kod	le	Urusan/ Pro Kegiatan/		Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	2	Penyediaan Bia 10 Personil Pesert Nonformal/Kes	a Didik		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	100 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2	Pengadaan Ala dan Peraga Sis Nonformal / Kesetaraan			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	4 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	4 Paket	45,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2	Penyelenggaraa 12 Proses Belajar Nonformal/Kes			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	683,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Peserta Didik	1,100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	600 Peserta Didik							600 Peserta Didik		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2 :	2	Penyiapan dan Lanjut Evaluas 13 Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kes	si Satuan		Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	12 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 Satuan Pendidikan	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2	Penyediaan Per dan Tenaga 14 Kependidikan I Satuan Pendid Nonformal/Kes	bagi ikan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145 Orang	95,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	145 Orang	60,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2 :	2	Pengembangan Pendidik dan T 15 Kependidikan _I Satuan Pendid Nonformal/Kes	Penaga pada ikan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	0 Orang	300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidkan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang							70 Orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2	Pembinaan Kelembagaan d Manajemen Se Nonformal/Kes	kolah		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	10 Satuan Pendidikan	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2	Pengelolaan Da 17 Sekolah Nonformal/Kes			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	12 Satuan Pendidikan	1,300,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	2	2 2	Rehabilitasi 20 Sedang/Berat Laboratorium			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	2 Ruang	150,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H	+	+	URUSAN					12,703,508,600		+	+	+	+		111,701,450,000	
1			PEMERINTAHA WAJIB YANG BERKAITAN DI PELAYANAN D	ENGAN												DINAS KESEHATAN
1 2			URUSAN PEMERINTAHA BIDANG KESE													DINAS KESEHATAN
\Box	\prod	4			SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil											DINAS KESEHATAN
					SPM Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin											DINAS KESEHATAN

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Consist Vine	erja dan Kerangka Pendan	000			Prakiraan Maju Ren	cone Tohun 2024	
F	Code		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan	Kegiatan/ Sub					aan Prio	ritas	Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah
			Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
				SPM Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir											DINAS KESEHATAN
				SPM Pelayanan Kesehatan Balita											DINAS KESEHATAN
				SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia											DINAS KESEHATAN
				Pendidikan Dasar SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia											DINAS KESEHATAN
				Lanjut SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia											DINAS KESEHATAN
	+			Produktif SPM Pelayanan Kesehatan Penderita											DINAS KESEHATAN
				Hipertensi SPM Pelayanan											DINAS KESEHATAN
				Kesehatan Penderita Diabetes Melitus SPM Pelayanan											DINAS KESEHATAN
				Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	ι										DINAS KESEHATAN
				SPM Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB											DINAS KESEHATAN
				SPM Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko HIV											DINAS KESEHATAN
1 2 2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	15,378,475,659						100 %	16,073,269,931	DINAS KESEHATAN
					Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 persen							100 persen		DINAS KESEHATAN
1 2 2	2 2		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100 %	1,800,780,659						100 %	2,986,900,424	DINAS KESEHATAN
1 2 2	2 2	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	5 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	5 Unit	353,944,128	DINAS KESEHATAN
1 2 2	2 2	6	Pengembangan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dikembangkan	1 unit	350,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	1 unit	761,025,153	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1 Unit		DINAS KESEHATAN
1 2 2	2 2	7	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnay yang dikembangkan	2 unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	2 unit	131,751,325	DINAS KESEHATAN
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2 Unit			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				2 Unit		DINAS KESEHATAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kin	erja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Kod	le		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Priori Nasional	tas Daerah	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 2	2 2	2	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	watchar	Davian	Sarana Kesehatan	1 Unit	0	DINAS KESEHATAN
						Ruman Sakt				Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	3 Unit	0	DINAS KESEHATAN
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	5 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN
										Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	320,780,659		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	15 Unit	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	15 Unit	131,751,325	DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	100 Unit	815,956,381	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	16	Pengadaan Obat, Vaksin		Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	5 Paket	566,239,917	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2		Pengadaan Bahan Habis Pakai		Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	4 Paket	0		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	4 Paket	226,232,195	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	4 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	4 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2 2	2	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	15 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	15 Unit	0	DINAS KESEHATAN
						Persentase Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	100 %			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100 %		DINAS KESEHATAN

				Urusan/ Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Program/			Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendana	aan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Kod	le		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 2	2	2	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kegiatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	280,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah	Sarana Kesehatan	100 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN
						Persentase Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	100 %			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				100 %		DINAS KESEHATAN
1 2	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	13,111,695,000						100 %	8,581,960,164	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5679 Orang	34,298,136	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5421 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4957 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25371 Orang	126,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	25371 Orang	513,371,966	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41694 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	41694 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	165362 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21225 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	21225 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44152 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	44152 Orang	0	DINAS KESEHATAN

				Ilmana / Bidon a		I v. 411	ı		Complex Wines	-!- 4 W				Destine Main Des	m-1 0004	
	Kod	de		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub		l		rja dan Kerangka Pendan	an Prior	itas	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Ren		Perangkat Daerah
				Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 2	2	2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	450 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	530 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	530 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2855 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2855 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3558 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3558 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	732,355,367	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	1,604,347,362	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	52 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	59,535,561	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	11,461,456	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	39,384,909	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	12 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	3,876,592	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	45,275,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	17,054,039	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	4584 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4584 Orang	0	DINAS KESEHATAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kine	rja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024	
	Kod	ie		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
-	11	_	_	Kegiatan/ Sub		Kegiatan Jumlah Penyalahguna		g			Nasional	Daerah				
1 2	2	2	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	24 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	93,336,036	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	14 Dokumen	323,607,515	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	7,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	3,813,897,658	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	200 Orang	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	7 Dokumen	78,922,637	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	825,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36 Dokumen	1,036,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	36 Dokumen	611,947,724	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	550,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	225,689,713	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit	70,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	14 Unit	318,893,972	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	8,057,895	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	50,744,806	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Presentase Sarana pelayanan kesehatan yang yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %	326,000,000						100 %	264,933,096	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 Dokumen	148,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	12 Dokumen	150,825,042	DINAS KESEHATAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Carsian Visco	ja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Ren	icana Tahun 2024	
	Kod	de		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan	Kegiatan/ Sub					Prio:	ritas	Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah
				Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1 2	2	2	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	73,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	12 Dokumen	69,095,413	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	5 Unit	105,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	5 Unit	45,012,641	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standar	100 %	140,000,000						100 %	4,239,476,247	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	2 Unit	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	2 Unit	0	DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	0 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	0 Unit	4,239,476,247	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	14 Unit							14 Unit		DINAS KESEHATAN
1 2	2	2	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Sarana Kesehatan	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
4	НĪ	<u> </u>	_	LIDLIGAN		ļ		15,378,475,659				ļ			16,073,269,931	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					SPM Penyedian Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan layanan air minum	90 %	705,225,000						90 %	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kiner	ja dan Kerangka Pendan	ıaan			Prakiraan Maju Reno	rana Tahun 2024	
	Kod	le	Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 3	3	2	Regiatan/ Sub Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Kegiatan		705,225,000			Nasional	Daerah			0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	3	2 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	205,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		3 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	3	2 4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan		Jumlah jaringan air minum yang terbangun dan jumlah sambungan rumah (SR) terpasang	45000 Meter	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		45000 Meter	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1800 SR	705,225,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1800 SR	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik										3	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Cakupan sanitasi yang layak	90 %	405,225,000						90 %	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	5	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				405,225,000							0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	5	2 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi layak	2 Dokumen	205,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 3	5	2 1	Pembangunan/Penyedi aan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman		Jumlah sarana prasarana yang dibangun	80 Paket		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		80 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
\dashv	+	_	URUSAN				405,225,000	1						0	DINIAG DEDUMATA
1 4			PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
				SPM Fasilitasi Penyedian Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Jumlah data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	5 data	165,000,000						5 data	165,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kiner	ja dan Kerangka Pendan	ıaan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Kode		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 4	2 2		Kegiatan/ Sub Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Kegiatan jumlah data penerima rumah korban bencana alam	5 data	5,000,000			Nasional	Daerah		5 data	5,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2 2	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah data penerima rumah korban bencana alam	5 data	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	5 data	5,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	5 Dokumen							5 Dokumen		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2 2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Korban bencana yang direhabilitasi	9 unit	150,000,000						9 unit	150,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2 2	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	9 Unit Rumah	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	9 Unit Rumah	150,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi	9 unit							9 unit		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2 2		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah yang diserahkan pada korban bencana	14 unit	10,000,000						14 unit	10,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1 4	2 2	1	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	14 Laporan	10,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	14 Laporan	10,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah yang diserahkan pada korban bencana	14 unit							14 unit		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				165,000,000							165,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
				SPM Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum											DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

			Urusan/ Bidang	Yearla Balancana	Indikator Program/			Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	December Decemb
	Kod	e	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 5	2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Regiatan		1,529,667,000			Nasionai	Daeran			5,025,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1,454,667,000							4,400,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		Jumlah Kasus Gangguan Ketertieraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50 Kasus	1,364,278,000						50 Kasus	3,000,000,000	DINAS POLISI PAMONO PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 1	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 perdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	10 Kasus	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Kasus	300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan 3 Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	63 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				63 Dokumen	75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Pemberdayaan Perlindungan 4 Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63 Dokumen	90,389,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				63 Dokumen	250,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25 Orang	425,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	150,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 7 dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	50 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Unit	0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kiner	ja dan Kerangka Pendan	297			Prakiraan Maju Ren	rana Tahun 2024	
	Kod	le		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi		Prior		Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	renanggung Jawab
1 5	2 2	2	8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	0	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	25 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25 Laporan	200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				75,000,000							525,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 1	2	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	15 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				15 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				75 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	50 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	175,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2	2		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				0							100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	2 2	2	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				2 Laporan	100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
\vdash	\dashv		_		SPM Pelayanan			1,529,667,000							5,025,000,000	DINAS POLISI
					Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran											PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1,963,048,000							4,475,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kineri	a dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Ko	ode		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Ī			Kegiatan/ Sub Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,		Kegiatan	Tanget 2020	I ugu mumum	20200	James 2 James 1	Nasional	Daerah		Tuiget	rugu mumutn	DINAS POLISI
1 5	4	2		Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,963,048,000							3,550,000,000	PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggul angan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	25 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25 Dokumen	2,600,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	365 Laporan	1,913,048,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				365 Laporan	300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakua si Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	50 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Dokumen	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	6 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				6 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Unit	200,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	5 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Orang	150,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kines	rja dan Kerangka Pendana	an			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024	
	Kod	de		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan/ Sub	Dasai	Kegiatan	Target 2023	ragu indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatii	renanggung dawab
1 5	4	2	9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dan Non	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	125,000,000	PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				0							100,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	35 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	35 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				35 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Investigasi Kejadian Kebakaran				0							75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	25 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				25 Dokumen	75,000,000	PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0							300,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				1000 Orang	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	10 Desa/Kelur ahan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Desa/Kelurahan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	4	2		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	5 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	50,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kiner	a dan Kerangka Pendana	ıan			Prakiraan Maju Rer	icana Tahun 2024	
	Ko	ode		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 5	5 4	2		Kegiatan/ Sub Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		Kegiatan	Target 2020	0	20200	Sumst Pana	Nasional	Daerah		- August	450,000,000	DINAS POLISI
1 5	5 4	2	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	50 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				50 Laporan	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	5 4	2	2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi		Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi yang Sesuai Standar	5 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				5 Dokumen	75,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	5 4	2	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	20 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				20 Unit	125,000,000	DINAS POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 5	5 4	2	4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamata n dan Evakuasi yang Sah dan Legal	10 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				10 Laporan	125,000,000	PEMADAM KEBAKARAN
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1,963,048,000							4,475,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana											BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kiner	ja dan Kerangka Penda	naan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Ko	de		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatii	renanggung Jawab
1 5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Jumlah Nagari/Destana Minimal Destana Madya	10 %	833,000,000						10 %	3,280,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase jumlah warga negara yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8 %							8 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Persentase pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi	90 %							90 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Pesentase jumlah warga negara yang menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	55 %							55 %		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		jumlah warga negara yang mendapat layanan infromasi rawan bencana	32000 Orang	15,000,000						32000 Orang	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat	10 Orang	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	10 Orang	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang mendapat layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200 Orang	308,000,000						200 Orang	1,435,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	400,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	30 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	253,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	310,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	250,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kine	erja dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Reno	rana Tahun 2024	
	Koo	le		Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran		Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	-			Kegiatan/ Sub	Duoui	Kegiatan	Target 2023	ragu munkatn	LUKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	ragu inuikatii	I changgang dawab
1 5	3	2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	2 Kawasan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Kawasan	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	30 Orang	75,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2 Orang	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	2 Orang	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		jumlah warga negara yang mendapat layanan infromasi rawan bencana	200 Orang	342,500,000						200 Orang	680,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Dietapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cenat	0 Dokumen	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Dokumen							4 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	297,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Orang	350,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 Orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Orang	80,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Orang							100 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	4 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	4 Laporan	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	3	2	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Canaian Kineria	a dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Reno	ana Tahun 2024	
	Ko	de	Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatii	Lokası	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatii	renanggung Jawab
1 5	5 3	2	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana	25 %	167,500,000						25 %	915,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	150,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Penguatan 2 Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Dokumen	100,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Pengelolaan dan 4 Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	12 Dokumen	17,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	12 Dokumen	15,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	0 Dokumen							0 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Pembinaan dan Pengawasan 5 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	0 Laporan	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	0 Laporan	50,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5	5 3	2	Penanganan 6 Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana JJTU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Rescana (R3P)	3 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	3 Dokumen	500,000,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0 Dokumen							0 Dokumen		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
H		П	URUSAN				833,000,000	<u> </u>						3,280,000,000	
1			ORUSAIN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti											DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kiner	a dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024	
	Kod	е	Urusan/ Program/	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Kegiatan/ Sub	SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	Kegiatan					Nasional	Daerah				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Anak dan Lanjut Usia Terlantar diluar Panti											DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
				SPM Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti											DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				292,978,572							522,160,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				199,978,572							331,760,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 1	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		330 Orang	81,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 2	Penyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		70 Orang	75,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 3	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		270 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

			Urusan/ Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Program/			Capaian Kine	erja dan Kerangka Pendana	ıan			Prakiraan Maju Reno	cana Tahun 2024	Perangkat Daerah
	Kode	е	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daeran Penanggung Jawab
1 6	4 2	5 6	Pemberian Lavanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	322 Orang	46,978,572			Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		322 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 1	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 1	Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 Orang	34,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Buka: Korban HIV/AIDS dar NAPZA di Luar Panti Sosial				93,000,000							190,400,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 5	5 Penyediaan Alat Bantı		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	22,000,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		16 Orang	42,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 7	Pemberian Bimbingan 7 Fisik, Mental, Spiritua dan Sosial		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		70 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	8 2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarg Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Buka Korban HIV/AIDS dar NAPZA	n	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	23,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		30 Orang	75,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2 1	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	40,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
H	H	Ŧ					292,978,572							522,160,000	
				SPM Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	ı										DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

				Urusan/ Bidang		Indikator Program/			Capaian Kineri	a dan Kerangka Pendan	aan			Prakiraan Maju Ren	cana Tahun 2024	
	Kod	le	ı	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional		Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1 6	6		PE	ROGRAM ENANGANAN ENCANA		Regiatan	_	170,000,000			Nasionai	Daerah		-	453,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	Ko da:	rlindungan Sosial orban Bencana Alam in Sosial ubupaten/Kota				125,000,000							298,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	1 Per	nyediaan Makanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		50 Orang	125,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	2 Per	nyediaan Sandang		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		50 Orang	83,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	3 Per	nyediaan Tempat nampungan ngungsi		Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Unit	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2		nanganan Khusus gi Kelompok Rentan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2		layanan Dukungan ikososial		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	Per Ma Ke	nyelenggaraan mberdayaan asyarakat Terhadap siapsiagaan Bencana abupaten/Kota				45,000,000							155,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	1 da: Ka	oordinasi, Sosialisasi n Pelaksanaan umpung Siaga uncana		Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Kampung	115,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampung							0 Kampung		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	6	2	2 da	oordinasi, Sosialisasi n Pelaksanaan runa Siaga Bencana		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	тот	AL						170,000,000 34,146,127,831							453,000,000 141,694,879,931	

LAMPIRAN II



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH SESUAI PENERAPAN STUNTING KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023

LAMPIRAN II

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Sesuai Penerapan Stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	F	Kode		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan		ruiget	raga manaam	Donusi	Sumber Buna	Nasional	Daerah		Target	r ugu mumum	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											DINAS KESEHATAN
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	13,111,695,000						100 %	8,581,960,164	DINAS KESEHATAN
					Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %							100 %		DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabunaten/Kota	100 %	13,111,695,000						100 %	8,581,960,164	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5679 Orang	34,298,136	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5421 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan 3 Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4957 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25371 Orang	126,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	25371 Orang	513,371,966	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan 5 Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	41694 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	41694 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan 6 Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165362 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	165362 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Pengelolaan Pelayanan 7 Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	21225 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	21225 Orang	0	DINAS KESEHATAN

				Ur	usan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	n Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	I	Kode		Ur Ke	rusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	2 2	2	8 Ke		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44152 Orang	80,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	Daerah	Masyarakat	44152 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	9 Ke		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	450 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	450 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	10 Ke	esehatan Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	530 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	530 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	11 Ke	sehatan Orang rduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2855 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2855 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	12 Ke	ngan Kisiko rinfeksi UIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3558 Orang	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	3558 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	13 Per Ko	sehatan bagi nduduk pada ondisi Kejadian Luar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai	12 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	732,355,367	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	Ke Per 14 Kri Ak da	nduduk Terdampak risis Kesehatan ribat Bencana rn/atau Berpotensi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	12 Dokumen	500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	1,604,347,362	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2	15 Ke	ngelolaan Pelayanan esehatan Gizi asyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masvarakat	52 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	59,535,561	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	16 Ke	ngelolaan Pelayanan esehatan Kerja dan ahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Keria dan Olahraga	24 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	11,461,456	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2	17 Per Ke	ngelolaan Pelayanan sehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	2 2	2		ngelolaan Pelayanan omosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	39,384,909	DINAS KESEHATAN

				Urusan/ B	dana				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	an Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	K	Code		Urusan/ P Kegiatan/	rogram/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		D . 7 .11 .116			P	rioritas	Kelompok Sasaran		D . 7 111 416	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan		Regiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2 2	2 2	2		in		12 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	3,876,592	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	20 Pengelolaa Kesehatan	n Surveilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 Dokumen	45,275,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	17,054,039	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Pengelolaa Kesehatan 21 dengan Ma Kesehatan (ODMK)	salah	n Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesebatan	4584 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4584 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Pengelolaa Kesehatan NAPZA	n Pelayanar Jiwa dan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	23 Pengelolaa Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	24 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	93,336,036	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Pelayanan 25 Penyakit M Tidak Men	enular dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	14 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	14 Dokumen	323,607,515	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	26 Pengelolaa Kesehatan	n Jaminan Masyaraka	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	12 Dokumen	7,500,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	3,813,897,658	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Deteksi Di Penyalahg NAPZA di I dan Sekola	ınaan asyankes	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sakalah	200 Orang	14,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	200 Orang	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Pengambila Pengiriman 28 Penyakit P ke Laborat Rujukan/N	Spesimen otensial KLI orium	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	12 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Paket	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	29 Penyelengg Kabupaten	araan /Kota Seha	Jumlah Dokumen	7 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	7 Dokumen	78,922,637	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	32 Operasiona Rumah Sa	l Pelayanar cit	I1-1- D-1	1 Dokumen	825,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	33 Operasiona Puskesmas	l Pelayanar	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	36 Dokumen	1,036,100,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	36 Dokumen	611,947,724	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Operasiona 34 Fasilitas K Lainnya	l Pelayanar sehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	24 Dokumen	550,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	24 Dokumen	225,689,713	DINAS KESEHATAN
1	2 2	2 2	2	Pelaksanaa 35 Fasilitas K Kabupaten		si Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	14 Unit	70,320,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	14 Unit	318,893,972	DINAS KESEHATAN

					Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	н	Kode	е		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pi	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kegiatan	_		8			Nasional	Daerah				
1	2	2	2	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 Laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Laporan	8,057,895	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	52 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	52 Dokumen	50,744,806	DINAS KESEHATAN
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase nagari siaga aktif	100 %	600,000,000						100 %	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabunaten/Kota	Jumlah nagari yang diakvokasi pembentukan nagari siaga aktif	4 Nagari	200,000,000						4 Nagari	300,000,000	DPMN
						Persentase nagari yang diadvokasi pembentukan nagari siaga aktif	100 %							100 %		DPMN
1	2	5	2		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nagari	12 Dokumen	300,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	200,000,000						100 %	0	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	26 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	26 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1	2	5	2		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	100 %	200,000,000						100 %	0	DINAS KESEHATAN
						Persentase pelaksanaan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	100 %							100 %		DINAS KESEHATAN

				Urns	san/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	n Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
		Kod	е	Urus Kegi	san/ Program/ iatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegi	iatan		Imget	rugu mumum	Donusi	Sumber Bunu	Nasional	Daerah		ranget	r aga mamatir	
1	2	5	2	Supe Peng 1 Pelal Kese Daya	RM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen	200,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
1				PEM WAJ BER PEL	SAN ERINTAHAN IB YANG KAITAN DENGAN AYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
1	2			PEM BIDA	SAN ERINTAHAN ANG KESEHATAN											DINAS KESEHATAN
2				PEM WAJ BER	SAN ERINTAHAN IB YANG TIDAK KAITAN DENGAN AYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
2	14			URU PEM BIDA PENO PENO KELO	SAN ERINTAHAN											DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3		PEM KEL	GRAM BINAAN UARGA ENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	76,63 %	357,420,000						76,63 %	910,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	11,52 %							11,52 %		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,75 %							20,75 %		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Kom dan Peng Pend	luduk dan KB ıai Kearifan	Jumlah Masyrakat yang mendapatkan KIE Program Bangga Kencana	6200 Orang	153,508,500						6200 Orang	213,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	KKB	okasi Program PK kepada eholders dan Mitra a	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders	3 Organisasi	898,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Organisasi	9,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kode	;	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	F	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Regiatan						Nasional	Daerah		_	_	
2	14	3	2	Komunikasi, Inform dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Ses Kearifan Budaya Lo	Kencana uai (Pembangunan	3 Dokumen	11,518,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Dokumen	16,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Penyediaan dan 3 Distribusi Sarana K Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga E Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	9,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Mass Cetak dan Elektroni serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	3,850,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Med Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lo dalam Pencitraan Program KKRPK	digunakan sesuai kal kearifan lokal dalam pencitraan program	0 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Paket	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Prograt KKBPK Melahui Rap 6 Koordinasi Kecamat (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mir Lokakarya (Minilok)	At Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat	8 Laporan	25,898,700		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	24,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	Pengelolaan 7 Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	8 Laporan	109,045,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	85,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kode		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	F	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan	Negmun	Target	Pagu indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatii	
2	14	3	2	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	8 Laporan	2,297,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	8 Laporan	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 :	2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pencapaian Kinerja PKB/PLKB	86 %	19,123,200						86 %	188,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 :	2	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lin Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga i Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh	0 Organisasi	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	55,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 1	2	Penyediaan Sarana 2 Pendukung Operasional PKB/PLKI	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Unit	40,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 3	2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan 3 Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	23,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 :	2	Penggerakan Kader 4 Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	220 Orang	19,123,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	220 Orang	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 :	2	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Ketersediaan dan	100 %	125,327,700						100 %	352,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 :	2	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Lajaringan	13 Laporan	44,755,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	13 Laporan	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	rja dan Kerangka Pendanas	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	F	Kode		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14	3 2	2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik 2 Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	18,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Peningkatan Kesertaa Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	n Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	900 Orang	68,297,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	900 Orang	75,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Penyediaan Dukungar 4 Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Insurabala I amanana	0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan	0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Penyediaan Sarana 6 Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	12 Unit	2,900,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Unit	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Pembinaan Pasca 7 Pelayanan bagi Peserti KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 8 Reproduksi di Fasilita Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan	12 Laporan	9,375,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	12 Laporan	4,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Promosi dan Konselin Kesehatan Reproduks serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilita Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	i, dan Konseling Kesehatan Reproduksi,	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Peningkatan Kompetensi Tenaga 10 Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduks	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga i Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3 2	2	Dukungan Operasiona Pelayanan KB Bergera		0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	5,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

					Urusan/ Bidang				Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendanas	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kod	е		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas .	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kegiatan						Nasional	Daerah				
2	14	3	2	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Kemuran	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	8,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	Persentase Tingkat Partisipasi Ormas dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	100 %	59,460,600						100 %	157,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	3 Organisasi	18,021,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	3 Organisasi	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	26 Kampung	41,439,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	26 Kampung	70,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	3	2	4	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	15,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja, Ibu Hamil, Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	36,52 %	223,385,000						36,52 %	727,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE	34 %	173,385,000						34 %	552,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				τ	Jrusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	an Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	I	Kode	:	U	Jrusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I	Kegiatan		Target	ragu munam	LUKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	ragu iliulkatii	
2	14	4 :	2	1 6 () 1 6 () 1 F	Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja BKR), Pusat Informasi Ian Konseling Remaja PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	371 Kelompok	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	371 Kelompok	45,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	2 H	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarra //IIPPKS)	20 Unit	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	20 Unit	11,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4 .	2	3 H H H H	Orientasi dan Pelatihan Peknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	81,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4 :	2	4 H	Orientasi/Pelatihan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	35,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	5 H	Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan	Mehosa (HDDKC) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	303 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	303 Orang	10,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	к	ode		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	14 4	1 2	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	23 Kelompok	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	23 Kelompok	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 4	1 2	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 4	1 2	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan	26 Laporan	93,385,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	26 Laporan	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 4	1 2	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan	0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1 2	10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Dokumen	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 4	1 2	11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	50,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14 4	1 2	12	Sosialisasi IPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	1 2	13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	I	Kode	В	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan		Tanget	raga manatir	DORUSI	Sumser Bana	Nasional	Daerah		ruiget	I agu Indikatii	
2	14	4	2	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangun Keluarga Melalui Pembinaan Ketaha dan Kesejahteraan	Kesejahteraan	34 %	50,000,000						34 %	175,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	Penguatan Kebijak Daerah dalam rang Pemberdayaan dan Peningkatan Perasan Serta Organisasi Kemasyarakatan d Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Kehahteraan Kehanga (BKB, BK BKL, PPPKS, PIK-R Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	yang Mengangkan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketabanan dan	0 Organisasi	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	Pendayagunaan Mi Kerja dan Organise Kemasyarakatan dalam Penggerakar Operasional Pembinaan Prograi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BK BKL, PPPKS, PIK- Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Si Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	0 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Laporan	25,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	Pelaksanaan Peningkatan Kapas Mitra dan Organise Kemasyarakatan dalam Pengelolaan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BK BKL, PPPKS, PIK-R Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan	0 Organisasi	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Organisasi	30,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	14	4	2	Promosi dan Sosial Program Ketahana: 4 dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Promosi dan Sosialisas Program Ketahanan	i 1 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	120,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

					Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kod	ie		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	82,50 %	268,502,600						82,50 %	672,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan	2 kali	95,300,400						2 kali	152,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	13,980,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	20,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	32,420,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	10,959,900	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	27,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 Unit	37,940,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Unit	60,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi sejmhang	5 kelompok	173,202,200						5 kelompok	520,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	3	2	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	21,842,300	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	Ko	de		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					P	rioritas	Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan	Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2 9	3	2	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	1 laporan	120,200,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 laporan	430,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	3	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	31,159,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	13 %	90,856,700						13 %	110,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9) 4	2		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah dokumen kerentanan dan ketahanan pangan	3 jenis	15,506,600						3 jenis	0	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9	9 4	2	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen	15,506,600	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	0	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2) 4	2		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peta kerentanan dan ketahan pangan	1 peta	75,350,100						1 peta	110,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen							1 dokumen		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 4	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	75,350,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9 4	2	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	45,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	85 %	57,435,100						85 %	129,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2 9	5	2		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Keamanan bangan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 komoditi	57,435,100						5 komoditi	129,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	5	2	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	20,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

					Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	n Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kode	•		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kegiatan	G		ı ugu mumum	2011101	Juliou Juliu	Nasional	Daerah		- mgot	1 ugu 11141111111	
						KelembagaanKeamana n Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 Dokumen							0 Dokumen		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	5	2	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Sertifikat	7,357,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Sertifikat	25,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	5	2	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	6,230,200	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	17,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	5	2	4	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	32,847,800	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	50,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen							0 Dokumen		DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	9	5	2	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	0	1 Dokumen	17,500,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang Aktif	30 %	729,154,000						30 %	1,586,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
						Tingkat Penurunan Sengketa Adat	13 %							13 %		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendanaa	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	1	Kode	•	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	5	2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serte Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyaraka Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalar Daerah	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	250 Lembaga	64,577,000			Nesional	Davida		250 Lembaga	1,586,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Ada Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,	4 Dokumen	34,076,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Dokumen	201,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	Peningkatan Kapasita Kelembagaan Lembag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adi Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	A Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	4 Lembaga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Lembaga	325,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasaran Kelembagaan Lembag Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adı Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	a Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang at Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Dokumen	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknolog Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah	1 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	125,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

				Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	Ko	ode		Urusan/ Program/	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P Nasional	rioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13 5	2	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masvarakat	1 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan	62 Nagari/Desa	0	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	62 Nagari/De sa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	5 Dokumen	630,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	5 Dokumen	710,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	62 Keluarga	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	62 Keluarga	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	62 Keluarga	0	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	62 Keluarga	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											DINAS PEKERJAAN UMUM
1	3 3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum	90 %	705,225,000						90 %	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 3	2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			705,225,000							0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

				Urusan/ Bidang				Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	K	ode		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P	rioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan						Nasional	Daerah				
1	3 3	3 2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	3 Dokumen	205,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		3 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 3	3 2	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jaringan air minum yang terbangun dan jumlah sambungan rumah (SR) terpasang	45000 Meter	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		45000 Meter	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1800 SR			Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik				1800 SR		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 5	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi yang layak	90 %	405,225,000						90 %	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 5	5 2		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			405,225,000							0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 5	5 2	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi	2 Dokumen	205,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		2 Dokumen	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1	3 5	5 2	12		Jumlah sarana prasarana yang dibangun	80 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		80 Paket	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 6	5		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100 %	69,000,000						100 %	60,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8 6	5 2		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan	Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100 %	21,000,000						100 %	35,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

					Urusan/ Bidang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023			Prakiraan Ma	aju Rencana Tahun 2024	
		Kod	е		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	P Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	8	6	2	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi	10 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	10 Orang	21,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2	2	Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Non	1 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha	1 Dokumen	14,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabunaten/Kota	persentase kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %	48,000,000						100 %	25,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabunaten/Kota	40 Orang	23,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	40 Orang	12,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	8	6	2	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	0	1 Dokumen	13,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolah yang menerapkan teknologi Informasi SD	97 sekolah	5,099,160,600						97 sekolah	24,212,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			5,099,160,600							24,212,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	16 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdava Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		16 Unit	3,600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

					Urusan/ Bidang				Capaian Kine	rja dan Kerangka Pendan	aan Tahun 2023			Prakiraan M	aju Rencana Tahun 2024	
	F	Kode	В		Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Kegiatan						Nasional	Daerah				
1	1	2	2	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	17 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		17 Unit	1,000,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		6 Unit	1,360,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	90,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	25 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		25 Unit	110,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	21 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Paket	250,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	8	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	28 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		28 Paket	120,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	9	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	32 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	350,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1163 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1163 Paket	117,300,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20 Peserta Didik	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		20 Peserta Didik	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	32 Paket	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		32 Paket	800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2	2	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	0 Peserta Didik	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Peserta Didik	200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	306 Peserta Didik							306 Peserta Didik		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

				Urusan/ I	idang				Capaian Kiner	ja dan Kerangka Pendana	an Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
	F	Kode		Urusan/ F Kegiatan/		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	I	Prioritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan			Tunget	I ugu III uii	2011101		Nasional	Daerah		- maget	1 ugu 1111111111	
1	1	2 2	! 1	Penyiapan 14 Lanjut Eva PAUD	dan Tindak Iluasi Satuar	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	3 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		3 Satuan Pendidikan	50,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2 2	! 1	Penyediaa dan Tenag Kependidi Satuan PA	kan bagi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1340 Orang	5,009,160,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		1340 Orang	5,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2 2	? 1	Pengemba Pendidik d Kependidi Satuan Pe PAUD	kan pada	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	90,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		0 Orang	875,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/ Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan	100 Orang							100 Orang		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	1	2 2	! 1	Pembinaar Kelembaga Manajeme	ıan dan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		21 Satuan Pendidikan	210,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1			Pengelolaa PAUD	n Dana BOP	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	364 Satuan Pendidikan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		364 Satuan Pendidikan	7,900,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	T	OTAL						21,717,059,000		1		1		l	37,288,760,164	

LAMPIRAN III



PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2023

LAMPIRAN III

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sijunjung Tahun 2023

	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/	T 111 4 B 4 4 7 4 4 4			Capaian K	inerja dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraa	an Maju Rencana			
	Ko	ode		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio Nasional	ritas Daerah	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Hogratun		2020				Husionar	Buciun				
1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1 4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Dokumen yang diterbitkan	1 dokumen	75,000,000						1 dokume n	75,000,000	
1 4	3	2		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	20 unit	75,000,000						20 unit	75,000,000	
1 4	3	2	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah	75,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	0	20 Unit Rumah	75,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	20 unit							20 unit		
h					Jung unungum		75,000,000							75,000,000	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 27	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
3 27	7 6			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan usulan izin usaha pertanian	4 Persen	60,000,000						4 Persen	60,000,000	
3 27	7 6	2		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi teknis izin usaha pertanian yang diterbitkan	80 Persen	60,000,000						80 Persen	60,000,000	
3 27	7 6	2	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokume n	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani Peternak kelompok tani	2 Dokume n	10,000,000	DINAS PERTANIAN
3 27	7 6	2	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Petani Peternak kelompok tani	2 Laporan	50,000,000	DINAS PERTANIAN
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 25	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
3 25	5 6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	12400000 Rp/tahun	113,240,100						12400000 Rp/tahun	320,000,000	
3 25	5 6	2		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	1 rekomen dasi	22,230,100						1 rekomen dasi	40,000,000	
3 25	5 6	2	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokume n	22,230,100	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Dokume n	40,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Pen	ıdanaan			Prakiraa	n Maju Rencana	
	K	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	0 Dokume				Nasional	Daerah		0 Dokume n		33. 3
3 2	5 6	2		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil	1 rekomen dasi	25,375,000						1 rekomen dasi	50,000,000	
3 2	5 6	2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	25,375,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Unit Usaha	50,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3 2	5 6	2		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan	1 paket	65,635,000						1 paket	230,000,000	
3 2	5 6	2	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Ton	41,082,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Ton	60,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton							0 Ton		
3 2	5 6	2	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	5 Pelaku Usaha	24,552,500	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	5 Pelaku Usaha	170,000,000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	0 Pelaku Usaha							0 Pelaku Usaha		
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 1	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2 1	7 3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rata-rata omset Koperasi aktif (Rp Juta)	166.89 jut a	64,000,000						166.89 jut a	66,000,000	

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraa	n Maju Rencana	
	K	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	17 3	2		Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dibina dan diawasi	2023 55 KSP/U SP	64,000,000			Nasional	Daerah		55 KSP/U SP	66,000,000	·
2	17 3	2	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	55 Unit Usaha	64,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	55 Unit Usaha	66,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2	17 7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4.3 persen	200,000,000						4.3 persen	99,000,000	
2	17 7	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Peningkatan Usaha Kecil/Mikro Menjadi Wirausaha	0.25 perse n	200,000,000						0.25 perse n	99,000,000	
2	17 7	2	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokume n	200,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	1 Dokume n	99,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
					Jumlah fasilitasi pinjaman Dana Bergulir	20 KUM- LKM							20 KUM- LKM		
ľ					jumlah Monitoring dan Evaluasi KUM-LKM Nasabah Dana Bergulir	677 KUKM -LKM							677 KUKM -LKM		
2	17 8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Omset Usaha Mikro	5 persen	175,000,000						5 persen	174,000,000	
2	17 8	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UMKM yg meningkat permodalannya	5 persen	175,000,000						5 persen	174,000,000	

				- 1	Urusan/ Bidang Urusan/				Canaian K	inerja dan Kerangka Pen	lanaan			Prakiraa	ın Maju Rencana	
	1	Kode	•		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif		Sumber Dana		ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
					Kegiatan	Sub Regiatan	2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatii	Penanggung Jawab
2	17 8	2	2	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	175,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	60 Unit Usaha	174,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Ш	_							612,240,100						1	719,000,000	
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM REHABILITASI			292,978,572							522,160,000	
1	0 4				SOSIAL			292,918,512							522,160,000	
1	5 4	. 2	2		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			199,978,572							331,760,000	
1	5 4	. 2	2	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	330 Orang	75,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		330 Orang	81,750,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	5 4	. 2	?	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	28,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		70 Orang	75,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		
1	5 4	. 2	?	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		0 Orang	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
										Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah				
1	5 4	. 2	2		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

				Urusan/ Bidang Urusan/				Canaian K	Kinerja dan Kerangka Per	danaan			Prakiraa	ın Maju Rencana	
	Kod	е		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		ı		Kegiatan	Sub Regiatan	2023	Fagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	ragu indikatii	renanggung Jawab
1 6	4 2	2	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	270 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		270 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4	2	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	322 Orang	46,978,572				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		322 Orang	50,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	28,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		
1 6	4	2		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		12 Orang	34,650,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			93,000,000							190,400,000	
1 6	4 2	2	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang	22,000,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		16 Orang	42,550,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		
1 6	4 2	2	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		70 Orang	32,500,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4 2	2	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	23,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		30 Orang	75,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	4	2	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	38,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		5 Orang	40,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			190,000,000							377,010,000	

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraa	ın Maju Rencana	
	K	Code		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			_	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak	2 m 110Bmm1	2023	- uguu	2011101		Nasional	Daerah		- Lunger	- ugu	1 0111119841118 0 1111111
1	6 5	2		Terlantar			5,000,000							23,100,000	
1	6 5	2	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Orang	5,000,000				7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		32 Orang	23,100,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang							0 Orang		
1	6 5	2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			185,000,000							353,910,000	
1	6 5	2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	123282 Or ang	55,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		123282 Or ang	110,250,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40601 Kel uarga	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40601 Kel uarga	31,880,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40601 Kel uarga	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40601 Kel uarga	86,630,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 5	2	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		600 Orang	125,150,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			170,000,000							453,000,000	
1	6 6	2		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			125,000,000							298,000,000	
1	6 6	2	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		50 Orang	125,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		50 Orang	83,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2	3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Unit	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	6 6	2	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraa	n Maju Rencana	
	Ko	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan	Sub Regiatan	2023	Pagu muikatn	LOKASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	ragu indikatii	renanggung Jawab
1 6	5 6	2	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	30,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 6	5 6	2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			45,000,000							155,000,000	
1 6	5 6	2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampun g	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		4 Kampun g	115,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Kampun g							0 Kampun g		
1 6	5 6	2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		7. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah		40 Orang	40,000,000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2 1	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5,703,644,490							9,415,000,000	
2 1	13 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Jumlah desa mandiri	15 Nagari/ Desa	40,000,000						15 Nagari/ Desa	425,000,000	
					Persentase nagari yang dilaksanakan Penataan nagari	50 %							50 %		
					Persentase Peningkatan Status Nagari/Desa Mandiri	2 %							2 %		
2 1	13 2	2		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Nagari/Desa yang menyelenggarakan penataan desa	18 Nagari/ Desa	40,000,000						18 Nagari/ Desa	425,000,000	
2 1	13 2	2	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	1 Desa	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	41,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2 1	13 2	2	2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	62 Nagari/ Desa	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	62 Nagari/ Desa	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2 1	13 2	2	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	1 Desa	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	48,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

					Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian F	Kinerja dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakira	an Maju Rencana	
		Kod	le		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prio	ritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13	2	2	4	Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	2023 1 Desa	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Masional Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Daerah 1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	0	1 Desa	46,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	2	2	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	34 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Pelayanan Dasar Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Tinggi	0	34 Unit	245,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari yang Aktif	30 %	64,577,000						30 %	1,586,000,000	
						Tingkat Penurunan Sengketa Adat	13 %							13 %		
2	13	5	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang dibina	250 Lemba ga	64,577,000						250 Lemb aga	1,586,000,000	
2	13	5	2	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4 Dokume n	34,076,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Dokume n	201,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	4 Lembaga	325,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13	5	2	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Tarunaj, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Unit	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Unit	25,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Per	ıdanaan			Prakiraa	n Maju Rencana	
	K	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pric	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	13 5	2	5	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2023 1 Dokume n	0	202200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Nasional	9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Dokume	135,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	C		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	125,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	O		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	1 Laporan	45,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah nagari yang difasilitasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	62 Nagari/ Desa	C	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	62 Nagari/ Desa	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokume n	30,501,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat, dan Sosial Budaya	0	5 Dokume n	710,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	62 Keluarg a	C	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	62 Keluarg a	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
2	13 5	2	11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	62 Keluarg a	C	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait Lainnya	0	62 Keluarg a	10,000,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI
							757,555,572				-			3,363,170,000	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											

				Urusan/ Bidang Urusan/	İ			Canaian K	inerja dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraa	an Maju Rencana	
	Ko	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Pri	oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	1		Kegiatan	Sub Regiatan	2023	Pagu Indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	Fagu Indikatii	renanggung Jawab
2 7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
2 7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	25 %	727,247,550						25 %	938,000,000	
2 7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah RTKM(Rencana Tenaga Kerja Makro) yang disusun	24 orang	687,247,550						24 orang	660,000,000	
2 7	3	2	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	96 Orang	662,247,550		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	96 Orang	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	5 Lembaga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Lembaga	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	8 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Tinggi Tinggi	Kabupaten Sijunjung	8 Unit	100,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	24 orang	20,000,000						24 orang	80,000,000	
2 7	3	2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	4 Lembaga	20,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Tinggi Tinggi	Kabupaten Sijunjung	4 Lembaga	80,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah rekomendasi perizinan lembaga pelatihan	2 rekomen dasi	5,000,000						2 rekomen dasi	60,000,000	
2 7	3	2	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2 Perizinan	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	2 Perizina n	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	a	1 a	15,000,000						1 a	68,000,000	
2 7	3	2	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 perusa haan	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	15 perusa haan	68,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	3	2.1		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	aa	11 a	0						11 a	70,000,000	
2 7	3	2.1	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokume n	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	1 Dokume n	70,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	32 %	460,631,150						32 %	1,733,000,000	
2 7	4	2		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	a	1 we	314,520,350						1 we	1,210,000,000	
2 7	4	2	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	16 orang	65,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	16 orang	400,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

				Urusan/ Bidang Urusan/				Capaian K	inerja dan Kerangka Pe	ndanaan			Prakiraa	n Maju Rencana	
	Ko	ode		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Kegiatan	Sub Regiatan	2023	ragu indikatii	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah	Sasaran	Target	ragu indikatii	renanggung Jawab
2 7	7 4	2	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	350 orang	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	350 orang	400,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	120 orang	36,057,350		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	120 orang	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	3 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	3 Orang	10,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
									Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Tinggi Tinggi				
2 7	7 4	2	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 orang	83,463,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	kabupaten sijunjung	20 orang	200,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan	2 dokumen	0						2 dokume n	60,000,000	
2 7	7 4	2	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	1 Lembaga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Lembaga	20,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	1 Lembaga	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Aplikasi IPK yang dioperasionalkan	24 dokume n	131,110,800						24 dokum en	345,000,000	
2 7	7 4	2	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12 Dokum en	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	12 Dokum en	25,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 orang	31,110,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	50 orang	40,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	100,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	100 orang	280,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	ssss	1 sss	15,000,000						1 sss	118,000,000	
2 7	7 4	2	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Orang	58,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	5 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi Tinggi Tinggi	Kabupaten Sijunjung	5 Orang	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
2 7	7 4	2	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	3 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	3 Orang	30,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

				Urusan/ Bidang Urusan/	In dilatan Busanan / Wanistan /			Capaian F	inerja dan Kerangka Pen	danaan		W-1	Prakiraa	n Maju Rencana	Danie dat Danie
	Kod	de		Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		oritas	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			1	Kegiatan	oub negman	2023	r ugu mumum	Donusi	Dumber Dum	Nasional	Daerah	Dugurun	ruiget	rugu mumum	T Changgang Gawas
2 7	4	2.1		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	ee	1 dd	O						1 dd	0	
2 7	4	2.1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	o		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	0	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3 32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
3 32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibangun	30 %	137,410,000						30 %	810,000,000	
3 32	3	2		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	ddd	11 sss	137,410,000						11 sss	810,000,000	
3 32	3	2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari I (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	6 Laporan	60,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32	3	2	2	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	6 Dokume n	28,591,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	6 Dokume n	500,000,000	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32	3	2	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	19 Kepala Keluarga	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	19 Kepala Keluarga	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32	3	2	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	19 Kepala Keluarga	23,819,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	19 Kepala Keluarga	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
3 32	3	2	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	30 Orang	250,000,000	DINAS
3 32	3	2	7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	19 Kepala Keluarga	35,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		1. Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi	Kabupaten Sijunjung	19 Kepala Keluarga	0	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
							1,325,288,700							3,481,000,000	
	тот	`AL					2,770,084,372							7,638,170,000	

LAMPIRAN IV



DUKUNGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PROGRAM UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Dukungan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung Untuk Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

					Ca	paian Kinerja	dan Kerangka Pendanaa	n Tahun 2023				aju Rencana Tahun 2024	
NO	Program Unggulan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Prior	ritas	Kelompok Sasaran			 Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
	CUNTING												
	ervensi gizi spesifik yang ujukan untuk menjangkau	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS KESEHATAN
	nua sasaran prioritas	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	100 %	400,000,000						100 %	75,474,956	DINAS KESEHATAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	400,000,000						100 %	75,474,956	5 DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5679 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5679 Orang	34,298,136	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5421 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5421 Orang	20,588,410	DINAS KESEHATAN
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4957 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4957 Orang	20,588,410	
2 dit	ervensi gizi sensitif yang ujukan pada sasaran nting yakni Remaja putri	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
daı	n wanita usia subur, dan ak berusia 24-59 bulan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	76,63 %	o						76,63 %	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	100 %							100 %		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kepiatan	0 Orang	0		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	0 Orang	47,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Remaja, Ibu Hamil, Ibu Baduta yang mendapatkan KIE Stunting	36,52 %	10,000,000						36,52 %	65,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Kegiatan yang mendapatkan KIE	34 %	173,385,000						34 %	552,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	0	1 Laporan	65,000,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	ervensi gizi sensitif yang ujukan pada kelompok	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
um	uum yakni keluarga dan syarakat umum	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan sanitasi yang layak	90 %	405,225,000						90 %	C	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDJIP
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			405,225,000							(DINAS PERUMAHAN, KAWASAN DERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang tersusun dan data rumah sasaran pembangunan sanitasi layak	2 Dokumen	205,225,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		2 Dokumen	(DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sarana prasarana yang dibangun	80 Paket	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar		80 Paket	(DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					815,225,000							187,474,956	5
II PE PE	NERAPAN MERINTAHAN DAN MBANGUNAN MANUSIA												
1 di :	nyediakan sanitasi layak sekolah dan fasilitas	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	um lainnya serta ningkatan kesadaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			_		1					1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Program Unggulan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Ca	paian Kinerja	dan Kerangka Pendana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
NO			Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior	Kelompok Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				rarget	ragu muikatn	LURASI	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	ragu muikatn	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah Sekolag yang menerapkan teknologi Informasi SD	97 sekolah	0	ı					97 sekolah	1,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			0							1,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	0		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	3 Unit	600,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	0		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0	6 Unit	1,200,000,000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
***	PENERAPAN EKONOMI DAN				0						<u> </u>	1,800,000,000	
1	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDLIP
	padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA	52,80 Nilai	225,000,000						52,80 Nilai	300,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas Pemulihan Tutupan Lahan	0.3 Ha	225,000,000						0.3 Ha	300,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	225,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	8. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	0	1 Dokumen	300,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Meningkatkan pendapatan	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				Kemranan							DINAS PERTANIAN
	petani & nelayan serta	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Jumlah teknologi pasca panen yang diterapkan	3 ienis	850,000,000						3 jenis	850 000 000	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN
		SARANA PERTANIAN	pada komoditas pertanian Persentase kelompok tani pengguna sarana								-		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	pertanian yang terawasi dan terdampingi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana	65 Persen	500,000,000						65 Persen	500,000,000	DINAS PERTANIAN
		Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	3. Membangun Ketahanan Pangan	petani	5 Laporan	100,000,000	DINAS PERTANIAN
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	3. Membangun Ketahanan Pangan	petani	5 Laporan	400,000,000	DINAS PERTANIAN
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG hewan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang terkelola	4 komoditas	717,038,000						4 komoditas	717,038,000	DINAS PERTANIAN
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	-	3. Membangun Ketahanan Pangan	0	3 Dokumen		DINAS PERTANIAN
īv	PENERAPAN INFRASTRUKT	IR DAN KEWILAYAHAN		 	1,075,000,000		+	1	-		1	1,150,000,000	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	63 %	5,700,000,000						63 %	8,450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Indeks Kinerja Sistem Irigasi	63 %	5,700,000,000						63 %	8,450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

	Program Unggulan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
NO								Prioritas		Kelompok Sasaran			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa yang tersusun	20 Dokume n	500,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk - Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	20 Dokumen	450,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang rehabilitasi irigasi permukaan yang direhabilitasi	15000 Mete r	3,000,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk - Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	15000 Meter	5,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	10000 M	2,200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk - Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasai	Kabupaten Sijunjung	10000 M	3,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				N. HI ALIAN		I Maxanan Trasar					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Sarana Publik yang tersedia	50 %	1,528,268,000	4					50 %	7,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Utilitas dan Pemeliharaan Gedung yang dilaksanakan Tepat Waktu	65 %	1,528,268,000						65 %	7,700,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah penataan bangunan dan lingkungan di kawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah,kawasan panitia, kawasan sistem perkotaan nasional, kawasan strategis lainnya	2 Kawasan	1,528,268,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk - Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasar	Kabupaten Sijunjung	2 Kawasan	7,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dan jembatan	71,57 %	3,050,000,000	Kemanan		reavanan rasa			71,57 %	465,399,539,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten dengan kondisi baik Persentase Panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dengan kondisi baik	71.57 %	3,050,000,000						71.57 %	465,399,539,000	PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	12.7 KM	3,050,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk - Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dasai	Kabupaten Sijunjung	12.7 KM	465,399,539,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
**					10,278,268,000							481,549,539,000	
_ v	ENTERPRENEUR												DINAS PERDAGANGAN,
1	entrepreneur dan women	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											DINAS PERDAGANGAN , PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang ditetapkan RIPIK	95 persen	850,000,000						95 persen	401,000,000	DINAS PERDAGANGAN , PERINDUSTRIAN , KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Persentase produk yang bersertifikasi	51 persen							51 persen		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan industri yang dilatih dan teridentifikasi	1 paket	850,000,000						1 paket	401,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

	Program Unggulan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Ca	paian Kinerja	dan Kerangka Pendana	Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
NO				Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prior Nasional	itas Daerah	Sasaran	Target	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	20 Dokume n	25,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	o	20 Dokumen	30,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokumen	270,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	5 Dokumen	181,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Jumlah Lokasi Sentra yang dibangun dan direvitalisasi	1 sentra							1 sentra		DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0 Dokumen	555,000,000	Kab. Sijunjung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Keatif yang Didukung Infrastruktur, Transportasi, Industri, Perdagangan dan Perhotelan serta Informasi, Komunikasi dan Sektor Terkait	0	0 Dokumen	190,000,000	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							I sissess				DINAS PERTANIAN
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani dengan peringkat kelas	2 kelompok	1,782,006,100		1		1		2 kelompok	1,782,006.100	DINAS PERTANIAN DINAS PERTANIAN
			kelompok madya Persentase penyuluh pertanian yang memiliki	80 persen	, , , , ,		1				80 persen	, , , , ,	DINAS PERTANIAN
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	nilai evaluasi kinerja baik Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	80 Persen	1,782,006,100						80 Persen	1,782,006,100	DINAS PERTANIAN
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	kelompoknya Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Unit	1,367,305,700		Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		3. Membangun Ketahanan Pangan	Penyuluh kelompok rani	8 Unit		DINAS PERTANIAN
		-			2,632,006,100							2,183,006,100	
	JUMLAH				14,800,499,100							486,870,020,056	